PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019;

b. bahwa ditetapkannya kebijakan di tingkat pusat serta terjadinya bencana nonalam berupa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta perekonomian masyarakat Jawa Barat, sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dilakukan penyelarasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 23 dan angka 24 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
9. Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian di Daerah.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.
11. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Jawa Barat.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

13. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
20. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

24. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juni 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 8 Tahun 2021 Nomor 8

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 8 Tahun 2021

Tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 260, Pasal 263 ayat (4), Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Pasca diberlakukannya RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, terdapat dinamika perkembangan daerah maupun nasional dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang mempengaruhi perencanaan dalam RPJMD tersebut. Perkembangan dimaksud berupa terbitnya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mempengaruhi beberapa sektor perencanaan yang telah disusun.

Kemudian dampak bencana non alam berupa pandemik *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan membawa implikasi bagi perekonomian masyarakat Jawa Barat. Selain menimbulkan banyak korban jiwa dan juga mempengaruhi aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta membawa implikasi besar bagi perekonomian masyarakat Jawa Barat. Pemerintah Pusat kemudian berinisiatif menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Hal ini kemudian mempengaruhi *refocussing* anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya.

Dengan terjadinya perubahan yang mendasar tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2018-2023 untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dapat dicapai, dengan tetap menjaga keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta dapat menjalankan amanat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pada saat RPJMD Tahun 2018-2023 sedang diimplementasikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 7 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Adapun yang dimaksud dengan perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR xiii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-10
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-15
1.3.1 Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RPJMN I-15
1.3.2 Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD I-15
1.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RTRW Provinsi Jawa Barat I-16
1.3.4 Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat I-17
1.4 Maksud dan Tujuan I-17
1.5 Sistematika Penulisan I-18
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.2 Kondisi Topografi II-3
2.1.3 Kondisi Klimatologi II-5
2.1.4 Kondisi Geologi II-5
2.1.5 Kondisi Hidrologi II-11
2.1.6 Penggunaan Lahan II-13
2.1.7 Daya Dukung Lingkungan Hidup II-13
2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah II-20
2.1.9 Demografi II-22
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-24
2.2.1 Pertumbuhan PDRB II-24
2.2.2 PDRB per Kapita II-31
2.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) II-32
2.2.4 Indeks Williamson II-33
2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-34

2.2.6 Persentase Penduduk Miskin II-39
2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) II-41
2.2.8 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) II-44
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-45
2.3.1 Layanan Urusan Wajib II-45
2.3.2 Layanan Urusan Pilihan II-89
2.3.3 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ... II-101
2.3.4 Unsur Pengawasan II-112
2.3.5 Unsur Pemerintahan Umum II-114
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-114
2.4.1 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan II-115
2.4.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga II-115
2.4.3 Nilai Tukar Petani II-117
2.4.4 Angka Kriminalitas II-118
2.4.5 Tingkat Kesempatan Kerja II-119
2.4.6 Rasio Ketergantungan II-119
2.4.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) II-120
2.4.8 Indeks Reformasi Birokrasi II-121
2.4.9 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) II-122
2.4.10 Indeks Kerukunan Umat Beragama II-123
2.4.11 Indeks Risiko Bencana Daerah (IRBI) II-124
2.4.12 Indeks Kebahagiaan II-125
2.5 Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2013-2018 ..... II-166
2.6 Dampak Pandemi COVID-19 ..... II-174
2.7 Kondisi Kesehatan Masa Pandemi COVID-19 ..... II-185
2.8 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) II-187
2.9 Kerja Sama Daerah II-194
2.10 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) .. II-196
2.11 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-199
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-2
3.1.2 Neraca Daerah III-13
3.1.3 Kinerja Pendanaan Non APBD III-19
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-26
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-32
3.2.2 Proporsi Pembiayaan Daerah III-40

3.3 Kerangka Pendanaan III-45
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja III-48
3.3.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah III-60
3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-68
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1
4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat IV-5
4.1.2 Aspek Pelayanan Umum IV-13
4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah IV-47
4.2 Isu Strategis IV-47
4.2.1 Telaahan Isu Internasional IV-48
4.2.2 Telaahan Isu/Kebijakan Nasional IV-49
4.2.3 Telaahan Isu/Kebijakan Provinsi Jawa Barat IV-64
4.2.4 Telaahan RPJMD Daerah Lain IV-78
4.2.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD IV-81
4.2.6 Penetapan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat IV-98
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN V-1
5.1 Visi dan Misi V-1
5.2 Tujuan dan Sasaran V-5
5.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 ..... V-26
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif VI-1
6.2 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial .. VI-10
6.2.1 Keselarasan Penataan Ruang pada Perubahan RPJMD dengan RTRW VI-10
6.2.2 Keselarasan Penataan Ruang pada Perubahan RPJMD dengan RPJMN VI-49
6.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 ..... VI-66
6.4 Program Pembangunan Daerah VI-125
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan VII-1
7.2 Program Perangkat Daerah VII-5
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1
8.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat VIII-1

8.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota.....VIII-166
BAB IX PENUTUP.....IX-1
9.1 Pedoman Transisi IX-1
9.1.1 Masa Transisi Tahun 2020 .....IX-1
9.1.2 Masa Transisi Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) ...IX-2
9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Banyaknya Kecamatan, Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 .....II-2
Tabel 2.2 Potensi Bahan Tambang di Provinsi Jawa Barat II-7
Tabel 2.3 Ketersediaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat.....II-12
Tabel 2.4 Luas Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 .....II-13
Tabel 2.5 Indikator Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 .....II-22
Tabel 2.6 Nilai PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah) II-25
Tabel 2.7 PDRB ADHB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah) II-25
Tabel 2.8 Distribusi PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku II-26
Tabel 2.9 PDRB ADHK Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah) II-26
Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persen).....II-27
Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota II-29
Tabel 2.12 PDRB ADHB Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah) II-30
Tabel 2.13 PDRB ADHK Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah) II-31
Tabel 2.14 PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) II-32
Tabel 2.15 Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2015-2020 .....II-33
Tabel 2.16 IPM beserta Komponennya Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 .....II-35
Tabel 2.17 Indikator Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 .....II-40
Tabel 2.18 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 .....II-46
Tabel 2.19 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 .....II-46
Tabel 2.20 Indeks Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 .....II-48
Tabel 2.21 Indeks Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Jawa Barat.....II-49
Tabel 2.22 Jumlah Kabupaten/Kota Lokus *Stunting* Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2022.....II-53
Tabel 2.23 Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 .....II-58
Tabel 2.24 Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 .....II-58
Tabel 2.25 Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 .....II-59

Tabel 2.26 Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 .....II-60
Tabel 2.27 Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 .....II-61
Tabel 2.28 Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 .....II-61
Tabel 2.29 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 .....II-63
Tabel 2.30 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 .....II-64
Tabel 2.31 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018II-65
Tabel 2.32 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020II-66
Tabel 2.33 Indikator Kinerja Urusan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 .....II-67
Tabel 2.34 Indikator Kinerja Urusan Pangan Provinsi Jawa Barat.....II-69
Tabel 2.35 Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 .....II-71
Tabel 2.36 Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 .....II-72
Tabel 2.37 Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020 .....II-73
Tabel 2.38 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyakarat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 .....II-74
Tabel 2.39 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 .....II-75
Tabel 2.40 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 .....II-76
Tabel 2.41 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2015-2016 II-77
Tabel 2.42 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2017-2018 II-77
Tabel 2.43 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019-2020 II-78
Tabel 2.44 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 .....II-79
Tabel 2.45 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 .....II-79
Tabel 2.46 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 .....II-80
Tabel 2.47 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 .....II-80
Tabel 2.48 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 .....II-81
Tabel 2.49 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 .....II-82
Tabel 2.50 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 .....II-82
Tabel 2.51 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 .....II-83

Tabel 2.52 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-84
Tabel 2.53 Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ..... II-85
Tabel 2.54 Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-85
Tabel 2.55 Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-85
Tabel 2.56 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ..... II-86
Tabel 2.57 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-87
Tabel 2.58 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ..... II-88
Tabel 2.59 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-88
Tabel 2.60 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ..... II-89
Tabel 2.61 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-90
Tabel 2.62 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ..... II-92
Tabel 2.63 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-92
Tabel 2.64 Indikator Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ..... II-93
Tabel 2.65 Indikator Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-93
Tabel 2.66 Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ..... II-95
Tabel 2.67 Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-95
Tabel 2.68 Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ..... II-96
Tabel 2.69 Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-97
Tabel 2.70 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ..... II-98
Tabel 2.71 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-98
Tabel 2.72 Indikator Bidang Perindustrian Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ..... II-99
Tabel 2.73 Indikator Bidang Perindustrian Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-100
Tabel 2.74 Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ..... II-101
Tabel 2.75 Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017 ..... II-102

Tabel 2.76 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 ..... II-106
Tabel 2.77 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2023 ..... II-106
Tabel 2.78 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021 ..... II-107
Tabel 2.79 Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2006-2020 ..... II-109
Tabel 2.80 Indikator Kinerja Urusan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ..... II-110
Tabel 2.81 Indikator Kinerja Urusan Keuangan Provinsi Jawa Barat. II-110
Tabel 2.82 Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020..... II-111
Tabel 2.83 Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018 ..... II-111
Tabel 2.84 Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-111
Tabel 2.85 Indikator Kinerja Pengawasan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ..... II-112
Tabel 2.86 Indikator Kinerja Pengawasan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-113
Tabel 2.87 Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ..... II-114
Tabel 2.88 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020 ..... II-117
Tabel 2.89 Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi di Indonesia Tahun 2019 ..... II-124
Tabel 2.90 Perbandingan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan 2017 ..... II-125
Tabel 2.91 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Aspek Kesejahtraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020 ..... II-128
Tabel 2.92 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Aspek Pelayanan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 ..... II-130
Tabel 2.93 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Aspek Pelayanan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-150
Tabel 2.94 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ..... II-167
Tabel 2.95 Sebaran Debitur dan *Outstanding* Restrukturisasi di Provinsi Jawa Barat (Baju Debet Rp Miliar) II-182
Tabel 2.96 Gambaran Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum di Provinsi Jawa Barat II-186
Tabel 2.97 Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terhadap BUMD II-191

Tabel 2.98 Kontribusi Pajak dari PT Jaswita Jabar ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pusat Tahun 2020 (Dalam Jutaan Rupiah) II-194
Tabel 2.99 Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri, Antar Daerah, Daerah Dengan Pihak Ketiga di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020 ..... II-195
Tabel 2.100 Proyek Strategis dengan Skema KPBU II-197
Tabel 2.101 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 ..... II-200
Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019 ..... III-3
Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat III-8
Tabel 3.3 Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019 ..... III-10
Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019 ..... III-12
Tabel 3.5 Neraca Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019 ..... III-14
Tabel 3.6 Analisis Rasio Keuangan Provinsi Jawa Barat III-17
Tabel 3.7 Perkembangan Pendanaan APBN (Dana Dekonsentrasi, Urusan Bersama dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2020 ..... III-20
Tabel 3.8 Perkembangan Pendanaan Kegiatan TJSL/PKBL Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2020 ..... III-23
Tabel 3.9 Prospek Proyek KPBU III-25
Tabel 3.10 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019 ..... III-33
Tabel 3.11 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jawa Barat III-36
Tabel 3.12 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019 ..... III-38
Tabel 3.13 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019 ..... III-39
Tabel 3.14 Penutup Defisit Rill Anggaran Provinsi Jawa Barat III-41
Tabel 3.15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019 ..... III-42
Tabel 3.16 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2020 ..... III-43
Tabel 3.17 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2020 ..... III-56
Tabel 3.18 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021–2023 ..... III-58
Tabel 3.19 Persentase Rencana Pengembalian Pinjaman PEN Provinsi Jawa Barat III-64
Tabel 3.20 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... III-65
Tabel 3.21 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 ..... III-67
Tabel 3.22 Proyeksi SiLPA Tahun 2022 dan Tahun 2023 ..... III-68
Tabel 3.23 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) III-69

Tabel 3.24 Realisasi dan Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 .....III-69
Tabel 3.25 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiyaan yang Wajib dan Mengikat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023.....III-71
Tabel 3.26 Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2020 .....III-72
Tabel 3.27 Realisasi dan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2020 .....III-73
Tabel 3.28 Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021–2023 .....III-74
Tabel 4.1 Target dan Indikator TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Pilar Pembangunan.....IV-56
Tabel 4.2 Target Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RPJMN .IV-61
Tabel 4.3 Daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) di Provinsi Jawa Barat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 .....IV-61
Tabel 4.4 Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Jawa Barat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 .....IV-63
Tabel 4.5 Identifikasi RPJMD Daerah Lain IV-79
Tabel 4.6 Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 1 tentang Tanpa Kemiskinan IV-83
Tabel 4.7 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 2 tentang Tanpa Kelaparan.....IV-84
Tabel 4.8 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera IV-85
Tabel 4.9 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas IV-88
Tabel 4.10 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 6 tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak IV-89
Tabel 4.11 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.....IV-93
Tabel 4.12 Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 15 tentang Ekosistem Darat.....IV-95
Tabel 4.13 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Isu Strategis Tahun 2022-2023 .....IV-106
Tabel 5.1 Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 .....V-11
Tabel 5.2 Perbandingan Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Hasil Prediksi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023V-12
Tabel 5.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 V-14
Tabel 5.4 Persandingan Sasaran RPJMN dengan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat V-24
Tabel 5.5 Prioritas Pembangunan Daerah dan Arahan Program V-28
Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023.....VI-4
Tabel 6.2 Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jawa Barat VI-22
Tabel 6.3 Keterkaitan Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jawa Barat dengan Nasional VI-35

Tabel 6.4 Keselarasan Program Perangkat Daerah dalam Perubahan RPJMD dengan Program Prioritas dalam RPJMN VI-50
Tabel 6.5 Indikasi Prioritas Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2022 – 2023 .....VI-67
Tabel 6.6 Rencana Proyek Strategis Provinsi Tahun 2018–2023 .....VI-127
Tabel 6.7 Proyek Strategis yang Didanai Tahun Jamak VI-133
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dan 2020 .....VII-2
Tabel 7.2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 .....VII-4
Tabel 8.1 Proyeksi Indikator Makro Tahun 2021 - 2023 ..... VIII-2
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 ..... VIII-5
Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/*Impact* Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 ..... VIII-10
Tabel 8.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/*Impact* Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 VIII-33
Tabel 8.5 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/*Outcome* Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ..... VIII-53
Tabel 8.6 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/*Outcome* Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 ..... VIII-69
Tabel 8.7 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/*Outcome* Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 .....VIII-125
Tabel 8.8 Penetapan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 .....VIII-167
Tabel 8.9 Penetapan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2023 .....VIII-169
Tabel 8.10 Penetapan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 .....VIII-171
Tabel 8.11 Penetapan Angka Harapan Hidup Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 .....VIII-173
Tabel 8.12 Penetapan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 .....VIII-175
Tabel 8.13 Penetapan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota VIII-177
Tabel 8.14 Penetapan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 .....VIII-179

Tabel 8.15 Penetapan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 .....VIII-181

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ..... I-8
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat II-3
Gambar 2.2 Peta Topografi II-4
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng II-4
Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Tahunan II-5
Gambar 2.5 Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat II-8
Gambar 2.6 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam II-10
Gambar 2.7 Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah II-11
Gambar 2.8 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Jawa Barat ... II-12
Gambar 2.9 Peta Kebutuhan Air Bersih Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ..... II-15
Gambar 2.10 Peta Ketersediaan Air Bersih Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ..... II-16
Gambar 2.11 Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ..... II-16
Gambar 2.12 Peta Kebutuhan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ..... II-18
Gambar 2.13 Peta Ketersediaan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ..... II-19
Gambar 2.14 Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ..... II-19
Gambar 2.15 Bonus Demografi Provinsi Jawa Barat II-23
Gambar 2.16 Komposisi Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 . II-23
Gambar 2.17 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (Persen) II-24
Gambar 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat II-28
Gambar 2.19 Gini Ratio Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020 ..... II-33
Gambar 2.20 Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020 ..... II-34
Gambar 2.21 Tren Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhannya Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 ..... II-35
Gambar 2.22 Tren Harapan Lama Sekolah dan Pertumbuhannya Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 ..... II-37
Gambar 2.23 Tren Rata-Rata Lama Sekolah dan Pertumbuhannya Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 ..... II-37
Gambar 2.24 Tren Umur Harapan Hidup Saat Lahir dan Pertumbuhannya Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 ..... II-38
Gambar 2.25 Tren Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan dan Pertumbuhannya Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 ..... II-39
Gambar 2.26 Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 ..... II-40

Gambar 2.27 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-41
Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2018 - Agustus 2020 ..... II-42
Gambar 2.29 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 ..... II-42
Gambar 2.30 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-43
Gambar 2.31 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 ..... II-44
Gambar 2.32 Penurunan Prevelensi *Stunting* di Indonesia Tahun 2013 – 2019 ..... II-53
Gambar 2.33 Intervensi Pencegahan *Stunting* II-56
Gambar 2.34 Pengeluaran per Kapita Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 ..... II-115
Gambar 2.35 Rata-Rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 ..... II-118
Gambar 2.36 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 ..... II-119
Gambar 2.37 Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 ..... II-120
Gambar 2.38 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020 ..... II-121
Gambar 2.39 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat II-123
Gambar 2.40 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2020 (Persen) II-175
Gambar 2.41 Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha dan Pengeluaran Tahun 2019-2020 (Persen) II-176
Gambar 2.42 Pengeluaran Per Kapita Tahun 2018-2020 (Ribu Rupiah) II-177
Gambar 2.43 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2018-2020 ..... II-178
Gambar 2.44 Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Provinsi Jawa Barat 2018-2020 ..... II-179
Gambar 2.45 Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Provinsi Jawa Barat II-179
Gambar 2.46 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-180
Gambar 2.47 Kondisi Penyaluran KUR Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-182
Gambar 2.48 Persentase Pekerja/Buruh yang Dirumahkan dampak COVID-19 Per Sektor Usaha (Persen) II-183
Gambar 2.49 Persentase Pekerja/Buruh yang Di-PHK dampak COVID-19 ..... II-184
Gambar 3.1 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2015–2019 ..... III-4
Gambar 3.2 Rata–Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015–2019 ..... III-5

Gambar 3.3 Rata–Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2015–2019 .....III-6
Gambar 3.4 Rata–Rata Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2015–2019 .....III-6
Gambar 3.5 Proporsi Mitra PKBL dan TJSL di Provinsi Jawa Barat..III-21
Gambar 3.6 Jumlah Pendanaan dari Program PKBL dan TJSL di Jawa Barat III-22
Gambar 3.7 Perkembangan Pendanaan TJSL/PKBL BUMD di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2020.....III-24
Gambar 3.8 Perkembangan Pendanaan TJSL/PKBL Perusahaan Swasta di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2020 .....III-24
Gambar 3.9 Perkembangan Pendanaan TJSL/PKBL Berdasarkan Jenis Perusahaan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2020 .III-25
Gambar 3.10 Beberapa Peraturan yang diterbitkan sebagai Penjabaran dari.....III-45
Gambar 3.11 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ...III-46
Gambar 4.1 Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 .....IV-60
Gambar 6.1 Posisi RPJMD Tahun 2018-2023 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD VI-2
Gambar 6.2 Tema Pembangunan Lima Tahunan Provinsi Jawa Barat VI-10
Gambar 6.3 Peta Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Barat VI-13
Gambar 6.4 Peta Keterkaitan Fungsional Antar WP VI-14
Gambar 6.5 Kerangka Pikir Perumusan Arahan Kebijakan Kewilayahan VI-21
Gambar 6.6 Peta Arah Kebijakan Kewilayahan WP Bodebekpunjur..VI-28
Gambar 6.7 Peta Arah Kebijakan Kewilayahan WP Purwasuka VI-29
Gambar 6.8 Peta Arah Kebijakan Kewilayahan WP Ciayumajakuning VI-30
Gambar 6.9 Peta Arah Kebijakan Kewilayahan WP Priangan Timur dan Pangandaran VI-31
Gambar 6.10 Peta Arah Kebijakan Kewilayahan WP KK Cekungan Bandung.....VI-32
Gambar 6.11 Peta Arah Kebijakan Kewilayahan WP Sukabumi dan sekitarnya VI-33

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 268 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan daerah ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Oleh karena itu, pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa sesuai dengan kewenangannya, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa RPJMD disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Barat terpilih, yaitu Mochamad Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum yang dilantik pada tanggal 5 September 2018, telah melaksanakan kewajibannya menyusun Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019, pada tanggal 4 Maret 2019.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tersebut, telah terjadi dinamika pembangunan yang memengaruhi keberlangsungan implementasinya. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya beberapa kebijakan nasional baru maupun perkembangan keadaan daerah yang memengaruhi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD, karena memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Lebih lanjut, perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 juga memenuhi poin 3 (tiga) pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang memengaruhi substansi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian, telah ditetapkan lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); dan
7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581).

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terbit pula beberapa peraturan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Peraturan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaran pemerintah daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini terbit untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat

daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional, pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Kronologis terkait COVID-19 diawali oleh *World Health Organization* (WHO) yang menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD), pada tanggal 30 Januari 2020. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia diawali dengan ditemukannya kasus pertama yang terjadi di Kota Depok pada Tanggal 2 Maret 2020.

Kasus positif di Indonesia maupun Provinsi Jawa Barat memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) yang ditetapkan pada Tanggal 31 Maret 2020. *Refocusing* dan realokasi anggaran tersebut diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan

penanganan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Untuk itu, upaya penanganan pandemi COVID-19 dilakukan secara komprehensif melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. Hal tersebut diimplementasikan dengan menyesuaikan prioritas pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023 menjadi: 1) Reformasi sistem kesehatan daerah; 2) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi; 3) Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan; 4) Reformasi sistem perlindungan sosial; 5) Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan; 6) Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana; 7) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah; 8) Gerakan membangun desa; 9) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara; 10) Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 11) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Prioritas ini telah disesuaikan dengan amanat yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020, dan dirumuskan melalui serangkaian pembahasan dengan legislatif sejak bulan Januari – Februari 2021.

Memerhatikan perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Jawa Barat akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah (IKU pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). Selain itu, perlu ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak Triwulan-II 2020.

Substansi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum dan kondisi daerah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi

keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Dalam penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 diterapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 juga memerhatikan pemenuhan pendekatan substansi, yaitu:

a. Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan Pentahelix – ABCGM *(Academic, Business, Community, Government, and Media);*
b. Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dana masyarakat/umat, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan obligasi daerah, dan hibah;
c. Penerapan *Dynamic Government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. Pendekatan Spasial dan *a-Spasial* melalui 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP); dan
e. Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dilakukan sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, pembahasan dan penyepakatan bersama dengan DPRD tentang rancangan awal, evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri tentang rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD. Alur tahapan pelaksanaan perubahan RPJMD digambarkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Tahapan dan Tatacara Penyusunan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

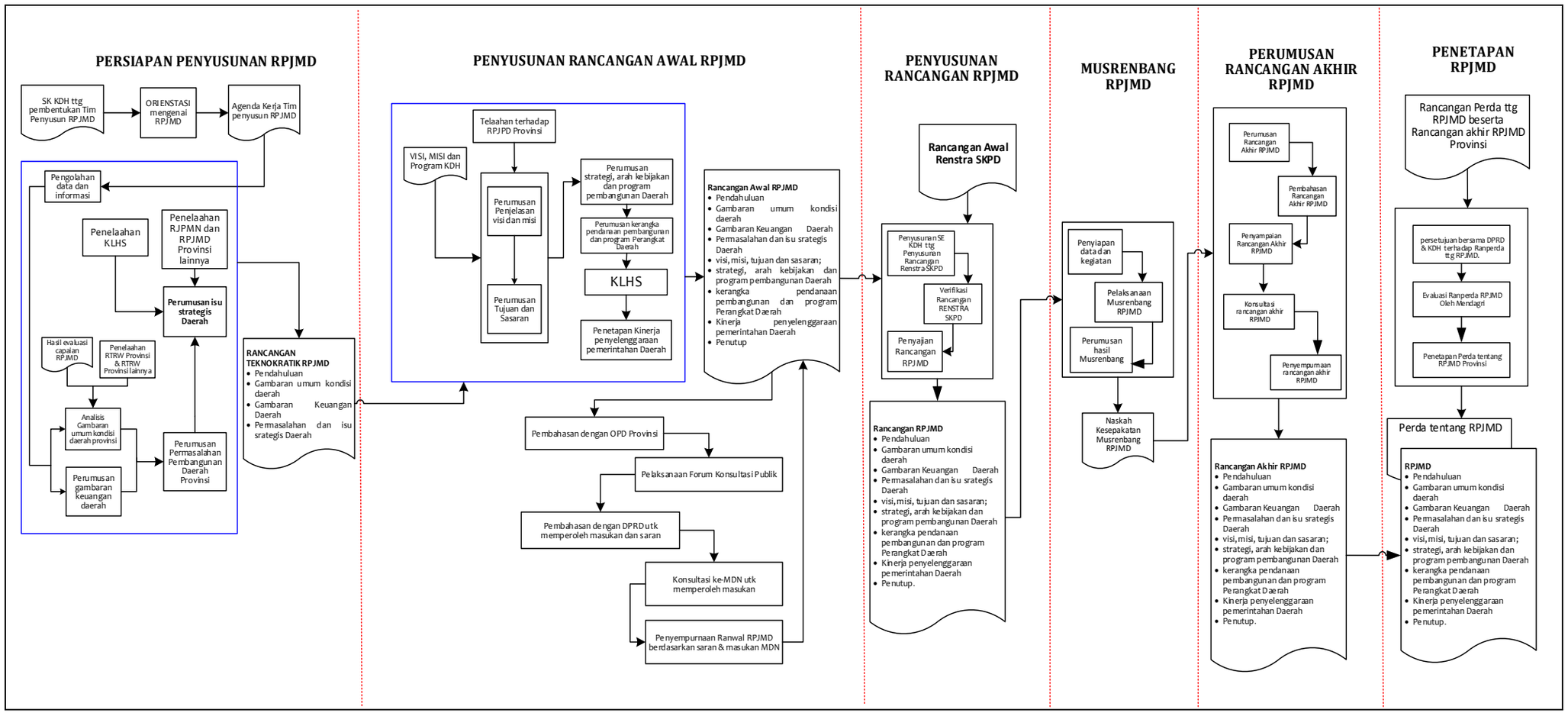

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Jawa Barat Tahun 2005-2025 tahapan keempat;
3. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
4. Pedoman dan arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Barat;
5. Pedoman penyusunan RPJMD kabupaten/kota se-Jawa Barat;
6. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
7. Instrumen pengukuran tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun; dan
8. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda.

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 akan menjadi dasar penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021, RKPD Tahun 2022 dan 2023, serta perubahannya. Selanjutnya, Perubahan RKPD Tahun 2021 akan menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023, serta perubahannya. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan perencanaan strategis di kabupaten/kota dan perencanaan operasional di perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196 Tahun 2016 Seri E);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236); dan
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.3.1 Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RPJMN

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 juga memerhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, pembangunan Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan.

1.3.2 Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan merupakan salah satu pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap III dan IV RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Perubahan Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Perubahan RPJMD ini serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun, berdasarkan Renstra PD.

1.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RTRW Provinsi Jawa Barat

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memerhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

1.3.4 Hubungan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Perubahan RPJMD memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dilakukan dengan memerhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Ayat (1); "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program", dan Ayat (2) yaitu KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah; dan
b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah memperbarui kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2023 yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD, penyesuaian terhadap RPJMN, percepatan penanganan pandemi COVID-19, serta dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan RPJMD dan RKPD kabupaten/kota se-Jawa Barat; dan
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika yang terdiri atas 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB I : **PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Perubahan RPJMD.

BAB II : **GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH**

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi hasil RPJMD periode lalu, pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's). dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB III : **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV : **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis daerah memerhatikan

isu internasional, nasional, dan regional Provinsi Jawa Barat.

BAB V : **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

BAB VI : **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang pada periode berkenaan. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.

BAB VII : **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Provinsi Jawa Barat, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target serta pendanaannya yang bersifat indikatif.

BAB VIII : **KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun, termasuk target tahun 2020 dan realisasinya. Selain itu, bab ini juga memuat arahan target indikator kinerja makro dari seluruh kabupaten/kota untuk pencapaian target indikator kinerja makro provinsi.

BAB IX : **PENUTUP**

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Jawa Barat terletak di Pulau Jawa memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara DKI Jakarta serta menghubungkan pusat kegiatan ekonomi di bagian lain Pulau Jawa yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Letak geografis Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan wilayah provinsi lain dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Banten
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia

Provinsi Jawa Barat terletak antara $5^0$50'– $7^0$50' Lintang Selatan dan $104^0$48' – $108^0$48' Bujur Timur dengan luas wilayah berdasarkan Peta Administrasi Jawa Barat Tahun 2020 mencapai 35.377,76 km^2 dengan garis pantai sepanjang 832,69 km (berdasarkan Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat). Berdasarkan kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil, luas wilayah laut Provinsi Jawa Barat 15.528,90 ha dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 19 (sembilan belas) pulau. Wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi atas dataran rendah dan dataran tinggi, dataran rendah umumnya berada di wilayah Utara dan dataran tinggi berada di wilayah Selatan.

Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terbagi atas 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota yang meliputi 18 (delapan belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota. Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah terluas di Provinsi Jawa Barat dengan persentase terhadap luas wilayah provinsi mencapai 11,72 persen, sedangkan Kota Cirebon merupakan wilayah terkecil dengan persentase terhadap luas wilayah provinsi sebesar 0,11 persen.

Tabel 2.1
Banyaknya Kecamatan, Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km^2)	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Bogor	2.710,62	40	19	416
2	Sukabumi	4.145,70	47	5	381
3	Cianjur	3.840,16	32	6	354
4	Bandung	1.767,96	31	10	270
5	Garut	3.074,07	42	21	421
6	Tasikmalaya	2.551,19	39	-	351
7	Ciamis	1.414,71	27	7	258
8	Kuningan	1.110,56	32	15	361
9	Cirebon	984,52	40	12	412
10	Majalengka	1.204,24	26	13	330
11	Sumedang	1.518,33	26	7	270
12	Indramayu	2.040,11	31	8	309
13	Subang	1.893,95	30	8	245
14	Purwakarta	825,74	17	9	183
15	Karawang	1.652,20	30	12	297
16	Bekasi	1.224,88	23	7	180
17	Bandung Barat	1.305,77	16	-	165
18	Pangandaran	1.010,00	10	-	93
19	Kota Bogor	118,50	6	68	-
20	Kota Sukabumi	48,25	7	33	-
21	Kota Bandung	167,67	30	151	-
22	Kota Cirebon	37,36	5	22	-
23	Kota Bekasi	206,61	12	56	-
24	Kota Depok	200,29	11	63	-
25	Kota Cimahi	39,27	3	15	-
26	Kota Tasikmalaya	171,61	10	69	-
27	Kota Banjar	113,49	4	9	16
	Jawa Barat	35.377,76	627	645	5.312

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat

Sumber: Hasil Olahan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

2.1.2 Kondisi Topografi

Topografi Jawa Barat terdiri atas wilayah pegunungan curam di selatan, wilayah lereng bukit yang landai di tengah, wilayah dataran luas di utara, dan wilayah aliran sungai. Topografi mengidentifikasi ketinggian wilayah dari permukaan laut. Wilayah pegunungan curam (9,5 persen) terletak di bagian selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 Meter di Atas Permukaan Laut (mdpl), dan wilayah lereng bukit yang landai (36,48 persen) terletak di bagian tengah dengan ketinggian 10-1.500 mdpl, serta wilayah daratan landai (54,02 persen) terletak di bagian utara dengan ketinggian 0-10 mdpl.

Topografi wilayah pesisir Utara terdiri atas dataran pantai dan rawa *alluvial* pantai (kemiringan lereng 0–5 persen), merupakan daerah yang bertopografi landai, perairan dangkal, memiliki substrat lumpur, berpasir dan berawa, pola arus yang dipengaruhi arus laut Jawa, serta bervegetasi *mangrove* dan terumbu karang. Topografi wilayah selatan merupakan pegunungan dan perbukitan terjal, perairan dalam dengan banyak batu karang dan pantai berpasir, pola arus laut yang kuat yang dipengaruhi keberadaan Samudera Indonesia, seperti tercantum dalam peta topografi di Gambar 2.2, dan Peta Kemiringan Lereng dalam Gambar 2.3.

Gambar 2.2
Peta Topografi

Sumber: Badan Informasi Geospasial, Tahun 2018

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng

Sumber: Badan Informasi Geospasial, Tahun 2018

2.1.3 Kondisi Klimatologi

Provinsi Jawa Barat termasuk daerah beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata antara 16°-34° celsius dan curah hujan yang beragam. Curah hujan berada pada rentang 1.000-4.000 mm per tahun (Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Pada musim kemarau curah hujan kurang dari 150 mm sedangkan pada musim hujan curah hujan lebih dari 150 mm.

Persebaran curah hujan terendah berada di wilayah Utara (Pantura, Bekasi sampai dengan Cirebon dan Kuningan) dan sebagian wilayah Tengah Jawa Barat (Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan Garut, dan sekitarnya); sedangkan sebaran curah hujan tinggi melingkupi wilayah Barat-Selatan (Bogor dan Sukabumi), wilayah Tengah (Purwakarta, Subang, Sumedang, dan sekitarnya), serta wilayah Timur-Selatan (Tasikmalaya, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran).

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Tahunan

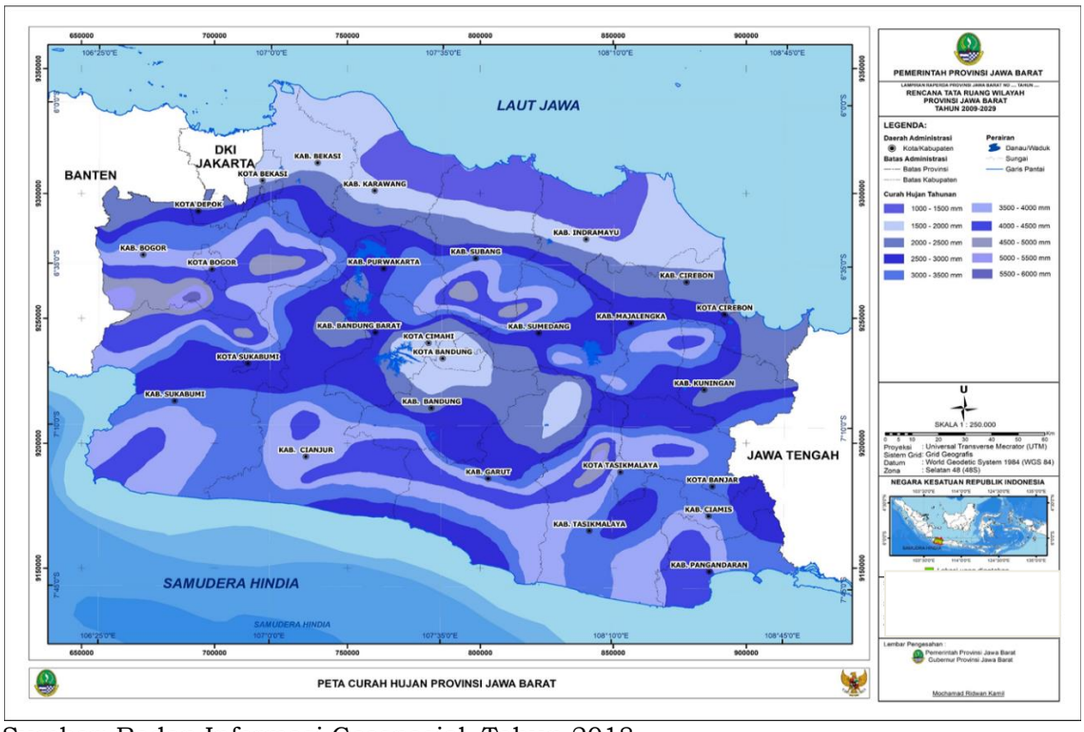

Sumber: Badan Informasi Geospasial, Tahun 2018

2.1.4 Kondisi Geologi

Kondisi Geologi ditinjau dari aspek struktur geologi, kondisi air tanah, dan kawasan rawan bencana. Struktur geologi wilayah Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh peristiwa tumbukan 2 (dua) lempeng yang

sudah berlangsung sejak jutaan tahun lalu. Akibat peristiwa geologi tektonik global ini, batuan sedimen berumur *Neogen* di Jawa Barat membentuk pola lipatan anjakan (*fold thrust belt*) berarah Barat-Timur. Beberapa struktur sesar regional di Jawa Barat yang memegang peranan penting, antara lain Sesar Cimandiri, Sesar Baribis, dan Sesar Lembang. Salah satu wilayah di Jawa Barat dengan keunikan geologi terdapat di daerah Ciletuh-Palabuhanratu Sukabumi, yang memiliki singkapan batuan campur aduk (*melange*) yang pembentukannya berasal dari hasil tumbukan 2 (dua) lempeng pada Zaman Kapur. Batuan *melange* Ciletuh-Palabuhanratu Sukabumi merupakan batuan tertua di Jawa yang tersingkap di permukaan.

Struktur geologi berupa sesar termasuk ke dalam Pola Sunda umumnya berkembang di Utara Jawa (Laut Jawa). Sesar ini termasuk kelompok sesar tua yang memotong batuan dasar (*basement*) dan merupakan pengontrol dari pembentukan cekungan *Paleogen* di Jawa Barat. Mekanisme pembentukan struktur geologi di Jawa Barat terjadi secara simultan di bawah pengaruh aktivitas tumbukan Lempeng Hindia-Australia dengan Lempeng Eurasia yang berlangsung sejak Zaman Kapur hingga sekarang. Posisi jalur tumbukan (*subduction zone*) dalam kurun waktu tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Aktivitas tumbukan lempeng yang terakhir menghasilkan jalur gunung api aktif di Poros Tengah Jawa Barat. Beberapa contoh gunung api aktif di Jawa Barat, antara lain Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Malabar, Gunung Tangkuban Parahu, dan Gunung Ciremai.

Jenis batuan yang terbentuk berupa batuan sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik ditemukan berbagai kandungan mineral baik logam (mineral logam) dan non-logam (mineral industri), serta bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomis sebagai potensi bahan galian tambang yang tersebar hampir di 18 (delapan belas) kabupaten se-Jawa Barat. Potensi bahan galian tambang meliputi bahan galian mineral logam, mineral industri, dan bahan galian konstruksi.

Tabel 2.2
Potensi Bahan Tambang di Provinsi Jawa Barat

No	Jenis Komoditas Tambang	Jumlah (Ton)	Sebaran
1	Andesit	10.124.796.963	Cianjur, Sukabumi, Bogor, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Subang, Tasikmalaya, Pangandaran, Garut, Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Sumedang, Majalengka, dan Pangandaran
2	Batu Gamping/Kapur	3.743.209.839	Sukabumi, Bogor, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Subang, Tasikmalaya, Pangandaran, Garut, Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Banjar, Majalengka, dan Pangandaran
3	Bentonit	329.604.075	Cianjur, Sukabumi, Bogor, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, dan Sumedang
4	Diatome	25.552	Bogor dan Kuningan
5	Feldspar	26.339.972	Cianjur, Sukabumi, Bogor, Tasikmalaya, Purwakarta, Pangandaran dan Kuningan
6	Fospat	524.160	Sukabumi, Bogor, Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis, dan Cirebon
7	Kaolin	5.777.576	Bogor, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Kuningan, dan Majalengka
8	Marmer	172.276.288	Sukabumi, Tasikmalaya, Bandung, dan Bandung Barat
9	Pasir+Tanah Urug	275.153.365.028	Cianjur, Sukabumi, Bogor, Purwakarta, Bekasi, Subang, Tasikmalaya, Pangandaran, Garut, Ciamis, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Banjar, Sumedang, dan Majalengka
10	Sirtu	1.601.991.429	Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Subang, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Banjar, dan Majalengka
11	Pasir Kwarsa	3.257.579.879	Sukabumi, Bogor, Karawang, Bekasi, Bandung, dan Bandung Barat,
12	Tanah Liat	123.678.899.924	Cianjur, Sukabumi, Bogor, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Subang, Tasikmalaya, Pangandaran, Garut, Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Banjar, Sumedang, dan Majalengka
13	Trass	2.454.950.551	Cianjur, Sukabumi, Bogor, Purwakarta, Subang, Pangandaran, Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Banjar, Sumedang, dan Majalengka
14	Zeolit	127.548.000	Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran
15	Pasir Besi	24.306	Tasikmalaya
16	Batu ½ Permata	1.000.000	Garut
17	Galena	22.271	Cianjur dan Ciamis
18	Emas	9.342.173	Bogor, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Garut
19	Perak	57.736.916	Bogor, Tasikmalaya, dan Garut
20	Mangan	500.000	Sukabumi, Tasikmalaya, dan Garut
21	Onyx	50.606.950	Kuningan
22	Gypsum	6.451.205	Subang, Tasikmalaya, dan Banjar
23	Pasir Besi	135.822.533	Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Pangandaran

No	Jenis Komoditas Tambang	Jumlah (Ton)	Sebaran
24	Tembaga	210	Tasikmalaya
25	Belerang	20.360.000	Garut dan Banjar
26	Bijih Besi	51.346.000	Tasikmalaya, Garut, dan Pangandaran
27	Kalsit	2.701.600	Ciamis, Kuningan, dan Pangandaran
28	Batubara	9.450.800	Sukabumi, Garut, Ciamis, dan Banjar
29	Seng	70.423	Purwakarta
30	Batu Ares	171.068	Sukabumi
31	Obsidan/Perlit	5.640.000	Sukabumi dan Garut

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018

Secara hidrogeologi, wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki 27 (dua puluh tujuh) Cekungan Air Tanah (CAT) yang tersebar ke seluruh wilayah yang mencakup 8 (delapan) CAT lokal, 15 (lima belas) CAT lintas kabupaten/kota, dan 4 (empat) CAT lintas provinsi.

Gambar 2.5
Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat

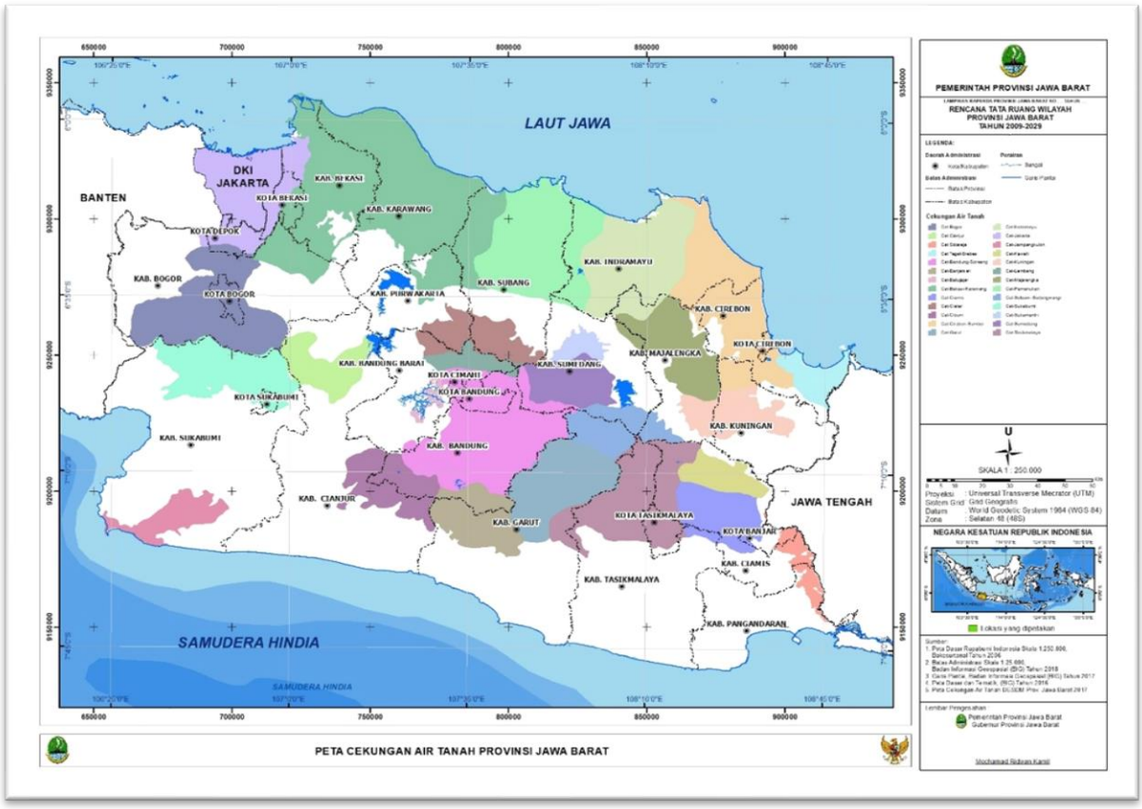

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018

Struktur geologi yang bersifat kompleks menjadikan sebagian wilayah Jawa Barat memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dari ancaman bencana alam. Jawa Barat secara geologi terletak di sebelah Utara lajur pertemuan 2 (dua) lempeng aktif yang saling bertumbukan. Kedua lempeng tektonik yang saling bertumbukan tersebut adalah Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng

Eropa-Asia. Sumber-sumber potensi penyebab bencana alam di Jawa Barat yang perlu diwaspadai adalah 7 (tujuh) gunung api aktif, 5 (lima) sesar aktif serta aktivitas lempeng tektonik di Selatan Jawa Barat.

Wilayah Jawa Barat terletak pada jalur *Circum Pacific* dan mediteran, sehingga sebagian besar wilayahnya termasuk daerah labil yang ditandai dengan banyaknya gunung berapi yang masih aktif sehingga memiliki resiko gempa bumi. Bahaya lingkungan beraspek geologi yang sering terjadi di Jawa Barat antara lain masalah kegempaan, letusan gunung api dan aliran lahar, longsor (gerakan tanah), perubahan garis pantai dan erosi tebing sungai. Sumber penyebab bencana lainnya adalah tingginya intensitas curah hujan yang memicu gerakan tanah terutama di wilayah Jawa Barat bagian Selatan, serta banjir di wilayah Utara Jawa Barat dan Cekungan Bandung. Selain itu, wilayah Selatan Jawa Barat secara geologis memiliki kerentanan terhadap bencana Tsunami. Kawasan rawan bencana banjir di Jawa Barat terkonsentrasi di Pesisir Pantai Utara Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Cirebon (DAS Cimanuk dan DAS Cipunagara), Cekungan Bandung (DAS Citarum), dan Kabupaten Ciamis (DAS Citanduy).

Kawasan rawan bencana alam di Jawa Barat tercantum pada Gambar 2.6, termasuk informasi terkait kawasan rawan bencana gunung api yang terdiri dari:

1. Kategori I: berpotensi terhadap aliran lahar hujan;
2. Kategori II: berpotensi terlanda aliran awan panas, lava, dan lahar hujan; dan
3. Kategori III: yang selalu terancam aliran awan panas, lava, dan gas beracun.

Gunung-gunung di Jawa Barat yang tergolong pada gunung api tipe A adalah Gunung Ciremai (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon), Gunung Galunggung (Kabupaten dan Kota Tasikmalaya), Gunung Guntur (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut), Gunung Papandayan (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut). Adapun Gunung Talagabodas, Gunung Wayang Windu, Gunung Gede (Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi), Gunung Patuha (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur), dan Gunung Salak (Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten Sukabumi) tergolong pada tipe B.

Gambar 2.6
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam

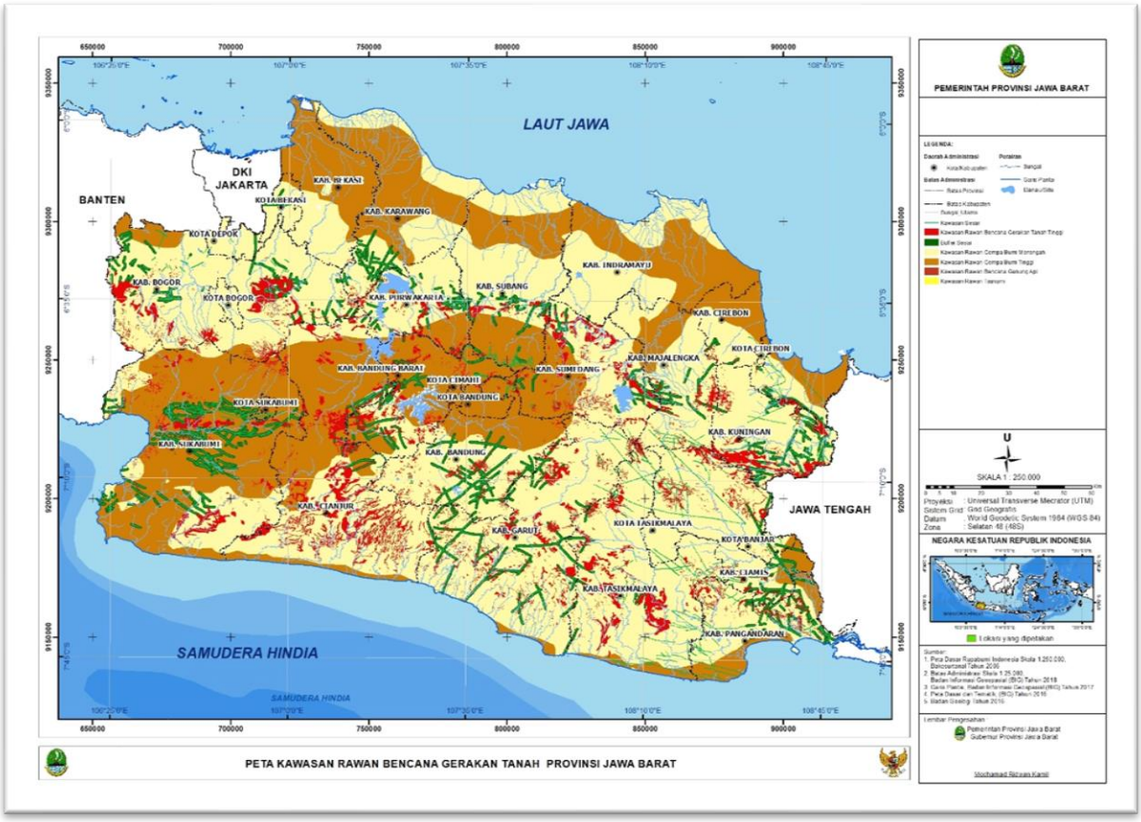

Sumber: Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG), Tahun 2016

Rawan bencana tsunami, terutama terjadi di Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi), Pangandaran (Kabupaten Pangandaran), dan Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan peta kawasan rawan bencana tsunami, terdapat 3 (tiga) tingkat kerawanan yakni rendah (26,5 persen), menengah (34,5 persen), dan tinggi (40 persen). Tsunami umumnya disebabkan oleh gempa bumi dasar laut.

Rawan pergerakan tanah di Jawa Barat terbagi ke dalam 4 (empat) kategori zona, yaitu:

1. Sangat Rendah (25,9 persen)

   Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai.

2. Rendah (25,5 persen)

   Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah, umumnya pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika

tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali.

3. Menengah (40,4 persen)

   Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah, pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan.

4. Tinggi (7,3 persen)

   Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah, pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat curah hujan yang tinggi dan erosi kuat.

Gambar 2.7
Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah

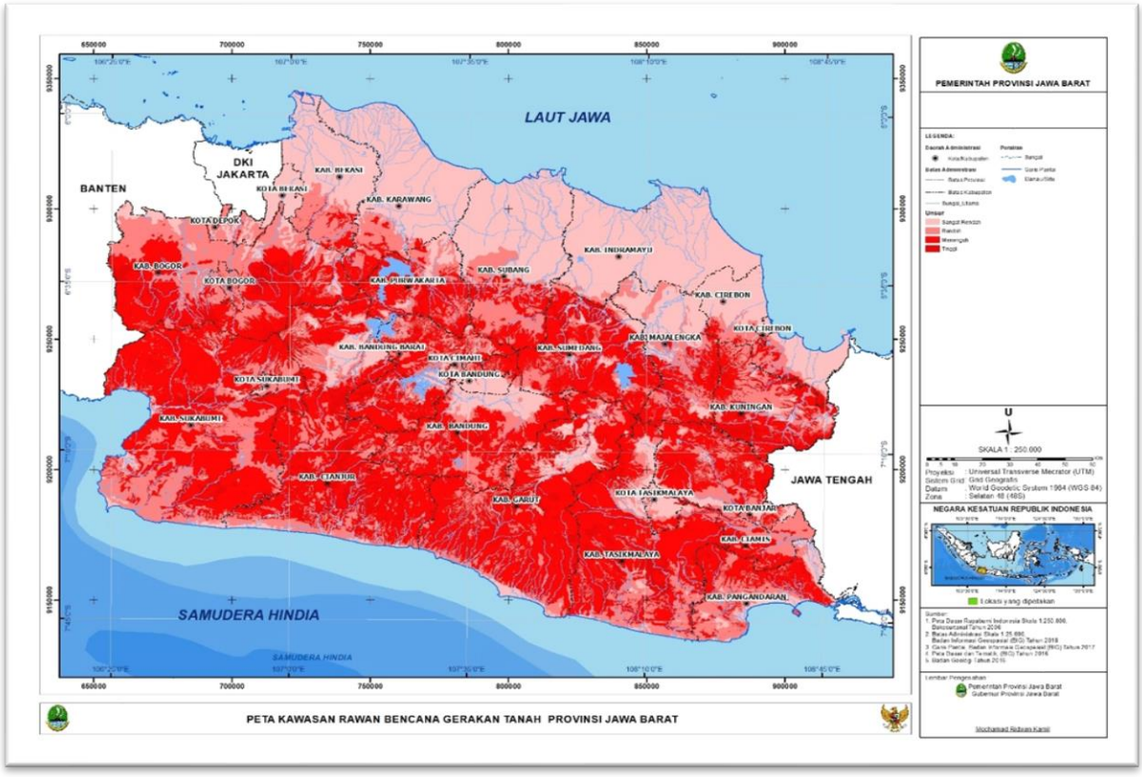

Sumber: Badan Geologi, Tahun 2016

2.1.5 Kondisi Hidrologi

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya air permukaan yang cukup besar yang berasal dari sungai induk dan anak sungainya. Potensi sumber daya air per tahun rata-rata 48.023,78 juta m^3. Provinsi Jawa Barat memiliki 6 (enam) Wilayah Sungai (WS) yang terdiri atas WS

Ciliwung-Cisadane, WS Citarum, WS Cimanuk-Cisanggarung, WS Citanduy, WS Cisadea-Cibareno, dan WS Ciwulan-Cilaki. Provinsi Jawa Barat memiliki 41 (empat puluh satu) Daerah Aliran Sungai (DAS), terdiri atas 21 (dua puluh satu) DAS bermuara ke Laut Jawa dan 20 (dua puluh) DAS bermuara ke Samudera Hindia. Secara hidrogeologi, wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki 27 (dua puluh tujuh) Cekungan Air Tanah (CAT) yang tersebar ke seluruh wilayah yang mencakup 8 (delapan) CAT lokal, 15 (lima belas) CAT lintas kabupaten/kota, dan 4 (empat) CAT lintas provinsi.

Tabel 2.3
Ketersediaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat

No	Wilayah Sungai	Luas (km^2)	Potensi SDA (Juta m^3/thn)	Ketersediaan Air Permukaan (Juta m^3/thn)		
				Q90	Q80	Q50
1	Ciliwung	3675.40	5538.62	9990.35	9011.32	7802.52
2	Cisadea-Cibareno	6693.60	10987.47	7586.62	5789.65	5618.55
3	Citarum	11436.90	12924.43	10724.80	7606.45	7243.98
4	Cimanuk-Cisanggarung	7157.50	7878.07	7111.68	5854.20	5851.24
5	Citanduy	2682.00	3542.59	3079.13	2613.87	2482.36
6	Ciwulan-Cilaki	5415.00	7152.60	5280.45	6220.33	5014.76
Total		37060.40	48023.78	43773.02	37095.82	34013.40

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018

Gambar 2.8
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Jawa Barat

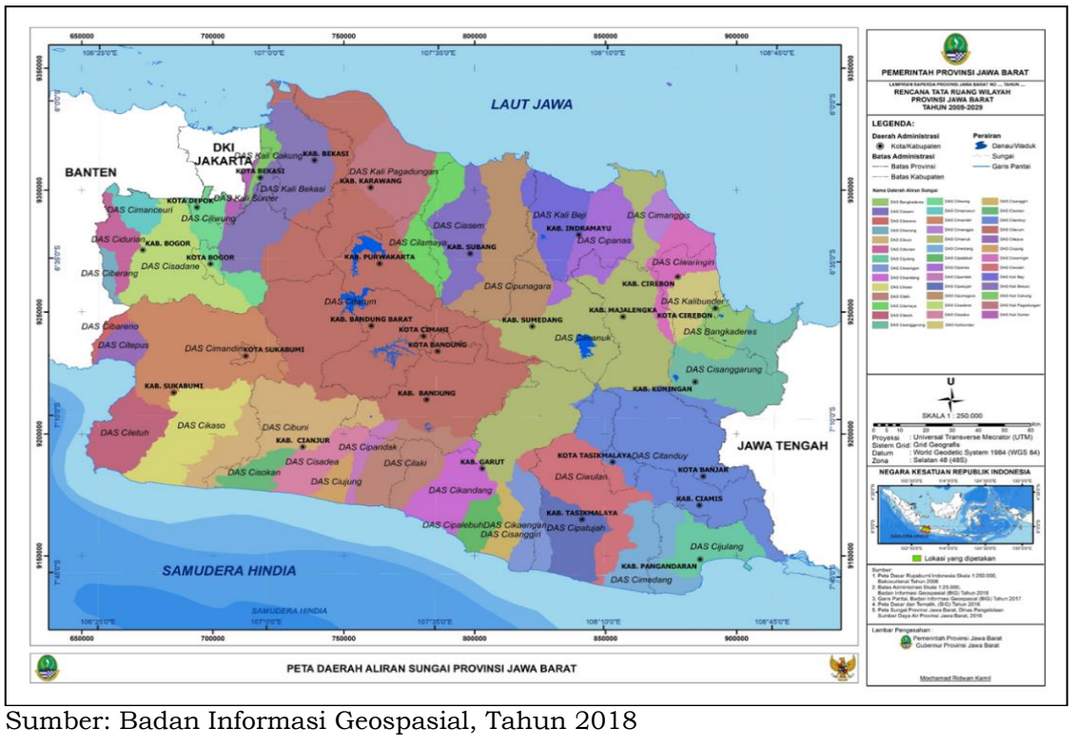

Sumber: Badan Informasi Geospasial, Tahun 2018

2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Barat disajikan dalam informasi tutupan lahan yang dihasilkan dari interpretasi Peta Citra Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2018. Secara urutan waktu, tutupan lahan mengalami perubahan sebagian besar menjadi wilayah terbangun. Perubahan tutupan lahan sangat dipengaruhi dari aktivitas pemanfaatan lahan yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah. Pertambahan jumlah penduduk yang berimplikasi pada kebutuhan ruang untuk Permukiman, dan kebutuhan ruang untuk pembangunan infrastruktur menyebabkan perubahan tutupan lahan tidak dapat dihindari. Berdasarkan data Citra Satelit tahun 2018, penggunaan lahan wilayah Provinsi Jawa Barat teridentifikasi dari klasifikasi tutupan lahan, dimana penggunaan lahan dibedakan sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Luas Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018

No	Klasifikasi Tutupan Lahan	Tahun (Ha)	
		2014	2018
1	Hutan (Primer/ Sekunder)	703.504,96	695.658,9
2	Kebun Perkebunan/Kebun Campuran)	594.612,79	553.380,6
3	Areal Terbangun (Permukiman/Industri/ Gedung)	456.564,75	483.668,0
4	Sawah (Irigasi/ Tadah Hujan)	1.161.468,86	1.075.704,2
5	Ladang/ Tegalan	446.737,41	532.309,8
6	Rawa/ Tambak/ Empang	77.071,22	78.100,7
7	Belukar/Semak/ Rumput/ Tanah Berbatu	275.457,92	240,511.4
8	Sungai/ Waduk/ Situ/ Badan Air	42.924,97	47.494,5
9	Tanah Kosong	2.033,9	1.941,0

Sumber: Perhitungan GIS, Bappeda Jawa Barat Tahun 2014-2018
Data: *Landcover* Tahun 2014 (Pemuktahiran *Landcover* 2010 hasil interpretasi SPOT 6 dan Citra Sekunder 2011-2014) Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Tahun 2018

2.1.7 Daya Dukung Lingkungan Hidup

Berdasarkan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (2020), Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan makhluk hidup di suatu wilayah. Daya dukung lingkungan ditentukan oleh berbagai faktor, di antaranya ketersediaan bahan baku, ketersediaan energi, akumulasi limbah dari produk dan cara pembuangannya, serta interaksi antar mahluk hidup yang ada.

Untuk memperoleh status DDLH, digunakan pendekatan kuantitatif dengan menghitung selisih ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya, untuk kemudian dibandingkan dengan ambang batas pada masing-masing parameter jasa lingkungan sebagai batas tingkatan yang masih dapat ditoleransi. Pada KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat, jasa lingkungan yang dipilih sebagai parameter untuk kuantifikasi DDLH adalah penyediaan air bersih dan pangan.

1) Daya Dukung Air

Kebutuhan air bersih untuk domestik dan lahan produksi (tutupan lahan sawah, perkebunan, ladang, tambak, industri) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 mencapai 42 miliar m3/tahun. Wilayah dengan kebutuhan air tinggi sebagian besar tersebar di bagian Utara Provinsi Jawa Barat yang didominasi oleh lahan sawah dan tambak seperti halnya Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon. Selain itu, tersebar juga di wilayah perkotaan dan sekitarnya yang didominasi oleh permukiman dan bangunan seperti halnya Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kota Tasikmalaya. Wilayah dengan kebutuhan air tinggi juga tersebar pada beberapa wilayah kabupaten yang didominasi oleh lahan sawah seperti halnya Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Garut.

Kebutuhan air bersih Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.9
Peta Kebutuhan Air Bersih Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

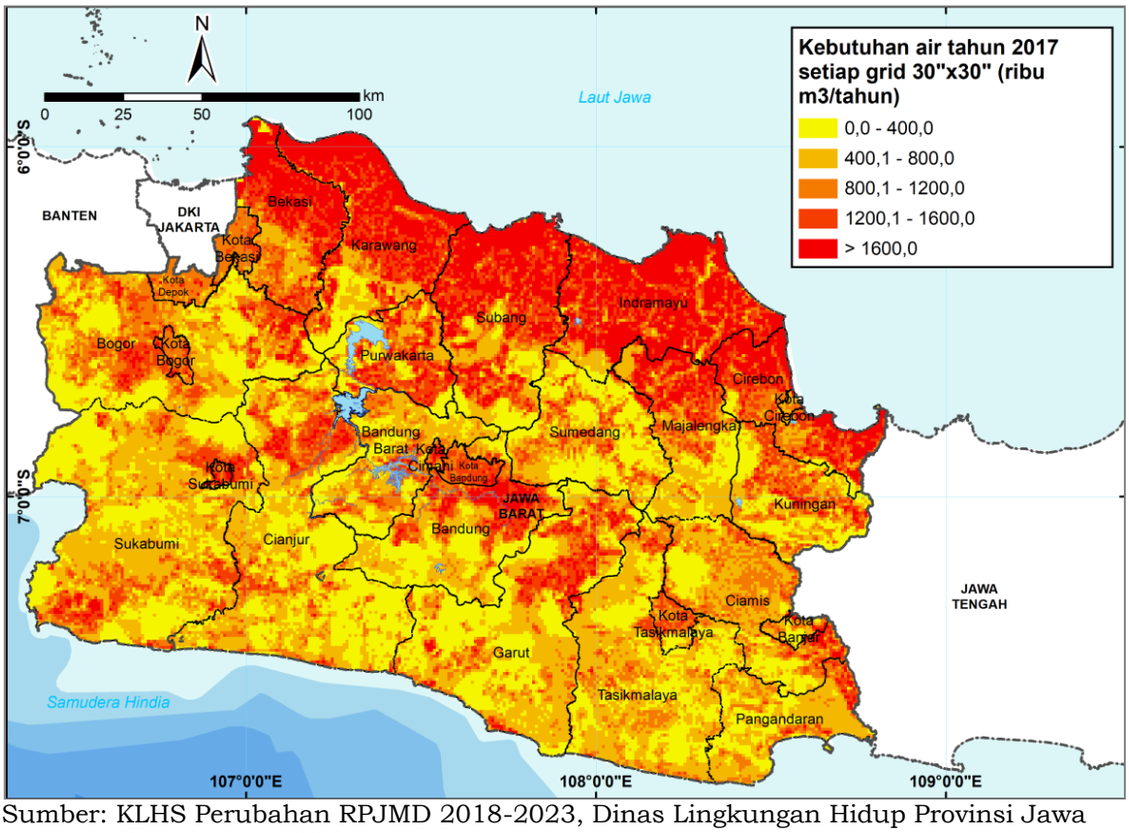

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Adapun wilayah dengan ketersediaan air tinggi sebagian besar terdapat di *Water District* (WD) Cisanggarung, WD Cimanuk Hulu-Bd Rentang, WD Cisadane Hilir-Bd Pasarbaru, dan WD Cisadea-Cibareno. Wilayah keempat WD ini meliputi sebagian dari Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor. Sementara ketersediaan air rendah sebagian besar terdapat di WD Citarum Timur, WD Cisadane Hulu-Bd Pasarbaru, dan WD Ciliwung. Wilayah ketiga WD tersebut meliputi sebagian dari Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Kebutuhan air bersih Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.10
Peta Ketersediaan Air Bersih Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

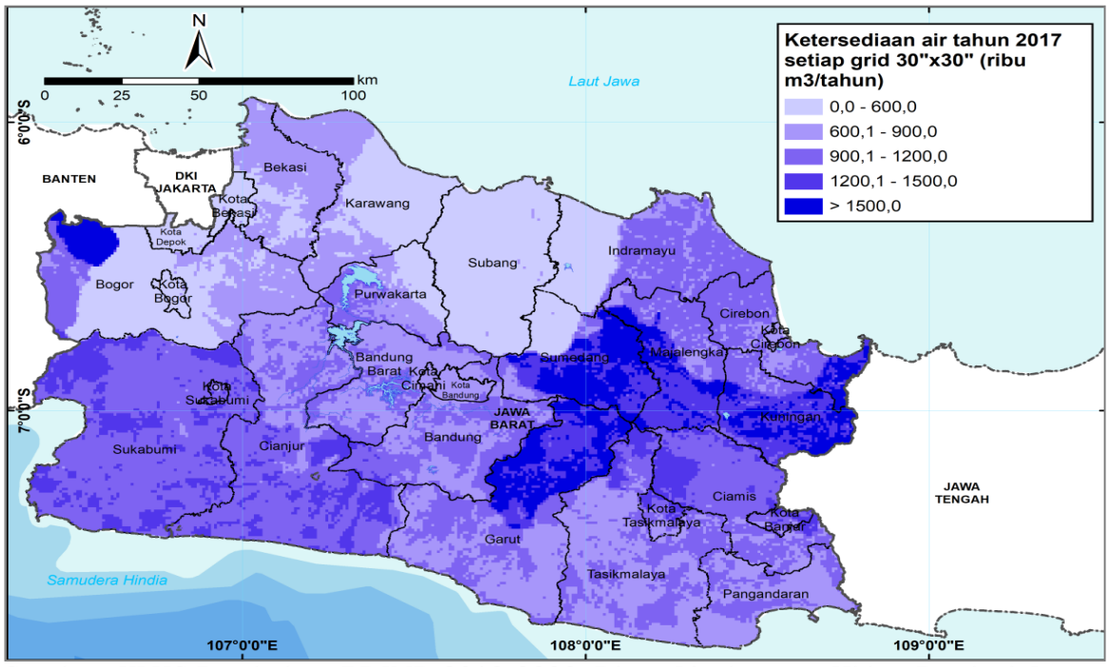

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Berdasarkan selisih ketersediaan air dan kebutuhan air dibandingkan dengan ambang batas penduduk yang terlayani, diketahui status daya dukung air Provinsi Jawa Barat sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.11
Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

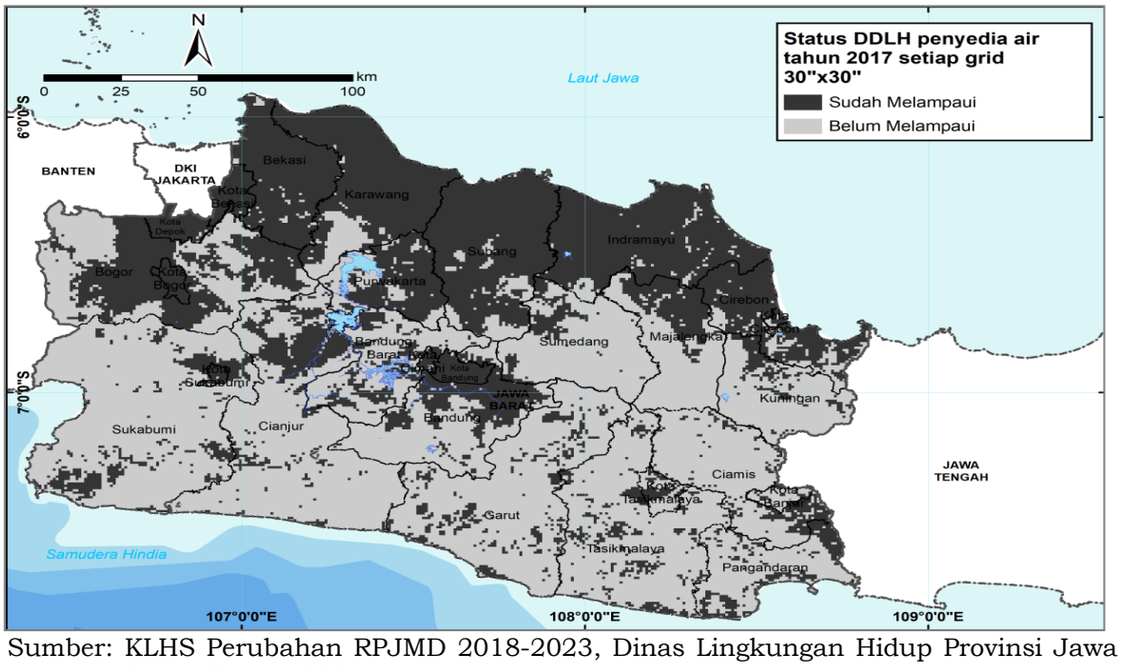

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Daya dukung air terlampaui sebagian besar tersebar di daerah bagian Utara Provinsi Jawa Barat yang memiliki kebutuhan air yang tinggi untuk lahan sawah dan tambak, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Selain itu kebutuhan air tinggi untuk domestik tersebar di wilayah perkotaan, meliputi Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cianjur.

Persentase wilayah dengan daya dukung air yang telah terlampaui di Provinsi Jawa Barat mencapai 40,2 persen. Wilayah tersebut bukan berarti mengalami kekeringan, melainkan harus bergantung pada wilayah lainnya yang memiliki daya dukung air belum melampaui ambang batas. Untuk itu, wilayah-wilayah dengan daya dukung air belum melampaui batas perlu dipelihara dengan baik agar kelangsungan jasa lingkungan di wilayah tersebut tetap terjaga dan dapat mendukung penyediaan air di wilayah sekitarnya.

2) Daya Dukung Pangan

Selain daya dukung air, daya dukung pangan merupakan kebutuhan dasar yang perlu diperhatikan untuk keberlangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Informasi mengenai status daya dukung pangan dan persebarannya dapat membantu memastikan pengelolaan lingkungan dapat mendukung tersedianya sumber daya pangan bagi penduduk di suatu wilayah.

Kebutuhan pangan Provinsi Jawa Barat diketahui melalui hasil pemodelan yang didasarkan pada Angka Kecukupan Energi (AKE) per satu orang, yaitu 2.150 kkal/hari. Kebutuhan pangan terbesar terkonsentrasi pada wilayah-wilayah padat penduduk, yang umumnya merupakan daerah kota dan perkotaan. Kebutuhan pangan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2.12
Peta Kebutuhan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

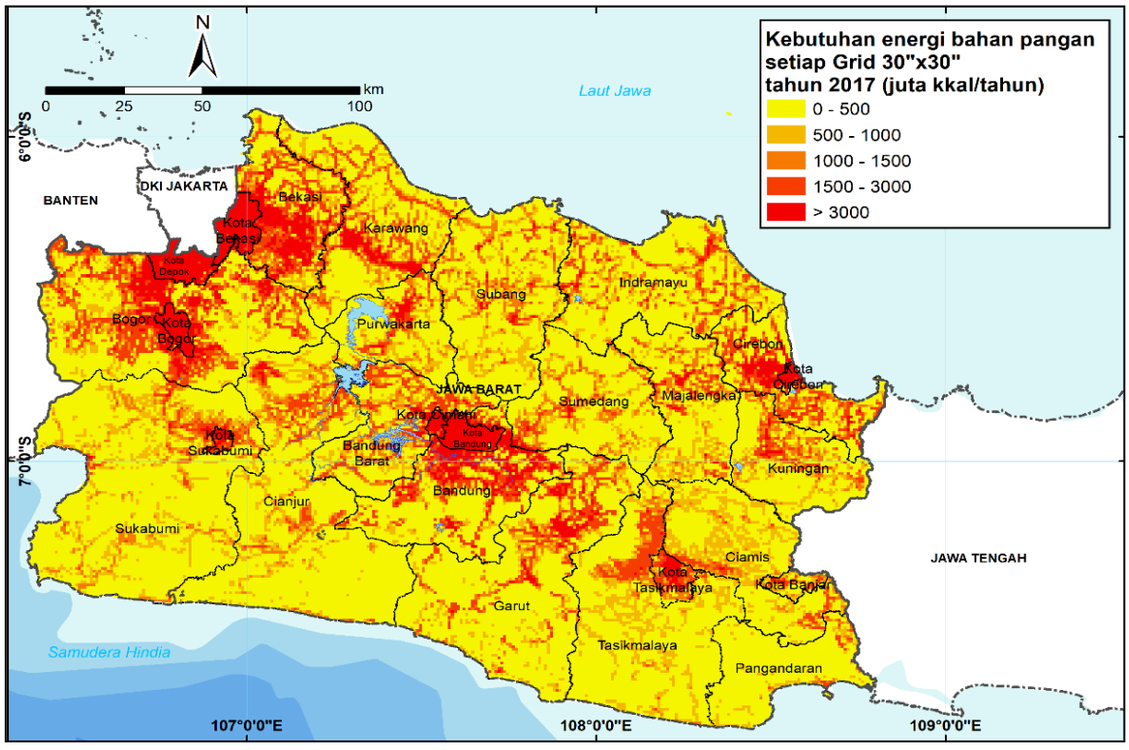

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Adapun model distribusi ketersediaan pangan Provinsi Jawa Barat dalam satuan energi bahan pangan (kkal) diperoleh dari data produksi pangan per kabupaten/kota tahun 2017, mencakup tanaman pertanian, palawija, hortikultura, serta produksi peternakan dan perikanan.

Ketersediaan energi bahan pangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya terdapat di Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Tasikmalaya. Ketujuh kabupaten tersebut memiliki jumlah produksi pangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya dengan ketersediaan energi bahan pangan di atas 4 triliun kkal/tahun. Selain itu, dilihat dari pola tutupan lahannya, wilayah-wilayah tersebut memiliki lahan produksi pangan yang cukup mendominasi.

Ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.13
Peta Ketersediaan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

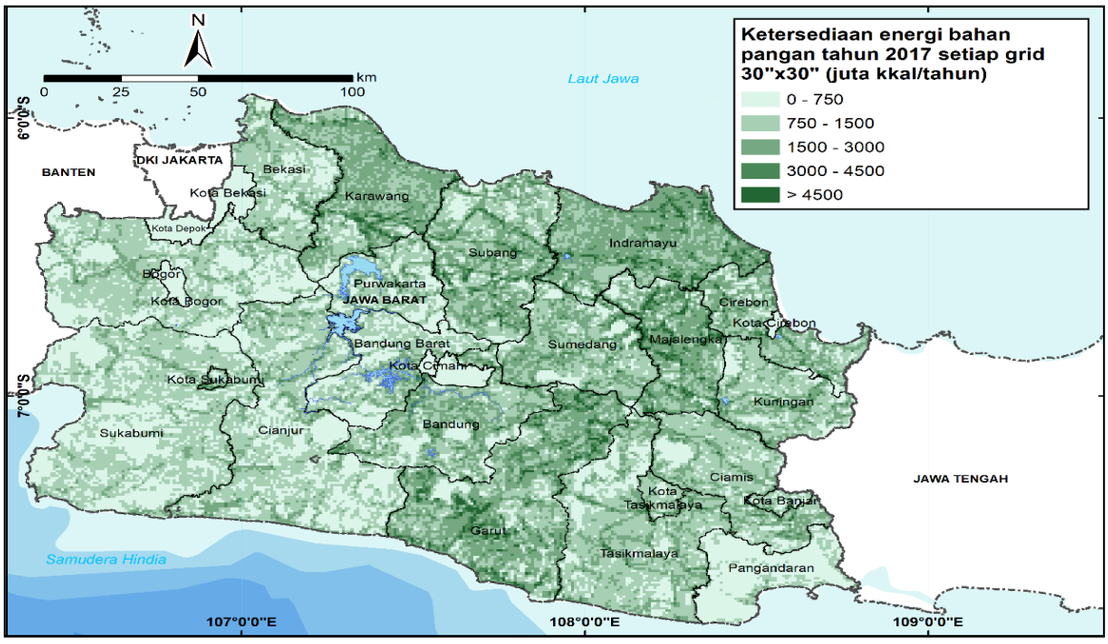

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Berdasarkan selisih ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan dibandingkan dengan ambang batas penduduk yang terlayani, diketahui status daya dukung pangan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.14
Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

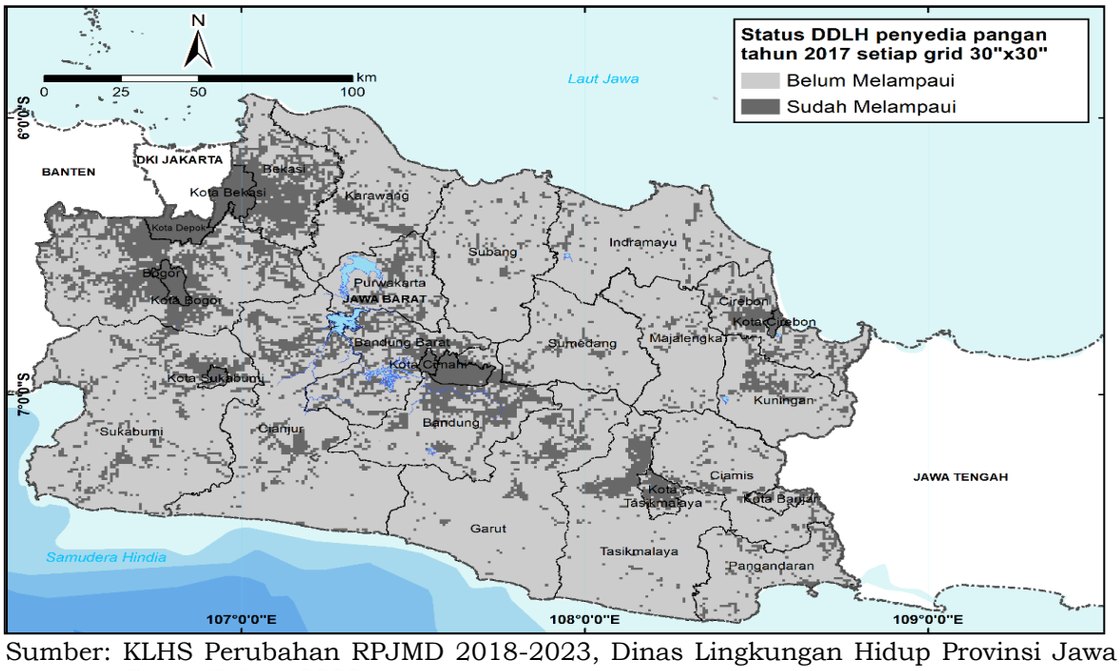

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Wilayah dengan status daya dukung pangan yang sudah terlampaui pada tahun 2017 sebagian besar merupakan wilayah perkotaan padat penduduk, antara lain Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya. Pada bagian pantai utara juga ditemukan wilayah dengan status daya dukung pangan yang terlampaui yang merupakan pusat-pusat kegiatan/pusat kota**.**

Secara akumulatif, 80 persen wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki status daya dukung pangan yang belum terlampaui. Artinya, sebagian besar kebutuhan pangan masih dapat terpenuhi oleh ketersediaan pangan di setiap wilayah itu sendiri.

2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Jawa Barat memiliki beragam potensi pengembangan wilayah yang keunggulannya perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat serta perlu diantisipasi perkembangannya sehingga tidak berdampak buruk bagi sosial dan lingkungan di masa yang akan datang. Potensi tersebut didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan pengembangan Provinsi Jawa Barat dimasa yang akan datang serta fakta aktual dengan adanya keunggulan konektivitas wilayah berupa infrastruktur strategis yang sudah terbangun di Provinsi Jawa Barat sehingga berpotensi menjadi magnet investasi yang perlu diantisipasi perkembangannya. Pusat-pusat kegiatan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baik yang berkarakter perkotaan dan perdesaan di wilayah Jawa Barat bagian Utara, Tengah dan Selatan, memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda, sehingga perlu ditangani dengan skenario pengembangan yang berbeda.

A. Wilayah utara dengan potensi fisik dominan berupa dataran, secara eksisting merupakan lahan pertanian yang luas, dan lokasi infrastruktur strategis diantaranya konektivitas Jalan Tol Cipali, Tol Cisumdawu, Stasiun Kereta Api dan Kereta Api Cepat-Semi Cepat, serta *outlet* simpul transportasi nasional maupun internasional seperti Pelabuhan Patimban di Subang, Pelabuhan Cirebon, serta Bandara Kertajati di Majalengka.
B. Wilayah Tengah dengan potensi fisik bergelombang dan datar didominasi kawasan perkotaan yang memiliki resiko rawan bencana, dan sebagian lainnya merupakan kawasan yang perlu dilindungi dan

memiliki potensi destinasi pariwisata. Hal ini mengarahkan potensi pengembangan wilayah yang mengoptimalisasikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, menerapkan mitigasi bencana, pemenuhan pelayanan publik, aktivitas ekonomi yang berkelanjutan seperti jasa, pariwisata, dan kerjasama pengelolaan kawasan perkotaan.

C. Wilayah Selatan dengan potensi fisik yang bergelombang hingga curam dan resiko rawan bencana tinggi, perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan yang mengedepankan optimalisasi aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, agroindustri, industri kelautan dan pariwisata terpadu, yang mengoptimalkan sumber daya lahan, pesisir dan kelautan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Konsep pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Selatan.

Selain itu, peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan di wilayah selatan perlu diprioritaskan untuk pemenuhan sarana prasarana minimal agar pelayanan publik terjangkau dan memiliki akses yang tinggi. Sehingga walaupun tidak dibangun seperti di wilayah utara dan tengah, wilayah selatan tetap maju dan sejahtera dan tetap menjaga daya dukung lingkungannya. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengusulkan beberapa rencana infrastruktur lintas selatan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah.

Untuk meningkatkan perekonomian regional, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga menginisiasi pengembangan 6 (enam) Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, meliputi: KEK Pariwisata Cikidang-Sukabumi, KEK Lido, KEK Sumedang (Jatigede), KEK Agrowisata Purwakarta, KEK Pangandaran, dan KEK Kota Raya Walini. Perkembangan inisiatif pengembangan KEK di Jawa Barat saat ini, baru rencana KEK Pariwisata Cikidang-Sukabumi dan KEK Lido yang telah memenuhi persyaratan administratif dan dalam proses pembahasan di Dewan Nasional KEK.

2.1.9 Demografi

Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dihadapkan pada tantangan dinamika kependudukan yang lebih kompleks dibanding provinsi lain. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2020 mencapai 48.274.162 jiwa (Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020) atau ekuivalen dengan 17,86 persen dari jumlah penduduk Indonesia dengan *sex ratio* sebesar 103,10. Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk, dimana laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari 1,30 persen pada tahun 2019 menjadi 1,11 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.5
Indikator Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator Kependudukan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	47.379.389	48.037.827	48.683.861	49.316.712	48.274.162
1.a	- Laki-Laki	Jiwa	24.011.261	24.355.331	24.652.609	24.962.701	24.508.885
1.b	- Perempuan	Jiwa	23.368.128	23.702.496	24.031.252	24.354.011	23.765.277
2	LPP	%	1,43	1,39	1,34	1,3	1,11
3	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km^2	1.339	1.358	1.376	1.358	1.365

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BAPPENAS, BPS & UNFPA. 2013) diperkirakan pada periode Tahun 2025-2030, Provinsi Jawa Barat akan mengalami *window of opportunity* dengan adanya bonus demografi yakni suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dari penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+) dengan kata lain angka rasio ketergantungan menjadi kecil. Disisi lain, dinamika kependudukan di Jawa Barat menunjukkan bahwa populasi penduduk Jawa Barat akan memasuki fase *ageing population* dimana komposisi jumlah penduduk usia tua akan semakin banyak.

Gambar 2.15
Bonus Demografi Provinsi Jawa Barat

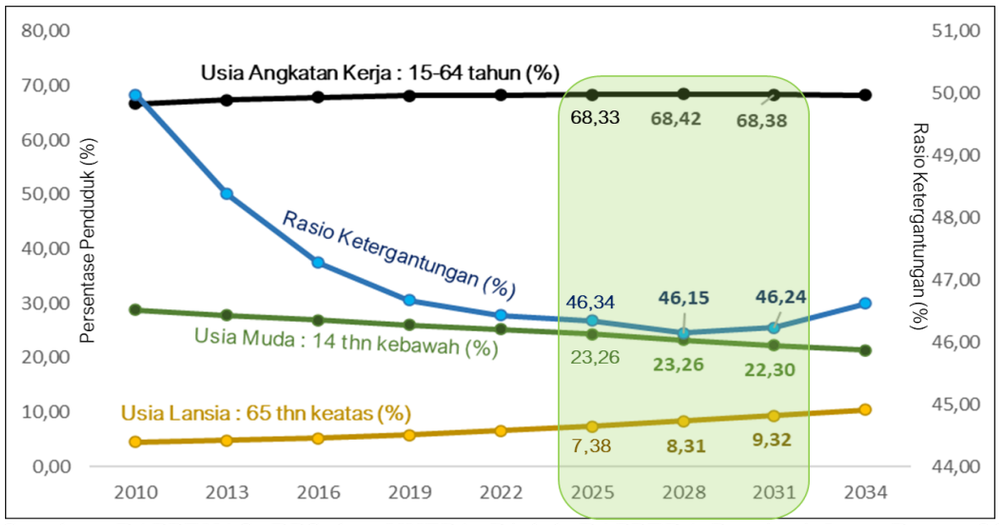

Sumber: BAPPENAS, BPS dan UNFPA. Diolah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, 2020

Komposisi penduduk tahun 2020 menunjukkan populasi penduduk Jawa Barat didominasi oleh Generasi Z usia 8-23 tahun (27,88 persen) dan generasi milenial usia 24-39 tahun (26,07 persen), serta Generasi X usia 40-55 tahun (22 persen), sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 2.16
Komposisi Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

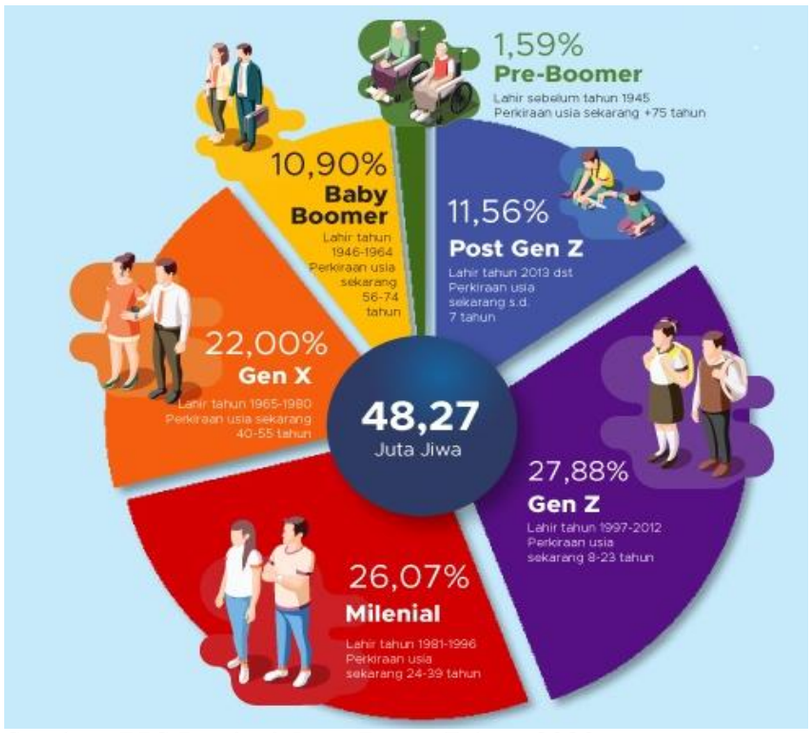

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Kinerja pembangunan di bidang ekonomi tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, fokus kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi, membangun infrastruktur, dan mengembangkan kewirausahaan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mencapai -2,44 lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07 persen.

Gambar 2.17
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2016-2020 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi dapat tergambarkan melalui sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Tabel 2.6
Nilai PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	1.653,23	1.788,12	1.962,23	2.125,16	2.088,04
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	1.275,61	1.343,66	1.419,69	1.491,71	1.455,24

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Selama 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Jawa Barat didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; serta Transportasi dan Pergudangan.

Tabel 2.7
PDRB ADHB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah)

Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146,77	152,94	170,16	186,44	192,12
B. Pertambangan dan Penggalian	25,35	25,48	26,61	26,45	23,16
C. Industri Pengolahan	703,52	755,39	827,29	884,12	860,07
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,92	10,86	10,92	10,97	10,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,34	1,59	1,79	1,94	2,16
F. Konstruksi	134,11	147,55	165,61	181,32	171,26
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	249,24	269,73	291,74	323,63	303,86
H. Transportasi dan Pergudangan	94,85	103,49	111,44	117,22	109,15
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	43,01	48,40	54,64	61,14	60,85
J. Informasi dan Komunikasi	45,46	51,85	56,27	60,94	82,06
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	46,10	50,12	54,71	57,51	58,46
L. Real Estate	16,81	18,66	20,75	22,96	23,56
M,N. Jasa Perusahaan	6,65	7,34	8,17	9,97	8,4
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	39,16	43,31	46,56	49,06	46,03
P. Jasa Pendidikan	44,68	51,39	59,30	68,08	75,57
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,06	13,47	14,78	16,68	16,21
R,S,T,U Jasa Lainnya	32,21	36,82	40,89	45,61	45,05
PDRB	**1.653,24**	**1.788,38**	**1.962,23**	**2.125,16**	**2.088,04**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Struktur ekonomi Provinsi Jawa Barat dapat dilihat menurut Lapangan Usaha dan Komponen Pengeluaran. Pada tahun 2020, kontributor terbesar dalam perekonomian berdasar PDRB lapangan usaha adalah Industri Pengolahan sebesar 41,19 persen, diikuti Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,55 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,20 persen.

Tabel 2.8
Distribusi PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persen)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,90	8,55	8,68	8,78	9,20
B. Pertambangan dan Penggalian	1,53	1,42	1,36	1,25	1,11
C. Industri Pengolahan	42,49	42,24	42,19	41,62	41,19
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,72	0,61	0,56	0,52	0,48
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10
F. Konstruksi	8,12	8,25	8,45	8,54	8,20
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,15	15,08	14,88	15,24	14,55
H. Transportasi dan Pergudangan	5,72	5,79	5,68	5,52	5,23
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,60	2,71	2,79	2,88	2,91
J. Informasi dan Komunikasi	2,75	2,90	2,87	2,87	3,93
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,80	2,79	2,71	2,80
L. *Real Estate*	1,02	1,04	1,06	1,08	1,13
M,N. Jasa Perusahaan	0,40	0,41	0,42	0,47	0,40
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,34	2,42	2,32	2,31	2,20
P. Jasa Pendidikan	2,70	2,87	3,03	3,21	3,62
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,73	0,75	0,75	0,79	0,78
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,95	2,06	2,09	2,15	2,16
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Perekonomian Jawa Barat tahun 2020 yang diukur berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 mencapai Rp1.455,24 Triliun ekuivalen dengan laju pertumbuhan sebesar -2,44 persen dibanding capaian 2019. Pelemahan kinerja ekonomi merupakan dampak pandemi COVID-19 yang mulai mewabah sejak Maret 2020.

Tabel 2.9
PDRB ADHK Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah)

Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Triliun Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	98,10	99,67	101,75	104,6	106,99
B.Pertambangan dan Penggalian	27,14	26,59	25,49	24,79	23,77
C. Industri Pengolahan	549,47	578,86	616,43	641,35	614,29
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,14	5,44	5,44	5,37	4,96

Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Triliun Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,01	1,08	1,13	1,17	1,3
F. Konstruksi	103,51	111,00	119,31	126,63	119,07
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	198,87	207,91	216,61	232,87	214,37
H. Transportasi dan Pergudangan	61,30	64,26	67,7	71,06	68,1
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32,56	35,29	38,16	40,93	38,63
J. Informasi dan Komunikasi	47,86	53,53	58,42	63,86	85,98
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	33,03	34,18	35,73	36,51	36,93
L. *Real Estate*	14,74	16,11	17,66	19,34	19,72
M, N. Jasa Perusahaan	5,33	5,78	6,28	6,86	5,6
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	25,74	26,93	27,36	28,7	26,72
P. Jasa Pendidikan	34,89	37,91	40,07	42,16	44,98
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,72	10,54	11,37	12,45	11,78
R, S, T, U. Jasa Lainnya	26,23	28,79	30,72	32,91	32,05
PDRB	**1.275,62**	**1.343,86**	**1.419,62**	**1.491,58**	**1.455,24**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Perekonomian Provinsi Jawa Barat tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,44 persen. Penurunan merupakan andil oleh hampir semua lapangan usaha, kecuali beberapa bidang yang masih tumbuh positif bahkan ada yang meningkat secara siginifikan yaitu Informasi dan komunikasi. Beberapa lapangan usaha yang tumbuh positif di tahun 2020 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,29 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 10,8 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 34,64 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,15 persen, *Real estate* 1,92 persen, dan Jasa pendidikan sebesar 6,69 persen.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persen)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,70	1,60	2,09	2,8	2,29
B. Pertambangan dan Penggalian	(0,97)	(2,02)	-4,13	-2,75	-4,11
C. Industri Pengolahan	4,77	5,32	6,52	4,04	-4,22
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,37	(11,42)	0,02	-1,2	-7,62
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,33	7,13	4,96	3,03	10,8
F. Konstruksi	5,02	7,24	7,48	6,14	-5,97

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,42	4,52	4,21	7,51	-7,94
H. Transportasi dan Pergudangan	8,84	4,83	5,36	4,97	-4,18
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,35	8,37	8,15	7,25	-5,6
J. Informasi dan Komunikasi	14,27	11,85	9,14	9,31	34,64
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	11,89	3,48	4,53	2,2	1,15
L. *Real Estate*	6,51	9,31	9,61	9,55	1,92
M,N. Jasa Perusahaan	8,16	8,42	8,64	9,16	-18,38
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,01	4,64	1,59	4,91	-6,92
P. Jasa Pendidikan	7,61	8,67	5,69	5,22	6,69
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,48	8,38	7,9	9,48	-5,39
R,S,T,U. Jasa lainnya	8,73	9,78	6,68	7,15	-2,63
PDRB	**5,66**	**5,33**	**5,65**	**5,07**	**-2,44**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama periode 2016-2019 selalu lebih tinggi dari LPE Nasional dengan kisaran 5,07 persen hingga 5,66 persen. Namun krisis dibandingkan akibat COVID-19 menyebabkan pelemahan kinerja perekonomian baik global maupun nasional hingga perekonomian Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 terkontraksi atau tumbuh tahun sebelumnya.

Gambar 2.18
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

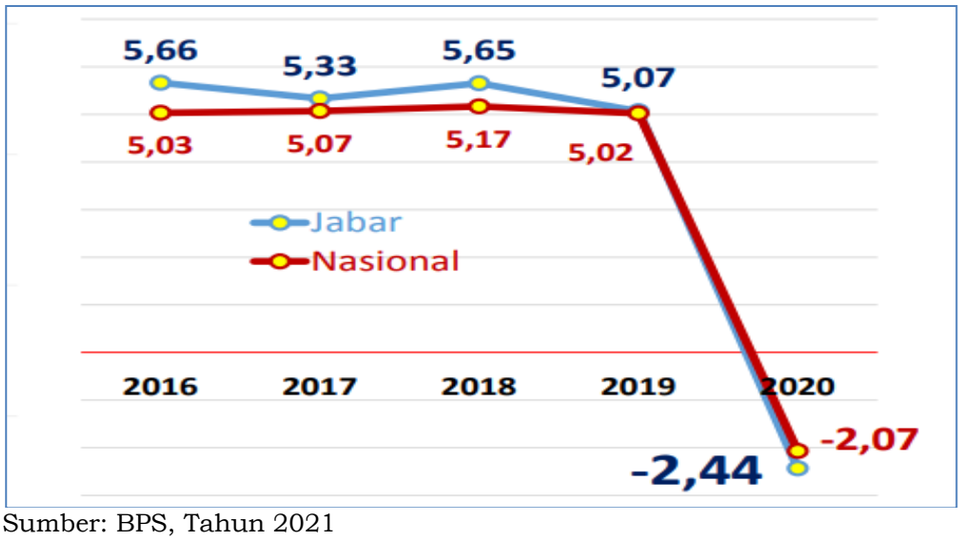

Sumber: BPS, Tahun 2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi di 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2015-2019 menunjukkan pencapaian yang variatif. Pada tahun 2019 terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota yang memiliki LPE lebih rendah dari LPE Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang,

Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Banjar.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (persen)

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab Bogor	6,10	5,96	6,19	5,85	-1,77
2	Kab Sukabumi	5,56	5,14	5,79	5,75	-1,08
3	Kab Cianjur	6,43	5,72	6,23	5,47	-0,78
4	Kab Bandung	6,34	6,17	6,26	6,09	-1,87
5	Kab Garut	5,90	4,89	4,96	5,02	-1,26
6	Kab Tasikmalaya	5,91	5,95	5,7	5,43	-0.98
7	Kab Ciamis	5,99	5,21	5,44	5,38	-,014
8	Kab Kuningan	6,09	6,36	6,43	6,56	0,09
9	Kab Cirebon	5,63	5,05	5,02	4,86	-1,08
10	Kab Majalengka	6,03	6,81	6,1	7,14	0,86
11	Kab Sumedang	5,70	6,23	5,83	6,32	-1,12
12	Kab Indramayu	0,08	1,45	1,34	3,2	-1,58
13	Kab Subang	5,40	5,10	4,38	4,27	-1,27
14	Kab Purwakarta	5,99	5,12	4,98	4,38	-2,05
15	Kab Karawang	6,29	5,76	6,07	4,06	-3,59
16	Kab Bekasi	4,99	5,78	6,02	4,18	-3,3
17	Kab Bandung Barat	5,64	5,69	5,5	5,05	-2,41
18	Kab Pangandaran	5,29	5,10	5,41	5,96	-0,05
19	Kota Bogor	6,73	6,12	6,14	5,96	-0,53
20	Kota Sukabumi	5,64	5,43	5,51	5,49	-1,48
21	Kota Bandung	7,79	7,21	7,08	6,79	-2,28
22	Kota Cirebon	5,98	5,79	6,21	6,29	-0,99
23	Kota Bekasi	6,09	5,73	5,86	5,41	-2,55
24	Kota Depok	7,28	6,65	6,97	6,74	-1,92
25	Kota Cimahi	5,49	5,43	6,46	6,84	-2,26
26	Kota Tasikmalaya	6,91	6,07	5,93	5,97	-2,01
27	Kota Banjar	5,86	5,12	5,04	5,02	1,04
Provinsi Jawa Barat		**5,67**	**5,33**	**5,65**	**5,07**	**-2,44**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Selain dari sisi lapangan usaha, kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat juga dapat dilihat dari PDRB menurut pengeluaran. PDRB menurut pengeluaran menjabarkan perilaku sektor pelaku ekonomi dalam melakukan pengeluaran konsumsi akhir, investasi dan perdagangan antar wilayah serta antar negara. Nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut pengeluaran menggambarkan penggunaan akhir seluruh sumberdaya yang diciptakan oleh sumber daya ekonomi dalam wilayah

Provinsi Jawa Barat. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama periode 2015-2019 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran meningkat sebesar Rp600.183,16 miliar atau 39,35 persen. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan perubahan volume. Peningkatan nilai juga mengindikasikan perekonomian secara makro tumbuh positif, daya beli masyarakat meningkat, serta penguatan daya saing produk barang dan jasa di pasar nasional dan internasional.

PDRB menurut pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010. PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2016-2020, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut pengeluaran meningkat sebesar Rp434,80 triliun atau 26,29 persen. Meskipun pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang besar namun jika dihitung dari tahun 2016 mesih mengalami peningkatan. Peningkatan ini menggambarkan adanya tarikan yang cukup kuat dari sisi permintaan terhadap perekonomian secara agregat sehingga perekonomian masih bertumbuh. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh harga dalam perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Adapun penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pengaruh faktor harga ditiadakan. Dengan demikian, selisih nilai antara atas dasar harga berlaku dengan atas dasar harga konstan merupakan nilai perubahan harga.

Tabel 2.12
PDRB ADHB Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah)

Sektor PDRB Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.075,52	1.169,37	1.278,28	1.387,76	1.378,90
2. Konsumsi LNPRT/Lembaga Nirlaba	9,57	10,45	12,75	13,63	13,38
3. Konsumsi Pemerintah	100,67	107,94	112,94	117,45	118,69
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	412,30	449,34	495,83	535,72	493,96
5. Perubahan Inventori	67,70	67,74	72,02	73,29	27,71
6. Ekspor	608,59	732,23	859,97	943,71	915,06
7. Dikurangi Impor	621,11	748,95	871,16	947,52	859,66
PDRB	**1.653,24**	**1.788,12**	**1 960,63**	**2.124,04**	**2.088,04**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Secara umum, total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluaran. Selama periode 2016-2020, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga (di atas 60 persen). Peranan komponen konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 mencapai 66,04 persen diikuti oleh peranan PMTB sebesar 23,66 persen, konsumsi pemerintah sebesar 5,68 persen, konsumsi LNPRT sebesar 0,64 persen. Adapun komponen ekspor mempunyai peran yang cukup besar mencapai 43,82 persen dan impor sebesar 41,17 persen.

Tabel 2.13
PDRB ADHK Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran
Tahun 2016-2020 (Triliun Rupiah)

Sektor PDRB Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Konsumsi Rumah Tangga	800,01	836,92	878,99	920,74	894,11
2. Konsumsi LNPRT/Lembaga Nirlaba	7,49	7,84	9,03	9,33	9,00
3. Konsumsi Pemerintah	66,09	6,87	69,97	72,25	71,90
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	313,08	332,75	352,31	366,80	336,23
5. Perubahan Inventori	44,60	42,63	43,59	43,65	16,43
6. Ekspor	435,54	493,92	550,81	591,69	552,91
7. Dikurangi Impor	391,20	439,01	485,08	512,91	425,36
PDRB	**1.275,62**	**1.343,66**	**1.419,62**	**1.491,58**	**1.455,24**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.2.2 PDRB per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan indikator yang dapat merefleksikan kemakmuran ekonomi di suatu daerah. Secara umum PDRB per kapita setiap penduduk Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2020 untuk ADHK mengalami penurunan. Dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun 2020, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) meningkat sebesar Rp8,35 juta atau 23,92 persen sedangkan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami kenaikan sebesar Rp3,22 juta atau 11,96 persen.

Tabel 2.14
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

PDRB per Kapita	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB per Kapita (ADHB)	34,9	37,22	40,27	43,06	41,81
PDRB per Kapita (ADHK)	26,92	27,97	29,16	30,24	30,14

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar tercipta pemerataan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Indeks gini (*gini ratio*) merupakan indikator yang umum digunakan sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Selama periode Tahun 2015-2020, tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat yang diukur dengan *gini ratio* menunjukkan angka yang berfluktuasi.

Namun secara umum, tingkat ketimpangan pendapatan termasuk dalam kategori Ketimpangan sedang, hanya di perdesaan termasuk kategori ketimpangan rendah. Pada Maret 2020, angka *gini ratio* di perkotaan + perdesaan menunjukan penurunan dibandingkan Maret 2015. Tercatat pada Maret 2015, angka *gini ratio* di perkotaan sebesar 0,433 menurun menjadi 0,412 pada Maret 2020. Namun tidak demikian dengan perdesaan, dimana angka *gini ratio* justru mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2015, dari 0,316 menjadi 0,325 pada Maret 2020.

Gambar 2.19
Gini Ratio Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020

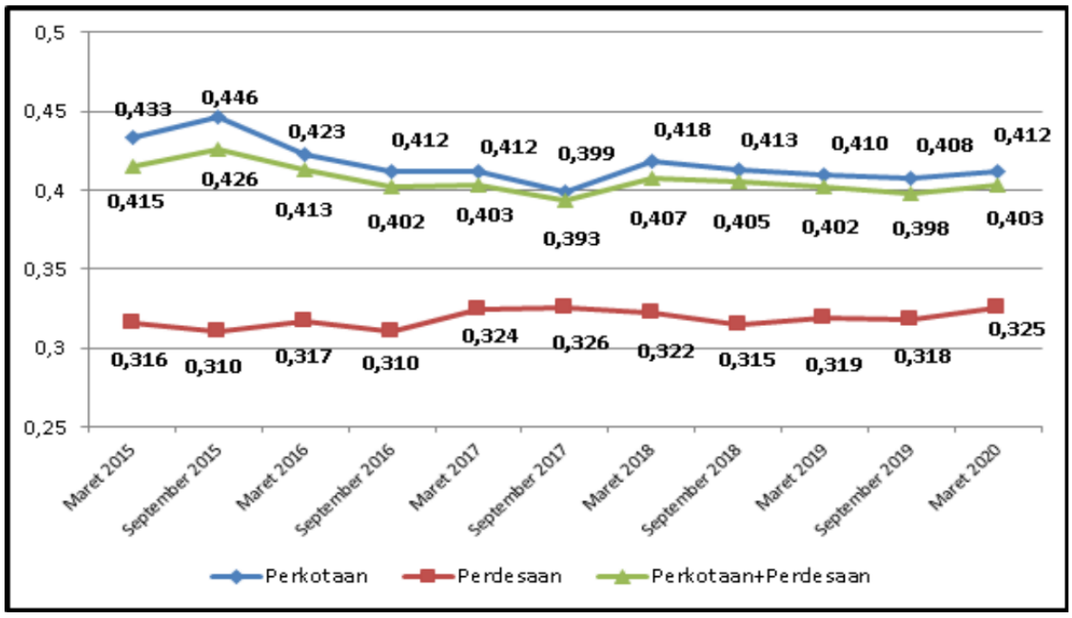

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Bila dibandingkan dengan nasional, indeks gini Provinsi Jawa Barat memiliki angka lebih tinggi. Indeks gini Nasional pada tahun 2020 sebesar 0,381. Bila dibandingkan dengan provinsi lain se-Indonesia, maka posisi indeks gini Jawa Barat pada Maret 2020 berada pada posisi tertinggi kedua setelah DI Yogyakarta dari 34 provinsi. Kondisi ini menunjukan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat cukup besar dibandingkan daerah lain dan membutuhkan berbagai kebijakan untuk mengejar pemerataan.

Tabel 2.15
Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2015-2020

Uraian	Indeks Gini					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Jawa Barat	0,43	0,40	0,39	0,405	0,398	0,398
Nasional	0,40	0,39	0,39	0,384	0,380	0,385

Sumber: BPS RI, Tahun 2021

2.2.4 Indeks Williamson

Pemerataan pembangunan daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Indeks williamson merupakan salah satu alat ukur ketimpangan antarwilayah dengan pendekatan PDRB per Kapita.

Indeks Willaiamson pada periode Tahun 2017-2019 menunjukkan tren menurun dari 0,678 pada tahun 2017 menjadi 0,665 pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan ketimpangan antarwilayah selama periode tahun tersebut semakin mengecil.

Pada tahun 2020, indeks williamson menunjukkan kenaikan dibanding tahun 2019, hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan antarwilayah di Provinsi Jawa Barat semakin melebar dalam 1 (satu) tahun terakhir. Pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap melemahnya kinerja perekonomian di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menyebabkan tingkat ketimpangan antarwilayah semakin melebar. Hal ini akibat terkontraksinya pertumbuhan ekonomi di sebagian besar kabupaten/kota yang disebabkan penurunan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Penurunan nilai PDRD ADHB tersebut berimplikasi pada turunnya nilai PDRB per Kapita di semua kabupaten/kota.

Gambar 2.20
Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020

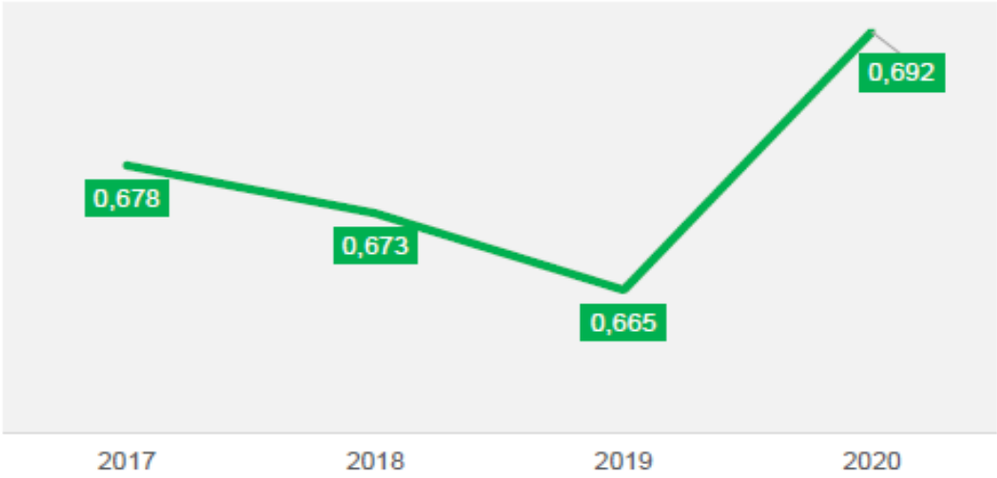

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah/daerah. IPM dihitung dari 3 (tiga) agregasi 3 (tiga) dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan

Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Adapun dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Dari ketiga indeks komponen pembentuk IPM, terlihat bahwa kontribusi terbesar pada indeks komponen IPM adalah UHH, sedangkan kontribusi terkecil adalah RLS, dengan komposisi sebagai berikut:

a) UHH sebesar 29,07 persen;
b) Pengeluaran perkapita sebesar 25,87 persen;
c) HLS sebesar 24,76 persen; dan
d) RLS sebesar 20,31 persen.

Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat terus memperlihatkan perkembangan yang positif sejak tahun 2010. Peningkatan kualitas hidup manusia pada Tahun 2019-2020 mengalami percepatan, dimana untuk capaian IPM Provinsi Jawa Barat tahun 2020 mampu melampaui rata-rata IPM Nasional. IPM Provinsi Jawa Barat tahun 2020 mencapai 72,09, lebih tinggi dari IPM Nasional sebesar 71,94.

Gambar 2.21
Tren Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhannya
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tabel 2.16
IPM beserta Komponennya Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Usia Harapan Hidup	Tahun	72,44	72,47	72,66	72,85	73,04
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,3	12,42	12,45	12,48	12,50
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,95	8,14	8,15	8,37	8,55

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah	10.035	10.285	10.790	11.152	10.845
Indeks Pembangunan Manusia	**Indeks**	**70,05**	**70,69**	**71,30**	**72,03**	**72,09**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kualitas pendidikan. Seseorang dengan pendidikan tinggi akan memiliki peluang yang besar dalam hidupnya dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, misalnya di bidang pekerjaan. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan mendorong perbaikan di bidang lain seperti tingkat kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan secara ekonomi.

Mengingat begitu pentingnya pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dalam agenda pembangunan jangka menengah periode 2018-2023 dengan fokus pada peningkatan partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, melalui berbagai program pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, juga menyasar peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar.

Dimensi pengetahuan/pendidikan pada IPM dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, HLS di Provinsi Jawa Barat telah meningkat sebesar 0,20 tahun, sementara RLS meningkat sebesar 0,60 tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, HLS secara rata-rata tumbuh sebesar 0,57 persen per tahun. Meningkatnya HLS menunjukkan peningkatan tahun bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 (tujuh) tahun di masa mendatang. Pada tahun 2020, HLS di Provinsi Jawa Barat telah mencapai 12,50 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau hingga menempuh jenjang D1.

Gambar 2.22
Tren Harapan Lama Sekolah dan Pertumbuhannya
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Sementara itu, RLS penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Jawa Barat tumbuh 1,66 persen per tahun selama periode 2016 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat yang lebih baik. Pada tahun 2020, secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 8,55 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (atau setara SMP kelas 2).

Gambar 2.23
Tren Rata-Rata Lama Sekolah dan Pertumbuhannya
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

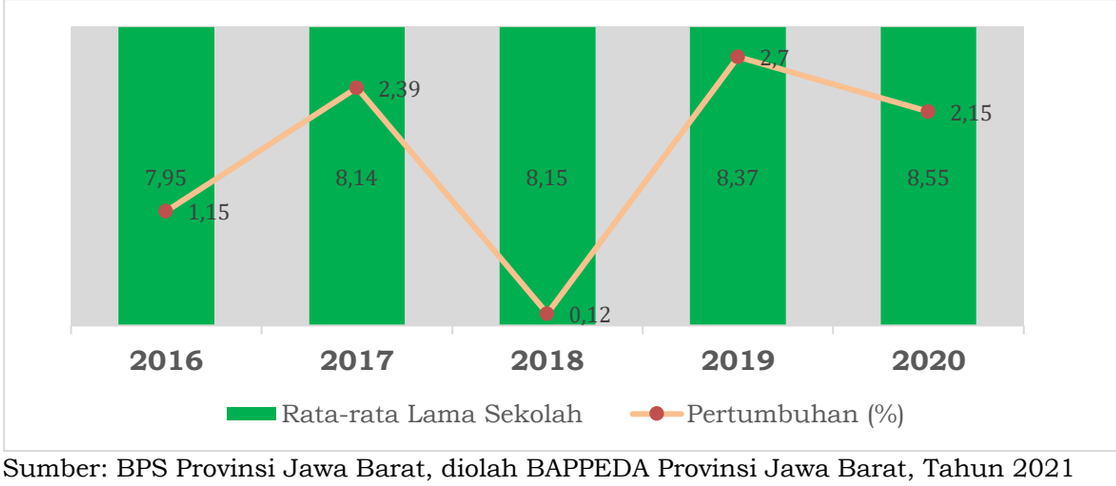

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Salah satu indikasi meningkatnya derajat kesehatan suatu wilayah adalah rata-rata umur harapan hidup yang lebih lama. Peningkatan derajat

kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat melalui desentralisasi layanan kesehatan. Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, aksesibilitas, SDM kesehatan hingga kualitas pelayanan kesehatan. Tren capaian UHH saat lahir dari Tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Selama periode Tahun 2016 hingga 2020, Provinsi Jawa Barat telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,60 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,17 persen per tahun. Pada tahun 2016, UHH saat lahir di Provinsi Jawa Barat sebesar 72,44 tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 73,04 tahun. Peningkatan UHH saat lahir mengindikasikan kemajuan pembangunan bidang kesehatan.

Gambar 2.24
Tren Umur Harapan Hidup Saat Lahir dan Pertumbuhannya
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

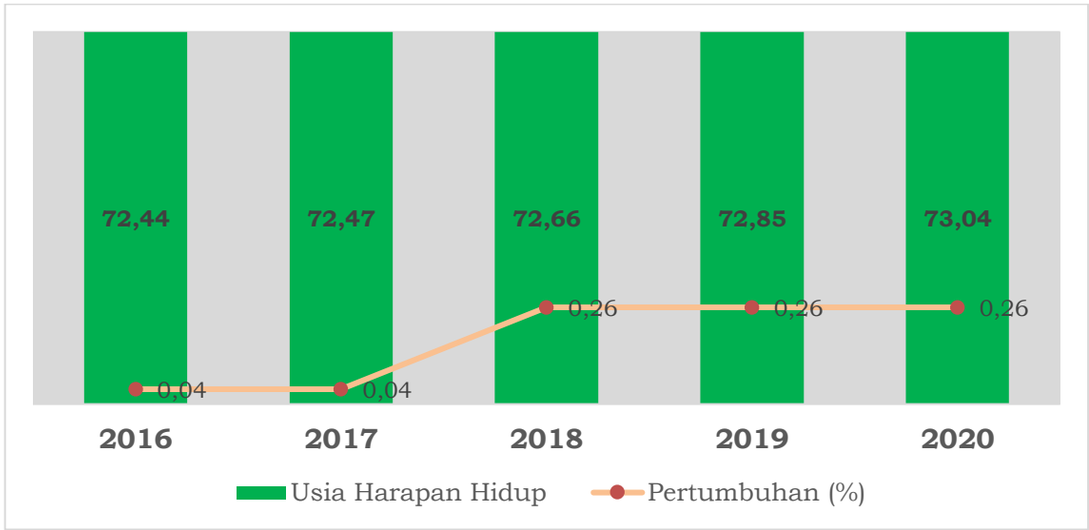

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Dimensi lainnya dari IPM adalah standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Selama 5 (lima) tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat sebesar Rp810 juta dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 3,38 persen. Sebagai catatan pengeluaran per kapita yang digunakan adalah pengeluaran per kapita dengan tahun dasar 2012 yang sudah disesuaikan antardaerah (pengeluaran per kapita disesuaikan).

Gambar 2.25
Tren Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan dan Pertumbuhannya
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020
(Rp Ribu dan Persen)

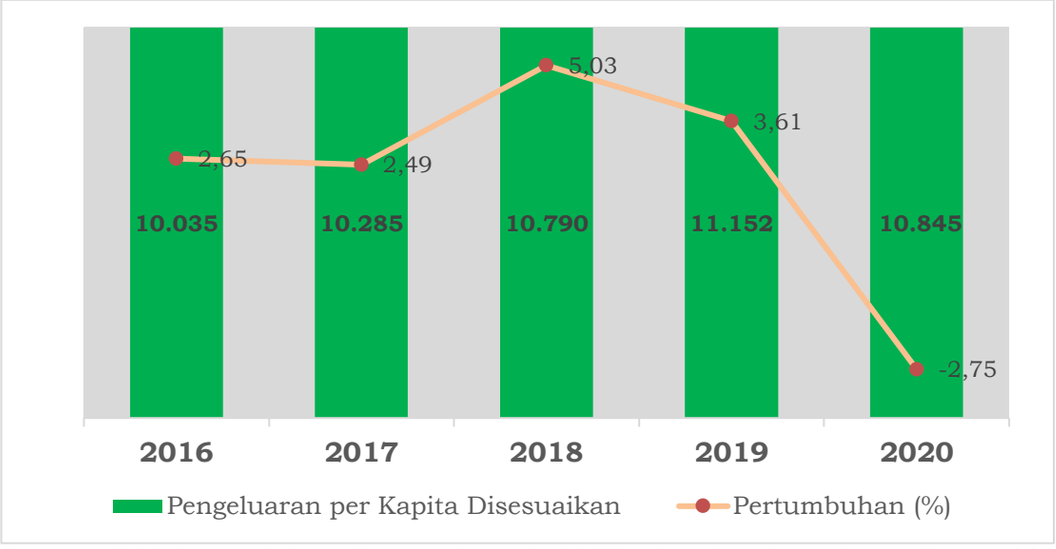

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.2.6 Persentase Penduduk Miskin

Salah satu penghambat laju pembangunan manusia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan sering kali menjadi penghalang bagi penduduk dalam mengakses kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan perlu aksi yang mencakup berbagai dimensi yang berkaitan. Kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun 2016 hingga 2020 cenderung mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah maupun persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Selama periode Tahun 2016 hingga 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat turun sebanyak 300 ribu orang dan persentase penduduk miskin turun sebesar 1,07 persen.

Gambar 2.26
Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

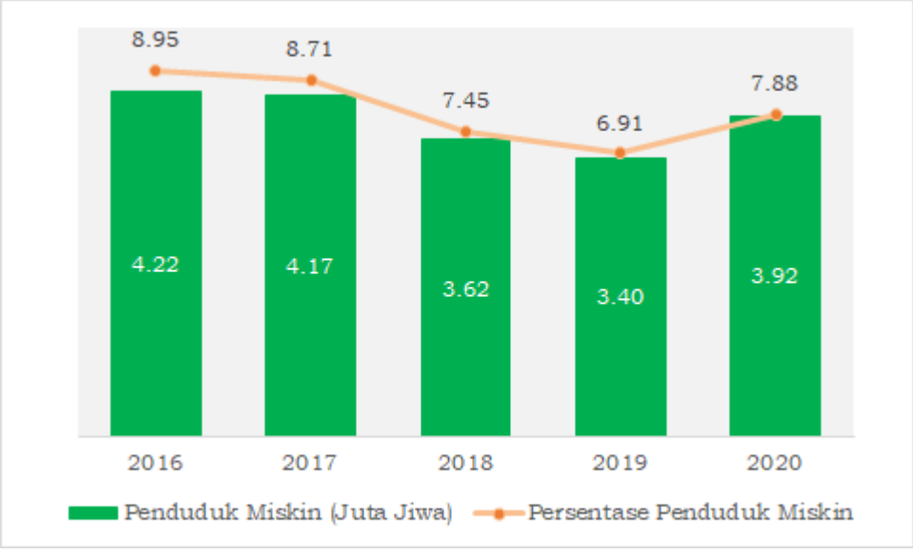

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Berdasarkan tabel di bawah indeks kedalaman kemiskinan tertinggi di Jawa Barat sebesar 1,28 persen pada tahun 2016, dan terendah sebesar 1,06 persen di tahun 2019, dan meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 1,13 persen. Penurunan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Tabel 2.17
Indikator Kemiskinan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Indikator Kemiskinan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	4,22	3,77	3,54	3,38	4,19
2	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	324.119	354.679	371.376	391.009	410.988
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,95	7,83	7,25	6,82	8,43
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	1,28	1,39	1,13	1,06	1,13
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,28	0,35	0,27	0,24	0,23

Sumber: BPS RI, Tahun 2021

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berdasarkan tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi sebesar 0,28 persen di tahun 2016, dan terendah sebesar 0,23 persen di tahun 2020. Kondisi keparahan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,23 persen pada tahun 2020 yang berarti turun dari tahun sebelumnya, memiliki makna bahwa sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat semakin rendah.

Gambar 2.27
Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

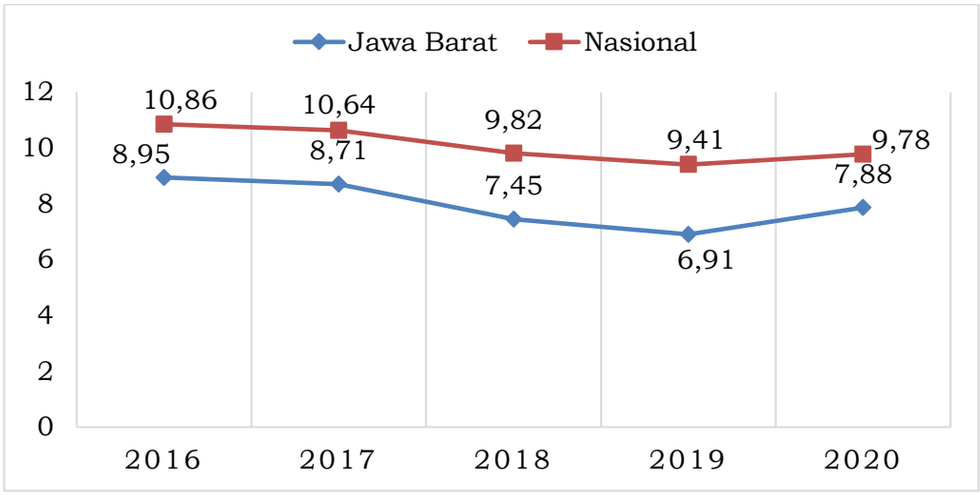

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2021

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa periode 2016-2020 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Walaupun kondisi tersebut juga menunjukkan terjadi perlambatan penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dari target yang telah ditetapkan akibat dari kondisi makro ekonomi nasional. Informasi lain yang diperoleh dari gambar tersebut, yaitu persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 10,19 persen.

2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang lebih kompleks dibandingkan

provinsi lain. Selama periode Tahun 2016-2019, kondisi TPT di Provinsi Jawa Barat turun sebesar 0,85 persen, dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 2,42 persen. Pada Agustus 2020, TPT di Provinsi Jawa Barat mencapai 10,46 persen. Pada tahun 2020 jumlah pengangur adalah sebesar 2,53 juta meningkat sebesar 35,2 persen dibanding tahun 2016. Berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan SMK menyumbang tingkat pengangguran terbesar dibandingkan dengan tingka pendidikan lainnya. Hal ini salahsatunya diakibatkan oleh belum terwujudnya "*link and match*" antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau paras tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.28
Tingkat Pengangguran (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2018 - Agustus 2020

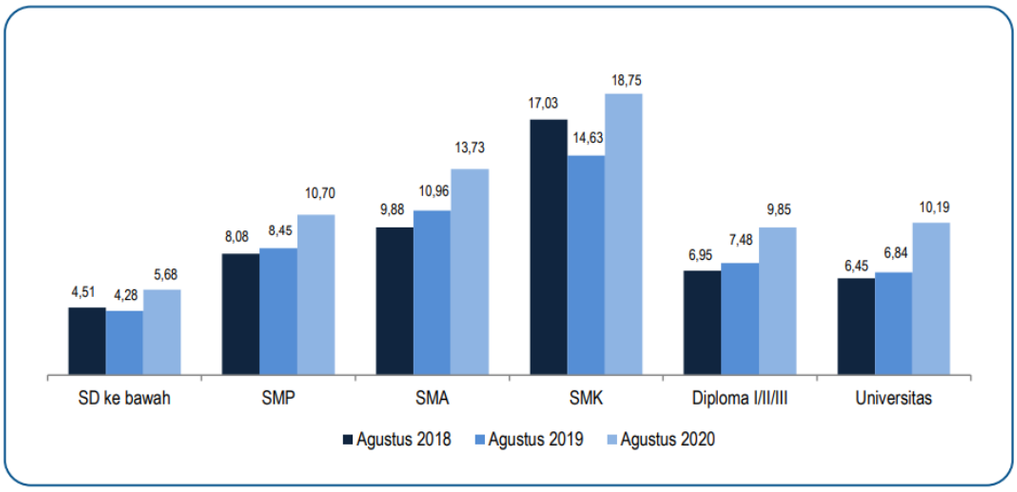

Sumber: BPS RI, Tahun 2020

Gambar 2.29
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

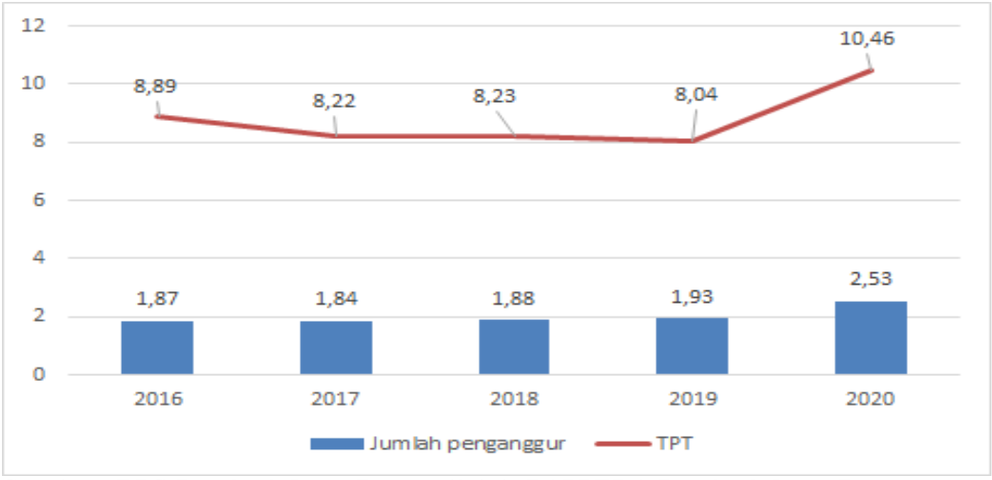

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Dibandingkan dengan TPT nasional, maka TPT Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu berada pada posisi lebih tinggi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.30.

Gambar 2.30
Tingkat Pengangguran Terbuka
di Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

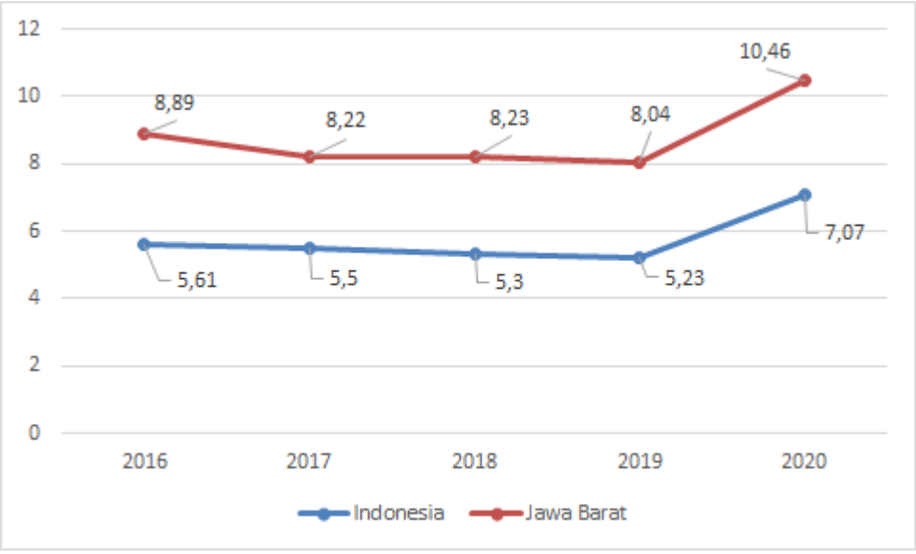

Sumber: BPS RI, Tahun 2021

Tingkat pengangguran terbuka kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 menunjukkan angka yang bervariasi. Pada tahun 2020 beberapa kabupaten/kota dengan TPT lebih rendah dibandingkan nasional yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan kota Banjar. Selanjutnya kabupaten/kota dengan TPT lebih rendah dari provinsi dan lebih tinggi dari nasional yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, kabupaten Subang, dan Kota Depok. Kabupaten/kota dengan TPT di atas provinsi yaitu Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Cirebon.

2.2.8 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dalam mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender dapat digunakan beberapa indikator, diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau *gap* pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia perempuan dan laki-laki. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa IPG Jawa Barat selama periode 2015 sampai 2019 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun kecuali tahun 2017 yang sempat turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, IPG Jawa Barat berada di nilai 89,19 meningkat menjadi 89,26 pada tahun 2019. Kecendrungan peningkatan juga terjadi pada IDG yang diawali dengan nilai 69,02 pada tahun 2015 dan menjadi 69,48 pada tahun 2019.

Gambar 2.31
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2019

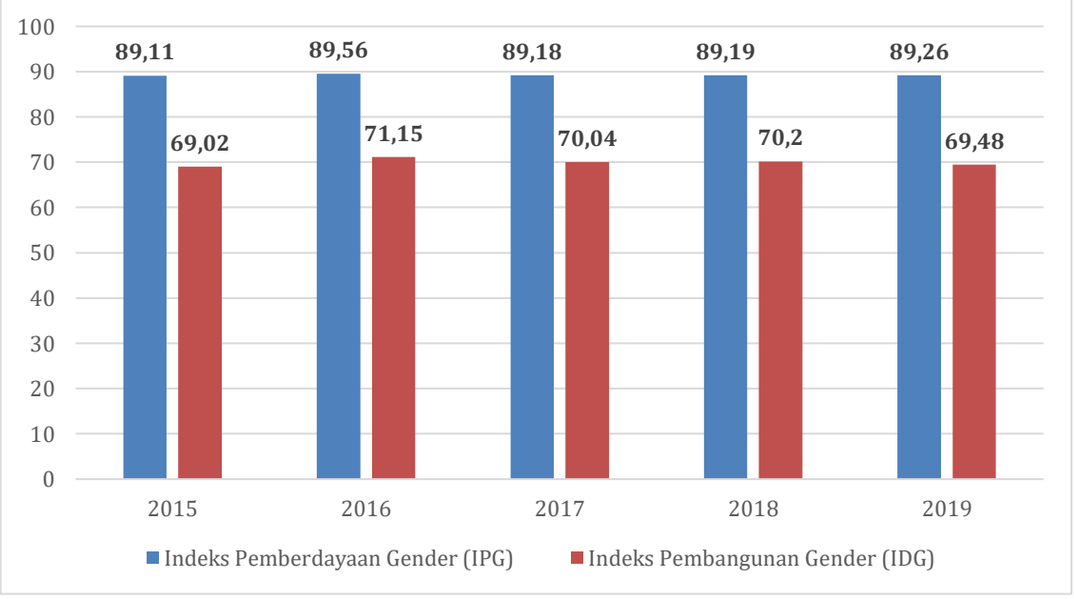

Sumber: BPS RI, Tahun 2020

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada RPJMD Tahun 2018-2023. Ukuran keberhasilan atau kemajuan program-program pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Namun demikian, saat ini masih terdapat 19 kecamatan yang tidak terdapat sekolah (SMA/SMK) Negeri maupun Swasta dari total kecamatan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 627 kecamatan. Kabupaten yang paling banyak kecamatan yang tidak terdapat sekolah (SMA/SMK) Negeri maupun Swasta adalah Kabupaten Kuningan sebanyak 8 (delapan) Kecamatan.

Dalam hal pendidikan khusus yang juga merupakan kewenangan pemerintah provinsi, saat ini di Jawa Barat terdapat 382 unit SLB yang terdiri dari 39 SLB Negeri dan 343 SLB Swasta. Jumlah siswa SLB secara keseluruhan pada tahun 2019/2020 berjumlah 24.510 siswa yang terdiri dari 5.033 siswa negeri dan 19.477 siswa swasta. Namun demikian, masih ada 2 (dua) kota di Provinsi Jawa Barat yang tidak terdapat sekolah SLB Negeri yaitu Kota Bogor dan Kota Sukabumi. Kota Bogor memiliki jumlah siswa berkebutuhan khusus yang berpatisipasi di SLB Swasta sebanyak 619 siswa yang tersebar di 10 (sepuluh) SLB Swasta. Begitu pula Kota Sukabumi memiliki jumlah siswa berkebutuhan khusus yang berpatisipasi di SLB Swasta sebanyak 196 siswa yang tersebar pada 3 (tiga) SLB Swasta.

Indikator kinerja urusan pendidikan yang mengalami fluktuatif cenderung menurun selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Menengah Atas dan Kualifiaksi S2 Guru SMK yaitu pada angka 20 dan 8,43 di tahun 2015 sedangkan di tahun 2019 cenderung menurun menjadi 19 dan 6,69. Sementara itu, indikator yang mengalami fluktuatif cenderung meningkat adalah Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA), Angka Kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA), dan Kualifiaksi S2 Guru SMA, dimana tahun 2015 berada pada angka 1,45; 98,7; dan 11,54 sedangkan di tahun 2019 cenderung meningkat berada pada angka 0,30; 98,78; dan 13,70. Selanjutnya, Persentase Angka Melanjutkan dari jenjang SMA/MA/SMK ke

Perguruan Tinggi pada angka 20,50 ditahun 2015 meningkat terus menjadi 40,57 di tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

Indikator	2015	2016	2017	2018
APK SD/MI	109,42	108,09	107,54	103,35
APK SMP/MTs	90,07	89,58	88,8	99,27
APK SMA/SMK/MA	70,23	70,56	76,48	75,31
APM SD/MI	97,68	97,82	98,06	94,36
APM SMP/MTs	79.55	79,76	80,29	76,65
APM SMA/SMK/MA	56,73	56,92	57,22	57,33
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	65,72	65,82	66,62	67,17
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/Paket C	70,23	70,56	76,48	75,31
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C	56,73	56,92	57,22	57,33
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas	20	18	19	20
Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	1,45	1,37	1,19	0,28
Angka Kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	98,7	98,52	97,97	98,56
Persentase Angka Melanjutkan dari jenjang SMA/MA/SMK ke Perguruan Tinggi	20,50	24,05	35,5/40,39	40,57
SMA/SMK Sederajat Akreditasi A	n/a	25,71	24,77	43,23
Kualifiaksi S2 Guru SMA	11,54	15,88	13,55	13,31
Kualifiaksi S2 Guru SMK	8,43	9,68	6,86	6,83
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/MA/SMK	n/a	n/a	336	659

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020
Lakip Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018, diolah

Tabel 2.19
Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Indikator	2019	2020
APK SD/MI	104,45	104,46
APK SMP/MTs	99,37	99,61
APK SMA/SMK/MA	77,82	90,94
APM SD/MI	94,42	96,75
APM SMP/MTs	78,17	76,73
APM SMA/SMK/MA	57,53	66,77
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	67,29	67,29
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/Paket C	77,82	90,94
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C	57,53	66,77
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas	19	19

Indikator	2019	2020
Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	0,30	SMA: 0,22 SMK: 0,38
Angka Kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	98,78	SMA: 99,27 SMK: 98,29
SMA/SMK Sederajat Akreditasi A	43,64	SMA: 56,07 SMK: 33,28
Nilai Rerata Uji Kompetensi GTK SMA/MA/SMK/SLB	58,97	58,97
Kualifiaksi S2 Guru SMA	13,70	13.74
Kualifiaksi S2 Guru SMK	6,69	7.60
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/MA/SMK	194	RKB: 93 RPS: 135
Indeks Kepuasan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	3,20	3.22

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020
Lakip Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, diolah
Keterangan:
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.1.2 Kesehatan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dari indikator Indeks Kesehatan, Rasio Kematian Bayi, dan Jumlah Kasus Kematian Ibu. Selama periode Tahun 2015-2018, Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Barat meningkat 0,39 poin. Indikator yang mengalami fluktuatif cenderung menurun adalah Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk, Persentase Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar, dan Prevalensi Hipertensi. Indikator yang mengalami fluktuatif cenderung meningkat adalah Rasio Posyandu Per Satuan Balita, Rasio Puskesmas/Puskemas Keliling per satuan penduduk, Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi, Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (*Treatment Success Rate*), dan Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI > 90%. Sedangkan indikator yang mengalami tren meningkat adalah Persentase Desa Siaga Aktif, persentase penduduk menggunakan jamban sehat, Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi, Jumlah RS mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar, persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota, persentase penduduk dengan jaminan kesehatan, dan persentase kabupaten/kota dengan 100 persen puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa. Adapun Rasio Kematian Bayi dan Jumlah Kasus

Kematian Ibu pada periode 2015-2019 menunjukkan tren yang positif, dimana Rasio Kematian Bayi turun menjadi 3,28 persen dan Jumlah Kasus Kematian Ibu turun menjadi 684 kasus pada tahun 2019.

Tabel 2.20
Indeks Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Indeks Kesehatan	Indeks	80,63	80,68	80,72	81,02
Rasio Kematian Bayi	Persen	4,09	3,93	3,4	3,4
Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	825	799	696	700
Rasio Posyandu per Satuan Balita	Rasio	84	83	88	82,85
Rasio Puskesmas/Puskemas Keliling per satuan penduduk	Rasio	44.485	45.123	44.782	44,746
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	Rasio	147.349	144.891	142.124	n/a
Persentase Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	54,16	55,9	58,1	61,8
Persentase Desa Siaga Aktif	Persen	92,37	94,90	97,65	99,00
Persentase penduduk menggunakan jamban sehat	Persen	53,30	66,89	67,95	69,78
Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	Persen	95,95	86,00	91,84	94,18
Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar	Persen	46,70	64,29	62,50	38,64
Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi	Puskes mas	0	80	385	772
Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi	Rumah Sakit	33	78	170	229
Jumlah RS mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar	Rumah Sakit	73,00	78,00	88,00	98,00
Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota	Persen	78,00	78,06	88,74	94,18
Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan	Persen	62,50	68,56	71,62	83,17
Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (*Treatment Success Rate*)	Persen	88	89	83	87
Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI >90%	Persen	88,81	91,07	91,80	91,90
Prevalensi Hipertensi	Persen	40,74	40,74	33,00	34,50
Persentase Kabupaten/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	Persen	74,10	92,59	99,25	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2020
Lakip Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018, diolah

Tabel 2.21
Indeks Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Rasio Kematian Bayi	Per 1000 KH	3,26	3,18
Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	684	-
Rasio Kematian Ibu	Per 100.000 KH	-	85,77
Rasio Puskesmas/ per satuan penduduk	Rasio	45.328	45.687
Persentase Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	60,4	59,25
Persentase penduduk menggunakan jamban sehat	Persen	72,39	82,49
Persentase Desa Siaga Aktif	Persen	99,9	99,9**
Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	Persen	96,71	94,9
Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar	Persen	66,64	66,64**
Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi	Puskesmas	1028	1083
Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi	Rumah Sakit	320	376
Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota	Persen	94,33	92,12
Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan	Persen	84,46	85,51
Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (*Treatment Success Rate*)	Persen	67	73,16
Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI >90%	Persen	93.8	44,8
Prevalensi Hipertensi	Persen	39,6	39,6
Persentase Kabupaten/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	Persen	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2020
Lakip Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, diolah
Keterangan:
-) Data tidak ada
*) Data Sementara
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

Sejak awal tahun 2020 yang lalu telah terjadi pandemi COVID-19, yang mengakibatkan adanya perubahan sistem tatanan kehidupan, baik ditingkat global, nasional maupun ditingkat daerah. Dalam upaya menangani penyebaran pandemi COVID-19 yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai upaya pencegahan. Penanganan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 dilakukan secara komprehensif, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

1. Upaya Promotif

   Upaya promotif dilakukan mulai dari sosialisasi, publikasi dan edukasi kepada masyarakat, yaitu mengedukasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar menerapkan protokol kesehatan, serta menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Upaya promotif juga dilakukan melalui penyebaran dan penempelan *leaflet* tentang pandemi COVID-19, serta menggalang peningkatan partisipasi masyarakat dan seluruh sektor untuk membantu penanganan pandemi COVID-19, sosialisasi melalui media-media informasi, baik radio, televisi, dan memanfaatkan media sosial seperti *facebook*, *instagram* serta penyuluhan kesehatan oleh tenaga kesehatan.

2. Upaya Preventif

   Upaya preventif, yang telah dilakukan meliputi: a) penyelidikan epidemiologi, pemantauan, dan pendataan kepada seluruh kriteria kasus beserta kontak eratnya; b) melakukan analisa terhadap peningkatan kasus, pemetaan persebaran kasus, dan kejadian transmisi lokal (pelacakan klaster); c) menerapkan PSBB di daerah zona merah, yakni memberlakukan dan mengawasi pelaksanaan *social distancing*, seperti meliburkan anak sekolah dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rumah, memberlakukan bekerja dari rumah secara bergantian / *Work From Home* (WFH), membatasi kegiatan di tempat umum dan membatasi kegiatan yang mengumpulkan massa; d) melaksanakan pemeriksaan *rapid test* bagi masyarakat, dan e) membuat Alat Pelindung Diri (APD)/masker secara mandiri dan membagikannya kepada masyarakat, membagikan *hand sanitaizer*, pengadaan sarana cuci tangan di tempat umum, dan penyemprotan disinfektan.

3. Upaya Kuratif

   Upaya kuratif dilakukan melalui: a) menyiapkan tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit untuk melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19, pelayanan kesehatan baik bagi masyarakat yang dengan gejala maupun yang Orang Tanpa Gejala (OTG), b). menyediakan obat-obatan untuk menangani kasus pandemi COVID-19 dan penyediaan/ pemenuhan alat-alat kesehatan untuk penanganan pasien COVID-19 dan menyediakan sarana rujukan yang aman untuk pasien COVID-19.

4. Upaya Rehabilitatif

   Upaya rehabilitatif dilakukan melalui pemantauan kepada pasien COVID-19 yang telah sembuh. Untuk mengetahui perkembangan kesehatannya dan agar tetap menerapkan protokol kesehatan.

   Upaya-upaya penangan pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat tidak hanya oleh sektor kesehatan saja, tetapi melibatkan lintas sektor lainnya. Semua perangkat daerah dilingkungan pemerintahan berperan dalam penanganan dan penyebaran pandemi COVID-19 minimal di lingkungan tempat kerjanya. Disamping sektor pemerintah, peran sektor swasta/dunia usaha, sektor pendidikan perguruan tinggi, media massa serta komunitas/masyarakat juga dilibatkan. Banyak sektor-sektor tersebut berperan dalam penggalangan dana untuk membantu pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, dan pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit.

Selain hal tersebut diatas, Provinsi Jawa Barat mengemban amanat untuk menurunkan angka prevalensi *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pencegahan *stunting* penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak Indonesia dari risiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Bahkan, *stunting* dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Di Indonesia, *stunting* merupakan masalah serius dan juga merupakan masalah gizi utama yang sedang dihadapi. Bila masalah ini bersifat kronis, maka akan mempengaruhi fungi kognitif yakni tingkat kecerdasan yang rendah dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Masalah *stunting* memiliki dampak yang cukup serius; antara lain, jangka pendek terkait dengan morbiditas dan mortalitas pada bayi/balita, jangka menengah terkait dengan intelektualitas dan kemampuan kognitif yang rendah, dan jangka panjang terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan masalah penyakit degeneratif di usia dewasa.

Prevalensi *stunting* selama 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah *stunting* perlu ditangani segera. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 menunjukkan 30,8 persen atau sekitar 7 (tujuh) juta balita menderita *stunting*. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita (SSGB) Tahun 2019, prevalensi *stunting* balita di Provinsi Jawa Barat masih relatif tinggi yaitu sebesar 26,2 persen dari total balita. Walaupun angka ini telah mencapai di bawah rata-rata nasional sebesar 27,67 persen, namun kondisi tersebut masih termasuk dalam kategori masalah kesehatan masyarakat tinggi menurut WHO (2010). Badan Internasional yang membidangi Kesehatan WHO menetapkan ambang batas toleransi prevalensi *stunting* pada angka maksimal 20 persen.

Berdasarkan Status Gizi (PSG) Tahun 2017 menunjukkan prevalensi balita *stunting* di Indonesia masih tinggi, yakni 29,6 persen di atas batasan yang ditetapkan WHO yaitu 20 persen. *Stunting* pada anak balita merupakan konsekuensi dari beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan kemiskinan, termasuk gizi, kesehatan, sanitasi dan lingkungan. Terdapat 5 (lima) faktor utama penyebab *stunting* yaitu kemiskinan, sosial dan budaya, peningkatan paparan terhadap penyakit infeksi, kerawanan pangan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

"*Jabar Zero Stunting*" adalah satu gerakan masif untuk mewujudkan prevalensi *stunting* pada tahun 2023 menjadi lebih kecil dari standar WHO yaitu <20 persen. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 dan 2018, serta Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019. Provinsi Jawa Barat telah berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* sebanyak 9,1 persen dengan rata-rata penurunan 1,51 persen per tahun. Adapun gambaran penurunan prevalensi *stunting* di Provinsi Jawa Barat pada level nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.32
Penurunan Prevelensi *Stunting* di Indonesia
Tahun 2013 – 2019

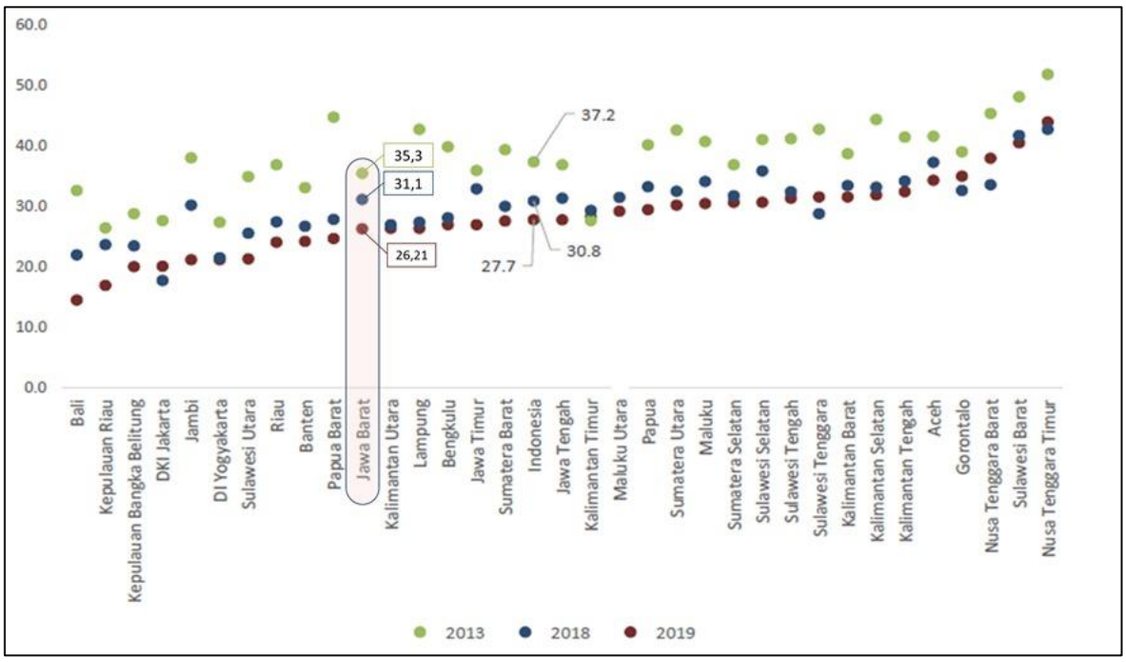

Sumber: RISKESDAS (2013), RISKESDAS (2018), SSGBI-SUSENAS (2019)

Provinsi Jawa Barat perlu mengoptimalkan upaya penurunan *stunting,* sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri sehubungan program *stunting*; bahwa program-program terkait pengentasan kemiskinan dan *stunting* diharapkan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena pengentasan kemiskinan dan *stunting* sangat erat kaitannya dengan program prioritas Nasional yang berkenaan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan berkualitas.

Dalam upaya sinergi lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* di Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Kabupaten/Kota Lokus Prioritas sejak Tahun 2018. Pemilihan Kabupaten/Kota Lokus ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan didasarkan atas kriteria jumlah dan prevalensi balita *stunting*, yang dibobot dengan tingkat kemiskinan provinsi (desa-kota). Berikut Tabel Jumlah Kabupaten/Kota Lokus *Stunting* Tahun 2018-2020.

Tabel 2.22
Jumlah Kabupaten/Kota Lokus *Stunting*
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2022

No	Jumlah Kabupaten/Kota Lokus *Stunting*				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor

No	Jumlah Kabupaten/Kota Lokus *Stunting*				
	2018	2019	2020	2021	2022
2	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi
3	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Cianjur
4	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung
5	Kabupaten Garut	Kabupaten Garut	Kabupaten Garut	Kabupaten Garut	Kabupaten Garut
6	Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya
7	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Kuningan
8	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon
9	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Majalengka
10	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Sumedang
11	Kabupaten Subang	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Indramayu
12	Kabupaten Karawang	Kabupaten Subang	Kabupaten Subang	Kabupaten Subang	Kabupaten Subang
13	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang
14	-	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat
15	-	-	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi
16	-	-	Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi
17	-	-	Kota Depok	Kota Depok	Kota Depok
18	-	-	Kota Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung
19	-	-	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Ciamis
20	-	-	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Purwakarta
21	-	-	-	Kota Bogor	Kota Bogor
22	-	-	-	Kota Cimahi	Kota Cimahi
23	-	-	-	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya
24	-	-	-	-	Kabupaten Pangandaran
25	-	-	-	-	Kota Cirebon
26	-	-	-	-	Kota Sukabumi
27	-	-	-	-	Kota Banjar
Jumlah	**13**	**14**	**20**	**23**	**27**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2021 (diolah)

Pencegahan *stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan *stunting*. Intervensi gizi spesifik menyasar penyebab *stunting* yang meliputi

kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh dan pengobatan penyakit infeksi. Intervensi gizi sensitif mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Upaya Percepatan pencegahan *stunting* akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen, artinya pendekatan intervensi dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas. Untuk mencapai keterpaduan/integrasi tersebut diperlukan penyelarasan perencanan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan terkait dengan penanganan *stunting* oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa, antara lain peningkatan akses gizi masyarakat, akses terhadap air bersih, perbaikan sanitasi, dan sebagainya. Pendekatan intervensi konvergensi merupakan penguatan aksi-aksi tata kelola (*governance*): pengkoordinasian, pengerahan, dan pegarahan (*steering*) dalam rangka penguatan dan integrasi pelaksanaan kegiatan prioritas penurunan *stunting* yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Terdapat 3 (tiga) aspek dan 8 (delapan) aksi konvergensi untuk memperkuat pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* secara terintegrasi, yaitu:

1. Aspek Internalisasi program dan kegiatan prioritas penurunan *stunting* ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Diawali dengan melakukan analisis situasi (aksi #1), penyusunan rencana kegiatan (aksi #2) serta pelaksanaan rembug stunting (aksi #3).
2. Aspek Penguatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam penurunan *stunting*, dilaksanakan melalui penyusunan Peraturan Bupati/Walikota yang menjelaskan peran dan kewenangan desa sebagai rujukan bagi pemerintah desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBDes termasuk Dana Desa untuk melaksanakan kegiatan integrasi intervensi penurunan *stunting* di tingkat desa (Aksi #4). Aksi #5 adalah penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang berfungsi untuk membantu desa dalam

memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi penurunan *stunting* di tingkat desa.

3. Aspek Pemantauan dan Evaluasi, yaitu dilaksanakan melalui pengembangan sistem manajemen data (aksi #6) di tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan aksi-aksi integrasi lainnya (aksi #1, aksi #2, dan aksi #8). Pada aspek ini juga dilaksanakan aksi #7: pengukuran dan publikasi angka *stunting*, yaitu upaya pemerintah kabupaten/kota untuk memperoleh data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa. Aksi berikutnya adalah Reviu Kinerja Tahunan (Aksi #8), yaitu reviu terhadap kinerja penurunan *stunting* dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pendekatan intervensi prioritas merupakan serangkaian kegiatan prioritas yang berdampak langsung (intervensi spesifik) maupun tidak langsung (intervensi sensitive) terhadap penurunan balita *stunting*.

Gambar 2.33
Intervensi Pencegahan *Stunting*

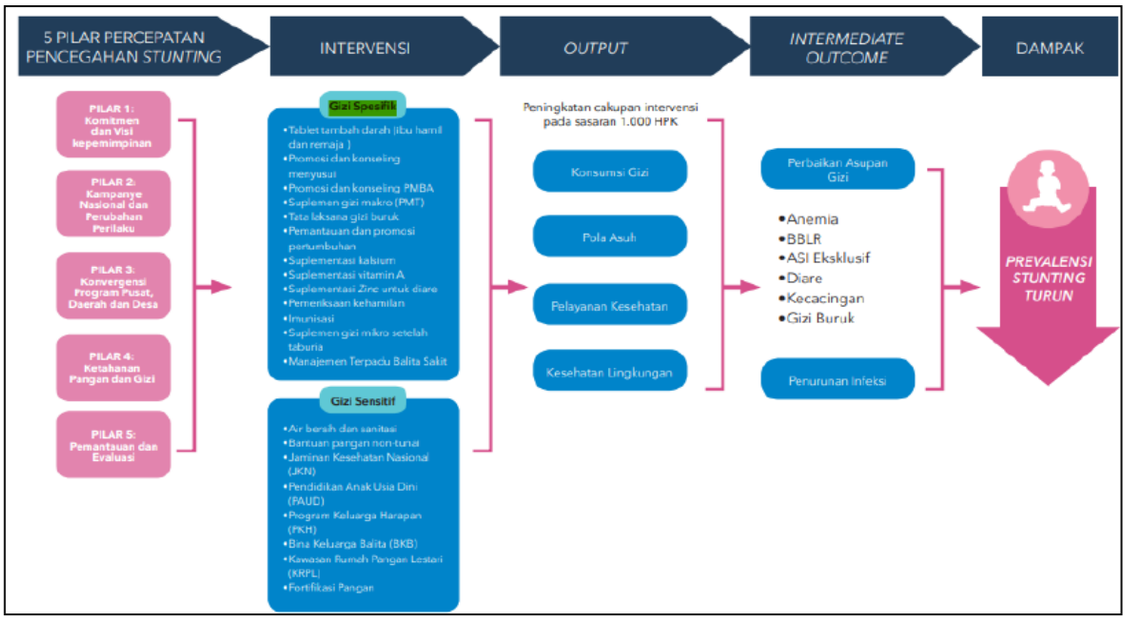

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan bidang urusan pekerjaan umum di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa indikator, seperti Tingkat Kemantapan Jalan, Kondisi Baik

Jaringan Irigasi, Cakupan Pelayanan Air Minum dan lain-lain. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang terkait dengan infrastruktur pelayanan dasar.

Berdasarkan statusnya, sistem jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 250/KPTS/M/2015 Tanggal 31 April 2015, panjang jaringan jalan nasional adalah 1.789,200 km dan panjang jaringan jalan provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620 / Kep. 1086-Rek Tanggal 4 November 2016 adalah 2.360,580 km. Adapun berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1350-Rek/2016 tanggal 23 Desember 2016 panjang jaringan jalan kabupaten/kota adalah 43.570,184 km. Tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Adanya perubahan metode penghitungan menyebabkan tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2018 turun menjadi 90,18 persen dan meningkat di tahun 2019 menjadi 91,90 persen.

Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas lahan pertanian. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi baik jaringan irigasi, yang menjadi kewenangan provinsi. Program rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi telah berhasil meningkatkan jaringan irigasi dalam kondisi baik dari 69,65 persen di tahun 2015 menjadi 74,01 persen di tahun 2018. Namun keterbatasan anggaran menyebabkan tingkat kondisi baik jaringan irigasi turun menjadi 69,53 persen di tahun 2019.

Salah satu infrastruktur pelayanan dasar yang terus dibangun adalah infrastruktur yang terkait dengan penyediaan air minum. Cakupan pelayanan air minum terus meningkat, dimana persentase rumah tangga pengguna air minum pada tahun 2015 sebesar 67,13 persen naik menjadi 78,78 persen pada tahun 2019. Indikator lain yang terkait dengan pelayanan persampahan yakni cakupan pelayanan persampahan. Tahun 2019 cakupan pelayanan persampahan mencapai 69,01 persen meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 65,65 persen.

Tabel 2.23
Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Kondisi Baik dan Sedang	Persen	97,80	98,01	98,17	90,18
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	Persen	69,65	72,06	73,95	74,01
Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	67,12	71,14	73,17	76,85
Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	61,13	66,26	67,11	67,87
Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	61,37	65,64	67,01	70,74
Cakupan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman	Persen	N/A	N/A	N/A	72,00
Persentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	n/a	n/a
Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air	Tahapan	4	4	n/a	n/a
Persentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat	Persen	1,51	1,77	n/a	n/a
Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di WS. Kewenangan Provinsi	m3	131.800	520.000	n/a	n/a
Persentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	Persen	100	100	n/a	n/a
Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	Persen	58,33	60,73	n/a	n/a
Persentase Data Sumber Daya Air yang dilayani	Persen	100	100	n/a	n/a
Bertambahnya luas sawah yang terlayani Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi	Ha	n/a	86,29	88,31	88,31
Persentase ketersediaan air terhadap kebutuhan air baku	Persen	n/a	51,5	53,5	55,5
Persentase luas tanam di sawah yang terairi terhadap total luas tanam keseluruhan di Daerah Irigasi kewenangan Provinsi	Persen	220	220	245	250
Persentase jaringan irigasi kewenangan provinsi yang berkinerja baik	Persen	69,65	72,06	73,95	74,01
Persentase kerusakan infrastruktur SDA dan irigasi yang dapat ditangani	Persen	n/a	100	100	100

Sumber: Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat; Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 2020

Tabel 2.24
Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Kondisi Baik dan Sedang	Persen	91,90	81,54

Indikator	Satuan	2019	2020
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	Persen	69,53	69,53**
Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	78,78	79,59
Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	69,01	69,69
Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	72,44	73,31
Cakupan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman	Persen	74,57	75,36
Persentase Luasan Genangan Permukiman yang Tertangani	Persen	29,20	36,93
Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Persen	0,29	0,02
Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Persen	52,20	53,58
Tingkat implementasi rekomendasi yang dihasilkan oleh kelembagaan Sumber Daya Air	Persen	50	50
Persentase Titik Terdampak Banjir dan Kekeringan yang terkendali	Persen	8	8

Sumber: Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat; Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 2020

Keterangan: ** Data Realisasi Tahun 2019, Tahun 2020 akan realease pada TW II Tahun 2021

2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan bidang urusan perumahan dan kawasan pemukiman di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari capaian indikator cakupan rumah layak huni dan jumlah unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki. Pada tahun 2015 cakupan rumah layak huni sebesar 92,70 persen, meningkat menjadi 98,72 persen pada tahun 2019. Adapun jumlah unit rumah tidak layak huni yang sudah diperbaiki selama periode Tahun 2015-2019 mencapai 161.874 unit.

Tabel 2.25
Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Cakupan Rumah Layak Huni	Persen	92,70	92,78	93,12	98,46
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	12.493	9.801	32.152	53.373
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	Persen	82,64	78,00	80,65	80,95
Rasio Permukiman Layak	Poin	n/a	n/a	0,9928	0,9948
Tingkat kualitas kawasan permukiman	Persen	n/a	n/a	-	-

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2020

Tabel 2.26
Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Cakupan Rumah Layak Huni	Persen	98,72	99,19
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	60.800	56.004
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	Persen	79,59	86,6
Rasio Permukiman Layak	Poin	0,9952	0,9952
Tingkat kualitas kawasan permukiman	Persen	6,39	12,79

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2020
Keterangan: -) indikator ini sudah tidak digunakan lagi di tahun 2020

Indikator Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun yaitu di tahun 2015 sebesar 82,64 persen dan menurun di tahun 2018 menjadi 80,95 persen. Sedangkan indikator Rasio Permukiman Layak, selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami tren yang meningkat.

2.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, terbib dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari berbagai indikator, diantaranya adalah pada tahun 2019 Tingkat Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sektor Pembangunan mencapai 85 persen, Tingkat Pengurangan Korban Jiwa Akibat Bencana Alam mencapai 80 persen, Tingkat Penanganan Keadaan Darurat Bencana mencapai 90 persen, dan Tingkat Pemulihan Pasca Bencana 80 persen.

2.3.1.6 Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Permasalahan PPKS terbanyak di Provinsi Jawa Barat yaitu fakir miskin, penyandang cacat, dan lanjut usia terlantar. Data PPKS di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi selama periode 2015-2019. Jumlah PPKS pada tahun 2019 berjumkah 5.872.900 orang, Jumlah PPKS yang mendapat bantuan sebanyak 1.646 orang dan jumlah sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi 3.052 unit.

Tabel 2.27
Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Jumlah PPKS	orang	6.045.376	6.548.234	7.032.533	7.032.533
Jumlah PSKS	Orang	-	-	-	64.165
Jumlah PPKS yang Mendapat Bantuan	Orang	644.268	643.618	710.539	2.443
Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	unit	3.518	5.350	2.978	3.052
Persentase yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya	Persen	0.88	0.88	1,28	1,48
Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	Persen	0,33	0,33	0,44	1,26
Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	Persen	0,64	0,64	0,77	6,44
Persentase PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	5,48	5,48	6,63	11,3
Persentase PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	2,56	2,56	3,1	9,5
Persentase sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	1,19	1,19	1,30	3,4
Persentase peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Persen	4,32	4,32	5,24	6,3
Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	Persen	1,93	1,93	2,33	-2,33
Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya	Persen	0,33	0,33	0,44	1,26

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Tabel 2.28
Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Jumlah PPKS	orang	5.872.900	5.872.900**
Jumlah PSKS	Orang	68.133	68.133**
Jumlah PPKS yang Mendapat Bantuan	Orang	1.646	1.646**
Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	unit	3.052	3.052**
Persentase yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya	Persen	72,44	72,44**

Indikator	Satuan	2019	2020
Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	Persen	53,81	53,81**
Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	Persen	6,42	6,42**
Persentase PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	45,49	45,49**
Persentase PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	1,96	1,96**
Persentase sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	0,85	0,85**
Persentase peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Persen	0,59	0
Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	Persen	17,28	17,28**
Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya	Persen	53,81	39.45

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020
Keterangan:
*) Data Sementara
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

Selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 persentase PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, persentase sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan persentase peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun. Sementara itu, Indikator yang menunjukkan tren fluktuatif cenderung meningkat adalah Indikator persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya. Sedangkan indikator yang mengalami tren selalu meningkat adalah persentase PPKS yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya, persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar, persentase PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kualitas hidupnya, persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya.

2.3.1.7 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor-faktor produksi tidak dapat digunakan

dan dimanfaatkan secara optimal. Terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat beberapa indikator yang menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu tingkat kesempatan kerja, persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi, jumlah wirausaha baru, dan rasio penduduk yang bekerja. Kondisi ini menunjukkan kinerja pelayanan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat semakin baik. Pada periode yang sama, masih terdapat juga indikator lain yang menunjukkan belum optimalnya kinerja ketenagakerjaan antara lain persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan, persentase serapan tenaga kerja, persentase fasilitasi penyelesaian kasus calon tenaga kerja migran dan tenaga kerja migran, persentase penyelesaian kasus hubungan industrial, dan persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tabel 2.29
Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	20.586.356	21.075.899	22.391.003	22.628.122
Rasio penduduk yang bekerja	Persen	91,1	91,28	91,78	91,83
Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91,28	91,11	91,78	91,83
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	60,34	60,65	63,34	62,92
Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,72	8,89	8,22	8,17
Pencari Kerja yang Sudah Ditempatkan	persen	40,24	47,57	n/a	n/a
Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Persen	2,78	2,29	1,57	1,00
Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0,38	0,34	0,34	0,38
Persentase Serapan Tenaga Kerja	Persen	75,79	72,16	87,67	54,24
Jumlah wirausaha baru	Orang	3380,00	640,00	280,00	620,00
Persentase penyelesaian	Persen	94,00	90,70	87,52	86,97

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
kasus hubungan industrial					
Persentase fasilitasi penyelesaian kasus Calon Tenaga Kerja Migran dan Tenaga Kerja Migran	Persen	72,99	63,64	55,55	66.11
Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	14,79	14,59	12,63	11,08

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 2020

Tabel 2.30
Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	23.81 (Juta Jiwa)	24,21 (Juta Jiwa)*
Rasio penduduk yang bekerja	Persen	92,02	89,54*
Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	92,02	89,54* *
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	65,07	64,53
Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	7,99	10,46
Pencari Kerja yang Sudah Ditempatkan	persen	35,57	35,57**
Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Persen	0,17	0,18
Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0,25	0,08*
Persentase Serapan Tenaga Kerja	Persen	35,57	64,92
Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Persen	57,63	57,63**
Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	13,46	13,46**
Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Persen	18,08	2,55
Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	Persen	19,20	20,25

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 2020
Keterangan :
*) Sumber Berita Resmi Statistik BPS, Agustus 2020
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan strategi untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Salah satu komponen untuk mengetahui tingkat pemberdayaan gender adalah sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik yang dapat dilihat melalui keterwakilan perempuan di parlemen. Sedangkan untuk pembangunan terkait pemenuhan hak anak dapat dilihat dari upaya Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Tingkat keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Jawa Barat untuk suatu periode dapat diketahui setiap 5 (lima) tahun sekali mengikuti pemilihan umum yang diadakan dalam jangka waktu tersebut. Pada periode 2014-2019 anggota parlemen perempuan di Provinsi Jawa Barat adalah 22 persen dari keseluruhan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 100 orang. Pada Pemilu periode 2019-2024, meski jumlah perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat meningkat menjadi 24 orang, terdapat pula peningkatan jumlah laki-laki yang signifikan menjadi 96 orang sehingga secara keseluruhan, persentase keterwakilan perempuan legislatif menurun menjadi 20 persen. Hal ini akan berlangsung demikian hingga akhir masa jabatan pada tahun 2024.

Pada aspek pemenuhan hak anak, hingga tahun 2018 terdapat 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan meningkat menjadi 23 kabupaten/kota pada tahun 2019.

Tabel 2.31
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	38,74	49,30	43,89	42,37
Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	7	8	15	19
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	38,74	40,3	43,89	42,37
Perkembangan Perolehan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional	Jumlah Kabupaten /Kota	6	*n/a	15	19
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100	100
Persentase Kabupaten/Kota mendapat Penghargaan KLA Tingkat Nasional	Persen	25,92	*n/a	55,55	70,37
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Persen	100	100	100	100
Persentase perempuan di legislatif	Persen	22,00	22,00	22,00	22,00
Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender	Persen	**) IPG 88,35 **) IDG 68,87	**) IPG 89,56 **) IDG 69,02 **) Jumlah APE Kabupate	**) IPG 89,56 **) IDG 71,15	**) IPG 89,18 **) IDG 70,04 **) Jumlah APE Kabupaten /Kota 24

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
			n/Kota 13		
Persentase keberhasilan penanganan kasus KED terhadap perempuan dan anak	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase kabupaten/kota yang mendapat input peningkatan kualitas hidup perempuan di Jawa Barat	Persen	**) 184 Desa /Kel P2WKSS Aktif **) Jumlah Kel PP melalui Program Pekka 493	**) 211 Desa /Kel P2WKSS Aktif **) Jumlah Kel PP melalui Program Pekka 493	**) 238 Desa /Kel P2WKSS Aktif **) Jumlah Kel PP melalui Program Pekka 379	**) 265 Desa /Kel P2WKSS Aktif **) Jumlah Kel PP melalui Program Pekka 379
Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*)	Persen	2,2	2,05	2,24	2,49

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Catatan: # Tahun 2015 dan Tahun 2017 tidak ada penilaian Anugrah Parahita Ekapaya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
* Angka satuan IPG Tahun 2015 mengalami perubahan menjadi persen, sedangkan sampai dengan Tahun 2014 menggunakan angka satuan poin.
Data IPG tahun 2014 dalam satuan persen baru diperoleh pada awal tahun 2018 dari KPPA.

Tabel 2.32
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	46,45	46,79
Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	23	85,18
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	46,45	46,79
Perkembangan Perolehan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional	Kabupaten/Kota	23	23**
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100
Persentase Kabupaten/Kota mendapat Penghargaan KLA Tingkat Nasional	Persen	85,18	85,18
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Persen	100	100
Persentase perempuan di legislatif	Persen	20,00	20
Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender	Persen	88,89	44
Persentase keberhasilan penanganan kasus KED terhadap perempuan dan anak	Persen	100,00	100
Persentase kabupaten/kota yang mendapat input peningkatan kualitas hidup perempuan di Jawa Barat	Persen	100,00	45
Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*)	Persen	2,52	2,55

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Keterangan:
*) Data Sementara
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.1.9 Pangan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat dicerminkan dari besaran skor Pola Pangan Harapan (PPH), skor PPH maksimal adalah 100, yang berarti memiliki tingkat keberagaman yang optimal. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan Provinsi Jawa Barat. Selain hal tersebut, skor PPH digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Selama periode 2015 – 2019 perkembangan pola konsumsi pangan didominasi oleh kelompok padi-padian terutama beras sedangkan kontribusi ubi, sayur dan buah masih rendah. Indikator terkait ketahanan pangan adalah konsumsi energi dan konsumsi protein. Terjadi kenaikan konsumsi dari 2.161 kkal/kap/hari pada tahun 2018 menjadi 2.165 kkal/kap/hari pada tahun 2019 (WPNPG 2012) dan untuk konsumsi protein mengalami penurunan dari 63,3 gr/kap/hari pada tahun 2018 menjadi 62,9 gr/kap/hari pada tahun 2019 (WNPG 2012). Sedangkan indikator lainnya yang ada pada bidang pangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.33
Indikator Kinerja Urusan Pangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/Tidak Ada	ada	ada	ada	ada
Ketersediaan Pangan Utama	Kg / kapita / tahun	145,46	154,00	152,19	149,61
Konsumsi Beras per Kapita	Kg / kapita / tahun	86,95	87,48	83,93	82,4
Produksi Komoditas Peternakan:					
a. Daging	Ton	680.650	873.311	991.154	1.057.078
b. Telur	Ton	210.198	222.865	229.870	234.223
c. Susu	Ton	249.947	302.559	310.461	324.817
Jumlah Sertifiksi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Peternakan	Unit	56	58	105	195
Peningkatan Mutu Produk Peternakan:					
a. Daging	Persen	71	87	83,92	90,02
b. Telur	Persen	87	83	90,85	97,41

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
c. Susu	Persen	80	72	99,64	86,64
Jumlah Populasi ternak:					
a. Sapi Potong	Ekor	425.826	413.372	405.334	406.241
b. Sapi Perah	Ekor	116.400	119.595	115.827	119.349
c. Kerbau	Ekor	110.660	102.571	102.743	103.734
d. Domba	Ekor	11.575.359	10.038.828	11.425.574	11.608.559
e. Kambing	Ekor	2.610.375	1.237.990	1.251.354	1.274.548
f. Ayam Ras Petelur	Ekor	14.469.405	15.143.460	15.157.182	15.717.734
g. Ayam Ras Pedaging	Ekor	104.015.708	108.304.978	122.314.586	125.088.799
h. Ayam Buras	Ekor	27.504.336	25.842.311	26.166.517	26.712.982
i. Itik	Ekor	9.689.260	10.734.277	10.158.658	12.062.171
Persentase Produk Peternakan yang sesuai SNI:					
a. Daging	Ton	71	87	83,92	90,02
b. Telur	Ton	87	83	90,85	97,41
c. Susu	Ton	80	72	99,64	86,64
Persentase Pelaku Usaha yang Berdaya Saing	Persen	10	10	11	
Jumlah Kawasan Usaha Peternakan	Kawasan	5	5	5	5
Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosa:					
a. *Anthrax*	Kasus/ tahun	0	0	0	0
b. AI	Kasus/ tahun	33	50	38	29
c. *Brucellosis*	Prevalensi	2,35	2,1	1,44	1,79
d. Rabies	Kasus/ tahun	2	2	2	3
Persentase Kapasitas Kompetensi SDM Aparatur dan Masyarakat Bidang Ketahanan Pangan (%)	Persen	0	0	75,98	100
Jumlah Kelompok yang Meningkatkan Usahanya	Kelompok	30	30	66	43
Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan	Poin	84,6/81	86/84,3	88/85,2	85,9
Jumlah Cadangan Pangan Pokok Pemerintah	Ton	223,60	198,50	916,54	792,24
Ketersediaan Informasi, Harga dan Akses pangan	Persen	125,00	124,94	100,00	100,00
Persentase Desa Rawan Pangan yang Tertangani	Persen	38,50	40.96	44,65	47,00
Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat	Kelompok	70	0	184	0
Persentase Capaian Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Persen	0	125	100	100
Persentase Intervensi Lokasi Potensi Rawan Pangan	Persen	38,50	40.96	44,65	47,00

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Jumlah Pelaku Usaha yang Bisa Mengakses Pasar Regional dan Nasional	Orang	5	15	30	Tidak dilanjutkan (direvisi)
Jumlah Sarana Pemasaran Peternakan di Kabupaten/Kota yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal SOP	Unit	8	5	5	Tidak dilanjutkan (direvisi)
Persentase Tingkat Konsumsi Pangan	Persen	103,24	106,81	94,58	Tidak dilanjutkan (direvisi)
Energi	kkal/Kap/ hr)	2010,9	2.165	2259,5	2218
Protein	gr/Kap/hr	58,5	60,5	63,9	64,8
Konsumsi (hewani/ daging, telur, susu)	gr/Kap/hr	54,3	62,41	68,3	70,58
Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi	Poin	78,3	81	80,6	81,6
Persentase Sampel Komoditi Pangan Segar yang Tersertifikat	Persen	85,5	98,5	100	100
Persentase Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan yang sesuai SNI	Persen	n/a	n/a	n/a	84
Nilai Tukar Usaha Peternakan	Poin	117,01	122,37	125,87	127,09

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Tabel 2.34
Indikator Kinerja Urusan Pangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/Tidak Ada	ada	Ada**
Ketersediaan Pangan Utama	Kg/jiwa/tahun	110,45	110,45**
Konsumsi Beras per Kapita	Kg / kapita / tahun	79,40	79,40**
Produksi Komoditas Peternakan:			
d. Daging	Ton	1.059.719	1.021.699*
e. Telur	Ton	296.945	609.741*
f. Susu	Ton	300.337	293.490*
Jumlah Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Peternakan	Unit	502	502**
Peningkatan Mutu Produk Peternakan:			
d. Daging	Persen	58	58**
e. Telur	Persen	80	80**
f. Susu	Persen	80	80**
Persentase Produk Peternakan yang sesuai SNI:			
d. Daging	Ton	58	58**
e. Telur	Ton	80	80**
f. Susu	Ton	80	80**

Indikator	Satuan	2019	2020
Jumlah Kawasan Usaha Peternakan	Kawasan	5	5**
Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosa:			
e. *Anthrax*	Kasus/ tahun	0	0**
f. AI	Kasus/ tahun	26	26**
g. *Brucellosis*	Prevalensi	1,74	1,74**
h. Rabies	Kasus/ tahun	1	1**
Persentase Kapasitas Kompetensi SDM Aparatur dan Masyarakat Bidang Ketahanan Pangan (%)	Persen	51,85	51,85**
Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan	Poin	90,4	92,9
Jumlah Cadangan Pangan Pokok Pemerintah	Ton	831,78	831,78**
Ketersediaan Informasi, Harga dan Akses pangan	Persen	100,00	100,00**
Persentase Desa Rawan Pangan yang Tertangani	Persen	90,40	90,40**
Persentase Capaian Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Persen	100	100**
Persentase Intervensi Lokasi Potensi Rawan Pangan	Persen	90,40	90,40**
Energi	kkal/Kap/hr)	2199	2150
Protein	gr/Kap/hr	62,9	64,9
Konsumsi (hewani/ daging, telur, susu)	gr/Kap/hr	73,08	73,08**
Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi	Poin	84,8	85,2**
Persentase Sampel Komoditi Pangan Segar yang Tersertifikat	Persen	56,31	56,31**
Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang sesuai SNI	Persen	98,46	65,21
Nilai Tukar Usaha Peternakan	Poin	125,01	94,44

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020
Keterangan:
*) Data Sementara
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.1.10 Pertanahan

Data indikator Persentase Luas Lahan Bersertifikat pada tahun 2015 berada di angka 29,12 persen dan meningkat di tahun 2016 menjadi 40,75 persen. Urusan pemerintahan bidang pertanahan menjadi kewenangan urusan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017. Pada Tahun 2020 Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebesar 48,84 Persen.

2.3.1.11 Lingkungan Hidup

Sesuai dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pembangunan yang dilaksanakan perlu mempertimbangkan 3 (tiga) pilar,

yaitu pilar ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang agar dapat berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup ditujukan agar dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan masih dapat ditoleransi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup juga diupayakan tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal (*economy feasible*), serta tetap dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan mendukung kesejahteraan oleh masyarakat.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dapat direpresentasikan oleh beberapa indikator utama. Untuk periode Tahun 2015-2019, indikator utama yang digunakan adalah Persentase Tutupan Lahan yang Berfungsi Lindung terhadap Luas Wilayah, Pencapaian Status Mutu Sungai dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang, dan Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Pada tahun 2018, Persentase Tutupan Lahan yang Berfungsi Lindung terhadap Luas Wilayah mencapai 40,96 persen, Pencapaian Status Mutu Sungai dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang mencapai sebesar 89,96 persen, dan Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca mencapai 3,85 persen. Adapun indikator lainnya serta capaiannya hingga tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.34. Pada tahun 2019, indikator utama yang digunakan adalah Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan capaian 3,85 persen, Indeks Kualitas Air dengan capaian 42,37 persen, dan Indeks Kualitas Udara dengan capaian 79,4 persen. Adapun indikator lainnya serta capaian pada Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35
Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Persentase Tutupan Lahan yang Berfungsi Lindung terhadap Luas Wilayah	Persen	37,2	37,2	38,52	40,96
Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	10,23	11,45	12,56	12,91
Pencapaian Status Mutu Sungai dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang	Persen	23,45	56,12	96,55	89,96
Indeks Kualitas Air	Poin	40	40,41	42,07	39.87
Indeks Kualitas Udara	Poin	74,63	51,49	78,91	72.73
Jumlah lokasi Program kampung Iklim (PROKLIM)	Kampung iklim	23,00	61,00	155,00	313,00

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Taman	1,00	6,00	12,00	13,00
Jumlah Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung dan Non Lindung dalam Pelaksanaan Pembangunan	Kawasan	2,00	4,00	6,00	8,00
Jumlah Contoh Uji yang Terlayani di Laboratorium	Uji sampel	n/a	n/a	2139,00	2876,00
Jumlah Kabupaten/Kota yang terlayani Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional	Kab/kota	n/a	n/a	4,00	4,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. 2020

Pada tahun 2020, indikator utama yang digunakan adalah Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan capaian 3,87 persen, Indeks Kualitas Air dengan capaian 42,84 persen, dan Indeks Kualitas Udara dengan capaian 79,58 persen. Adapun indikator lainnya serta capaian pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.36
Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	3,85	3,87
Indeks Kualitas Air	Poin	42,73	42,84
Indeks Kualitas Udara	Poin	79,4	79,58
Peningkatan jumlah dokumen rencana kebijakan strategis yang dievaluasi dampak dan risikonya melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Persen	16,67	54,16
Peningkatan Dokumen Lingkungan yang Dinilai dan Diawasi Implementasinya	Persen	47,00	89,16
Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter COD	Persen	91,38	136,32
Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SOX	Persen	87,34	107,9
Persentase Peningkatan Desa Berbudaya Lingkungan	Persen	78,63	81,84
Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persen	94,23	110,74
Persentase Peningkatan Kemitraan Lingkungan	Persen	28,80	40
Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK Kabupaten/Kota	Persen	18,52	60
Persentase Peningkatan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Pelaku	Persen	73,50	76,33

Indikator	Satuan	2019	2020
Usaha dan/kegiatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup			
Persentase Peningkatan Sampah yang Terolah di TPA/TPST Regional	Persen	55,79	53,78
Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Operasional TPPAS regional	Persen	0,78	0,80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. 2021

2.3.1.12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Ketersediaan basis data kependudukan skala kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2017 berada dalam kategori "ada". Indikator lainnya pada tahun 2019 indikator Akurasi Data Kependudukan mencapai 80,53 persen, Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan mencapai 16 (enam belas) perangkat daerah, Tertib Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 91,84 persen dan Indikator Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018 mencapai angka 91,44 persen.

Tabel 2.37
Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik	Persen	88,61	97,07	96,79	96,79**
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Akurasi Data Kependudukan	Persen	98,63	96,83	80,53	81,37*
Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan	Perangkat Daerah	4,00	15,00	16,00	64

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, 2020
Keterangan:
*) Data Sementara
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

Data kinerja pada tabel di atas dimulai dari tahun 2017 sebab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru terbentuk pada tahun 2017.

Data capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2018 adalah capaian sesuai Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Tahun 2013–2018.

Terdapat kesenjangan antara capaian kinerja tahun 2017, 2018 dengan 2019, disebabkan tidak semua indikator yang digunakan pada Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018 digunakan pada RPJMD Tahun 2018–2023.

2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai maksud untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Ukuran keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa digunakan indikator yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.38
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyakarat dan Desa
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Terlibat dalam Kegiatan TMMD, BSMSS, dan BBGRM	Persen	100	100
Persentase Lembaga Lembaga Budaya dan Keswadayaan Masyarakat	Persen	100	100**
Persentase Posyandu Mandiri	Persen	27,06	27,06**
Identifikasi Potensi Kawasan Perdesaan di Perbatasan	Kabupaten	6	6**
Jumlah Kerjasama Pengembangan Potensi Kawasan Perdesaan di Perbatasan	Kabupaten	2	2**
Jumlah Desa yang sudah Menerapkan SISKEUDES	Desa	90	90**
Persentase anggaran APB-Desa di atas 30% untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persen	100	100**
Jumlah desa yang sudah memiliki rencana tata ruang wilayah desa	Dokumen	40	40**
Persentase Kader Terlatih dalam Kelembagaan Desa	Persen	73,26	73,26**
Jumlah dan jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) di Jawa Barat	Buah	27	27**
Persentase Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	70	70**

Indikator	Satuan	2019	2020
Persentase Kerjasama Pengembangan Kapasitas Produksi Desa, dan Akses Pemasaran Potensi Desa	Persen	30	30**
Persentase Kader Terlatih dalam Kelembagaan Desa	Persen	79,74	79,74**
Persentase Desa Mandiri	Persen	1,58	5,08
Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan TMMD/BBGRM/BSMSS	Jumlah	TMMD 12 Kab, BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota di wilayah Kodam III Siliwangi	MMD 12 Kab, BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota di wilayah Kodam III Siliwangi
Jumlah KPD	KPD	653,00	440
Persentase BUMDesa aktif	Persen	69,55	92,05
Jenis Inovasi dan TTG yang dihasilkan dari 27 Kabupaten/Kota	Jenis	9,00	25

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020
Keterangan:
*) Data Sementara
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk selama 5 (lima) tahun terakhir yang menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat mencapai 1,48 persen dan menurun hingga 1,30 persen di tahun 2019. Rata-rata jumlah anak per keluarga juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 sebesar 1,2 anak menjadi 1,14 anak pada tahun 2017. Sedangkan Cakupan Peserta KB Aktif menurun dari 9.715.496 orang pada tahun 2015 menjadi 7.126.366 orang di tahun 2019.

Tabel 2.39
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,48	1,43	1,39	1,34
Total *Fertility Rate*	Anak	1,20	1,22	1,14	2,49
Cakupan Peserta KB Aktif	Orang	9.715.496	1.441.317	1.029.212	6.245.099

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Tabel 2.40
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,30	1,11
Total *Fertility Rate*	Anak	2,52	2,55
Cakupan Peserta KB Aktif	Orang	7.126.366	7.126.366**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020
Keterangan :
*) Data Sementara
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.1.15 Perhubungan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan meliputi 4 (empat) bidang pelayanan, yaitu: perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, dan perkeretaapian. Kinerja penyelenggaraan perhubungan darat dapat tercermin dari indikator tingkat ketersediaan sarana, prasarana perhubungan darat dan fasilitas perlengkapan jalan, kinerja perhubungan laut dan ASDP, serta perhubungan udara melalui indikator tingkat ketersediaan prasarana perhubungan udara dan bidang perkeretaapian dapat tercermin dari tingkat pelayanan transportasi kereta api perkotaan di Provinsi Jawa Barat.

Pada rentang waktu Tahun 2015-2020 Indikator Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengalami beberapa perubahan dengan mengacu pada peraturan tentang RPJMD mulai dari Tahun 2015-2016 indikator Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya pada Tahun 2017-2018 indikator Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Tahun 2019 merupakan tahun transisi di Provinsi Jawa Barat sehingga Indikator Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 seiring dengan telah ditetapkanya RPJMD 2018-2023 maka Tahun 2020 Indikator Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengacu

kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Perubahan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Jawa Barat pada rentang 2015-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.41
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2015-2016

No	Indikator	Satuan	2015	2016
1	Jumlah Terminal	Unit	12	12
2	Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	10	10
3	Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guadrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	persen	19,06	20,03
4	Tingkat pelayanan angkutan di jaringan jalan provinsi	persen	88,11	94
5	Tingkat Penurunan pelanggaran muatan lebih	unit	262.552	148.851
6	Tingkat ketersediaan sarpras pemeriksaan kendaraan bermotor	persen	65	76
7	Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru	persen	22,01	51,90
8	Tingkat ketersediaan prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jabar Selatan	persen	58,98	69,69
9	Ketersediaan prasarana jalur kereta api di Jawa Barat	Km	1135,44	1135,44

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tabel 2.42
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2017-2018

No	Indikator	Satuan	2017	2018
1	Jumlah Terminal	Unit	14	14
2	Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	6	6
3	Prosentase Jaringan Trayek yang terevaluasi di Jawa Barat	persen	8,38	22,66
4	Prosentase Keikutsertaan Kab/Kota dalam WTN	persen	55,56	70,37
5	Prosentase Kepemilikan armada angkutan umum AKDP perseorangan menjadi berbadan hukum	persen	79,17	83,13
6	Prosentase Ketersediaan Terminal Tipe B yang memenuhi standar	persen	55,67	56,93
7	Prosentase Angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan	persen	45,77	50,4
8	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (Penyusunan Dokumen Perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan Pengembangan Bandara Nusawiru)	persen	55,56	58,71
9	Prosentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan	Persen	62,42	83,05

No	Indikator	Satuan	2017	2018
	Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Pelabuhan Ratu, Pengembangan Laut dan ASDP)			
10	Prosentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen perencanaan, pembebasan lahan, sosialisasi)	Persen	89,36	91,80
11	Prosentase Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di Jalan Provinsi	persen	26,78	28,67

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tabel 2.43
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2019	2020
1	Jumlah Penumpang Angkutan Umum (Darat, Laut dan ASDP, Kereta Api dan Udara)	Penumpang	260.039.637	Tidak ada
2	Persentase angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan	Persen	57,33	Tidak ada
3	Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat, Laut & ASDP, Kereta Api, dan Udara	Persen	73,61	Tidak ada
4	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, PJU, guardrill dll) pada ruas jalan provinsi	Persen	33,85	Tidak ada
5	Tingkat Ketersediaan Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Persen	52,53	52,62
6	Tingkat Ketersediaan Prasarana Perhubungan Udara	Persen	58,01	58,07
7	Tingkat Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP	Persen	36,16	38,35
8	Tingkat Ketersediaan Jaringan Transportasi Massal Berbasis Rel	Persen	20,4	30,51

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Perkembangan kinerja pembangunan daerah yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat diketahui dari ketersediaan *website* milik pemerintah daerah yang berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah memiliki *website* resmi yang dapat diakses pada alamat https://www.jabarprov.go.id/. Selain *website*, media penyebarluasan informasi juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan adanya media sosial yaitu *facebook, twitter, instagram* dan *youtube*. Sedangkan indikator lainnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.44
Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Keberadaan *Website* Milik Pemerintah Daerah	Ada/tidak	Ada	Ada
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,00	3,58
Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi di Daerah	Persen	93	90
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	90,40	98,15
Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	*Score*	571	610
Tingkat kematangan pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persen	77,99	80,46

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kinerja pembangunan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama periode Tahun 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini dapat diketahui dari Persentase Koperasi Aktif yang mencapai 46,82 persen pada tahun 2019. Selain itu, di tahun yang sama Jumlah Koperasi Aktif sebesar 12.631 koperasi, sedangkan untuk indikator yang lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.45
Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Persentase Koperasi Aktif	persen	65,48	63,79	66,64	43,19
Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha	usaha	8.365	14.868	11.996	16.655
Jumlah Pencetakan Wirausaha Baru	Orang	20.150	19.121	46.887	10.260
Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	16.855	16.542	16.967	11.021
Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha	UMKM	224,00	267,00	1.523	612,00
Persentase Peningkatan Omzet UKM	Persen	5,00	5,00	6,50	16,44
Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi	Persen	5,00	5,00	-4,50	5,00
Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Koperasi (Kop) /Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi	Persen	20,00	6,40	6,70	6,40
Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi UMKM (UMKM) / Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM	Persen	35,00	19,70	18,06	20,10
Jumlah Wirausaha Baru	Unit	1.800,00	3.300,00	5.300,00	9.300,00
Persentase Wirausaha Baru yang menjadi Pelaku Usaha	Unit	100,00	100,00	62,00	75,00

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, 2020
Keterangan: *) Indikator RPJMD 2013-2018

Tabel 2.46
Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Persentase Koperasi Aktif	persen	46,82	58,90
Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	Persen	29,84	27,97
Pertumbuhan Akses Modal KUK	Persen	24,61	24,61**
Pertumbuhan Jumlah Rasio Wirausaha	Persen	1,5	1,5**
Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	12.631	12.631**
Tingkat kepatuhan koperasi	Persen	-	15,17
Laju pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	-	-6,24
Laju pertumbuhan omzet UMKM binaan	Persen	-	8,25
Jumlah usaha pemula	Unit	-	1.300
Persentase pertumbuhan SDM koperasi	Koperasi	-	0

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, 2020
Keterangan:
Indikator RPJMD Tahun 2018-2023
-) indikator baru di tahun 2020
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.1.18 Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *output* dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya peran investasi maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk menarik minat investor. Selama periode Tahun 2015-2019, realisasi investasi PMA dan PMDN di Provinsi Jawa Barat meningkat sebesar 13,15 persen dari Rp121,5 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp137,5 triliun di tahun 2019. Sedangkan dilihat dari jumlah proyek dan serapan tenaga kerja mengalami penurunan dari 37.213 buah proyek dan 349.377 tenaga kerja di tahun 2015 menjadi 15.370 buah proyek dan 130.704 tenaga kerja di tahun 2019. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perijinan) juga mengalami peningkatan dari 77,06 poin menjadi 81,62 poin.

Tabel 2.47
Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perijinan)	Poin	77,06	76,94	77,67	79,56
Jumlah Total Proyek	Buah	37.213	38.057	36.791	39.749
a. PMA	Buah	5.108	5.923	7.151	7.893
b. PMDN	Buah	32.105	32.134	29.640	31.865
Jumlah Total Investasi	Rp. Triliun	121,516	143,04	162,72	162,8

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
a. PMA	Rp. Triliun	71,73	74,99	68,66	74,69
b. PMDN	Rp. Triliun	49,78	68,05	94,05	88,19
Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	349.377	479.751	297.786	242.151
a. PMA	Orang	240.048	295.039	138.921	70.709
b. PMDN	Orang	109.329	184.712	158.865	171.442

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Tabel 2.48
Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perijinan)	Poin	81,62	85,36
Jumlah Total Proyek	Buah	15.370	20.020
a. PMA	Buah	10.455	11.031
b. PMDN	Buah	4.915	8.989
Jumlah Total Investasi	Rp. Triliun	137,5	120,4
a. PMA	Rp. Triliun	88,21	51,4
b. PMDN	Rp. Triliun	49,28	51,4
Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	130.704	113.426
a. PMA	Orang	94.644	85.928
b. PMDN	Orang	36.06	27.498

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.3.1.19 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 2018 Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda di angka 46,70. Pada tahun 2019 Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO) sebesar 52 persen, Indeks Pembangunan Pemuda pada angka 50,00 persen. Peringkat Provinsi Jawa Barat pada *Multievent* Berkebutuhan PEPARPENAS Khusus Nasional berada pada peringkat 5 (lima), dan peringkat Provinsi Jawa Barat pada *Multievent* Nasional POPNAS berada pada peringkat 1 (satu).

Terkait dengan Indeks Pembangunan Pemuda, publikasinya dilakukan oleh Bappenas/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan BPS yang dilakukan mulai tahun 2017. Publikasi tahun 2017 ini memuat Indeks Pembangunan Pemuda tahun

2016, sedangkan capaian tahun 2017 tidak dipublikasikan. Publikasi berikutnya adalah Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2018 dan 2019.

Tabel 2.49
Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Indeks	43,33	43,33	43,33	46,70
Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	44,00	46,00	48,00	50,00
Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional	Orang	739	202	1295	302
Indeks Pembangunan Pemuda	persen	45,83	47,67	47,67 (angka 2016)	46,17
Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional	Peringkat	1	2	1	1
Peringkat Jawa Barat pada *Multievent* Berkebutuhan PEPARPENAS Khusus Nasional	Peringkat	1	0	2	0
Peringkat Jawa Barat pada *Multievent* Nasional POPNAS	Peringkat	1	0	1	0
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Tingkat Kebugaran Masyarakat	Persen	28,17	32,04	32,07	63,50
Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	Persen	75,00	89,00	100,00	110,00
Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha	Orang	1.140	1.440	1.850	2.460
Jumlah Pemuda Jawa Barat yang dibina untuk prestasi Nasional	Orang	7	7	7	9

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Tabel 2.50
Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Indeks	46,70	46,70**
Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	52,00	47,30
Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional	Orang	342	342**
Indeks Pembangunan Pemuda	Persen	50,00	50,00
Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam *Event* Nasional	Peringkat	1	1**
Peringkat Jawa Barat pada *Multievent* Berkebutuhan PEPARPENAS Khusus Nasional	Peringkat	5	5**
Peringkat Jawa Barat pada *Multievent* Nasional POPNAS	Peringkat	1	1**
Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	Persen	110,00	100,00
Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha	Orang	1.082.664	IKK dalam penyusunan

Indikator	Satuan	2019	2020
Jumlah Pemuda Jawa Barat yang dibina untuk prestasi Nasional	Orang	19	5

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020
Keterangan :
*) Data Sementara
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.1.20 Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Provinsi Jawa Barat memiliki kekayaan budaya yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator yang menggambarkan pemajuan kebudayaan adalah persentase seni dan budaya yang dilestarikan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, persentase seni dan budaya yang dilestarikan pada tahun 2019 mencapai 58,21 persen dan Persentase seni budaya dan destinasi wisata yang dipromosikan 77,77 persen. Sedangkan indikator yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun adalah Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) unit menjadi 13 (tiga belas) unit di tahun 2019, Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah dari 3 (tiga) pembinaan menjadi 16 (enam belas) pembinaan dan Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Sejarah dan Permuseuman dari 15 (lima belas) menjadi 30 (tiga puluh). Sedangkan untuk indikator lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.51
Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	7	7	12	12
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah	1.933	2.522	n/a	n/a
Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah	Jumlah Pembinaan	3	3	3	3
Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Sejarah dan	Jumlah Pembinaan	15	25	17	15
Pengusulan HKI	Usulan/ Rekomendasi Per Tahun	1	1	1	1
Pelestarian Seni Tradisi	Jumlah Pembinaan	4	3	3	3

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Jumlah Event/Festival/Pasanggiri/ Lomba/Sayembara Karya Seni	Event Per Tahun	24	12	7	7
Pengusulan HAKI/Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Jumlah Usulan	1	8	5	16,00
Pelestarian seni tradisi, kontemporer dan perfilman	Jenis	7	4	4	4,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Tabel 2.52
Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	13	12
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah	30	44
Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah	Jumlah Pembinaan	16	0
Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Sejarah dan	Jumlah Pembinaan	30	1
Pengusulan HKI	Usulan/ Rekomendasi Per Tahun	1	0
Pelestarian Seni Tradisi	Jumlah Pembinaan	9	1
Jumlah Event/Festival/Pasanggiri/ Lomba/Sayembara Karya Seni	Event Per Tahun	7	155
Persentase seni budaya dan destinasi wisata yang dipromosikan	Persen	77,77	52,38
Pengusulan HAKI/Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Jumlah Usulan	13,00	32
Pelestarian seni tradisi, kontemporer dan perfilman	Jenis	9,00	0
Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	Persen	58,21	37,69
Persentase Benda Koleksi Museum Sri Baduga yang dilestarikan	Persen	26,46 (800 koleksi museum)	9,93(300 koleksi museum)

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.3.1.21 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah, khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data memiliki peran penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Buku Provinsi Dalam Angka dan Buku PDRB Provinsi di Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berada dalam kategori “ada”.

Tabel 2.53
Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Buku Provinsi Dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Provinsi	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Tabel 2.54
Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Buku Provinsi Dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada
Buku PDRB Provinsi	Ada/ Tidak	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.3.1.22 Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa penting.

Tabel 2.55
Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Persentase aplikasi di Pemda yang telah dilakukan *penetration test*	Aplikasi	10	22	22**

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, 2020
Keterangan:
*) Data Sementara
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.1.23 Perpustakaan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Layanan yang diberikan kepada pemustaka antara lain inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi misalnya membaca dengan menggunakan *handphone*, yaitu CANDI (Maca Dina *Digital Library*) memperbanyak buku digital, ekstentifikasi melalui mobil perpustakaan keliling, motor perpustakaan keliling, meningkatkan kegemaran membaca masyarakat antara lain safari/*road show* kegemaran membaca, serta melalui pengembangan KOLECER (Kotak Literasi Cerdas), perlombaan, pengangkatan duta baca, iklan layanan masyarakat di berbagai media, kerja sama dengan berbagai PT, dan kolaborasi dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang transportasi yaitu PT. Grab melalui kegiatan Makan Jengkol (Mari Kita Antar Jemput Buku dengan Kolaborasi), bantuan buku kepada komunitas, pondok pesantren, memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat antara lain pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di berbagai lapisan masyarakat dan komunitas di desa.

Perkembangan literasi untuk membangun kualitas manusia sangat bergantung pada kegemaran membaca masyarakat. Berdasarkan kajian Indeks Membaca Masyarakat di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 mencapai angka 68,16 poin dan sampai dengan tahun 2019 telah mencapai angka 68,50 poin pada kategori cukup.

Sesuai dengan Indeks Membaca Masyarakat di atas, terdapat beberapa variabel yang mendukung Indeks Membaca Masyarakat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.56
Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	513.731	565.435	593.707	596.229
Tingkat Kepuasan Pemustaka	Persen	81,00	90,00	90,00	90,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Tabel 2.57
Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	676.609	69.256
Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Umum	Eksemplar	536.373	563.236
Indeks Membaca Masyarakat	Poin	68,50	61,49
Jumlah Pembinaan Lembaga Perpustakaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan	Unit	54	100
	Orang	82	270
Tingkat Kepuasan Pemustaka	Persen	87	87**
Persentase Bahan Perpustakaan yang Dipreservasi	Persen	2,5	2,5
Persentase Bahan Perpustakaan yang Dialihmediakan	Persen	1,81	1,81
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Membaca	Poin	62,76	52,33
Tingkat Kebiasaan Membaca Masyarakat	Poin	67,68	63,54
Tingkat Pemanfaatan Bahan Bacaan	Poin	74,39	68,61
Laju Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Persen	2,20	2,25
Persentase Karya Cetak, Karya Rekam dan Hasil Khazanah Budaya Jawa Barat yang Disimpan Sesuai dengan Peraturan	Persen	2,87	50,5
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Poin	0,3178	0,3178**
Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Lingkup Provinsi yang Memiliki Sertifikat	Persen	17,31	3,00
Persentase Koleksi buku yang Dibaca	Persen	1,65	1,21
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Perpustakaan	Poin	82,75	80,53

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020
Keterangan:
*) Data Sementara
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.1.24 Kearsipan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berupaya untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat sebagai alat bukti yang sah. Arsip-arsip yang tercipta tersebut, apabila memiliki nilai guna kesejarahan maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip-arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu pembinaan kearsipan melalui *workshop*, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis TIK, peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip melalui penelusuran arsip-arsip tokoh-tokoh skala Provinsi Jawa Barat, alih media arsip, serta

digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan, digabung, serta penyelamatan arsip pasca bencana.

Ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sangat bergantung pada standar pengelolaan arsip secara baku yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Berdasarkan capaian kinerja pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 11 persen tahun 2019, artinya terdapat 4 (empat) perangkat daerah yang telah memenuhi pengelolaan arsip secara baku.

Dalam rangka penyelamatan arsip, capaian kinerjanya sebesar 58,57 persen sampai dengan tahun 2019, sehingga masih perlu dilakukan optimalisasi untuk penyelamatan arsip.

Berdasarkan capaian pengelolaan arsip secara baku, maupun penyelamatan arsip terdapat beberapa variabel yang mendukung sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.58
Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Persentase Jumlah Arsip yang Digitalisasi/ Dialih- Mediakan	Persen	29,96	0,21	12.600,00	1.000,00
Jumlah Arsip yang di Preservasi	Lembar	n/a	n/a	220,00	120,00
Jumlah Khasanah Arsip Diselamatkan	Khasanah	3,00	1,00	1,00	8,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Tabel 2.59
Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persen	11,00	28,95
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	3	6
Persentase Jumlah Arsip yang Digitalisasi/ Dialih-Mediakan	Persen	100	100
Jumlah Arsip yang di Preservasi	Lembar	275	375
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Tertib	Persen	11,00	11,00
Persentase Penyusutan Arsip	Persen	12,00	4,00
Persentase Simpul SIKN yang Terintegrasi Se-Jawa Barat	Persen	4	4
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Kearsipan	Poin	50,00	50,00**
Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	16,90	3
Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	17,10	66

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020
Keterangan :
*) Data Sementara
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.2 Layanan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Pada prinsipnya, penyelenggaraan urusan pilihan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sub sektor perikanan di Provinsi Jawa Barat. Peranan sub sektor perikanan terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan yang cenderung menggambarkan kondisi makro dari perekonomian. Namun demikian, peranan terhadap perekonomian perlu dilihat juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku yang terlibat dalam sub sektor perikanan. Ukuran kesejahteraan pelaku sub sektor perikanan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tingkat kesejahteraan yang cukup baik. Hal ini tercermin dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan pada tahun 2015 senilai 98,86, meningkat sampai tahun 2019 menjadi 109,49. Nilai Tukar Usaha Pertanian Sub Sektor Perikanan juga meningkat mulai tahun 2015 senilai 108,76 sampai tahun 2019 menjadi 126,71. Sedangkan indikator yang lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.60
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Nilai Tukar Usaha Pertanian Sub Sektor Perikanan	Poin	108,76	113,08	116,53	122,95
Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	269.987,70	232.890,34	274.465,48	263.846,66
Produksi Perikanan Budidaya	Ton/Tahun	1.075.260,25	1.124.387,54	1.160.747,99	1.174.357,65
Nilai Tukar Nelayan	Poin	109,74	109,55	113,17	116,48
Konsumsi Ikan per Kapita	Kg/kap/ tahun	24,56	26,27	28,6	29,64
Peningkatan Produksi Perikanan yang Memenuhi Standar Jaminan	Persen	100,91	96,83	96,14	96,06

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Pangan					
Peningkatan Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel	Persen	100	100	100	100
Jumlah Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola	Kawasan	1	1	1	1
Jumlah Benih Ikan yang ditebar di Perairan Daratan	Ekor	12.853.400	17.605.500	51.414.500	37.500.000
Jumlah Plasma Nutfah yang dilestarikan	Jenis	4	4	4	5
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	105,39	100,24	101,54	96,44
Kontribusi terhadap Pemenuhan Benih Ikan Mas Nasional	Persen	80	74,81	32,15	19,47
Kontribusi terhadap Pemenuhan Benih Ikan Nila Nasional	Persen	70,36	65,54	68,59	27,82
Kontribusi terhadap Pemenuhan Benih Ikan Patin Nasional	Persen	77,7	63,9	45,47	24,53
Kontribusi terhadap Pemenuhan Benih Ikan Lele Nasional	Persen	70,59	66,02	64,47	42,19
Persentase Permintaan Benih Ikan Gurame	Persen	10	9,78	4,8	5,62
NTP Sub Sektor Perikanan	Poin	98,96	100,46	102,29	106,55
Produksi Perikanan	Ton	1.345.247,95	1.357.272,88	1.435.213,47	1.438.204,31
Peningkatan Konsumsi Ikan Jawa Barat	Persen	2,73	6,51	8,15	3,51

Sumber:-Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020
- Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Tahun 2020

Tabel 2.61
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Nilai Tukar Usaha Pertanian Sub Sektor Perikanan	Poin	126,71	104,76
Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	249.745,87	225.759,86
Produksi Perikanan Budidaya	Ton/Tahun	1.268.509,71	1.163.695,40
Nilai Tukar Nelayan	Poin	119,88	119,88**
Angka Konsumsi Ikan Jawa Barat	Kg/kap/tahun	35,81	36,2
Peningkatan Produksi Perikanan yang Memenuhi Standar Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Pangan	Persen	99	99**
Peningkatan Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel	Persen	100	100**

Indikator	Satuan	2019	2020
Jumlah Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola	Kawasan	2	2**
Jumlah Benih Ikan yang ditebar di Perairan Daratan	Ekor	29.060.500	29.060.500**
Jumlah Plasma Nutfah yang dilestarikan	Jenis	5	5
Produksi Garam	Ton	445.727,64	41.342,98
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	105,71	105,71**
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	102,35	102,35**
Peningkatan Produksi Non Konsumsi	Persen	20,39	20,39**
Kontribusi terhadap Pemenuhan Benih Ikan Mas Nasional	Persen	59,1	59,1**
Kontribusi terhadap Pemenuhan Benih Ikan Nila Nasional	Persen	39,75	39,75**
Kontribusi terhadap Pemenuhan Benih Ikan Patin Nasional	Persen	49,36	49,36**
Kontribusi terhadap Pemenuhan Benih Ikan Lele Nasional	Persen	30,29	30,29**
Persentase Permintaan Benih Ikan Gurame	Persen	58,63	58,63**
Persentase Peningkatan Produksi Olahan	Persen	- 43,15	- 43,15**
Persentase Peningkatan Produksi Garam	Persen	-6,69	-6,69**
NTP Sub Sektor Perikanan	Poin	109,49	109,49**
Persentase Peningkatan Jumlah Ekspor Hasil Perikanan	Persen	14,9	14,9**
Produksi Perikanan	Ton	1.518.215,58	1.389.455,26
Peningkatan Konsumsi Ikan Jawa Barat	Persen	2,95	1,1
Persentase Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola	Persen	14,03	19,04
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang undangan	Persen	51,18	51,85

Sumber:- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020
- Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Tahun 2020

Keterangan :
*) Data Sementara
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.2.2 Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat mewujudkan ekonomi yang inklusif, sektor pariwisata juga dapat menjadi nilai tambah bagi potensi Jawa Barat yang sangat banyak dan beragam. Potensi alam mulai dari gunung, rimba, laut dan pantai. Potensi pertanian, peternakan, perdesaan dan lain sebagainya.

Selama periode 2015-2019 jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke objek wisata dan jumlah wisatawan mancanegara di tahun 2015 sebanyak 1.067.271 orang, meningkat sampai tahun 2019 menjadi

3.645.433 orang. Jumlah Wisatawan Domestik pun meningkat setiap tahun, dimana di tahun 2015 sebanyak 56.334.706 orang sampai tahun 2019 meningkat menjadi 64.610.832 orang. Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan sosial berskala besar, sehingga terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang dapat dilihat pada tabel 2.62.

Tabel 2.62
Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	1.067.271	1.765.059	2.038.319	2597445
Jumlah Wisatawan Domestik	Orang	56.334.706	58.728.666	59.780.016	63.298.608
Jumlah Event Pariwisata	Event Per Tahun	2	3	4	5
Jumlah Event Promosi Pariwisata	Event Per Tahun	5	7	9	5

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Tabel 2.63
Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	3.645.433	31.610
Jumlah Wisatawan Domestik	Orang	64.610.832	35.513.885
Jumlah Event Pariwisata	Event Per Tahun	3	8
Jumlah Event Promosi Pariwisata	Event Per Tahun	5	25

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.3.2.3 Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Selain itu, pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan daerah, diantaranya: penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Pertanian di Provinsi Jawa Barat secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk

pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dapat diketahui dari berbagai indikator sektoral, salah satunya adalah produksi padi sawah dan produktivitas padi sawah. Data tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.64
Indikator Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Produksi Padi Sawah	Ton	10.856.438	12.031.508	11.849.636	11.073.462
Luas Tanam Padi Sawah	Hektar	1.801.402	1.984.306	1.981.539	1.967.260
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	8,69	8,9	8,6	8,67
Nilai Tukar Petani	Poin	105,07	104,31	104,92	110,9
Peningkatan Ketersediaan Benih Unggul Komoditas Perkebunan	Persen	2,2	2,35	2,46	2,64
Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan	Persen	-1,02	-1,02	-1,04	-1,05
Persentase Peningkatan Produksi Rata-rata Komoditas Strategis Perkebunan (%)	Persen	2,15	2,23	2,34	2,36
Persentase Peningkatan Produktivitas Rata- rata Komoditas Strategis Perkebunan (%)	Persen	2,19	2,25	2,35	2,37
Persentase Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan terhadap Luas Jawa Barat (%)	Persen	13,14	13,22	13,25	13,02
Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)	Persen	0,9619	0,9850	1,0082	1,0058
Persentase Peningkatan Jumlah Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI (%)	Persen	2,15	2,22	2,54	2,57
Persentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)	Persen	2,17	2,20	2,30	2,48

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, 2020; dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2020.

Tabel 2.65
Indikator Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Produksi Padi Sawah	Ton	9.084.957	9,22* (Ribu Ton)
Luas Tanam Padi Sawah	Hektar	1.903.360	1,61* (Ribu Hektar)

Indikator	Satuan	2019	2020
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	8,77	9,20*
Nilai Tukar Petani	Poin	112,36	101,41
Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan	Persen	-17,91	-17,91**
Pertumbuhan Subsektor Tanaman Hortikultura	Persen	-12,55	-12,55**
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	-7,13	-7,13**
Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Persen	3,96	3,96**
Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	13.393.076	13.759.620
Peningkatan Ketersediaan Benih Unggul Komoditas Perkebunan	Persen	2,7	1,58
Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan	Persen	-1,20	1
Persentase Peningkatan Produktivitas Rata- rata Komoditas Strategis Perkebunan (%)	Persen	4,71	2,19
Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Utama Perkebunan	Persen	1,00	1

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, 2020 ; Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2020.

Keterangan :
*) Data Sementara
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.2.4 Kehutanan

Sektor kehutanan memiliki peran penting dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan luas lahan kritis. Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menahan laju deforestasi dan memperbaiki kondisi hutan yang terdegradasi dengan mencanangkan dan menggalakkan program Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTTP). Melalui program Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon ditargetkan sampai dengan tahun 2023 dapat menanam 50 (lima puluh) juta pohon di lahan-lahan kritis yang tersebar di kabupaten/kota. Selain program yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, program peningkatan peran sektor kehutanan menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023. Peningkatan peran sektor kehutanan dilakukan dengan cara memacu produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu. Peningkatan hasil hutan kayu diarahkan pada hutan rakyat dan hasil hutan bukan kayu melalui peningkatan dan pengembangan sentra budidaya lebah madu, pemanfaatan jasa kawasan hutan lindung dan hutan konservasi sebagai

objek wisata. Berikut ini indikator yang dapat menggambarkan pembangunan di sektor kehutanan selama periode 2015-2019.

Tabel 2.66
Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Persentase Tutupan Lahan yang berfungsi lindung terhadap luas wilayah	Persen	17,41	17,41	18,72	18,73
Jumlah lokasi kawasan hutan yang siap ditata batas (lokasi)	Lokasi	6	5	4	5
Persentase penurunan gangguan keamanan hutan (%)	Persen	3,44	32,21	2	46,18
Persentase Peningkatan jumlah tumbuhan dan satwa liar yang ditangkarkan (%)	Persen	23,67	6,91	5	5
Persentase bertambahnya produksi hasil hutan kayu (%)	Persen	-6,55	2,06	7,21	-28
Persentase bertambahnya produksi hasil hutan bukan kayu (%)	Persen	429,61	0,37	-6,05	12,00
Persentase bertambahnya produksi olahan hasil hutan kayu dan bukan kayu (%)	Persen	0,94	69,41	61,49	-24,49
Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam (%)	Persen	51,17	6,33	5,02	10,18
Jumlah unit hutan rakyat yang dikelola secara lestari	Unit	1	3	4	6

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2020

Tabel 2.67
Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Persentase tutupan hutan	Persen	33,67	45,43
Tingkat kerusakan hutan	Persen	0	0,78
Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Persen	5	0
Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	108,15	12,45
Produksi Hasil Hutan	Persen	108,15	12,45
Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam	Persen	-5,75	0
Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	0	0

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2021

2.3.2.5 Energi Dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan dan tantangan pengelolaan energi dan sumber daya mineral semakin kompleks pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam periode RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdapat 5 (lima) isu strategis yang mengemuka dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral, salah satunya adalah usaha pertambangan yang tertib administrasi dan teknis. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan usaha pertambangan yang tertib secara administrasi dan teknis melalui strategi yang dilakukan yakni meningkatkan pengelolaan pengusahaan sumber daya pertambangan, melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaku usaha pertambangan dan inventarisasi data dan pengembangan usaha pertambangan.

Indikator kinerja bidang energi dan sumber daya mineral dalam periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rasio elektrifikasi tahun 2015 mencapai 93,71 persen meningkat menjadi 99,99 persen di tahun 2018. Dalam periode yang sama indikator Jumlah pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan mencapai 87.339 meningkat menjadi 254.979,65, Persentase Luas Usaha Pertambangan yang melaksanakan *Good Mining Practice* dari 56 persen meningkat menjadi 71,31 persen, Persentase Luas Zona Aman pada Cekungan Air Tanah dari 65,34 persen meningkat menjadi 65,75 persen. Sedangkan Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi pada tahun 2019 mencapai 1,84 persen.

Tabel 2.68
Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Rasio Elektrifikasi	Rasio	93,71	97,87	99,87	99,99
Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi	Persen	0,55	0,64	0,91	1,07
Jumlah pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan	SBM	87.339,00	169.748,00	251.586,00	254.979,65
Persentase luas Usaha Pertambangan yang Melaksanakan *Good Mining Practice*	Persen	56,00	64,29	65,26	71,31

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah	Persen	65,34	65,46	65,68	65,75
Tersedianya prasarana air bersih bagi masyarakat bersumber dari air tanah dalam di wilayah rawan air	Titik	11,00	11,00	15,00	19,00
Jumlah pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral	Rp.	2.652.685.269.341,00	2.467.211.328.499,00	2.661.245.408.227,00	2.820.042.158.107,00

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, 2020

Tabel 2.69
Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Rasio Elektrifikasi	Rasio	99,99	99,99
Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Administrasi dan Teknis	Persen	40,87	46,65
Persentase Peningkatan Muka Air Tanah	Persen	5,22	5,46
Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh	1.302	1.146,60
Jumlah Instalasi Tenaga Listrik yang Laik Operasi	Unit	916	882
Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi	Persen	1,84	1,84

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, 2021

2.3.2.6 Perdagangan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan diantaranya terkait dengan peningkatan dan pengembangan ekspor. Kinerja sektor perdagangan dapat dilihat dari nilai ekspor nonmigas dan kontribusinya terhadap total ekspor nonmigas Indonesia pada tahun tertentu. Selama periode Tahun 2015-2019, kinerja ekspor nonmigas Provinsi Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang positif, dimana nilai ekspor nonmigas rata-rata meningkat sebesar 5,96 persen per tahun. Selain itu, Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting terhadap total nilai ekspor nonmigas secara nasional dengan kontribusi rata-rata mencapai 18,81 persen. Hal ini menempatkan Provinsi Jawa Barat sebagai penyumbang ekspor barang nonmigas terbesar di Indonesia. Data kinerja bidang Perdagangan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Ekspor NonMigas	Juta US$	24.271,9	25.280	28.969,2	30.120,5
Kontribusi Ekspor NonMigas	Persen	18,42	19,14	18,92	18,50
Laju Pertumbuhan Ekspor	Persen	- 4,97	1,24	14,49	3,99
Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	U$ Juta	12,74	14,187	18,432	18,976
IHK (Indeks Harga Konsumen) Bahan Makanan	Poin	127,396	137,565	140,643	146,771
Volume Ekspor	Ribu Ton	6.852,41	7.093,11	7.354.59	7.495,86
Nilai Ekspor	Juta USD	24.970,18	25.280,03	25.280,03	30.125,78
Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per Tahun	Persen	-3,27	-3,14	14,49	3,99
Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per Tahun	eksportir	173	208	182	211
Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	Persen	1	1,89	+4	3
Terkendalinya Inflasi Jawa Barat	Persen	0,79	2,75	3,63	3,54
Peningkatan Cakupan Pengawasan Barang Beredar	Persen	27,87	10,90	100	100
Laju Pertumbuhan Ekspor Non Migas	Persen	-4.97	1.24	14.49	3,99

Sumber:
- https://statistik.kemendag.go.id. 2020
- Lakip Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Jawa Barat 2015-2018

Tabel 2.71
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	US$ Juta	19,679	19,679**
Nilai Ekspor Jawa Barat	Juta US$	29.937,46	26.591,08
Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat	Juta US$	29.709,05	26.388,27
Volume Ekspor Non Migas Jawa Barat	Ribu Ton	7.393,30	7.609,42
Kontribusi Ekspor Non Migas	Persen	99,237	99,237
Laju Pertumbuhan Ekspor Non Migas	Persen	- 1,38	-11,18
Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per Tahun	Eksportir	254	285
Laju Nilai Impor Jawa Barat	Persen	-12,84	-21,29
Laju Nilai Impor Non Migas Jawa Barat	Persen	-10,10	-20,51
Indeks Harga Konsumen (IHK) Bahan Makanan	Poin	4,18	3,76
Terkendalinya Inflasi Jawa Barat	Persen	3,21	2,18
Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Poin	41,7	51,95
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	SNI Wajib	101	101*
Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	Persen	10	10**
Jumlah kerjasama perdagangan	Buah	14	14**
Peningkatan cakupan pengawasan barang beredar	Persen	100	100**

Indikator	Satuan	2019	2020
Jumlah barang yang diuji	Buah	10	10**

Sumber:
– https://statistik.kemendag.go.id. 2020
– Lakip Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Jawa Barat 2019
Keterangan :
*) Data Sementara
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.2.7 Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor yang berperan penting bagi perekonomian Provinsi Jawa Barat. Sektor industri khususnya pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Selama 5 (lima) tahun terakhir, sektor industri menjadi penopang perekonomian Provinsi Jawa Barat dengan pangsa pasar di atas 40 persen. Kinerja sektor industri pengolahan dapat dilihat dari peranan dan laju pertumbuhannya terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.72
Indikator Bidang Perindustrian Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	Persen	43,07	42,55	42,23
Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Persen	Persen	4,39	4,77	5,32
Jumlah Unit usaha Industri	Unit Usaha	Unit Usaha	202.940	203.440	210.809
Peningkatan Jumlah wirausaha baru	Orang	Orang	4.620	9.133	13.303
Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat	Triliun upiah	Triliun upiah	166,29	168,49	51,870
Peningkatan Nilai Produksi IKM	Persen	Persen	0,05	0,17	0,34
Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	Orang	Orang	2.285	2.345	3.095
Peningkatan nilai produksi industri	Persen	Persen	6.32	-1.33	7,43

Sumber:
a) Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020
b) Lakip Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Jawa Barat 2015-2018

Tabel 2.73
Indikator Bidang Perindustrian Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	41,60	41,19
Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Persen	4,04	-4,22
Jumlah Unit usaha Industri	Unit Usaha	214.560	214.851
Peningkatan Jumlah wirausaha baru	Orang	15.182	15.812**
Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat	Triliun upiah	71,914	-27,06
Peningkatan Nilai Produksi IKM	Persen	9,92	9,92**
Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	Orang	3.365	3.365**
Peningkatan nilai produksi industri	Persen	9,88	9,88**
Jumlah kerjasama industri	Buah	10,00	10,00**

Sumber:
a) Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020
b) Lakip Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Jawa Barat 2019

2.3.2.8 Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan serta persebaran penduduk. Perpindahan memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah atau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi meliputi program perencanaan kawasan transmigrasi, program pembangunan kawasan transmigrasi, dan program pengembangan kawasan transmigrasi. Dalam upaya mempersiapkan transmigran agar mampu mengembangkan berbagai program kegiatan produktif di lahan transmigrasi, maka para calon transmigran memerlukan beberapa pelatihan guna membekali dirinya dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi yang kuat dalam menjalankan program transmigrasi di daerah penempatan nantinya. Selama periode Tahun 2015-2018, telah dilakukan pelatihan calon transmigran sebagaimana data di bawah ini.

Tabel 2.74
Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
Jumlah keluarga calon transmigran yang telah dilatih	KK	309,00	206,00	63,00	63,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

2.3.3 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.3.1 Sekretariat Daerah

1) Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, nilai SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah BB dan mulai Tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah A. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat semakin baik, akuntabel dan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran.

2) Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan Kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam

Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Capaian LPPD Jawa Barat selama periode 2015 sampai dengan 2017 mengalami peningkat dengan status sangat tinggi.

Tabel 2.75
Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017

Uraian	2015	2016	2017
Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Peringkat 2/ Skor: 3,1760 /Status: sangat tinggi	Peringkat 2 / Skor: 3,2496/Status: sangat tinggi	Peringkat 2 / Skor: 3,2842/Status: sangat tinggi

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

3) Level Kematangan/ Maturitas PBJ

Tingkat Maturitas UKPBJ adalah gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi.

Dalam penjabarannya, Level Maturitas dibagi menjadi 4 (empat) Domain (Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi) yang dibagi lagi kedalam 9 (sembilan) Variabel (Manajemen Risiko, Manajemen Kinerja, Manajemen Penyedia dan Manajemen Pengadaan, Pengorganisasian Kelembagaan, Tupoksi Kelembagaan, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM, dan Sistem Informasi). Realisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap Level Kematangan/Maturitas PBJ mencapai tingkat kematangan pada level 3 (tiga) proaktif. Adapun yang menjadi faktor pendorong tercapainya target diatas antara lain:

a) Terbentuknya kelembagaan UKPBJ melalui terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2019 yang yang memiliki tugas, fungsi serta organisasi kelembagaan yang jelas dan terdokumentasi sesuai peraturan perundangan

b) Terselenggaranya layanan pengadaan secara elektronik (SIRUP, *e*Tendering, *ePurchasing*, SIKAP) secara terpadu.
c) Terselenggaranya proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak.

4) Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD NonLembaga Keuangan dan investasi Daerah yang ditindaklanjuti.

Indeks Reformasi Birokrasi sebagai Sasaran IKU Gubernur Jawa Barat, dijabarkan dalam IKU Kepala Biro BUMD dan Investasi dalam bentuk Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Investasi Daerah yang ditindaklanjuti.

Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Investasi daerah yang ditindaklanjuti adalah tingkat penyelesaian bahan perumusan kebijakan umum, hasil koordinasi, monitoring dan fasilitasi administratif aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Investasi Daerah. Kondisi tersebut akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD, dan isu-isu strategis serta disesuaikan dengan tujuan yang telah dirumuskan

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Biro BUMD dan Investasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi, dan efektivitas. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur, kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Biro BUMD dan Investasi periode Januari sampai dengan Desember

2019 yaitu Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Investasi daerah yang ditindaklanjuti, terealisasikan 90 persen sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dapat dinyatakan **Memuaskan**.

5) Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dapat dilihat berdasarkan persentase tingkat capaian yang menunjukan besar sasaran kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2019 sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang terukur dari nilai persentase tingkat capaian.

Pengukuran untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang perumusan Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti

6) Indeks Kualitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah.

Hasil survei indeks kepuasan pelayanan Biro umum tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan responden/sample sebanyak 550 orang meliputi pegawai lingkup Sekretariat Daerah dan BPKAD dengan menilai 20 (dua puluh) unsur pelayanan menghasilkan IKM dengan kualifikasi nilai (Baik). Hal ini didukung pula antara lain dengan terselenggaranya berbagai kegiatan sehingga proses administrasi dapat berjalan dengan lancar serta pelayanan dapat terlaksana optimal dari 3 (tiga) aspek pelayanan yaitu aspek layanan

umum dan kepegawaian, aspek adminsitrasi keuangan, serta aspek pengelolaan barang milik daerah lingkup Sekretariat Daerah.

Selanjutnya, pencapaian target Biro Umum didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah.

2.3.3.2 Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat telah tersedia atau ada, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Tabel 2.76
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

No	Dokumen Perencanaan	Tanggal	Nomor Perda
1.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025	20 Agustus 2008	Perda Nomor 9 Tahun 2008
2.	Perubahan Pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025	31 Desember 2010	Perda Nomor 24 Tahun 2010
3.	Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025	4 Maret 2019	Perda Nomor 7 Tahun 2019

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat telah tersedia atau ada. RPJMD Provinsi Jawa Bara Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Tabel 2.77
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2023

No	Dokumen Perencanaan	Tanggal di tetapkan	Nomor Perda
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013	22 Oktober 2009	Perda Nomor 10 Tahun 2008
2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018	10 Desember 2013	Perda Nomor 25 Tahun 2013

No	Dokumen Perencanaan	Tanggal di tetapkan	Nomor Perda
3.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	4 Maret 2019	Perda Nomor 8 Tahun 2019

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

3) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah, ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut: (a) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013; (b) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014; (c) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015; (d) Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; (e) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017; (f) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018; (g) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, (h) Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, dan (i) Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Tabel 2.78
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021

No	Dokumen Perencanaan	Tanggal Ditetapkan	Nomor Pergub
1.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018	18 Mei 2017	18 Tahun 2017

No	Dokumen Perencanaan	Tanggal Ditetapkan	Nomor Pergub
2.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018	20 Juli 2018	49 Tahun 2018
3.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	28 Juni 2018	Pergub Nomor 47 Tahun 2018
4.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	17 Juli 2019	37 Tahun 2019
5.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	28 Juni 2019	32 Tahun 2019
6.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	6 Agustus 2020	61 Tahun 2020
7.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	24 Juli 2020	Pergub Nomor 59 Tahun 2020

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

4) Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD mencapai persentase sebesar 100 persen, sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 99 persen. Hal ini disebabkan adanya Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang diikuti dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 99,22 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan ke dalam RKPD mencapai 100 persen. Adapun untuk tahun 2020 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD sebesar 98,43 persen.

Tabel 2.79
Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
Tahun 2006-2020

NO	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	99,00	99,22	100	98,43

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.3.3.3 Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi perda dan peraturan gubernur. Namun bila menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan

PPAS, serta RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Barat dan Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Tabel 2.80
Indikator Kinerja Urusan Keuangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat waktu/Tidak	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber: www.sakip.jabarprov.go.id dan Lakip Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2019

Tabel 2.81
Indikator Kinerja Urusan Keuangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2019	2020
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	predikat	WTP	WTP
2	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat waktu/Tidak	Tepat waktu	Tepat Waktu
3	Jumlah penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah	Buah	3	3**
4	Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	Persen	100	100**
5	Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal	Persen	40	40**
6	Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.	Persen	85	85**
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Pendapatan Daerah)	Skor	84,6	84,6**

Sumber: www.sakip.jabarprov.go.id dan Lakip Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Keterangan:
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.3.4 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.82
Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

No	Uraian	2019	2020
1	Persentase tingkat pelanggaran disiplin pegawai	0,05	0,05**
2	Persentase pegawai yang mendapat nilai SKP >76%	87,89	87,89**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
Keterangan :
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.3.5 Penelitian dan Pengembangan

Indikator kinerja fungsi penelitian dan pengembangan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 umumnya menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 Persentase rekomendasi kebijakan daerah yang dihasilkan, Persentase hasil kelitbangan yang diterapkan, dan Persentase inovasi daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan kekayaan intelektual menunjukkan angka besaran yang sama yaitu 20 persen. Sedangkan Capaian indikator kinerja penelitian dan pengembangan lainnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.83
Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018
1.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	77	83	90
2.	Persentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persen	50	55	67
3.	Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat	Jumlah	42	50	62
4.	Persentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan	Persen	40	50	60
5.	Persentase hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan	Persen	67	70	80
6.	Persentase Kerja sama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK yang diimplementasikan	Persen	100	100	100

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2020

Tabel 2.84
Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

No	Uraian	Satuan	2019	2020
1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Berbasis IPTEK	Jumlah	4	5
2.	Jumlah Hasil Penelitian yang Diterapkan dalam Pembangunan Jawa Barat	Jumlah	10	11
3.	Jumlah Karya IPTEK yang Didaftarkan untuk Mendapat Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah	20	26

No	Uraian	Satuan	2019	2020
4.	Jumlah Inovasi yang Ditindaklanjuti menjadi SIDa	Jumlah	15	15**
5.	Persentase rekomendasi kebijakan daerah yang dihasilkan	Persen	20	12,5
6.	Persentase hasil kelitbangan yang diterapkan	Persen	20	10,5
7.	Persentase inovasi daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan kekayaan intelektual	Persen	37,10	20,8
8.	Persentase kajian kelitbangan yang didiseminasikan kepada perangkat daerah atau stakeholder lainnya	Persen	16,70	17,14
9.	Persentase kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti	Persen	20,00	20
10.	Persentase dokumen perencanaan, peningkatan kualitas aparatur, sarana prasarana dan dokumen pengelolaan keuangan	Persen	100,00	100

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2020
Keterangan :
** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.4 Unsur Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Tindak lanjut temuan terdiri dari: jumlah temuan (R), tindak lanjut yang selesai (S), tindak lanjut dalam proses (DP), dan belum ditindaklanjuti (B).

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa pada tahun 2015 Persentase Tindak Lanjut Temuan terhadap Kabupaten/kota yang selesai sebesar 31,56 persen, dalam proses 22,57 dan belum ditindaklanjuti 45,87 persen. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 “A”. Opini BPK tahun 2018 dan 2019 “WTP”. Sedangkan untuk indikator lainnya disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.85
Indikator Kinerja Pengawasan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Terhadap Kabupaten/kota					
	% S (tindak lanjut yang selesai)	persen	31,56	69,47	72,41	56,00
	% DP (tindak lanjut dalam proses)	persen	22,57	24,43	20,79	25,21
	% B (belum ditindaklanjuti)	persen	45,87	6,10	6,80	18,79
2.	Persentase Tindak Lanjut Temuan terhadap PD					
	% S	persen	92,84	90,12	14,92	81,90

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018
	% DP	persen	6,014	6,43	0	17,59
	% B	persen	1,12	3,45	85,08	19,52
3.	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK					
	% TS	persen	73,06	70,30	65,90	65,91
	% TB	persen	22,28	25,10	24,80	27,90
	% BT	persen	4,66	4,00	8,88	6,19
4.	Hasil Penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di Tingkat Nasional	Poin	2,920	3,176	3,249	3,497
5.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Peringkat	BB	A	A	A
6.	Opini BPK-RI terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Persentase Penyelesaian tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Persen	76,34	74,85	66,80	66,40
8.	Persentase Penyelesaian TLHP Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap PD Provinsi	Persen	87,64	-77,30	95,00	83,96
9.	Persentase Nilai Indikator RAD-PPK	Persen	100	100	100	87
10.	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Persen	75,00	75,00	51,10	76,00
11.	Tingkat kapabilitas APIP Tingkat kapabilitas	Level	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
12.	Persentase penurunan jumlah temuan inspektorat terhadap pelanggaran sistem pengendalian intern PD Provinsi	Persen	22,30	15,00	12,00	10,00
13.	Persentase PD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas	Persen	67,00	80,00	100,00	100,00
14.	Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat	persen	41,67	22,7	57,10	76,00
15.	Jumlah auditor dan P2UPD bersertifikasi	Orang	67,00	61,00	58,00	75,00
16.	Jumlah auditor dan P2UPD yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan auditor madya	Orang	25,00	24,00	23,00	35,00

Sumber: Inspektorat, Tahun 2020

Tabel 2.86
Indikator Kinerja Pengawasan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

No	Uraian	Satuan	2019	2020
1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Terhadap Kabupaten/kota			
	% S (tindak lanjut yang selesai)	persen	61,60	61,60**
	% DP (tindak lanjut dalam proses)	persen	26,16	26,16**
	% B (belum ditindaklanjuti)	persen	12,24	12,24**
2.	Persentase Tindak Lanjut Temuan terhadap PD			
	% S	persen	51,46	51,46**
	% DP	persen	22,33	22,33**
	% B	persen	26,21	26,21**
3.	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK			
	% TS	persen	66,07	66,07**

No	Uraian	Satuan	2019	2020
	% TB	persen	27,11	27,11**
	% BT	persen	5,16	5,16**
4.	Hasil Penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di Tingkat Nasional	Poin	3,259	3,259**
5.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Peringkat	A	A
6.	Opini BPK-RI terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat	Opini	WTP	WTP
7.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Level	III	III
8.	Persentase Penyelesaian tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Persen	94	100,00
9.	Persentase Penyelesaian TLHP Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap PD Provinsi	Persen	83	83**
10.	Persentase Nilai Indikator RAD-PPK	Persen	92	91,80
11.	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Persen	100	100**
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	3,259	3,259**
12.	Tingkat kapabilitas APIP Tingkat kapabilitas	Level	Level 3	Level 3**
13.	Persentase penurunan jumlah temuan inspektorat terhadap pelanggaran sistem pengendalian intern PD Provinsi	Persen	10,00	10,00 **
14.	Persentase PD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas	Persen	100	100 **
15.	Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat	persen	77,00	77,00**
16.	Jumlah auditor dan P2UPD bersertifikasi	Orang	80,00	80,00**
17.	Jumlah auditor dan P2UPD yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan auditor madya	Orang	36,00	36,00**

Sumber: Inspektorat, Tahun 2020
Keterangan :
**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.3.5 Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.87
Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2018

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Ormas Terdaftar	Unit	1.079	1.126	1.043	n/a
2.	Jumlah Ormas Aktif	Unit	512	580	640	700
3.	Persentase Ormas Aktif	Persen	1,85	3,99	4,21	n/a

Sumber: Kesatuan Bangsa dan Politik, 2020

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan

unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini tercermin dari standar hidup yang makin membaik yang direpresentasikan oleh capaian indikator pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk Provinsi Jawa Barat meningkat sebesar Rp810.000 selama periode Tahun 2016-2020.

Gambar 2.34
Pengeluaran per Kapita Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020
(Ribu Rupiah)

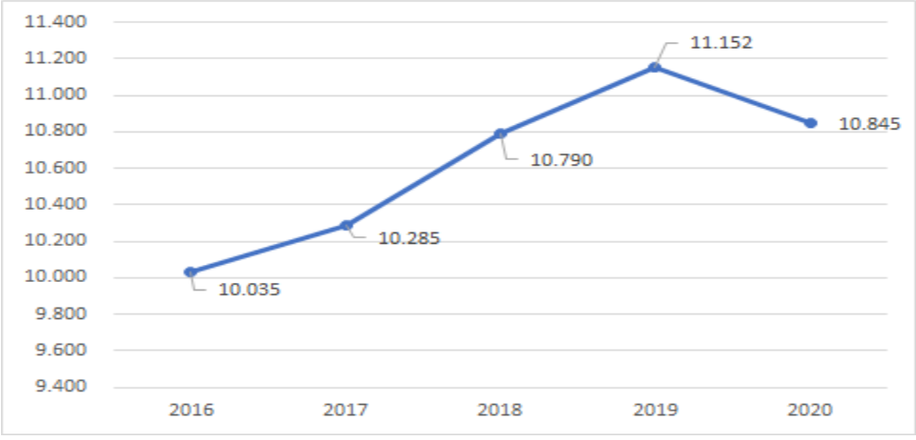

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021

2.4.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Peranan terbesar penggunaan produksi barang dan jasa di wilayah Provinsi Jawa Barat adalah untuk konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu 2015-2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode 2015-

2019 rata-rata di atas 65 persen. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 65,39 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 64,51 persen.

Rata-rata konsumsi per rumah tangga per tahun menggambarkan besaran dana yang dihabiskan oleh setiap rumah tangga untuk membiayai konsumsi anggota rumah tangga baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb) selama periode 2015-2019. Pengeluaran ini terus meningkat dari 79,24 juta rupiah (2015); 85,43 juta rupiah (2016); 91,63 juta rupiah (2017); tahun 2018 sebesar 98,87 juta rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 105,98 juta rupiah. Meningkatnya nilai konsumsi per rumah tangga sejalan dengan semakin bervariasinya jenis barang dan volume yang dikonsumsi terutama konsumsi nonmakanan. Kenaikan konsumsi per rumah tangga ini bisa disebabkan oleh peningkatan jumlah anggota rumah tangga, atau peningkatan kualitas komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut yang sangat berkorelasi dengan peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini dapat diamati dari laju pertumbuhan rata-rata konsumsi per rumah tangga yang selalu tumbuh tiap tahun dengan kisaran 3 persen dimana pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,21 persen dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,85 persen.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan pertumbuhan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Dengan demikian, konsumsi rata-rata per kapita selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya, pertumbuhan ini terjadi baik ADHB maupun ADHK 2010. Kondisi ini memberi gambaran bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Jawa Barat meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per kapita secara nominal adalah sebesar 21,14 juta rupiah pada tahun 2015, terus meningkat mencapai 28,14 juta rupiah pada tahun 2019. Laju pertumbuhan konsumsi per kapita sejalan dengan laju pertumbuhan konsumsi per rumah tangga, yaitu pada kisaran 3 persen. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,82 persen dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,18 persen. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan konsumsi per kapita adalah sebesar 3,41 persen, melambat dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.88
Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total Konsumsi Rumah Tangga:						
a. ADHB (Miliar Rp)	983,77	1.075,52	1.169,37	1.278,28	1.387,76	1.378,9
b. ADHK 2010 (triliun Rp)	759,65	800,01	836,92	878,99	920,74	894,11
Rata-Rata Konsumsi Per Kapita/tahun:						
a. ADHB (Ribu Rp)	21,06	22,70	24,34	26,26	28,14	28,14**
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	16,26	16,89	17,42	18,06	18,67	18,67**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020
Keterangan:
** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.4.3 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang dapat mengukur kemampuan daya beli petani sebagai salah satu pelaku utama di sektor pertanian. Secara konsep, NTP mengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Selama periode Tahun 2016-2020, rata-rata NTP Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada periode tersebut, rata-rata NTP terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 100 dan tertinggi terjadi di tahun 2019 dengan rata-rata NTP mencapai 110,68.

Secara umum, rata-rata NTP menunjukkan angka diatas 100 (>100). Hal ini berarti petani di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika tingkat rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar. Atau dengan kata lain, produk pertanian di Provinsi Jawa Barat memiliki daya tukar yang lebih tinggi daripada biaya produksi dan barang/jasa yang dikonsumsi petani secara umum.

Gambar 2.35
Rata-Rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016-2020

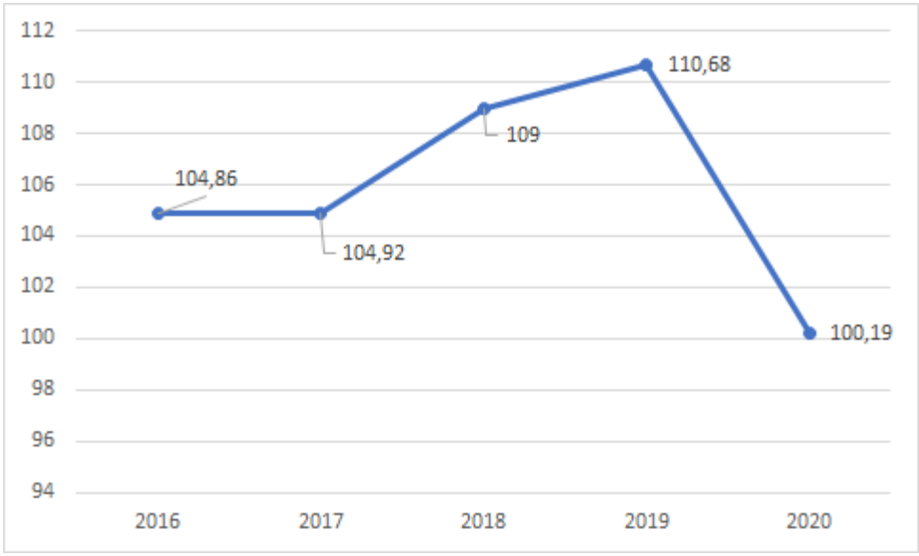

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2021,diolah

Fluktuatifnya NTP menunjukkan harga-harga komoditas pertanian sangat dipengaruhi faktor musiman, harga meningkat apabila jumlah produksi sedang mengalami penurunan seperti pada musim kemarau dan musim angin barat yang mengakibatkan produksi ikan menurun. Sebaliknya harga akan menurun apabila persediaan komoditas di sentra-sentra pertanian melimpah karena musim panen. Hal ini mengakibatkan *take home pay* petani tidak tetap untuk jumlah produksi yang diasumsikan sama (*ceteris paribus*) seperti produksi pada tahun dasar 2012.

2.4.4 Angka Kriminalitas

Stabilitas keamanan menjadi salah satu aspek penting daya saing daerah. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih baik akan memiliki daya saing ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini karena faktor keamanan menjadi prasyarat bagi dunia usaha dan masyarakat pada umumnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir (2016-2018), jumlah kejahatan yang dilaporkan yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka yang cenderung turun. Pada tahun 2016 jumlah kejahatan yang dilaporkan mencapai 27.850 kasus, sementara itu pada tahun 2018 berkurang menjadi 16.256 kasus.

2.4.5 Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menggambarkan peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Selama periode Tahun 2015-2019, TKK Provinsi Jawa Barat cenderung meningkat meskipun menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2015, TKK mencapai 91,26 persen meningkat menjadi 92,02 persen di tahun 2019. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkat kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja sejalan dengan upaya meningkatkan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Gambar 2.36
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020 (Diolah)

2.4.6 Rasio Ketergantungan

Informasi mengenai perubahan struktur populasi penduduk merupakan hal penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi dinamika permasalahan kependudukan yang lebih kompleks dibanding provinsi lain. Salah satu indikator kependudukan yang menggambarkan perubahan struktur populasi penduduk adalah rasio ketergantungan (*defendency ratio*). Rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Adapun rasio ketergantungan yang rendah

menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan di Provinsi Jawa Barat cenderung menurun dalam periode Tahun 2015-2019. Pada tahun 2015, rasio ketergantungan sebesar 47,62 persen menurun menjadi 46,67 persen di tahun 2019. Hal ini berarti pada tahun 2019, setiap 100 orang penduduk usia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang penduduk yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Gambar 2.37
Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

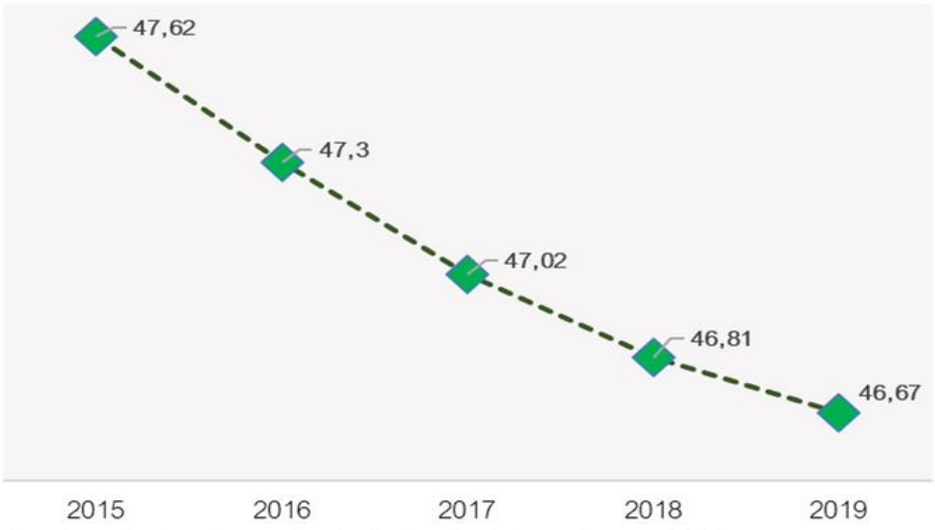

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020

2.4.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan instrumen keberhasilan pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH telah mengalami pengembangan, sesuai dengan surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.318/PPKL/SPT/ REN.O/12/2020 pada tanggal 4 Desember 2020, IKLH provinsi terdiri atas 4 (empat) komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Rumus perhitungan IKLH disesuaikan dari

(0,30 x IKA) + (0,30 X IKU) + (0,40 X IKTL), menjadi rumus yang baru = (0,340 X IKA) + (0,428 X IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 X IKAL).

Selama periode Tahun 2015-2019, IKLH Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka berfluktuasi yang disebabkan adanya perubahan metode perhitungan dari Kementerian LHK. Capaian IKLH Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.35 dimana pada tahun 2019 sebesar 52,12 dengan perhitungan yang berlaku Tahun 2019 yaitu dengan 3 (tiga) komponen. Capaian IKLH Tahun 2020 adalah 61,59 dimana nilai tersebut dihitung berdasarkan 4 (empat) komponen yaitu IKA, IKU, IKAL, dan IKL. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menggalakkan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan diantaranya program penanganan DAS Prioritas di Jawa Barat yaitu DAS Citarum, DAS Cilamaya serta Sub DAS Cileungsi dan Sub DAS Cikeas.

Gambar 2.38
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2020

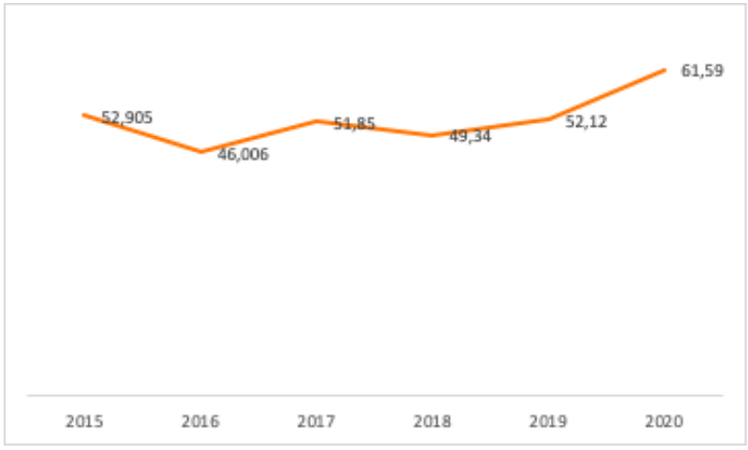

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, 2020

2.4.8 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan *good governance* menuju *clean governance*. Langkah awalnya adalah melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai oleh organisasi yang sangat gemuk dan berjenjang, adanya tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundang-undangan, rendahnya produktivitas kerja pegawai, ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang seharusnya tergambar dalam *Machinery of Government* (MoG) yakni *interconnected*

between structural and process, belum semuanya memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) yang jelas dan terukur, serta penempatan sumber daya manusia aparatur yang tidak *The Right Man In The Right Place*.

Melalui reformasi birokrasi, perlu dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengutamakan nilai 4E yakni efektivitas, efisiensi, *equity* (rasa adil), serta ekonomis (hemat dan optimal). Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Pengukuran penerapan reformasi birokrasi menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Semula, Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat adalah predikat C pada tahun 2013, meningkat menjadi B pada tahun 2016 dan berhasil naik menjadi BB pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

2.4.9 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel, dan 28 indikator demokrasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan penguatan aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat.

Hasil survei BPS Provinsi Jawa Barat, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi. Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 73,04. Pada tahun berikutnya sempat turun ke 66,83, dan kembali meningkat pada tahun 2017 ke angka 68,78. Namun pada tahun 2018 turun menjadi 65,5 dan kembali naik sebesar 3,59 poin pada tahun 2019 menjadi 69,09. Tingkat dekomorasi di Jawa Barat secara umum masih dalam katagori **sedang**.

Gambar 2.39
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2019

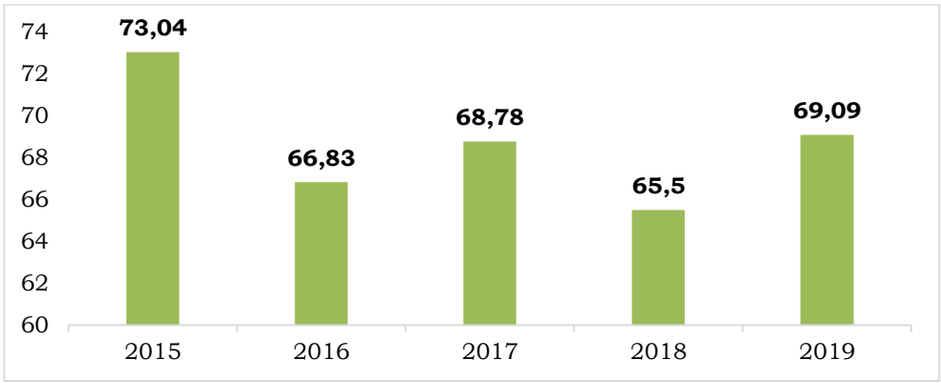

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, 2020

Hasil survei BPS Provinsi Jawa Barat, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Tahun 2013 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi. Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 73,04. Pada tahun berikutnya sempat turun ke 66,82, Kembali meningkat pada tahun 2017 dan 2018 ke angka 68,78 dan 73,91 dan menurun Kembali di tahun 2019 menjadi 69,09.

2.4.10 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta berkerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari definisi tersebut, alat ukur Indeks Kerukunan Umat Beragama terdiri dari 3 (tiga) indikator utama, yaitu (1). Toleransi, (2). Kesetaraan, dan (3). Kerjasama. Indek Kerukunan Umat Beragama dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan persoalan kerukunan umat beragama yang dapat menangkal intoleransi dan radikalisme.

Dari hasil survei Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, Indek Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Barat dari awal tahun 2015 berada pada angka 72,6. Tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 9 (sembilan) Poin menjadi 63,39, dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 68,5. Posisi di tahun 2019 ini masuk dalam kategori rukun.

2.4.11 Indeks Risiko Bencana Daerah (IRBI)

Indikator Risiko Bencana Daerah (IRBI) merupakan indikator di dalam mengukur risiko bencana. IRBI dilakukan dengan menghitung indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Proses menghitung IRBI dilakukan dengan menggunakan kalkulasi secara spasial sehingga dapat menghasilkan peta risiko dan nilai grid yang dapat dipergunakan dalam menyusun penjelasan peta risiko.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2019, Provinsi Jawa Barat dikategorikan sebagai daerah dengan IRBI yang Tinggi. Kondisi ini menuntut pemerintahan daerah dan masyarakat Provinsi Jawa Barat untuk dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan, maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Tabel 2.89
Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi di Indonesia Tahun 2019

No	Provinsi	Skor	Kelas Rasio
1.	Aceh	160	Tinggi
2.	Sumatera Utara	150	Tinggi
3.	Sumatera Barat	153	Tinggi
4.	Riau	147	Tinggi
5.	Jambi	142	Sedang
6.	Sumatera Selatan	142	Sedang
7.	Bengkulu	172	Tinggi
8.	Lampung	153	Tinggi
9.	Kepulauan Bangka Belitung	162	Tinggi
10.	Kepulauan Riau	116	Sedang
11.	DKI Jakarta	103	Sedang
12.	Jawa Barat	166	Tinggi
13.	Jawa Tengah	158	Tinggi
14.	Daerah Istimewa Yogyakarta	165	Tinggi
15.	Jawa Timur	171	Tinggi
16.	Banten	180	Tinggi
17.	Bali	170	Tinggi
18.	Nusa Tenggara Barat	172	Tinggi
19.	Nusa Tenggara Timur	156	Tinggi
20.	Kalimantan Barat	157	Tinggi
21.	Kalimantan Tengah	141	Sedang
22.	Kalimantan Selatan	152	Tinggi
23.	Kalimantan Timur	165	Tinggi
24.	Sulawesi Utara	151	Tinggi
25.	Sulawesi Tengah	158	Tinggi
26.	Sulawesi Selatan	167	Tinggi
27.	Sulawesi Tenggara	169	Tinggi
28.	Gorontalo	140	Sedang
29.	Sulawesi Barat	191	Tinggi
30.	Maluku	179	Tinggi
31.	Maluku Utara	169	Tinggi

No	Provinsi	Skor	Kelas Rasio
32.	Papua Barat	154	Tinggi
33.	Papua	125	Tinggi

Sumber: IRBI Tahun 2020, BNPB

Potret penurunan indeks risiko bencana di beberapa kabupaten/kota Jawa Barat yang rawan bencana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.90
Perbandingan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan 2017

ID Kab	Kabupaten/Kota	Indeks Risiko Bencana			Persentase (%)	
		2015	2016	2017	2016	2017
3201	Bogor	152,4	152,4	152,4	0,00	0,00
3202	Sukabumi	231,2	231,2	127,6	0,00	-44,80
3204	Bandung	174	174	100,7	0,00	-42,10
3207	Ciamis	215,2	178,2	133,5	-17,20	-38,00
3218	Pangandaran	215,2	215,2	104,2	0,00	-51,60
3216	Bekasi	164,8	164,8	108,9	0,00	-33,90
3217	Bandung Barat	162	120	101,9	-25,90	-37,10
3271	Kota Bogor	107,2	87,4	62,7	-18,40	-41,50
3273	Kota Bandung	154	126	125,99	-18,20	-0,01
3276	Kota Depok	102,4	83,5	70,7	-18,40	-31,00

Sumber: BNPB, diolah 2018

2.4.12 Indeks Kebahagiaan

Indikator kebahagiaan merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kesejahteraan karena kebahagiaan merupakan refleksi dari tingkat kesejahteraan yang telah dicapai oleh setiap individu (Kapteyn, Smith dan Soest, 2010 dalam Indeks Kebahagiaan 2017, BPS). Indikator kebahagiaan akan menggambarkan tingkat kesejahteraan subjektif terkait beberapa aspek kehidupan yang dianggap esensial dan bermakna bagi sebagian besar penduduk dan masyarakat (Martin, 2012; OECD, 2011, 2013 dalam Indeks Kebahagiaan 2017, BPS).

Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2017 yang dihitung dengan menggunakan Metode 2014, lebih tinggi dibanding tahun 2014. Pada Metode 2014, Indeks Kebahagiaan diukur menggunakan 1 (satu) dimensi, yaitu Kepuasan Hidup, sedangkan pada Metode 2017 Indeks Kebahagiaan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi, yaitu: Kepuasan Hidup, Perasaan, dan Makna Hidup.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Jawa Barat tahun 2014 sebesar 67,66 pada skala 0 sampai 100. Angka ini naik menjadi 69,58 pada tahun 2017. Kondisi kehidupan penduduk Jawa Barat dapat dikatakan cukup bahagia pada tahun 2019, karena sudah di atas 50 (lima puluh). Tahun 2018, BPS tidak mempublikasikan Indeks Kebahagiaan sehingga tidak diketahui capaian per provinsi. Selanjutnya, berdasarkan data tahun 2019 bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kebahagiaan Provinsi Jawa Barat masih berada di bawah Indeks Kebahagiaan nasional yaitu 69,58.

Keseluruhan capaian pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagaimana telah diuraikan pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing di bab ini, disajikan pada tabel di bawah. Sebagian dari realisasi kinerja tidak dapat disajikan setiap tahun sebab adanya perbedaan indikator kinerja untuk mengukur capaian pelaksanaan pembangunan dan urusan pemerintahan daerah pada RPJMD Tahun 2013-2018 dan RPJMD Tahun 2018-2023. Terdapat beberapa indikator kinerja yang dipakai di kedua periode RPJMD ini, namun ada juga yang hanya digunakan di periode 2013-2018 demikian pula sebaliknya. Selain itu, pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan perubahan RPJMD Tahun 2013-2018. Sebagian substansi RPJMD yang mengalami perubahan yaitu indikator kinerja sebagai alat ukur capaian pembangunan di Jawa Barat.

Tabel 2.90 memuat capaian indikator kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah. Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum indikator-indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat pada periode Tahun 2015-2019 menunjukkan kinerja yang baik. Walau pada umumnya berkinerja baik, namun indikator laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan gender perlu upaya yang lebih besar untuk dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pada aspek daya saing daerah di periode yang sama menunjukkan capaian seluruh indikator semakin baik dari tahun ke tahun. Walaupun demikian masih diperlukan upaya dari seluruh pelaku pembangunan untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di

Jawa Barat dan indeks kerukunan umat beragama yang cenderung menurun capaian pada tahun 2019.

Capaian indikator kinerja berdasarkan urusan yang merupakan bagian dari aspek pelayanan umum disajikan pada Tabel 2.90 (Tahun 2015-2020) dan Tabel 2.92 (Tahun 2019-2020). Berdasarkan data realisasi indikator kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya capaian pembangunan menunjukkan peningkatan kearah pelayanan yang lebih baik, namun masih ditemui juga beberapa indikator yang kinerjanya masih rendah atau belum optimal. Berdasarkan data dan informasi pembangunan daerah yang belum optimal pencapaiannya, maka perlu diidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas, pembangunan Provinsi Jawa Barat harus terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Terlebih dengan kondisi tahun 2020 dimana terjadi pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Pandemi COVID-19 telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional nonalam yang tidak saja melanda aspek kesehatan namun telah berdampak buruk pada sosial ekonomi serta sektor-sektor lainnya. Dampak negatif dari pandemi COVID-19 telah dibuktikan dengan memburuknya berbagai indikator makro baik negara-negara lain maupun Indonesia termasuk Provinsi Jawa Barat dan provinsi lainnya.

Tabel 2.91
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Aspek Kesejahtraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan	Persen	5,05	5,66	5,33	5,66	5,07	-2,44
2	Inflasi	Persen	2,73	2,75	3,63	3,54	3,21	2,18
3	PDRB per kapita:							
	d) ADHB	Juta Rp	32,65	34,88	37,23	40,27	43,06	43,25
	e) ADHK	Juta Rp	25,84	26,92	27,97	29,16	30,24	30,14
4	Indeks Gini	Poin	0,43	0,40	0,39	0,405	0,398	0,398
5	Indeks Williamson	Poin	0,71	0,70	0,71	0,673	0,665	0,692
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	69,50	70,05	70,69	71,30	72,03	72,09
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,15	12,30	12,42	12,45	12,48	12,50
8	Angka Rata-Rata lama sekolah	Tahun	7,86	7,95	8,14	8,15	8,37	8,55
9	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,41	72,44	72,47	72,66	72,85	73,04
10	Persentase penduduk miskin	Persen	9.57	8.77	7,83	7,25	6,82	8,43
11	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	4.485.654	4.168.110	3.774.410	3.539.400	3.375.890	3,92
12	Garis Kemiskinan	Rp	318.602	324.119	354.679	371.376	391.009	4.188,52
13	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Persen	1,63	1,28	1,39	1,13	1,06	1,13
14	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persen	0,43	0,28	0,35	0,27	0,24	0,23
15	Jumlah Pengangguran	Juta Orang	1,80	1,87	1,84	1,85	1,90	2,53
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,72	8,89	8,22	8,23	8,04	10,46
17	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,11	89,56	89,18	89,52	89,26	89,26**
18	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	69,02	69,02	70,04	70,14	69,48	69,48**
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	ribu rupiah	9.778	10.035	10.285	10.790	11.152	10 .845
2	Total Konsumsi Rumah Tangga:							
	a. ADHB	Miliar rupiah	983.765,23	1.075.522,04	1.169.367,39	1.278.278,90	1.387.762,27	1.378,90
	b. ADHK 2010	Miliar rupiah	759.652,86	800.012,10	836.915,02	878.991,27	920.742,90	894,11
3	Rata-Rata Konsumsi Per Kapita:							
	a. ADHB	Ribu rupiah	21.061,31	22.700,20	24.342,75	26.256,81	28.139,80	-

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	b. ADHK 2010	Ribu rupiah	16.263,31	16.885,23	17.422,08	18.055,15	18.670,00	-
4	Nilai Tukar Petani	Poin	105,07	104,31	104,92	110,9	112,36	101,41
5	Jumlah Tindak Pidana Kriminalitas	Kasus	24.461	23.777	24.689	n/a	n/a	-
6	Persentase Penyelesaiaan Tindak Pidana Kriminalitas	Persen	52,82	49,17	60,84	n/a	n/a	-
7	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91,28	91,11	91,78	91,82	92,02	-
8	Rasio Ketergantungan	persen	47,62	48,22	47,02	46,81	46,67	46,57
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	52,91	46,01	51,85	49,54	52,12	61,59
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	C	B	BB	BB	BB	BB**
11	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Poin	73,04	66,82	68,78	73,91	65,5	65,5**
12	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	72,6	63,39	68,5	68,7	68,5	68,5**
13	Indeks Risiko Bencana Daerah (IRDI)	Poin	168,15	163,18	158,52	152,13	152,13	152,13**
14	Indeks Kebahagiaan	Poin	n/a	n/a	69,58	n/a	69,58	69,58**

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021
Keterangan : **) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

Tabel 2.92
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Aspek Pelayanan Umum
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
1	**Fokus Layanan Urusan Wajib**					
1.1	**Pendidikan**					
1.1.1	APK SD/MI	Persen	109,42	108,09	107,54	103,35
1.1.2	APK SMP/MTs	Persen	90,07	89,58	88,8	99,27
1.1.3	APK SMA/SMK/MA	Persen	70,23	70,56	76,48	75,31
1.1.4	APM SD/MI	Persen	97,68	97,82	98,06	94,36
1.1.5	APM SMP/MTs	Persen	79.55	79,76	80,29	76,65
1.1.6	APM SMA/SMK/MA	Persen	56,73	56,92	57,22	57,33
1.1.7	**Angka Partisipasi Sekolah**					
a.	Sekolah Dasar (SD/MI)	Persen	99,57	99,54	99,51	99,52
b.	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Persen	93,19	93,41	93,77	94,15
c.	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	65,72	65,82	66,62	67,17
d.	Perguruan Tinggi	Persen	19,40	20,37	21,50	21,96
1.1.8	**Rasio Guru Terhadap Murid**					
a.	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar	Rasio	15	21	23	23
b.	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama	Rasio	16	21	21	21
c.	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas	Rasio	20	18	19	20
1.1.9	**Angka Putus Sekolah**					
a.	Sekolah Dasar (SD/MI)	Persen	0,18	0,10	0,08	0,05
b.	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Persen	0,57	0,48	0,52	0,17
c.	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	1,45	1,37	1,19	0,28
1.1.10	**Angka Kelulusan**					
a.	Sekolah Dasar (SD/MI)	Persen	99,75	99,93	99,61	98,79
b.	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Persen	99,46	99,63	99,87	97,92
c.	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	98,70	98,52	97,97	98,56
1.1.11	**Angka Melanjutkan Pendidikan**					
a.	Sekolah Dasar (SD/MI)	Persen	77,41	75,9	79,86	80,79

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
b.	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Persen	97,77	102,67	103,81	107,77
c.	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	20,50	24,05	35,5/40,39	40,57
d.	SMA/SMK Sederajat Akreditasi A	Persen	n/a	25,71	24,77	43,23
1.1.12	Kualifiaksi S2 Guru SMA	Persen	11,54	15,88	13,55	13,31
1.1.13	Kualifiaksi S2 Guru SMK	Persen	8,43	9,68	6,86	6,83
1.1.14	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/MA/SMK	Buah	n/a	n/a	335	659
1.2	**Kesehatan**					
1.2.1	Indeks Kesehatan	Indeks	80,63	80,68	80,72	81,02
1.2.2	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Rasio	84	83	88	n/a
1.2.3	Rasio Puskesmas/Puskemas Keliling per satuan penduduk	Rasio	44.485	45.123	44.782	44,746
1.2.4	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio	147.349	144.891	142.124	n/a
1.2.5	Persentase Balita Gizi buruk	Persen	1,8	1,6	1,65	3,2
1.2.6	Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	4.045	3.730	3.240	3.083
1.2.7	Rasio Kematian Bayi	Persen	4,09	3,93	3,63	3,40
1.2.8	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	825	797	797	796
1.2.9	Persentase Rumah tangga yang berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	54,16	55,9	58,1	61,8
1.2.10	Persentase Desa Siaga Aktif	Persen	92,37	94,90	97,65	99,00
1.2.11	Persentase penduduk menggunakan jamban sehat	Persen	53,30	66,89	67,95	69,78
1.2.12	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	Persen	95,95	86,00	91,81	94,18
1.2.13	Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar	Persen	62,75	64,29	62,50	38,64
1.2.14	Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi	Puskesmas	0	80	385	772
1.2.15	Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi	Rumah Sakit	33	78	170	229
1.2.16	Jumlah RS mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar	Rumah Sakit	73,00	78,00	88,00	98,00
1.2.17	Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota	Persen	78,00	78,04	88,74	94,18
1.2.18	Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan	Persen	62,50	68,56	71,62	83,17
1.2.19	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (*treatment Succes Rate*)	Persen	70,40	62,00	86,02	74,00
1.2.20	Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI >90%	Persen	88,81	91,07	91,80	91,90

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.2.21	Prevalensi Hipertensi	Persen	40,74	40,74	33,00	34,50
1.2.22	Persentase Kab/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	Persen	74,10	92,59	99,25	100,00
1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1.3.1	Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Kondisi Baik	Persen	97,80	98,01	98,17	90,18
1.3.2	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	Persen	69,65	72,06	73,95	74,01
1.3.3	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	67,12	71,14	73,17	76,85
1.3.4	Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	61,13	66,26	67,11	67,87
1.3.5	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	61,37	65,64	67,01	70,74
1.3.6	Cakupan akses infrastruktur dasar permukiman	Persen	N/A	N/A	N/A	72,00
1.3.7	Persentase luasan genangan permukiman yang tertangani	Persen	n.a	n.a	n.a	n.a
1.3.8	Persentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	100
1.3.9	Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air	Tahapan	4	4	4	4
1.3.10	Persentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat	Persen	1,51	1,77	n/a	n/a
1.3.11	Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di WS. Kewenangan Provinsi	m3	131.800	520.000	n/a	n/a
1.3.12	Persentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	Persen	100	100	n/a	n/a
1.3.13	Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	Persen	58,33	60,73	n/a	n/a
1.3.14	Persentase Data Sumber Daya Air yang dilayani	Persen	100	100	100	100
1.3.15	Bertambahnya luas sawah yang terlayani Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi	Ha	n/a	86,29	88,31	88,31
1.3.16	Persentase ketersediaan air terhadap kebutuhan air baku	Persen	n/a	51,5	53,5	55,5
1.3.17	Persentase luas tanam di sawah yang terairi terhadap total luas tanam keseluruhan di Daerah Irigasi kewenangan Provinsi	Persen	220	220	245	250
1.3.18	Persentase jaringan irigasi kewenangan provinsi yang berkinerja baik	Persen	69,65	72,06	73,95	74,01
1.3.19	Persentase kerusakan infrastruktur SDA dan irigasi yang dapat ditangani	Persen	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.3.20	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a
1.3.21	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a
1.3.22	Tingkat implementasi rekomendasi yang dihasilkan oleh kelembagaan Sumber Daya Air	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a
1.3.23	Persentase Titik Terdampak Banjir dan Kekeringan yang terkendali	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a
1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**					
1.4.1	Cakupan Rumah Layak Huni	Persen	92,70	92,78	93,12	98,46
1.4.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	12.493	9.801	32.152	53.373
1.4.3	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	Persen	82,64	78,00	80,65	80,95
1.4.4	Rasio Permukiman Layak	Persen	n/a	n/a	0,9928	0,9948
1.4.5	Tingkat kualitas kawasan permukiman	Persen	n/a	n/a	1,44	1,60
1.5	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**					
1.5.1	Jumlah Linmas	Orang	120.928	119.424	n/a	n/a
1.5.2	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Rasio	26	26	n/a	n/a
1.6	**Sosial**					
1.6.1	Jumlah PPKS	orang	6.045.376	6.548.234	7.032.533	7.032.533
1.6.2	Jumlah PPKS yang Mendapat Bantuan	Orang	644.268	643.618	710.539	2.443
1.6.3	Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	3.518	5.350	2.978	3.052
1.6.4	Persentase PMKS yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya	Persen	0.88	0.88	1,28	1,48
1.6.5	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	Persen	0,33	0,33	0,44	1,26
1.6.6	Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	Persen	0,64	0,64	0,77	6,44
1.6.7	Persentase PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	5,48	5,48	6,63	11,3

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.6.8	Persentase PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	2,56	2,56	3,1	9,5
1.6.9	Persentase sumber dana bantuan social yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	1,19	1,19	1,30	3,4
1.6.10	Persentase peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Persen	4,32	4,32	5,24	6,3
1.6.11	Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	Persen	1,93	1,93	2,33	n/a
1.6.12	Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya	Persen	0,33	0,33	0,44	1,26
1.7	**Tenaga Kerja**					
1.7.1	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	20.586.356	21.075.899	22.391.003	22 628 123
1.7.2	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	91,1	91,28	91,78	91,83
1.7.3	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91,28	91,11	91,78	91,83
1.7.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	60,34	60,65	63,34	62,92
1.7.5	Pencari Kerja yang Sudah Ditempatkan	persen	40,24	47,57	n/a	n/a
1.7.6	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Persen	2,78	2,29	1,57	1,00
1.7.7	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0,38	0,34	0,34	0,38
1.7.8	Persentase Serapan Tenaga Kerja	Persen	75,79	72,16	87,67	54,24
1.7.9	Jumlah wirausaha baru	Orang	3380,00	640,00	280,00	620,00
1.7.10	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Persen	94,00	90,70	87,52	86,97
1.7.11	Persentase fasilitasi penyelesaian kasus CTKI dan TKI	Persen	72,99	63,64	55,55	66.11
1.7.12	Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	14,79	14,59	12,63	11,08
1.8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
1.8.1	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	38,74	40,3	43,89	42,37
1.8.2	Perkembangan Perolehan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional	Jumlah	6 Kab/Kota	n/a	15 Kab/Kota	19 Kab/Kota
1.8.3	Korban *Trafficking* yang Berhasil dipulangkan	Orang	11	37	57	n/a
1.8.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	38,74	49,30	43,89	42,37
1.8.5	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	7	8	15	19

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.8.6	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100	100
1.8.7	Persentase Kab/Kota mendapat Penghargaan KLA Tingkat Nasional	Persen	25,92	*n/a	55,55	70,37
1.8.8	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Persen	100	100	100	100
1.8.9	Persentase perempuan di legislatif	Persen	22	22	22	22
1.8.10	Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender	Persen	**) IPG 88,35 **) IDG 68,87	**) IPG 89,11 **) IDG 69,02 **)Jumlah APE Kab/Kota 13	**) IPG 89,56 **) IDG 71,15	**) IPG 89,18 **) IDG 70,04 **)Jumlah APE Kab/Kota 24
1.8.11	Persentase keberhasilan penanganan kasus KED terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100
1.8.12	Pesrsentase kabupaten kota yang mendapat input peningkatan kualitas hidup perempuan di Jawa Barat	Persen	**) 184 Desa /Kel P2WKSS Aktif **) Jumlah Kel PP melalui Program Pekka 493	**) 211 Desa /Kel P2WKSS Aktif **) Jumlah Kel PP melalui Program Pekka 493	**) 238 Desa /Kel P2WKSS Aktif **) Jumlah Kel PP melalui Program Pekka 379	**) 265 Desa /Kel P2WKSS Aktif **) Jumlah Kel PP melalui Program Pekka 379
1.8.13	Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*)	Persen	2,2	2,05	2,24	2,49
1.9	**Pangan**					
1.9.1	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/Tidak Ada	ada	ada	ada	ada
1.9.2	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/jiwa/ tahun	145,46	154,00	152,19	149,61
1.9.3	Konsumsi Beras Per Kapita	Kg/kapita /tahun	86,95	87,48	83,93	82,4
1.9.4	Produksi Komoditas Peternakan:					
	a. Daging	Ton	680.650	873.311	991.154	1.057.078
	b. Telur	Ton	210.198	222.865	229.870	234.223
	c. Susu	Ton	249.947	302.559	310.461	324.817

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.9.5	Jumlah Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Peternakan	Unit	56	58	105	195
1.9.6	Peningkatan mutu produk peternakan:					
	a. Daging	Persen	71	87	83,92	90,02
	b. Telur	Persen	87	83	90,85	97,41
	c. Susu	Persen	80	72	99,64	86,64
1.9.7	Jumlah Populasi ternak:					
	– Sapi Potong	Ekor	425.826	413.372	405.334	406.241
	– Sapi Perah	Ekor	116.400	119.595	115.827	119.349
	– Kerbau	Ekor	110.660	102.571	102.743	103.734
	– Domba	Ekor	11.575.359	10.038.828	11.425.574	11.608.559
	– Kambing	Ekor	2.610.375	1.237.990	1.251.354	1.274.548
	– Ayam Ras Petelur	Ekor	14.469.405	15.143.460	15.157.182	15.717.734
	– Ayam Ras Pedaging	Ekor	104.015.708	108.304.978	122.314.586	125.088.799
	– Ayam Buras	Ekor	27.504.336	25.842.311	26.166.517	26.712.982
	– Itik	Ekor	9.689.260	10.734.277	10.158.658	12.062.171
1.9.8	Persentase produk peternakan yang sesuai SNI					
	– Daging	Ton	71	87	83,92	90,02
	– Telur	Ton	87	83	90,85	97,41
	– Susu	Ton	80	72	99,64	86,64
1.9.9	Presentase pelaku usaha yang berdaya saing	Persen	10	10	11	
1.9.10	Jumlah kawasan usaha peternakan	Kawasan	5	5	5	5
1.9.11	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa:					
	– Anthrax	Kasus/ tahun	0	0	0	0
	– AI	Kasus/ tahun	33	50	38	29
	– Brucellosis	Prevalensi	2,35	2,1	1,44	1,79
	– Rabies	Kasus/ tahun	2	2	2	3

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.9.12	Persentase kapasitas kompetensi SDM aparatur dan masyarakat bidang ketahanan pangan (%)	Persen	0	0	75,98	100
1.9.13	Jumlah kelompok yang meningkatkan usahanya (kelompok)	Kelompok	30	30	66	43
1.9.14	Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan (Point).	Poin	84,6/81	86/84,3	88/85,2	85,9
1.9.15	Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah (Ton)	Ton	223,60	198,50	916,54	792,24
1.9.16	Ketersediaan Informasi, Harga dan Akses pangan	Persen	125,00	124,94	100,00	100,00
1.9.17	Persentase Desa Rawan Pangan yang Tertangani	Persen	38,50	40.96	44,65	47,00
1.9.18	Jumlah cadangan pangan masyarakat (Kelompok)	Kelompok	70	0	184	0
1.9.19	Persentase Capaian Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis (%)	Persen	0	125	100	100
1.9.20	Persentase intervensi lokasi potensi rawan pangan (persentase)	Persen	38,50	40.96	44,65	47,00
1.9.21	Jumlah pelaku usaha yang bisa mengakses pasar regional dan nasional (orang)	Orang	5	15	30	Indikator tidak berlanjut (direvisi)
1.9.22	Jumlah sarana pemasaran peternakan di kab/kota yang memenuhi standar pelayanan minimal SOP (unit)	Unit	8	5	5	Indikator tidak berlanjut (direvisi)
1.9.23	Persentase tingkat konsumsi pangan (%)	Persen	103,24	106,81	94,58	Indikator tidak berlanjut (direvisi)
1.9.24	Energi (kkal/Kap/hr)	kkal/Kap /hr)	2010,9	2.165	2259,5	2218
1.9.25	Protein (gr/Kap/hr)	gr/Kap/hr	58,5	60,5	63,9	64,8
1.9.26	Konsumsi hewani /daging, telur, susu) (gr/Kap/hr)	gr/Kap/hr	54,3	62,41	68,3	70,58
1.9.27	Skor Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi (point)	Poin	78,3	81	80,6	81,6
1.9.28	Persentase sampel komoditi pangan segar yang tersertifikat (%)	Persen	85,5	98,5	100	100
1.9.29	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan yang sesuai SNI (%)	Persen	n/a	n/a	n/a	84
1.9.30	Nilai Tukar Usaha Peternakan (poin)	Poin	117,01	122,37	125,87	127,09
1.10	**Pertanahan**					
1.10.1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Persen	29,12	40,75	n/a	n/a

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.11	**Lingkungan Hidup**					
1.11.1	Persentase Tutupan Lahan yang Berfungsi Lindung terhadap Luas Wilayah	Persen	37,2	37,2	38,52	40,96
1.11.2	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	10,23	11,45	12,56	12,91
1.11.3	Pencapaian Status Mutu Sungai Dan Waduk Besar Dengan Tingkat Cemar Sedang	Persen	23,45	56,12	96,55	89,96
1.11.4	Indeks Kualitas Air	Poin	40	40,41	42,07	39.87
1.11.5	Indeks Kualitas Udara	Poin	74,63	51,49	78,91	72.73
1.11.6	Jumlah lokasi Program kampung Iklim (PROKLIM)	Kampung Iklim	23,00	61,00	155,00	313,00
1.11.7	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Taman	1,00	6,00	12,00	13,00
1.11.8	Jumlah pedoman pengelolaan kawasan lindung dan non lindung dalam pelaksanaan pembangunan	Kawasan	2,00	4,00	6,00	8,00
1.11.9	Jumlah contoh uji yang terlayani di laboratorium	Uji sampel	n/a	n/a	2139,00	2876,00
1.11.10	Jumlah kabupaten/kota yang terlayani Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional	Kab/kota	n/a	n/a	4,00	4,00
1.12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
1.12.1	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.12.2	Akurasi Data Kependudukan	Persen	n/a	n/a	98,63	96,83
1.12.3	Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan	Perangkat Daerah	n/a	n/a	4,00	15,00
1.12.4	Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jawa Barat	Persen	n/a	n/a	95,26	91,44
1.13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
1.13.1	Persentase PKK aktif	Persen	99,16	99,07	n/a	n/a
1.13.2	Persentase Ormas/LSM Aktif	Persen	4,7	8,6	n/a	n/a
1.14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
1.14.1	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	Anak	1,20	1,22	1,14	n/a
1.14.2	Cakupan Peserta KB Aktif	Orang	9.715.496	1.441.317	1.029.212	6.245.099
1.14.3	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,48	1,43	1,39	1,34

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.15	**Perhubungan**					
1.15.1	Jumlah Terminal	Unit	12	12	14	14
1.15.2	Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	10	10	6	6
1.15.3	Prosentase Jaringan Trayek yang terevaluasi di Jawa Barat	persen	88,11	94	8,38	22,66
1.15.4	Prosentase Keikutsertaan Kab/Kota dalam WTN	persen	44,44	55,56	55,56	70,37
1.15.5	Prosentase Kepemilikan armada angkutan umum AKDP perseorangan menjadi berbadan hukum	persen	21,8	75	79,17	83,13
1.15.6	Prosentase Ketersediaan Terminal Tipe B yang memenuhi standar	persen	NA	NA	55,67	56,93
1.15.7	Prosentase Angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan	persen	NA	NA	45,77	50,4
1.15.8	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (Penyusunan Dokumen Perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan Pengembangan Bandara Nusawiru)	persen	22,01	48,73	55,56	58,71
1.15.9	Prosentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Pelabuhan Ratu, Pengembangan Laut dan ASDP)	Persen	NA	NA	62,42	83,05
1.15.10	Prosentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen perencanaan, pembebasan lahan, sosialisasi)	Persen	NA	NA	89,36	91,80
1.15.11	Prosentase Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di Jalan Provinsi	persen	19,06	20,03	26,78	28,67
1.16	**Komunikasi dan Informatika**					
1.16.1	Keberadaan Website Milik Pemerintah Daerah	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
1.16.2	Jumlah Pelaksanan Pameran/Expo	kali	65	123	n/a	n/a
1.16.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	n/a	n/a	n/a	2,90
1.16.4	Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi di Daerah	Persen	80	80	n/a	87,10
1.16.5	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	n/a	n/a	82,89	90,32
1.16.6	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Score	n/a	n/a	414	512
1.17	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**					
1.17.1	Persentase Koperasi Aktif	persen	65,48	63,79	66,64	43,19
1.17.2	Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha	usaha	8.365	14.868	11.996	16.655
1.17.3	Jumlah Pencetakan Wirausaha Baru	Orang	20.150	19.121	46.887	10.260

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.17.7	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	Koperasi	16.855,00	16.542,00	16.967,00	11.021,00
1.17.8	Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM)	UMKM	224,00	267,00	1.523,00	612,00
1.17.9	Persentase Peningkatan Omzet UKM (%)	Persen	5,00	5,00	6,50	16,44
1.17.10	Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi (%)	Persen	5,00	5,00	-4,50	5,00
1.17.11	Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Koperasi (Kop) /Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi (%)	Persen	20,00	6,40	6,70	6,40
1.17.12	Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi UMKM (UMKM)/Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM (%)	Persen	35,00	19,70	18,06	20,10
1.17.13	Jumlah Wirausaha Baru	Unit	1.800,00	3.300,00	5.300,00	9.300,00
1.17.14	Persentase Wirausaha Baru yang menjadi Pelaku Usaha	Unit	100,00	100,00	62,00	75,00
1.18	**Penanaman Modal**					
1.18.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perijinan)	Poin	77,06	76,94	77,67	79,56
1.18.2	Jumlah Total Proyek (buah)	Buah	37.213	38.057	36.791	39749/10549
1.18.3	a. PMA (buah)	Buah	5.108	5.923	7.151	7.893
	b. PMDN (buah)		32.105	32.134	29.640	31856/2856
1.18.4	Jumlah Total Investasi PMA dan PMDN (Rp)		121,516	143,04	162,72	116,96
	a. PMA (Rp.)	Rp. Triliun	71,73	74,99	68,66	74,69
	b. PMDN (Rp.)	Rp. Triliun	49,78	68,05	94,05	42,28
1.18.5	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)		349.377	479.751	297.786	242151/125190
	a. PMA (Orang)	Orang	240.048	295.039	138.921	70.709
	b. PMDN (Orang)	Orang	109.329	184.712	158.865	171442/54478
1.19	**Kepemudaan dan Olahraga**					
1.19.1	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Indeks	43,33	43,33	43,33	46,70
1.19.2	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	44	46	48	50
1.19.3	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional	Orang	739	202	1295	302
1.19.4	Indeks Pembangunan Pemuda	persen	45,83	47,67	47,67 (angka 2016)	46,17
1.19.5	Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional	Peringkat	1	2	1	1

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.19.6	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional (PEPARPENAS)	Peringkat	1	0	2	0
1.19.7	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional POPNAS	Peringkat	1	0	1	0
1.19.8	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Tingkat Kebugaran Masyarakat	Persen	28,17	32,04	32,07	63,50
1.19.9	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	Persen	75,00	89,00	100,00	110,00
1.19.10	Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha	Orang	1.140,00	1.440,00	1.850,00	2.460,00
1.19.11	Jumlah Pemuda Jawa Barat yang dibina untuk prestasi Nasional	Orang	7,00	7,00	7,00	9,00
1.20	**Kebudayaan**					
1.20.1	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	Unit	7	7	12	12
1.20.2	Jumlah Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Jumlah	1.933	2.522	n/a	n/a
1.20.3	Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Jumlah Pembinaan Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah)	Pembinaan	3	3	3	3
1.20.4	Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Sejarah dan Permuseuman (Jumlah Pembinaan Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Sejarah dan Permuseuman)	Pembinaan	15	25	17	15
1.20.5	Pengusulan HKI	Usulan/ Rekomendasi Per Tahun	1	1	1	1
1.20.6	Pelestarian Seni Tradisi (Jumlah Pembinaan Pelestarian Seni Tradisi)	Pembinaan	4	3	3	3
1.20.7	Jumlah Event/Festival/Pasanggiri/ Lomba/Sayembara Karya Seni	Event Per Tahun	24	12	7	7
1.20.9	Pengusulan HAKI/Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Usulan	3	8	5	16,00
1.20.10	Pelestarian seni tradisi, kontemporer dan perfilman	Jenis	7	4	4	4,00
1.20.11	Persentase Benda Koleksi Museum Sri Baduga yang dilestarikan	Persen/ Koleksi	300	465	683	750
1.21	**Statistik**					
1.21.1	Buku Provinsi Dalam Angka	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
1.21.2	Buku PDRB Provinsi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.22	**Persandian**					
1.22.1	Persentase aplikasi di Pemda yang telah dilakukan *penetration test*	Aplikasi	n/a	n/a	n/a	10
1.23	**Perpustakaan**					
1.23.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	513.731	565.435	593.707	596.229
1.23.2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Umum	Eksemplar	149.047	182.355	189.943	n/a
1.23.3	Indeks Membaca Masyakarat	Poin	n/a	68,16	68,16	68,16
1.23.4	Persentase Pembinaa, sosialisasi dan Penyuluhan ke semua jenis perpustakaan	Persen	38,14	38,26	4,00	n/a
1.23.5	Jumlah pembinaan lembaga perpustakaan dan sumber daya manusia pengelola perpustakaan	Unit	n/a	n/a	n/a	803,00
		Orang	n/a	n/a	n/a	1.502,00
1.23.6	Tingkat kepuasan pemustaka	Persen	81,00	90,00	90,00	90,00
1.23.7	Persentase bahan perpustakaan yang dipreservasi	Persen	n/a	3,67	0,50	2.5
1.23.8	Persentase bahan perpustakaan yang dialihmedia-kan	Persen	n/a	1,81	1,81	1,81
1.24	**Kearsipan**					
1.24.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	10	20	30	50
1.24.2	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	14	18	14	15
1.24.3	Persentase peningkatan jumlah pengunjung	Persen	n/a	n/a	20,00	n/a
1.24.4	Persentase jumlah arsip yang digitalisasi/ dialih- mediakan	Persen	29,96	0,21	12.600,00	1.000,00
1.24.5	Jumlah arsip yang di preservasi	Lembar	n/a	n/a	220,00	120,00
1.24.6	Jumlah khasanah arsip diselamat-kan	Khasanah	3,00	1,00	1,00	8,00
2	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**					
2.1	**Kelautan dan Perikanan**					
2.1.1	Nilai Tukar Usaha Pertanian Sub Sektor Perikanan	poin	108,76	113,08	116,53	122,95
2.1.2	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	269.987,70	232.890,34	274.465,48	263.846,66
2.1.3	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	1.075.260,25	1.124.387,54	1.160.747,99	1.174.357,65
2.1.4	Nilai Tukar Nelayan	Poin	109,74	109,55	113,17	116,48
2.1.5	Konsumsi Ikan Per Kapita	kg/kap/ tahun	24,56	26,27	28,6	29,64
2.1.6	Peningkatan produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan	Persen	100,91	96,83	96,14	96,06

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.1.7	Peningkatan Penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan secara akuntabel	Persen	100	100	100	100
2.1.8	Jumlah Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	Kawasan	1	1	1	1
2.1.9	Jumlah Benih Ikan yang ditebar di Perairan Daratan	Ekor	12.853.400	17.605.500	51.414.500	37.500.000
2.1.10	Jumlah Plasma Nutfah yang dilestarikan	Jenis	4	4	4	5
2.1.11	Produksi garam	Ton	890.103,86	3.830,09	234.268,20	475.537,23
2.1.12	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	105,39	100,24	101,54	96,44
2.1.13	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	115,19	61,05	103,3	106,07
2.1.14	Peningkatan Produksi Non Konsumsi	Persen	72,78	224,53	82,15	54,53
2.1.15	Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan mas nasional	Persen	80	74,81	32,15	19,47
2.1.16	Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan nila nasional	Persen	70,36	65,54	68,59	27,82
2.1.17	Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan patin nasional	Persen	77,7	63,9	45,47	24,53
2.1.18	Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan lele nasional	Persen	70,59	66,02	64,47	42,19
2.1.19	Persentase Permintaan Benih Ikan Gurame	Persen	10	9,78	4,8	5,62
2.1.20	Persentase peningkatan produksi olahan	Persen	105,68	8,52	-103,97	71,18
2.1.21	Persentase peningkatan produksi garam	Persen	61,57	- 23.139,76	98,37	50,74
2.1.22	NTP Sub sektor perikanan	poin	98,96	100,46	102,29	106,55
2.1.23	Persentase peningkatan jumlah ekspor hasil perikanan	Persen	12,54	13,88	65,38	-11,32
2.1.24	Produksi Perikanan	Ton	1.345.247,95	1.357.272,88	1.435.213,47	1.438.204,31
2.1.25	Peningkatan Konsumsi Ikan Jawa Barat	Persen	2,73	6,51	8,15	3,51
2.1.26	Persentase Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola	Persen	n/a	n/a	n/a	5,28
2.1.27	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang undangan	Persen	n/a	n/a	n/a	55,48
2.2	**Pariwisata**					
2.2.1	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	1.067.271	1.765.059	2.038.319	2597445
2.2.2	Jumlah Wisatawan Domestik	Orang	56.334.706	58.728.666	59.780.016	63.298.608
2.2.3	Jumlah Event Pariwisata	Event Per Tahun	2	3	4	5
2.2.4	Jumlah Event Promosi Pariwisata	Event Per Tahun	5	7	9	5
2.3	**Pertanian**					
2.3.1	Produksi Padi Sawah	Ton	10.856.438	12.031.508	11.849.636	11.073.462

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.3.2	Luas Tanam Padi Sawah	Hektar	1.801.402	1.984.306	1.981.539	1.967.260
2.3.3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	8,69	8,9	8,6	8,67
2.3.4	Nilai TukarPetani	Poin	105,07	104,31	104,92	101,37/110,9
2.3.5	Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan	Persen	-3,78	11,22	-2,25	-6,36
2.3.6	Pertumbuhan Subsektor Tanaman Hortikultura	Persen	3,86	5,90	-0,95	-4,15
2.3.7	KontribusiSektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	0.67	0.63	0,67	n/a
2.3.8	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a
2.3.9	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a
2.3.10	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	20.455.085	21.662.178	21.457.468	20.566.470
2.3.11	Peningkatan ketersediaan benih unggul komoditas perkebunan	Persen	2,2	2,35	2,46	2,64
2.3.12	Penurunan intensitas serangan OPT Perkebunan	Persen	-1,02	-1,02	-1,04	-1,05
2.3.13	Persentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)	Persen	2,15	2,23	2,34	2,36
2.3.14	Persentase Peningkatan Produktivitas rata- rata komoditas strategis perkebunan (%)	Persen	2,19	2,25	2,35	2,37
2.3.15	Persentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)	Persen	13,14	13,22	13,25	13,02
2.3.16	Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)(%)	Persen	0,9619	0,9850	1,0082	1,0058
2.3.17	Persentase Peningkatan jumlah penerapan system jaminan mutu sesuai SNI (%)	Persen	2,15	2,22	2,54	2,57
2.3.18	Persentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)	Persen	2,17	2,20	2,30	2,48
2.4	**Kehutanan**					
2.4.1	Persentase Tutupan Lahan yang berfungsi lindung terhadap luas wilayah (%)	Persen	17,41	17,41	18,72	18,73
2.4.2	Jumlah lokasi kawasan hutan yang siap ditata batas (lokasi)	Lokasi	6	5	4	5
2.4.3	Persentase penurunan gangguan keamanan hutan (%)	Persen	3,44	32,21	2	46,18
2.4.4	Persentase Peningkatan jumlah tumbuhan dan satwa liar yang ditangkarkan (%)	Persen	23,67	6,91	5	5
2.4.5	Persentase bertambahnya produksi hasil hutan kayu (%)	Persen	-6,55	2,06	7,21	-28

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.4.6	Persentase bertambahnya produksi hasil hutan bukan kayu (%)	Persen	429,61	0,37	-6,05	12,00
2.4.7	Persentase bertambahnya produksi olahan hasil hutan kayu dan bukan kayu (%)	Persen	0,94	69,41	61,49	-24,49
2.4.8	Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam (%)	Persen	51,17	6,33	5,02	10,18
2.4.9	Jumlah unit hutan rakyat yang dikelola secara lestari	Unit	1	3	4	6
2.5	**Energi dan Sumberdaya Mineral**					
2.5.1	Rasio Elektrifikasi	Rasio	93,71	97,87	99,87	99,99
2.5.2	Persentase Penertiban Pertambangan Tanpa Izin	Persen	79,07	82,86	100	n/a
2.5.3	Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Administrasi dan Teknis	Persen	n/a	n/a	30	35
2.5.4	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	Persen	n/a	n/a	1,84	1,84
2.5.5	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh	n/a	n/a	1155	1231
2.5.6	Jumlah Instalasi Tenaga Listrik yang Laik Operasi	Unit	n/a	311	498	349
2.5.7	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi	Persen	0,55	0,64	0,91	1,07
2.5.8	Jumlah pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan	SBM	87.339,00	169.748,00	251.586,00	254.979,65
2.5.9	Persentase luas Usaha Pertambangan yang Melaksanakan *Good Mining Practice*	Persen	56,00	64,29	65,26	71,31
2.5.10	Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah	Persen	65,34	65,46	65,68	65,75
2.5.11	Tersedianya prasarana air bersih bagi masyarakat bersumber dari air tanah dalam di wilayah rawan air	Titik	11,00	11,00	15,00	19,00
2.5.12	Jumlah pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral	Rp.	2.652.685.269.341,00	2.467.211.328.499,00	2.661.245.408.227,00	2.820.042.158.107,00
2.6	**Perdagangan**					
2.6.1	Laju Pertumbuah Ekspor	Persen	15,05	3,34	13,42	n/a
2.6.2	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	U$ Juta	12,74	14,187	18,432	18,976
2.6.3	Ekspor NonMigas	Juta US$	24.271,9	25.280	28.969,2	30.120,5
2.6.4	Kontribusi Ekspor NonMigas	Persen	18,42	19,14	18,92	18,50
2.6.5	Indeks Keberdayaan Konsumen	Poin	n/a	n/a	37,29	37,28
2.6.7	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	SNI Wajib	n/a	n/a	70	85
2.6.8	IHK (Indeks Harga Konsumen) bahan makanan	Poin	127,396	137,565	140,643	146,771
2.6.9	Volume Ekspor Non Migas	Ribu Ton	6.852,41	7.093,11	7.354.59	7.495,86

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.6.10	Nilai Ekspor Non Migas	Juta USD	24.970,18	25.280,03	25.280,03	30.125,78
2.6.11	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun	Persen	-3,27	-3,14	14,49	3,99
2.6.12	Peningkatan Jumlah eksportir Jawa Barat per tahun	eksportir	203	208	182	211
2.6.13	Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	Persen	1	1,89	+4	3
2.6.14	Jumlah revitalisasi pasar tradisional	Unit	20	24	n/a	n/a
2.6.15	Jumlah kerjasama perdagangan	Buah	15	3	n/a	11
2.6.16	Terkendalinya inflasi Jawa Barat	Persen	0,79	2,75	3,63	3,54
2.6.17	Jumlah UTTP dan BDKT	Buah	4.341.614	4.341.614	157	305
		Buah	1.342	928	n/a	n/a
2.6.18	Peningkatan cakupan pengawasan barang beredar	Persen	27,87	10,90	100	100
2.6.19	Indeks kemberdayaan konsumen (IKK)	Poin	n/a	n/a	37,29	37,28
2.6.20	Jumlah barang yang diuji	Buah	n/a	n/a	111,00	260,00
2.6.21	Laju pertumbuhan ekspor non migas	Persen	-4.97	1.24	14.49	3,99
2.7	**Perindustrian**					
2.7.1	Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	43,07	42,55	42,23	42,16
2.7.2	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Persen	4,39	4,77	5,32	6,52
2.7.3	Jumlah Unit usaha Industri	Unit Usaha	202.940	203.440	210.809	213.706
2.7.4	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	Orang	4.620	9.133	13.303	15.182
2.7.5	Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat	Triliun upiah	166,29	168,49	51,870	71,914
2.7.6	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Persen	0,05	0,17	0,34	9,92
2.7.7	Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	Orang	2.285	2.345	3.095	3.365
2.7.8	Peningkatan nilai produksi industri	Persen	6.32	-1.33	7,43	9,88
2.7.9	Jumlah kerjasama industri	Buah	n/a	n/a	2,00	10,00
2.8	**Transmigrasi**					
2.8.1	Persentase Transmigran Swakarsa	Persen	11,91	35,93	n/a	n/a
2.8.2	Jumlah keluarga calon transmigran yang telah dilatih	KK	309,00	206,00	63,00	63,00
3	**Unsur Pendukung Urusan Peemerintahan Daerah**					
3.1	**Sekretariat Daerah**					
3.1.1	Nilai LKjIP/LAKIP	Nilai	BB	A	A	A

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3.1.2	Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Peringkat /Skor/Status	Peringkat 2/ Skor: 3,1760 /Status: sangat tinggi	Peringkat 2 / Skor: 3,2496/Status: sangat tinggi	Peringkat 2 / Skor: 3,2842/Status: sangat tinggi	n/a
4	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
4.1	**Perencanaan**					
4.1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
4.1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
4.1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
4.1.4	Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	100	99	99,22
4.2	**Keuangan**					
4.2.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
4.2.2	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat waktu/ Tidak	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
4.2.3	Perda dan Pergub APBD /APBD Perubahan tepat waktu	Persen	n/a	n/a	100,00	100,00
4.2.4	Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota tepat waktu	Persen	n/a	n/a	100,00	100,00
4.2.5	Terselenggarana koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pembinaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	n/a	n/a	100,00	100,00
4.3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan**					
4.3.1	Persentase ketersediaan aparatur sesuai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja	Persen	n/a	0	85	n/a
4.3.2	Persentase tingkat pelanggaran disiplin pegawai	Persen	n/a	0	2	n/a
4.3.3	Persentase pegawai yang mendapat nilai SAKP >76%	Persen	n/a	91	78	n/a
4.3.4	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	Persen	n/a	86	90	n/a
4.3.5	Persentase ketersediaan layanan informasi kepegawaian	Persen	n/a	100	100	n/a
4.4	**Penelitian dan Pengembangan**					
4.4.1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Berbasis IPTEK	Jumlah	8	n/a	n/a	n/a

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4.4.2	Jumlah Hasil Penelitian yang Diterapkan dalam Pembangunan Jawa Barat	Jumlah	3	n/a	n/a	n/a
4.4.3	Jumlah Karya IPTEK yang Didaftarkan untuk mendapat Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah	30	n/a	n/a	n/a
4.4.4	Jumlah Inovasi yang Ditindaklanjuti menjadi SIDa	Jumlah	3	n/a	n/a	n/a
4.4.5	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	persen	n/a	77	83	90
4.4.6	Persentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	persen	n/a	50	55	67
4.4.7	Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat	jumlah	n/a	42	50	62
4.4.8	Persentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan	persen	n/a	40	50	60
4.4.9	Persentase hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan	persen	n/a	67	70	80
344.10	Persentase Kerja sama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK yang diimplementasikan	persen	n/a	100	100	100
4.5	**Penghubung**					
4.5.1	Persentase koordinasi jejaring kerja dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat	Persen	n/a	n/a	n/a	100,00
4.5.2	Persentase fasilitasi promosi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan potensi pembangunan Jawa Barat	Persen	n/a	n/a	n/a	100,00
5	**Unsur Pengawasan**					
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan Terhadap Kab/kota:					
	% S (tindak lanjut yang selesai)	Persen	31,56	n/a	n/a	n/a
	% DP (tindak lanjut dalam proses)	Persen	22,57	n/a	n/a	n/a
	% B (belum ditindaklanjuti)	Persen	45,87	n/a	n/a	n/a
5.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Terhadap PD					
	% S	Persen	0	n/a	n/a	n/a
	% DP	Persen	0	n/a	n/a	n/a
	% B	Persen	0	n/a	n/a	n/a
5.3	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK					
	% TS	Persen	73,06	44,44	21,88	n/a

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	% TB	Persen	22,28	55,56	37,50	n/a
	% BT	Persen	4,66	0	40,63	n/a
5.4	Hasil Penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di Tingkat Nasional	Poin	n/a	n/a	3,249	3,497
5.5	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Peringkat	n/a	n/a	A	A
5.6	Opini BPK-RI terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat	Opini	n/a	n/a	n/a	WTP
5.7	Level Maturitas SPIP Pemeintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Level	n/a	n/a	II	III
5.8	Persentase Penyelesaian tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Persen	n/a	n/a	66,80	66,40
5.9	Persentase Penyelesaian TLHP Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap PD Provinsi	Persen	n/a	n/a	95,00	83,96
5.10	Persentase Nilai Indikator RAD-PPK	Persen	n/a	n/a	100	87/100
5.11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	n/a	n/a	n/a	3,249
5.12	Tingkat kapabilitas APIP Tingkat kapabilitas	Level	n/a	n/a	Level 3	Level 3
5.13	Persentase penurunan jumlah temuan inspektorat terhadap pelanggaran sistem pengendalian intern PD Provinsi	Persen	n/a	n/a	12,00	10,00
5.14	Persentase PD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas	Persen	n/a	n/a	100,00	100,00
5.15	Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat	Persen	n/a	n/a	57,10	76,00
5.16	Jumlah auditor dan P2UPD bersertifikasi	Orang	n/a	n/a	59,00	75,00
5.17	Jumlah auditor yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan auditor madya	Orang	n/a	n/a	23,00	35,00
6.	**Unsur Pemerintahan Umum**					
6.1	**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**					
6.1.1	Jumlah Ormas Terdaftar	Unit	1.079	1.126	1.043	n/a
6.1.2	Jumlah Ormas Aktif	Unit	512	580	640	700
6.1.3	Persentase Ormas Aktif	Persen	1,85	3,99	4,21	n/a

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020

Tabel 2.93
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Aspek Pelayanan Umum
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
1	**Fokus Layanan Urusan Wajib**			
1.1	**Pendidikan**			
1.1.1	APK SD/MI	Persen	104,45	104,46
1.1.2	APK SMP/MTs	Persen	99,37	99,61
1.1.3	APK SMA/SMK/MA	Persen	77,82	90,94
1.1.4	APM SD/MI	Persen	94,42	96,75
1.1.5	APM SMP/MTs	Persen	78,17	76,73
1.1.6	APM SMA/SMK/MA	Persen	57,53	66,77
1.1.7	**Angka Partisipasi Sekolah**			
a.	Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	67,29	67,29
b.	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/Paket C	Persen	77,82	90,94
c.	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C		57,53	66,77
1.1.8	**Rasio Guru Terhadap Murid**			
a.	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas	Rasio	19	19
1.1.9	**Angka Putus Sekolah**			
a.	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	0,30	SMA: 0,22 SMK: 0,38
1.1.10	**Angka Kelulusan**			
a.	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	98,78	SMA: 99,27 SMK: 98,29
1.1.11	**Angka Melanjutkan Pendidikan**			
a.	SMA/SMK Sederajat Akreditasi A	Persen	43,64	SMA: 56,07 SMK: 33,28
1.1.12	Nilai Rerata Uji Kompetensi GTK SMA/MA/SMK/SLB	Persen	58,97	58,97
1.1.13	Kualifiaksi S2 Guru SMA	Persen	13,70	13.74
1.1.14	Kualifiaksi S2 Guru SMK	Persen	6,69	7.60
1.1.15	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/MA/SMK	Buah	194	RKB: 93

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				RPS: 135
1.1.16	Indeks Kepuasaan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Nilai	3,20	3.22
1.2	**Kesehatan**			
1.2.1	Rasio Puskesmas/Puskemas Keliling per satuan penduduk	Rasio	45,328	45.687
	Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	2.851	2.851**
1.2.2	Rasio Kematian Bayi	Persen	3,26	3,18
1.2.3	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	783	85,55
1.2.4	Persentase Rumah tangga yang berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	60,4	59,25
1.2.5	Persentase Desa Siaga Aktif	Persen	99,9	99,9**
1.2.6	Persentase penduduk menggunakan jamban sehat	Persen	72,39	82,49
1.2.7	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	Persen	96,71	94,9
1.2.8	Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar	Persen	66,64	66,64**
1.2.9	Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi	Puskesmas	1028	1083
1.2.10	Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi	Rumah Sakit	320	376
1.2.11	Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota	Persen	94,33	92,12
1.2.12	Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan	Persen	84,46	85,51
1.2.13	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (*treatment Succes Rate*)	Persen	67	73,16
1.2.14	Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI >90%	Persen	93.8	44,8
1.2.15	Prevalensi Hipertensi	Persen	39,6	39,6
1.2.16	Persentase Kab/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	Persen	100	100
1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
1.3.1	Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Kondisi Baik	Persen	91,90	81,54
1.3.2	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	Persen	69,53	69,53**
1.3.3	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	78,78	79,59
1.3.4	Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	69,01	69,69
1.3.5	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	72,44	73,31
1.3.6	Cakupan akses infrastruktur dasar permukiman	Persen	74,57	75,36
1.3.7	Persentase luasan genangan permukiman yang tertangani	Persen	29,20	36,93
1.3.13	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Persen	0,29	0,02
1.3.14	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Persen	52,20	53,58

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.3.15	Tingkat implementasi rekomendasi yang dihasilkan oleh kelembagaan Sumber Daya Air	Persen	50	50
1.3.16	Persentase Titik Terdampak Banjir dan Kekeringan yang terkendali	Persen	8	8
1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**			
1.4.1	Cakupan Rumah Layak Huni	Persen	98,72	99,19
1.4.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	60.800	56.004
1.4.3	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	Persen	79,59	86,6
1.4.4	Rasio Permukiman Layak	Persen	0,9952	0,9952
1.4.5	Tingkat kualitas kawasan permukiman	Persen	6,39	12,79
1.5	**Sosial**			
1.5.1	Jumlah PPKS	Orang	5.872.900	5.872.900**
1.5.2	Jumlah PSKS	Orang	68.133	68.133**
1.5.3	Jumlah PPKS yang Mendapat Bantuan	Orang	1.646	1.646**
1.5.4	Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	3.052	3.052**
1.5.5	Persentase PMKS yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya	Persen	72,44	72,44**
1.5.6	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	Persen	53,81	53,81**
1.5.7	Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	Persen	6,42	6,42**
1.5.8	Persentase PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	45,49	45,49**
1.5.9	Persentase PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	1,96	1,96**
1.5.10	Persentase sumber dana bantuan social yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	0,85	0,85**
1.5.11	Persentase peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Persen	0,59	0
1.5.12	Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	Persen	17,28	17,28**
1.5.13	Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya	Persen	53,81	39.45

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.6	**Tenaga Kerja**			
1.6.1	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	23,80 juta	24,21 juta*
1.6.2	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	92,01	89,54*
1.6.3	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	92,02	89,54*
1.6.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	65,07	64,53
1.6.5	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	7,99	10,46
1.6.6	Pencari Kerja yang Sudah Ditempatkan	persen	35,57	35,57**
1.6.7	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Persen	0,17	0,18
1.6.8	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0,25	0,08*
1.6.9	Persentase Serapan Tenaga Kerja	Persen	35,37	64,92
1.6.10	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Persen	57,63	57,63**
1.6.11	Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	13,46	13,46**
1.6.12	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Persen	18,08	2,55
1.6.13	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	Persen	19,20	20,25
1.7	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
1.7.1	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	46,45	46,79
1.7.2	Perkembangan Perolehan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional	kab/kota	23	23**
1.7.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	46,45	46,79
1.7.4	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	23	85,18
1.7.5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100
1.7.6	Persentase Kab/Kota mendapat Penghargaan KLA Tingkat Nasional	Persen	85,18	85,18
1.7.7	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Persen	100	100
1.7.8	Persentase perempuan di legislatif	Persen	20,00	20
1.7.9	Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender	Persen	88,89	44
1.7.10	Persentase keberhasilan penanganan kasus KED terhadap perempuan dan anak	Persen	100,00	100
1.7.11	Pesrsentase kabupaten kota yang mendapat input peningkatan kualitas hidup perempuan di Jawa Barat	Persen	100,00	45

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.7.12	Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*)	Persen	2,52	2,55
1.8	**Pangan**			
1.8.1	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/Tidak Ada	ada	Ada**
1.8.2	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/jiwa/tahun	110,45	110,45**
1.8.3	Konsumsi Beras Per Kapita	Kg/kapita /tahun	79,40	79,40**
1.8.4	Produksi Komoditas Peternakan:			
	a. Daging	Ton	1.059.719	1.021.699**
	b. Telur	Ton	296.945	609.741**
	c. Susu	Ton	300.337	293.490**
1.8.5	Jumlah Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Peternakan	Unit	502	502**
1.8.6	Peningkatan mutu produk peternakan:			
	a. Daging	Persen	58	58**
	b. Telur	Persen	80	80**
	c. Susu	Persen	80	80**
1.8.7	Persentase produk peternakan yang sesuai SNI			
	– Daging	Ton	58	58**
	– Telur	Ton	80	80**
	– Susu	Ton	80	80**
1.8.8	Jumlah kawasan usaha peternakan	Kawasan	5	5**
1.8.9	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa:			
	– Anthrax	Kasus/ tahun	0	0**
	– AI	Kasus/ tahun	26	26**
	– Brucellosis	Prevalensi	1,74	1,74**
	– Rabies	Kasus/ tahun	1	1**
1.8.10	Persentase kapasitas kompetensi SDM aparatur dan masyarakat bidang ketahanan pangan (%)	Persen	51,85	51,85**
1.8.11	Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan	Poin	90,4	92,9
1.8.12	Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah (Ton)	Ton	831,78	831,78**
1.8.13	Ketersediaan Informasi, Harga dan Akses pangan	Persen	100,00	100,00**
1.8.14	Persentase Desa Rawan Pangan yang Tertangani	Persen	90,40	90,40**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.8.15	Persentase Capaian Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis (%)	Persen	100	100**
1.8.16	Persentase intervensi lokasi potensi rawan pangan (persentase)	Persen	90,40	90,40**
1.8.17	Energi (kkal/Kap/hr)	kkal/Kap/hr)	2199	2150
1.8.18	Protein (gr/Kap/hr)	gr/Kap/hr	62,9	64,9
1.8.19	Konsumsi hewani /daging, telur, susu) (gr/Kap/hr)	gr/Kap/hr	73,08	73,08**
1.8.20	Skor Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi (point)	Poin	85,2	85,2**
1.8.21	Persentase sampel komoditi pangan segar yang tersertifikat (%)	Persen	56,31	56,31**
1.8.22	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan yang sesuai SNI (%)	Persen	98,46	65,21
1.8.23	Nilai Tukar Usaha Peternakan (poin)	Poin	125,01	94,44
1.10	**Lingkungan Hidup**			
1.10.1	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	3,85	3,87
1.10.2	Indeks Kualitas Air	Poin	42,73	42,84
1.10.3	Indeks Kualitas Udara	Poin	79,4	79,58
1.10.4	Peningkatan jumlah dokumen rencana kebijakan strategis yang dievaluasi dampak dan risikonya melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Persen	16,67	54,16
1.10.5	Peningkatan dokumen lingkungan yang dinilai dan diawasi implementasinya	Persen	47,00	89,16
1.10.6	Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD	Persen	91,38	136,32
1.10.7	Persentase penurunan konsentrasi parameter SOX	Persen	87,34	107,90
1.10.8	Persentase peningkatan desa berbudaya lingkungan	Persen	78,63	81,84
1.10.9	Persentase peningkatan luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persen	94,23	110,74
1.10.10	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	Persen	28,80	40
1.10.11	Persentase ketersediaan data inventarisasi dan mitigasi GRK kabupaten/kota	Persen	18,52	60
1.10.12	Persentase peningkatan pengawasan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan hidup pelaku usaha dan/kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Persen	73,50	76,33
1.10.13	Persentase peningkatan sampah yang terolah di TPA/TPST Regional	Persen	55,79	53,78
1.10.14	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari operasional TPPAS regional	Persen	0,78	0,8

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.11	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
1.11.1	Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik	Persen	96,79	96,79**
1.11.2	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	ada/tidak ada	Ada	Ada
1.11.3	Akurasi Data Kependudukan	Persen	80,53	81,37*
1.11.4	Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan	Perangkat Daerah	16	64
1.12	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
1.12.1	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Terlibat dalam Kegiatan TMMD, BSMSS, dan BBGRM	Persen	100	100
1.12.2	Persentase Lembaga Lembaga Budaya dan Keswadayaan Masyarakat	Persen	100	100**
1.12.3	Persentase Posyandu Mandiri	Persen	27,06	27,06**
1.12.4	Identifikasi potensi kawasan perdesaan di perbatasan	Kabupaten	6	6**
1.12.5	Jumlah kerjasama pengembangan potensi kawasan perdesaan di perbatasan	Kabupaten	2	2**
1.12.6	Jumlah desa yang sudah menerapkan SISKEUDES	Desa	90	90**
1.12.7	Persentase anggaran APB-Desa diatas 30% untuk pembangunan infrastruktur perdesaan	Persen	100	100**
1.12.8	Jumlah desa yang sudah memiliki rencana tata ruang wilayah desa	Dokumen	40	40**
1.12.9	Persentase Kader Terlatih dalam Kelembagaan Desa	Persen	73,26	73,26**
1.12.10	Jumlah dan jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) di Jawa Barat	Buah	27	27**
1.12.11	Persentase Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	70	70**
1.12.12	Persentase Kerjasama Pengembangan Kapasitas Produksi Desa, dan Akses Pemasaran Potensi Desa	Persen	30	30**
1.12.13	Persentase Kader Terlatih dalam Kelembagaan Desa	Persen	79,74	79,74**
1.12.14	Persentase Desa Mandiri	Persen	1,58	5,08
1.12.15	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan TMMD/BBGRM/BSMSS	Jumlah	TMMD 12 Kab, BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota di wilayah Kodam III Siliwangi	MMD 12 Kab, BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota di wilayah Kodam III Siliwangi
1.12.16	Jumlah KPD	KPD	653,00	440
1.12.17	Persentase BUMDesa aktif	Persen	69,55	92,05
1.13.18	Jenis inovasi dan TTG yang dihasilkan dari 27 Kabupaten/Kota	Jenis	9,00	25

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.13	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
1.13.1	Cakupan Peserta KB Aktif	Orang	7.126.366	7.126.366**
1.13.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,30	1,11
1.13.3	Total *Fertility Rate*	Anak	2,52	2,55
1.14	**Perhubungan**			
1.14.1	Jumlah Penumpang Angkutan Umum (Darat, Laut dan ASDP, Kereta Api dan Udara)	Penumpang	260.039.637	Tidak ada
1.14.2	Persentase angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan	Persen	57,33	Tidak ada
1.14.3	Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat, Laut & ASDP, Kereta Api, dan Udara	Persen	73,61	Tidak ada
1.14.4	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, PJU, guardrill dll) pada ruas jalan provinsi	Persen	33,85	Tidak Ada
1.14.5	Tingkat Ketersediaan Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Persen	52,53	52,62
1.14.6	Tingkat Ketersediaan Prasarana Perhubungan Udara	Persen	58,01	58,07
1.14.7	Tingkat Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP	Persen	36,16	38,35
1.14.8	Tingkat Ketersediaan Jaringan Transportasi Massal Berbasis Rel	Persen	20,4	30,51
1.15	**Komunikasi dan Informatika**			
1.15.1	Keberadaan Website Milik Pemerintah Daerah	ada/tidak	Ada	Ada
1.15.2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,00	3,58
1.15.3	Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi di Daerah	Persen	93	90
1.15.4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	90,40	98,15
1.15.5	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Score	571	610
1.15.6	Tingkat kematangan pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persen	77.99	80,46
1.16	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**			
1.16.1	Persentase Koperasi Aktif	persen	46,82	58.90
1.16.2	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	Persen	29,84	27,97
1.16.3	Pertumbuhan Akses Modal KUK	Persen	24,61	24,61**
1.16.4	Pertumbuhan Jumlah Rasio Wirausaha	Persen	1,5	1,5**
1.16.5	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	12.631	12.631**
1.16.6	Tingkat kepatuhan koperasi	Persen	-	15,17

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.16.6	Laju pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	-	-6,24
1.16.7	Laju pertumbuhan omzet UMKM binaan	Persen	-	8,25
1.16.8	Jumlah usaha pemula	Unit	-	1.300
1.16.9	Persentase pertumbuhan SDM koperasi	Koperasi	-	0
1.17	**Penanaman Modal**			
1.17.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perijinan)	Poin	81,62	85,36
1.17.2	Jumlah Total Proyek (buah)	Buah	15.370	20.020
1.17.3	a. PMA (buah)	Buah	10.455	11.031
	b. PMDN (buah)		4.915	8.989
1.17.4	Jumlah Total Investasi PMA dan PMDN (Rp)		137,5	120,4
	a. PMA (Rp.)	Rp. Triliun	88,21	51,4
	b. PMDN (Rp.)	Rp. Triliun	49,28	51,4
1.17.5	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	Orang	130.704	113.426
	a. PMA (Orang)	Orang	94.644	85.928
	b. PMDN (Orang)	Orang	30.060	36.060**
1.18	**Kepemudaan dan Olahraga**			
1.18.1	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Indeks	46,70	46,70**
1.18.2	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	52	47,30
1.18.3	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional	Orang	342	342**
1.18.4	Indeks Pembangunan Pemuda	persen	50,00	50,00
1.18.5	Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional	Peringkat	1	1**
1.18.6	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional (PEPARPENAS)	Peringkat	5	5**
1.18.7	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional POPNAS	Peringkat	1	1**
1.18.8	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	Persen	110	100,00
1.18.9	Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha	Orang	1.082	IKK dalam penyusunan
1.18.10	Jumlah Pemuda Jawa Barat yang dibina untuk prestasi Nasional	Orang	19	5
1.19	**Kebudayaan**			
1.19.1	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	Unit	13	12
1.19.2	Jumlah Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Jumlah	30	44
1.19.3	Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Jumlah Pembinaan Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah)	Pembinaan	16	0

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.19.4	Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Sejarah dan Permuseuman (Jumlah Pembinaan Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Sejarah dan Permuseuman)	Pembinaan	30	1
1.19.5	Pengusulan HKI	Usulan/ Rekomendasi Per Tahun	1	0
1.19.6	Pelestarian Seni Tradisi (Jumlah Pembinaan Pelestarian Seni Tradisi)	Pembinaan	9	1
1.19.7	Jumlah Event/Festival/Pasanggiri/ Lomba/Sayembara Karya Seni	Event Per Tahun	7	155
1.19.8	Persentase seni budaya dan destinasi wisata yang dipromosikan	Persen	77,77	52,38
1.19.9	Pengusulan HAKI/Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Usulan	13,00	32
1.19.10	Pelestarian seni tradisi, kontemporer dan perfilman	Jenis	9,00	0
1.19.11	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	Persen	58,21	37,69
1.19.12	Persentase Benda Koleksi Museum Sri Baduga yang dilestarikan	Persen/Koleksi	26,46%/ 800 koleksi museum	9,93(300 koleksi museum)
1.20	**Statistik**			
1.20.1	Buku Provinsi Dalam Angka	ada/tidak	Ada	Ada
1.20.2	Buku PDRB Provinsi	ada/tidak	Ada	Ada
1.21	**Persandian**			
1.21.1	Persentase aplikasi di Pemda yang telah dilakukan *penetration test*	Aplikasi	22	22**
1.22	**Perpustakaan**			
1.22.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	676.609	69.256
1.22.2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Umum	Eksemplar	536.373	563.236
1.22.3	Indeks Membaca Masyakarat	Poin	68,50	61,49
1.22.4	Jumlah Pembinaan Lembaga Perpustakaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan	Unit	54	100
		Orang	82	270
1.22.5	Tingkat Kepuasan Pemustaka	Persen	87	87**
1.22.6	Persentase Bahan Perpustakaan yang Dipreservasi	Persen	2,5	2,5
1.22.7	Persentase Bahan Perpustakaan yang Dialihmediakan	Persen	1,81	1,81
1.22.8	Tingkat ketersediaan fasilitas membaca	Poin	62,76	52,33
1.22.9	Tingkat kebiasaan membaca masyarakat	Poin	67,68	63,54
1.22.10	Tingkat pemanfaatan bahan bacaan	Poin	74,39	68,61
1.22.11	Laju Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Persen	2,20	2,25

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.22.12	Persentase karya cetak, karya rekam dan hasil khazanah budaya Jawa Barat yang disimpan sesuai dengan peraturan	Persen	2,87	50,5
1.22.13	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Poin	0,3178	0,3178**
1.22.14	Persentase pustakawan, tenaga teknis dan penilai lingkup provinsi yang memiliki sertifikat	Persen	17,31	3,00
1.22.15	Persentase Koleksi buku yang dibaca	Persen	1,65	1,21
1.22.16	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Perpustakaan	Poin	82,75	80,53
1.23	**Kearsipan**			
1.23.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	11	28,95
1.23.2	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	3	6
1.32.3	Persentase Jumlah Arsip yang Digitalisasi/ Dialih- Mediakan	Persen	100	100
1.32.4	Jumlah Arsip yang di Preservasi	Lembar	275	375
1.32.5	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Tertib	Persen	11,00	11,00
1.32.6	Persentase Penyusutan Arsip	Persen	12,00	4,00
1.32.7	Persentase Simpul SIKN yang Terintegrasi Se-Jawa Barat	Persen	4	4
1.23.8	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Kearsipan	Poin	50,00	50,00**
1.23.9	Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	16,90	3
1.23.10	Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	17,10	66
2	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**			
2.1	**Kelautan dan Perikanan**			
2.1.1	Nilai Tukar Usaha Pertanian Sub Sektor Perikanan	poin	126,71	104,76
2.1.2	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	249.745,87	225.759,86
2.1.3	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	1.268.509,71	1.163.695,40
2.1.4	Nilai Tukar Nelayan	Poin	119,88	119,88**
2.1.5	Angka Konsumsi Ikan Jawa Barat	kg/kap/tahun	35,81	36,2
2.1.6	Peningkatan produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan	Persen	99	99**
2.1.7	Peningkatan Penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan secara akuntabel	Persen	100	100**
2.1.8	Jumlah Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	Kawasan	2	2**
2.1.9	Jumlah Benih Ikan yang ditebar di Perairan Daratan	Ekor	29.060.500	29.060.500**
2.1.10	Jumlah Plasma Nutfah yang dilestarikan	Jenis	5	5

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.1.11	Produksi garam	Ton	445.727,64	41.342,98
2.1.12	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	105,71	105,71**
2.1.13	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	102,35	102,35**
2.1.14	Peningkatan Produksi Non Konsumsi	Persen	20,39	20,39**
2.1.15	Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan mas nasional	Persen	59,1	59,1**
2.1.16	Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan nila nasional	Persen	39,75	39,75**
2.1.17	Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan patin nasional	Persen	49,36	49,36**
2.1.18	Kontribusi terhadap pemenuhan benih ikan lele nasional	Persen	30,29	30,29**
2.1.19	Persentase Permintaan Benih Ikan Gurame	Persen	58,63	58,63**
2.1.20	Persentase peningkatan produksi olahan	Persen	- 43,15	-43,15**
2.1.21	Persentase peningkatan produksi garam	Persen	-6,69	-6,69**
2.1.22	NTP Sub sektor perikanan	poin	109,49	109,49**
2.1.23	Persentase peningkatan jumlah ekspor hasil perikanan	Persen	14,9	14,9**
2.1.24	Produksi Perikanan	Ton	1.518.215,58	1.389.455,26
2.1.25	Peningkatan Konsumsi Ikan Jawa Barat	Persen	2,95	1,1
2.1.26	Persentase Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola	Persen	14,03	19,04
2.1.27	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang undangan	Persen	51,18	51,85
2.2	**Pariwisata**			
2.2.1	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	3.645.433	31.610
2.2.2	Jumlah Wisatawan Domestik	Orang	64.610.832	35.513.885
2.2.3	Jumlah Event Pariwisata	Event Per Tahun	3	8
2.2.4	Jumlah Event Promosi Pariwisata	Event Per Tahun	5	25
2.3	**Pertanian**			
2.3.1	Produksi Padi Sawah	Ton	9.084.957	9,22* (Ribu Ton)
2.3.2	Luas Tanam Padi Sawah	Hektar	1.903.360	1,61* (Ribu Hektar)
2.3.3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	8,77	9,20*
2.3.4	Nilai TukarPetani	Poin	112,36	101,41
2.3.5	Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan	Persen	-17,91	-17,91**
2.3.6	Pertumbuhan Subsektor Tanaman Hortikultura	Persen	-12,55	-12,55**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.3.7	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	-7,13	-7,13**
2.3.8	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Persen	3,96	3,96**
2.3.9	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	13.393.076	13.759.620
2.3.10	Peningkatan ketersediaan benih unggul komoditas perkebunan	Persen	2,7	1,58
2.3.11	Penurunan intensitas serangan OPT Perkebunan	Persen	-1,20	1
2.3.12	Persentase Peningkatan Produktivitas Rata- rata Komoditas Strategis Perkebunan (%)	Persen	4,71	2,19
2.3.13	Presentase peningkatan produksi komoditas unggulan utama perkebunan	Persen	1,00	1
2.4	**Kehutanan**			
2.4.1	Persentase tutupan hutan	Persen	33,67	45,43
2.4.2	Tingkat kerusakan hutan	Persen	0	0,78
2.4.3	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Persen	5	0
2.4.4	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	108,15	12,45
2.4.5	Produksi Hasil Hutan	Persen	108,15	12,45
2.4.6	Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam	Persen	-5,75	0
2.4.7	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	0	0
2.5	**Energi dan Sumber Daya Mineral**			
2.5.1	Rasio Elektrifikasi	Rasio	99,99	99,99
2.5.2	Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Administrasi dan Teknis	Persen	40,87	46,65
2.5.3	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	Persen	2,06	5,46
2.5.4	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh	1302	1.146,60
2.5.5	Jumlah Instalasi Tenaga Listrik yang Laik Operasi	Unit	916	882
2.5.6	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi	Persen	1,84	1,84
2.6	**Perdagangan**			
2.6.1	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	US$ Juta	19,679	19,679**
2.6.2	Nilai Ekspor Jawa Barat	Juta US$	29.937,46	26.591,08
2.6.3	Nilai Ekspor Non Migas	US$ Juta	29.709,05	26.388,27
2.6.4	Volume Ekspor Non Migas	Ribu Ton	7.393,30	7.609.42
2.6.5	Kontribusi Ekspor Non Migas	Persen	99,237	99,237
2.6.6	Laju pertumbuhan ekspor non migas	Persen	-1,38	-11,18

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.6.7	Peningkatan Jumlah eksportir Jawa Barat per tahun	eksportir	254	285
2.6.8	Laju Nilai Impor Jawa Barat	Persen	-12,84	-21,29
2.6.9	Laju Nilai Impor Non Migas Jawa Barat	Persen	-10,10	-20,51
2.6.10	IHK (Indeks Harga Konsumen) bahan makanan	Poin	4,18	3,76
2.6.11	Terkendalinya inflasi Jawa Barat	Persen	3,21	2,18
2.6.12	Indeks Keberdayaan Konsumen	Poin	41,7	51,95
2.6.13	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	SNI Wajib	101	101*
2.6.14	Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	Persen	10	10**
2.6.15	Jumlah kerjasama perdagangan	Buah	14	14**
2.6.16	Peningkatan cakupan pengawasan barang beredar	Persen	100	100**
2.6.17	Jumlah barang yang diuji	Buah	10	10**
2.7	**Perindustrian**			
2.7.1	Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	42,16	41,19
2.7.2	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Persen	6,52	-4,22
2.7.3	Jumlah Unit usaha Industri	Unit Usaha	214.560	214.851
2.7.4	Peningkatan Jumlah wirausaha baru	Orang	15.182	15.812**
2.7.5	Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat	Triliun upiah	71,914	-27,06
2.7.6	Peningkatan Nilai Produksi IKM	Persen	9,92	9,92**
2.7.7	Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	Orang	3.365	3.365**
2.7.8	Peningkatan nilai produksi industri	Persen	9,88	9,88**
2.7.9	Jumlah kerjasama industri	Buah	10,00	10,00**
3	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
3.1	**Sekretariat Daerah**			
3.1.1	Nilai LKjIP/LAKIP	Nilai	A	A**
4	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
4.1	**Perencanaan**			
4.1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada
4.1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Ada	Prediksi Maret
4.1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada/tidak	Ada	Ada

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4.2	**Keuangan**			
4.2.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	predikat	WTP	WTP
4.2.2	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat waktu/Tidak	Tepat waktu	Tepat Waktu
4.2.3	Jumlah penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah	Buah	3	3**
4.2.4	Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	Persen	100	100**
4.2.5	Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal	Persen	40	40**
4.2.6	Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.	Persen	85	85**
4.2.7	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Pendapatan Daerah)	Skor	84,6	84,6**
4.3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan**			
4.3.1	Persentase tingkat pelanggaran disiplin pegawai	Persen	0,05	0,05**
4.3.2	Persentase pegawai yang mendapat nilai SAKP >76%	Persen	87,89	87,89**
4.4	**Penelitian dan Pengembangan**			
4.4.1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Berbasis IPTEK	Jumlah	4	5
4.4.2	Jumlah Hasil Penelitian yang Diterapkan dalam Pembangunan Jawa Barat	Jumlah	10	11
4.4.3	Jumlah Karya IPTEK yang Didaftarkan untuk mendapat Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah	20	26
4.4.4	Jumlah Inovasi yang Ditindaklanjuti menjadi SIDa	Jumlah	15	15**
4.4.5	Persentase rekomendasi kebijakan daerah yang dihasilkan	persen	20	12,5
4.4.6	Persentase hasil kelitbangan yang diterapkan	persen	20	10,5
4.4.7	Persentase inovasi daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan kekayaan intelektual	persen	37,10	20,8
4.4.8	Persentase kajian kelitbangan yang didiseminasikan kepada perangkat daerah atau stakeholder lainnya	Persen	16,70	17,14
4.4.9	Persentase kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti	Persen	20,00	20
4.4.10	Persentase dokumen B28perencanaan, peningkatan kualitas aparatur, sarana prasarana dan dokumen pengelolaan keuangan	Persen	100,00	100
5	**Unsur Pengawasan**			
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan Terhadap Kabupaten/kota			
	% S (tindak lanjut yang selesai)	persen	61,60	61,60**
	% DP (tindak lanjut dalam proses)	persen	26,16	26,16**
	% B (belum ditindaklanjuti)	persen	12,24	12,24**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan terhadap PD			
	% S	persen	51,46	51,46**
	% DP	persen	22,33	22,33**
	% B	persen	26,21	26,21**
5.3	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK			
	% TS	persen	66,07	66,07**
	% TB	persen	27,11	27,11**
	% BT	persen	5,16	5,16**
5.4	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Peringkat	A	A
5 5	Opini BPK-RI terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat	Opini	WTP	WTP
5.6	Level Maturitas SPIP Pemeintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Level	III	III
5.7	Persentase Penyelesaian tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Persen	94	100
5.8	Persentase Penyelesaian TLHP Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap PD Provinsi	Persen	83	83**
5.9	Persentase Nilai Indikator RAD-PPK	Persen	92	91,80
5.10	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Persen	100	100**
5.11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	3,259	3,259**
5.12	Tingkat kapabilitas APIP Tingkat kapabilitas	Level	Level 3	Level 3*
5.13	Persentase penurunan jumlah temuan inspektorat terhadap pelanggaran sistem pengendalian intern PD Provinsi	Persen	10,00	10,00 **
5.14	Persentase PD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas	Persen	100	100 **
5.15	Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat	persen	77,00	77,00**
5.16	Jumlah auditor dan P2UPD bersertifikasi	Orang	80,00	80,00**
5.17	Jumlah auditor dan P2UPD yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan auditor madya	Orang	36,00	36,00**

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021

2.5 Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2013-2018

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang kontinyu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi. Hasil pembangunan yang disajikan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan RPJMD merupakan informasi penting bagi proses perencanaan periode berikutnya.

Pencapaian indikator kinerja sasaran mencerminkan capaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dengan Visi "**Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua**" terdapat 59 indikator kinerja sasaran, yang mencerminkan komitmen untuk mencapai 5 (lima) misi pembangunan daerah Jawa Barat Tahun 2013-2018. Dari 59 indikator kinerja sasaran yang terdapat pada RPJMD tersebut terdistribusi pada Misi Pertama, "Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing" sebanyak 20 (dua puluh) indikator; Misi Kedua, "Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan", sebanyak 18 (delapan belas) indikator; Misi Ketiga, "Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik" sebanyak 10 (sepuluh) indikator; Misi Keempat, "Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan" sebanyak 11 (sebelas) indikator; dan Misi Kelima, "Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olahraga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal", sebanyak 14 (empat belas) indikator.

Tingkat capaian indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat merupakan perbandingan antara realisasi dengan target yang direncanakan di RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Berdasarkan data kinerja, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.94
Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2013-2018						Realisasi Indikator Kinerja 2013-2018						Evaluasi Capaian Di Akhir Tahun 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
MISI 1: MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING															
Sasaran 1: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata															
1	Indeks Pembangunan Manusia	poin	73,40	74,25 – 74,75	74,75 – 75,50	69,56 – 70,91 (MB)	70,82 - 71,03	71,04 - 71,54	73,58	74,28 (ML)	74,72 (ML)	70,05 (MB)	70,69	71,30	Tercapai
2	Indeks Pendidikan	poin	82,31	84,65	85,50	60,17 – 62,04 (MB)	88,00	89,00	58,08 (MB)	59,26 (MB)	59,95 (MB)	60,67 (MB)	61,63	63,04	Tidak tercapai
3	Angka Melek Huruf	persen	97.00 - 97.50	97,50 – 98,00	98,00 – 98,50	98,50 – 99,00	99,00 – 99,50	99,00 – 99,50	96,70	97,96	98,01	98,22	98,38	98,48	Tidak Tercapai
4	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten	tahun	8,20-8,25	8,25 – 8,30	8,30 – 8,50	8,50 – 8,75	8,75 – 9,10	9,10 – 9,50	8.09	7,69 (ML)	7,88 (ML)	5,63 – 8,89 (MB)	8,02	n/a	Tidak Dapat Nilai
5	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota	tahun	9,25 - 11,00	9,50 – 11,25	9,75 – 11,50	10,25 – 11,75 (ML)	10,75 – 12,00	11,50 – 12,50	9.25	10,10 (ML)	10,19 (ML)	8,07 - 10,93 (ML)	9,82	n/a	Tidak Dapat Nilai
6	APK Sekolah Menengah	persen	72.68	80,48	87,48	92,80	94,10	95,50	72.68	61,19	67,58	67,56	81,25	n/a	Tidak Dapat Nilai
7	APK Pendidikan Tinggi	persen	16-17	17 – 18	18 - 19	19 – 20	20-22	22-25	17.09	19,06	N/A	17,76	19,19	n/a	Tidak Dapat Nilai
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata															
8	Indeks Kesehatan	poin	72,60	75,60	76,53	81,17 – 82,74	81,18 - 81,48	81,49 - 81,54	73,06	73.33 (ML)	73,66 (ML)	81,05 (MB)	81,18	81,26	Tidak tercapai
9	AHH (Angka Harapan Hidup)	tahun	68,70 - 68,9	69 - 69,2	70 - 70,25	70,5– 71	70,75 - 71,,50	71 - 72	72,09	72,23	72,41	72,44	72,47	72,66	Melampaui

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2013-2018						Realisasi Indikator Kinerja 2013-2018						Evaluasi Capaian Di Akhir Tahun 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Sasaran 3: Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK															
10	Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI	buah/tahun	5	10	20	25	30	40	5	5	30	42	52	62	Melampaui
11	Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas	orang	11.400.000	12.540.000	13.794.000	15.173.400	16.690.740	18.359.814	11.400.000	11.400.000	7.722.903	7.722.903	17.783.520	n/a	Tidak Dapat Nilai
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga															
12	Indeks Pemberdayaan Gender	poin	69,70	70	72,02	73	69,40	69,65	67,57	68,87	69,02	71,15	70,04	70,0	Melampaui
MISI 2: MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN BERKEADILAN															
Sasaran 1: Jawa Barat sebagai daerah pertanian berbasis agrikultur															
13	Skor Pola Pangan Harapan	poin	72	74	76	78	80	82	74,90	78,2	81	84,3	85,2	85,9	Melampaui
14	Pencetakan Sawah Baru	Ha	400	5,000	25,000	50,000	80	100	400	5000	0	N/A	400	n/a	Tidak Dapat Nilai
Sasaran 2: Meningkatnya daya saing usaha pertanian															
15	Nilai Tukar Petani (NTP)	poin	109 – 110	110 – 111	111– 112	112 – 113	113 - 114	114 - 116	109 – 110	105,16	105,06	108,06	108,39	110,9	Tidak tercapai
16	Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian	buah	130	205	305	415	540	690	130	N/A*)	0	120	2.756	n/a	Tidak Dapat Nilai
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi															
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	63.01	64,00 – 65,00	65,00– 66,00	66,00 – 67,00	60,96	61,27	63.01	62,77	60,34	60,65	63,34	62,92	Melampaui

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2013-2018						Realisasi Indikator Kinerja 2013-2018						Evaluasi Capaian Di Akhir Tahun 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
18	PDRB Per Kapita (ADHB)	juta - Rp	21,25 - 21,50	21,50 – 22,00	22,00 – 24,00	24,00 – 26,00	26,00 – 28,00	28,00 – 30,00	27,77	30,11	32,65	34,88	37,18	40,31	Melampaui
19	PDRB Per Kapita (ADHK)	juta - Rp	8,5 - 9,0	9,00 – 9,50	9,50 – 11,00	11,00 – 13,00	13,00 – 15,00	15,00 – 17,00	24,12	24,97	25,85	26,92	27,96	29,16	Melampaui
20	Laju Pertumbuhan Ekspor	persen	5,5 – 6,0	6,0 – 6,5	6,5 - 7,0	7,0 – 7,5	3,50 - 4,00	4,00 - 4,50	– 6,29	5,64	5,65	2,93	11,54	3,98	Tidak tercapai
21	Nilai Investasi PMA – PMDN	trilyun- Rp	76,52 – 85,55	85,55 – 95,81	95,81 – 107,79	107,79 – 121,80	121,80 - 138,85	138,85 - 154,00	93,52	108,89	121,51	143,04	162,72	162,8	Melampaui
22	Nilai Investasi PMDN	trilyun- Rp	16 – 17	17 – 19	19 - 21	21 - 23	23 - 27	27 - 34	26,02	37,91	49,78	68,05	94,05	n/a	Tidak Dapat Nilai
23	Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)	trilyun- Rp	60 – 70	65 – 75	75 - 85	85 – 95	84,65	86,87	67,5	70,98	71,73	74,99	68,66	n/a	Tidak Dapat Nilai
24	Nilai Investasi/PMTB ADHB	trilyun- Rp	154,18 - 174,2	174,2 - 194,2	198,6 - 208,6	226,4 – 246,4	267,2 - 287,2	315,3 - 335,3	194,33	305,989	396,36	412,30	449,34	88,12	Tidak tercapai
25	Inflasi	persen	9,15	6,0 - 7,0	6,3 - 7,3	6,3 - 7,3	4,0 - 5,0	4,0 - 5,0	9,15	7,60	2,73	2,75	3,63	3,54	Melampaui
Sasaran 4: Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan															
26	Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha	orang	5,750	6,250	7,250	7,750	7,75	7,75	5,750	5,101	8,365	14.868	11,996	n/a	Tidak Dapat Nilai
27	Indek Daya beli / Indek Pengeluaran	poin	64,17	64,00	64,45	68,90 – 69,46	70,44	70,62	65,08	65.5 (ML)	66,16 (ML)	69,51	70,22	71,01	Melampaui
28	Daya Beli Masyarakat (ML)/Pengeluaran (MB)	ribu rupiah	644.041	645,000 (ML)	650,000 (ML)	9.610.827 – 9.781.956 (MB)	10,098	10,160	9.421 (MB)	9.447 (MB)	9.778 (MB)	10.035 (MB)	10.285 (MB)	n/a	Tidak Dapat Nilai
Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional															
29	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen/tahun	5,2-5,8	5 ,90 – 6,50	6,20 – 6 ,80	6,3 – 6,9	5,5 – 5,76	5,76 – 5,81	6,06	5,07	5,03	5,66	5,35	5,64	Tidak tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2013-2018						Realisasi Indikator Kinerja 2013-2018						Evaluasi Capaian Di Akhir Tahun 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
30	Indeks Gini	poin	0,4 - 0,39	0,38-0,37	0,37 – 0,36	0,36 – 0,35	0,39	0,38	0,41	0,40	0,43	0,40	0,39	0,405	Tidak Tercapai
MISI 3: MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN, PROFESIONALISME APARATUR, DAN PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK															
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi public															
31	Skala Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	skala 1 - 4	3	3	4	4	3,5	3,5	3	3	3	3,21	3,5	3,5	Tercapai
32	Jumlah Penerbitan Perijinan	izin	39,029	42.931	47.224	51.946	52.000	52.000	33.783	40.868	48.741	44.362	17.818	n/a	Tidak tercapai
33	Pendapatan Asli Daerah	trilyun-rp	11,0	14,30	13,30	14,6	16,1	17,7	11,0	15,04	16,26	17,04	18,03	19,78	Melampaui
34	Indikator Daya Saing Provinsi	ranking	6 – 5	5 - 4	4 - 3	3 – 2	2-1	2-1	6 – 5	5	N/A	2	2*	3	Tidak Tercapai
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK															
35	Skala Komunikasi Organisasi	skala 1 - 7	3	3	3 ,5	4	5	6	N/A	N/A*)	2,74	4,97	5	n/a	Tidak Dapat Nilai
36	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	poin	50	60	70	75	80	85	50	63	73	76,50	82,89	90,32	Melampaui
37	Indeks Persepsi Korupsi	poin	5,5	6	6,5	7	7,5	8	5,5	3,7	N/A	N/A	N/A*	n/a	Tidak Dapat Nilai
Sasaran 3: Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur															
38	Indeks Kebahagiaan	poin	55 – 57	57 – 59	59 – 61	61 - 63	63 – 65	63 – 65	65,11	67,66	N/A	N/A	69,58	n/a	Tidak Dapat Nilai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2013-2018						Realisasi Indikator Kinerja 2013-2018						Evaluasi Capaian Di Akhir Tahun 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Sasaran 4: Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum															
39	Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum	persen	57	60	63	65	68	70	57	71,3	62,58	62,58	71,36	71,6	Melampaui
40	Indeks Demokrasi	poin	N/A	66,50 – 67,00	67,00 – 67,50	67,00 – 67,50	68,00 – 68,50	68,50 – 69,00	65,18	71,52	73,04	66,82	68,78	68,78	Tercapai
MISI 4: MEWUJUDKAN JAWA BARAT YANG NYAMAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURSTRATEGIS YANG BERKELANJUTAN															
Sasaran 1: Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana															
41	Jumlah Penduduk	jiwa	45,204,289	46.035.927	46.800.123	47.577.000	48.366,90	49.169,70	45,380,799	46.029.669	47.379.389	46.800.123	48.037.827	48.683.861	Tercapai
42	Persentase Tutupan Lahan yang Berfungsi Lindung terhadap Luas Wilayah	Persen	36 – 37	37 – 38	38 – 39	39 - 41	38-39	39-40	N/A	37,2	37,2	37,2	38,52	40,96	Melampaui
43	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	2	4 – 3	5 - 4	5	6	7	7,70	9,57	10,23	11,45	12,56	12,91	Melampaui
44	Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang	Persen	9,6 - 10,4	10,4 - 10,8	10,8 - 11,2	11,2 – 11,7	11,7 - 12,3	12,3 – 13	10,40	13,14	23,45	56,12	96,55	89,96	Melampaui
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat															
45	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi	persen	11,5 – 12,03	12,03 – 25,09	25,09 – 39,77	38,22	26,73	33,43	11,5 – 12,03	12,03 – 25,09	25,09 – 39,77	39,77-53,64	26,78	28,03	Tidak tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2013-2018						Realisasi Indikator Kinerja 2013-2018						Evaluasi Capaian Di Akhir Tahun 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
46	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	persen	64-66	66 –71	67 - 72	72 - 77	72-74	74-76	65,98	67,37	69,65	67 - 72	73,95	74,01	Tercapai
47	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	persen	78-80	80 - 82	82 - 84	84 – 86	96 - 98	98 - 100	80,50	83,41	93,71	82 - 84	99,87	99,99	Tercapai
48	Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan)	persen	63-64	64 - 65	65 - 67	67 – 69	66,78	67,30	64,70	64,88	61,13	65 - 67	67,11	67,87	Melampaui
49	Cakupan Pelayanan Air Minum	persen	54-58	58 - 63	63 – 70	70 – 73	73 – 74	74 – 76	60,52	65,433	67,12	63 – 70	73,17	76,85	Melampaui
50	Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan)	persen	63-63,50	63,5 - 64	64 - 65	65 – 67	67 – 68	68 – 69	63,40	63,59	61,37	64 - 65	67.01	70,74	Melampaui
Sasaran 3: Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur															
51	Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik dan sedang)	persen	93-93,70	97,10 – 97,4	97,20 – 97,50	97,3 – 97,6	98,15 - 98,25	98,50 - 98,60	97,56	97,68	97,80	98,01	98,17	98,38	Tidak tercapai
MISI 5: MENINGKATKAN KEHIDUPAN SOSIAL, SENI DAN BUDAYA, PERAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM BINGKAI KEARIFAN LOKAL															
Sasaran 1: Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)															
52	Angka Kemiskinan	persen	8,80-7,80	7,80 - 6,80	6,80 - 5,90	5,90 – 5,00	7,97	7,17	9,61	9,18	9,57	8,77	7,83	7,25	Tidak tercapai
53	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	9-8,80	8,50 - 8,00	8,00 - 7,50	7,50 – 7,00	8,0	7,7	9,16	8,45	8,72	8,89	8,22	8,17	Tidak tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2013-2018						Realisasi Indikator Kinerja 2013-2018						Evaluasi Capaian Di Akhir Tahun 2018
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
54	Jumlah PMKS yang Ditangani	orang	479.255	527.181	579. 899	637.888	701.677	771.845	479.255	2.582	643.618	643.618	710.539	n/a	Tidak Dapat Nilai
55	Jumlah Pekerja Anak	orang	562.815	551.558	540.527	529.717	519.122	508.74	562.815	54	192.288	192.288	191.448	n/a	Tidak Dapat Nilai
Sasaran 2: Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu															
56	Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional	orang	1	2	3	3	4	5	N/A	0	0	7	15	16	Melampaui
Sasaran 3: Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni budaya dan pariwisata															
57	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (target optimis)	orang	700	810	950	1.100	1.50	1.75	877.868	902.735	1.067	1.765	2.038	2.597	Melampaui
58	Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional	Karya Budaya	10	10	10	10	10	10	4	5	3	8	5	16	Melampaui
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama															
59	Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama	poin	3	3	4	4	5	5	N/A	3,6	N/A	N/A	3,425	n/a	Tidak Tercapai

Sumber: RKPD Tahun 2020, Bappeda

2.6 Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan mulai dari sektor kesehatan, ekonomi bahkan sosial. Sejak kejadian pertama kasus infeksi COVID-19 ditemukan pada bulan Maret hingga bulan Desember 2020, kinerja pembangunan makro Indonesia mengalami penurunan, begitu pula dengan Provinsi Jawa Barat. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap kinerja pembangunan makro tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan kondisi ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 masih mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif dan capaian indeks pembangunan manusia tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara kondisi ketenagakerjaan pada Agustus 2020 menunjukkan jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dibanding kondisi Februari 2020.

Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 telah berimbas pada kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dampak pandemi COVID-19 mulai terlihat pada Triwulan-I 2020 dimana pertumbuhan PDRB-ADHK hanya mencapai 2,77 persen melambat dibanding triwulan yang sama pada tahun 2019. Pada Triwulan-II 2020, pertumbuhan ekonomi terkontraksi cukup dalam sebesar -5,91 persen, selanjutnya pada Triwulan-III dan IV kinerja perekonomian mulai membaik meskipun masih terkontraksi masing-masing sebesar -4,01 persen dan -2,39 persen. Kinerja perekonomian sepanjang tahun 2020 terkontraksi sebesar -2,44 persen dibanding tahun 2019 yang mencapai 5,07 persen.

Gambar 2.40
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2020 (Persen)

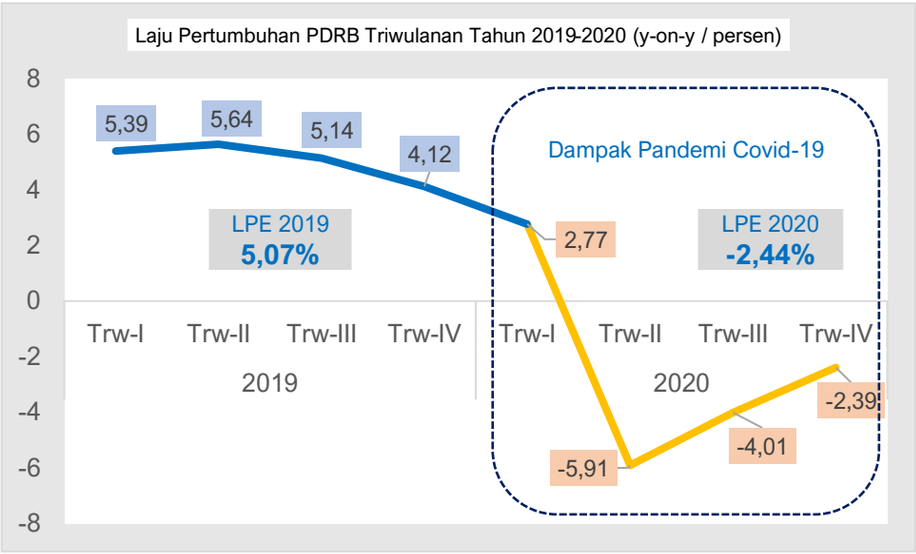

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Melambatnya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari sisi lapangan usaha dan sisi pengeluaran. Dari sisi lapangan usaha, 3 (tiga) lapangan usaha dengan peranan terbesar pada pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat, yaitu Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami kontraksi masing-masing sebesar -4,22 persen dan -7,94 persen dibanding tahun 2019. Sementara lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh positif sebesar 2,29 persen meskipun melambat dibanding tahun 2019 sebesar 2,80 persen.

Adapun dari sisi pengeluaran, 4 (empat) komponen pengeluaran dengan peranan terbesar pada pembentukan PDRB tahun 2020 adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor Barang dan Jasa, Impor Barang dan Jasa dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi cukup dalam mencapai -17,07 persen diikuti PMTB sebesar -8,34 persen, Ekspor Barang dan Jasa terkontraksi sebesar -6,55 persen dan Konsumsi Rumah Tangga terkontraksi sebesar -2,89 persen.

Gambar 2.41
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha dan Pengeluaran
Tahun 2019-2020 (Persen)

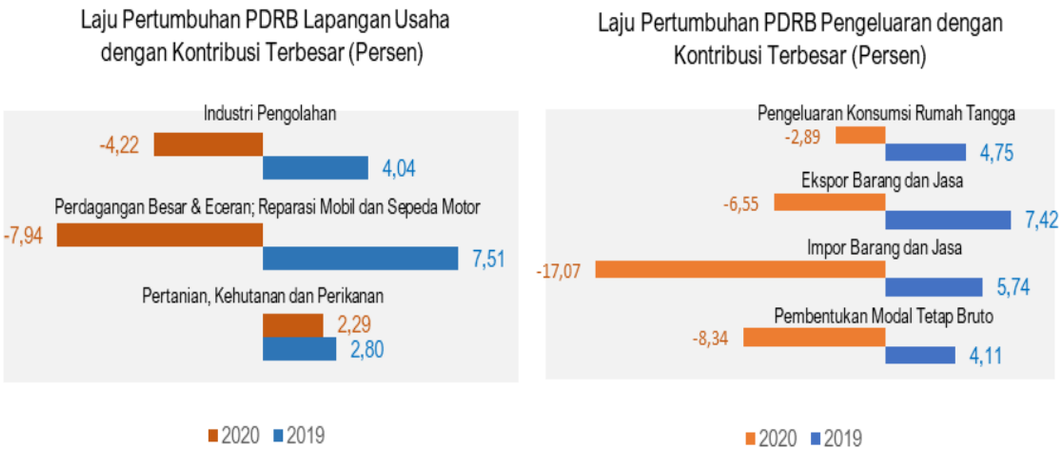

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Dampak Pandemi COVID-19 juga berimbas pada aspek pembangunan manusia. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020. IPM Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan meskipun meningkat dibanding tahun sebelumnya dari 72,03 poin menjadi 72,09 poin. Pada periode 2015-2019 rata-rata pertumbuhan mencapai 0,90 persen sedangkan pertumbuhan IPM tahun 2020 dibanding tahun 2019 hanya sebesar 0,08 persen. Perlambatan pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Barat disebabkan karena komponen pengeluaran per kapita mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita mencapai Rp11.152 ribu menurun menjadi Rp10.845 ribu pada tahun 2020. Penurunan komponen pengeluaran per kapita pada tahun 2020 terjadi di semua kabupaten/kota.

Gambar 2.42
Pengeluaran Per Kapita Tahun 2018-2020 (Ribu Rupiah)

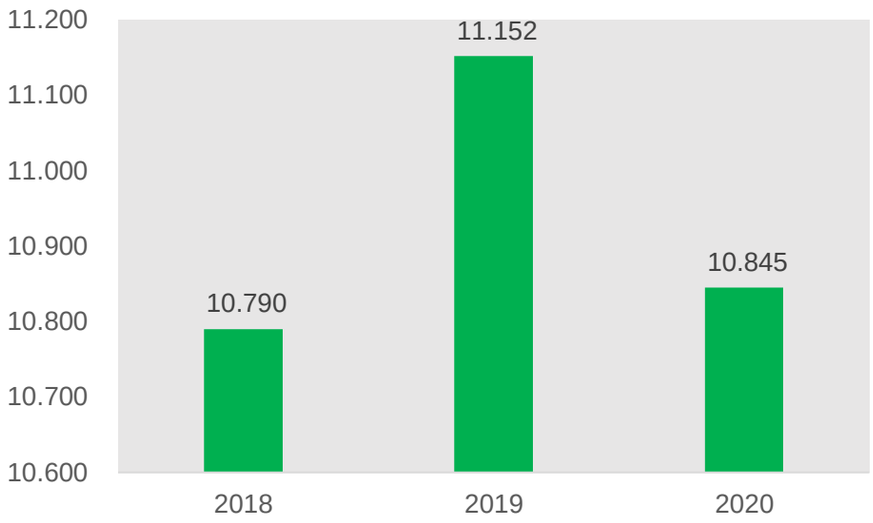

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2020

Dinamika ketenagakerjaan pada Agustus 2020 tidak terlepas dari dampak Pandemi COVID-19. Jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dibanding Februari 2020. Pengangguran mengalami kenaikan sebesar ± 660.000 orang sebanding dengan kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,77 persen poin. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2019 mencapai 7,69 persen meningkat menjadi 10,46 persen pada Agustus 2020. Dinamika ketenagakerjaan pada periode Februari-Agustus 2020 mengindikasikan terdapat 2 (dua) kelompok penduduk bekerja yang terdampak Pandemi COVID-19 yaitu kelompok penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau yang sementara tidak bekerja dan kelompok yang berhenti bekerja (pemutusan hubungan kerja).

Gambar 2.43
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Agustus 2018-2020

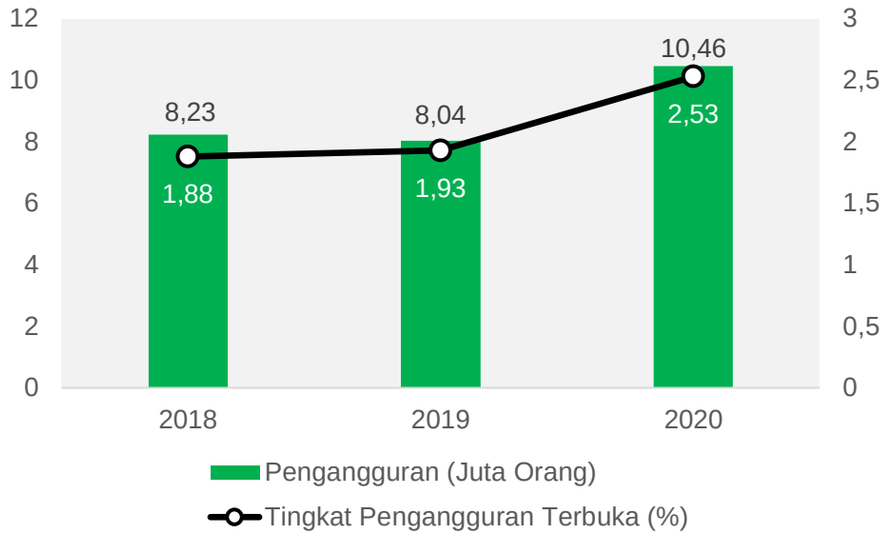

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2020

Dampak pandemi COVID-19 juga mempengaruhi sektor-sektor ekonomi di Jawa Barat, diantaranya sektor pariwisata, UMKM, dan ketenagakerjaan sebagai berikut.

1. Sektor Pariwisata

Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata karena penutupan destinasi wisata berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat bulan Mei 2020 adalah sebagai berikut:

a. Penutupan 411 destinasi wisata dengan jumlah tenaga kerja terdampak 5.179 orang;
b. Penutupan 1.076 hotel dengan jumlah tenaga kerja terdampak 12.143 orang;
c. Usaha ekonomi kreatif yang berhenti berproduksi sebanyak 626 unit, dengan jumlah tenaga kerja terdampak 14.991 orang;
d. Usaha biro perjalanan yang berhenti aktivitasnya sebanyak 251unit dengan jumlah tenaga kerja terdampak 1.107 orang;
e. Jumlah tenaga seni dan budaya yang terdampak 15.034 orang;
f. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Jawa Barat pada bulan Mei 2020 mulai menunjukkan perkembangan positif menjadi 13,35 persen, naik sebesar 5,33 poin dari bulan April 2020 yaitu 8,02 persen. Pada bulan Mei – Agustus 2020 berangsur-angsur meningkat sampai 34,95 persen pada bulan Agustus, sedangkan pada bulan September 2020 sedikit menurun menjadi 32,68

persen. Pada bulan Oktober 2020 kembali menunjukkan perkembangan positif menjadi 37,02 persen dan kembali naik pada bulan November 2020 menjadi 41,31 persen, selanjutnya sedikit menurun menjadi 38,80 persen pada Bulan Desember 2020.

g. Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara ke Jawa Barat masih dalam tren negatif pada bulan Desember 2020 hanya 108 orang. naik 13,68 persen dari bulan November 2020 (*m-t-m*) dan -99,29 persen dari bulan Desember 2019 (*y-o-y*).

Gambar 2.44
Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK)
Provinsi Jawa Barat 2018-2020

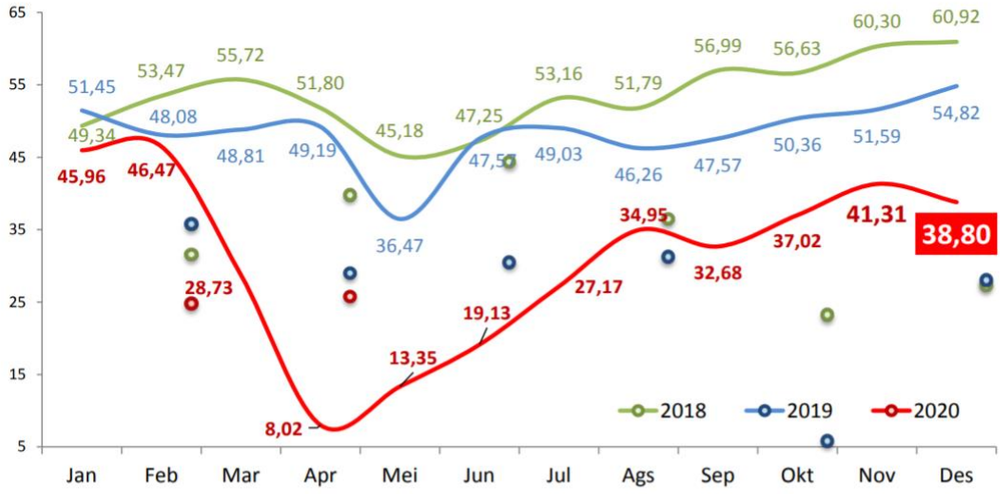

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Update data 1 Februari 2021

Gambar 2.45
Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK)
Provinsi Jawa Barat

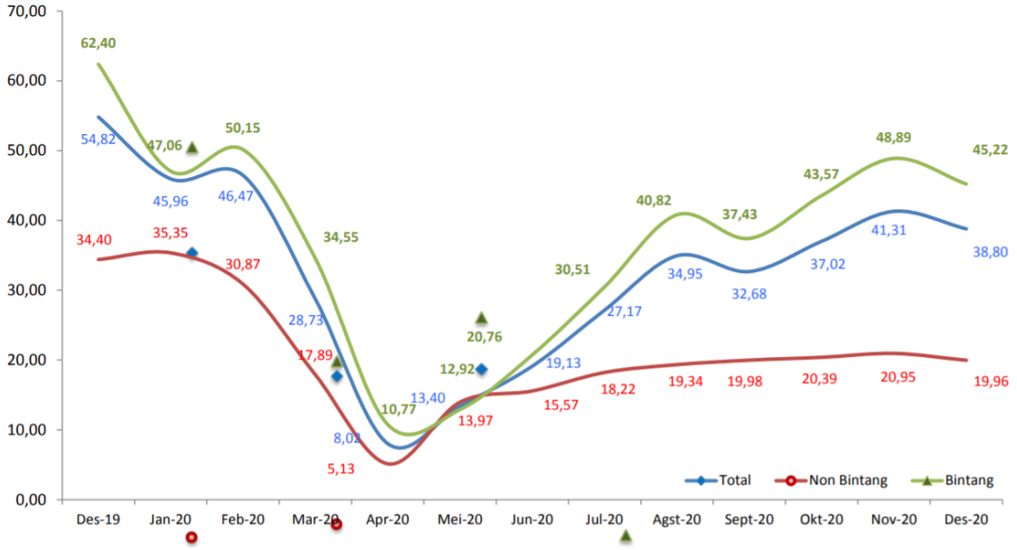

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Update data 1 Februari 2021

h. Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara ke Jawa Barat mengalami tren negatif sejak pandemi COVID-19, pada bulan Desember 2020 hanya 108 orang. Secara kumulatif Januari – Desember 2020 hanya sebesar 31.610 orang turun -80,12 persen dibandingkan tahun 2019 dengan periode yang sama.

Gambar 2.46
Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

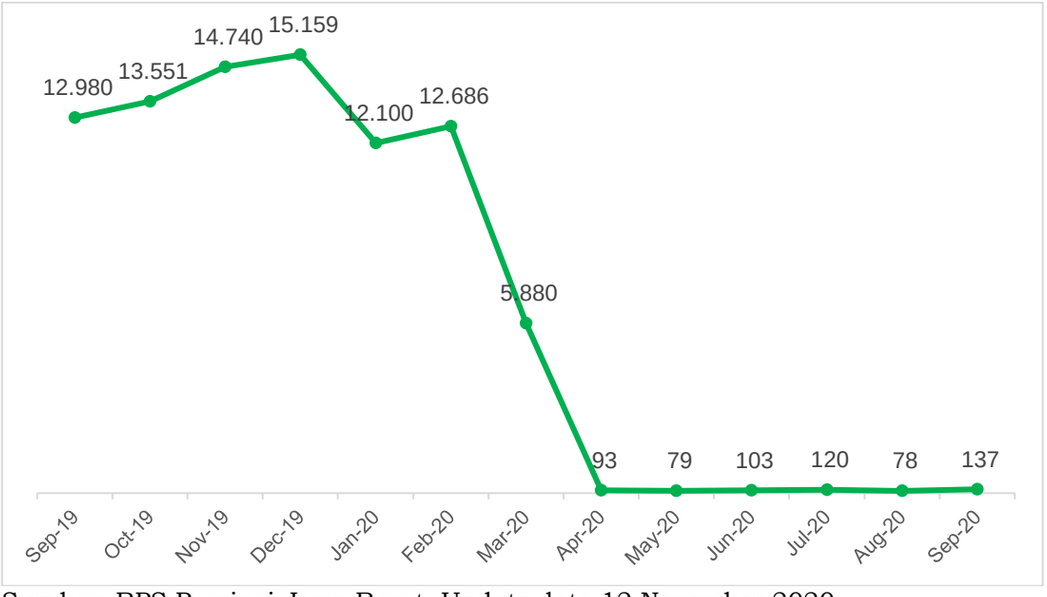

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Update data 12 November 2020

2. Sektor UMKM

Kontraksi ekonomi yang masih terjadi dan belum pulihnya permintaan akibat masih terbatasnya aktivitas ekonomi di masa pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan kredit masih bertahap.

Kredit UMKM pada Triwulan IV-2020 mencapai Rp148,913 triliun (OJK, 2020) dan terkontraksi sebesar -2,50 persen (*yoy*), lebih dalam dibandingkan Triwulan III-2020 yang terkontraksi -0,40 persen (*yoy*). Pertumbuhan kredit UMKM yang anjlok, terjadi pada kredit modal kerja dan investasi yang turun cukup dalam. Panjangnya periode pandemi COVID-19 memukul kinerja UMKM (BI 2020).

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) kredit UMKM terpantau meningkat dari 4,18 persen menjadi 4,34 persen (OJK 2020). *Tren* penurunan kredit UMKM terus terjadi sejak pandemi COVID-19 karena terbatasnya aktivitas usaha sebagai dampak kebijakan *physical distancing* dan PSBB yang terus

berlanjut hingga Desember 2020. Dengan terbatasnya aktivitas usaha, UMKM terkena dampak yang besar akibat pandemi COVID-19. Turunnya permintaan sejalan dengan banyaknya PHK yang menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat. Selain itu UMKM juga menghadapi kendala sulitnya memperoleh bahan baku karena logistik yang tersendat akibat terbatasnya pergerakan orang dan barang. Kondisi di atas menyebabkan UMKM mengalami kesulitan dalam membayar kredit, sehingga rasio NPL meningkat (BI, 2020).

Dari survei yang telah dilaksanakan oleh BPS dalam kurun waktu 10-26 Juli 2020, sebanyak 5 (lima) dari 10 (sepuluh) perusahaan di Provinsi Jawa Barat masih beroperasi seperti biasa. Namun sebanyak 28,1 persen UMK di Provinsi Jawa Barat berhenti beroperasi, 52,4 persen beroperasi normal, 11,6 persen melebihi kapasitas dan 7,6 persen mengurangi kapasitas. Adapun 3 (tiga) sektor tertinggi perusahaan yang masih beroperasi yaitu air dan pengelolaan sampah (77,88 persen), *real estate* (77,87 persen) serta komunikasi dan informasi (66,86 persen) (BPS, 2020).

Sebanyak 86 persen di sektor UMK mengalami penurunan pendapatan, 11 persen pendapatan tetap dan 2 persen pendapatannya meningkat. Pelaku usaha yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan berada di Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi (BPS, 2020).

Sektor usaha yang paling terdampak COVID-19 adalah: transportasi dan pergudangan (91,08 persen), jasa perusahaan (91,07 persen), akomodasi dan makan minum (90,54 persen), konstruksi (90,32 persen), dan industri pengolahan (90,21 persen). (BPS, 2020). Adaptasi di masa pandemi salah satunya adalah dengan melakukan pemasaran *online*. Sebanyak 49,02 persen UMK mengakui adanya pengaruh positif dalam penggunaan internet dan media *online* untuk pemasaran (BPS, 2020).

Pada saat ini sebagian besar pelaku UMKM membutuhkan bantuan finansial, sehingga pelaku UMKM dapat mengajukan restrukturisasi kredit/keringanan dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun untuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu yang ditetapkan oleh bank/*leasing* sebagaimana diatur oleh PO OJK No.11/POJK.03/2020 yang mencapai hampir 77 persen dari total UMKM di Jawa Barat (sektor-sektor terkait pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, industri pengolahan, pertanian, dan pertambangan) (BI, 2020).

Tabel 2.95
Sebaran Debitur dan *Outstanding* Restrukturisasi
di Provinsi Jawa Barat (Baju Debet Rp Miliar)

No	Jawa Barat	TOTAL	
		DEBITUR	BAKI DEBET
1	**Bank Umum**	**1.534.444**	**119.725**
	- Berkantor Pusat	**8.246**	**3.118,08**
	1. BJB	7.368	1.952,35
	2. BJBS	607	531,16
	3. Fama International	207	466,89
	4. Bisnis Internasional	64	167,69
	- Non Kantor Pusat	**1.526.198**	**116.607,00**
2	**BPR**	**188.711**	**1.849,21**
	- KR 2 Jawa Barat	175.687	1.464,13
	- KOJK Cirebon	6.170	193,31
	- KOJK Tasikmalaya	6.854	191,77
3	**Lembaga Pembiayaan**	**1.184.308**	**34.414,15**
Total		**2.907.463**	**155.988,44**

Sumber: OJK Kantor Regional II Jawa Barat, diolah (15 Juni 2020)

Sementara data penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada bulan Juni 2020 (berdasarkan data SIKP sampai dengan tanggal 27 Juni 2020) adalah sebesar Rp472,78 miliar, masih mengikuti tren penurunan sejak bulan Februari dan Maret 2020 dan terendah jika dibandingkan dengan penyaluran pada bulan Juni di tahun 2018 dan 2019.

Gambar 2.47
Kondisi Penyaluran KUR Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

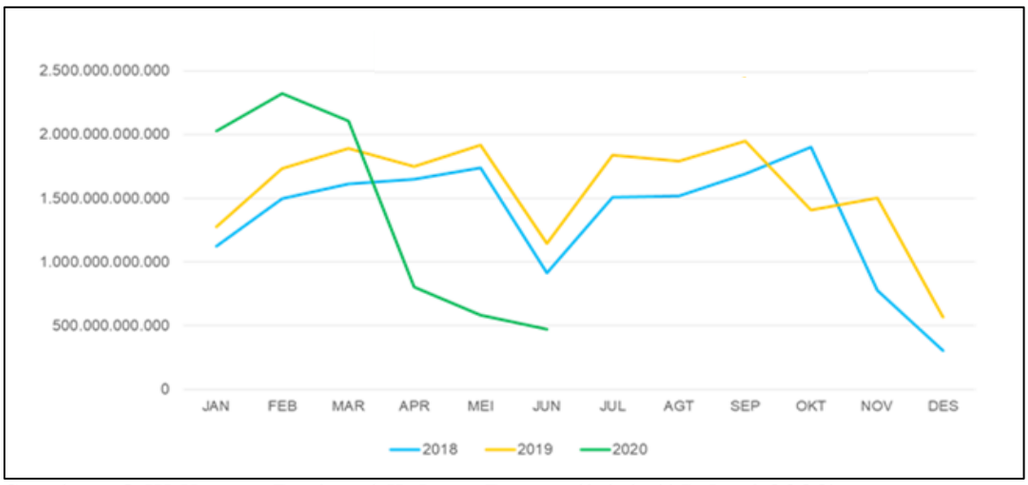

Sumber: OJK Kantor Regional II Jawa Barat, diolah (15 Juni 2020)

Selain tren penurunan, penyaluran KUR ini dapat menjadi salah satu indikator lesunya sektor riil di segmen UMKM, hal ini dapat diakibatkan juga oleh keterbatasan-keterbatasan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang timbul pada sisi debitur maupun bank/lembaga penyalur KUR akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

3. Sektor Ketenagakerjaan

Dampak dari pandemi COVID-19 pada sektor industri memengaruhi ketenagakerjaan (para pekerja/buruh). Berdasarkan data per tanggal 20 Oktober 2020 dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat diketahui terdapat sebanyak 1.983 perusahaan yang terdampak akibat pandemi COVID-19, dengan total pekerja/buruh yang terdampak sebanyak 111.985 orang. Gambar di bawah menunjukkan persentase pekerja/buruh yang dirumahkan sebagai dampak pandemi COVID-19 per sektor usaha.

Gambar 2.48
Persentase Pekerja/Buruh yang Dirumahkan dampak COVID-19
Per Sektor Usaha (Persen)

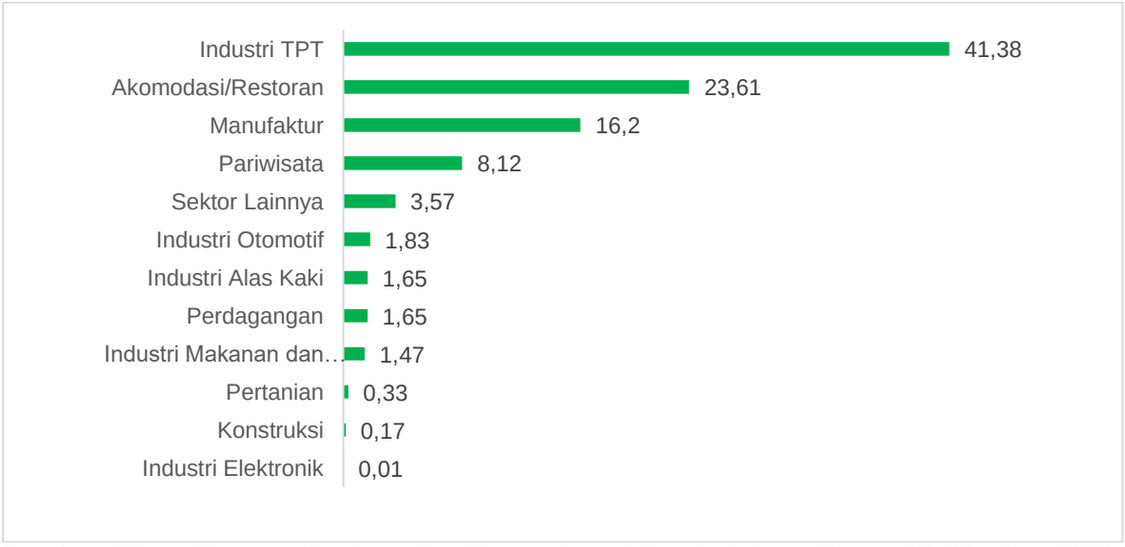

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 20 Oktober 2020

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa sektor usaha yang memberlakukan kebijakan untuk merumahkan pekerja/buruh selama pandemi COVID-19 adalah sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dengan persentase sebesar 41,38 persen, kemudian sektor akomodasi/restoran sebesar 23,61 persen dan sektor usaha manufaktur sebesar 16,20 persen. Sektor usaha yang merumahkan paling sedikit pekerja/buruh adalah sektor industri elektronik dan kontruksi dengan

persentase masing-masing sebesar 0,01 persen dan 0,17 persen. Secara keseluruhan, jumlah perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 dan mengadaptasi kebijakan merumahkan pekerja/buruh adalah sebanyak 983 perusahaan dengan total 80.138 pekerja buruh yang terdampak.

Kebijakan lain selain merumahkan pekerja/buruh sebagai akibat dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh. Dari total sebanyak 1.983 perusahaan terdampak, sebanyak 460 perusahaan melakukan PHK terhadap para pekerja/buruh dengan total 19.089 pekerja/buruh mengalami PHK.

Gambar 2.49
Persentase Pekerja/Buruh yang Di-PHK dampak COVID-19
Per Sektor Usaha (Persen)

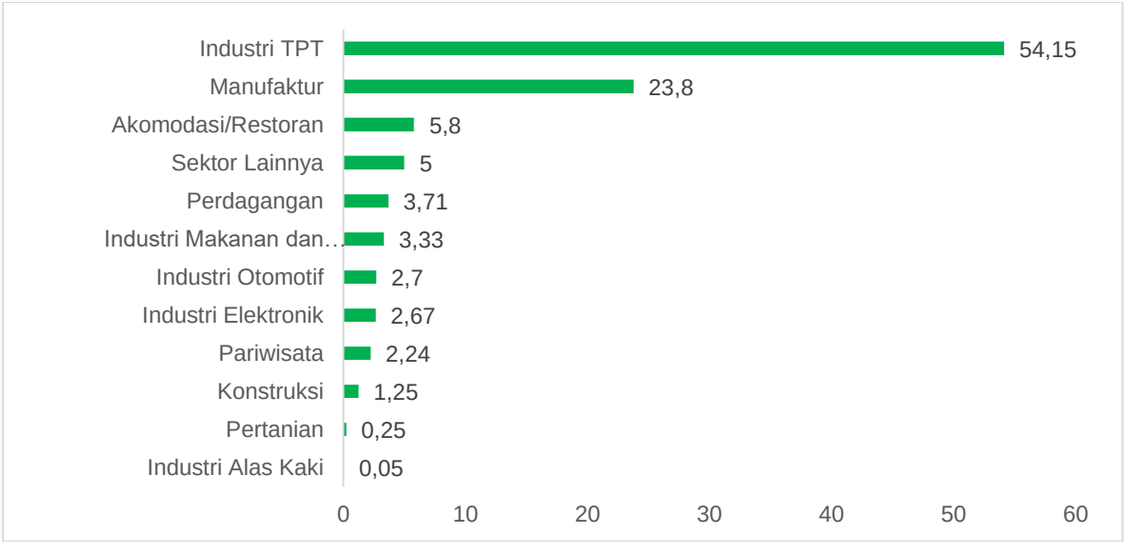

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 20 Oktober 2020

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui informasi mengenai persentase pekerja/buruh yang terkena PHK per sektor usaha. Industri TPT memiliki persentase paling besar dalam jumlah pekerja/buruh yang di-PHK akibat dampak pandemi COVID-19 sebanyak 54,15 persen disusul dengan sektor manufaktur dengan persentase sebesar 23,8 persen dan sektor akomodasi/restoran sebesar 5,8 persen. Sektor pertanian, dan industri alas kaki memiliki persentase yang sangat kecil dalam pemberlakuan PHK terhadap pekerja/buruh dengan persentase kurang dari 1 (satu) persen.

Dampak pandemi COVID-19 juga mempengaruhi penganggaran APBD Tahun 2020 yang sudah mengalami perubahan kelima, dengan

adanya kebijakan anggaran untuk stimulus penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk *refocusing* APBD Tahun 2020.

2.7 Kondisi Kesehatan Masa Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia merupakan bagian dari pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia dan dikategorikan sebagai bencana non alam sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat khususnya menuntut respon kesiapsiagaan yang harus didukung oleh kesiapan sistem kesehatan daerah yang optimal baik dari aspek upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sumberdaya obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar) per 31 Januari 2021, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Jawa Barat sebanyak 150.336 orang dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 117.251 orang dan meninggal 1.932 orang. Adapun jumlah kasus kontak erat sebanyak 227.476 orang, kasus suspek sebanyak 122.379 orang dan probable sebanyak 2.968 orang. Jumlah spesimen yang telah di tes PCR sebanyak 973.680 spesimen. Data kasus COVID-19, baik kasus terkonfirmasi positif, kontak erat, suspek dan probable menunjukkan kecenderungan meningkat sehingga membutuhkan upaya ketat untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Berdasarkan kondisi fasilitas kesehatan saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu mengidentifikasi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penanganan kasus pandemi COVID-19 yang terjadi di Provinsi Jawa Barat sehingga angka penularan dan angka kematian akibat pandemi COVID-19 dapat dikendalikan. Keterbatasan fasilitas kesehatan yang tersedia, tentunya akan memperlambat penanganan kasus akibat pandemi COVID-19. Sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas di beberapa wilayah Provinsi Jawa Barat masih belum memenuhi standar minimal penanganan. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit menurut *World Health Organization* (WHO) adalah 1 (satu) TT untuk 1.000 penduduk, sehingga dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar kurang lebih 48 juta jiwa maka dibutuhkan total Tempat Tidur (TT)

sebanyak 48 ribu TT. Sementara kondisi saat ini, dari 369 rumah sakit yang ada di Provinsi Jawa Barat, jumlah total tempat tidur yang tersedia adalah 37.296 TT, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 1.088 TT. Angka ini masih jauh dari yang diharapkan. Kurang baiknya pencatatan dan pelaporan ketersediaan sarana prasarana di rumah sakit akan mempengaruhi kualitas data dan pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan yang diambil.

Tabel 2.96
Gambaran Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum di Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Kebutuhan TT (sesuai standar WHO)	Ketersediaan Jumlah TT	Ketersediaan TT Terhadap standar (%)	Ketersediaan TT ICU
1	Kab. Bogor	5.965.410	29.827	843	2,83	42
2	Kab. Sukabumi	2.466.270	12.331	359	2,91	18
3	Kab. Cianjur	2.263.070	11.315	229	2,02	11
4	Kab. Bandung	3.775.280	18.876	715	3,79	36
5	Kab. Garut	2.622.430	13.112	372	2,84	19
6	Kab. Tasikmalaya	1.754.130	8.771	428	4,88	21
7	Kab. Ciamis	1.195.180	5.976	603	10,09	30
8	Kab. Kuningan	1.080.800	5.404	427	7,90	21
9	Kab. Cirebon	2.192.900	10.965	512	4,67	2
10	Kab. Majalengka	1.205.030	6.025	261	4,33	13
11	Kab. Sumedang	1.152.400	5.762	229	3,97	11
12	Kab. Indramayu	1.728.470	8.642	160	1,85	8
13	Kab. Subang	1.595.830	7.979	285	3,57	14
14	Kab. Purwakarta	962.890	4.814	257	5,34	13
15	Kab. Karawang	2.353.920	11.770	2366	20,10	118
16	Kab. Bekasi	3.763.890	18.819	567	3,01	28
17	Kab. Bandung Barat	1.699.900	8.500	157	1,85	8
18	Kab. Pangandaran	399.280	1.996	200	10,02	10
19	Kota Bogor	1.112.080	5.560	1569	28,22	78
20	Kota Sukabumi	328.680	1.643	875	53,24	44
21	Kota Bandung	2.507.890	12.539	3921	31,27	196
22	Kota Cirebon	319.310	1.597	590	36,95	30
23	Kota Bekasi	3.003.920	15.020	1329	8,85	366
24	Kota Depok	2.406.830	12.034	675	5,61	34
25	Kota Cimahi	614.300	3.072	941	30,64	47
26	Kota Tasikmalaya	663.520	3.318	400	12,06	20

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Kebutuhan TT (sesuai standar WHO)	Ketersediaan Jumlah TT	Ketersediaan TT Terhadap standar (%)	Ketersediaan TT ICU
27	Kota Banjar	183.110	916	198	21,63	10
	Total	**49.316.720**	**246.584**	**19.468**	**7,90**	**973**

Sumber: Jawa Barat dalam Angka Tahun 2019 - 2020

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jumlah puskesmas di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.088 Puskesmas dimana 292 unit (26,84 persen) merupakan Puskesmas Rawat Inap dan 796 unit (73,16 persen) merupakan Puskesmas Non Rawat Inap. Selain kebutuhan TT, permasalahan penting lain yang perlu menjadi perhatian bersama adalah persoalan data. Hal ini disebabkan tidak sinkronnya data antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ketidakserasian data ini menyebabkan ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan. Selain ketidaksinkronan data, permasalahan lain yang perlu diselesaikan adalah ketidaktepatan data penemuan kasus sehingga memerlukan sistem informasi yang saling terintegrasi, transparan, dan terkini serta peningkatan kapasitas tes dan penguatan kegiatan *surveilans*.

2.8 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pembentukan BUMD bertujuan untuk mengembangkan investasi daerah, memanfaatkan potensi daerah dan menangkap peluang usaha serta menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan guna mendukung pembangunan daerah dan akses permodalan bagi KUMKM di Provinsi Jawa Barat.

Di Provinsi Jawa Barat terdapat BUMD keuangan dan BUMD non keuangan. BUMD non keuangan di Jawa Barat, meliputi:

1. PT. Jasa dan Kepariwisataan, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah

Jasa dan Kepariwisataan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah).

2. PT. Tirta Gemah Ripah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Tirta Gemah Ripah.
3. PT. Agronesia, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas Agronesia.
4. PT. Jasa Sarana Jawa Barat, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT. Jasa Sarana Jawa Barat.
5. PT. Agro Jabar, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro.
6. PT. BIJB, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity.
7. PT. Migas Hulu Jabar, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu.
8. PT. Migas Hilir Jabar, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir.
9. PD. Agribisnis dan Pertambangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010.

Adapun BUMD keuangan di Jawa Barat, meliputi:

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
2. PT. Jamkrida Jabar, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
3. PT. BPR Intan Jabar Kab. Garut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD BPR Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas.
4. PT. BPR Karya Utama Jabar Kabupaten Subang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas.

5. PT. BPR Cianjur Jabar Kab. Cianjur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD BPR Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas.
6. PT. BPR Cipatujah Jabar Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas.
7. PT. BPR Wibawa Mukti Jabar Kabupaten Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas.
8. PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas.
9. PT. BPR Majalengka Jabar, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD BPR Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas.
10. PD Bank Perkreditan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Povinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015.
11. PT Lembaga Keuangan Mikro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015.

Permodalan BUMD yang dimaksud pada bagian ini adalah modal sendiri (ekuitas) yang diperoleh dari setoran modal pemegang saham. Modal pada BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terbagi atas saham. Pemerintah daerah memiliki saham paling sedikit sebesar 51 persen atau dapat memiliki keseluruhannya atau sebesar 100 persen. BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas disebut Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda), sedangkan untuk BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum

Daerah (Perumda) modalnya tidak terbagi atas saham. BUMD ini, seluruh modalnya dimiliki oleh 1 (satu) pemerintah daerah. Bila pada kondisi pemilik modal Perumda lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah maka Perumda ini berubah bentuk hukumnya menjadi Perseda.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan investasinya dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya penyertaan modal kepada BUMD baik untuk membeli dan menyetorkan setoran modal/saham kepada BUMD yang berbentuk Perseroda, atau menyetorkan modalnya kepada Perumda. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap BUMD dapat dilihat pada tabel pada halaman selanjutnya.

Realisasi setoran modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada BUMD Rp7.121.117.963.914,-. Pemenuhan setoran modal/saham tersebut dilakukan dengan mempertimbangan Peraturan Daerah terkait dengan pendirian masing-masing BUMD dan Peraturan Daerah terkait Penyertaan Modal kepada masing-masing BUMD, serta kebutuhan dan kelayakan penyertaan modal daerah. Kelayakan penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida dan PT. BPR Karawang Jabar telah dikaji dan dinyatakan layak oleh Penasihat Investasi Pemerintah Daerah (PIPD) walaupun 2 (dua) perusahaan tersebut bukan BUMD Jawa Barat.

Tabel 2.97
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terhadap BUMD

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BUMD	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN S.D. 2020	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN
1.	2019	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	Perda No. 11 Tahun 2009	2.040.000.000.000	1.115.698.682.263	947.501.316.536
2.	2007	PT. Agronesia	Perda No. 12 Tahun 2017	262.500.000.000	255.000.000.000	7.500.000.000
3.	2012	PT. Tirta Gemah Ripah	Perda No. 3 Tahun 2015	245.000.000.000	245.000.000.000	-
4.	2010	PT. Jasa Sarana Jawa Barat	Perda No. 2 Tahun 2010	1.020.000.000.000	700.000.000.000	320.000.000.000
5.	2007	PD Agribisnis dan PErtambangan	Perda No. 31 Tahun 2010	72.771.688.651	72.771.688.651	-
6.	2017	PT. Jasa dan Kepariwisataan Jabar	Perda No. 3 Tahun 2018	3.500.000.000.000	2.851.333.000.000	648.667.000.000
7.	2012	PT. Jamkrida Jabar	Perda No. 17 Tahun 2012	153.000.000.000	153.000.000.000	-
8.	2012	PT. Asuransi Bngun Askrida	Perda No. 22 Tahun 2011	50.000.000.000	1.310.000.000	48.690.000.000
9.	2012	PT. Agro Jabar	Perda No. 18 Tahun 2012	76.500.000.000	30.000.000.000	46.500.000.000
10.	2013	PT. Bandar udara Internasional Jawa Barat	Perda No. 1 Tahun 2018	2.487.500.000.000	1.521.554.593.000	965.945.407.000
11.	2013	PT. BPR Intan Jabar	Perda No. 10 Tahun 2016	44.880.000.000	7.000.000.000	37.880.000.000
		PT. BPR Karya Utama Jabar		35.700.000.000	5.996.750.000	29.703.250.000
		PT. BPR Cianjur Jabar		45.900.000.000	9.165.566.750	36.703.250.000
		PT. BPR Cipatujah Jabar		20.400.000.000	3.997.490.000	16.402.510.000
12.	2014	PD. Bank Perkreditan Rakyat	Perda No. 6 Tahun 2015	27.342.390.000	27.342.390.000	-
13.	2014	PT. Lembaga Keuangan Mikro	Perda No. 11 Tahun 2015	29.647.803.250	29.647.803.250	-
14.	2014	PT. Migas Hulu Jabar	Perda No. 12 Tahun 2016	50.000.000.000	35.000.000.000	15.000.000.000

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BUMD	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN S.D. 2020	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN
15.	2014	PT Migas Hilir Jabar	Perda No. 11 Tahun 2014	140.000.000.000	35.000.000.000	105.000.000.000
16.	2015	PT. BPR Wibawa Mukti Jabar	Perda No. 10 Tahun 2016	26.520.000.000	12.400.000.000	14.120.000.000
17.	2015	PT. BPR Majalengka Jabar	Perda No. 10 Tahun 2016	9.996.000.000	6.800.000.000	3.196.000.000
18.	2015	PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar	Perda No. 10 Tahun 2016	4.080.000.000	2.200.000.000	1.880.000.000
19.	2015	PT. BPR Karawang Jabar	Perda No. 10 Tahun 2016	6.075.000.000	900.000.000	5.175.000.000
Jumlah Total				**10.347.812.881.901**	**7.121.117.963.914**	**3.226.694.917.986**

Sumber: Sekretariat Daerah, Tahun 2020

Dari jumlah Penyertaan modal sampai tahun 2020 sebesar Rp7,121 triliun, BUMD Non Lembaga Keuangan telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan secara langsung berupa diantaranya adalah berupa penyerapan tenaga kerja secara langsung dan juga penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung. Tenaga kerja secara tidak langsung merupakan tenaga kerja yang terserap sebagai dampak dari kerjasama BUMD dengan pihak ketiga atau dampak pelaksanaan suatu proyek pekerjaan yang ditangani langsung oleh BUMD, seperti halnya di Jaswita Jabar jumlah SDM langsung sebesar 135 orang sementara untuk penyerapan tenaga kerja tidak langsung mencapai 651 orang, terdiri dari

1. Grand Preanger Hotel jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 184 karyawan;
2. Hotel Salak, Bogor jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 250 karyawan;
3. Hotel Aryaduta Bandung jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 191 karyawan; dan
4. Plaza Bandung Indah Mall total jumlah serapan tenaga kerja dan karyawan- karyawan di lingkungan Plaza Bandung Indah Mall kurang lebih sebanyak 26 karyawan.

Selain itu, dampak kontribusi berupa Peningkatan PAD bagi kabupaten/kota yang diakibatkan oleh kenaikan NJOP atas aset yang dikerjasamakan, yaitu:

1. Grand Preanger Hotel dengan nilai NJOP bangunan Rp73.005.000.000.
2. Hotel Salak, Bogor dengan nilai NJOP sebesar Rp50.715.715.000.
3. Hotel Aryaduta Bandung dengan nilai NJOP bangunan Rp164.183.700.000.
4. Plaza Bandung Indah Mall dengan nilai NJOP bangunan Rp519.924.500.000.

Penciptaan sumber pendapatan melalui kontribusi pajak daerah bagi kabupaten/kota dan PPH untuk Pemerintah Pusat dengan total mencapai Rp28,61 miliar, dengan rincian sebagaimana disajikan tabel di bawah.

Tabel 2.98
Kontribusi Pajak dari PT Jaswita Jabar
ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pusat Tahun 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

Nama KSO	Pajak Hotel & Restaurant	PBB	PPH
Grand Hotel Preanger	3.211	616	306
Hotel Salak Bogor	17.097	101	330
Hotel Aryaduta Bandung	5.662	328	-
Plaza Bandung Indah Mall	-	1.039	-
TOTAL	**25.970**	**2.084**	**636**

Sumber: Sekretariat Daerah, Tahun 2020

Selain itu untuk kontribusi PT. Jasa Sarana terhadap pembangunan secara langsung antara lain berupa penyerapan tenaga kerja, penerimaan pajak/retribusi, *Corporate Social Responsibility*, sedangkan manfaat secara tidak langsung berupa:

a. Uang ganti untung pembebasan lahan;
b. Peningkatan NJOP dan harga pasar tanah;
c. Peningkatan mobilitas masyarakat dan aksesibilitas barang dan jasa;
d. Pertumbuhan ekonomi sekitar kawasan proyek;
e. Mendukung Ketahanan Energi dan penghematan energi (bahan bakar dan listrik);
f. Konektivitas Wilayah; dan
g. Solusi Limbah.

2.9 Kerja Sama Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama daerah yang dilaksanakan terdiri dari kerja sama antardaerah, kerja sama dengan pihak ketiga, serta kerja sama dengan badan atau pemerintah luar negeri.

Kebijakan kerja sama antardaerah diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Mengingat kerja sama antardaerah yang berbatasan bersifat wajib, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan mendorong dilaksanakannya kerja sama penyelenggaraan urusan di daerah yang berbatasan baik

provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki eksternalitas lintas daerah, dampak negatif bersifat lintas daerah serta apabila urusan tersebut dipandang lebih efektif dan efisien dilaksanakan melalui kerja sama. Untuk itu akan disusun pemetaan urusan yang akan dikerjasamakan dengan daerah yang berbatasan (kerja sama wajib) dan memanfaatkan forum Musrenbang sebagai instrumen perencanaan kerja sama wajib.

Untuk kerja sama dengan pihak ketiga (swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya) dilaksanakan dalam kerangka pelayanan publik, pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, dan kerja sama investasi. Sedangkan kerja sama dengan pihak luar negeri diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan serta promosi potensi daerah.

Melalui kolaborasi *stakeholder* pembangunan (pemerintah, akademisi, swasta, komunitas dan media) dan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan terus berkomitmen dalam penyelenggaraan kerja sama daerah sebagai strategi penyelenggaraan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat. Jumlah kerja sama dalam negeri, antardaerah, daerah dengan pihak ketiga di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.99
Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri, Antar Daerah, Daerah Dengan Pihak Ketiga di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020

No	Bentuk Kerjasama	Jumlah Kerja Sama/Tahun						Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kerja Sama Dalam Negeri								
1	Kerja Sama antar Daerah	25	30	123	128	95	74	
2	Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	150	178	282	173	121	60	
Kerja Sama Luar Negeri (dengan Pemerintah dan Lembaga Luar Negeri)								
3	Lol	3	3	6	1	2	5	
4	MoU	-	1	8	-	1	3	
5	*Agreement/ Implementing Arrangement*	2	-	3	4	1	1	
Jumlah		**180**	**212**	**422**	**306**	**220**	**143**	

Sumber: Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Setda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

2.10 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan.

Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”.

Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

Sampai dengan tahun 2020, dari seluruh proyek strategis yang direncanakan dibiayai melalui skema KPBU telah ada 1 (satu) proyek strategis yang sedang dalam proses pelaksanaan, yaitu TPPAS Regional Lulut Nambo, 1 (satu) proyek yang dalam proses transaksi, yaitu TPPAS Regional Legok Nangka, dan 5 (lima) proyek dalam proses penyiapan, yaitu SPAM Jatigede, Sinumbra dan Kertasari, serta LRT Bandung Raya dan

TPPAS Bekarpur. Sementara 5 (lima) proyek telah menyelesaikan tahap perencanaan, dan 8 (delapan) proyek dalam proses perencanaan. Pada tahun-tahun berikutnya diharapkan proses pembangunan proyek strategis melalui skema KPBU dapat dilanjutkan.

Tabel 2.100
Proyek Strategis dengan Skema KPBU

No.	Proyek Strategis	Perkembangan Tahun 2020	Jadwal KPBU		
			2021	2022	2023
1	Pembangunan RS Pendidikan Unpad	Tahap Perencanaan (Penyusunan FS oleh Unpad)	Pelaksanaan (Konstruksi)	Pelaksanaan (konstruksi) dan Operasional COD Tahap I	Pelaksanaan (Operasional/ *Commercial Operation Date/ COD)*
2	Pengembangan Rumah Sakit Provinsi	-	Penyiapan (Penyusunan FS)	Penyiapan (Penyusunan FS)	Penyiapan (Penyusunan OBC)
3	TPPAS Lulut Nambo	Tahap Pelaksanaan (Proses pemilihan mitra investor oleh PT. Jabar Bersih Lestari)	Penyiapan (*Final Business Case* dan Perjanjian Tarif)	Transaksi (proses lelang)	Transaksi (Perjanjian KPBU dan *Financial Close*)
4	TPPAS Legok Nangka	Tahap Transaksi (Pra Qualifikasi dibantu oleh JICA)	Transaksi (Pra Kualifikasi dan Lelang)	Transaksi (Perjanjian KPBU dan *Financial Close*)	Pelaksanaan (konstruksi)
5	TPPAS Bekarpur	Tahap Penyiapan (Penyusunan OBC bersama JICA)	Penyiapan (Penyusunan FBC)	Penyiapan (*Market Sounding* danPerjanjian Tarif)	Transaksi (Proses lelang)
6	TPPAS Ciayumajakuning	Tahap Perencanaan (Penyusunan FS oleh PT. MUJ)	Penyiapan (Penyusunan OBC)	Penyiapan (Penyusunan FBC*)*	Penyiapan (*Market Sounding* danPerjanjian Tarif)
7	SPAM Kertasari	Tahap Penyiapan (Penyusunan OBC oleh PT. Adhi Karya)	Penyiapan (Penyusunan FBC)	Penyiapan (*Market Sounding,* Peralihan PJPK, dan Perjanjian Tarif)	Transaksi (Proses lelang)
8	SPAM Jatigede	Tahap Penyiapan (Penyusunan FBC bersama PT. SMI)	Penyiapan (*Final Business Case* dan Perjanjian Tarif)	Transaksi (proses lelang)	Transaksi (Perjanjian KPBU dan *Financial Close*)
9	SPAM Metro Bandung (Sinumbra)	Tahap Penyiapan (Penyusunan OBC)	Penyiapan (Penyusunan FBC)	Penyiapan (*Market Sounding,* Peralihan PJPK, dan Perjanjian Tarif)	Transaksi (Proses lelang)
10	SPAM Cikalong	Tahap Perencanaan (FS sudah ada	Penyiapan (Penyusunan OBC)	Penyiapan (Penyusunan FBC)	Penyiapan (*Market Sounding,*

No.	Proyek Strategis	Perkembangan Tahun 2020	Jadwal KPBU		
			2021	2022	2023
		di Dinas Permukiman dan Perumahan)			Peralihan PJPK danPerjanjian Tarif)
11	SPAM Cikeruh/ Cigondong (SPAM Regional Timur 2)	Tahap Perencanaan (FS sudah ada di Dinas Permukiman dan Perumahan)	Penyiapan (Penyusunan OBC)	Penyiapan (Penyusunan FBC)	Penyiapan (*Market Sounding*, Peralihan PJPK dan Perjanjian Tarif)
12	SPALD Cirebon Raya	Tahap Perencanaan (FS sudah ada di Dinas Permukiman dan Perumahan)	Penyiapan (Penyusunan OBC)	Penyiapan (Penyusunan FBC)	Penyiapan (*Market Sounding* dan Perjanjian Tarif)
13	SPALD Bandung Raya	Tahap Perencanaan (FS sudah ada di Dinas Permukiman dan Perumahan)	Penyiapan (Penyusunan OBC)	Penyiapan (Penyusunan FBC)	Penyiapan (*Market Sounding* danPerjanjian Tarif)
14	Pengembangan Kawasan Wisata dan MICE	Tahap Perencanaan (FS tahun 2018)	Penyiapan (Finalisasi FS)	Penyiapan (Penyusunan OBC)	Penyiapan (Penyusunan FBC)
15	Patimban *Seaport Access*, Subang *Railway Construction*	Tahap Perencanaan (KPBU dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan)	Penyiapan (Finalisasi FS)	Penyiapan (Penyusunan OBC)	Penyiapan (Penyusunan FBC)
16	Kolam Retensi di Kabupaten Bandung	-	Penyiapan (Penyusunan FS)	Penyiapan (Finalisasi FS)	Penyiapan (Penyusunan OBC)
17	Puncak II *Road Construction*	-	Penyiapan (Penyusunan FS)	Penyiapan (Finalisasi FS)	Penyiapan (Penyusunan OBC)
18	Kertajati *Aerocity Railway Access Construction*	Tahap Perencanaan KPBU dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan	Penyiapan (Finalisasi FS)	Penyiapan (Penyusunan OBC)	Penyiapan (Penyusunan FBC)
19	Nusawiru *Airport Development* (Pangandaran)	Tahap Perencanaan (FS disusun oleh Dishub Jabar)	Penyiapan (Finalisasi FS)	Penyiapan (Penyusunan OBC)	Penyiapan (Penyusunan FBC)
20	Kawasan Pariwisata *Geopark* Ciletuh – Pelabuhan Ratu	Tahap Perencanaan (Penyusunan FS oleh Pemkab Sukabumi)	Penyiapan (Finalisasi FS)	Penyiapan (Penyusunan OBC)	Penyiapan (Penyusunan FBC)
21	Cirebon *Ring Road Construction*	-	Penyiapan (Penyusunan FS)	Penyiapan (Finalisasi FS)	Penyiapan (Penyusunan OBC)
22	LRT Bandung Raya	Tahap Penyiapan (Penyusunan	Penyiapan (Penyusunan FBC)	Penyiapan (*Market Sounding*	Transaksi (Proses lelang)

No.	Proyek Strategis	Perkembangan Tahun 2020	Jadwal KPBU		
			2021	2022	2023
		OBC bersama Bappenas)		danPerjanjian Tarif)	
23	*Shortcut* Cibungur-Tanjung Rasa	-	Penyiapan (Penyusunan FS)	Penyiapan (Finalisasi FS)	Penyiapan (Penyusunan OBC)
24	Kawasan Sains *Technopark* Jatinangor	-	Penyiapan (Penyusunan FS)	Penyiapan (Finalisasi FS)	Penyiapan (Penyusunan OBC)
25	Pengembangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Provinsi	Tahap Perencanaan (FS dikerjakan PT. Brantas Abipraya)	Penyiapan (Finalisasi FS)	Penyiapan (Penyusunan FBC)	Penyiapan (*Market Sounding* danPerjanjian Tarif)
26	Pembangunan PLT Surya Atap di Gedung-gedung Pemerintah Provinsi	Tahap Perencanaan (Sudah ada FS yang dibuat Kedutaan Besar Inggris)	Penyiapan (Penyusunan OBC)	Penyiapan (Penyusunan FBC)	Penyiapan (*Market Sounding* danPerjanjian Tarif)

Sumber: Simpul KPBU Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

2.11 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.101
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH
SPM BIDANG PENDIDIKAN							
1	Pendidikan menengah	Program Pengelolaan Sekolah Menengah Atas	1	Rasio Siswa Per-Sekolah SMA	Rasio	439	Dinas Pendidikan
			2	Rasio Siswa Per-Kelas SMA	Rasio	31	
			3	Persentase SMA dengan Akreditasi B	Persen	80.77	
			4	Angka Kelulusan SMA	Persen	100	
		Program Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan	1	Rasio Siswa Per-Sekolah SMK	Rasio	379	
			2	Rasio Siswa Per-Kelas SMK	Rasio	29	
			3	Persentase SMK dengan Akreditasi B	Persen	76,56	
			4	Angka Kelulusan SMK	Persen	100	
			5	Persentase lulusan SMK tersertifikasi	Persen	30	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Rasio	406/366/96	
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Rasio	32/10	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Persen	80,47/50,00	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Persen	100	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Rasio	377/323/51	
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Rasio	27/6	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Persen	82,35/29,17	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Persen	100	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Rasio	399/391/77	
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Rasio	29/8	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Persen	74,43/72,73	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Persen	100	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SATUAN	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Rasio	541/432/100	
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Rasio	32/10	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Persen	77,48/47,37	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Persen	100	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Rasio	440/305/73	
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Rasio	30/9	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Persen	79,87/40,00	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Persen	100	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Rasio	405/334/64	
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Rasio	30/8	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Persen	74,72/26,92	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Persen	100	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Rasio	446/559/49	
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Rasio	29/6	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Persen	87,54/53,70	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Persen	100	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Rasio	535/373/53	
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Rasio	32/8	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Persen	77,93/55,13	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SATUAN	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Persen	100	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Rasio	462/394/67	
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Rasio	29/8	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Persen	72,06/52,63	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Persen	100	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Rasio	514/507/77	
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Rasio	30/9	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Persen	77,62/54,55	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Persen	100	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Rasio	371/329/55	
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Rasio	32/10	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Persen	76,95/38,24	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Persen	100	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Rasio	403/330/83	
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Rasio	30/12	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Persen	81,18/81,82	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Persen	100	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Rasio	558/328/70	
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Rasio	30/11	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH
		Dinas Pendidikan Wilayah XIII	3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Persen	71,52/71,88	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Persen	100	
2	Pendidikan khusus	Program Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (Sekolah Inklusi)	1	Rasio siswa per sekolah SLB	Rasio	64	
			2	Rasio siswa per kelas SLB	Rasio	8	
			3	Persentase SLB terakreditasi minimal B	Persen	52,6	
			4	Angka Kelulusan SLB	Persen	100	
			5	Jumlah Siswa Pendidikan dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	Persen	3,96	
SPM BIDANG KESEHATAN							
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Program Kesehatan Akibat Bencana Dan Kesehatan Akibat KLB Provinsi	1	Persentase Kegiatan *Rapid Health Assesment*	Persen	100	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi		2	Persentase Masyarakat Yang Dilayani di lokasi Bencana	Persen	100	
SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM							
1	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	1	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	79,59	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	1	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	73,31	
SPM BIDANG PERUMAHAN							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan	1	Persentase Hunian Rumah Untuk Pendukungan Pelaksanaan Program Pemerintah Dan Pasca Bencana yang ditangani	Persen	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SATUAN	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH
	terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi						
SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS							
1	Pelayanan ketentera-man dan ketertiban umum provinsi.	Program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja
SPM BIDANG SOSIAL							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh	1	Persentase penyandang disabilitas yang direhabilitasi di UPTD PSRPD Cibabat Cimahi	Persen	80,8	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	1	Persentase anak membutuhkan perlindungan khusus yang mendapat rehabilitasi sosial di UPTD	Persen	1,225	
		Program pelayanan Rehabilitasi sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum	1	persentase ABH yang direhab di PSRABH Cileungsi Bogor dan satpel	Persen	98	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan	1	Persentase lanjut usia di dalam balai yang mendapat perlindungan sosial	Persen	138,8	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya	1	Persentase PMKS yg mendapat rehabilitasi sosial di PRSBK dan satpel - RTM	Persen	67,3	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM		SATUAN	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Persentase PMKS Yang Mendapat Jaminan Sosial	Persen	9,53	
			2	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	Persen	0	

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-

undangan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini:

1. Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan daerah yang disajikan setiap tahunnya menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015–2019 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	**PENDAPATAN**	**24.009.980.850.227**	**27.694.035.120.859**	**32.163.957.645.604**	**33.919.022.032.348**	**36.037.894.762.461**	**10,8**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**16.032.856.414.345**	**17.042.895.113.672**	**18.081.123.739.824**	**19.642.915.448.764**	**21.244.266.598.018**	**7,3**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	14.617.071.393.160	15.727.483.589.791	16.483.085.760.842	18.153.616.036.193	19.626.352.311.765	7,7
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	73.404.322.719	73.564.738.396	60.273.043.774	49.176.487.699	56.222.370.756	-5,5
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	281.661.628.120	322.402.263.906	345.121.410.237	348.537.989.633	386.442.976.038	8,3
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	1.060.719.070.346	919.444.521.579	1.192.643.524.971	1.091.584.935.239	1.175.248.939.459	3,9
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**2.506.877.511.840**	**10.622.671.443.683**	**13.981.445.314.589**	**14.208.000.403.584**	**14.715.372.046.649**	**90,1**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.184.319.132.840	1.778.216.936.253	1.851.522.979.677	1.804.540.601.861	1.483.785.231.865	8,5
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.303.654.355.000	1.248.112.171.860	3.011.001.477.000	3.023.552.986.000	3.212.647.404.000	35,9
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	18.904.024.000	7.596.342.335.570	9.118.920.857.912	9.379.906.815.723	10.018.939.410.784	10.028,4
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.470.246.924.042**	**28.468.563.504**	**101.388.591.191**	**68.106.180.000**	**78.256.117.794**	**34,7**
4.3.1	Pendapatan Hibah	22.869.295.542	23.468.563.504	23.799.491.191	22.044.000.000	23.188.473.794	0,5
4.3.4	Dana Penyesuaian	5.447.377.628.500	5.000.000.000	7.500.000.000	33.750.000.000	42.579.794.000	81,6
4.3.3	Lain-Lain Penerimaan	-	-	-	-	-	-
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi /Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	70.089.100.000	12.312.180.000	12.487.850.000	-

Sumber: LRA, Tahun 2015–2019

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa selama kurun waktu Tahun 2015–2019, realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat rata-rata 10,8 persen. Adapun pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 90,1 persen, dimana tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10.028,4 persen. Tingginya nilai ini dikarenakan adanya reklasifikasi posting kode rekening dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam dana penyesuaian. Kemudian sejak tahun 2016 direklasifikasi pada kelompok Dana Perimbangan dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik, sehingga apabila dirata-ratakan dari Tahun 2015–2019 kenaikannya sangat signifikan. Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Dana Perimbangan, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 34,7 persen. Namun komponen dana penyesuaian pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terjadi kenaikan sebesar 81,6 persen, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2015 kode rekening dana BOS semula berada pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, namun sejak tahun 2016 direklasifikasi pada kelompok Dana Perimbangan.

Berikut ini disajikan grafik rata–rata proporsi realisasi pendapatan daerah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Gambar 3.1
Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah
Tahun 2015–2019

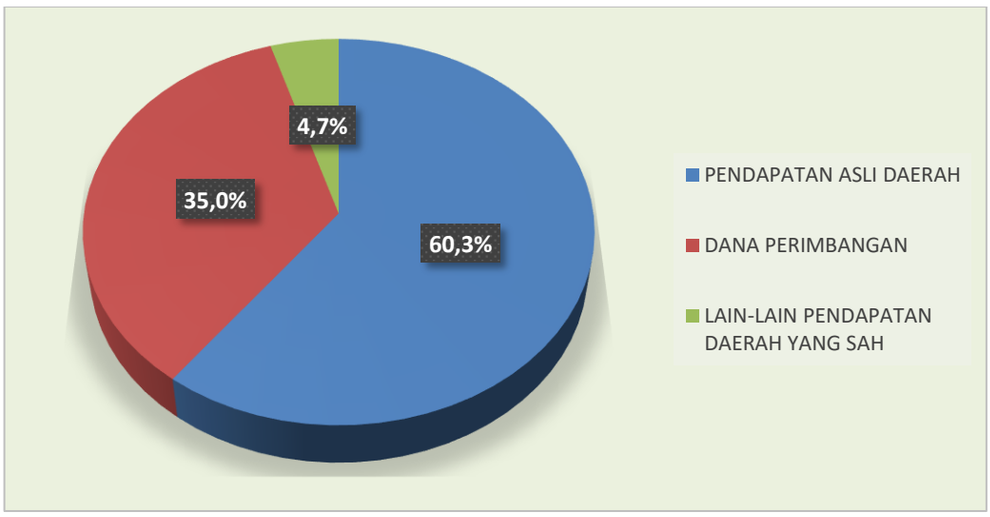

Sumber: LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019, diolah

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa rata–rata proporsi komponen Pendapatan Daerah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 60,3 persen. Hal ini dengan proporsi Dana Perimbangan sebesar 35,0 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 4,7 persen dari seluruh total pendapatan.

Rincian dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

1) Pendapatan Asli Daerah

Rata–rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 91,9 persen. Sisanya terdiri dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,9 persen, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 1,8 persen, dan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 0,3 persen

Gambar 3.2
Rata–Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2015–2019

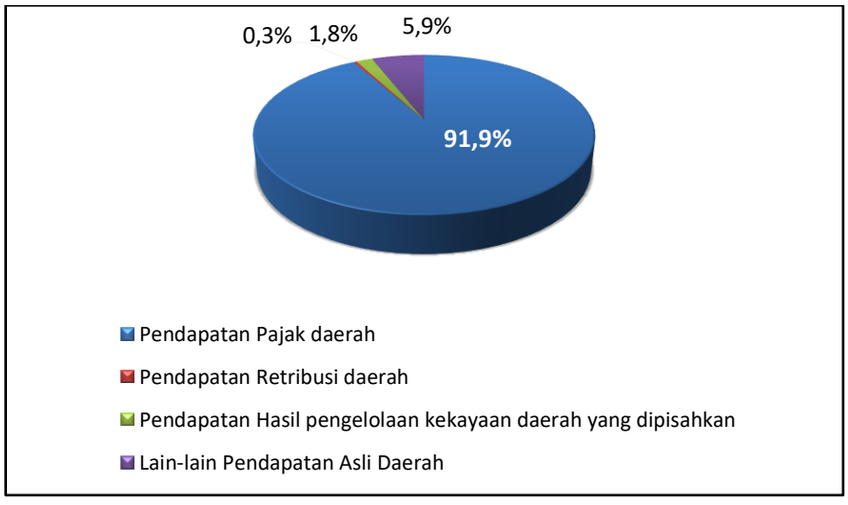

Sumber: Diolah dari LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019

2) Dana Perimbangan

Komposisi Dana Perimbangan selama Tahun 2015-2019 berasal dari DAK sebesar 54,3 persen dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25,7

persen, sedangkan sisanya sebesar 20,0 persen merupakan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

Gambar 3.3
Rata–Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan
Tahun 2015–2019

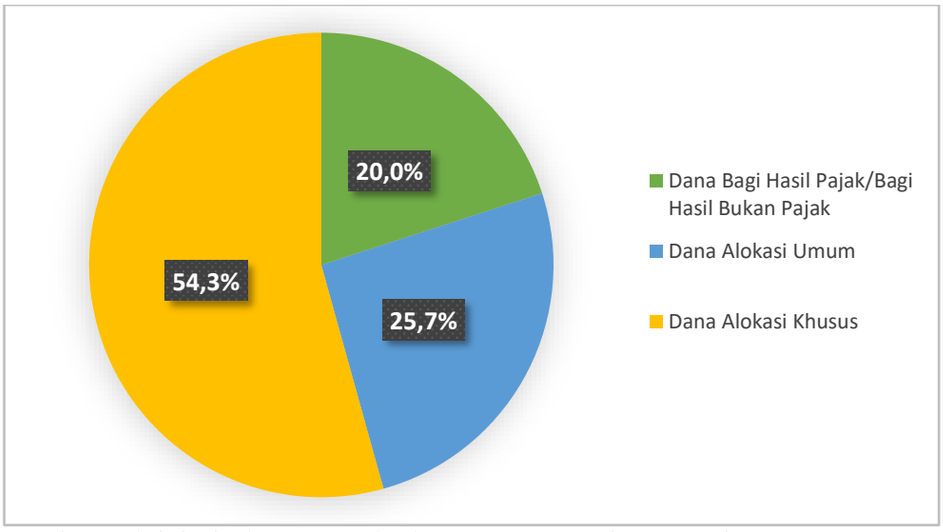

Sumber: Diolah dari LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019

3) Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penyumbang terbesar dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari Dana Penyesuaian sebesar 45,7 persen, sisanya sebesar 33,7 persen berupa Pendapatan Hibah dan 20,6 persen adalah Lain-Lain Penerimaan.

Gambar 3.4
Rata–Rata Proporsi Komponen Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2015–2019

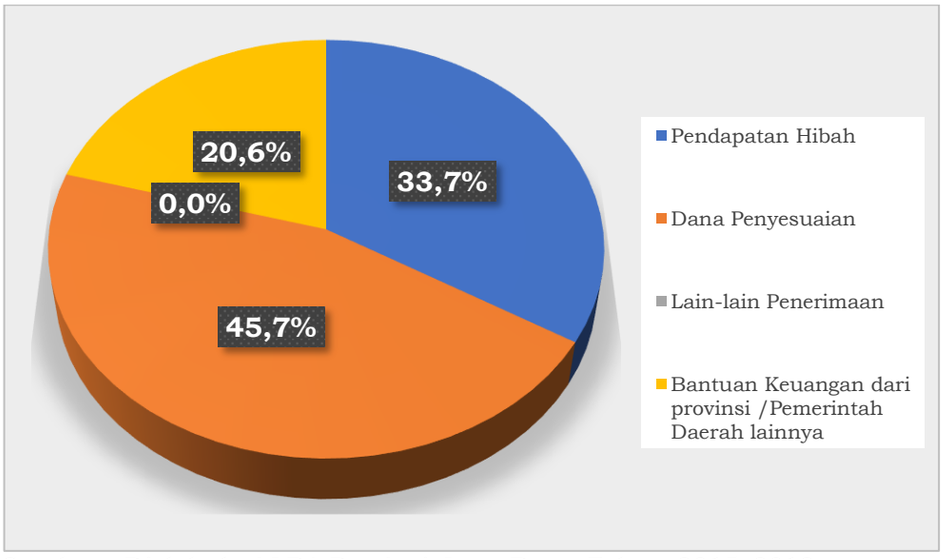

Sumber : Diolah dari LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019

2. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015–2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015–2019

Kode	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
5	**BELANJA**	**24.417.605.860.513**	**27.621.964.467.242**	**32.706.749.485.376**	**33.333.824.961.824**	**35.833.086.126.516**	**10,2**
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**19.256.280.145.688**	**21.748.500.641.497**	**25.804.945.655.137**	**25.647.521.830.488**	**28.100.337.548.508**	**10,1**
5.1.1	Belanja Pegawai	1.671.229.142.927	1.835.034.492.249	5.152.653.055.073	5.543.456.779.986	5.605.436.893.218	49,8
5.1.3	Belanja Subsidi	18.990.870.500	14.999.772.000	14.758.266.000	19.359.366.500	19.384.264.000	2,2
5.1.4	Belanja Hibah	6.826.862.952.000	9.854.923.609.133	9.526.753.045.558	8.591.815.722.306	8.802.612.033.243	8,4
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.048.750.000	9.940.000.000	37.096.500.000	285.950.507.171	277.619.075.000	291,8
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	6.406.192.657.944	6.393.271.239.759	6.902.132.882.595	7.450.622.081.732	7.901.869.013.400	5,4
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	4.329.955.772.317	3.640.311.644.356	4.171.504.088.911	3.756.133.209.513	5.493.416.269.647	8,7
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	19.884.000	47.817.000	184.163.280	-	-
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**5.161.325.714.825**	**5.873.463.825.745**	**6.901.803.830.239**	**7.686.303.131.336**	**7.732.748.578.008**	**10,8**
5.2.1	Belanja Pegawai	223.252.160.576	233.811.805.839	281.793.512.576	239.876.746.009	283.317.579.553	7,1
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	2.639.397.429.044	2.780.296.396.345	4.308.394.171.933	4.300.579.125.004	4.919.083.456.094	18,6
5.2.3	Belanja Modal	2.298.676.125.205	2.859.355.623.561	2.311.616.145.730	3.145.847.260.323	2.530.347.542.361	5,4

Sumber: LRA Tahun 2015-2019, diolah

Gambaran belanja daerah berdasarkan Tabel 3.2 yaitu periode Tahun 2015-2019 bahwa belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata–rata kenaikan sebesar 10,02 persen. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,1 persen. Komponen Belanja Tidak Langsung terbesar pertumbuhannya adalah Belanja Bantuan Sosial, dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 291,8 persen. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2018 sebesar Rp285.950.507.171 berarti periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar Rp248.854.007.171.

Dari sisi Belanja Langsung diperoleh bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 10,8 persen. Komponen belanja langsung yang mengalami kenaikan cukup signifikan pada komponen Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar 18,6 persen selama periode Tahun 2015-2019.

Tabel 3.3
Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A	**Pendapatan Umum Daerah**					
1	Pendapatan Asli Daerah	16.032.856.414.345	17.042.895.113.672	18.081.123.739.824	19.642.915.448.764	21.244.266.598.018
2	Dana Bagi Hasil	1.184.319.132.840	1.778.216.936.253	1.851.522.979.677	1.804.540.601.861	1.483.785.231.865
3	Dana Alokasi Umum	1.303.654.355.000	1.248.112.171.860	3.011.001.477.000	3.023.552.986.000	3.212.647.404.000
	Jumlah A	**18.520.829.902.185**	**20.069.224.221.785**	**22.943.648.196.501**	**24.471.009.036.625**	**25.940.699.233.883**
B	**Belanja Pegawai**					
1	Belanja Gaji Dan Tunjangan	731.450.717.945	774.052.942.382	2.567.003.671.898	2.517.071.384.469	3.641.345.847.077
2	Tambahan Pengjhasilan PNS	632.816.883.316	722.775.955.703	1.161.360.854.267	1.520.516.796.249	1.472.412.473.875
	Jumlah B	**1.364.267.601.261**	**1.496.828.898.085**	**3.728.364.526.165**	**4.037.588.180.718**	**5.113.758.320.952**
	Kemampuan Keuangan Daerah	**17.156.562.300.924**	**18.572.395.323.700**	**19.215.283.670.336**	**20.433.420.855.907**	**20.826.940.912.931**

Sumber: Diolah dari LRA Provinsi Jawa Barat, Tahun 2015-2019

Berdasarkan data Tabel 3.3. dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp17.156.562.300.924 nilai tersebut termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp20.826.940.912.931 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
b. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
c. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada tabel di bawah ini menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH (netto)**	**3.891.871.624.714**	**3.271.852.254.627**	**3.036.248.951.611**	**2.475.492.824.311**	**3.084.492.273.179**	**-4,2**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**4.551.871.624.714**	**3.650.427.254.627**	**3.348.123.951.611**	**2.563.692.823.111**	**3.161.292.271.179**	**-7,1**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	4.549.073.508.028	3.485.029.560.541	3.345.697.892.227	2.493.457.111.838	3.060.677.232.835	-7,5
	Koreksi	-	-	-			
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.798.116.686	165.397.694.086	-			
6.1.8	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-	2.426.059.384	70.235.711.273	100.615.038.344	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**660.000.000.000**	**378.575.000.000**	**311.875.000.000**	**88.199.998.800**	**76.799.998.000**	**-36,2**
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	610.000.000.000	378.575.000.000	311.875.000.000	88.199.998.800	76.799.998.000	-35,1
6.2.5	Dana Bergulir	50.000.000.000	-	-			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	3.484.246.614.428	3.343.922.854.244	2.493.457.111.838			

Sumber: LRA Tahun 2015-2019, diolah

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan netto dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,2 persen. Penerimaan pembiayaan mengalami penurunan dengan rata-rata kenaikan sebesar 7,1 persen, sedangkan dari data realisasi pengeluaran pembiayaan diperoleh gambaran realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 36,2 persen.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Provinsi Jawa Barat serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca daerah Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu Tahun 2015–2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Neraca Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertunbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas Di Kas Daerah	3.459.266.840.057	3.315.803.533.501	2.404.194.947.419	2.995.658.149.272	3.145.941.829.515	-0,51
Kas Di Bendahara Penerimaan	213.250	-	129.441.300	15.000	48.547.500	
Kas Di Bendahara Pengeluaran	329.625.741	690.217.203	44.795.467.537	1.839.118.932	46.573.408.799	2.208,98
Kas Di BLUD	24.903.737.136	27.429.103.540	46.243.868.312	61.206.204.462	96.737.122.509	42,29%
Kas Lainnya	-	-	75.389.070	-	76.799.998.800	
Piutang Pajak Dan Retribusi	-	-	-			
Piutang Pajak	1.987.572.773.342	1.128.749.868.058	208.989.450.410	227.782.482.180	231.207.921.261	-28,55
Piutang Retribusi	1.964.157.020	1.925.608.925	3.884.941.338	516.873.640	526.027.940	3,72
Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah	-	64.780.902.087	80.236.170.745	116.756.792.026	65.460.440.000	
Piutang BLUD	41.854.871.409	-	-			
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	563.677.395	504.897.595	446.607.995	437.937.145	404.635.369	-7,88
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	3.168.398.993	3.690.500.531	3.698.031.989	25.070.700.886	18.647.662.551	142,25
Bagian Lancar Piutang Sewa	768.541.821	1.395.534.560	820.635.471	629.423.452	593.826.915	2,86
Bagian Lancar Piutang Kerjasama	-	5.330.997.000	4.630.075.000	4.645.226.000	4.660.452.000	
Piutang Lainnya	6.189.134.585	-	-	1.821.451.714	4.641.583.735	
Penyisihan Piutang	(118.835.119.335)	(129.115.859.784)	(16.494.060.183)	(38.207.338.451)	(18.204.712.271)	0,18
Penyisihan Piutang BLUD	(16.246.552.322)	-	-	-	1.463.906.123	
Beban Dibayar Dimuka	2.246.774.962	8.509.512.481	7.421.881.280	6.048.339.977	7.704.641.825	68,71
Persediaan	119.210.109.468	217.188.565.589	235.735.480.747	260.228.798.542	232.043.778.941	22,57
Persediaan BLUD	5.427.649.485	11.966.613.798	23.591.516.524	31.659.097.307	31.067.736.562	62,49
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak				1.934.995.945		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan					257.799.774.614	
JUMLAH ASET LANCAR	**5.518.384.833.007**	**4.658.849.995.084**	**3.048.399.844.954**	**3.698.028.268.029**	**4.204.118.582.687**	**-3,79**
INVESTASI JANGKA PANJANG						
INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN						
Dana Bergulir	439.397.794.708	267.373.574.970	265.316.486.570	195.080.775.297	94.465.736.953	-29,49
Dana Penjaminan	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00
Penyisihan Dana Bergulir	(61.322.794.708)	(53.473.574.970)	(51.416.486.570)	(50.830.775.297)	(49.715.736.953)	-4,99

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertunbuhan (%)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	**383.075.000.000**	**218.900.000.000**	**218.900.000.000**	**149.250.000.000**	**49.750.000.000**	**-35,34**
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.816.921.935.617	5.907.651.621.623	9.100.789.072.117	10.351.502.853.070	10.230.840.801.347	22,32
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	**4.816.921.935.617**	**5.907.651.621.623**	**9.100.789.072.117**	**10.351.502.853.070**	**10.230.840.801.347**	**22,32**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.199.996.935.670**	**6.126.551.621.623**	**9.319.689.072.117**	**10.500.752.853.070**	**10.280.590.801.347**	**20,13**
ASET TETAP						
Tanah	8.220.334.492.471	8.865.243.125.716	11.458.684.421.322	11.755.360.838.224	12.029.703.019.503	10,51
Peralatan dan Mesin	2.288.227.089.078	2.816.907.751.955	4.523.831.967.246	5.097.590.400.898	5.912.399.795.185	28,09
Gedung dan Bangunan	2.319.146.011.948	2.778.442.415.043	6.422.981.747.622	7.182.916.038.810	8.291.802.529.752	44,56
Jalan, Jaringan dan Instalasi	7.145.536.334.038	7.134.806.709.143	7.678.593.819.862	8.478.755.549.176	9.065.518.230.664	6,20
Aset Tetap Lainnya	45.648.970.080	80.245.207.457	482.803.913.007	682.825.734.417	874.523.864.956	161,74
Konstruksi Dalam Pengerjaan	696.785.048.687	1.085.315.941.948	1.045.971.403.432	1.432.169.457.044	1.581.810.135.362	24,88
Akumulasi Penyusutan	(7.133.000.193.744)	(7.264.174.288.881)	(9.766.444.558.447)	(10.866.545.619.576)	(13.115.949.140.151)	17,06
JUMLAH ASET TETAP	**13.582.677.752.558**	**15.496.786.862.381**	**21.846.422.714.044**	**23.763.072.398.992**	**24.639.808.435.271**	**16,88**
ASET LAINNYA						
Bagian Jangka Panjang Piutang Tuntutan Ganti Rugi	12.125.000	36.081.458	-	-		
Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	-	939.000.867	398.504.367	1.151.447.915	629.996.000	
Bagian Jangka Panjang Piutang Kerjasama	-	166.759.570.655	162.129.495.655	157.484.269.655	152.823.817.655	
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	493.045.596.000	1.080.898.492.938	1.080.898.492.938	514.917.649.916	514.917.649.916	16,72
Aset Tak Berwujud	116.833.277.765	146.318.803.358	194.400.566.850	145.500.000	145.500.000	-10,46
Aset Lain - Lain	800.290.212.785	1.555.978.842.946	2.581.188.965.521	1.550.935.324.950	1.858.083.037.126	35,05
Akumulasi Amortisasi	(27.333.214.225)	(30.860.083.853)	(39.806.528.292)	(91.625.000)	(118.875.000)	-7,03
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(109.413.329.230)	(915.717.666.096)	(819.270.558.285)	(828.275.489.302)	(902.378.989.705)	184,11
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga				(23.617.558.587)	(24.179.243.558)	
JUMLAH ASET LAINNYA	**1.273.434.668.095**	**2.004.353.042.273**	**3.159.938.938.754**	**1.372.649.519.547**	**1.624.102.135.991**	**19,20**
JUMLAH ASET	**25.574.494.189.270**	**28.286.541.521.361**	**37.374.450.569.869**	**39.334.503.039.639**	**40.748.619.955.297**	**12,89**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertunbuhan (%)
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	21.859.854	-	1.906.612.730	113.494.896	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	4.720.061.878	5.625.378.264	6.403.208.704	5.130.207.112	5.168.426.025	3,47
Utang Belanja	312.288.201.728	473.156.258.351	436.417.579.331	407.152.016.363	440.333.819.394	11,30
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-				
Utang Bagi Hasil Pajak Retribusi kepada Pemkab/Pemkot	-	-				
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**317.030.123.460**	**478.781.636.615**	**444.727.400.765**	**412.395.718.371**	**445.502.245.419**	**11,17**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja - BLUD	-	-	-			
Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	932.493.254	-	-	-		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**932.493.254**	**-**	**-**	**-**	**-**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**317.962.616.714**	**478.781.636.615**	**444.727.400.765**	**412.395.718.371**	**445.502.245.419**	**11,06**
EKUITAS						
EKUITAS	25.256.531.572.561	27.807.759.884.746	36.929.723.169.107	38.922.107.321.267	40.278.938.466.319	12,95
JUMLAH EKUITAS	**25.256.531.572.561**	**27.807.759.884.746**	**36.929.723.169.107**	**38.922.107.321.267**	**40.278.938.466.319**	**12,95**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**25.574.494.189.275**	**8.286.541.521.361**	**37.374.450.569.872**	**39.334.503.039.639**	**40.724.440.711.738**	**73,05**

Sumber: Neraca Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019

1. Aset

Aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,89 persen. Rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain Investasi Jangka Panjang rata-rata tumbuh sebesar 20,13 persen, Aset Tetap memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 16,88 persen, sedangkan Aset Lancar mengalami penurunan rata-rata 3,79 persen.

2. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi antarwaktu, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar 11,06 persen. Kewajiban ini berasal dari kewajiban jangka pendek dan tidak ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek bertumbuh dengan rata-rata sebesar 11,17 persen.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan dari neraca daerah periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, diperoleh informasi bahwa Jumlah Ekuitas yang diperoleh sebesar 12,95 persen.

Berdasarkan data yang dijelaskan di atas, maka dilakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Adapun rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dari tahun ke tahun pada periode tahun 2015 sampai tahun 2019 disajikan sebagaimana Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Analisis Rasio Keuangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015–2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio Lancar (*current ratio*)	17,41	9,73	6,85	8,97	9,44
2	Rasio Cepat (*quick ratio*)	17,03	9,28	6,32	8,34	8,92
3	Rasio Total Utang Terhadap Total Asset	0,01	0,02	0,012	0,01	0,011
4	Rasio Utang Terhadap Modal	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01

Sumber: Hasil perhitungan, Tahun 2020

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan *solvabilitas* yang positif. Analisis keduanya disajikan sebagai berikut.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2015 adalah sebesar 17,41 dan cenderung turun pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2019 mencapai 9,44.

2. Rasio Cepat *(Quick Ratio)*

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang lancar. *Quick ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, *quick ratio* pada tahun 2015 sebesar 17,03 dan tahun 2019 *quick ratio* sebesar 8,92. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua utangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Rasio Total Utang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh utang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Besar rasio total utang terhadap total aset pada tahun 2015 sebesar 0,01 dan pada tahun 2019 sebesar 0,01 Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh utang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Utang Terhadap Modal

Rasio Utang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri dan tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2015 Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 0,01 serta periode tahun 2019 sebesar 0,01. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total utang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada utang.

3.1.3 Kinerja Pendanaan Non APBD

Selain pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Barat, pembangunan di wilayah ini juga didukung oleh berbagai sumber pendanaan lainnya. Kolaborasi dalam pembangunan telah dilakukan sejak periode pembangunan jangka menengah yang lalu. Pada bagian ini akan disajikan kinerja pendanaan Non APBD Provinsi Jawa Barat, antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Provinsi Jawa Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta urusan bersama yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

Tabel 3.7
Perkembangan Pendanaan APBN (Dana Dekonsentrasi, Urusan Bersama dan Tugas Pembantuan)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2020

NO.	TAHUN	TUGAS PEMBANTUAN (Rp. 000)	URUSAN BERSAMA (Rp. 000)	DEKONSENTRASI (Rp.000)	JUMLAH
1	2015	480.151.693	214.300.159	584.660.182	1.279.112.034
2	2016	1.899.599.157	55.570.806	750.881.473	2.706.051.436
3	2017	814.031.093	19.947.452	435.453.571	1.269.432.116
4	2018	679.993.649	4.337.355	398.086.484	1.082.417.488
5	2019	471.895.517	-	402.673.419	874.568.936
6	2020	292.946.111	-	216.120.258	509.066.369

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021, diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendanaan APBN di Provinsi Jawa Barat pada 6 (enam) tahun terakhir sangat fluktuatif yaitu terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup besar dan tahun 2020 berada pada posisi menurun. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga Menteri yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan RI, dan Kementerian Dalam Negeri RI yang menyatakan pemindahan pengalokasian pendanaan APBN dari Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK) serta disebabkan tidak adanya Dana Urusan Bersama yang disalurkan ke Jawa Barat. Pelaksanaan penggunaan yang pendanaannya bersumber dari Dana APBN Tahun Anggaran 2016, paling besar digunakan untuk pembiayaan program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, program peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura ramah lingkungan, program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, dengan nilai anggaran belanja sebesar Rp517,8 miliar. Selain itu juga digunakan untuk pembiayaan program pengelolaan sumber daya air (operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA, jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara, layanan perkantoran) dengan anggaran sebesar Rp105,4 miliar.

2. Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Provinsi Jawa Barat yang lainnya adalah Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mitra PKBL dan TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini haruslah berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Sampai dengan saat ini, telah terdaftar sebanyak 228 mitra PKBL dan TJSL Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya terbagi menjadi 170 perusahaan swasta, 49 BUMN dan 9 (sembilan) BUMD.

Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang kesinambungan serta berdampak positif terhadap masyarakat, penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Gambar 3.5
Proporsi Mitra PKBL dan TJSL di Provinsi Jawa Barat

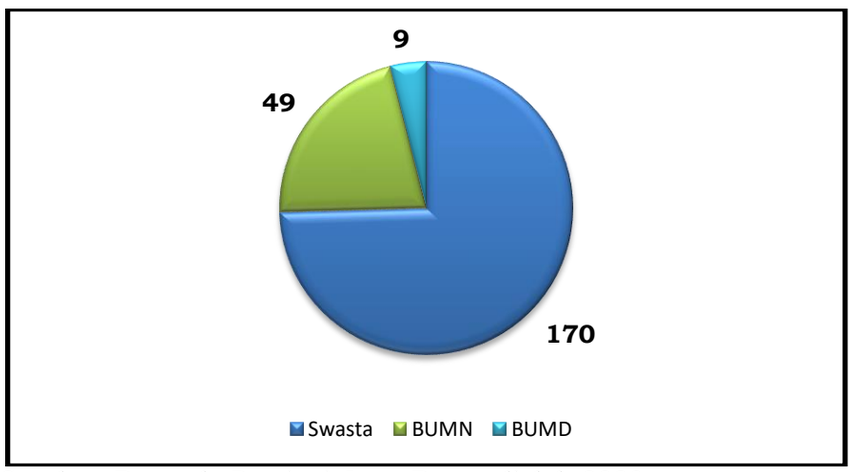

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2020

Dukungan kerjasama pendanaan untuk pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari TJSL/PKBL dari Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.6
Jumlah Pendanaan dari Program PKBL dan TJSL di Jawa Barat

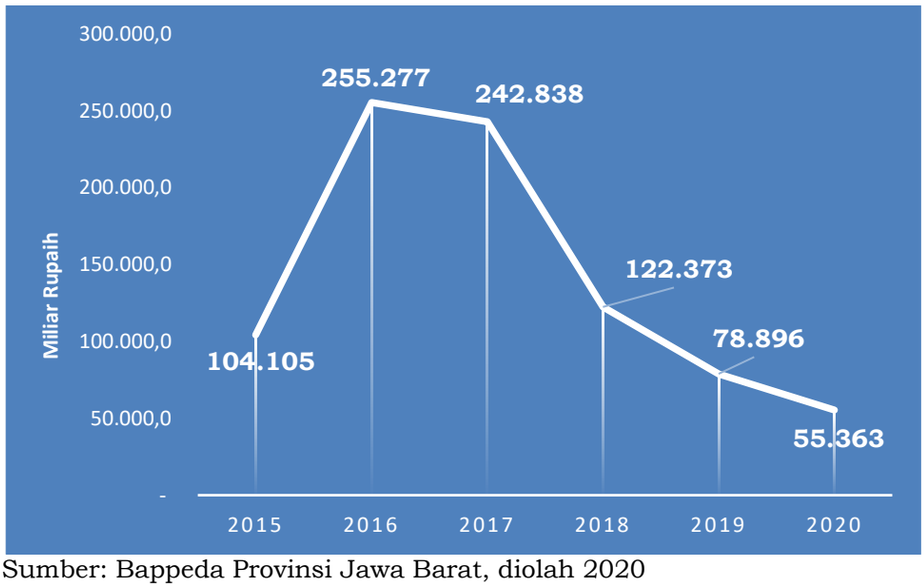

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2020

Dari gambar di atas didapatkan informasi bahwa sumber pendanaan dari Program PKBL dan TJSL di Provinsi Jawa Barat bersifat sangat fluktuatif dari Tahun 2015 hingga 2020. Jumlah dana tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar Rp255,28 miliar, disusul dengan tahun berikutnya pada tahun 2017 sebesar Rp242,84 miliar. Kenaikan terbesar terdapat pada tahun 2015 menuju tahun 2016. Sebaliknya, penurunan terbesar terdapat pada tahun 2018 dan terus menurun hingga tahun 2020 sebesar Rp55,36 miliar. Rincian jumlah pendanaan Program PKBL dan TJSL di Provinsi Jawa Barat berdasarkan jenis perusahaan terdapat pada tabel di bawah.

Tabel 3.8
Perkembangan Pendanaan Kegiatan TJSL/PKBL
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2020

No	Jenis Perusahaan	Nilai Total Investasi Prgram TJSL/PKBL Jawa Barat (Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	BUMD	14.088.400.942	22.337.679.178	13.787.936.053	516.317.966	9.093.920.527	1.261.380.693
2	BUMN	47.544.609.018	144.661.985.763	166.548.330.260	77.666.265.820	32.581.953.689	9.051.239.902
3	Swasta	42.471.545.198	88.277.458.623	62.501.268.441	44.190.686.493	37.219.845.514	45.050.640.573
TOTAL		**104.104.555.158**	**255.277.123.564**	**242.837.534.754**	**122.373.270.279**	**78.895.719.730**	**55.363.261.168**

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2020

Gambar 3.7
Perkembangan Pendanaan TJSL/PKBL BUMD di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2020

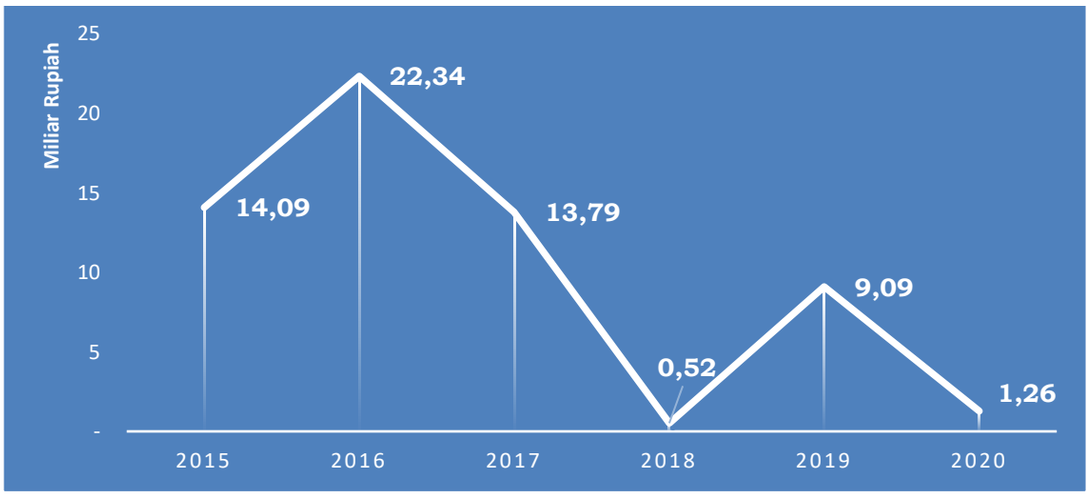

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020, diolah

Perkembangan pendanaan TJSL/PKBL BUMD di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2020 bersifat sangat fluktuatif juga. Jumlah dana tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar Rp22,34 miliar, disusul dengan tahun berikutnya pada tahun 2017 sebesar Rp13,79 miliar, dan terus menurun, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi Rp1,26 miliar.

Gambar 3.8
Perkembangan Pendanaan TJSL/PKBL Perusahaan Swasta di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2020

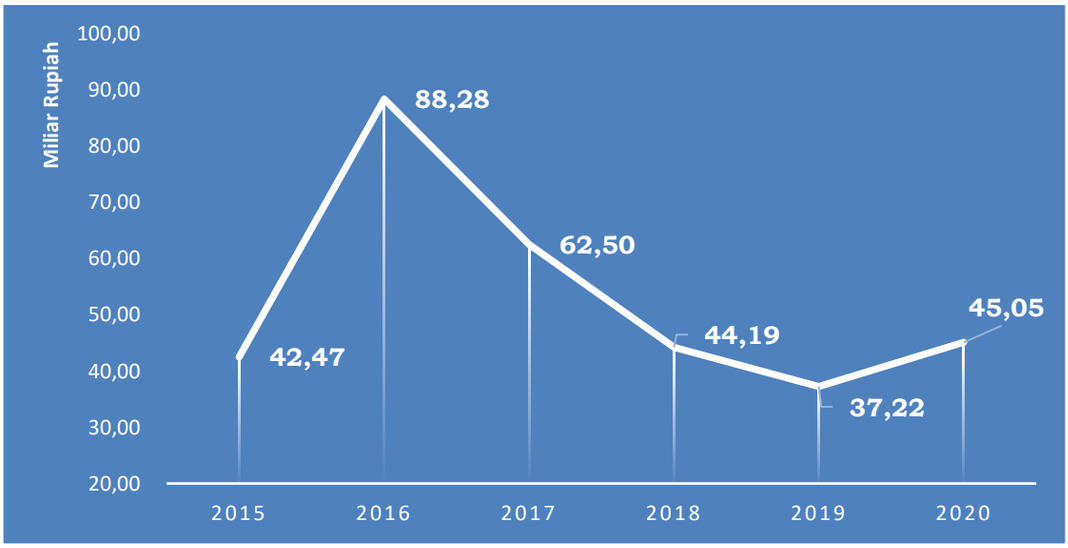

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020, diolah

Perkembangan pendanaan TJSL/PKBL Perusahaan Swasta di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015 mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp88,28 miliar. Namun pada tahun 2017 terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019, dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi Rp45,05 miliar.

Gambar 3.9
Perkembangan Pendanaan TJSL/PKBL Berdasarkan Jenis Perusahaan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2020

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2020

3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Prospek proyek dengan skema KPBU yang telah diidentifikasi tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Rincian masing-masing prospek disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.9
Prospek Proyek KPBU

No.	Nama Proyek	Dinas yang Bertanggung Jawab	Area Layanan	Nilai Investasi (dalam Rp)
1	TPPAS Legok Nangka	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Bandung, Kab. Bandung, KBB, Kota Cimahi Kab. Sumedang, Kab. Garut	3,45 T

No.	Nama Proyek	Dinas yang Bertanggung Jawab	Area Layanan	Nilai Investasi (dalam Rp)
2	TPPAS Ciayumajakuning	Dinas Lingkungan Hidup dan PT. MUJ	Kab. Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan	400 M
3	SPAM Jatigede	Dinas Perumahan dan Permukiman dan PT. Tirta Jabar	Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Indramayu, Majalengka, Sumedang	2,1 - 2,3 T
4	SPAM Metro Bandung Raya (Sinumbra)	Dinas Permukiman dan Perumahan	Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung	2,9 T
5	SPAM Kertasari	Dinas Permukiman dan Perumahan	Kabupaten Bandung	367 M
6	SPAM Cikalong	Dinas Permukiman dan Perumahan	Kabupaten Bandung	400 M
7	SPAM Pangandaran	Dinas Permukiman dan Perumahan	Kabupaten Pangandaran	155 M
8	SPALD Bandung Raya	Dinas Perumahan dan Permukiman	Kota Bandung, Kabupaten Bandung	115,3 M
9	SPALD Cirebon Raya	Dinas Permukiman dan Perumahan	Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung	116,5 M
10	Pengembangan Pelabuhan Cirebon	Dinas Perhubungan	Kabupaten Cirebon	975 M
11	Pelabuhan Bojongsalawe	Dinas Perhubungan	Kabupaten Pangandaran	40 M
12	Kolam Retensi Andir	Dinas Sumber Daya Air	Kabupaten Bandung	95 M
13	Bendungan Sadawarna	Dinas Sumber Daya Air	Kabupaten Subang	1,943 T
14	Hutan Bakau Sinar Laut	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kabupaten Cianjur	36,5 M
15	Pengembangan Jalur Puncak II	Dinas Bina Marga	Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur	1,2 T
16	Pengembangan Jalur Lingkar Cirebon	Dinas Bina Marga	Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon	1,2 T
17	Pengembangan Pariwisata *Geopark* Ciletuh	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kabupaten Sukabumi	200 M Untuk Aksesibilitas
18	Bandara Nusawiru	Dinas Perhubungan	Kabupaten Pangandaran	568 M
19	Bandara Sukabumi	Dinas Perhubungan	Kabupaten Sukabumi	395 M
20	Pengembangan Pantai Gebang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kabupaten Cirebon	226 M
21	Pengembangan Pantai Gebang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kabupaten Cirebon	226 M
22	*Shortcut* Cibungur - Tanjung Rasa	Dinas Perhubungan	Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang	1,8 T
23	Pengembangan Hotel di Batu Karas	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kabupaten Pangandaran	185 M
24	Jatinangor *Science Park*	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kabupaten Sumedang	940 M

Sumber: Simpul KPBU Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum merupakan kebijakan pengelolaan APBD yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah

dengan efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Kebijakan pengelolaan APBD Provinsi Jawa Barat periode RPJMD lalu diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian, serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi CPDP, UPT, UPPD, dan Balai Penghasil.
b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
c. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
d. Meningkatkan *deviden* BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
e. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
f. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
g. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
h. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
i. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan
c. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dilakukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

a. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
    1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
    2) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
    3) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
    4) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat dan *Samsat Mobile,* layanan SMS, pengembangan Samsat Outlet, dan Samsat Gendong serta *e-Samsat*;
    5) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008;
    6) Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
    7) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;

8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; dan
9) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.

b. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
1) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
2) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
3) Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; dan
4) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

c. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, strategi yang ditempuh melalui:
1) Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri;
2) Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat; dan
3) Pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat.

2. Kebijakan Belanja

Belanja daerah dikelompokan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program penjabaran kebijakan perangkat daerah untuk mencapai hasil

yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari beberapa komponen yaitu belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bagi hasil, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Kebijakan belanja daerah, sebagai berikut:

a. Memprioritaskan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan;
b. Memprioritaskan pemenuhan rencana pembangunan RPJMD Tahun 2013-2018;
c. Sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2010-2014 dan RPJMN Tahun 2015-2019;
d. Pendukungan terhadap pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG`s) dan *Sustainable Development Goals* (SDG's);
e. Pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Belanja Daerah;
f. Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji;
g. Pemenuhan anggaran fungsi infrastruktur sekurang-kurangnya 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
h. Pengalokasian Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan desa, hibah, Bansos dan subsidi sebagai implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota;
i. Pengalokasian Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Belanja Operasional Sekolah (BOS) Pusat, Pajak Rokok sesuai dengan peruntukan yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
j. Mengalokasikan anggaran untuk kepentingan nasional serta kebutuhan penting dan mendesak lainnya.

3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Khusus untuk investasi pembelian surat berharga (pembelian saham) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila APBD diperkirakan surplus serta pemerintah daerah harus memenuhi kewajibannya untuk melayani masyarakat dan membangun daerah melalui APBD terlebih dahulu, sebelum merencanakan untuk berinvestasi. Apabila APBD diperkirakan surplus saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka rencana investasi pemerintah daerah akan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi. Sedangkan kebijakan pengeluaran diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
b. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah;
c. Pemerintah daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll;
d. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian; dan
e. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan obligasi daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Jawa Barat pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.10
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019

Kode	Uraian	2015			2016			2017		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5	**BELANJA**	**27.752.682.415.573**	**24.417.605.860.513**	**87,98**	**29.493.210.807.883**	**27.621.964.467.242**	**93,66**	**34.403.683.011.749**	**32.706.749.485.377**	**95,07**
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**21.686.438.822.087**	**19.256.280.145.688**	**88,79**	**22.807.901.948.556**	**21.748.500.641.497**	**95,36**	**26.755.432.696.561**	**25.804.945.655.137**	**96,45**
5.1.1	Belanja Pegawai	1.778.690.298.085	1.671.229.142.927	93,96	1.964.995.266.290	1.835.034.492.249	93,39	5.199.192.018.051	5.152.653.055.073	99,10
5.1.3	Belanja Subsidi	20.000.000.000	18.990.870.500	94,95	15.000.000.000	14.999.772.000	100,00	15.000.000.000	14.758.266.000	98,39
5.1.4	Belanja Hibah	7.643.860.862.000	6.826.862.952.000	89,31	10.180.627.452.113	9.854.923.609.133	96,80	9.863.495.294.372	9.526.753.045.558	96,59
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.000.000.000	3.048.750.000	17,93	18.380.000.000	9.940.000.000	54,08	47.479.445.000	37.096.500.000	78,13
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	6.597.238.772.635	6.406.192.657.944	97,10	6.572.457.593.224	6.393.271.239.759	97,27	6.968.418.260.973	6.902.132.882.595	99,05
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	5.544.350.892.459	4.329.955.772.317	78,10	4.027.435.706.096	3.640.311.644.356	90,39	4.507.759.030.986	4.171.504.088.911	92,54
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	85.297.996.908	-	-	29.005.930.833	19.884.000	0,07	154.088.647.179	47.817.000	0,03
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**6.066.243.593.486**	**5.161.325.714.825**	**85,08**	**6.685.308.859.327**	**5.873.463.825.745**	**87,86**	**7.648.250.315.188**	**6.901.803.830.240**	**90,24**
5.2.1	Belanja Pegawai	250.088.838.048	223.252.160.576	89,27	260.145.578.711	233.811.805.839	89,88	302.752.764.887	281.793.512.576	93,08
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	2.989.975.605.854	2.639.397.429.044	88,27	3.097.185.938.161	2.780.296.396.345	89,77	4.599.883.412.734	4.308.394.171.934	93,66
5.2.3	Belanja Modal	2.826.179.149.584	2.298.676.125.205	81,34	3.327.977.342.455	2.859.355.623.561	85,92	2.745.614.137.567	2.311.616.145.730	84,19

Sumber: LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019, diolah kembali

Lanjutan Tabel 3.10

Kode	Uraian	2018			2019			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Penyerapan (%)
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%		
5	**BELANJA**	**35.669.850.990.460**	**33.333.824.961.824**	**93,45**	**39.111.008.407.298**	**35.833.086.126.516**	**91,62**	**1,07**	**92,36**
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**27.153.904.782.419**	**25.620.293.293.038**	**94,35**	**29.934.606.632.471**	**28.100.337.548.508**	**93,65**	**1,41**	**93,72**
5.1.1	Belanja Pegawai	5.671.092.268.289	5.543.456.779.986	97,75	5.976.569.983.926	5.605.436.893.218	93,79	0,02	95,60
5.1.3	Belanja Subsidi	20.000.000.000	19.359.366.500	96,80	20.000.000.000	19.384.264.000	96,92	0,55	97,41
5.1.4	Belanja Hibah	9.408.172.570.736	8.572.522.302.027	91,12	9.218.746.973.712	8.802.612.033.243	94,76	1,63	93,72
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	302.512.790.000	278.015.390.000	91,90	298.152.000.000	277.619.075.000	93,05	66,24	67,02
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	7.542.526.872.477	7.450.622.081.732	98,78	8.184.719.740.938	7.901.869.013.400	96,54	-0,13	97,75
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	4.167.091.405.800	3.756.133.209.513	90,14	6.205.159.446.715	5.493.416.269.647	88,53	3,43	87,94
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	42.508.875.117	184.163.280	0,43	31.258.487.180	-	-		
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**8.515.946.208.041**	**7.713.531.668.786**	**90,58**	**9.176.401.774.827**	**7.732.748.578.008**	**85,00**	**0,05**	**87,75**
5.2.1	Belanja Pegawai	260.990.606.870	239.876.746.009	91,91	327.891.462.318	283.317.579.553	86,41	-0,75	90,11
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	4.643.920.869.009	4.327.807.662.454	93,19	5.585.583.141.133	4.919.083.456.094	89,26	0,33	90,83
5.2.3	Belanja Modal	3.611.034.732.162	3.145.847.260.323	87,12	3.262.927.171.376	2.530.347.542.361	77,55	-0,97	83,22

Sumber: LRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019, diolah

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi realisasi rata–rata pertumbuhan Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2015–2019 sebesar 1,07 persen, dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar 1,41 persen dan Belanja Langsung sebesar 0,05 persen. Adapun realisasi penggunaan belanja dibandingkan dengan anggaran yang tersedia periode Tahun 2015–2019 rata-rata sebesar 92,36 persen. Lebih lanjut, rata-rata penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 93,72 persen dan Belanja Langsung sebesar 87,75 persen.

Pada belanja tidak langsung, 3 (tiga) peringkat teratas rata-rata penyerapan anggaran terbesar selama periode 5 (lima) tahun tersebut berada pada jenis belanja bagi hasil, belanja subsidi, dan belanja pegawai. Sementara rata-rata penyerapan anggaran pada belanja langsung paling besar pada jenis belanja barang dan jasa, berikutnya adalah belanja pegawai, dan belanja modal.

2. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ditampilkan pada tabel di bawah. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015–2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**1.619.550.838.569**	**1.773.445.657.923**	**4.017.200.548.841**	**4.393.370.649.241**	**5.501.894.138.835**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	731.450.717.945	774.052.942.382	2.567.003.671.898	2.517.071.384.469	3.641.345.847.077
2	Belanja Tambahan Penghasilan	632.816.883.316	722.775.955.703	1.161.360.854.267	1.520.516.796.249	1.472.412.473.875
3	Biaya Pemungutan Pajak	583.204.313	-	-		
4	Insentif Pemungutan Pajak	242.999.229.400	264.639.927.050	273.404.127.200	329.710.321.825	360.119.904.625
5	Insentif Pemungutan Retribusi	1.008.803.595	1.257.832.788	1.190.895.476	1.124.146.698	1.156.913.258
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	10.692.000.000	10.719.000.000	14.241.000.000	24.948.000.000	26.859.000.000
B.	**Belanja Langsung**	**656.713.871.000**	**789.558.297.701**	**905.086.486.633**	**1.110.524.603.500**	**1.164.802.108.207**
1	Belanja Honorarium PNS Provinsi	26.871.610.500	31.572.820.993	23.144.909.840	23.486.891.500	33.094.793.660
2	Honorarium PNS Non Provinsi	20.351.032.800	20.722.697.000	163.350.980.781	16.313.963.800	102.814.135.418
3	Belanja Uang Lembur	8.599.336.100	-	-		
4	Uang Jahit Pakaian	-	-	-	-	-
5	Belanja Premi Asuransi	5.064.209.106	5.513.820.598	1.955.648.940	1.899.061.940	2.487.061.135
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.738.005.097	12.264.864.949	12.172.495.780	9.239.483.400	11.027.448.480
8	Belanja Pakaian Kerja	9.593.182.125	6.986.987.868	6.438.821.909	8.878.239.450	13.249.724.319
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	20.165.368.090	22.260.116.873	24.404.787.124	9.239.483.400	26.735.230.836
10	Belanja Perjalanan Dinas PNS Provinsi	312.717.314.956	352.429.933.350	364.241.337.693	420.911.424.986	484.184.341.191
11	Belanja Perjalanan Dinas PNS Non Provinsi	7.502.370.816	11.394.042.515	8.862.533.308	7.292.868.050	11.820.164.675
12	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	-
13	Belanja Pemulangan Pegawai	760.000.000	130.500.000	45.000.000	1.629.700	-

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
14	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	5.838.280.400	4.603.764.825	3.876.678.773	3.012.840.400	3.299.103.178
15	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	9.503.200.813	11.845.732.381	17.266.301.385	22.602.960.866	33.354.202.657
16	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan)**	223.009.960.197	309.833.016.349	279.326.991.100	587.645.756.008	442.735.902.658
TOTAL		**2.276.264.709.569**	**2.563.003.955.624**	**4.922.287.035.474**	**5.503.895.252.741**	**6.666.696.247.042**

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019, diolah

Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 (%)
1	2015	2.276.264.709.569	25.077.605.860.513	9,08
2	2016	2.563.003.955.624	30.893.816.721.869	8,30
3	2017	4.922.287.035.474	35.742.998.436.987	13,77
4	2018	5.503.895.252.741	33.422.024.960.624	16,47
5	2019	6.666.696.247.042	35.909.886.124.516	18,57

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat 2015–2019, diolah

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif meningkat antar tahun pada periode Tahun 2015–2019. Pada tahun 2019 proporsinya adalah 18,57 persen. Ini berarti belanja untuk pembangunan tetap lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan.

3. Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**8.079.296.780.359**	**8.230.543.439.314**	**10.990.886.096.284**	**11.956.835.874.977**	**13.530.021.850.418**	**14,34**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	731.450.717.945	774.052.942.382	2.567.003.671.898	2.517.071.384.469	3.641.345.847.077	70,04
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	632.816.883.316	722.775.955.703	1.161.360.854.267	1.520.516.796.249	1.472.412.473.875	25,66
3	Biaya Pemungutan Pajak	583.204.313	-	-		-	
4	Insentif Pemungutan Pajak	242.999.229.400	264.639.927.050	273.404.127.200	329.710.321.825	360.119.904.625	10,51
5	Insentif Pemungutan Retribusi	1.008.803.595	1.257.832.788	1.190.895.476	1.124.146.698	1.156.913.258	4,17
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	10.692.000.000	10.719.000.000	14.241.000.000	24.948.000.000	26.859.000.000	28,99
7	Gaji dan Tunjangan DPRD	28.335.365.207	36.970.404.579	43.418.766.132	62.515.492.417	69.567.758.517	25,79
8	Gaji dan Tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur	220.228.151	223.129.747	214.653.410	181.338.787	232.024.866	2,49
9	Belanja Penerimaan Lainnya Gubernur/Wakil Gubernur	23.122.711.000	24.395.300.000	25.681.538.000	25.088.113.000	31.400.715.000	8,41
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	6.405.426.901.111	6.392.971.712.365	6.902.132.882.595	7.450.622.081.732	7.901.869.013.400	5,44
11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada kepada Kabupaten/Kota	765.756.833	-	-	-	-	-
12	Belanja Bagi Hasil Kepada Pihak Ketiga	-	299.527.394	-	-	-	-
13	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.874.979.488	2.237.707.306	2.237.707.306	25.058.199.800	25.058.199.800	259,79
B	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**660.000.000.000**	**378.575.000.000**	**311.875.000.000**	**88.199.998.800**	**386.442.976.038**	**51,54**
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	660.000.000.000	378.575.000.000	311.875.000.000	88.199.998.800	386.442.976.038	51,54
	TOTAL A+B	**8.739.296.780.359**	**8.609.118.439.314**	**11.302.761.096.284**	**12.045.035.873.777**	**13.916.464.826.456**	**12,98**

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat 2015–2019, diolah

3.2.2 Proporsi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode tahun 2015 sampai tahun 2019.

Tabel 3.14
Penutup Defisit Rill Anggaran Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015–2019

No	Uraian	Relisasi Tahun (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan Daerah	24.009.980.850.227	27.694.035.120.859	32.163.957.645.604	33.919.022.032.348	36.037.894.762.461
2	Belanja Daerah	24.417.605.860.513	27.621.964.467.242	32.706.749.485.376	33.333.824.961.824	35.833.086.126.516
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	660.000.000.000	378.575.000.000	311.875.000.000	88.199.998.800	76.799.998.800
A.	Defisit Riil	-1.067.625.010.286	-306.504.346.383	-854.666.839.772	496.997.071.724	128.008.637.145
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	4.549.073.508.028	3.485.029.560.541	3.345.697.892.227	2.493.457.111.838	3.060.677.232.835
2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	50.000.000.000	-	-	-	-
3	Koreksi	-	-	-	-	-
B.	Total Realisasi Penerimaan	4.599.073.508.028	3.485.029.560.541	3.345.697.892.227	2.493.457.111.838	3.060.677.232.835
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**3.531.448.497.742**	**3.178.525.214.158**	**2.491.031.052.455**	**2.990.454.183.562**	**3.188.685.869.980**

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Data Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2015 sampai 2019, nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tertinggi pada tahun 2015 yaitu Rp3.531.448.497.742. Posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp3.188.685.869.980. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata–Rata Pertumbuhan (%)
1	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	4.549.073.508.028	3.485.029.560.541	3.345.697.892.227	2.493.457.111.838	3.060.677.232.835	-7,53
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya		4.549.073.508.028	3.485.029.560.541	3.345.697.892.227	2.493.457.111.838	3.060.677.232.835	-7,53

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019, diolah

Analisis yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenaan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2020

URAIAN	2015		2016		2017	
	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	3.484.246.614.428		3.343.922.854.244		2.493.457.111.839	
Bersumber Dari:						
Pelampauan Pendapatan	28.081.719.930	0,81	1.202.775.273.754	36	792.322.488.099	31,78
Penghematan Belanja	3.335.076.555.060	95,72	1.871.246.340.641	56	1.696.933.526.372	68,06
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	2.798.116.686	0,08	166.180.586.199	5	4.201.097.367	0,17
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	-	-	25.000.000.000	0,7	-	-
Penghematan Pembiayaan Netto	118.290.222.752	3,4	78.720.653.650	2,4	-	-

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019, diolah
*) Tahun 2020: BPKAD (*Cut off* Data per 31 Desember 2021 (*Unreviu)*)

Lanjutan Tabel 3.16

URAIAN	2018		2019		2020*)		Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	3.060.689.894.835		3.289.300.908.323		**1.924.109.043.835**		
Bersumber Dari:							
Pelampauan Pendapatan	654.428.153.726	21,38	(89.224.126.002,34)	(2,71)	(3.437.522.840.924)	(178,66)	(15,23)
Penghematan Belanja	2.336.026.028.635	76,32	3.277.922.286.781	99,65	5.591.287.591.555	290,59	114,39
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	70.235.711.273	2,29	100.602.376.344	3,06	(229.655.706.796)	(11,94)	(0,22)
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	1.200,00	0	1.200	0		0	
Penghematan Pembiayaan Netto							

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Pada akhir tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kesemuanya ini merupakan hal baru di dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2021.

Gambar 3.10
Beberapa Peraturan yang diterbitkan sebagai Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

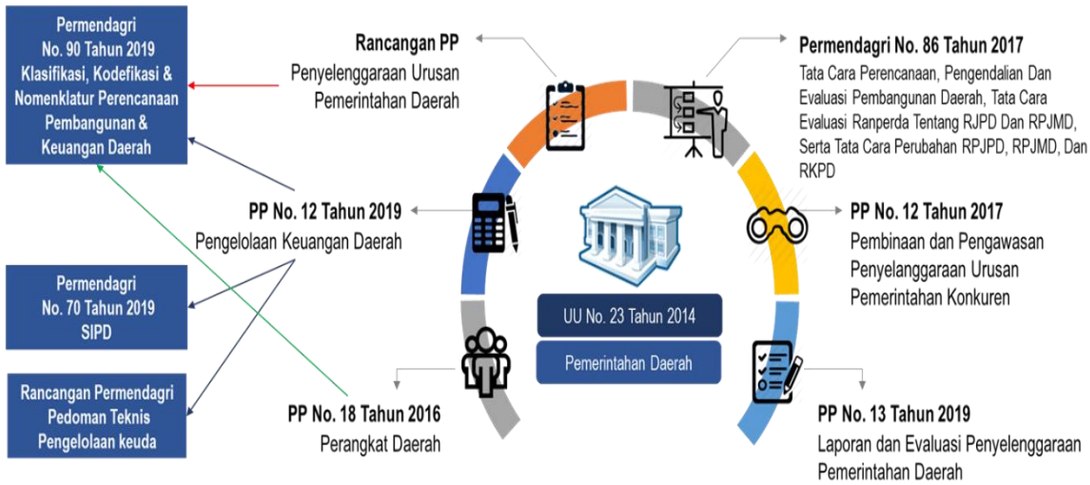

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan APBD Tahun 2021 sudah mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Gambar 3.11
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

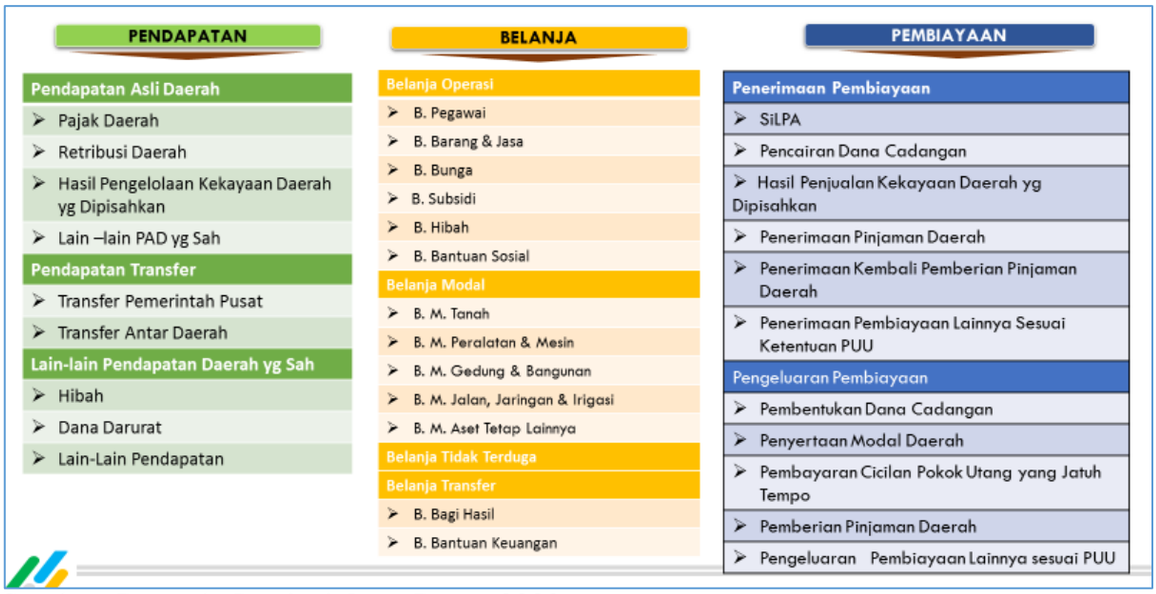

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020

Selain adanya peraturan baru yang terbit di akhir tahun 2019, terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah pandemi COVID-19 yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, hal ini berdampak pada banyak aspek, antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini.

Perkembangan penyebaran pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), *social distancing* dan anjuran *Work From Home* (WFH) yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berimplikasi terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro. Pandemi COVID-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada Triwulan I dan II Tahun 2020 dan hal ini mempengaruhi capaian indikator-indikator ekonomi makro lainnya pada perencanaan di RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan daerah Provinsi Jawa Barat. Diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2020 diasumsikan akan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diasumsikan juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2020.

Dengan pendapatan daerah yang menurun, maka Belanja Daerah yang sebelumnya fokus untuk melaksanakan dan menuntaskan program/kegiatan yang sudah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat, pada tahun mendatang selain tetap menuntaskan program/kegiatan strategis, juga harus mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi COVID-19.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pada awalnya proyeksi pendapatan daerah terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar proyeksi, diantaranya asumsi proyeksi pajak, seperti telah diuraikan di atas bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu Tahun 2015–2019 tercapai rata-rata sebesar 9,60 persen, dan berkontribusi sebesar 91,52 persen terhadap keseluruhan pendapatan daerah dari PAD, hal ini mengindikasikan bahwa dalam tahun-tahun mendatang komponen Pajak Daerah tetap menjadi tumpuan dan andalan di dalam peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut, penetapan proyeksi pendapatan retribusi relatif stagnan dan tidak menggambarkan kenaikan penerimaan. Hal ini disebabkan terdapat perubahan kebijakan yang memberikan dampak terhadap penurunan total penerimaan. Kebijakan dimaksud adalah perubahan kewenangan dialihkannya Pemungutan Tera-tera Ulang dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu terjadi perubahan pola pengelolaan keuangan dari retribusi daerah menjadi PPK BLUD untuk beberapa rumah sakit daerah yang sekarang menjadi Rumah Sakit Provinsi dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat.

Struktur pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah diperoleh dari Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Atas Penempatan Deposito, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Atas Pengelolaan Sampah Regional, dan Pemanfaatan Aset oleh pihak ketiga. Pendapatan denda pajak daerah diharapkan diperoleh dari dampak gencarnya pemerintah daerah provinsi melakukan penelusuran kendaraan yang tidak mendaftar ulang. Sementara pendapatan dari pengelolaan sampah regional dimana pemerintah daerah provinsi menyediakan tempat pembuangan akhir dan pengolahannya diharapkan memberikan kecenderungan meningkat sejalan dengan pertumbuhan produksi sampah di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Terkait proyeksi Dana Perimbangan, penyusunan target dana bagi hasil pajak/bukan pajak pada tahun-tahun mendatang secara umum terdapat kenaikan per tahun. Kenaikan tersebut mempertimbangkan rerata realisasi dana bagi hasil pajak per tahun dan penurunan dana bagi hasil bukan pajak. Penyusunan target DAK bersifat flat dengan *baseline*

tahun 2018, mempertimbangkan tidak ada perubahan yang fundamental terkait perhitungan alokasi, nilai tahun-tahun sebelumnya yang dianggap masih relevan sebagai perkiraan target.

Sementara penyusunan Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berdasarkan pertumbuhan penerimaan hibah dari pihak ketiga selama kurun waktu Tahun 2015–2019 sebesar 3,57 persen per tahun. Pertumbuhan ini telah memperhitungkan estimasi dana insentif daerah dari pemerintah.

Tetapi dengan merebaknya pandemi COVID-19 ini, terdapat beberapa komponen pendapatan yang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kondisi normal, walaupun diharapkan pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi lagi bencana sosial tersebut atau tidak sampai berkepanjangan sampai tahun mendatang. Hal ini diperkuat dengan kondisi bahwa pemerintah akan memfokuskan pemulihan ekonomi dan reformasi nasional pada sejumlah sektor akibat pandemi COVID-19 di tahun 2021. Setidaknya ada 4 (empat) sektor akan menjadi fokus pemerintah yakni pemulihan sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan negara, yang tentu saja hal ini akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Balai Penghasil.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
4. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
8. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
   a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
   b. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
   c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
   d. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan antara lain *drive thru*, Gerai Samsat dan Samsat *Mobile,* layanan SMS, mengembangkan Samsat Outlet, Samsat Gendong,

Aplikasi Sambara dan Aplikasi Sipolin serta Samsat J'Bret (Samsat Jawa Barat Ngabret). Selain itu dilakukan kerjasama dengan beberapa toko ritel dalam rangka kemudahan pelayanan pembayaran.

e. Menggalakkan sebuah program akselerasi pendapatan daerah yaitu "Program Triple Untung Plus". Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan sebagai tahun Tertib Administrasi Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor sekaligus memberikan insentif pajak daerah kepada dunia usaha sektor otomotif dan masyarakat/wajib pajak di Jawa Barat. Program Triple Untung Plus tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 973/267-Bapenda/2020. Program Triple Untung Plus merupakan tindak lanjut terhadap arahan Presiden Republik Indonesia terkait pemberian relaksasi pajak untuk mengurangi dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di lingkungan pemerintah daerah.
f. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008.
g. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
h. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya yaitu mengelola BUMD secara profesional, meningkatkan sarana dan prasarana, memberikan kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik.
i. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
j. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil.

2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
   a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
   b. Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai dasar Perhitungan Bagi Hasil.
   c. Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi.
   d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Transfer (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang optimal ditempuh melalui:
   a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
   b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.
   c. Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat.

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain hal tersebut, seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa belanja daerah selain dialokasikan untuk penuntasan program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 juga harus dialokasikan pada program/kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet; Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
    a. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023, sebanyak 11 (sebelas) prioritas, sebagai berikut: 1). Reformasi sistem kesehatan daerah; 2). Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi; 3). Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan; 4). Reformasi sistem perlindungan sosial; 5). Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan; 6). Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana; 7). Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah; 8). Gerakan membangun desa; 9). Pendidikan agama dan tempat ibadah juara; 10). Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 11). Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.
    b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023.
    c. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan provinsi, meliputi 19 (sembilan belas) jenis pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah

yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi; pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Jawa Barat secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
7. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
8. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018-2023, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.
9. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan

pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.

10. Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial semua yang terdampak pandemi COVID-19.

Belanja daerah, dari tahun ke tahun relatif mengalami kenaikan. Sejak pada tahun 2020, alokasi belanja daerah sudah mencakup pembayaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil untuk 13 (tiga belas) bulan dan Tunjangan Hari Raya (Gaji ke-14) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok serta *acres*. Selain itu dianggarkan pula untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja serta tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai, disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan yaitu Rp2.118.872.730.113 atau sebesar 6,2 persen, dengan Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen yang memiliki peningkatan terbesar yaitu Rp1.601.351.149.254 atau sebesar 8,5 persen.

Lebih lanjut, pendapatan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,36 persen setiap tahun. Rata-rata pertumbuhan positif ditunjukkan oleh komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,95 persen dan Pendapatan Transfer sebesar 2,99 persen, sementara Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sama dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau

bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Lebih rinci mengenai realisasi dan proyeksi pendapatan dan belanja tersebut ditunjukkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3.17
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2020

Struktur APBD berdasarkan PP 58/2005

Kode Akun	Uraian	Realisasi		
		2018	2019	2020*)
4.	**PENDAPATAN**	**33.919.022.032.348**	**36.037.894.762.461**	**34.777.470.830.693**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**19.642.915.448.764**	**21.244.266.598.018**	**18.795.077.303.417**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	18.153.616.036.193	19.626.352.311.765	17.036.015.136.018
4.1.2	Retribusi Daerah	49.176.487.699	56.222.370.756	40.235.623.478
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	348.537.989.633	386.442.976.038	401.703.315.844
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.091.584.935.239	1.175.248.939.459	1.317.123.228.077
4.2	**Dana Perimbangan**	**14.208.000.403.584**	**14.715.372.046.649**	**15.881.415.189.271**
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	1.804.540.601.861	1.483.785.231.865	2.063.105.718.266
4.2.2	Dana Alokasi Umum	3.023.552.986.000	3.212.647.404.000	2.964.612.155.000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	9.379.906.815.723	10.018.939.410.784	10.853.697.316.005
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**68.106.180.000**	**78.256.117.794**	**100.978.338.005**
4.3.1	Pendapatan Hibah	22.044.000.000	23.188.473.794	36.459.066.005
4.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.750.000.000	42.579.794.000	29.413.272.000
4.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya	12.312.180.000	12.487.850.000	35.106.000.000
5.	**BELANJA**	**33.333.824.961.824**	**35.833.086.126.517**	**37.672.383.765.771**
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**25.620.293.293.038**	**28.033.579.142.382**	**31.074.644.696.112**
5.1.1	Belanja Pegawai	5.543.456.779.986	5.605.436.893.218	5.829.309.275.886
5.1.2	Belanja Bunga	-	-	18.123.947.774
5.1.3	Belanja Subsidi	19.359.366.500	19.384.264.000	-
5.1.4	Belanja Hibah	8.572.522.302.027	8.736.051.702.117	9.461.124.000.592
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	278.015.390.000	277.421.000.000	206.084.000.000
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa*	7.450.622.081.732	7.901.869.013.400	7.212.501.291.449
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	3.756.133.209.513	5.493.416.269.647	5.020.674.544.240
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	184.163.280	-	3.326.827.636.171
5.2	**Belanja Langsung**	**7.713.531.668.786**	**7.799.506.984.135**	**6.597.739.069.659**
5.2.1	Belanja Pegawai	239.876.746.009	283.317.579.553	280.747.359.080
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.327.807.662.454	4.985.841.862.221	4.753.271.452.404
5.2.3	Belanja Modal	3.145.847.260.323	2.530.347.542.361	1.563.720.258.175

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Barat, 2020
*) Realisasi 2020 (Pendapatan belum merupakan hasil rekonsiliasi, Belanja merupakan nilai SP2D)

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa awal tahun 2020 ini terjadi kejadian luar biasa yaitu pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap kondisi saat ini, sehingga anggaran pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, baik pendapatan daerah maupun belanja daerah diproyeksikan mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, proyeksi pendapatan daerah mengalami penyesuaian dengan tetap melaksanakan upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi, sedangkan belanja daerah disamping untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga diprioritaskan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi semua yang terdampak pandemi COVID-19.

Adapun proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yang menggunakan struktur APBD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ditunjukan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021–2023

Struktur APBD berdasarkan PP 12/2019

Kode Akun	Uraian	Proyeksi			Rata-rata pertumbuhan
		2021	2022	2023	%
4	**PENDAPATAN**	**41.471.996.756.123**	**42.191.753.377.822**	**43.383.767.630.465**	**2,28**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**25.066.632.128.677**	**25.551.933.104.698**	**26.035.021.934.969**	**1,91**
4.1.01	Pajak Daerah	23.458.576.336.110	23.838.299.804.260	24.300.840.179.240	1,78
4.1.02	Retribusi Daerah	48.719.409.971	44.487.094.443	46.389.801.722	-2,21
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	408.899.021.533	426.579.275.567	445.225.023.579	4,35
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.150.437.361.063	1.242.566.930.428	1.242.566.930.428	4,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**16.381.985.627.446**	**16.616.441.273.124**	**17.325.366.695.496**	**2,85**
4.2.01	**Transfer Pemerintah Pusat**	**16.381.985.627.446**	**16.616.441.273.124**	**17.325.366.695.496**	**2,85**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	16.293.819.865.446	16.616.441.273.124	17.325.366.695.496	3,12
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.861.356.621.446	1.612.237.954.500	1.612.237.954.500	-6,69
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.107.449.500.000	3.586.261.202.624	4.295.186.624.996	17,59
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus	11.325.013.744.000	11.417.942.116.000	11.417.942.116.000	0,41
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	88.165.762.000			
4.2.02	**Transfer Antar Daerah**	**-**			
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	-			
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-			
4.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**23.379.000.000**	**23.379.000.000**	**23.379.000.000**	**0,00**
4.3.01	Hibah	23.379.000.000	23.379.000.000	23.379.000.000	0,00

Kode Akun	Uraian	Proyeksi			Rata-rata pertumbuhan
		2021	2022	2023	%
5	**BELANJA**	**44.615.065.661.799**	**42.126.705.021.135**	**42.365.232.496.792**	**-2,51**
5.1	**Belanja Operasi**	**24.836.798.357.117**	**25.607.220.991.355**	**25.813.010.514.364**	**1,95**
5.1.01	Belanja Pegawai	6.857.125.031.176	7.028.553.156.955	7.054.266.985.879	1,43
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.220.375.246.644	7.712.452.954.571	7.863.892.326.042	4,39
5.1.03	Belanja Bunga				
5.1.04	Belanja Subsidi	-	30.000.000.000	30.000.000.000	
5.1.05	Belanja Hibah	10.199.076.329.297	10.451.485.129.829	10.480.121.452.443	1,37
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	560.221.750.000	384.729.750.000	384.729.750.000	-15,66
5.2	**Belanja Modal**	**3.207.473.349.875**	**3.631.623.326.798**	**3.565.069.216.960**	**5,70**
5.2.1	Belanja Modal	3.207.473.349.875	3.631.623.326.798	3.565.069.216.960	5,70
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**368.913.568.696**	**100.000.000.000**	**100.000.000.000**	**-36,45**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	368.913.568.696	100.000.000.000	100.000.000.000	-36,45
5.4	**Belanja Transfer**	**16.201.880.386.111**	**12.787.860.702.982**	**12.887.152.765.468**	**-10,15**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.301.544.755.277	9.420.872.902.982	9.565.164.965.468	1,41
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	6.900.335.630.834	3.366.987.800.000	3.321.987.800.000	-26,27

Sumber: Bappeda, 2020
*) Perda APBD 2021,
Tahun 2022 dan 2023 Hasil Proyeksi masih sangat sementara

3.3.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Selain pendapatan dan belanja daerah yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, pada bagian ini dibahas mengenai pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran cicilan utang dalam rangka pinjaman daerah dan provinsi.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh pinjaman daerah.
2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah.
3. Pemerintah daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dan lain-lain (untuk konteks obligasi daerah).
4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian.

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah.

Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diproyeksikan fluktuatif antar tahun. Sebagai tahun dasar perencanaan perubahan RPJMD, SiLPA tahun 2020 memiliki angka tertinggi dibandingkan 3 (tiga) tahun setelahnya. Tahun 2021 diproyeksikan SiLPA akan menurun signifikan dan kembali meningkat pada tahun 2022.

Selain hal tersebut dalam perencanaan pembiayaan daerah dilakukan melalui skema pinjaman daerah didasarkan kepada estimasi defisit APBD dan kemampuan fiskal daerah. Dimana analisa kemampuan fiskal daerah harus memperoleh rekomendasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

2. Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang antara lain berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan; dan memburuknya sistem keuangan, yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara dalam rangka perekonomian nasional.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan serta

Penyelamatan Ekonomi Nasional yang kemudian dilakukan perubahan dalam Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional untuk melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dimana pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan 179 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan Program PEN Pemerintah dapat melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah dan penjaminan. Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN dapat berupa investasi langsung dalam bentuk Pinjaman PEN Daerah.

Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap penurunan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk bencana luar biasa non-alam ini yaitu melakukan pinjaman PEN Daerah untuk menutupi penurunan pendapatan.

Pemanfaatan Pinjaman PEN Daerah menitikberatkan kepada pembangunan 4 (empat) infrastruktur utama dengan mengedepankan pola pemberdayaan masyarakat (padat karya), yaitu:

a. Infrastruktur lingkungan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jawa Barat dengan menjaga dan menjamin ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi pertanian khususnya tanaman pangan, serta pengendalian banjir melalui pembangunan dan

pengembangan jaringan irigasi, serta pembangunan instalasi pengolahan air limbah;

b. Infrastruktur perumahan dan pengembangan kawasan khusus yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkait ketersediaan ruang publik sebagai pusat interaksi dan aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, dan kreativitas masyarakat atau komunitas yang lebih baik dan memadai, serta untuk memenuhi sarana prasarana masyarakat kelompok miskin. Hal ini dilakukan melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), pembangunan alun-alun, pembangunan mesjid, pembangunan sarana olahraga, pembangunan *creative center*, dan pembangunan destinasi pariwisata;
c. Infrastruktur logistik yang ditujukan untuk percepatan pembangunan dan peningkatan ruas-ruas jalan dan jembatan di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk kemudahan akses dan konektivitas antarwilayah yang dapat memperlancar logistik (distribusi) perdagangan dan industri, termasuk mendukung perwujudan pengembangan kawasan Cirebon, Patimban, dan Kertajati, serta dukungan menuju akses-akses pusat produksi pangan dan pariwisata; dan
d. Infrastruktur sosial yang ditujukan untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat/tradisional yang ber-SNI, serta untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuka akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan pengadaan alat kesehatan yang lebih efektif dan memadai.

Nilai total rencana pinjaman PEN Daerah ini sebesar Rp3.745.570.358.165 dengan suku bunga 0 (nol) persen per tahun, *grace period* (masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran utang tanpa penghitungan denda bagi nasabah) 2 (dua) tahun, tenor 8 (delapan) tahun, provisi 1 (satu) persen dan pengelolaan 0,185 persen. Anggaran yang di danai oleh PEN daerah pada tahun 2020 dan 2021 dialokasikan terutama untuk sektor kesehatan (pembangunan rumah sakit dan pengadaan Alat kesehatan). Untuk Tahun Anggaran 2020 dari total pinjaman sebesar Rp1,532 triliun dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp1 triliun, sedangkan sisa anggaran digunakan mendanai infrastuktur jalan, pengairan, air limbah, perumahan rakyat, dan infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik. Rencana pinjaman PEN Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk

membiayai 105 kegiatan sedangkan pinjaman PEN Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai 95 kegiatan.

Selanjutnya, kebijakan Pengeluaran Daerah diarahkan pada pembentukan dana cadangan; dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Adapun pembayaran cicilan utang dalam rangka pinjaman daerah dan provisi sebesar 1 (satu) persen dialokasikan pada Belanja Barang dan Jasa di kelompok Belanja Operasi.

Pembiayaan Pinjaman ini memiliki jangka waktu pengembalian selama 8 (delapan) tahun (pinjaman jangka panjang). Kewajiban pembayaran kembali meliputi pokok pinjaman dan biaya provisi yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang berlaku. Berikut rencana pembayaran pengembalian PEN Daerah.

Tabel 3.19
Persentase Rencana Pengembalian Pinjaman PEN
Provinsi Jawa Barat

Pengembalian PEN	Tahun						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nilai Pengembalian (%)	6,82	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	9,85

Sumber: hasil analisis, 2020

Selain hal-hal di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali tearkhir dengan Peranturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangn-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024, maka diperlukan pendanaan pelaksanaan kegiatan tersebut. Apabila mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017

tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, bahwa pendanaan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 mencapai Rp1,71 triliun, maka pendanaan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada tahun 2024 diperkirakan akan mencapai Rp2 triliun. Tingginya kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada tersebut menjadi masalah yang harus segera dicarikan solusinya. Dana cadangan menjadi salah satu alternatif solusi yang dipertimbangkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Untuk itu, dalam struktur pendanaan daerah tahun 2022 dan tahun 2023, pada pengeluaran pembiayaan diproyeksikan dana cadangan masing-masing pada tahun 2022 sebesar Rp600 miliar dan pada tahun 2023 sebesar Rp900 miliar, yang nantinya akan dipergunakan pada tahun 2024 sebagai penerimaan pembiayaan.

Tabel 3.20
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Struktur APBD berdasarkan PP 58/2005

Kode Akun	Uraian	Realisasi		
		2018	2019	2020*)
6.	**PEMBIAYAAN**	**2.475.492.824.312**	**3.084.492.272.379**	**4.766.003.978.913**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**2.563.692.823.112**	**3.161.292.271.179**	**5.101.695.685.709**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	2.493.457.111.839	3.060.677.232.835	3.289.300.908.323
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			1.812.394.777.386
6.1.8	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	70.235.711.273	100.615.038.344	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**88.199.998.800**	**76.799.998.800**	**53.018.000.000**
6.2.2	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	88.199.998.800	76.799.998.800	53.018.000.000

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Barat, 2020
*) Pergub APBD TA 2020

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun ke belakang, maka dapat dihasilkan proyeksi/target tahun rencana dan perkiraan maju pada tahun 2022 dan tahun 2023. Rata-rata penerimaan pembiayaan diproyeksikan terjadi penurunan pada kurun waktu Tahun 2020-2023. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2021 terjadi penurunan SiLPA yang cukup signifikan dan direncanakan pinjaman daerah melalui skema PEN, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 penerimaan pembiayaan diproyeksikan hanya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pada perubahan tahun 2020 dan pada tahun 2021 telah dilakukan pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI). Pada tahun 2020, alokasi pinjaman daerah sebesar Rp1.532.607.660.148 sedangkan pada tahun 2021, diajukan pinjaman daerah sebesar Rp2.212.962.698.017. Adanya mekanisme pengajuan pinjaman daerah akan tercatat dalam proyeksi pembiayaan daerah. Tabel di bawah menyajikan realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.21
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

Struktur APBD berdasarkan PP 12/2019

Kode Akun	Uraian	Proyeksi			Rata-rata pertumbuhan
		2021	2022	2023	%
6	**PEMBIAYAAN**	**3.143.068.905.676**	**(65.048.356.687)**	**(1.018.535.133.673)**	**681,87**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**3.243.068.905.676**	**1.140.386.253.337**	**805.726.592.688**	**-47,09**
6.1.01	SiLPA	1.030.106.207.659	1.140.386.253.337	805.726.592.688	-9,32
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan				
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.212.962.698.017			
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah				
6.2	**Pengeluaran pembiayaan**	**100.000.000.000**	**1.205.434.610.025**	**1.824.261.726.361**	**578,39**
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo		255.434.610.025	624.261.726.361	
6.2.02	Penyertaan modal daerah	100.000.000.000	350.000.000.000	300.000.000.000	117,86
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan		600.000.000.000	900.000.000.000	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah				
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				

Sumber: Bappeda, 2020
*) Perda APBD 2021,
Tahun 2022 dan 2023 Hasil Proyeksi masih sangat sementara

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

1. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan kemudian dengan membandingkan dengan SiLPA pada tahun 2021 terlihat rata-rata bervariasi per tahunnya, dan pada tahun 2021 sampai tahun 2023, rata-rata pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 9,32 persen. Dengan melihat tren pertumbuhan selama dari tahun ke 2015 ke tahun 2021, SiLPA diproyeksikan berasal dari efisiensi pengadaan barang/jasa dan pelampauan target pendapatan.

Tabel 3.22
Proyeksi SiLPA Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tahun	SiLPA (Rp)
2015	3.484.246.614.428
2016	3.343.922.854.244
2017	2.493.457.111.839
2018	3.060.689.894.835
2019	3.289.300.908.323
2020	1.924.109.043.835
2021	1.030.106.207.659
2022	1.140.386.253.337*
2023	805.726.592.688*

Sumber: Hasil Analis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021 (diolah)
keterangan: *) Proyeksi sementara

Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3.23
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023

Tahun	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA)	
	Realisasi (Rp.)	Proyeksi (Rp.)
2018	2.493.457.111.839	
2019	3.060.677.232.835	
2020	3.289.300.908.323	
2021		1.030.106.207.659
2022		1.140.386.253.337
2023		805.726.592.688

Sumber: Hasil proyeksi, Tahun 2020

2. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi Tahun 2018 sampai dengan 2020 menggunakan data realisasi tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 serta pada tahun 2020 menggunakan data APBD Tahun 2020. Berdasarkan data tersebut nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Lebih rinci mengenai proyeksi tersebut ditunjukkan melalui tabel di bawah.

Tabel 3.24
Realisasi dan Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

No	Uraian	Realisasi		
		2018	2019	2020*)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**13.125.484.660.563**	**13.761.326.082.311**	**13.371.432.850.320**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.667.064.008.187	2.733.740.608.392	2.802.084.123.602
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.550.097.021.028	1.281.885.395.385	1.477.841.779.933
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	278.500.000.000	289.166.506.092	296.395.668.744
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.702.593.616	341.104.265.992	341.152.228.637
5	Gaji dan Tunjangan DPRD	67.013.932.000	73.528.605.300	73.576.567.945
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	25.200.000.000	26.460.000.00	26.475.750.000

No	Uraian	Realisasi		
		2018	2019	2020*)
7	Gaji dan Tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur	277.892.000	284.839.300	291.960.283
8	Belanja Penerimaan Lainnya Gubernur/ Wakil Gubernur	26.377.458.000	27.036.894.450	27.712.816.811
9	Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru	1.058.629.674.000	1.082.709.954.000	1.083.400.662.916
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	7.450.622.081.732	7.901.869.013.400	7.212.501.291.449
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-	30.000.000.000	30.000.000.000
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**88.199.998.800**	**76.799.998.800**	**53.018.000.000**
1	Penyertaan Modal	88.199.998.800	76.799.998.800	53.018.000.000
	Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama (a+b)	**13.213.684.659.363**	**13.838.126.081.111**	**13.424.450.850.320**

Sumber: Hasil proyeksi, 2020

*) Realiasi 2020 (Pendapatan belum merupakan hasil rekonsiliasi, Belanja merupakan nilai SP2D)

Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sampai 2023 memiliki nilai yang lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pengertian belanja wajib dan belanja mengikat yang berbeda pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Rincian komponen belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.25
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiyaan yang Wajib dan Mengikat
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	%	2022	%	2023	%
A	**Belanja Mengikat**	**6.857.125.031.176**		**7.028.553.156.955**		**7.104.266.985.879**	
1	Belanja Pegawai	6.857.125.031.176	15,4	7.028.553.156.955	16,37	7.104.266.985.879	16,39
2	Belanja Bunga						
B	**Belanja Wajib**	**12.883.811.092.000**		**13.165.966.554.915**		**13.454.301.222.468**	
1	Pendidikan	8.345.835.293.758	18,71	8.528.609.086.691	19,86	8.715.385.625.689	20,10
2	Kesehatan	1.674.340.269.768	3,75	1.711.008.321.676	3,98	1.748.479.403.921	4,03
3	Infrastruktur	2.555.898.939.295	5,73	2.611.873.126.066	6,08	2.669.073.147.526	6,16
4	Peningkatan Kapasitas SDM	201.181.295.974	0,45	205.587.166.356	0,48	210.089.525.299	0,48
5	Penguatan APIP	106.555.293.206	0,24	108.888.854.127	0,25	111.273.520.033	0,26
C	**Pengeluaran Pembiayaan**	**100.000.000.000**		**1.155.434.610.025**		**1.824.261.726.361**	
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo			255.434.610.025	0,59	624.261.726.361	1,44
2	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000		300.000.000.000	0,70	300.000.000.000	0,69
3	Pembentukan Dana Cadangan	-		600.000.000.000	1,40	900.000.000.000	2,08
4	Pemberian Pinjaman Daerah						
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.						
	Total Belanja Wajib Mengikat	**19.840.936.123.176**		**21.349.954.321.895**		**22.382.829.934.708**	

Sumber: Hasil proyeksi, Tahun 2020

3. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta Belanja Tidak Langsung (BTL) dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2018-2020 untuk mendanai pembangunan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis, total penerimaan meningkat dari Rp36.482.714.855.459 pada realisasi tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp39.649.510.809.606 pada tahun 2020. Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja tidak langsung, maka diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.26
Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2020

Uraian	Realisasi		
	2018	2019	2020*)
Pendapatan	**33.919.022.032.348**	**36.037.894.762.461**	**34.777.470.830.693**
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	2.493.457.111.839	3.060.677.232.835	3.289.300.908.323
Penerimaan Pinjaman Daerah			1.532.607.660.148
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	70.235.711.273	100.615.038.344	50.131.410.442
Total penerimaan	**36.482.714.855.459**	**39.199.187.033.640**	**39.649.510.809.606**
Dikurangi:			
Pengeluaran Pembiayaan	88.199.998.800	76.799.998.800	53.018.000.000
Belanja Tidak Langsung	25.620.293.293.038	28.033.579.142.382	31.074.644.696.112
Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	**10.774.221.563.621**	**11.088.807.892.458**	**8.521.848.113.494**

Sumber: Hasil proyeksi, Tahun 2020
*) Realisasi 2020 (Pendapatan belum merupakan hasil rekonsiliasi, Belanja merupakan nilai SP2D)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menyebabkan pengertian belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak digunakan lagi dan diganti dengan a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer. Hal ini menyebabkan konsep kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tidak sesuai lagi digunakan dengan adanya perubahan Belanja Daerah. Dengan kondisi tersebut maka proyeksi belanja Tahun 2021 sampai dengan 2023 disusun

sesuai konsep dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow programme*) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun prioritas anggaran untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sampai dengan 2020, sebagai berikut:

a. **Prioritas I,** dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat,
b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada Prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur juga termasuk hal tersebut;
c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Realisasi dan rencana penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan daerah ditunjukan pada tabel di bawah.

Tabel 3.27
Realisasi dan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2020

Uraian	Realisasi	Proyeksi
	2019	2020*
Kapasitas riil keuangan daerah:	**11.088.807.892.458**	**8.521.848.113.494**
Prioritas I	3.013.343.621.855	3.442.108.234.986
Prioritas II	5.315.613.412.759	2.958.769.792.766
Prioritas III	2.759.850.857.844	2.120.970.085.742

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2020

Rencana penggunaan kapasitas keuangan daerah Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana penggunaan kapasitas keuangan tetap akan dialokasikan kepada prioritas pembangunan daerah Tahun 2021-2023 dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagai berikut:

a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:
   1) Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
   2) Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
   3) Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
   4) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
   5) Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
   6) Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
   7) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
   8) Gerakan Membangun Desa;
   9) Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
   10) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
   11) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

b. **Prioritas II,** dialokasikan untuk pemenuhan janji Gubernur dan Wakil Gubernur dan urusan wajib yang tidak termasuk dalam 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.

Lebih rinci mengenai alokasi masing-masing prioritas disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.28
Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021–2023

Uraian	Proyeksi		
	2021	2022	2023
Kapasitas Keuangan Daerah:	**44.715.065.661.799**	**43.332.139.631.159**	**44.189.494.223.153**
Prioritas I	27.274.256.706.995	29.303.607.432.487	29.624.358.999.387
Prioritas II	17.440.808.954.804	14.028.532.198.672	14.565.135.223.766

Sumber: Hasil proyeksi, Tahun 2020

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Provinsi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pokok pembangunan adalah; (1) Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial; (2) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; (3) Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur; (4) Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan; (5) Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan (6) Masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan pokok pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memproritaskan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penanganan kemiskinan dan masalah sosial
    1. Optimalisasi jaminan sosial daerah
    2. Peningkatan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin
    3. Peningkatan Kebutuhan Hidup Layak melalui perbaikan Rutilahu, Pembangunan sanitasi dan air bersih, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat miskin, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Revitalisasi panti sosial serta optimalisasi pelayanan panti sosial milik provinsi;
    4. Penguatan sistem informasi pendataan dan pengaduan penyandang disabilitas dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antardaerah.
b. Peningkatan Sumber Daya Manusia
    1. Peningkatan akses pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru, unit sekolah baru, dan sekolah terintegrasi.

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta sarana prasana pendidikan;
3. Peningkatan efektivitas Bantuan pendidikan (BOS-PIP-LPDP);
4. Penguatan program vokasi melalui kerjasama dan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri;
5. Pemerataan dan penguatan jaringan internet di daerah;
6. Pembangunan sistem informasi berupa portal untuk dukungan Pendidikan Jarak Jauh;
7. Bantuan peralatan bagi guru dan siswa tidak mampu;
8. Digitalisasi metoda dan kurikulum pendidikan,
9. Pelatihan bagi guru dalam hal penggunaan digitalisasi pendidikan;
10. Peningkatan akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan.

c. Optimalisasi pelayanan infrastruktur
   1. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur melalui KPBU dan sumber pendanaan lainnya.
   2. Pembangunan dan revitalisasi jalan provinsi dengan tingkat kemantapan dan konektivitas yang tinggi, melalui pembangunan/ perbaikan jalan provinsi,
   3. Akselerasi pembangunan jalan tol dengan koordinasi multi pemangku kepentingan;
   4. Pembangunan dan peningkatan jalan di perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten/kota;
   5. Pembangunan jalan alternatif, jalan khusus maupun jalan lingkar di kabupaten/kota;
   6. Pembangunan/Peningkatan jalan baik horizontal maupun vertikal di Provinsi Jawa Barat bagian selatan, penyelesaian ketimpangan jalur tengah selatan, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah jalur tengah utara dan tengah selatan, dan infrastruktur yang menghubungkan pusat ekonomi;
   7. Dukungan Pembangunan transportasi berbasis rel dan transportasi massal berbasis jalan di 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Bodebek, Bandung Raya (jalur Cipatat ke Padalarang) dan Cirebon.
   8. Dukungan pembangunan dan pengembangan bandar udara di Provinsi Jawa Barat yaitu BIJB Kertajati di Majalengka, Bandara Nusawiru di Pangandaran.

9. Pembangunan dan rehabilitasi terminal tipe B, penyediaan fasilitas lalu lintas, pemantauan lalu lintas, dan sistem pengendalian transportasi

d. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

1. Penyelamatan tenaga kerja di berbagai sektor usaha dan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, dengan fokus kepada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha, relaksasi pembiayaan usaha, mempermudah dan mempromosikan investasi serta mendorong sektor – sektor ekonomi untuk berusaha dengan menerapkan protokol kesehatan.
2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan kompetensi, migran ataupun mandiri;
3. Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja dengan skema kolaborasi;
4. Pengembangan infrastruktur melalui KPBU, dan sumber pendanaan lainnya;
5. Peningkatan daya beli masyarakat terutama kalangan menengah dan atas, pemulihan kepercayaan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perijinan di daerah, dan government spending pada proyek-proyek padat karya, peningkatan ekspor, peningkatan kapasitas kewirausahaan terutama bagi korban PHK, serta transformasi digital pemasaran produk UMKM.
6. Menghidupkan kembali industri Jawa Barat yang bersifat strategis dan padat karya;
7. Mengakselerasi perwujudan kawasan industri terpadu dalam konteks pengembangan industri 4.0;
8. Meningkatkan implementasi pola kemitraan antara industri besar dengan IKM sebagai salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan bahan baku impor dan penciptaan lapangan kerja baru;
9. Meningkatkan dukungan kelancaran distribusi hasil produksi melalui aksesibilitas, pengawasan dan pengendalian transportasi sarana dan prasarana logistik, serta pusat distribusi provinsi.
10. Mendukung penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sektor industri dan perrdagangan, memfasilitasi sarana dan prasarana logistik penanganan pandemi COVID-19.

11. Fasilitasi proyek-proyek investasi yang terhambat pelaksanaannya melalui Investor Relation Officer (IRO);
12. Pengembangan ekonomi berbasis pesantren. Pengembangan ekonomi dan Peningkatan skala usaha berbasis pesantren
13. Fasilitasi pengembangan pasar rakyat
14. Pemanfataan teknologi pemasaran digital oleh Koperasi (Digitalisasi Koperasi)

e. Penanganan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
   1. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di DAS Citarum yang direplikasi untuk penanganan DAS Ciliwung, DAS Cilamaya serta Sub DAS Cileungsi dan Sub DAS Cikeas serta DAS lainnya;
   2. Penanganan lahan kritis, air limbah domestik, persampahan, limbah industri, limbah peternakan, limbah perikanan, pengelolaan sumber daya air, edukasi dan penegakan hukum;
   3. Pengembangan kawasan pengolahan persampahan tuntas dan berwawasan lingkungan, diantaranya melalui pembangunan bank sampah, biodigester, penerapan insinerator, pengembangan kelembagaan pengelola sampah dalam skala kelurahan/desa, dan peningkatan peran pemerintah, masyarakat, dan swasta dengan memperhatikan 5 aspek penting pengelolaan sampah yaitu regulasi, institusi, anggaran, teknologi, operasional, dan pasrtisipasi masyarakat dalam reduksi sampah dari sumbernya, serta penuntasan pembangunan TPPAS Legok Nangka dan TPPAS Lulut-Nambo.
   4. Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan kritis, yaitu dengan penanaman dan pemeliharaan pohon secara berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat melalui Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP).

f. Kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik
   1. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Digitalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Aplikasi secara optimal, seperti: Inovasi Penanganan COVID-19, Mall Pelayanan Publik (MPP), kolaborasi pelayanan publik dengan pemanfaatan e-commerce dan fintech.

2. Optimalisasi sumber daya, anggaran, teknologi informasi, serta jejaring kerja yang mendukung inovasi.
3. Optimalisasi unit kerja untuk melahirkan terobosan dalam rangka penyederhanaan proses bisnis pelayanan publik.
4. Pemanfaatan pengelolaan kanal informasi yang ada untuk diseminasi informasi pelayanan publik dan media partisipasi aktif masyarakat.

Masalah pokok tersebut dipicu oleh berbagai permasalahan yang dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek, sebagai berikut:

4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat dan Berkontraksi Akibat Pandemi COVID-19

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi, dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu -2,44 persen. Meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 5,66 persen, namun pada tahun 2019 LPE Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 5,07 persen, namun demikian realisasi tahun 2020 ini masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa sebesar -2,51 persen. Kontraksi ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh pandemi COVID-19.

Secara nasional, LPE Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari peringkat ke 18 dari 34 provinsi pada tahun 2017 ke urutan 21 dari 34 provinsi pada tahun 2019, meski sempat mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu urutan 17 dari 34 provinsi. Masih terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, yaitu: (1) Kabupaten Indramayu, (2) Kabupaten Karawang, (3) Kabupaten Bekasi, (4) Kabupaten Subang, (5) Kabupaten Purwakarta, (6) Kabupaten Cirebon, (7) Kabupaten Garut, (8) Kabupaten Bandung Barat dan (9) Kota Banjar. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberdayakan rakyat, perlu adanya kebijakan yang terpadu.

Perekonomian Provinsi Jawa Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020

mencapai Rp2.088,04 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp41,8 juta. Ekonomi Jawa Barat tahun 2020 terkontraksi 2,44 persen menurun dibanding tahun 2019 sebesar 5,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terendah dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar -18,38 persen. Adapun dari sisi Pengeluaran Komponen Perubahan Inventori mengalami pertumbuhan terendah yaitu sebesar -62,35 persen.

Ekonomi Provinsi Jawa Barat Triwulan IV-2020 bila dibandingkan triwulan IV-2019 terkontraksi sebesar 2,39 persen, menurun bila dibandingkan dengan triwulan IV-2019 yang tumbuh sebesar 4,12 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terendah dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar -17,78 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terendah terjadi pada Komponen Perubahan Inventori sebesar -122,92 persen.

Ekonomi Provinsi Jawa Barat Triwulan IV-2020 tumbuh sebesar 0,22 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 15,84 persen. Adapun dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 45,96 persen.

Sumber laju pertumbuhan (*Source of Growth*, SOG) tahun 2020 dari sisi lapangan usaha yang memberikan andil pertumbuhan terbesar adalah Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 1,48 persen. Dari sisi pengeluaran, andil negatif terbesar terhadap pertumbuhan adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar -2,05 persen.

2. Pengendalian Inflasi Belum Optimal dan Cenderung Deflasi Akibat Pandemi COVID-19

Selama 5 (lima) tahun terakhir, inflasi Provinsi Jawa Barat menunjukkan fluktuasi. Semula berada di angka 2,75 persen pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2017 menjadi 3,63 persen, namun turun menjadi 3,54 persen di tahun 2018, dan 3,21 persen di tahun 2019, serta 2,18 persen di tahun 2020. Walaupun inflasi dapat dikendalikan sampai 2,18 persen, namun bila dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,68 persen, maka Provinsi Jawa Barat berada pada posisi lebih tinggi. Sumbangan inflasi terbesar di Provinsi Jawa Barat berasal dari 2 (dua) kota, yaitu Kota Bekasi sebesar 2,81 persen dan Kota Bogor sebesar

2,18 persen. Komponen penyebab inflasi Provinsi Jawa Barat tak bisa dilepaskan dari komponen emas perhiasan dan cabe merah.

Pada Juli 2020 Provinsi Jawa Barat mengalami deflasi sebesar 0,07 persen sedangkan nasional mengalami deflasi sebesar 0,10 persen. Ini berarti deflasi Provinsi Jawa Barat sedikit di atas dari nasional. Laju inflasi tahun kalender "*year to date*" (Januari – Juli 2020) sebesar 1,38 persen dan laju inflasi dari tahun ke tahun (Juli 2020 terhadap Juli 2019) tercatat sebesar 2,21 persen.

3. Permasalahan Pelayanan Kesehatan saat Pandemi COVID-19

Beberapa permasalahan pelayanan Kesehatan terganggu pada saat pandemi COVID-19, diantaranya:

a) Angka *stunting* diperkirakan bertambah setelah pandemic COVID-19, hal tersebut diakibatkan oleh sosialisasi pencegahan masalah *stunting* terganggu. Sosialisasi tersebut biasanya dilakukan dalam kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
b) Menurut hasil survei Kementerian Kesehatan Bersama UNICEF dan pemerhati imuniasasi anak didapatkan fakta bahwa layanan imunisasi 83,9 persen terganggu karena pandemic COVID-19.

4. Distribusi Pendapatan Penduduk Belum Merata

Indeks gini Provinsi Jawa Barat masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,3 poin sampai 0,5 poin. Pada tahun 2015, indeks gini Provinsi Jawa Barat sebesar 0,426 poin dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 0,393 poin. Selanjutnya, meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 0,405 poin, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 0,398 poin. Bila dibandingkan dengan nasional, indeks gini Provinsi Jawa Barat memiliki angka lebih tinggi. Indeks gini nasional pada tahun 2018 sebesar 0,384 poin.

Bila dibandingkan dengan provinsi lain se-Indonesia, maka posisi indeks gini Provinsi Jawa Barat tahun 2019 berada pada posisi 32 dari 34 provinsi. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat cukup besar dibandingkan daerah lain dan membutuhkan berbagai kebijakan untuk mengejar pemerataan. Demikian pula bila dibandingkan dengan nasional, maka ketimpangan pendapatan di Provinsi

Jawa Barat masih sedikit lebih tinggi dibandingkan ketimpangan pendapatan nasional.

Sejak kemunculan pandemi COVID-19, aktivitas perekonomian di seluruh dunia mengalami penurunan, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan penurunan konsumsi rumah tangga. Penurunan aktivitas ekonomi tersebut memukul masyarakat kelas bawah lebih besar daripada kelas menengah dan atas. Hal ini mengakibatkan ketimpangan meningkat. Permasalahan pandemi COVID-19 secara global mempengaruhi kinerja pembangunan di tingkat nasional maupun daerah baik pada pada sektor sosial, ekonomi maupun penyediaan sarana prasarana infrastruktur.

Pada Maret 2019 indeks gini Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan menjadi 0,402 poin dan menurun lagi pada September 2019 menjadi 0,398 poin. Namun pada Maret 2020, indeks gini naik kembali menjadi 0,403 poin, menurun pada bulan September 2020 menjadi 0,398 poin. Sementara itu berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini di daerah perkotaan Provinsi Jawa Barat pada September 2020 tercatat sebesar 0,409 poin. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi September 2019. Untuk daerah perdesaan, indeks gini bulan September 2020 tercatat sebesar 0,326 poin. Angka ini juga mengalami peningkatan sebesar 0,008 poin dibandingkan pada kondisi September 2019 yang mencapai 0,318 poin.

5. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal dan Angka Kemiskinan Cenderung Meningkat Akibat Pandemi COVID-19

Pada periode Tahun 2016 sampai 2020, Provinsi Jawa Barat berhasil menurunkan dari 8,95 persen ke 8,43 persen. Upaya penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat belum cukup optimal bila dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Namun kondisi ini berubah pada saat mulai terjadi pandemi COVID-19 pada Triwulan I-2020. Dalam beberapa bulan sejak pertama kali terjadi pandemi, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat cenderung meningkat, yang menyebabkan persentase penduduk miskin juga meningkat.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat September 2020 mencapai 4,19 juta jiwa (8,43 persen). Terjadi

peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 270 ribu jiwa dibandingkan keadaan Maret 2020. Jika dibandingkan dengan keadaan September tahun sebelumnya, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan sekitar 810 ribu jiwa. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2020 – September 2020 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 280 ribu jiwa dan di perdesaan berkurang sebanyak 10 ribu jiwa. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,14 persen menjadi 7,79 persen. Sedangkan yang di perdesaan naik dari 10,27 persen menjadi 10,64 persen.

6. Penanganan Pengangguran Belum Optimal dan Angka Pengangguran Cenderung Meningkat Akibat Pandemi COVID-19

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat menunjukkan fluktuasi dimana pada tahun 2016 TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 8,89 persen. Namun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami penurunan hingga menjadi 7,99 persen, dan pada tahun 2020 sebesar 10,46 persen.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada Agustus 2020 sebanyak 2,53 juta jiwa. Dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2019 pengangguran meningkat 600 ribu orang, yaitu dari 1,93 juta orang menjadi 2,53 juta orang.

7. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia

Mengingat sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu modal pembangunan, maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitasnya pun sangat dibutuhkan. Provinsi Jawa Barat memanfaatkan kondisi jumlah penduduk yang besar menjadi potensi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar 72,09 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 72,03 pada tahun 2019. Dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, Kota Bandung sebesar 81,51, Kota Bekasi sebesar 81,50, dan Kota Depok sebesar 80,97 memiliki status IPM “Sangat Tinggi”, sedangkan 24 kabupaten/kota lainnya berstatus “Sedang” dan “Tinggi”. Terjadi penurunan IPM tahun 2020 di 14 (empat belas) kabupaten/kota, sedangkan 13 (tiga belas) kabupaten/kota lainnya mengalami peningkatan.

Pada tahun 2020 kualitas hidup penduduk Provinsi Jawa Barat secara umum terus bergerak positif. Hal ini terlihat pada pencapaian IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 72,09, artinya mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin dari pencapaian tahun 2019.

8. Harapan Lama Sekolah Belum Optimal

Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Jawa Barat masih berada di bawah HLS Indonesia (12,98 tahun). Artinya peluang anak-anak usia 7 (tujuh) tahun ke atas di Provinsi Jawa Barat untuk menamatkan pendidikan masih lebih rendah dibandingkan peluang rata-rata anak usia 7 (tujuh) tahun di Indonesia.

Selama periode 2016 hingga 2020, HLS di Provinsi Jawa Barat telah meningkat sebesar 0,20 tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, HLS secara rata-rata tumbuh sebesar 0,57 persen per tahun. Meningkatnya HLS menunjukkan peningkatan tahun bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 (tujuh) tahun di masa mendatang. Pada tahun 2020, HLS di Provinsi Jawa Barat telah mencapai 12,50 tahun yang berarti anak-anak usia 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau hingga menempuh jenjang D1.

9. Rata-Rata Lama Sekolah Belum Optimal

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Jawa Barat tumbuh 1,46 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas SDM Provinsi Jawa Barat yang lebih baik. Pada tahun 2020, secara rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 8,55 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (atau setara SMP kelas 2). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan atau mekanisme pendidikan di Provinsi Jawa Barat masih belum efektif meningkatkan RLS penduduk Provinsi Jawa Barat.

10. Derajat Kesehatan Masyarakat Masih Kurang

Indikator tingkat derajat kesehatan masyarakat, sangat dipengaruhi oleh kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Capaian derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari beberapa indikator, diantaranya:

a) Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Capaian AKI di Provinsi Jawa Barat masih dianggap tinggi. Ratio Kematian Ibu pada tahun 2020 sebesar 85,77/100.000 KH. Hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk dapat mengatasi peningkatan kasus AKI tersebut.

Rasio AKB di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar 3,18/ 1000 KH.

b) Gizi Masyarakat

Masyarakat Provinsi Jawa Barat masih menghadapi permasalahan gizi yang membutuhkan perhatian serius berbagai pihak khususnya permasalahan *stunting* yaitu kondisi dimana balita gagal tumbuh disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. *Stunting* memberikan hambatan pada perkembangan otak, kecerdasan, kemampuan belajar dan rendahnya produktivitas serta bersifat permanen sehingga akan mengurangi kualitas SDM Provinsi Jawa Barat ke depannya. Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi *stunting* Provinsi Jawa Barat sebesar 26,21 persen pada tahun 2020.

c) Penyakit Menular dan Tidak Menular

Provinsi Jawa Barat dihadapkan pada masalah kesehatan yang lain, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Beberapa penyakit menular yang diwaspadai meningkat yaitu, Tuberkolusis (TB) dan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Persentase Keberhasilan Pengobatan TB pada tahun 2020 sebesar 73,16 persen. Persentase Pasien HIV Yang Diobati pada tahun 2020 sebesar 42 persen.

Penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang harus diwaspadai, antara lain penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, keracunan makanan, campak, *difteri* dan rabies. Kecenderungan penyakit tidak menular juga terus meningkat dan menjadi penyebab tingginya angka kematian serta meningkatnya biaya perawatan yang menyebabkan beban berat pada BPJS dan Rumah Sakit. Beberapa penyakit tidak menular yang terus meningkat jumlah penderitanya, antara lain penyakit hipertensi, *diabetes mellitus*, *cancer*, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) dan *cardio vasculer* (jantung). Penyakit tidak menular yang menjadi standar pelayanan minimal adalah hipertensi, *diabetes melitus*, dan kesehatan jiwa. Selain itu, dalam 5 (lima) tahun

terakhir permasalahan kesehatan jiwa cenderung meningkat dan memerlukan peningkatan upaya pelayanan kesehatan jiwa untuk mengatasinya

Kondisi permasalahan penyakit menular di Provinsi Jawa Barat semakin diperburuk dengan terjadinya pandemi COVID-19. Penyebaran Virus COVID-19 di masyarakat terjadi melalui *droplet* dari orang yang terinfeksi. Penularan virus melalui *droplet* ini menyebabkan peningkatan jumlah kasus COVID-19, sehingga membutuhkan pengendalian yang cukup ketat.

d) Belum Optimalnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Akses penduduk terhadap sarana kesehatan di Provinsi Jawa Barat masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya persentase rumah sakit dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 80 persen. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai 80 persen rumah sakit dengan pencapaian SPM pada tahun 2020 sebesar 33 persen.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yaitu terkait sumber daya kesehatan. Jawa Barat masih dihadapkan dengan masalah kurangnya jumlah tenaga dokter, tenaga kesehatan tertentu seperti tenaga apoteker, analis kesehatan, *nutrisionis*, *sanitarian*, promkes, dan tenaga non kesehatan seperti tenaga akuntansi di puskesmas/FKTP.

Lebih lanjut, terkait dengan Pandemi COVID-19 yang muncul di awal tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat memerlukan peningkatan manajemen pendistribusian obat dan Alat Pelindung Diri (APD) secara maksimal. Selain itu perlu optimalisasi upaya Pemerintah Daerah Provinsi untuk menyediakan *test swab* di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

11. Menurunnya Kontribusi Sektor Utama PDRB

PDRB sebagai indikator pembangunan ekonomi suatu daerah tentunya terdiri dari beberapa sektor/lapangan usaha yang membentuknya, begitu pula PDRB Provinsi Jawa Barat yang dibentuk oleh 17 (tujuh belas) sektor/lapangan usaha. Pada kurun waktu Tahun 2016 hingga 2020 kontribusi sektor-sektor utama pembentuk PDRB Provinsi Jawa Barat cenderung menurun dan fluktuatif. Pada tahun 2020, kontributor terbesar dalam perekonomian berdasarkan PDRB lapangan usaha adalah Industri

Pengolahan sebesar 41,19 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,55 persen, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,20 persen.

Industri pengolahan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2016 tercatat kontribusinya sebesar 42,49 persen, menurun pada tahun 2017 menjadi sebesar 42,24 persen, tahun 2018 sebesar 42,16 persen, tahun 2019 sebesar 41,62 persen, dan terus menurun hingga pada tahun 2020 kontribusinya mencapai 41,19 persen.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga merupakan sektor utama pembentuk PDRB Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2016 kontribusi dari sektor ini tercatat sebesar 15,15 persen, kemudian menurun pada tahun 2017 dengan kontribusi sebesar15,08 persen, tahun 2018 kembali menurun pada angka 14,88 persen, hingga pada tahun 2019 mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB sebesar 15,24 persen, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,55 persen.

Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat juga tidak luput dari kondisi yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari angka kontribusi pertanian pada PDRB tahun 2016 sebesar 8,90 persen menurun pada tahun 2017 menjadi sebesar 8,55 persen, lalu meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 8,68 persen, kemudian kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 8,78 persen dan pada tahun 2020 sebesar 9,20 persen.

4.1.2 Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

Masalah pokok pendidikan di Provinsi Jawa Barat antara lain: (1) Belum meratanya akses pendidikan; (2) Belum optimalnya mutu pendidikan; (3) Belum optimalnya tata kelola pendidikan; (4) Belum *link and match* antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; dan (5) Masih rendahnya minat baca masyarakat. Kelima masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah sebagai berikut:

a. Belum meratanya distribusi guru antardaerah;
b. Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi;

c. Menurunnya Angka Partisipasi Sekolah untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar/*Madrasah Ibtidayah* (SD/MI);
d. Menurunnya Angka Kelulusan untuk jenjang SD/MI;
e. Masih rendahnya angka melanjutkan pendidikan untuk jenjang SD/MI dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/*Madrasah Aliyah* (SMA/SMK/MA);
f. Masih rendahnya jumlah SMA/SMK Sederajat Akreditasi A;
g. Cenderung menurunnya jumlah guru SMA dan SMK yang memiliki kualifiksi S2;
h. Belum sinergisnya pembagian tata kelola pendidikan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan kewenangan;
i. Partisipasi pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi masih rendah;
j. Program dan kegiatan masih belum menyasar peningkatan mutu dan daya saing pendidikan;
k. Belum sepenuhnya terwujud kesesuaian antara jurusan/program studi pada SMK di suatu daerah dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di daerah tersebut;
l. Sarana dan prasarana belajar pendidikan khusus belum memenuhi standar dan belum didayagunakan secara optimal;
m. Menurunnya partisipasi pendidikan khusus pada jenjang menengah;
n. Masih terdapat daerah/lokasi yang belum memiliki akses internet sehingga menghambat proses belajar mengajar secara daring pada masa pandemi COVID-19.
o. Masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya;
p. Belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling; dan
q. Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah untuk bekerja sama dengan komunitas literasi seperti forum perpustakaan desa/kelurahan atau forum perpustakaan taman bacaan masyarakat.

Indikator kinerja urusan pendidikan yang mengalami fluktuatif cenderung menurun selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Menengah Atas dan Kualifiaksi S2 Guru SMK yaitu pada angka 20 dan 8,43 di tahun 2015 sedangkan di tahun 2019 cenderung menurun menjadi 19 dan 6,69. Sementara itu, indikator yang mengalami fluktuatif cenderung meningkat adalah Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA), Angka Kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA), dan Kualifiaksi S2 Guru SMA, dimana tahun 2015 berada pada angka 1,45; 98,7; dan 11,54 sedangkan di tahun 2019 cenderung meningkat berada pada angka 0,30; 98,78; dan 13,70. Selanjutnya, Persentase Angka Melanjutkan dari jenjang SMA/MA/SMK ke Perguruan Tinggi pada angka 20,50 ditahun 2015 meningkat terus menjadi 40,57 di tahun 2018.

2. Bidang Kesehatan

Permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Provinsi Jawa Barat meliputi:

a. Masih banyaknya jumlah kematian ibu dan bayi;
b. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular;
c. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat;
d. Masalah gizi masyarakat;
e. Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan;
f. Menurunnya persentase Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terisi dokter spesialis penunjang sesuai standar;
g. Menurunnya persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI >90%; dan
h. Pendistribusian tenaga kesehatan yang belum merata.

Permasalahan pembangunan pada bidang kesehatan sebagaimana dituliskan di atas juga diwarnai dengan penurunan beberapa indikator seperti Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan Cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan. Selain penurunan pada 2 (dua) sektor tersebut, terjadi peningkatan pada kinerja terkait dengan penurunan Angka kematian bayi, peningkatan rasio puskesmas dan penduduk, penggunaan jamban sehat, dan peningkatan jumlah penduduk dengan jaminan kesehatan.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Jawa Barat diuraikan sebagai berikut:

a. Permasalahan penataan ruang ditinjau dari penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
   1) Pengaturan tata ruang wilayah dan kawasan dalam skala regional belum menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional dan dinamika pembangunan di provinsi maupun kabupaten/kota. Perubahan kebijakan yang perlu disikapi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang adalah penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
   2) Pembinaan tata ruang kepada perangkat daerah terkait penataan ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan masyarakat belum dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien.
   3) Pelaksanaan tata ruang melalui:
      a) Perencanaan tata ruang, dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota. Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 yang disusun berdasarkan Peninjauan Kembali pada tahun 2015, hingga tahun 2020 belum mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian terkait, sedangkan ketersediaan RDTR Kabupaten/Kota yang seharusnya digunakan sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang belum dimiliki oleh seluruh kabupaten/kota. Kebijakan nasional telah menghapus Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga tidak perlu lagi menetapkan pengaturan kawasan tersebut dalam peraturan daerah.
      b) pemanfaatan ruang, dilaksanakan melalui perwujudan indikasi program RTRW dalam rencana pembangunan, namun RTRW belum menjadi acuan/pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan atau pelaksanaan pembangunan oleh seluruh pemangku kepentingan.

c) pengendalian pemanfaatan ruang, dilaksanakan melalui pelayanan pemberian rekomendasi Gubernur tentang kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW yang memiliki skala dampak besar, namun belum dilengkapi dengan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang (acuan tertib ruang). Kebijakan nasional tentang Cipta Kerja telah mengubah pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi dilengkapi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

4) Pengawasan tata ruang dilaksanakan melalui perangkat daerah dan pranata yang belum memadai, karena fungsi belum didukung dengan kelembagaan yang kuat dalam menangani pelanggaran tata ruang. Pelaksanaan pengawasan penataan ruang belum secara menyeluruh mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dan peran pihak-pihak yang berwenang termasuk peran masayarakat belum ditetapkan dalam satu kerangka pikir yang sama.

5) Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan fasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota merupakan amanat baru yang belum ditindaklanjuti dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan. Kerja sama antarprovinsi yang sudah dilaksanakan belum fokus pada penanganan isu penataan ruang.

b. Beberapa perangkat pengendalian pemanfataan ruang sebagai acuan pelaksanaan tertib tata ruang dan pengawasan penataan ruang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di lingkup Provinsi Jawa Barat. Perangkat pengendalian dimaksud, meliputi peraturan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. Selain itu pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang belum dilaksanakan secara menyeluruh mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

c. Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik pada beberapa tahun lalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Sempat mencapai 74,01 persen pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 69,53 persen.

d. Kinerja Sistem Irigasi kewenangan provinsi masih belum optimal, terlihat dalam pencapaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) yang mencapai 52,31 persen di tahun 2019 dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 53,38 persen. Kurang optimalnya kinerja sistem irigasi disebabkan antara lain oleh jaringan irigasi yang banyak dalam kondisi rusak berat dan ringan, sebagai dampak dari umur jaringan irigasi yang sudah terlalu tua dan kerusakan yang diakibatkan karena tinggi dan rentannya kejadian bencana alam di Provinsi Jawa Barat.

e. Tingginya frekuensi kejadian banjir yang salah satunya disebabkan rendahnya kapasitas daya tampung sungai, situ dan sumber air lainnya serta lamanya proses pembangunan infrastruktur sumber daya air lainnya.

f. Cakupan pelayanan air minum belum optimal dan masih perlu ditingkatkan dengan melihat target *Universal Access/ SDGs*. Cakupan pelayanan air minum baru mencapai 79,59 persen di tahun 2020, sesuai dengan rumusan perhitungan akses layak dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Ke depan, cara perhitungan akses air minum akan disesuaikan dengan definisi operasional dalam perhitungan *baseline* dan target air minum yang sudah dibuat menjadi dasar perhitungan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dimana untuk Provinsi Jawa Barat, target pembangunan Bidang Air Minum adalah pada tahun 2024, akses air minum layak adalah 100 persen, di dalamnya terdapat akses air minum perpipaan 19 persen dan bukan jaringan perpipaan sebesar 91 persen. Akar masalah terkait masalah cakupan pelayanan air minum, antara lain:

   1) Kualitas air baku rendah dan kuantitas air baku berfluktuasi di beberapa tempat;
   2) Sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal;
   3) Kinerja kelembagaan belum menerapkan prinsip *good governance* sehingga pengelolaan sistem tidak optimal, baik di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun pada lembaga pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola masyarakat;

4) Keterbatasan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum; dan
5) Belum semua Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kebijakan dan rencana pemenuhan kebutuhan air minum.

g. Cakupan pelayanan air limbah domestik (sanitasi) belum optimal dan masih perlu ditingkatkan dengan melihat target *Universal Access/SDGs.* Cakupan pelayanan air limbah domestik baru mencapai 73,31 persen di tahun 2020. Akar masalah dari cakupan pelayanan air limbah domestik yang belum optimal, yaitu:
1) Masih tingginya angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
2) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama menyangkut limbah;
3) Rendahnya komitmen kepala daerah terhadap pentingnya mendidik masyarakat untuk ber-PHBS;
4) Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah sistem setempat maupun sistem terpusat;
5) Masih terbatasnya regulasi pengelolaan air limbah domestik di tingkat kabupaten/kota;
6) Belum ada unit kerja khusus untuk pengelolaan air limbah domestik;
7) Masih rendahnya tingkat pelayanan air limbah domestik sistem terpusat; dan
8) Terbatasnya pendanaan di tingkat kabupaten/kota untuk pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah domestik.

h. Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan mencapai 81,54 persen di tahun 2020, namun angka ini masih belum optimal karena persentase kondisi baik lebih sendikit dari pada kondisi sedang, sehingga masih membutuhkan peningkatan kondisi jalan. Bila ditelaah lebih dalam, maka akar masalah dari kondisi jalan yang belum optimal, antara lain:
1) Jaringan jalan belum merata karena adanya ketimpangan kawasan jalur Utara, Tengah dan Selatan, sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas;
2) Umur teknis layanan jalan sudah terlampaui; dan
3) Terdepresiasi oleh bencana alam, dan *overload* MST.

i. Cakupan pelayanan persampahan masih belum optimal dimana untuk cakupan penanganan persampahan mencapai 69,69 persen pada tahun 2020, sedangkan cakupan pengurangan persampahan mencapai 6,52 persen di tahun 2020, sesuai dengan rumusan perhitungan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Akar masalah terkait belum optimalnya pelayanan persampahan, antara lain:
   1) Perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan serta belum ada kesadaran dalam mengurangi dan memilah sampah atau *Reuse, Reduce* dan *Recycle* (3R);
   2) Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (pada sumber, Tempat Penampungan Sementara/TPS, Tempat Pemrosesan Akhir/TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir); dan
   3) Pengelolaan persampahan berorientasi 3R (dari hulu ke hilir) yang belum efektif dan terpadu.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tingkat Ketersediaan Rumah Layak di tahun 2020 sebesar 91,9 persen merupakan indikator kinerja utama Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Angka tersebut menggambarkan kondisi yang belum optimal dan perlu ditingkatkan. Dalam arahan Presiden terkait RPJMN Tahun 2020-2024 yang berkaitan langsung dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan 6 (enam) dan 11 (sebelas) adalah Pembangunan Infrastruktur yang terdiri dari Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perkotaan.

Akar masalah terkait pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang tergambarkan dalam pencapaian rumah layak huni di atas, antara lain:

a. Harga rumah tidak terjangkau bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan di bawah MBR;
b. Persoalan penyediaan tanah untuk rumah MBR, antara lain keterbatasan dan mahalnya harga lahan, pembangunan rumah bagi MBR yang sesuai dengan batas harga pemerintah berlokasi jauh dari perkotaan dan tempat kerja, dan belum ada intervensi pemerintah untuk penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan dan mengendalikan harga lahan;

c. Implementasi kebijakan penyediaan rumah MBR di tingkat pusat sulit untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah;
d. Tahapan perizinan aturan kemudahan perizinan bagi pembangunan Perumahan MBR belum ditindaklanjuti oleh peraturan di daerah;
e. Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang tidak memenuhi standar, berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman;
f. Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya;
g. Dukungan PSU yang terbatas karena belum menjadi aset pemerintah dikarenakan pengembang belum menyerahkan asetnya yang disebabkan prasyarat untuk serah terima belum terpenuhi; dan
h. Pembangunan perumahan belum sejalan dengan rencana pembangunan perkotaan yang tercantum dalam RTRW/RDTR.

Indikator Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun yaitu di tahun 2015 sebesar 82,64 persen dan menurun di tahun 2018 menjadi 80,95 persen. Sedangkan indikator Rasio Permukiman Layak, selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami tren yang meningkat.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Masalah ketentraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan demokrasi masih dimaknai sebagai kebebasan semata oleh sebagian masyarakat, yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aspek hukum, penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Provinsi Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota negara dan lintasan Jawa Sumatera dengan jumlah penduduk yang besar dan heterogen; memiliki obyek vital nasional; dan merupakan daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan, dan industri, menjadi pemicu timbulnya berbagai permasalahan sosial. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi, demikian pula dengan

masalah kepemilikan lahan. Selain itu, protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban, cukup baik.

Masalah pelindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Barat dengan kondisi geografi wilayah Provinsi Jawa Barat serta jumlah penduduk terpadat di Indonesia menjadikan Jawa Barat sebagai supermarket bencana dengan segala jenis bencana yang pernah terjadi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menyebabkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berada dalam kelas resiko sedang hingga tinggi. Pada tahun 2019 Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Provinsi Jawa Barat memilik indeks resiko 166 (tinggi). Pada tahun 2020 Indeks Kapasitas/Ketahanan Daerah sebesar 0,51 poin. Akar permasalahan penanggulangan bencana antara lain:

a) belum optimalnya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan daerah;
b) masih rendahnya mitigasi non struktural;
c) masih minimnya anggaran pada mitigasi struktural;
d) masih minimnya kegiatan pencegahan bencana;
e) masih lemahnya kesiapsiagaan bencana;
f) belum optimalnya penanganan darurat bencana; dan
g) masih kurangnya program kegiatan pemulihan pasca bencana.

Capaian di bidang urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dapat diketahui dari berbagai indikator, diantaranya adalah pada tahun 2019 Tingkat Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sektor Pembangunan mencapai 85 persen, Tingkat Pengurangan Korban Jiwa Akibat Bencana Alam mencapai 80 persen, Tingkat Penanganan Keadaan Darurat Bencana mencapai 90 persen, dan Tingkat Pemulihan Pasca Bencana 80 persen.

6. Bidang Sosial

Permasalahan bidang sosial, yaitu kecenderungan meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini disebabkan oleh: (1) Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran; (2) Belum optimalnya penanganan bencana sosial; (3) Masih rendahnya penanganan

kasus-kasus kekerasaan anak, perempuan dan *human trafficking*; (4) Belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial; (5) Masih rentan terhadap konflik sosial; (6) Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); dan (7) Meningkatnya PPKS akibat adanya Pandemi COVID-19

Bila ditelaah lebih lanjut, selain permasalahan kecenderungan meningkatnya jumlah PPKS terdapat masalah lain yaitu:

a) Cenderung menurunnya jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi;
b) Menurunnya persentase PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
c) Menurunnya Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yg berpartisipasi dalam penanganan PMKS pada tahun 2020 sebesar 56,45 persen.

4.1.2.2 Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1. Bidang Tenaga Kerja

Masalah pokok terkait tenaga kerja meliputi: (1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang rendah sebesar 64,53 persen di tahun 2020; dan (2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih tinggi yaitu 10,46 persen di tahun 2020. Beberapa hal yang diidentifikasi berkontribusi terhadap masalah-masalah pokok ketenagakerjaan, antara lain:

a. Kesempatan kerja terbatas;
b. Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja;
c. Banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
d. Proporsi penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan/ *vulnerable employment*" cukup tinggi, lebih dari 50 persen;
e. Kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri;
f. Masih tingginya penduduk yang bekerja di sektor informal;
g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) banyak didominasi lulusan SMK akibat *missmatch* (tidak sesuai) dengan kebutuhan industri atau perusahaan; dan
h. Pencari kerja lebih memilih bekerja di perkotaan dibanding perdesaan.

Permasalahan pembangunan pada bidang tenagakerjaan sebagaimana dituliskan di atas juga diwarnai dengan penurunan beberapa

indikator seperti Tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat kesempatan kerja, yang tidak sejalan dengan peningkatan angkatan kerja. Kondisi ini memunculkan tantangan tersendiri selain permasalahan-permasalahan di atas.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, yaitu:

a. Masih Rendahnya Cakupan perempuan di legislatif di Provinsi Jawa Barat, yaitu 20 persen di tahun 2020;
b. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak;
c. Masih banyaknya kasus perdagangan perempuan dan anak di Provinsi Jawa Barat; dan
d. Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan, serta eksploitasi dan diskriminasi yang akan berada dalam kondisi yang lebih rentan dalam situasi pandemi COVID-19. Resiko terjadinya eksploitasi dan kekerasan terhadap anak saat ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Dengan kondisi yang menuntut *physical distancing*, perempuan dan anak yang berada pada lingkungan keluarga yang tidak sehat atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga, akan semakin sulit mengakses layanan dan bantuan.

Terlepas dari berbagai permasalahan di atas, kinerja pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak mengalami peningkatan yang ditunjukan dengan kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan kenaikan kabupaten/kota layak anak.

3. Bidang Pangan

Permasalahan di bidang pangan yang masih dihadapi Provinsi Jawa Barat adalah akses. Akses pangan yang dimaksudkan disini adalah masih sulitnya akses produsen ke pasar dan juga akses masyarakat dalam mendapatkan pangan baik dari sisi ketersediaan maupun keterjangkauan harga. Permasalahan lainnya adalah tingkat keanekaragaman konsumsi pangan Provinsi Jawa Barat yang masih rendah, hal ini ditunjukkan

dengan Skor PPH Tingkat Ketersediaan pada tahun 2019 sebesar 90,4 poin dan capaian Skor PPH Tingkat Ketersediaan di tahun 2020 yaitu 92,9 poin.

Akar permasalahan di bidang pangan, antara lain:

a. Terdapat beberapa komoditi pangan penting yang masih didatangkan dari luar Provinsi Jawa Barat;
b. Logistik pangan belum optimal, yang menyebabkan harga pangan menjadi tidak stabil, terlebih di masa pandemi saat ini, dengan adanya pembatasan sosial menyebabkan arus distribusi pangan Provinsi Jawa Barat juga terganggu;
c. Provinsi Jawa Barat belum memiliki pusat distribusi pangan yang dapat mengontrol ketersediaan dan stabilitas harga pangan bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat;
d. Kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan pangan belum optimal, yang ditunjukkan dengan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) masih rendah, yang berpengaruh terhadap prevalensi stunting di Provinsi Jawa Barat. Akses pnagan berpengaruh pada kecukupan gizi pada balita dan dapat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di masa depan, program pangan dan gizi telah menjadi prioritas melalui RPJMN Tahun 2015-2019. Salah satu tujuan utama program tersebut adalah pengurangan angka *stunting* balita untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing;
e. Terdapat beberapa komoditi pangan penting yang masih didatangkan dari luar Provinsi Jawa Barat;
f. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan; dan
g. Masih terdapat daerah rentan rawan pangan di Provinsi Jawa Barat.

4. Bidang Pertanahan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan lingkup Pemerintah Provinsi meliputi:

a. Pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
b. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
c. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
e. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
f. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
g. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi serta inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
h. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Dalam pemenuhan sub urusan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi masih memerlukan kelengkapan data dan informasi terkait pertanahan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan *stakeholder* terkait lainnya. Selain itu diperlukan upaya koordinasi lebih lanjut dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat untuk penyelesaian sertifikasi tanah *asset* Pemerintah Daerah Provinsi.

Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dalam penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas daerah kabupaten/kota, penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota, dan penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota.

Pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota bidang pertanahan mengkoordinasikan perangkat daerah teknis lainnya dalam penyusunan kajian teknis yang mendukung penerbitan izin lokasi oleh perangkat daerah yang menangani perizinan.

5. Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Jawa Barat secara umum diindikasikan antara lain melalui kondisi:

a. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan;
b. Menurunnya kualitas udara ambien akibat emisi kendaraan bermotor dan cerobong industri, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik;
c. Menurunnya fungsi layanan jasa ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Jawa Barat yang ditandai dengan menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi, dan meningkatnya alih fungsi lahan; dan
d. Meningkatnya risiko bencana, terutama bencana terkait perubahan iklim, akibat belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana.

Jika dilihat dari capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2020 sebesar 61,59 poin, kinerja pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat dinilai cukup baik karena telah memenuhi target. Akan tetapi hal ini belum berarti upaya penanganan permasalahan lingkungan hidup telah dilaksanakan secara optimal.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi sangat berkaitan dengan aktivitas pembangunan pada berbagai sektor yang secara tidak langsung menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga penanganan permasalahan yang dilakukan pun harus bersifat multisektor. Saat ini penanganan permasalahan lingkungan hidup dinilai belum optimal karena dalam pelaksanaannya cenderung masih dibebankan pada perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup. Dalam hal ini komitmen berbagai *stakeholder* pembangunan untuk tetap memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam melaksanakan aktivitasnya sangat diperlukan.

Salah satu upaya yang dilakukan pada aspek kebijakan adalah dengan melibatkan dan memperjelas pembagian peran sektor terkait dalam upaya pencapaian target indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Sektor yang

terkait dalam upaya pencapaian target indikator IKLH meliputi sektor permukiman dan perumahan, industri, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, perkebunan, perhubungan dan penataan ruang. Adapun sektor yang terkait dalam upaya pencapaian target indikator Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca meliputi kehutanan, perkebunan, kelautan, pertanian, energi, perhubungan, pengelolaan limbah domestik.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, pendekatan pentahelix dinilai perlu dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup, seperti halnya yang telah dilakukan untuk penanganan DAS Prioritas melalui pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, DAS Cilamaya dan Sub DAS Cileungsi-Cikeas.

6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pokok terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Jawa Barat, yaitu: a. Menurunnya akurasi data kependudukan, dimana akurasinya pada tahun 2020 hanya mencapai 81,37 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 yang mencapai 98,63 persen; dan b. Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dengan kondisi tahun 2020 sebesar 82,22 persen.

Beberapa hal yang menyebabkan kondisi tersebut, yaitu:

a. Arus migrasi masuk penduduk ke Provinsi Jawa Barat yang tinggi menyebabkan kendala dalam hal pendataan administrasi kependudukan, antara penduduk asli Provinsi Jawa Barat dan penduduk non permanen di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menyebabkan selalu terjadi perbedaan data jumlah penduduk antara data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan data Badan Pusat Statistik (BPS);
b. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM jemput bola di kabupaten/kota, menyebabkan proses pelayanan dokumen administrasi kependudukan terhambat, dalam menjangkau daerah terpencil/pelosok;
c. Keterbatasan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten sebagai administrator *database*;

d. Kompetensi SDM dalam hal memberikan pelayanan masih belum merata. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif, untuk meminimalkan terjadinya kasus pungli di area pelayanan;
e. Aksesibilitas jaringan komunikasi data dari kabupaten/kota yang akan melakukan perekaman kurang merata;
f. Sarana berupa peralatan perekaman/pencetakan di kabupaten/kota banyak yang rusak dan tidak layak operasi;
g. Ketergantungan logistik perekaman dan pencetakan (blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik/KTP EL) masih tersentralisasi, sehingga keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah akan mengganggu kecepatan proses di daerah; dan
h. Dari sisi kelembagaan, terdapat beberapa kabupaten/kota yang wilayah kerjanya memiliki cakupan yang luas namun tidak didukung dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu masih rendahnya persentase desa mandiri yang hanya mencapai 5,08 persen di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa yakni belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kolaboratif dan inovatif untuk menuju Gerbang Desa Juara;
b. Belum sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan kabupaten/kota, masih bersifat parsial/sektoral;
c. Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian perdesaan antara lain: 1) belum seluruh desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 2) masih adanya desa *blankspot*; dan 3) belum optimalnya pemanfaatan potensi desa untuk mendorong OVOP (*One Village One Product*);
d. BUMDes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa;
e. SDM yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes belum memahami pengelolaan BUMDes (pelaksana teknis hingga kepala desa);

f. Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa;
g. Belum optimalnya pembangunan desa mencakup: 1) peningkatan pelayanan dasar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan; 3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 4) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
h. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;
i. Belum optimalnya penganggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan c*rowdfunding* untuk memberikan alternatif metode penganggaran pada program-program perdesaan melalui dana CSR dan penggalangan dana melalui jaringan internet; dan
j. Lemahnya pengelolaan profil desa dan kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditemui di Provinsi Jawa Barat yaitu Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*) pada tahun 2020 sebesar 2,55 jiwa. Permasalahan lainnya yaitu menurunnya cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif, dimana berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Peserta KB aktif di Provinsi Jawa Barat tahun 2016 yang mengalami penurunan. Data tahun 2019 menunjukkan cakupan peserta KB aktif mencapai 62,87 persen.

Permasalahan bidang pengendalian penduduk dan KB meliputi: 1) pertambahan penduduk yang cepat karena migrasi dan kelahiran; 2) persebaran penduduk yang tidak merata, serta tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 3) belum optimalnya pembangunan keluarga di Provinsi Jawa Barat; dan 4) masih banyaknya usia kawin pertama penduduk Provinsi Jawa Barat di usia dini.

9. Bidang Perhubungan

Permasalahan utama bidang perhubungan di Provinsi Jawa Barat yaitu:

a. Masih rendahnya Tingkat Ketersediaan Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perlengkapan Jalan yang hanya 52,53 persen di tahun 2020, karena jenis fasilitas yang beragam dan panjang jalan provinsi yang perlu dipasang fasilitas perlu ditangani secara bertahap dan merata di wilayah pelayanan UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan (PPP LAJ) Wilayah I-IV;
b. Belum berkembangnya penyediaan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang terintegrasi antar moda angkutan, karena masih dalam tahap perencanaan dan kajian pembiayaan;
c. Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
d. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana terminal serta tata kelola terminal, karena sebagian Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) belum diserahkan ke Provinsi;
e. Masih rendahnya tingkat keselamatan lalu lintas jalan, karena belum tersedia data lokasi rawan kecelakaan yang perlu diprioritaskan untuk penanganan keselamatan lalu lintas di Provinsi Jawa Barat;
f. Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK pada penyelenggaraan transportasi, karena kerja sama berbasis inovasi belum diprioritaskan untuk dilaksanakan secara kontinyu;
g. Belum terwujudnya pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas pelabuhan laut pengumpan regional;
h. Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP);
i. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan penataan sistem transportasi; dan
j. Belum optimalnya pengelolaan prasarana transportasi udara di Jawa Barat akibat urusan penerbangan yang tidak lagi menjadi urusan provinsi.

10. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama bidang komunikasi dan informatika untuk aplikasi dan informatika, meliputi:

a. Belum optimalnya nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Jawa Barat yaitu 3,58 poin di tahun 2020 atau memiliki predikat Baik, sehingga kinerja Provinsi Jawa Barat masih perlu ditingkatkan.
b. Penerapan *e-Government* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih dalam proses ditindaklanjuti dengan kebijakan/aturan hukum daerah;
c. Belum ada rencana induk/*strategic plan*/*masterplan*/*blueprint* teknologi informasi di Provinsi Jawa Barat;
d. Belum adanya standar pembangunan/pengembangan aplikasi/sistem informasi/*website*, data, serta infrastruktur teknologi informasi;
e. Belum adanya standar keamanan informasi;
f. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapa layanan teknologi informasi;
g. Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola teknologi informasi;
h. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan terhadap akses informasi yang lebih beragam dan cepat, namun kelemahannya berdampak pada akurasi dari informasi tidak menjadi prioritas. Tantangan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk kembali menata pengelolaan komunikasi dan informasi; dan
i. Belum ada regulasi terbaru seiring dengan perkembangan teknologi informasi tentang pengembangan kelompok informasi masyarakat, pembinaan komunitas komunikasi dan informatika serta pembinaan media tradisional.

Terlepas dari berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, beberapa indikator terkait menunjukan pencapaian yang cukup baik, diantaranya peningkatan indeks keterbukaan informasi publik, indeks keamanan informasi, dan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Beberapa permasalahan yang dihadapi koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM), yaitu:

a. Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mengalami penurunan usaha ataupun berhenti sehingga memerlukan tambahan modal untuk memulai kembali ataupun memulihkan usahanya.
b. Persentase koperasi yang berkualitas pada tahun 2020 sebesar 27,97 persen, sehingga perlu ditingkatkan.
c. Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup dalam terhadap UMK, sehingga hanya 52,4 persen yang dapat beroperasi normal. UMK yang dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 adalah yang memasarkan produknya melalui *platform online*.
d. Sarana dan prasarana penunjang pelatihan dan pendampingan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) sebagian besar masih tatap muka atau belum semua dilakukan secara *online* dalam beradaptasi terhadap kondisi pandemi COVID-19.

Secara umum akar permasalahan di bidang KUKM, antara lain:

a. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif.
b. Menurunnya fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi atau persentase kredit yang diserap oleh koperasi, serta pada akses pembiayaan bagi KUKM khususnya terhadap dunia perbankan;
c. Masih rendahnya informasi akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil terutama di perdesaan, dan kesulitan untuk mengakses kredit;
d. Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal;
e. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil; dan
f. Belum semua pelaku usaha kecil dan menengah memiliki kapasitas *digital literacy,* sehingga belum mampu memasarkan produk secara *online* di masa pandemi COVID-19.
g. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki fasilitas pelatihan dan pendampingan tetapi belum berbasis digital dan belum berkolaborasi secara optimal dengan para *stakeholder*.

12. Bidang Penanaman Modal

Beberapa permasalahan pada bidang penanaman modal, yaitu:

a. Jumlah nilai investasi berskala nasional Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun tertentu. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Rp51,4 Triliun pada tahun 2020.
b. Realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata masih terkonsentrasi di daerah Bodebekarpur.
c. Belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN.

Adapun akar permasalahan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu:

a. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata.
b. Belum sesuainya kualifikasi angkatan kerja lokal dengan pasar tenaga kerja.
c. Dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha.

Berbagai permasalahan dan akar permasalahan yang dituliskan diatas, mengakibatkan terjadinya penurunan total nilai investasi, meskipun terjadi peningkatan dari sisi jumlah proyek investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan bidang kepemudaan, yaitu:

a. Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Barat yang hanya mencapai 50,00 pada tahun 2020.
b. Rendahnya partisipasi pemuda Jawa Barat dalam lapangan dan kesempatan kerja.
c. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan.
d. Belum optimalnya penanganan kesetaraan dan diskriminasi gender.

Adapun permasalahan yang dihadapi bidang olahraga, antara lain:

a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk Jawa Barat yang melakukan kegiatan olahraga.
b. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (Sekolah Khusus Olahraga, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar (PPLP), dan Puslatda) guna pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
c. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan.
d. Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian di Provinsi Jawa Barat.
e. Masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan.
f. Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Jawa Barat yang memenuhi standar nasional dan internasional.
g. Kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Selain permasalahan di atas adapun beberapa permasalahan sektoral yang perlu diperhatikan antara lain, capaian Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO) pada tahun 2020 menurun 4,7 persen dibandingkan tahun 2019, dan capaian Jumlah pemuda Jawa Barat yang dibina untuk prestasi nasional juga menurun pada tahun 2020 dari 9 orang pemuda Jawa Barat yang dibina untuk prestasi nasional menjadi 5 orang pemuda Jawa Barat yang dibina untuk prestasi nasional.

14. Bidang Statistik

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan statistik yaitu:

a. Masih rendahnya tingkat kematangan pengelolaan dan layanan statistik sektoral pada tahun 2020 sebesar 80,46 persen. Belum optimalnya pencapaian tersebut disebabkan belum maksimalnya pengelolaan data di perangkat daerah dan kabupaten/kota;
b. Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola *database* dan belum tersosialisasi; dan

c. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah spasial dan aspasial.

Selain permasalahan di atas adapun beberapa permasalahan dibidang kebudayaan antara lain Pelestarian Seni Tradisi yang menurun jumlah pembinaannya pada tahun 2020, capaian Persentase seni budaya dan destinasi wisata yang dipromosikan pada tahun 2020 menurun 25,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan capaian Persentase seni dan budaya yang dilestarikan menurun 20,52 persen pada tahun 2020.

15. Bidang Persandian

Saat ini berkenaan dengan persandian terdapat permasalahan sebagai berikut:

a. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (*security awareness*), antara lain ditandai dengan makin maraknya informasi yang disebarkan kepada masyarakat melalui dokumen-dokumen pemerintah yang diragukan keasliannya, dan penyebaran informasi di masyarakat yang belum diketahui kebenarannya.
b. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang relatif masih terbatas.
c. Permasalahan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) pada tahun 2020 sebesar 610 *score*. Keamanan sistem elektronik termasuk kategori baik, namun masih perlu ditingkatkan sampai maksimal sebesar 645 *score*.
d. Pengamanan aset-aset dan ruangan pimpinan yang perlu disterilkan dari upaya-upaya penyadapan informasi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab masih relatif terbatas jumlahnya. Saat ini baru 3 (tiga) pimpinan daerah meliputi 9 (sembilan) titik yang dapat diamankan/disterilkan yakni ruang kerja, ruang rapat, dan rumah dinas gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah saja, dari 40 lebih pimpinan Provinsi Jawa Barat yang ada.
e. Pengamanan dokumen-dokumen penting dari pemalsuan dan peningkatan upaya pelayanan lebih efektif dan efisien belum optimal. Saat ini baru 33 orang yang memegang Sertifikat Elektronik atau 3 (tiga) perangkat daerah yang dapat memanfaatkan Sertifikat

Elektronik (SE), yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dari sejumlah 2.000 lebih pejabat struktural dan 30.000 lebih ASN di Provinsi Jawa Barat.

f. SDM persandian dan keamanan informasi di lingkungan Jawa Barat masih sedikit, baru ada 3 (tiga) orang (2 orang di Dinas Komunikasi dan Informatika dan 1 orang di Sekretariat Daerah). Sementara di kabupaten/kota tidak lebih dari 10 orang sandiman. Selain itu, SDM yang memiliki pengetahuan teknis mengenai *penetration test* maupun kontra penginderaan pun masih sangat terbatas.

16. Bidang Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada bidang kebudayaan antara lain:

a. Masih rendahnya perlindungan terhadap 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya di Provinsi Jawa Barat;
b. Masih rendahnya kompetensi SDM kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
c. Kurang optimalnya promosi budaya tradisional Provinsi Jawa Barat di dalam dan luar negeri; dan
d. Besarnya peluang masuknya pengaruh negatif budaya asing ke Provinsi Jawa Barat.

17. Bidang Perpustakaan

Permasalahan di bidang perpustakaan dapat dilihat dari aspek kelembagaan teknis dan aspek pembudayaan kegemaran budaya masyarakat. Secara umum permasalahan di bidang perpustakaan diuraikan sebagai berikut:

a. Permasalahan kelembagaan teknis perpustakaan di Provinsi Jawa Barat, yaitu:
   1) Penyelenggaraan perpustakaan belum mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang meliputi pengembangan koleksi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), sarana dan prasarana, anggaran, layanan, bahan perpustakaan, tenaga perpustakaan, kerja sama, penyelenggaraan perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan;

2) Perpustakaan Umum kabupaten/kota masih ada yang belum memiliki prasarana gedung permanen;
3) Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM Perpustakaan baik tenaga Fungsional Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan; dan
4) Kegiatan layanan perpustakaan belum menjangkau daerah tertinggal, terjauh dan terluar.

b. Permasalahan pembudayaan kegemaran membaca di Provinsi Jawa Barat, yaitu:
1) Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan;
2) Masih rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan per tahun;
3) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan sebagai tempat berkegiatan;
4) Kurangnya promosi dan publikasi pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat;
5) Gerakan membaca dalam kegiatan literasi belum masif serta masih bersifat parsial dan belum terintegrasi; dan
6) Pemaknaan membaca masih berorientasi kepada baca dan tulis, belum kepada pemaknaan holistik dan komprehensif.

Selain permasalahan di atas adapun beberapa permasalahan dibidang Perpustakaan antara lain Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun menurun signifikan sebesar 607.353 orang pada tahun 2020 dikarnakan banyaknya fasilitas umum yang ditutup pada masa pandemi Covid-19, sehinggga berdampak kepada Indeks Membaca Masyarakat yang menurun realisasinya pada tahun 2020 sebesar 7,01 poin, dan Tingkat Kebiasaan Membaca Masyarakat pun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 4,14 poin pada tahun 2020.

18. Bidang Kearsipan

Urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan akses penggunaan arsip belum efektif; penelusuran dan identifikasi arsip kesejarahan belum efektif; menurunnya persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku; pengelolaan arsip perangkat daerah atau pencipta arsip belum tertib; dan pemahaman sumber arsip bersejarah masih rendah. Adapun akar masalah dari permasalahan tersebut yaitu

ketersediaan fasilitas dan sumber daya kearsipan yang belum layak sesuai standar kearsipan, serta keterbatasan sumber informasi arsip kesejarahan. Adapun Persalahan dibidang Kearsipan antara lain menurnnya peresentase penyusutan kearsipan dan menurunnya tingkat penyelamatan arsip statis pada tahun 2020.

4.1.2.3 Urusan Pilihan

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan di bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat dari menurunnya produksi perikanan tahun 2020 dari yang semula 1.438.204,31 ton/tahun pada tahun 2018 dan 1.518.215,58 ton/tahun di tahun 2019, menjadi 1.389.455,26 ton pada tahun 2020. Secara umum akar permasalahannya, antara lain:

a. Pesisir Provinsi Jawa Barat bagian utara sudah mengalami *over fishing* (eksploitasi berlebihan), sedangkan pesisir Provinsi Jawa Barat bagian selatan belum dimanfaatkan secara optimal;
b. Fasilitas pelabuhan perikanan di Provinsi Jawa Barat belum optimal, karena masih kurangnya jumlah kolam labuh, tempat pembekuan ikan (ABF), tempat penyimpanan ikan (*cold storage*), dan fasilitas lainnya belum memadai;
c. Masih rendahnya tingkat pengguasaan teknologi oleh nelayan;
d. Eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (*fish landing*) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir;
e. Belum optimalnya kapasitas pengelolaan zonasi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil (0-12 mil);
f. Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir;
g. Industri pengolahan hasil perikanan belum berkembang dengan baik; dan
h. Sistem logistik perikanan yang ditandai dengan tempat pembekuan dan penyimpanan produk perikanan belum tersedia dengan baik.

Selain permasalahan di atas adapun beberapa permasalahan dibidang kelautan dan perikanan antara lain menurunnya Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Garam pada tahun 2020.

2. Bidang Pariwisata

Permasalahan pada bidang pariwisata dapat dilihat dari: (1) Penurunan Jumlah Wisatawan Mancanegara dari yang semula berjumlah 4.984.035 orang pada tahun 2017 menjadi hanya 3.645.433 orang di tahun 2019, dan menurun tajam pada tahun 2020 sebanyak 31.610 orang. Beberapa kondisi yang menjadi akar masalah adalah masih belum optimalnya perkembangan pariwisata, yaitu:

a. Belum semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memiliki dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) Kabupaten/Kota;
b. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenitas pariwisata (rumah makan, restoran, toko cinderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain);
c. Belum tersosialisasikannya pariwisata halal atau pariwisata *moslem friendly* untuk mengakomodir wisatawan negara muslim;
d. Belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota;
e. Kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata; dan
f. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan kebijakan *lockdown* di berbagai negara, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia dan kebijakan *social distancing* di tempat umum, menyebabkan turunnya jumlah kunjungan wisata secara drastis baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Selain permasalahan di atas adapun beberapa permasalahan dibidang pariwisata antara lain menurunnya Jumlah Wisatawan Mancanegara, dan Jumlah Wisatawan Domestik pada tahun 2020.

3. Bidang Pertanian

Permasalahan pokok terkait pertanian di Provinsi Jawa Barat yaitu rendahnya kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2020 sebesar 9,20 persen,

tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah, terutama di masa pandemi saat ini, hal ini disebabkan adanya pembatasan sosial dan penurunan daya beli masyarakat terhadap produk pertanian.

Secara umum, akar permasalahan di bidang pertanian, yaitu:

a. Belum ada *mapping* lokasi sentra pertanian Provinsi Jawa Barat;
b. Kepemilikan luas/lahan tanam petani masih skala kecil;
c. Petani kesulitan dalam akses pasar;
d. Petani kesulitan dalam akses modal untuk biaya produksi;
e. SDM petani terbatas, regenerasi petani masih rendah dan usia petani Provinsi Jawa Barat berada di atas usia produktif;
f. Teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian Provinsi Jawa Barat;
g. Provinsi Jawa Barat belum memiliki gudang penyimpanan yang sesuai standar untuk menyimpan produk pertanian; dan
h. *Supply* C*hain* distribusi masih panjang, hal ini disebabkan oleh sistem logistik pertanian Provinsi Jawa Barat belum tertata dengan baik dari daerah sentra produksi ke daerah konsumen.

Selain permasalahan di atas adapun beberapa permasalahan dibidang Pertanian antara lain menurunnya Nilai Tukar Petani, Peningkatan Ketersediaan Benih Unggul Komoditas Perkebunan dan Persentase Peningkatan Produktivitas Rata- rata Komoditas Strategis Perkebunan.

4. Bidang Kehutanan

Permasalahan pembangunan bidang kehutanan di Provinsi Jawa Barat, yaitu:

a. Tingkat degradasi hutan dan lahan masih tinggi pada DAS;
b. Rendahnya pengembangan teknologi dan budidaya di lahan kritis;
c. Meningkatnya gangguan fungsi ekosistem;
d. Terbatasnya produksi hasil hutan bukan kayu;
e. Rendahnya teknologi pemanfaatan sumber daya hutan;
f. Terbatasnya kemampuan kelompok tani hutan; dan
g. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.

Selain permasalahan di atas adapun beberapa permasalahan dibidang Kehutanan antara menurunnya Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Produksi Hasil Hutan.

5. Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan di bidang energi dan sumber daya mineral, yaitu:

a. Masih ditemukan aktivitas pertambangan yang tidak mengikuti kaidah usaha pertambangan yang baik (*good mining practice*);
b. Meningkatnya penggunaan air tanah;
c. Instalasi tenaga listrik belum terstandarisasi;
d. Belum meratanya akses terhadap layanan listrik; dan
e. Pemanfaatan energi final belum efisien dan minimnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) Ketidakseimbangan antara jumlah personil inspektur tambang beserta perlengkapan kerjanya dengan luas wilayah usaha pertambangan; (2) Meningkatnya penggunaan air tanah akibat air permukaan yang belum mampu memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat, baik kebutuhan domestik maupun industri; (3) Belum ada perangkat yang mensertifikasi instalasi tenaga listrik; (4) Basis data terpadu yang menjadi dasar pemberian bantuan sambungan instalasi listrik rumah tangga miskin belum sinkron antara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), PT PLN (Persero) dan pemerintah daerah; dan (5) Keterbatasan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan inefisiensi penggunaan energi.

6. Bidang Perdagangan

Permasalahan perdagangan di Provinsi Jawa Barat antara lain:

a. Dominasi barang impor;
b. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok;
c. Promosi produk industri lokal (asal Provinsi Jawa Barat) masih dirasa kurang;
d. Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern;
e. Kualitas dan kuantitas infrastruktur pasar tradisional belum memadai;
f. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan; dan

g. Menurunnya indeks keberdayaan konsumen yang menunjukkan tingkat keberanian masyarakat suatu negara sebagai konsumen apabila tidak puas dengan produk dan layanan atau merasa dirugikan dalam suatu aktivitas perdagangan.

Selain permasalahan di atas adapun beberapa permasalahan dibidang Perdagangan antara menurunnya Nilai Ekspor Jawa Barat, Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat, Laju Nilai Impor Jawa Barat dan Laju Nilai Impor Non Migas Jawa Barat pada tahun 2020.

7. Bidang Perindustrian

Permasalahan bidang perindustrian yang terjadi beberapa tahun terakhir di Provinsi Jawa Barat, yaitu:

a. Menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, dan pertumbuhan industri di Provinsi Jawa Barat;
b. Produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi);
c. Infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan kawasan industri di Provinsi Jawa Barat;
d. Bahan baku industri mayoritas impor mengakibatkan biaya produksi tinggi;
e. Peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri; dan
f. Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan bidang Perindustrian bahwa terjadi penurunan dibeberapa indikator yaitu, Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHB) dan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK).

8. Bidang Transmigrasi

Kompleksitas dalam masalah kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Barat salah satunya pada bidang transmigrasi yang kurang mendapatkan perhatian. Secara umum permasalahan pada bidang transmigrasi, sebagai berikut:

a. Masih rendahnya persentase transmigrasi swakarsa;
b. Menurunnya jumlah keluarga calon transmigran yang telah dilatih;
c. Kurangnya kompetensi transmigran Provinsi Jawa Barat;
d. Kurangnya pengawasan dan pendataan transmigrasi lokal; dan
e. Lemahnya sistem dan pengelolaan transmigrasi.

4.1.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Bidang Perencanaan

Permasalahan bidang perencanaan pembangunan meliputi, keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD harus tetap dijaga setiap tahun, belum optimalnya kelengkapan data dan infomasi pembangunan daerah, serta belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan. Hal ini cenderung disebabkan oleh indikator kinerja daerah yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) belum dirumuskan dan ditata jenjang kinerjanya dengan baik.

2. Bidang Keuangan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

a. Kapasitas fiskal kabupaten/kota masih banyak yang di bawah 15 persen dari APBD-nya, sehingga rasio anggaran belanja publiknya masih banyak yang dibawah 50 persen;
b. Metode penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan; dan
c. Belum ada ukuran penetapan belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional terhadap kebutuhan belanja unit penghasil, sehingga standarisasi sarana prasarana tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasanya secara keseluruhan.

3. Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang kepegawaian berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi BKD yaitu perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan teknis kepegawaian dan penyelenggaraan

kepegawaian daerah, meliputi kesekretariatan, pengadaan dan informasi pegawai, mutasi dan administrasi kepegawaian, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin.

Beberapa permasalahan terkait isu-isu kepegawaian di lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan masih menjadi kendala dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang aparatur. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terkonsentrasi oleh pemerintah pusat menyebabkan kekurangan pegawai terutama berkaitan hal yang sifatnya teknis. E-formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkadang tidak mampu mengisi kekurangan pegawai yang dialami provinsi. Seiring dengan pemberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memang terjadi pelimpahan pegawai yang sangat signifikan, namun penambahan tersebut tidak dapat menutupi kekurangan pegawai dalam hal teknis, mengingat hampir 80 persen pegawai yang dialih kelola ke provinsi adalah guru;
b. Reformasi birokrasi terutama dari parameter manajemen kepegawaian masih memerlukan peningkatan. Perlu dilakukan secara khusus program-program yang menunjang reformasi birokrasi sehingga amanat undang-undang tentang harus terlaksananya reformasi birokrasi bisa tercapai;
c. Belum adanya perencanaan manajemen kepegawaian berdasarkan Undang-Undang ASN. Selain itu, ditemui juga kondisi belum sesuainya antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN; dan
d. Belum semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS.

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi masalah, yaitu:

a. Belum optimalnya jumlah rekomendasi kebijakan daerah yang dihasilkan;
b. Belum optimalnya jumlah hasil kelitbangan yang diterapkan;

c. Belum optimalnya jumlah Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
d. Belum optimalnya jumlah karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Provinsi Jawa Barat; dan
e. Belum optimalnya jumlah hasil riset serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan.

Permasalahan pembangunan pada bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dituliskan diatas mengalami kenaikan pada beberapa indikator, seperti Jumlah Hasil Penelitian yang Diterapkan dalam Pembangunan Jawa Barat dan Jumlah Karya IPTEK yang Didaftarkan untuk Mendapat Kekayaan Intelektual (KI) meningkat di tahun 2020 selain itu terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan seperti Persentase hasil kelitbangan yang diterapkan dan Persentase rekomendasi kebijakan daerah yang dihasilkan.

5. Fungsi Lainnya

Permasalahan dalam fungsi lain penunjang urusan pemerintahan daerah, antara lain:

a. Masuknya perilaku sosial dan budaya asing yang negatif yang mengaburkan nilai budaya lokal dan kearifan lokal;
b. Munculnya berbagai ancaman serta gangguan terhadap ketentraman dalam masyarakat sehingga menghambat pembangunan di masyarakat yang berdampak pada potensi kerawanan di masyarakat;
c. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
d. Belum tuntasnya batas administrasi daerah;
e. Rentang kendali dan pelayanan publik belum optimal;
f. Belum optimalnya pengendalian intern pemerintahan;
g. Menurunnya persentase penyelesaian Tintak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat terhadap perangkat daerah provinsi;
h. Belum optimalnya strukturisasi organisasi pemerintahan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
i. Belum optimalnya promosi dan informasi potensi pembangunan di Jawa Barat;

j. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hantaman dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan;
k. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan;
l. Meningkatnya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
m. Kecenderungan peningkatan konflik sosial;
n. Melemahnya kehidupan demokrasi;
o. Meningkatnya potensi konflik antar umat beragama;
p. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
q. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing Provinsi Jawa Barat yang diukur dengan indikator-indikator ekonomi, sosial dan fisik lingkungan mayoritas mengalami perbaikan dari sejak periode awal RPJMD Tahun 2018-2023. Namun pada saat memasuki pertengahan tahun 2020 indikator ekonomi menunjukkan penurunan capaian sebagai dampak pandemi COVID-19. Dampak berganda pandemi juga terasa pada dimensi sosial dimana kontraksi ekonomi daerah memberikan tekanan bagi kelompok masyarakat rentan.

Dari segi aspek fisik lingkungan, secara natural Provinsi Jawa Barat dikategorikan sebagai daerah dengan Indeks Risiko Bencana Daerah (IRDI) yang Tinggi. Kondisi ini menciptakan limitasi pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan budidaya.

4.2 Isu Strategis

Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dalam penyusunan RPJMD, dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta pembangunan antar daerah. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Sementara penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Melengkapi penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya, pada proses penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dilakukan juga penelaahan terhadap isu internasional yang mempengaruhi Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan komprehensif dengan mempertimbangan kondisi eksternal yang ada sebagai dinamika internasional, nasional dan regional.

4.2.1 Telaahan Isu Internasional

1. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya dari tahun 2020 menjadi tahun 2015, atau 5 (lima) tahun lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Konsep Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain, yaitu: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community*/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. MEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain: a) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, b) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN, d) program Pembangunan seperti *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), e) Program Sistem Logistik Nasional (Sislognas), f) Penyusunan *Roadmap* dan

Inpres Daya saing, g) *Policy Paper* mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC, h) Pembentukan Komite Nasional AEC 2015, serta i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community* dan *The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 (sepuluh) tahun ke depan.

Pendeklarasian ASEAN *Community* 2025 menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 lalu. *ASEAN Community* 2025 merupakan visi ASEAN 10 (sepuluh) tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN *Economic Community* (AEC) atau dikenal sebagai MEA, ASEAN *Political-Security Community* (APSC), dan ASEAN *Socio-Culture Community* (ASCC). Terdapat 5 (lima) pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat berproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen. Sebab di sisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha.

4.2.2 Telaahan Isu/Kebijakan Nasional

1. Pandemi COVID-19

Sejak awal tahun 2020, terjadi bencana yang melanda dunia yaitu penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Virus yang petama kali ditemukan di Wuhan, China menyebar ke hampir seluruh negara dan pada

awal Maret 2020 terjadi kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut, virus ini telah dengan cepat menyebar keseluruh provinsi di Indonesia. Sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021, tercatat sebanyak 1.298.608 terkonfirmasi positif COVID-19 dan dari data tersebut terdapat 158.604 kasus aktif. Jumlah yang sembuh adalah 1.104.990 orang dan meninggal sebanyak 35.014 orang yang tersebar di 34 provinsi (sumber: Pikobar, 23 Pebruari 2021).

Dalam rangka menanggulangi wabah ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
c. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi;
d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasionaldan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
m. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah antara lain membatasi interaksi antarmanusia. Pembatasan sosial (*social distancing*) dilakukan dalam bentuk pelarangan perjalanan (*travel ban*), penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah. Berbagai langkah ini menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun dari sisi penawaran (*supply*). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, rantai pasokan global terganggu. Semua ini berujung pada penurunan *output* global yang sangat besar. Ketika kondisi ini berlanjut, maka rambatan dampaknya juga

berpotensi mengakibatkan gangguan stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini dialami hampir seluruh negara yang terdampak pandemi COVID-19, tidak terkecuali Indonesia.

2. Isu Lingkungan Hidup

Isu terkait lingkungan hidup menjadi salah satu hal yang sangat mengemuka belakangan ini. Dalam proses pembangunan, seringkali kepentingan ekonomi dan sosial dihadapkan dengan kepentingan lingkungan.

Permasalahan lingkungan pada dasarnya adalah irisan dari permasalahan yang terjadi pada lingkungan alami (*natural environment*), lingkungan buatan (*man-made environment*) terkait aktivitas perekonomian, dan lingkungan sosial (*social environment*). Oleh sebab itu, penanganan permasalahan lingkungan harus dilaksanakan secara holistik sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk memastikan bahwa upaya peningkatan kondisi ekonomi dan sosial yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan di Provinsi Jawa Barat ditandai dengan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Degradasi kuantitas air yang terjadi di Provinsi Jawa Barat diantaranya diakibatkan oleh pemanfaatan air tanah secara berlebihan, berkurangnya luas kawasan resapan air (*catchment area*), dan berkurangnya fungsi sungai sebagai sumber daya air akibat pencemaran dan sedimentasi. Adapun degradasi kualitas air ditandai dengan banyaknya sungai di Provinsi Jawa Barat yang tercemar berat, salah satunya adalah Sungai Citarum, akibat belum terkendalinya pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, dan pertambangan. Penurunan kualitas udara ambien di Jawa Barat diakibatkan oleh meningkatnya emisi kendaraan bermotor, emisi cerobong industri, dan emisi pembakaran sampah oleh masyarakat.

Meningkatnya frekuensi dan risiko bencana di Provinsi Jawa Barat sangat berkaitan dengan meningkatnya kerusakan lahan yang diakibatkan oleh berkurangnya tutupan vegetasi dan meningkatnya luas lahan kritis. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam berlebihan, meningkatnya kerusakan habitat tanaman dan satwa langka, dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, menyebabkan tingginya kerusakan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

Berbagai permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Provinsi Jawa Barat juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta kurangnya upaya pengelolaan ekosistem berbasis DAS secara terpadu.

Berkaitan dengan isu perubahan iklim yang telah berkembang menjadi isu global dan nasional, tingginya emisi gas rumah kaca diyakini secara ilmiah menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Indonesia berkomitmen untuk turut berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca dengan menetapkan target sebesar 29 persen melalui pendanaan domestik dan 41 persen dengan tambahan pendanaan dari dukungan internasional pada tahun 2030. Hal ini ditegaskan dengan diratifikasinya Paris *Agreement* melalui penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris *Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Sebelumnya, Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat.

Peningkatan emisi gas rumah kaca diakibatkan oleh meningkatnya alih fungsi lahan, aktivitas pertanian dan peternakan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan energi fosil berlebihan, dan limbah domestik yang tidak terkelola. Dari hasil proyeksi hingga tahun 2030, besar emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Jawa Barat pada kondisi tanpa aksi mitigasi (*Business as Usual*) mencapai 135.212.417 ton eCO2. Sumber emisi terbesar Provinsi Jawa Barat adalah sektor energi sebesar 41 persen, menyusul sektor lainnya yaitu sektor transportasi sebesar 31 persen, sektor kehutanan sebesar 12 persen, sektor limbah domestik sebesar 11 persen, dan sektor pertanian sebesar 5 persen. Selain dihasilkan oleh aktivitas alamiah, emisi Gas Rumah Kaca akan terus bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas antropogenik. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan. Dengan ditetapkannya Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca

(RAD-GRK), Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan mitigasi pada berbagai sektor.

1. Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals)*

Agenda pembangunan dunia *Millenium Development Goals* (MDGs) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015 telah digantikan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Program SDGs aktif mulai tahun 2016 hingga tahun 2030.

Pasca agenda pembangunan tahun 2015 yang dikenal dengan istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 2016-2030, diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan.

Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;

6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, maka Provinsi Jawa Barat melakukan Studi *Baseline* Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 menjabarkan tujuan global, target global, dan target nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dan instansi pelaksana yang menjadi penanggung jawab. Lingkup pemantauan dan evaluasi mencakup 17 Tujuan, 70 Target dan 147 Indikator.

Tabel 4.1
Target dan Indikator TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Pilar Pembangunan

No.	Pilar/Indikator	Jumlah Indikator
	PILAR SOSIAL	
1	Tanpa Kemiskinan	16
2	Tanpa Kelaparan	13
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	18
4	Pendidikan Berkualitas	11
5	Kesetaraan Gender	7
	Jumlah Pilar Sosial	**65**
	PILAR EKONOMI	
7	Energi Bersih dan Terjangkau	6
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	13
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	7
10	Berkurangnya Kesenjangan	8
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	2
	Jumlah Pilar Ekonomi	**36**
	PILAR LINGKUNGAN	
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	5
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	5
13	Penanganan Perubahan Iklim	4
14	Ekosistem Lautan	7
15	Ekosistem Daratan	10
	Jumlah Pilar Lingkungan	**35**
	PILAR HUKUM	
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	12
	Jumlah 4 pilar	**147**

Sumber: Studi *Baseline* Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat, 2018

Penelaahan lebih mendalam didukung dengan data terkini mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat dilakukan terhadap hasil KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada dokumen KLHS Perubahan RPJMD sudah memuat juga substansi mengenai TPB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2. Penelaahan RPJMN Tahun 2015-2019

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

RPJMN 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk Tahun 2015-2019 adalah: **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan

berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain Nawa Cita sebagaimana telah disajikan di atas, RPJMN Tahun 2015-2019 juga mengamanatkan antara lain akses air minum 100 persen, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100 persen (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan). Sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional, maka pemerintah daerah dan K/L diharapkan mensinergikan segala potensi dan sumber daya untuk mendukung target pembangunan tersebut.

Dalam mewujudkan agenda prioritas nasional (Nawa Cita), maka perlu memperhatikan strategi pembangunan nasional yang antara lain meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan. Tiga dimensi pembangunan meliputi: dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Ketiga dimensi tersebut menjadi bagian yang diprioritaskan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Aspek pembangunan manusia menjadi prioritas sebab Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Untuk itu perlu adanya perhatian lebih pada penyiapan SDM yang andal dan produktif serta mampu ikut serta dalam pembangunan. Diharapkan SDM

Provinsi Jawa Barat dapat mengelola sumber daya yang ada, terlebih dalam pengelolaan sektor unggulan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu, tapi lebih merata keseluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.

3. Penelaahan RPJMN Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat perlu mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024 sebab terdapat 4 (empat) tahun yang beririsan antara kedua dokumen tersebut yakni Tahun 2020 sampai dengan 2023, sebagai kelanjutan dari RPJMN periode sebelumnya.

Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawa Cita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah. Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi Prioritas Nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional.

Keterkaitan misi, arahan Presiden dan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 4.1
Misi dan Agenda Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024

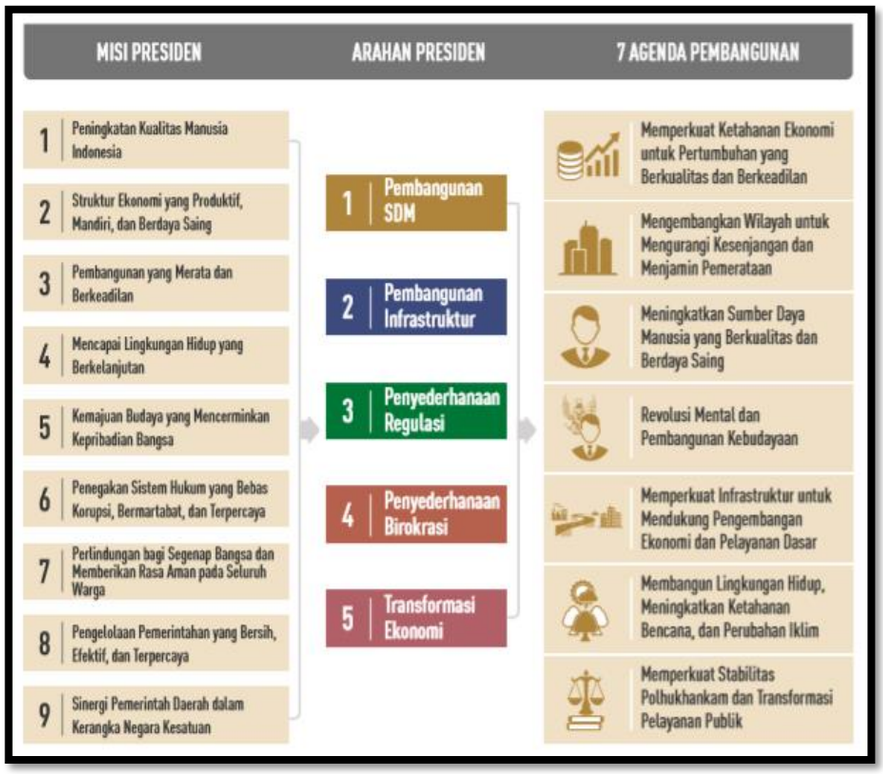

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Sebelum menganalisis keselarasan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD dengan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN, terlebih dahulu perlu diperhatikan beberapa hal terkait RPJMN. Hal pertama adalah bahwa RPJMN disahkan Januari 2020, dengan periode 2020–2024. Sedangkan RPJMD Provinsi Jawa Barat, semula sudah disahkan pada tahun 2018, dengan periode sampai tahun 2023. Revisi RPJMD dilakukan di masa pandemi COVID-19, sementara RPJMN disahkan sebelum masa pandemi COVID-19. Fakta bahwa RPJMN disahkan sebelum pandemi COVID-19 menyebabkan terdapat indikator makro yang diprediksi untuk Provinsi Jawa Barat di RPJMN perlu penyesuaian. Target indikator makro untuk Provinsi Jawa Barat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Target Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RPJMN

Indikator Pembangunan	Target Pembangunan			
	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,50	5,70	5,90
Tingkat Kemiskinan (%)	6,31	6,07	5,70	5,24
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,70	7,50	7,40	7,00

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam melaksanakan agenda pembangunan, Pemerintah telah menetapkan sejumlah proyek prioritas strategis (*major project*). Adapun *major project* yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) di Provinsi Jawa Barat dalam RPJMN Tahun 2020-2024

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Lokasi	Indikasi Pendanaan	Pelaksana
1	Pembangunan *Science Techno Park* (Optimalisasi *Tripple Helix* di 4 Major Universitas)	1. Peningkatan kapabilitas penciptaan inovasi 2. Peningkatan kapasitas STP sebagai simpul *tripple-helix* dalam rangka transformasi hasil riset menjadi produk inovasi yang komersial 3. Peningkatan produk inovasi nasional	2 Provinsi (Jawa Barat: ITB, UI, IPB; dan DIY: UGM)	Rp 0,8 Triliun (APBN)	Kementerian Ristek/BRIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri (ITB, IPB, UI dan UGM), Kementerian Perindustrian, Swasta
2	Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis	1. Pengembangan sistem pemantauan kualitas air yang terintegrasi 566 telemetri. 2. Peningkatan kualitas air menjadi kelas II. 3. Penurunan erosi di wilayah DAS Kritis dengan penghijauan lahan kritis sebesar 150.000 Ha. 4. Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara		Rp 30,9 Triliun (APBN)	KemenPUPR dan Pemerintah Daerah
3	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)	Berkurangnya waktu tempuh: - Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam - Jakarta – Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit		Rp 63,6 Triliun - APBN: 21,6 - KPBU: 42,0	a.l Kemenhub, KemenPUPR, BPPT Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta,	Mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan		Rp 118,8 Triliun (APBN, APBD, Badan Usaha)	a.l Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Lokasi	Indikasi Pendanaan	Pelaksana
	Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar				
5	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh 2. Terbentuknya sistem perumahan publik yang profesional di metropolitan (lintas kab/kota)	6 Kawasan Metropolitan (Mebidangro, Maminasata, Bandung Raya, Gerbangkertosusilo, Jabodetabek, Kedungsepur)	Rp. 397,9 Triliun APBN: Rp 18 Triliun APBD: Rp 109,2 Triliun BUMN: Rp 28 Triliun SWASTA: Rp 237,5 Triliun Masyarakat: Rp 5 Triliun	Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, & Masyarakat
6	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	1. Meningkatnya kapasitas produksi minyak menjadi 1,9 Juta Barrel Per Hari di tahun 2026 2. Perbaikan neraca perdagangan di sektor migas	Balongan, Cilacap; dan Pembangunan Kilang Baru Tuban	637,0 (Badan Usaha)	a.l Pertamina, Badan Usaha, Kementerian ESDM, Kemenkeu, BUMN
7	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya menjadi 10,32 Juta ton pada tahun 2024 atau tumbuh 8,5 persen per tahun. 2. Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8 persen per tahun	Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB	Rp 25 Triliun – APBN: Rp 3,3 Triliun – KPBU dan Swasta: Rp 21,7 Triliun	KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenATR/BPN, KemenESDM, Kemenristek/BRIN, KemenLHK, LIPI, BPPT, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
8	Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	1. Mengatasi bencana banjir rob di Jakarta Utara, Semarang, Pekalongan, Demak, Cirebon 2. Meningkatkan kualitas air sungai tercemar menjadi kualitas kelas II 3. Menurunkan waktu tempuh Semarang - Demak (dari 1 jam menjadi 25 menit) 4. Meningkatkan konektivitas Kawasan Industri *Jatengland Industrial Park Sayung* (JIPS) Demak dengan Simpul Pelabuhan Tanjung Emas		Rp 54,9 Triliun – APBN: Rp 31,4 Triliun – KPBU: Rp 18,7 Triliun – APBD: Rp 4,8 Triliun	KemenPUPR, KemenESDM, Pemda, & Badan Usaha

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam rangka mencapai target tersebut dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Jawa-Bali dilakukan dalam kerangka koridor

pertumbuhan dan pemerataan. Adapun prioritas pembangunan wilayah tersebut di Provinsi Jawa Barat terletak pada lokasi sebagai berikut:

Tabel 4.4
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Jawa Barat dalam RPJMN Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan		**Koridor Pemerataan**	
1	Kota Depok	1	Kabupaten Bandung
2	Kabupaten Bogor	2	Kabupaten Garut
3	Kota Bogor	3	Kabupaten Tasikmalaya
4	Kota Bekasi	4	Kota Tasikmalaya
5	Kabupaten Bekasi	5	Kabupaten Ciamis
6	Kabupaten Karawang	6	Kota Banjar
7	Kabupaten Purwakarta	7	Kabupaten Kuningan
8	Kabupaten Bandung Barat	8	Kabupaten Sukabumi
9	Kota Cimahi	9	Kota Sukabumi*
10	Kota Bandung	10	Kabupaten Pangandaran
11	Kabupaten Sumedang		
12	Kabupaten Majalengka		
13	Kabupaten Cirebon		
14	Kota Cirebon*		

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

Agenda pembangunan atau yang di perencanaan tahunan (RKP) menjadi dengan Prioritas Nasional (PN) dilaksanakan dengan dukungan dari seluruh pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap PN. Disisi lain, Pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sehubungan dengan evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Barat, maka dilakukan telaahan terhadap RPJMN. Pasal 159 dan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Mempedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

4.2.3 Telaahan Isu/Kebijakan Provinsi Jawa Barat

1. Penelaahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD. RPJPD Provinsi Jawa Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Isu strategis dalam 20 (dua puluh) tahun (2005-2025) di Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya;
2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan;
4. Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial;
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
6. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur;
7. Kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat; dan
8. Kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah.

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka visi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 adalah:

“DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA”

Pernyataan Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat di atas, memiliki makna:

1. Iman dan Takwa sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama. Pengamalan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan situasi yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah;
2. Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia dimaksudkan sebagai provinsi yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Keunggulan tersebut ditunjukkan pada 6 (enam) aspek kehidupan terutama aspek SDM, ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya dan lingkungan hidup.

Beberapa indikasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian visi tersebut, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu (*beyond the expectation*), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan.
2. Masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi.
3. Pengelolaan pertanian dan kelautan.
4. Energi baru dan terbarukan serta pengelolaan sumber daya air.
5. Industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif.
6. Infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan yang berkelanjutan.
7. Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. **Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing**; adalah membangun SDM yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
2. **Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah;** adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada

segenap potensi yang ada di daerah, untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3. **Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari**; adalah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
4. **Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik**; adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas kepemerintahan yang bertanggung jawab, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.
5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan**; adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan pembangunan dari RPJPD periode/tahap keempat (2005-2025). Arah pembangunan jangka panjang tahap keempat ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat Provinsi Jawa Barat. Kemandirian dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi daerah dan masyarakat Provinsi Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Bahkan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah sekitarnya, khususnya bagi ibukota negara Republik Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Provinsi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional.

Indikator keberhasilan pembangunan tahap keempat pembangunan jangka panjang ditandai oleh: (a). IPM sebesar 74,1–74,68 (dengan metode baru); (b). Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,67 persen–5,89 persen; (c). Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,34 persen–1,12 persen; (d). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 48,00–50,00; (e). Indeks Reformasi Birokrasi kategori A; (f). Persentase Penduduk Miskin sebesar 7,17 persen–6,80 persen; (g). Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,0 persen–7,45 persen; dan (h). Indeks Gini sebesar 0,38–0,35.

Pencapaian target kinerja pembangunan di atas dilakukan melalui prioritas pembangunan sebagai berikut:

Bidang Pendidikan. Prioritas pembangunan pendidikan pada periode 2018-2023 adalah Tuntas Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang disertai dengan peningkatan kualitas siswa, guru, dan sarana prasarana. Melalui upaya-upaya yang terus dilakukan dalam rangka penuntasan akselerasi tersebut yaitu peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar Lima Belas Tahun dan upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum internasional.

Pada periode ini juga upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multimedia bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya, mulai diarahkan untuk membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaaan melalui penerapan keterampilan dan penguasaan multimedia yang telah diperoleh.

Sedangkan upaya pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan pendidikan tinggi, diprioritaskan pada peningkatan

kuantitas dan kualitas implementasi hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Bidang Kesehatan. Prioritas pembangunan bidang kesehatan diupayakan melalui peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, pengembangan dan penguatan sistem kesehatan, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi) serta terwujudnya pemberian penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Prioritas pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan pada pemantapan pengelolaan infrastruktur transportasi jalan melalui upaya-upaya peningkatan kualitas dan kemantapan infrastruktur yang telah ada serta penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, melalui penyelesaian pembangunan jalan tol antar kota pada ruas Ciawi - Sukabumi, ruas Sukabumi – Ciranjang, dan ruas Ciranjang – Padalarang, serta jalan tol dalam kota pada ruas Terusan Pasteur - Ujung Berung – Cileunyi. Selain itu dilakukan pula pembangunan jalan tol antar kota pada ruas Cileunyi - Nagreg - Ciamis.

Dalam hal pembangunan sumber daya air dan irigasi, guna meningkatkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air dilakukan melalui upaya-upaya penyelesaian pembangunan Waduk Cipanas di Kabupaten Sumedang, Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang, Waduk Sukahurip, Waduk Cikembang, dan Waduk Leuwikeris di Kabupaten Ciamis, Waduk Citepus di Kabupaten Sukabumi, Waduk Santosa di Kabupaten Bandung, Waduk Cibatarua di Kabupaten Garut, serta waduk-waduk strategis lainnya; serta penyelesaian pembangunan pada Daerah Irigasi (DI) strategis lainnya.

Prioritas pembangunan bidang tata ruang diarahkan pada penetapan produk hukum RTRW sebagai produk kebijakan tata ruang provinsi dan acuan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian dan pengawasan tata ruang di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan pemanfaatan ruang diarahkan sesuai arahan pengembangan setiap Wilayah Pengembangan (WP), dalam meningkatkan ketersediaan sarana prasarana minimal dan

strategis di pusat kegiatan Pusat Kegiatan Nasional/Pusat Kegiatan Wilayah/Pusat Kegiatan Lokal (PKN/PKW/PKL), mempertahankan kawasan lindung 45 (empat puluh lima) persen dan ruang ketahanan pangan, meningkatkan pembangunan sektor perekonomian yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan menerapkan mitigasi bencana. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru diarahkan secara efektif dan efisien melibatkan peran dunia usaha terutama dalam membangun aktivitas ekonomi sesuai sektor unggulan dan karakter wilayah. Pengendalian pemanfaatan ruang diarahkan pada lokasi-lokasi berfungsi lindung, untuk menjaga dan mempertahankan daya dukung lingkungan demi kesejahteraan masyarakat.

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Prioritas pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman diarahkan pada percepatan pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan serta peningkatan ketersediaan air bersih, kualitas sanitasi lingkungan melalui upaya peningkatan ketersediaan dan kualitas perumahan; peningkatan ketersediaan rumah layak huni untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR); dan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian.

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Prioritas pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat diarahkan pada Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat melalui upaya-upaya mewujudkan dan memelihara kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut, baik secara fisik maupun psikis serta peningkatan dan pelayanan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bidang Sosial. Prioritas pembangunan bidang sosial diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui upaya-upaya peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial terhadap PPKS dan penghargaan kepada para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial; Peningkatan peran dan fungsi

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PPKS, serta pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS dalam penanganan PPKS dan pembangunan kesejahteraan sosial. Sementara untuk peningkatan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat, dilakukan melalui penanggulangan korban bencana.

Bidang Tenaga Kerja. Prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan pada peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum yang terkait dengan dunia kerja pada pelatihan tenaga kerja yang berbasis potensi lokal serta kewirausahaan melalui upaya-upaya penumbuhkembangan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Prioritas pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak diarahkan pada peningkatan pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, melalui upaya-upaya peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Bidang Pangan. Prioritas pembangunan bidang pangan diarahkan pada peningkatan ketersediaan, peningkatan akses pangan masyarakat, dan peningkatan pemanfaatan pangan masyarakat serta memperbaiki sistem informasi pangan.

Bidang Pertanahan. Prioritas pembangunan bidang pertanahan diarahkan pada mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

Bidang Lingkungan Hidup. Prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup diarahkan pada pemantapan daya dukung lingkungan Provinsi Jawa Barat, terus dijaga dan dipertahankan secara konsisten melalui upaya-upaya pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat. Hal tersebut dicerminkan melalui,

membudayanya perilaku ramah lingkungan di masyarakat, semakin mantapnya sistem pemantauan, penilaian dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, semakin terpeliharanya kualitas lingkungan terutama semakin membaiknya status mutu sungai-sungai dan waduk besar, fungsi kawasan lindung, kondisi 15 (lima belas) cekungan air bawah tanah, kualitas udara perkotaan, kondisi lahan bekas penambangan, bekas tempat pembuangan sampah, serta kualitas lahan pertanian dan perkebunan. Bertambahnya potensi dan cadangan sumber daya alam dan terciptanya diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang ramah lingkungan. Menguatnya ketahanan masyarakat di kawasan resiko bencana, serta tertatanya kawasan rawan bencana.

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Prioritas pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan pada peningkatan pengelolaan kependudukan di Provinsi Jawa Barat melalui upaya pengendalian dan penataan kependudukan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Prioritas pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada konsep Jabar *Cyber Province* melalui upaya-upaya konsep Desa Punya Internet (Desa Pinter) tahun 2020.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Prioritas pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan pada pengendalian pertumbuhan penduduk melalui upaya-upaya kemandirian keluarga, peningkatan kualitas data penduduk dan peningkatan persebaran penduduk yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidup melalui pengendalian kuantitas penduduk pembinaan KB serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Bidang Perhubungan. Prioritas pembangunan bidang perhubungan diarahkan pada peningkatan konektivitas antarwilayah guna mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, pengembangan sistem transportasi massal di wilayah metropolitan, serta peningkatan ketersediaan prasarana transportasi. Peningkatan konektivitas antarwilayah guna mendukung pemerataan dan pertumbuhan diwujudkan melalui dukungan perkeretaapian meliputi:

1. Dukungan pembangunan jalur Kereta Api (KA) semi cepat Jakarta-Surabaya;
2. Dukungan pembangunan akses jalur KA ke Pelabuhan Patimban;

3. Dukungan pembangunan akses jalur KA ke Bandara Internasional Kertajati,
4. Dukungan pembangunan jalur KA ganda Bogor – Sukabumi,
5. Dukungan pembangunan jalur *shortcut* Cibungur – Tanjungrasa,
6. Dukungan peningkatan prasarana jalur KA Padalarang – Cicalengka,
7. Dukungan reaktivasi lima jalur kereta api, yakni: jalur Sukabumi – Cianjur – Padalarang, jalur Bandung - Ciwidey, jalur Cibatu – Garut - Cikajang, jalur Rancaekek - Tanjungsari, dan jalur Banjar - Pangandaran - Cijulang

Peningkatan konektivitas udara antara lain:

1. Dukungan pembangunan bandar udara di Kabupaten Sukabumi,
2. Pengembangan bandar udara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran,
3. Dukungan pengembangan Bandar International Jawa Barat di Kertajati Majalengka,
4. Dukungan pengembangan bandar udara Cakrabhuana di Kota Cirebon, dan
5. Dukungan pengembangan bandar udara Wiriadinata di Kota Tasikmalaya.

Pembangunan transportasi laut dan ASDP meliputi:

1. Dukungan pembangunan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang;
2. Dukungan pembangunan *Inland Waterways* Cikarang – Bekasi - Laut di Kabupaten Bekasi;
3. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan Muara Gembong;
4. Dukungan pembangunan pelabuhan Bojongsalawe;
5. Pelabuhan penyeberangan Majingklak di Kabupaten Pangandaran;
6. Pembangunan pelabuhan pengumpan regional Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi;
7. Dukungan Pembangunan dermaga kapal wisata di Teluk Palangpang Kabupaten Sukabumi; dan
8. Dukungan pengembangan pelabuhan Cirebon di Kota Cirebon.

Adapun pengembangan sistem transportasi massal di wilayah metropolitan dilakukan juga melalui dukungan terhadap pembangunan perkeretaapian perkotaan di tiga wilayah metropolitan, yakni: Metropolitan Bodebekarpur, Metropolitan Bandung Raya, dan Metropolitan Cirebon Raya, serta dengan pengembangan *Bus Rapid Transit* (BRT) di wilayah perkotaan.

Bidang Komunikasi dan Informatika. Prioritas pembangunan bidang komunikasi dan informatika diarahkan pada: peningkatan kualitas pelayanan dan penerapan informasi, melalui upaya-upaya pengembangan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan; dan peningkatan kualitas Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik.

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Prioritas pembangunan bidang KUKM diarahkan pada pengembangan koperasi dan usaha kecil melalui upaya-upaya pengembangan jaringan kelembagaan koperasi dan usaha kecil, untuk mengatasi persaingan global dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil. Pada tahap ini koperasi dan usaha kecil diharapkan dapat menjadi andalan perekonomian dan mampu berkiprah dalam persaingan internasional.

Bidang Penanaman Modal. Prioritas pembangunan bidang penanaman modal diarahkan pada pembangunan investasi daerah melalui upaya-upaya pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu dan teknologi.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Prioritas pembangunan bidang pemuda dan olahraga diarahkan pada pencapaian kemandirian pemuda melalui upaya peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan, serta peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif sehingga mampu mensejahterakan dirinya juga berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Sementara untuk pembangunan olahraga dalam mempertahankan keunggulan prestasi olahraga Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional dan internasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat Provinsi Jawa Barat melalui upaya-upaya peningkatan pembinaan olahragawan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga melalui, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dan olahraga dalam rangka perwujudan pemuda mandiri.

Bidang Statistik. Prioritas pembangunan statistik diarahkan pada: peningkatan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah melalui upaya-upaya peningkatan pengelolaan data pembangunan.

Bidang Persandian. Prioritas pembangunan bidang persandian diarahkan pada pengamanan informasi, melalui upaya peningkatan tata kelola keamanan informasi dan risiko keamanan informasi.

Bidang Kebudayaan. Prioritas pembangunan bidang kebudayaan di Provinsi Jawa Barat diprioritaskan pada penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jawa Barat. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jawa Barat dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jati diri masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Bidang Perpustakaan. Prioritas pembangunan bidang perpustakaan diarahkan pada: pendukungan perpustakaan di Provinsi Jawa Barat dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis informasi dan teknologi melalui upaya-upaya terwujudnya perpustakaan Provinsi Jawa Barat bertaraf internasional dan berbasis digital guna mengembangkan pengetahuan masyarakat serta meningkatkan keinginan masyarakat untuk gemar membaca.

Bidang Kearsipan. Prioritas pembangunan bidang kearsipan diarahkan pada: peningkatan kinerja pengelolaan kearsipan daerah melalui upaya-upaya peningkatan pengelolaan sistem kearsipan dinamis dan statis.

Bidang Kelautan dan Perikanan. Prioritas pembangunan bidang kelautan dan perikanan diarahkan pada pengembangan perikanan komersial di Pantai Selatan dan Pantai Utara, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha pembuatan kapal penangkap ikan, pengembangan usaha penunjang rekreasi, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha informasi kelautan, pengembangan budaya kelautan (*marine culture*), pengembangan kota-kota pantai (*coastal cities*), pengembangan wisata kelautan dan pengembangan usaha eko-konservasi.

Bidang Pariwisata. Prioritas pembangunan bidang pariwisata, diarahkan pada pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata Provinsi Jawa Barat, melalui upaya-upaya pengembangan kelembagaan

pariwisata dan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisatawan baik domestik maupun asing.

Bidang Pertanian. Prioritas pembangunan bidang pertanian diarahkan pada: (a) pengembangan pertanian berkelanjutan yang bertumpu pada 3 (tiga) pilar yaitu ekonomi, sosial dan ekologi; (b) pengembangan *smart agriculture* dari hulu sampai hilir yaitu dari sisi produksi sampai pemasaran; (c) pengembangan korporasi pertanian; (d) pembentukan petani milenial; dan (e) optimalisasi lahan tidur untuk kegiatan pertanian, perkebunan serta peternakan.

Bidang Kehutanan. Prioritas pembangunan bidang kehutanan diarahkan pada penurunan luas lahan kritis di Luar Kawasan Hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis, peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan melalui upaya-upaya peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Prioritas pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral diarahkan pada pemantapan kemandirian energi melalui upaya-upaya pemantapan desa mandiri energi, infrastruktur energi, terwujudnya kehandalan pasokan energi, peningkatan efisiensi pendayagunaan energi semakin baik, peningkatan pengembangan energi alternatif, peningkatan investasi swasta dalam pengembangan energi alternatif, dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengusahaan energi.

Bidang Perdagangan. Prioritas pembangunan bidang perdagangan diarahkan pada pemantapan perdagangan, melalui upaya-upaya perkuatan penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar dan pengoptimalan pendayagunaan potensi dalam negeri serta perluasan jaringan perdagangan luar negeri.

Bidang Perindustrian. Prioritas pembangunan bidang perindustrian diarahkan pada pemantapan industri, melalui upaya penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar dan pengoptimalan pendayagunaan potensi dalam negeri.

Bidang Transmigrasi. Prioritas pembangunan bidang transmigrasi diarahkan pada: penataan persebaran penduduk baik di dalam maupun ke luar wilayah provinsi melalui upaya-upaya kerja sama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi,

peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran, masyarakat Kawasan Transmigrasi Lokal (*Resettlement*) dan warga sekitar.

Bidang Perencanaan. Prioritas pembangunan bidang perencanaan pembangunan diarahkan pada: peningkatan kerja sama pembangunan melalui upaya-upaya peningkatan kerja sama dan kemitraan strategis lintas provinsi, pemerintahan pusat, dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pengelolaan kerja sama Provinsi Jawa Barat melalui aliansi strategis multi pihak. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dengan arah kebijakan peningkatan kualitas perencanaan daerah, peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Bidang Keuangan. Prioritas pembangunan bidang keuangan diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dilakukan melalui upaya-upaya pengaturan pengelolaan keuangan daerah; peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah; mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan aset-aset daerah yang bermasalah.

Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan. Prioritas pembangunan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diarahkan pada penguatan dan pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik yang didukung oleh sistem dan dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayan serta mengembangkan budaya organisasi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan. Prioritas pembangunan bidang penelitian dan pengembangan diarahkan pada pemantapan kerjasama dengan lembaga penelitian internasional serta pengembangan ekonomi sebagai hasil penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Fungsi lain. Prioritas pembangunan fungsi lain untuk bidang keagamaan di Provinsi Jawa Barat diarahkan pada peningkatan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama melalui upaya-upaya pengimplementasian dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penyelesaian berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama, serta pengimplementasian dan pengaktualisasian pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik, agar

penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.

Prioritas pembangunan bidang politik diarahkan pada membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi, penataan daerah otonom di Provinsi Jawa Barat serta penguatan kerja sama antar institusi.

Prioritas pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia diarahkan pada pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakan hukum guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Penelaahan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023. Penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia. Sedangkan sasaran penataan ruang yaitu:

a. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45 persen dari wilayah Provinsi Jawa Barat dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan;
b. Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
c. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan
d. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Prioritas penataan ruang Provinsi Jawa Barat untuk pencapaian tujuan penataan ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2029 sebagai berikut:

a. Meningkatkan daya dukung lingkungan melalui perwujudan 45 persen kawasan lindung, mempertahankan sawah beririgasi teknis, mengurangi pencemaran perkotaan, dan mengarahkan kegiatan sesuai alokasi pemanfaatan ruang;
b. Membatasi perkembangan perkotaan dan mengintensifkan pemanfaatan lahan di sekitar PKN;
c. Pemerataan pembangunan dengan mengarahkan kegiatan pada wilayah yang didorong dan ditingkatkan perkembangannya;

d. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah melalui percepatan pembangunan infrastruktur wilayah;
e. Meningkatkan jasa pelayanan perhubungan, ekonomi, kesehatan, budaya dan olahraga di PKN, PKW dan PKL;
f. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman di PKN, PKW dan PKL;
g. Mendorong kerja sama pembangunan inter dan antarwilayah;
h. Meningkatkan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana;
i. Mengembangkan potensi lokal dan mensinergiskan hubungan fungsional kota-desa; dan
j. Meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan antarprovinsi.

Kebijakan dan strategi penataan ruang, meliputi:

a. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang;
b. Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang terdiri dari: 1) kebijakan dan strategi pengembangan wilayah dan 2) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan
c. Kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada saat perubahan RPJMD ini disusun, sedang dilakukan perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat. Lebih rinci mengenai struktur dan pola ruang serta arah kebijakan pemanfaatan ruang disajikan pada Bab VI Perubahan RPJMD ini.

4.2.4 Telaahan RPJMD Daerah Lain

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.5
Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Provinsi DKI Jakarta	2017-2022	Visi: Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Misi: 1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai kekeluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan. 2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanga lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatkan keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang. 3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas. 4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. 5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsanaan dan kebhinekaan.	Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
2	Provinsi Jawa Tengah	2018-2023	Visi: “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi Misi: 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk	Perda Provinsi Jawa Tengah N0. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
			menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota. 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. 4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan. Kebijakan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan Provinsi Jawa Barat, yaitu terkait Arahan Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Provinsi. Dalam rangka mendorong pembangunan di wilayah perbatasan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif melakukan sinergitas pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta. Ada 5 (lima) konsep pengembangan pembangunan wilayah perbatasan, yaitu: 1) Pengembangan Wilayah, adalah upaya mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya untuk merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan wilayah; 2) Keselarasan, adalah keberlanjutan pembangunan 3) Penanganan konflik/ potensi konflik, 4) Pemanfaatan bersama, adalah pemanfaatan fasilitas/sarana prasarana pada wilayah perbatasan 5) Pengawasan dan penanganan bersama, adalah upaya pelaksanaan/ implementasi peraturan.	Tengah Tahun 2018-2023

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
3	Provinsi Banten	2017-2022	Visi: Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah Misi: 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) 2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur. 3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas. 4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas. 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kebijakan Provinsi Banten yang terkait dengan Provinsi Jawa Barat, yaitu: Rencana pengembangan sistem transportasi darat di provinsi Banten: Rencana Pengembangan jalan nasional Bayah – Cibarenok – Batas Provinsi Jawa Barat, Teluknaga – Bandara Soekarno Hatta, Serang – Pandeglang, Pangarangan – Bayah – batas Provinsi Jawa Barat, Simpang 3 (tiga) Cilegon, Simpang 3 (tiga) Labuan, Simpang 3 (tiga) Tarogong;; Merak – Suralaya – Pulo Ampel Bojonegara – Cilegon, Tangerang – Bandara Soekarno Hatta, Labuan – Saketi – Pandeglang – Rangkasbitung – Cipanas – batas Provinsi Jawa Barat.	Perda Provinsi Banten No. 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Sumber:
- Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta
- Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah
- Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten

4.2.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS menghasilkan

rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil pengkajian pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan kondisi lingkungan daerah yang meliputi 6 (enam) muatan KLHS, kondisi keuangan dan kelembagaan daerah.

KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Data dan informasi, hasil analisis, serta rekomendasi kebijakan yang tertuang pada KLHS dipastikan terintergrasi di dalam muatan kebijakan, rencana, dan program pada Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Muatan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 terfokus pada 7 (tujuh) isu prioritas sebagai berikut:

1. TPB 1: Tanpa Kemiskinan;
2. TPB 2: Tanpa Kelaparan;
3. TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. TPB 4: Pendidikan Berkualitas;
5. TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak;
6. TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; dan
7. TPB 15: Ekosistem Darat.

Berdasarkan ketercapaian target eksisting dan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), terdapat beberapa skenario yang berkaitan dengan upaya tambahan pencapaian target TPB. Berikut ini disajikan skenario terhadap 7 (tujuh) isu strategis hasil KLHS.

1. TPB 1: Tanpa Kemiskinan

Outcome yang diharapkan dari TPB 1 adalah untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun, dengan demikian target yang diinginkan tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, namun diharapkan dapat menghilangkan kemiskinan. Berbagai aspek kemiskinan akan dihilangkan, salah satunya melalui perlindungan sosial. Untuk mengurangi kemiskinan dan bahkan menghilangkan kemiskinan, diperlukan peran berbagai pihak yang saling mendukung. Di bawah ini merupakan arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 1 tanpa kemiskinan.

Tabel 4.6
Arahan Kebijakan dan Program Dalam Mewujudkan TPB 1 tentang Tanpa Kemiskinan

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Mengurangi kemiskinan	a. Dinas Sosial b. Dinas Kesehatan c. Dinas Pendidikan d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi e. Dinas Energi dan Sumber daya Mineral f. Dinas Perumahan dan Permukiman g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1. Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi 2. Masyarakat Miskin dan/atau terdampak COVID-19 3. Meningkatkan Kemampuan Ekonomi bagi 4. Masyarakat Miskin dan/atau terdampak COVID-19 5. Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur 6. Dasar bagi Masyarakat Miskin	1. Program Penanganan Fakir Miskin 2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan 4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 7. Program Hubungan Industrial 8. Program Pelayanan Keluarga Berencana 9. Program Pendewasaan Usia Perkawinan 10. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 12. Program Perekonomian dan Pembangunan 13. Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 14. Program Pengelolaan Pendidikan 15. Program Rehabilitasi Sosial 16. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 17. Program Penanggulangan Bencana

Sumber: Rancangan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

2. TPB 2: Tanpa Kelaparan

Terdapat 2 (dua) *outcomes* yang diharapkan berkaitan dengan masalah pangan untuk TPB 2 dalam isu pembangunan berkelanjutan, yaitu terwujudnya ketahanan pangan dan meningkatnya kesehatan

masyarakat. Dalam mencapai 2 (dua) *outcomes* tersebut diperlukan peranan beberapa pihak yang bersangkutan. Pada *outcome* pertama diperlukan peranan dari para pihak, antara lain: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sementara itu, pada *outcome* kedua diperlukan peranan dari para pihak, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Beberapa arahan program yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pencapaian tersebut dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 4.7
Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 2 tentang Tanpa Kelaparan

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
a) Terwujudnya ketahanan pangan	a. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan b. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura c. Dinas Perkebunan d. Dinas Sumber Daya Air e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa f. Dinas Kelautan dan Perikanan g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah h. LSM Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
b) Meningkatnya kesehatan masyarakat	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil c. Dinas Sosial d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah e. LSM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan masyarakat dalam penanggulangan gizi buruk	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4. Program Pemberian Asupan Tambahan

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
			5. Program Rehabilitasi Sosial

Sumber: Rancangan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

3. TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Selain proporsi perempuan melahirkan dan persentase merokok, juga terdapat beberapa indikator di target kehidupan sehat dan sejahtera yang masih memiliki *gap*/masalah. Diantaranya adalah indikator kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap, prevalensi tekanan darah tinggi, eliminasi malaria dan kusta, pemakaian kontrasepsi, angka kelahiran pada remaja, dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Terdapat 6 (enam) *outcomes* yang berkaitan dengan target kehidupan sehat dan sejahtera (TPB 3), yaitu mengurangi angka kematian ibu; menurunkan angka kematian bayi dan balita; mengakhiri epidemi dan penyakit menular; mengurangi angka kematian dini dari penyakit tidak menular; akses universal terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi; dan akses kesehatan universal terhadap pelayanan kesehatan dasar. Keenam *outcomes* ini memerlukan peranan berbagai pihak dalam pencapaiannya. Untuk mewujudkan *outcomes* pada TPB 3 diperlukan kerja sama para pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program seperti pada tabel di bawah.

Tabel 4.8
Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program (Nomenklatur Permendagri 90/2019)
1. Mengurangi angka kematian ibu. 2. Menurunkan angka kematian bayi dan balita.	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana c. Dinas Ketahanan	a. Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
			2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
			3. Program Pemenuhan Hak Anak
		b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program (Nomenklatur Permendagri 90/2019)
	Pangan dan Peternakan d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa e. Dinas Perumahan dan Permukiman f. BPJS Kesehatan g. Rumah Sakit h. Puskesmas i. Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK) j. Perangkat Daerah dan masyarakat k. LSM Bidang Kesehatan l. LSM Bidang Sosial	c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui peran posyandu dan penyuluhan imunisasi.	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
		d. Peningkatan mutu gizi, ketahanan dan keamanan pangan bagi ibu hamil, bayi dan balita.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
			2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			4. Program Rehabilitasi Sosial
			5. Program Penanganan Kerawanan Pangan
			6. Program Pengawasan Keamanan Pangan
			7. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			8. Program Pembinaan KB
3. Mengakhiri epidemi dan penyakit menular. 4. Mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular.	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa c. Dinas Lingkungan Hidup d. Dinas Pendidikan e. Dinas Perumahan dan Permukiman f. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah h. Pertahanan dan Keamanan i. BPJS Kesehatan j. Rumah Sakit k. Puskesmas	a. Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, dan epidemi.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
			2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
		b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
		c. Peningkatan penelitian dan pengembangan terkait epidemi, penyakit menular dan tidak menular.	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
		d. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
		e. Pembinaan dan pemantauan masyarakat terkait pencegahan	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
			2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program (Nomenklatur Permendagri 90/2019)
	l. Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK) m. Perangkat daerah dan masyarakat n. LSM Bidang Kesehatan o. LSM Bidang Sosial	epidemi dan penyakit menular	Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. 3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
		f. Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat.	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
5. Akses universal terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. 6.Akses kesehatan universal terhadap akses pelayanan kesehatan dasar.	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Sosial c. Dinas Pendidikan d. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa f. Dinas Perumahan dan Permukiman g. BPJS Kesehatan h. Rumah Sakit i. Puskesmas j. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) k. Pemberdayaan Kesehatan Keluarga l. Perangkat daerah dan masyarakat m. LSM Bidang Kesehatan n. LSM Bidang Sosial	a. Peningkatan pelayanan kesehatan.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. 3. Program Pemenuhan Hak Anak.
		b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
		c. Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.	1. Program Pembinaan KB. 2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera. 3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
		d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan terkait kesehatan dasar dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. 1. Program Pemberdayaan Sosial. 2. Program Rehabilitasi Sosial.

Sumber: Rancangan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

4. TPB 4: Pendidikan Berkualitas

Pendidikan merupakan hak mendasar di dalam nilai kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. *Outcomes* TPB 4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030,

ditetapkan 10 (sepuluh) target yang diukur melalui 23 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: 1) menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas; 2) menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan; 3) membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak; serta 4) meningkatkan jumlah guru berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah melalui pembentukan *center of excellence* di setiap kabupaten/kota dan pengembangan SMK yang relevan dengan kebutuhan industri, meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidik untuk pendidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi, dan meningkatkan minat baca masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah diantaranya adalah program peningkatan akses dan mutu pendidikan, program pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, program pengembangan program studi di luar kampus utama, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan target dan tujuan TPB 4 dibutuhkan peran para pihak dalam mendukung ketercapaiannya dengan arahan kebijakan dan arahan program seperti pada tabel di bawah.

Tabel 4.9
Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas

Outcomes	**Para Pihak**	**Arahan Kebijakan**	**Arahan Program**
Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata	a. Dinas Pendidikan b. Dinas Komunikasi dan Informatika c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	a. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah melalui pembentukan *center of excellence* di setiap kabupaten/kota dan pengembangan SMK yang relevan dengan kebutuhan industri.	Program pengelolaan Pendidikan
			Program Pendidik dan tenaga Kependidikan
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Program Penempatan Tenaga Kerja

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
		b. Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi. c. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Pembinaan Perpustakaan

Sumber: Rancangan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

5. TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Berkaitan dengan kondisi air bersih dan sanitasi layak di Provinsi Jawa Barat tersebut, serta merujuk pada hasil analisis GAP, terdapat 3 (tiga) *outcomes* yang menjadi target dalam pencapaian TPB 6, yaitu: pemerataan akses air minum yang aman dan terjangkau, pemerataan akses terhadap sanitasi dan fasilitas kebersihan yang layak, serta peningkatan kuantitas dan kualitas air serta efisiensi dalam pemanfaatannya. Dalam upaya pencapaian ketiga *outcomes* tersebut, diperlukan peran berbagai pihak serta arahan kebijakan dan arahan program.

Tabel 4.10
Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 6 tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program (Nomenklatur Permendagri 90/2019)
1. Pemerataan akses air minum yang aman dan terjangkau	a. Dinas Sumber Daya Air b. Dinas Kesehatan c. Dinas Perumahan dan Permukiman d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa g. Perusahaan Daerah Air Minum h. Pemerintah kab/kota dan masyarakat i. LSM Bidang Kesehatan j. LSM Bidang Lingkungan Hidup	a. Pengembangan infrastruktur untuk penyediaan air minum, terutama di kawasan permukiman.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minu
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
		b. Perencanaan, koordinasi, dan evaluasi antar badan usaha dan institusi dalam pengelolaan air minum.	Program Perekonomian dan Pembangunan
			Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
			Program Pemberdayaan

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program (Nomenklatur Permendagri 90/2019)
	(WALHI Jawa Barat, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda/DPKLTS, dll) k. Mitra pembangunan (IUWASH, water.org, dll)		Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
		c. Penyediaan fasilitas dan SDM untuk uji laboratorium kualitas air minum sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
2. Pemerataan akses terhadap sanitasi layak dan peningkatan PHBS	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Pendidikan c. Dinas Perumahan dan Permukiman d. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang e. Dinas Sosial f. Dinas Lingkungan Hidup g. Dinas Komunikasi dan Informatika h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa i. Pemerintah kab/kota dan masyarakat j. LSM Bidang Kesehatan k. LSM Bidang Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda/DPKLTS, Asosiasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesia, dll) l. LSM Bidang Sosial (Aisyiyah Jawa Barat, dll) m. LSM Bidang Pendidikan n. Industri penyedia sarana prasarana/teknologi sanitasi & pengelolaan limbah	a. Sosialisasi dan edukasi perilaku hidup bersih sehat bagi masyarakat.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Program Pemberdayaan Sosial
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PPKS)
			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
		b. Pengembangan sarana prasarana sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
		c. Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi antar badan usaha dan institusi dalam pengelolaan air limbah dan sanitasi.	Program Perekonomian dan Pembangunan

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program (Nomenklatur Permendagri 90/2019)
	o. Mitra pembangunan (IUWASH, SNV, water.org, dll)		
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas air serta efisiensi dalam pemanfaatannya	a. Dinas Sumber Daya Air b. Dinas Lingkungan Hidup c. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang d. Dinas Perumahan dan Permukiman e. Dinas Kelautan dan Perikanan f. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura g. Dinas Perkebunan h. Dinas Kehutanan i. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa l. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah m. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) n. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) o. Pemerintah kab/kota dan masyarakat p. Pelaku usaha q. LSM Bidang Lingkungan Hidup (WALHI Jawa Barat, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda/DPKLTS, Asosiasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesia, dll) r. Mitra pembangunan (IUWASH, SNV, water.org, dll)	a. Peningkatan daya dukung penyediaan air dengan meningkatkan ketersediaan air dan mengefisiensikan pemanfaatannya.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengelolaan Hutan
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
			Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
			Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		b. Pengelolaan dan pengendalian pencemar air dari sumbernya.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Pengendalian

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program (Nomenklatur Permendagri 90/2019)
			Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		c. Perencanaan dan pengembangan teknologi untuk upaya menjaga kualitas dan kuantitas air.	Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber: Rancangan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

6. TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan skenario pencapaian target dan isu-isu ekonomi lainnya, sasaran TPB 8 di Provinsi Jawa Barat difokuskan pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha; penghidupan kembali UMKM dan sektor pariwisata terdampak pandemi COVID-19; pembukaan bidang bisnis, investasi, dan industri besar; dan pengembangan infrastruktur. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) sasaran/*outcomes* utama dalam mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8) di Provinsi Jawa Barat, antara lain meningkatnya PDRB per kapita, terpenuhinya kebutuhan akses UMKM ke layanan keuangan, dan meningkatnya jumlah wisatawan. Untuk mencapai ketiga *outcomes* tersebut, diperlukan peranan berbagai pihak dengan arahan kebijakan dan arahan program.

Tabel 4.11
Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
1. Meningkatnya PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan b. Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi c. Biro Perekonomian d. Inspektorat e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa f. Dinas Komunikasi dan Informatika g. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. j. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah m. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia n. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah o. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah p. Badan Pendapatan Daerah q. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat	a. Perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah yang lebih strategis dan transparan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
		b. Peningkatan iklim investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		c. Pengembangan industri, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
		d. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kewirausahaan, dan peningkatan kualitas, daya saing, dan jaminan sosial tenaga kerja	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Program Pengelolaan Kota Administrasi
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pengembangan
			Program Perencanaan Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial
			Program Pengawasan Ketenagakerjaan
		e. Peningkatan ekonomi masyarakat desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa
			Program Penataan Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2. Terpenuhinya kebutuhan akses Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan di Provinsi Jawa Barat	a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa c. Dinas Komunikasi dan Informatika d. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu f. Dinas Pemuda dan Olahraga g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	a. Peningkatan kualitas, pemasaran, dukungan, pembiayaan usaha, dan akses modal bagi UMKM	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Pengembangan UMKM
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Program Pelayanan Penghubung

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
	j. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia k. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah l. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat		
3. Meningkatnya jumlah wisatawan di Provinsi Jawa Barat	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa b. Dinas Komunikasi dan Informatika c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia f. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah g. Badan Penghubung	a. Pengembangan destinasi pariwisata, produk wisata, dan ekonomi kreatif, serta infrastruktur pendukung kawasan pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		b. Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital ke dalam dan luar negeri	Program Pemasaran Pariwisata
			Program Pelayanan Penghubung

Sumber: Rancangan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

7. TPB 15: Ekosistem Darat

Terdapat 2 (dua) sasaran/*outcomes* utama dalam mewujudkan ekosistem darat yang berkelanjutan (TPB 15) di Provinsi Jawa Barat, yaitu terwujudnya lingkungan hidup berkelanjutan dan berkualitas baik; serta tersedianya data dan informasi yang handal mengenai kondisi ekosistem. Dalam rangka mencapai kedua *outcomes* tersebut, peranan berbagai pihak sangat diperlukan dengan arahan kebijakan dan arahan program.

Tabel 4.12
Arahan Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan TPB 15 tentang Ekosistem Darat

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
1. Terwujudnya lingkungan hidup berkelanjutan dan berkualitas baik, terutama melalui pengelolaan dan peningkatan kawasan hijau, khususnya	a. Sekretariat Daerah b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah c. Inspektorat Daerah d. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang e. Dinas Sumber Daya Air f. Satuan Polisi Pamong Praja g. Dinas Lingkungan Hidup h. Dinas Pemberdayaan	a. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi lingkungan hidup yang tersinkronisasi dengan penataan ruang dan pembangunan daerah berkelanjutan, serta berkoordinasi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
hutan di Provinsi Jawa Barat	Masyarakat dan Desa i. Dinas Kehutanan j. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah l. WALHI Jawa Barat m. Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) n. Asosiasi Pengendali Pencemaran Lingkungan Indonesia o. water.org p. IUWASH PLUS	dengan pemerintah pusat	
		b. Peningkatan pengelolaan DAS, pengelolaan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya	Program Pengelolaan Hutan
			Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
			Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
			Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
		c. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran, pembinaan, dan pengawasan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		d. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perhutanan sosial	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
			Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Outcomes	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
			Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
2. Tersedianya data dan informasi yang handal mengenai kondisi ekosistem kawasan konservasi dan pemanfaatan hutan di Provinsi Jawa Barat	a. Dinas Sumber Daya Air b. Dinas Lingkungan Hidup c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa d. Dinas Komunikasi dan Informatika e. Dinas Kehutanan f. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah h. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah i. WALHI Jawa Barat j. Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) k. Asosiasi Pengendali Pencemaran Lingkungan Indonesia l. water.org m. IUWASH PLUS	a. Peningkatan pengadaan, pemanfaatan, dan publikasi data dan informasi lingkungan hidup maupun potensi sumber daya kehutanan yang berkualitas	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sumber: Rancangan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Berdasarkan rekomendasi KLHS sebagaimana diuraikan di atas, maka dilakukan integrasi ke dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Hasil analisis dan rekomendasi KLHS terhadap Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 pada umumnya telah diakomodir dan diintegrasikan ke dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD. Adapun beberapa catatan terkait proses pengintegrasi/adaptasi dari hasil analisis dan rekomendasi KLHS ke dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD, sebagai berikut:

a. Dasar hukum dan penjelasan pentingnya KLHS ditelaah pada saat penyusunan RPJMD telah dimuat dalam Bab I Rancangan Akhir Perubahan RPJMD;
b. Analisis daya dukung dan daya tampung di dokumen KLHS sebagian besar telah diadaptasi masuk ke Bab II Rancangan Akhir Perubahan RPJMD;
c. Permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah telah diintegrasikan dengan isu terkait TPB;
d. Penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan telah memperhatikan prinsip pelaksanaan TPB dan dimuat dalam Bab V dan Bab VI Rancangan Akhir Perubahan RPJMD. Hal ini sejalan dengan hasil analisis KLHS yang diuraikan di atas;
e. Program pembangunan daerah dan program perangkat daerah mulai Tahun 2019 sampai dengan 2023 telah diupayakan merespon seluruh TPB. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukungnya terdapat di Perubahan Renstra Perangkat Daerah terkait. Kegiatan tidak dimuat dalam dokumen RPJMD;
f. Indikator Kinerja Utama (IKU);
g. Indikator Kinerja Kunci (IKK) telah mengadaptasi indikator TPB pada Bab VIII Rancangan Akhir Perubahan RPJMD; dan
h. Beberapa indikator KLHS yang direkomendasikan tidak diintegrasikan ke RPJMD sebab akan direspon/diadaptasi ke dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah terkait.

4.2.6 Penetapan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat; (2) Dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu: (1) Kualitas nilai kehidupan dan daya

saing SDM; (2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) Reformasi birokrasi.

Kelima isu strategis di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing SDM

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Provinsi Jawa Barat mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan menengah yang belum mencapai seratus persen. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah pemerataan distribusi guru antar daerah, pemerataan jumlah sekolah bahwa masih terdapat 19 (sembilan belas) kecamatan yang tidak terdapat sekolah (SMA/SMK) Negeri dari total kecamatan di Provinsi Jawa Barat.

Selain hal tersebut di atas, masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang terakreditasi C dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Barat pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita per satuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang

tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukan dengan 1 (satu) dari 4 (empat) anak usia 0 (nol) sampai 59 bulan di Provinsi Jawa Barat mengalami *stunting*. Rasio layanan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat masih rendah yang dikarenakan kurangnya aksesibilitas ke tempat layanan kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemi COVID-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat tetap dituntut untuk terus berdaya guna dan beradaptasi dengan pola kehidupan baru/beradaptasi dalam kondisi pandemi COVID-19.

Pemberdayaan perempuan di Provinsi Jawa Barat saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Provinsi Jawa Barat sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Provinsi Jawa Barat.

2. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada periode Tahun 2015-

2019 penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020, kondisi memburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, diindikasikan dari angka kemiskinan perdesaan dan kemiskinan perkotaan. Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 serta keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya *link and match* antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),dan kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri, menjadi faktor-faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. PPKS di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasaan anak, perempuan, dan *human trafficking*, belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan PSKS.

Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu ATHG terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah *preventif* dan advokasi yang intensif demi terciptanya kerukunan umat beragama.

3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Pemerataan pembangunan dan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerataan pembangunan dituangkan dalam rencana wilayah pengembangan, daya dukung lingkungan dituangkan dalam penetapan kawasan lindung 45 persen, sedangkan daya tampung lingkungan dituangkan dalam rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta kawasan budidaya lainnya. Namun di sisi lain, dinamika pembangunan dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang tanpa prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Kondisi ini menyebabkan pemerataan pembangunan tidak tercapai, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diutamakan.

Pemerataan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pemerataan pembangunan berbasis komunitas diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti penyediaan perumahan, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, serta pengolahan persampahan dan limbah. Pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga menjadi penting untuk diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan wilayah dan sektoral.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan diwujudkan pula melalui antisipasi dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana, sehingga

meminimalisir kerugian ekonomi, memberi kenyamanan, dan berkelanjutan. Antisipasi dampak perubahan iklim melalui peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, diharapkan dapat meminimalkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi, serta mampu mempertahankan kesehatan masyarakat.

Pengolahan sampah terpadu lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal/terpusat, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama peningkatan cakupan pelayanan dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan air limbah domestik dan industri dalam rangka mengendalikan pencemaran sungai dan pengelolaan terpadu.

Salah satu hal penting dalam isu ini adalah penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Barat masih belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka semakin berdampak buruk terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terhadap tahun 2019 mengalami kontraksi.

Sebelum terjadinya pandemi, perekonomian Provinsi Jawa Barat telah dihadapkan dengan beberapa hal, diantaranya belum berkembangnya KUKM, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil, dan belum optimalnya kapasitas digital *literacy* bagi para pelaku UKM dalam memasarkan produknya, sehingga UKM bisa tetap bertahan di masa pandemi COVID-19.

Terjadinya penurunan realisasi PMA yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial

mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN. Dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara dan wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya dinamika ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga menyebabkan keragu-raguan pasar dalam berinvestasi.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenitas pariwisata, belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota, serta kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan *lockdown* di berbagai negara, PSBB di berbagai wilayah di Indonesia, *social distancing* di tempat umum, dan pembatasan mobilitas penduduk menyebabkan banyak destinasi wisata, pelaku usaha maupun pelaku seni yang tutup atau tidak melakukan aktivitasnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisata secara drastis baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Bahkan pada saat PSBB tidak diberlakukan lagi dan diterapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), belum mampu mendorong hidupnya kembali industri pariwisata.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan, petani kesulitan dalam akses pasar; SDM petani masih terbatas, regenerasi petani masih rendah dan usia petani Provinsi Jawa Barat berada di atas usia produktif; teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian Provinsi Jawa Barat; jumlah gudang penyimpanan hasil panen masih terlalu minim. Disamping itu, belum tersedianya pusat distribusi daerah produk pertanian dan rendahnya infrastruktur irigasi.

Pada sektor perikanan dan kelautan terdapat permasalahan yang ditandai oleh turunnya Nilai Tukar Nelayan. Hal tersebut disebabkan oleh eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (*fish landing*) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, pelabuhan perikanan Provinsi Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dan lain-lain), pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir, serta masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan.

Pada sektor pangan harus dilakukan antisipasi potensi krisis pangan yang disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas saat pandemi COVID-19. Potensi krisis pangan tidak hanya terjadi pada skala Provinsi Jawa Barat namun pada skala nasional maupun global. Hal ini ditandai dengan ketersediaan stok pangan yang mulai berkurang sehingga mengakibatkan lonjakan harga pada beberapa komoditi pangan. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah antara lain seperti meningkatnya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan pangan dari sisi harga dan kualitas sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi gizi masyarakat Jawa Barat.

Pada sektor kehutanan masih terdapat permasalahan yang ditandai oleh degradasi lahan yang masih tinggi di DAS, pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS, meningkatnya gangguan ekosistem, dan rendahnya teknologi pemanfaatan sumber daya hutan.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Provinsi Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu menurunnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi). Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur pendukung

kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik, bahan baku industri mayoritas impor, peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi.

5. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, perlu ditingkatkannya profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Isu strategis yang diuraikan di atas, diterjemahkan ke dalam 11(sebelas) prioritas pembangunan daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Isu Strategis
Tahun 2022-2023

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	1. P1- Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 2. P5 - Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan 3. P9 - Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara
2. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	1. P2 - Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 2. P3 - Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 3. P6 - Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana 4. P8 - Gerakan Membangun Desa 5. P10 - Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 6. P11 - Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. P6 - Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana 2. P8 - Gerakan Membangun Desa

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
	3. P10 - Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial	1. P2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 2. P3 Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 3. P4 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
5. Reformasi birokrasi	1. P7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanganan dampak dari pandemi COVID-19. Sejak kemunculannya di Indonesia, pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak hanya terkait kesehatan dan kematian, namun telah merambat pada timbulnya permasalahan lain, diantaranya sosial, ekonomi, keuangan daerah, dan tidak terlaksananya rencana-rencana pembangunan tahun 2020 akibat pengalihan sebagian besar sumber daya untuk penanganan pandemi COVID-19. Hal ini tentu membutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh aktor pembangunan dan inovasi yang tepat, sehingga diperlukan kualitas SDM ASN yang mampu meningkatkan pelayanan, peningkatan transparansi, penerapan merit sistem, penghapusan jabatan struktural, serta reformasi birokrasi.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Pernyataan Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jawa Barat Juara Lahir Batin: Pembangunan Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa** melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.

   Konsep Jawa Barat Juara secara "batin" sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Provinsi Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Provinsi Jawa Barat. Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain Masjid, pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat yang bertakwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tenteram, dan bahagia.

2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

   Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat, agar rakyat Provinsi Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan, perempuan Provinsi Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya serta dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

   Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

   Misi 3 dalam penjabaran Visi Provinsi Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat

pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, meningkatkan efisiensi distribusi logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten serta antar provinsi. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera dan Adil** melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.

   Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Jawa Barat. Ekonomi Kerakyatan yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Provinsi Jawa Barat. Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.

5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

   Dalam tata kelola pemerintahan, *good governance* atau tata kelola yang baik harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan 8 (delapan) pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan, dan akuntabel.

   Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merepresentasikan *good governance* melalui penerapan Provinsi Cerdas (*smart province*) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

Perwujudan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat didasarkan pada nilai-nilai sebagai prinsip pembangunan yang hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Nilai pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi:

Religius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jawa Barat Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Kerakyatan dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Gambar 5.1
Konsep Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat didukung oleh pendayagunaan modal dasar pembangunan, yaitu:

1. Karakteristik masyarakat Provinsi Jawa Barat yang religius dan berbudaya adil yang mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;
2. Posisi geografis Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan ibukota negara menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai lintasan utama arus regional penumpang dan barang koridor Sumatera-Jawa-Bali;
3. Keanekaragaman sumber daya alam hayati dan sumber daya buatan serta sumber daya manusia produktif menjadi potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
4. Keragaman budaya Provinsi Jawa Barat merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan; dan
5. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan.

5.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif yang holistik. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan penjabaran visi dan misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Indikasi pencapaian Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

1. Provinsi termaju dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel, dan berbasis ilmu pengetahuan.
2. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi (*society development*).
3. Provinsi termaju dalam bidang pengelolaan pertanian dan kelautan.
4. Provinsi termaju dalam bidang energi baru dan terbarukan.
5. Provinsi termaju dalam bidang industri manufaktur, industri jasa, dan industri kreatif.
6. Provinsi termaju dalam bidang infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan.

7. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang, juga memperhatikan modal dasar Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Karakteristik masyarakat Provinsi Jawa Barat yang religius dan berbudaya merupakan modal sosial yang mampu mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;
2. Posisi geografis yang berbatasan dengan ibukota negara menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai lintasan utama arus regional penumpang dan barang koridor Sumatera-Jawa-Bali;
3. Keanekaragaman sumber daya alam hayati dan sumber daya buatan serta sumber daya manusia produktif menjadi potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat; dan
4. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan.

Salah satu latar belakang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yakni adanya pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi COVID-19 ditandai dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan *output* di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran.

Dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *refocusing* dan realokasi anggaran, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. *Refocusing* dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak cukup serius terutama pada sektor riil dan sektor eksternal (perdagangan luar negeri). Pada sektor riil, kinerja perekonomian sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif dibanding tahun 2019. Perekonomian Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami kontraksi cukup dalam yaitu sebesar -2,44 persen. Penurunan kinerja ekonomi tidak terlepas dari turunnya kinerja lapangan usaha yang menjadi basis perekonomian Provinsi Jawa Barat. Pada sisi lapangan usaha, Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terkontraksi masing-masing sebesar -4,22 persen dan -7,94 persen. Sementara Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penyangga ditengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dengan tumbuh positif sebesar 2,29 persen.

Selain dari sisi lapangan usaha, kinerja ekonomi juga dapat ditinjau dari sisi komponen pengeluaran. Pada sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga yang menjadi kontributor terbesar mencapai 66,04 persen mengalami kontraksi sebesar -2,89 persen, diikuti Ekspor Barang dan Jasa terkontraksi sebesar -6,55 persen dan Impor Barang dan Jasa terkontraksi sebesar -17,07 persen. Pelemahan kinerja perekonomian juga tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merepresentasikan besaran investasi. Laju pertumbuhan PMTB terkontraksi sebesar -8,34 persen dibanding tahun 2019. Secara umum, melemahnya kinerja ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan nilai tambah, *output* hampir seluruh sektor ekonomi pada sisi lapangan usaha, sedangkan dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat, menurunnya transaksi perdagangan baik dalam maupun luar negeri dan penurunan investasi.

Kinerja ekonomi yang melemah berdampak terhadap situasi ketenagakerjaan. Dalam setahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat naik menjadi 10,46 persen pada bulan Agustus 2020 dari 8,05 persen pada tahun 2019. Penduduk yang bekerja sebanyak 21,68 juta orang, berkurang 380 ribu orang dari bulan Agustus 2019. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur naik sebesar 4,79 persen, dan persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 4,82 persen. Terdapat 6,36 juta orang yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi COVID-19 atau 16,96 persen. Angka ini terdiri dari pengangguran karena

pandemi COVID-19 sebanyak 700 ribu orang, Bukan Angkatan Kerja karena pandemi COVID-19 sebanyak 160 ribu orang, sementara tidak bekerja karena pandemi COVID-19 sebanyak 400 ribu orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena pandemi COVID-19 sebanyak 5,1 juta orang (BPS Jawa Barat, rilis Februari 2021).

Guna menanggulangi permasalahan mendasar yang terkait dengan pengangguran dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dibanding pertumbuhan serapan tenaga kerja yang mengakibatkan jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lebih tinggi di banding rata-rata nasional dan didominasi oleh lulusan SMK/SMA. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berupaya mendorong pengembangan *link and match* antara pendidikan vokasi dan SMK dengan dunia industri melalui: a) pembuatan kurikulum bersama yang disinkronisasikan dengan kebutuhan industri; b) penyediaan guru atau dosen tamu dari pihak industri; c) praktek magang siswa SMK atau mahasiswa vokasi yang dirancang bersama dengan pihak industri; d) sertifikasi kompetensi lulusan pendidikan vokasi; dan e) kerja sama dengan pihak industri (MoU) untuk berkomitmen menyerap lulusan SMK atau vokasi.

Indikator makro lain yang juga menunjukkan penurunan kinerja pembangunan makro, yaitu tingkat kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada September 2020 menunjukkan pengaruh dampak pandemi COVID-19 dimana jumlah dan tingkat kemiskinan meningkat dibanding Maret 2020. Upaya penanggulangan kemiskinan mengalami kemunduran 4 (empat) tahun ke belakang. Hal ini ditunjukkan dari jumlah penduduk miskin pada September 2020 sedikit lebih banyak dibandingkan September 2019. Pada periode Tahun 2015-2019, rata-rata penurunan kemiskinan sebesar 277.414 orang atau setara dengan 6,84 persen per tahun. Dampak Pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin di perkotaan bertambah sebanyak 739.000 atau setara 32,61 persen sementara di perdesaan bertambah sebanyak 73.000 orang atau setara 6,58 persen dibandingkan dengan kondisi pada September 2019.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat juga turut terdampak pandemi COVID-19. Meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari 72,03 poin menjadi 72,09 poin pada tahun 2020, namun laju pertumbuhan IPM mengalami

perlambatan. Hal ini disebabkan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dari Rp11,152 juta menjadi Rp10,845 juta pada tahun 2020. Secara spasial, capaian IPM kabupaten/kota mempengaruhi capaian IPM Provinsi Jawa Barat, dimana terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota yang mengalami penurunan nilai IPM dibanding tahun sebelumnya dan 13 (tiga belas) kabupaten/kota lainnya mengalami perlambatan laju pertumbuhan IPM pada tahun 2020 yang disebabkan oleh penurunan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di seluruh kabupaten/kota. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, capaian IPM Provinsi Jawa Barat berada di bawah Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,77 poin, Provinsi DI Yogyakarta sebesar 79,97 poin dan Provinsi Banten sebesar 72,45 poin. Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam 5 (lima) provinsi yang mengalami peningkatan IPM, sementara Provinsi DI Yogyakarta mengalami penurunan capaian IPM dibandingkan tahun sebelumnya.

Mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran.

Penjabaran Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 7 (tujuh) tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Target indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami penyesuaian. Penyesuaian target, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Provinsi Jawa Barat ditetapkan dengan

mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional dan kemampuan Provinsi Jawa Barat dengan adanya pandemi COVID-19. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu, capaian pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan publikasi BPS.

Tabel 5.1
Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018–2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		2019		Target RPJMD				2020		Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir
			2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	Target Perubahan RPJMD	Realisasi	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,70	71,30	71,42-71,91	72,03	71,91-72,52	72,52-73,13	73,13-73,74	73,74-74,35	71,82	72,09	72,19	72,57	73,05	73,05
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,39	1,36	1,50	1,30	1,48	1,45	1,43	1,41	1,26	1,26	1,21	1,16	1,12	1,12
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,83	7,25	6,66-6,90	6,82	6,07-6,31	5,48-5,72	4,89-5,13	4,30-4,54	8,48	8,43	7,77	7,67	7,54	7,54
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,22	8,17	8,00-7,90	7,99	7,90-7,70	7,70-7,50	7,50-7,30	7,30-7,10	10,58	10,46	10,45	10,16	9,69	9,69
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,33	5,66	5,40-5,80	5,07	5,50-5,90	5,60-6,00	5,70-6,10	5,80-6,20	(-2,63)	-2,44	3,15	3,92	4,35	4,35
6	Indeks Gini	Poin	0,393	0,405	0,38-0,39	0,398	0,37-0,38	0,37-0,38	0,36-0,37	0,36-0,37	0,404	0,403	0,402	0,400	0,396	0,396
7	Pendapatan Per Kapita*	Juta Rupiah	37,20	40,30	-	43,35	-	-	-	-	41,50	41,80	44,02	46,48	49,29	49,29

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
* Indikator makro yang baru digunakan dalam Perubahan RPJMD sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

Dari 7 (tujuh) indikator makro tersebut, 3 (tiga) di antaranya, yaitu LPE, Tingkat Kemiskinan, dan TPT, sudah diarahkan untuk Provinsi Jawa Barat dalam RPJMN Tahun 2020-2023. Perbandingan arahan indikator makro RPJMN Tahun 2020-2024 untuk Provinsi Jawa Barat dengan hasil prediksi dalam perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Perbandingan Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Hasil Prediksi Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Indikator Pembangunan	Target Pembangunan dari RPJMN Tahun 2020-2024				2020		Target Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Prov. Jabar Tahun 2018-2023		
	2020	2021	2022	2023	Target Perubahan RPJMD	Realisasi	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,50	5,70	5,90	(-2,63)	-2,44	3,15	3,92	4,35
Tingkat Kemiskinan (%)	6,31	6,07	5,70	5,24	8,48	8,43	7,77	7,67	7,54
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,70	7,50	7,40	7,00	10,58	10,46	10,45	10,16	9,69

Sumber: RPJMN 2020 – 2024 dan Hasil Proyeksi Bappeda Jabar 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dengan target perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adanya perbedaan ini bukan berarti program pembangunan Provinsi Jawa Barat tidak mendukung target nasional. Penyebab utama terjadinya perbedaan target adalah waktu penetapan target. Indikator makro secara nasional ditetapkan sebelum masa pandemi COVID-19, sementara Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dilakukan di masa-masa yang belum memperlihatkan pola berakhirnya pandemi COVID-19. Untuk itu dilakukan penyesuaian proyeksi target indikator-indikator makro tersebut dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagai bentuk respon dan adaptasi perencanaan berdasarkan kondisi riil. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan penyesuaian target indikator makro pada RKP Tahun 2021 dan Rancangan APBN Tahun 2021 yang berbeda angkanya dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

Setiap tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan indikator kinerja dan target per tahun. Indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 mengalami penyesuaian berupa

penggunaan beberapa indikator makro sebagai indikator tujuan dan/atau sasaran. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan indikator makro tersebut tepat digunakan untuk mengukur kinerja tujuan dan/atau sasaran. Selain itu, dilakukan juga penambahan indikator Indeks Williamson sebagai indikator kinerja tujuan terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan pada Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Indikator tujuan dan sasaran pada masing-masing misi yang disertai target per tahun disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 5.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023

TUJUAN/SASARAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR
				2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	Target Setelah Perubahan	Realisasi	2021	2022	2023	
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
VISI: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI																	
Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban																	
1.1.	**Terwujudnya manusia yang ber-Ketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial**		**Indeks Demokrasi (poin)**	**68,78**	**73,91**	**68,79 - 70,78**	**69,09)**	**70,79 - 71,78**	**71, 79 - 72,78**	**72,79 - 73,78**	**73,79 - 74,78**	**70,70**	**69,09****	**70,79**	**71,79**	**72,79**	**72,79**
1.1.1.	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	68,50	68,70	68,60 – 69,00	68,50	69,10 - 69,50	69,60 – 70,00	70,10 - 70,50	70,60 – 71,00	68,10	68,50**	68,60	69,10	69,60	69,60
		b.	Indeks Demokrasi (poin)	68,78	65,50	68,79 - 70,78	69,09	70,79 - 71,78	71, 79 - 72,78	72,79 - 73,78	73,79 - 74,78	70,70	69,09**	70,79	71,79	72,79	72,79
Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif																	
2.1.	**Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat**	**a.**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)**	**70,69**	**71,30**	**71,42-71,91**	**72,03**	**71,91 – 72,52**	**72,52-73,13**	**73,13-73,74**	**73,74-74,35**	**71,82**	**72,09**	**72,19**	**72,57**	**73,05**	**73,05**
2.1.1.	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	a	Persentase Penduduk Miskin (persen)	7,83	7,25	6,66-6,90	6,82	6,07-6,31	5,48-5,72	4,89-5,13	4,30-4,54	8,48	8,43	7,77	7,67	7,54	7,54
		b	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	8,22	8,17	8,00-7,90	7,99	7,90-7,70	7,70-7,50	7,50-7,30	7,30-7,10	10,58	10,46	10,45	10,16	9,69	9,69
2.1.2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	a	Angka Harapan Hidup (tahun)	72,47	72,76	73,67 – 74,87	72,85	74,87 – 76,07	76,07– 77,27	77,27 – 78,47	78,47 – 79,67	72,82	73,04	73,06	73,09	73,11	73,11

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR
				2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	Target Setelah Perubahan	Realisasi	2021	2022	2023	
1		*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan																
2.1.3.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	a.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	70,04	70,20	70,34	69,48	71,00	72,00	72,30	73,25	69,48	69,48**	69,60	69,80	70,30	70,30
		b.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	89,18	89,19	89,32	89,26	89,82	90,50	91,00	92,00	89,26	89,26**	89,30	89,42	90,02	90,02
2.1.4.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	a.	Rata–Rata lama sekolah (tahun)	8,14	8,18	8,28	8,37	8,39	8,49	8,60	8,70	8,35	8,55	8,58	8,60	8,64	8,64
		b	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,42	12,88	13,15	12,48	13.39	13.64	13,89	14,14	12,20	12,50	12,52	12,54	12,56	12,56
2.1.5.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga, dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	a.	Indeks Pembangunan Pemuda (poin)	46,33	49,00	53,63	50,00**	56,31	59,13	62,09	65,19	49,00	50,00**	50,00	52,00	54,00	54,00
2.2.	**Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram berbasiskan kearifan dan nilai budaya lokal**	**a.**	**Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (persen)**	**N/A**	**N/A**	**16,63**	**17,43**	**18,65**	**20,72**	**21,83**	**22,16**	**8,07**	**37,69**	**19,56**	**24,89**	**24,21**	**24,21**
2.2.1.	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan	a.	Persentase Pemajuan Kebudayaan	N/A	N/A	16,63	17,43	18,65	20,72	21,83	22,16	8,07	37,69	19,56	24,89	24,21	24,21

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR
				2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	Target Setelah Perubahan	Realisasi	2021	2022	2023	
1		*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	kebudayaan lokal		Jawa Barat (persen)														
2.2.2.	Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	a.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (poin)	69,58	69,61	70,00-71,00	77,50	70,00-71,00	71,00-73,50	71,00-73,50	73,60-76,00	70,00	88,40	72,00	74,00	75,00	75,00
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah																	
3.1.	**Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan**		**Indeks Williamson (poin)**	**0,678**	**0,673**	**-**	**0,665**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,664**	**0,692**	**0,659**	**0,655**	**0,650**	**0,650**
3.1.1.	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	a.	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	1.155	1.231	1.300	1302	1.340	1.386	1.447	1.503	1.000	1.146,6	1.050	1.100	1.150	1.150
3.1.2.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a.	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (persen)	40,90	40,90-41,00	41,00 – 43,00	46,13	44,00 – 46,00	47,00 – 49,00	50,00 – 52,00	53,00-55,00	38,00	39,06	41,00	44,00	47,00	47,00
3.1.3.	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a.	Indeks Desa Membangun (poin)	0,64	0,64	0,65	0,67	0,66	0,67	0,68	0,69	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,72

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR
				2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	Target Setelah Perubahan	Realisasi	2021	2022	2023	
1		*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
3.1.4.	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan	a.	Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (usulan)	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	0	1	2	6
3.2.	**Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**a.**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)**	**51,85 (metode lama)**	**49,54 (metode baru)**	**49,76**	**52,12**	**49,98**	**50,20**	**50,42**	**50,64**	**60,57**	**61,59**	**60,78**	**61,19**	**61,60**	**61,60**
3.2.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	51,85 (metode lama)	49,54 (metode baru)	49,76	52,12	49,98	50,20	50,42	50,64	60,57	61,59	60,78	61,19	61,6	61,6
		b.	Tingkat upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	2,02	2,38	2,80	3,85	3,92	5,87	7,11	7,72	3,82	3,87	4,29	4,75	5,22	5,22
		c.	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (persen)	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	50,60	52,28	51,70	52,80	53,90	53,90
3.2.2.	Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	a.	Indeks Penggunaan Air (poin)	N/A	N/A	1,1923	1,1920	1,191	1,1834	1,1822	1,1811	1,1927	1,1927	1,1922	1,1912	1,1902	1,1902
3.2.3.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (poin)	166	166	165	152,13	164	163	162	161	150,45	152,13**	149,00	147,00	144,00	144,00
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.																	
4.1.	**Terwujudnya pertumbuhan**	**a.**	**Laju Pertumbuhan**	**5,33**	**5,66**	**5,40-5,80**	**5,07**	**5,5-5,9**	**5,6-6,0**	**5,70-6,10**	**5,80-6,20**	**(-2,63)**	**-2,44**	**3,15**	**3,92**	**4,35**	**4,35**

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR
				2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	Target Setelah Perubahan	Realisasi	2021	2022	2023	
1		*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi		**Ekonomi (LPE) (persen)**														
4.1.1.	Jawa Barat sebagai daerah Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang mandiri	a.	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (poin)	85,20	81,60	82,40	85,20	83,20	84,00	84,80	85,60	83,20	84,80	84,00	84,80	85,60	85,60
		b.	Nilai Tukar Petani (NTP) (poin)	108,39	110,9	113,11	112,36	115,36	117,65	120,00	122,38	101,12	101,41	102,25	103,39	104,52	104,52
4.1.2.	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	a.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (persen)	2,71	2,85	2,30-3,00	6,84	3,01-3,15	3,16-3,30	3,31-3,45	3,46-3,50	2,65	2,85	2,91	2,99	3,08	3,08
4.1.3.	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Provinsi Jawa Barat	a.	Laju pertumbuhan Sektor Industri (persen)	5,35	6,49	2,63	4,04	2,70	2,77	2,85	2,94	(-4,49)	-4,22	2,78	3,40	3,72	3,72
		b.	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (persen)	4,55	4,19	3,00	7,51	3,00	4,00	4,00	5,00	-7,96	-7,94	3,23	4,01	4,45	4,45
4.1.4.	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (triliun rupiah)	449,37	473,00	495,4	535,72	520,17	546,18	573,48	602,15	490,16	493,96	501,52	515,31	531,87	531,87
		b.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (persen)	18,06	20,10	21,00	21,10	22,00	23,00	24,00	25,00	19,00	19,41	19,90	20,50	21,10	21,10

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN		KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR
				2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	Target Setelah Perubahan	Realisasi	2021	2022	2023	
1		*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota																	
5.1.	**Terwujudnya *good governance* dan *whole of government***	**a.**	**Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**A**	**A**	**A**	**A**	**BB (78,01)**	**BB****	**BB (78,01)**	**A (80,01)**	**A 82,01**	**A (82,01)**
5.1.1.	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel	b.	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	BB (78,01)	BB**	BB (78,01)	A (80,01)	A 82,01	A (82,01)
5.1.2.	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.	a.	Tingkat efektivitas kerjasama Daerah (persen)	N/A	N/A	50,00	61,22	60,00	70,00	80,00	90,00	54,00	73,43	56,00	58,00	62,00	62,00

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

*) Indikator baru digunakan pada periode RPJMD 2018-2023 dan belum pernah digunakan sebelumnya sehingga tidak tersedia data pada tahun tersebut.

**) Data Sementara menggunakan realisasi tahun sebelumnya (2019)

Sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 pada periode yang sama. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa walaupun periodesasi kedua dokumen rencana ini berbeda dan penetapan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebelum RPJMN, namun seluruh sasaran RPJMD dapat mendukung seluruh sasaran RPJMN. Sebuah sasaran RPJMD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab lingkupnya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan.

Adapun penjelasan keterhubungan sasaran-sasaran RPJMD dengan RPJMN, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran nasional 1: “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan” didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu “Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif” dan “Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Provinsi Jawa Barat”;
2. Sasaran nasional 2: “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu “Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi” dan “Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian”;
3. Sasaran nasional 3: “Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera” memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu: “Jawa Barat sebagai daerah Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang mandiri”; “Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa”; dan “Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan”;

4. Sasaran nasional 4: "Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan" memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu: "Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak" dan "Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih, dan akuntabel";
5. Sasaran nasional 5: "Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat "Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat";
6. Sasaran nasional 6: "Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan" memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: "Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan" dan "Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan";
7. Sasaran nasional 7: "Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda" memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: "Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak" dan "Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga, dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional";
8. Sasaran nasional 8: "Terwujudnya pengentasan kemiskinan" memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu: "Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat" dan "Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan yang mandiri";
9. Sasaran nasional 9: "Meningkatnya produktivitas dan daya saing" didukung oleh sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat: "Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan";
10. Sasaran nasional 10: "Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya" didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat: "Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal";
11. Sasaran nasional 11: "Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan" didukung

oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal”;

12. Sasaran nasional 12: “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat, yakni “Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi”;
13. Sasaran nasional 13: “Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat, yakni “Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi”;
14. Sasaran nasional 14: “Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu: “Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi” dan “Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak”;
15. Sasaran nasional 15: “Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat, yakni “Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan”;
16. Sasaran nasional 16: “Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik” dan “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat”;
17. Sasaran nasional 17: “Meningkatnya konektivitas wilayah” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian”;
18. Sasaran nasional 18: “Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan” didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat: “Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian”;
19. Sasaran nasional 19: “Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien” didukung oleh sasaran

RPJMD Provinsi Jawa Barat, yakni "Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok";

20. Sasaran nasional 20: "Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat: "Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel";
21. Sasaran nasional 21: "Peningkatan kualitas lingkungan hidup" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat: "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat";
22. Sasaran nasional 22: "Peningkatan ketahanan bencana dan iklim" memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: "Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana", dan "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat";
23. Sasaran nasional 23: "Pembangunan rendah karbon" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat: "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat"; dan
24. Sasaran nasional 24: "Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik" memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: "Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial"; "Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel"; dan "Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif".

Tabel 5.4
Persandingan Sasaran RPJMN dengan Sasaran RPJMD
Provinsi Jawa Barat

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S17	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
		S18	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S19	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
		S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
S3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera	S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri
		S11	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
		S12	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan
S4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel
S5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
S6	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan	S3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
		S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
		S6	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat Nasional
S8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
		S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri
S9	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S7	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S7	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi

Sasaran RPJMN		Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat	
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
		S4	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S14	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
S17	Meningkatnya konektivitas wilayah	S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
S18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
S19	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	S9	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok
S20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel
S21	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
S22	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	S15	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
S23	Pembangunan rendah karbon	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
S24	Menguatnya stabilitas polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik	S8	Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel
		S21	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif

Sumber: hasil analisis, Tahun 2020

5.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan selama masa jabatan. Prioritas pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, sepanjang tahun 2020 dihadapkan pada kondisi pendemi COVID-19, yang berdampak luas terhadap kualitas pengelolaan seluruh prioritas pembangunan daerah, yang dipicu oleh penurunan kualitas kesehatan masyarakat yang bersifat global serta implikasinya terhadap kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif serta sektor-sektor penopang di dalamnya, selain itu juga melakukan pemulihan aktivitas proses pembelajaran sekolah di Provinsi Jawa Barat dengan memperluas akses pendidikan yang makin memanfaatkan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas pendidikan vokasi yang sejalan dengan kebutuhan dunia kerja di daerah, baik pendidikan vokasi yang berorientasi pada agrobisnis maupun industri dan jasa.

Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu a. berkaitan dengan sumber daya manusia, khususnya guru dan tenaga kependidikan yang harus dapat beradaptasi dengan kondisi pembelajaran jarak jauh; b. berkaitan dengan infrastruktur pembelajaran yaitu koneksi internet dan peralatan pendukung yang digunakan oleh guru maupun siswa yang belum merata dan memadai; c. berkaitan dengan standardisasi dan kualitas manajemen sekolah dan kurikulum yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa generasi sekarang.

Sementara untuk pengelolaan pendidikan daerah akan melakukan penekanan pada penguatan kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri melalui Pengembangan Kerjasama Dual Sistem (Sekolah dan Industri) (*Link And Match*), pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri melalui peningkatan pelatihan kerja/pelatihan usaha yang sesuai dengan dunia industri (*Teaching Factory*), pengembangan SMK tematik, pengadaan alat praktik siswa sebagai penunjang *teaching factory* serta pembangunan bengkel/unit produksi penerapan SMK BLUD.

Untuk memulihkan turunnya beragam indikator makro pembangunan daerah, sejalan dengan prioritas pemulihan kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional, maka konsentrasi prioritas pembangunan daerah untuk Tahun 2021-2023, akan bertumpu pada stimulus pemulihan sektor kesehatan dasar yang memperluas kapasitas puskesmas, agar puskesmas dapat dimanfaatkan sebagai tempat pelayanan pasien COVID-19, dengan melakukan pengembangan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, melengkapi sarana prasarana/alat kesehatan yang diperlukan, meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM puskesmas serta meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas dengan melakukan akreditasi puskesmas serta fasilitasi pembangunan rumah sakit tipe D.

Demikian juga untuk mendorong pemulihan perekonomian daerah, dalam periode Tahun 2021-2023 ke depan, akan lebih mengkonsentrasikan pada penguatan perekonomian pada peningkatan daya beli masyarakat terutama kalangan menengah dan atas, pemulihan kepercayaan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perijinan di daerah, dan *government spending* pada proyek-proyek padat karya, peningkatan ekspor, serta transformasi digital pemasaran produk UMKM.

Adapun untuk membantu masyarakat yang terdampak secara langsung akibat pandemi COVID-19, masih diperlukan program jaring pengaman sosial yang dapat berupa bantuan sembako, subsidi listrik, subsidi internet, transfer uang secara *cash* atau bentuk bantuan lainnya yang disediakan pemerintah.

Dengan memperhatikan konsideran hukum dilakukannya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dampak pandemi COVID-19, serta kajian permasalahan dan isu strategis di Provinsi Jawa Barat, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023 adalah:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;

7. Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian diterjemahkan dalam arahan program-program prioritas sebagai berikut:

Tabel 5.5
Prioritas Pembangunan Daerah dan Arahan Program

NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM
1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	Melakukan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui: 1. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi/kemitraan tatakelola kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat; 2. Peningkatan pelayaan kesehatan yang efektif, aman, dan berkualitas baik; 3. Pemenuhan kebutuhan Rumah Sakit, termasuk penyediaan pusat isolasi COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan; 4. Peningkatan kompetensi, ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang ideal; 5. Peningkatan penggunaan informasi kesehatan yang andal dan tepat waktu di berbagai tingkat sistem kesehatan baik secara teratur maupun dalam keadaan darurat; 6. Peningkatan akses dan ketersediaan produk-produk medis, vaksin dan teknologi; 7. Peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat menuju 100% *Universal Health Coverage* (UHC) 8. Optimalisasi strategi preventif dan promotif, seperti digitalisasi 3T dan 5M
2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Melakukan percepatan pemulihan ekonomi melalui: 1. Peningkatan kapasitas kewirausahaan terutama bagi korban PHK; 2. Pelatihan digital marketing dan fasilitasi promosi bagi UMKM; 3. Kemudahan akses dan prosedur perizinan usaha dan permodalan; 4. Fasilitasi pengembangan ekspor; 5. Regenerasi petani dan nelayan melalui program petani milenial; 6. Pembentukan wirausaha pemula berkolaborasi dengan inkubator bisnis;

NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM
		7. Fasilitasi akses pemasaran dan pembiayaan.
3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Melakukan penguatan sistem ketahanan pangan dengan memperhatikan aspek ketersediaan, aspek akses (distribusi) dan aspek pemanfaatan, melalui: 1. Penyediaan pangan baik secara mandiri ataupun mendatangkan dari luar Jawa Barat (ekspor-impor) serta menyediakan stok cadangan pangan untuk kejadian pasca bencana; 2. Intensifikasi melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan; 3. Pemberian insentif serta mempermudah akses permodalan bagi petani dan nelayan untuk biaya produksi; 4. Mempermudah akses pasar bagi petani dan nelayan; 5. Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi; 6. Peningkatan kualitas SDM (penyuluh dan petani); 7. Penerapan *agriculture* 4.0; 8. Membangun gudang penyimpanan sesuai komoditi; 9. Merancang perubahan pola rantai pasok; 10. Stabilisasi harga pangan; 11. Optimalisasi penganekaragaman konsumsi pangan serta meningkatkan keamanan dan mutu pangan; 12. Membangun sistem informasi satu data pangan.
4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Melakukan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial melalui 1. Peningkatan bantuan tunai bagi keluarga miskin khususnya bagi yang terdampak pandemi COVID-19.
5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	A. Penguatan Sistem Pendidikan melalui: 1. Pemerataan dan penguatan tata kelola, aksesibilitas, sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu pendidikan di daerah; 2. Penguatan sistem pendidikan jarak jauh 3. Penguatan program vokasi; 4. Bantuan hukum bagi tenaga pendidik. B. Pemajuan kebudayaan untuk Pembentukan karakter melalui pemanfaatan sekolah sebagai pusat pengembangan kebudayaan
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Penguatan sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana melalui: 1. Pengembangan sistem mitigasi bencana; 2. Pemetaan (*mapping*) daerah rawan bencana;

NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM
		3. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan yang modern.
7	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	1. Digitalisasi pelayanan publik (administrasi hingga prosedur perizinan usaha); 2. Peningkatan sarana dan prasarana media digital; 3. Pelatihan digitalisasi bagi aparatur terkait.
8	Gerakan Membangun Desa	Mewujudkan desa yang mandiri, yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana desa, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	1. Peningkatan fungsi, kualitas dan kuantitas tempat peribadatan melalui pembangunan sarana dan prasarana dan penguatan tata kelola/manajemen tempat ibadah. 2. Pembentukan karakter peserta didik melalui peningkatan peran pendidikan agama dan tempat ibadah
10	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur melalui KPBU dan sumber pendanaan lainnya. 2. Pembangunan dan revitalisasi jalan provinsi, 3. Akselerasi pembangunan jalan tol dengan koordinasi multi pemangku kepentingan, 4. Pembangunan dan peningkatan jalan di perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten/kota; 5. Pembangunan jalan alternatif, jalan khusus maupun jalan lingkar di kabupaten/kota 6. Pembangunan/Peningkatan jalan baik horizontal maupun vertikal di Provinsi Jawa Barat bagian selatan, dan infrastruktur yang menghubungkan pusat ekonomi; 7. Bantuan dana untuk perbaikan/peningkatan jalan kabupaten/kota; 8. Dukungan Pembangunan transportasi berbasis rel dan transportasi massal berbasis jalan di 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Bodebek, Bandung Raya dan Cirebon 9. Pembangunan dan rehabilitasi terminal tipe B, penyediaan fasilitas lalu lintas, pemantauan lalu lintas, dan sistem pengendalian transportasi; 10. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM
		di DAS Citarum yang direplikasi untuk penanganan DAS Ciliwung, DAS Cilamaya serta Sub DAS Cileungsi dan Sub DAS Cikeas serta DAS lainnya melalui Penanganan lahan kritis, air limbah domestik, persampahan, limbah industri, limbah peternakan, limbah perikanan, pengelolaan sumber daya air, edukasi dan penegakan hukum; 11. Pengembangan kawasan pengolahan persampahan tuntas, 12. Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan kritis.
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	1. Pembangunan atau penataan destinasi dan infrastruktur pariwisata; 2. Pembenahan amenitas, atraksi dan akses pariwisata; 3. Pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal; 4. Standarisasi dan sosialisasi protokol kesehatan yang berbasis pada *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE); 5. Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif; 6. Pembangunan pusat budaya; 7. Pengembangan sentra industri ekonomi kreatif; 8. Pengembangan pengelolaan kawasan ekonomi khusus pariwisata.

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Selain pengembangan program-program prioritas di atas, juga dilakukan upaya-upaya transformasi pembangunan di Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan upaya-upaya adaptasi terhadap situasi pandemi COVID-19 melalui program-program Jawa Barat juara, meliputi pesantren juara, masjid juara, ulama juara, kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu dan anak juara, milenial juara, perguruan tinggi juara, SMK juara, transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, energi juara, nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, wirausaha juara, birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, BUMD juara, Migran Juara, Investasi Juara. Rangkaian prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 akan diterjemahkan lebih lanjut kedalam program pembangunan daerah yang disajikan pada Bab VI Perubahan RPJMD ini.

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan permasalahan daerah serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target pembangunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan serta penentuan sektor prioritas utama sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagai cara atau upaya yang ditempuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih operasional dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan periode Tahun 2018-2023 merupakan tahap pembangunan keempat dari RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, tema atau fokus pembangunan pada periode Tahun 2018-2023 adalah "*Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat*". Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD. Hal ini disajikan pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1
Posisi RPJMD Tahun 2018-2023 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD

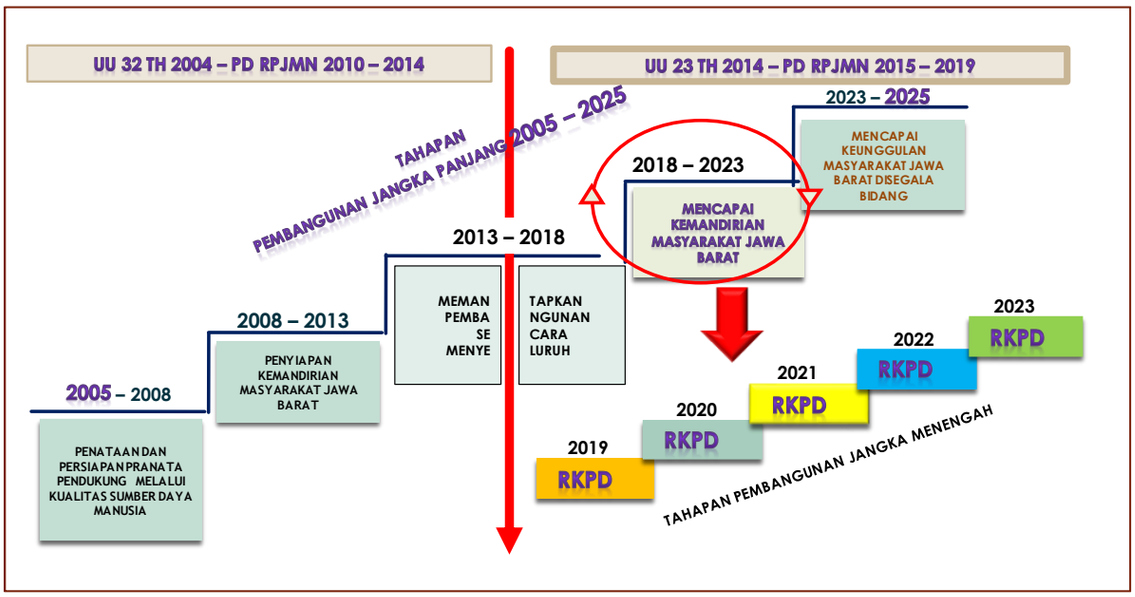

Rumusan arah kebijakan merasionalisasi pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Lingkungan itu sendiri mencakup 2 (dua) lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan

faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.

Berdasarkan perhitungan, yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah *weakness – opportunity* (WO) yaitu Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi di sisi lain menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Meskipun strategi WO merupakan alternatif strategi terbaik yang memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, namun belum tentu semua strategi-strategi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga perlu dilakukan prioritas apabila dalam pelaksanaannya secara bersama-sama menemui kendala sumberdaya (*resources constraints*).

Adapun strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
VISI: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI							
Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban							
1.1.	Terwujudnya Manusia yang Berketuhanan, Berdemokrasi, Berkebangsaan dan Berkeadilan Sosial	1.1.1.	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	1.1.1.1.	Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan pancasila dalam kehidupan masyarakat	a.	Meningkatkan fasilitasi penguatan sumberdaya dan lembaga keagamaan serta ekonomi umat
						b.	Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan dan kewaspadaan terhadap paham-paham radikalisme dan komunisme melalui penciptaan sistem kewaspadaan dini masyarakat
Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif							
2.1.	Meningkatnya Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat	2.1.1.	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	2.1.1.1.	Mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu	a.	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan/atau terdampak COVID-19
						b.	Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin dan/atau terdampak COVID-19
						c.	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
				2.1.1.1	Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha	a.	Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar
						b.	Mengembangkan inkubator bisnis
		2.1.2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	2.1.2.1	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	a.	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing melalui penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai standar WHO.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						b.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
						c.	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan melalui upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif.
		2.1.3.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	2.1.3.1.	Menguatkan peran keluarga dan kesetaraan gender	a.	Meningkatkan ketahanan keluarga serta peran dan perlindungan perempuan dan anak
		2.1.4.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	2.1.4.1.	Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau	a.	Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah melalui pembentukan *center of excellence* di setiap kabupaten/kota dan pengembangan SMK yang relevan di kawasan metropolitan
						b.	Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi
						c.	Pemberlakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) penyelenggaraan pendidikan melalui pendidikan jarak jauh, penyediaan *e-book* gratis di portal pemerintah dengan ditopang kehandalan infrastruktur jaringan TI
						d.	Meningkatkan minat baca masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital
		2.1.5.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga jawa barat di tingkat nasional	2.1.5.1.	Meningkatkan peran *stakeholder* pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	a.	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
						b.	Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat
						c.	Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
2.2.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Tertib dan Tentram Berbasiskan Kearifan Lokal dan Seni Budaya Daerah	2.2.1.	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	2.2.1.1.	Melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan Jawa Barat	a.	Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal
						b.	Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan
		2.2.2	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial	2.2.2.1	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat	a.	Mengembangkan fasilitasi peningkatan kesadaran hukum masyarakat
						b.	Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah							
3.1.	Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	3.1.1.	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	3.1.1.1.	Meningkatkan akses layanan listrik yang memenuhi standar	a.	Meningkatkan kualitas operasional instalasi tenaga listrik
						b.	Meningkatkan jangkauan pelayanan listrik untuk kepentingan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan rumah tangga hingga ke pelosok
		3.1.2.	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	3.1.2.1.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi	a.	Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok
						b.	Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial
				3.1.2.2.	Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal yang handal dan modern	a.	Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau dan antar moda
						b.	Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, dan ASDP serta mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut, udara dan kereta api, yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		3.1.3.	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	3.1.3.1.	Mempercepat pembangunan desa	a.	Memperkuat infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan
						b.	Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan
						c.	Memperkuat pemerintahan desa
		3.1.4.	Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan	3.1.4.1.	Optimalisasi penataan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru	a.	Mempercepat pemekaran wilayah yang memiliki potensi untuk menjadi DOB
3.2.	Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	3.2.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	3.2.1.1.	Meningkatkan pengelolaan DAS, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya	a.	Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara
						b.	Meningkatkan kualitas tutupan lahan
						c.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
				3.2.1.2.	Mengembangkan implementasi pembangunan rendah karbon	a.	Meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik
						b.	Meningkatkan upaya adaptasi perubahan iklim melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat pada sektor-sektor terdampak
				3.2.1.3.	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	a.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman
						b.	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
						c.	Meningkatkan tertib tata kelola pertanahan
		3.2.2.	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	3.2.2.1.	Meningkatkan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	a.	Meningkatkan kelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya air
						b.	Meningkatkan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian
						c.	Meningkatkan kinerja jaringan irigasi

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		3.2.3.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	3.2.3.1.	Mengurangi risiko bencana	a.	Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan							
4.1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing Serta Mengurangi Disparitas Ekonomi	4.1.1.	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	4.1.1.1.	Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat	a.	Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat Jawa Barat serta memperbaiki sistem informasi pangan
				4.1.1.2.	Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan	a.	Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.
						b.	Pengembangan kawasan klaster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
						c.	Mengembangkan unit pengelolaan hutan rakyat lestari dan meningkatkan akses pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial
		4.1.2.	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	4.1.2.1.	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata	a.	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif
						b.	Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital
		4.1.3.	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	4.1.3.1.	Meningkatkan daya saing industri	a.	Mengembangkan industri unggulan Jawa Barat, perwilayah industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri serta meningkatkan pemberdayaan industri
				4.1.3.2.	Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri	a.	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang; menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok; meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan ekspor dan menjaga neraca

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
							perdagangan; revitalisasi atau membangun pasar rakyat; serta perlindungan konsumen
						b.	Memperluas infrastruktur dan teknologi bagi peningkatan daya saing usaha ekonomi kreatif
		4.1.4.	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	4.1.4.1.	Meningkatkan investasi daerah	a.	Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (*Off Taker* dan Promosi)
						b.	Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota							
5.1.	Terwujudnya *Good Governance* dan *Whole Of Government*	5.1.1.	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel	5.1.1.1.	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	a.	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan *e-government*
						b.	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika
						c.	Pemberlakuan sistem merit secara penuh
		5.1.2	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.	5.1.2.1.	Meningkatkan kerja sama pembangunan	a.	Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar tingkat pemerintahan untuk menopang pelaksanaan kawasan metropolitan di Jawa Barat.

Sumber: Hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun.

Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yaitu *Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat*. Untuk mewujudkan tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Provinsi Jawa Barat, maka tema pembangunan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Gambar 6.2 berikut ini.

Gambar 6.2
Tema Pembangunan Lima Tahunan Provinsi Jawa Barat

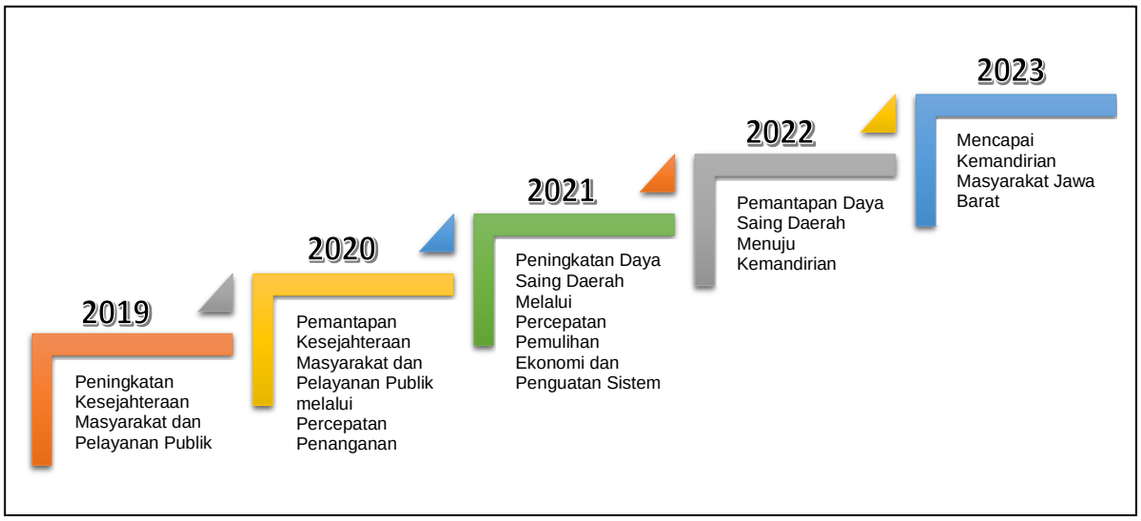

Sumber: hasil analisis, Tahun 2020

6.2 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

6.2.1 Keselarasan Penataan Ruang pada Perubahan RPJMD dengan RTRW

Perencanaan Pembangunan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran prioritas pembangunan. Pendekatan spasial (ruang) diperlukan dalam merumuskan keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi. Kebijakan pembangunan berbasis spasial (keruangan) ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang yang dirumuskan secara komprehensif memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, potensi sektoral, potensi investasi, dan struktur sistem pusat-pusat

permukiman yang sudah terbentuk secara eksisting maupun proyeksi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Amanat keterkaitan rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang menekankan perlunya integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara khusus disebutkan bahwa rencana pembangunan mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. RTRW mengarahkan lokasi dan menjadi dasar menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Barat.

Misi 3 pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah memiliki keterkaitan dan dasar kebijakan penataan ruang (spasial) yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Perubahan RPJMD perlu dirumuskan dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah, perwujudan rencana struktur ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), dan perwujudan rencana pola ruang (kawasan lindung dan budidaya).

Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai tujuan penataan ruang Provinsi Jawa Barat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia. Tujuan penataan ruang Provinsi Jawa Barat dicapai melalui sasaran penataan ruang, meliputi:

1. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45 (empat puluh lima) persen dari wilayah Provinsi Jawa Barat dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan;
2. Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
3. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan
4. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

a. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah memberi acuan fokus pengembangan dan arahan pengembangan secara kewilayahan sesuai karakteristik, potensi pengembangan (kebijakan nasional dan infrastruktur strategis eksisting), serta daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan. Kebijakan pengembangan wilayah untuk meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antarwilayah kabupaten/kota maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan. Strategi kebijakan pengembangan wilayah terdiri dari:

1. Pembagian 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan. Setiap WP ditetapkan tema, arah, dan fokus pengembangan serta sektor unggulan dalam rangka mewujudkan keseimbangan dan keterpaduan pembangunan), meliputi: WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur-Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, dan WP KK Cekungan Bandung.
2. Keterkaitan fungsional antar Wilayah Pengembangan (WP), yang ditujukan untuk meningkatkan sinergi dan integrasi pengembangan wilayah antar WP untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, meliputi:
   a) Kawasan yang mencakup WP Bodebekpunjur dan sebagian WP Purwasuka, WP KK Cekungan Bandung dan WP Ciayumajakuning, menjadi kawasan yang dikendalikan perkembangannya;
      Dikendalikan: membatasi perkembangan kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis yang dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.
   b) Kawasan yang mencakup sebagian WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung dan WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan sebagai kawasan yang didorong perkembangannya;
      Didorong: memfasilitasi berkembangnya kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang merupakan karakteristik khusus wilayah.

c) Kawasan yang meliputi sebagian WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya serta WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya;
Dibatasi: pengembangan kota-kota perlu memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik. Kerentanan terhadap risiko bencana alam (gempa, letusan gunung berapi, gerakan tanah, dan bahaya geologi lainnya); gangguan terhadap hulu DAS, menghindari alih fungsi lahan lindung dan lahan pertanian sawah produktif.

d) Kawasan yang meliputi sebagian WP Bodebekpunjur, WP KK Cekungan Bandung dan WP Sukabumi dan sekitarnya, ditetapkan menjadi kawasan yang ditingkatkan perkembangannya.
Ditingkatkan: prioritas fasilitasi pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang harus dijaga.

Pembagian WP dan keterkaitan fungsional antar WP dapat dilihat pada Gambar 6.3 dan 6.4.

Gambar 6.3
Peta Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Barat

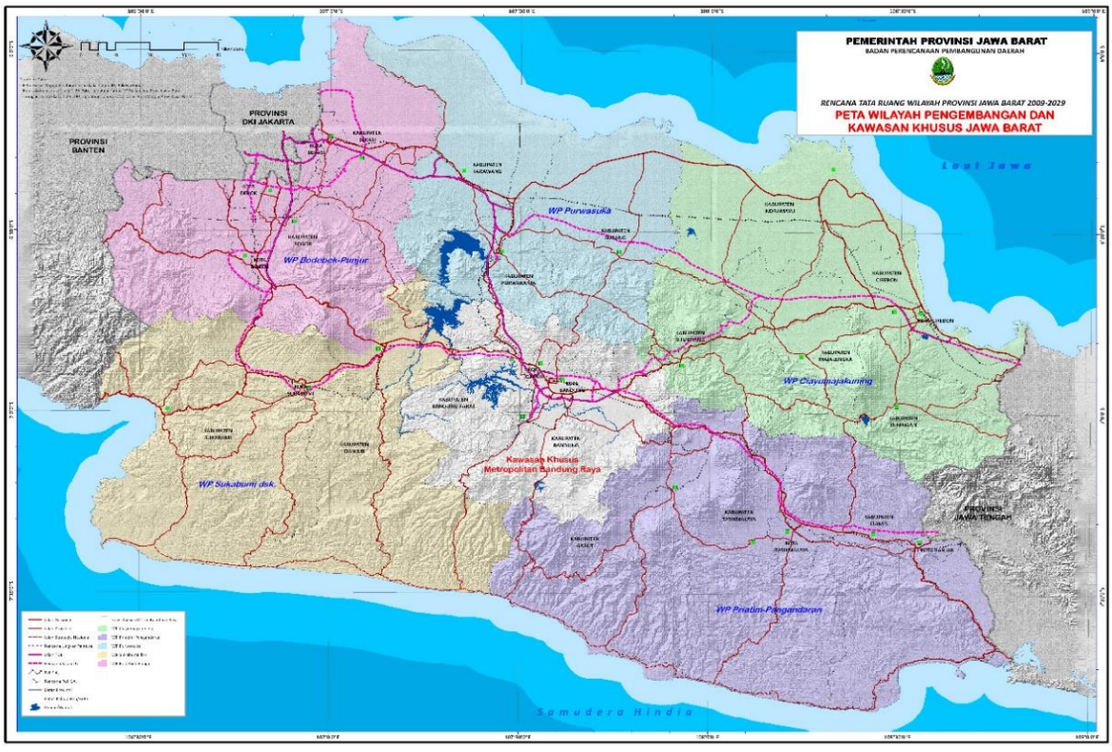

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Gambar 6.4
Peta Keterkaitan Fungsional Antar WP

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

b. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang memberi arahan pengembangan pusat-pusat kegiatan (PKN/PKW/PKL) dan pengembangan jaringan prasarana wilayah strategis, meliputi:

1. Pemantapan peran perkotaan di Provinsi Jawa Barat sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu PKN, PKW, dan PKL.
2. Pengembangan sistem kota-desa yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsi kegiatan dominannya.
3. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah utara, serta wilayah yang berada di antara wilayah utara dan selatan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan.
4. Pengendalian perkembangan sistem kota di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.
5. Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali, dan pendorong pengembangan wilayah untuk mewujudkan sistem kota di Provinsi Jawa Barat.

6. Mendorong terlaksananya peran Wilayah Pengembangan (WP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.
7. Mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan rencana tata ruang pertahanan dan keamanan.

c. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan pengembangan pola ruang memberi arahan sektor ekonomi yang dominan dalam skala provinsi, meliputi:

1. Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung:
   a) Pencapaian luas kawasan lindung sebesar 45 (empat puluh lima) persen.
   b) Menjaga kualitas kawasan lindung.
2. Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya:
   a) Mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.
   b) Mendorong pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, serta kegiatan pembangunan berkelanjutan.
   c) Mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumber daya alam, guna mendorong pertumbuhan sosial, ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

d. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan dalam melaksanakan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tertib ruang dalam pembangunan yang dilaksanakan sesuai RTRW, meliputi:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan dan penertiban berdasarkan arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan kesesuiaan kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

2. Pemberian izin pemanfaatan ruang oleh kabupaten/kota yang berdampak besar dan/atau menyangkut kepentingan nasional dan/atau provinsi, khusus untuk wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Kebijakan pengembangan wilayah, struktur ruang, pola ruang, ditindaklanjuti dalam arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program utama sebagai perwujudan 4 (empat) sasaran penataan ruang Provinsi Jawa Barat.

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang dirumuskan berdasarkan masukan seluruh pemangku kepentingan, terdiri dari indikasi program utama, lokasi, pelaksana, waktu pelaksanaan, dan sumber pembiayaan. Indikasi program memuat indikasi program utama/ indikasi kegiatan sektoral yang perlu diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah, tahunan, dan sektoral. Indikasi program, meliputi:

1. Perwujudan Struktur Ruang
    a. Pengembangan infrastruktur strategis: jaringan prasarana jalan, perhubungan, sumber daya air, energi, dan permukiman.
    b. Penyediaan sarana prasarana minimal di Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
2. Perwujudan Pola Ruang
    a. Pencapaian 45 (empat puluh lima) persen kawasan lindung:
        1) Peningkatan luasan kawasan lindung hutan;
        2) Peningkatan fungsi kawasan lindung;
        3) Rehabilitasi lahan kritis; dan
        4) Pemantapan fungsi konservasi kawasan lindung.
    b. Penyediaan ruang ketahanan pangan:
        1) Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
        2) Peningkatan jaringan irigasi;
        3) Pembangunan jaringan irigasi baru;
        4) Peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis;
        5) Pengembangan pengaturan pola tanam sesuai dengan perubahan iklim;
        6) Penyediaan prasarana sumber daya air untuk cadangan air; dan
        7) Pemeliharaan saluran irigasi

c. Pelaksanaan pengurangan resiko bencana:
   1) Mitigasi non struktural; dan
   2) Mitigasi struktural.

d. Perwujudan ruang investasi sektor perekonomian:
   1) Industri:
      a) Optimalisasi perbaikan aspek lingkungan hidup untuk industri yang berkelanjutan;
      b) Penguatan sinergi antar industri;
      c) Pembangunan infrastruktur penunjang industri;
      d) Pengembangan Kawasan Industri;
      e) Pengembangan industri pengolahan untuk mendukung komoditas unggulan Jabar Selatan; dan
      f) Pengembangan pengelolaan kawasan ekonomi khusus industri.
   2) Perdagangan:
      a) Pembangunan pusat distribusi provinsi;
      b) Peningkatan daya saing ekspor;
      c) Peningkatan ekonomi digital;
      d) *Branding* produk; dan
      e) *Market inteligent.*
   3) Pariwisata:
      a) Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata berstandar internasional;
      b) Pengembangan destinasi wisata unggulan;
      c) Pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal dan tematik;
      d) Pembangunan pusat budaya;
      e) Pengembangan pengelolaan kawasan ekonomi khusus pariwisata;
      f) Pengembangan sentra industri ekonomi kreatif;
      g) Pengembangan promosi pariwisata dengan strategi *branding;* dan
      h) Peningkatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif.
   4) Pertanian:
      a) Pengembangan agropolitan dan minapolitan;
      b) Pengembangan desa mandiri benih dan padi;

c) Pengembangan dan penataan kawasan tambak;
d) Pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan; dan
e) Pengembangan agro *technopark* dan *science technopark.*

5) Perumahan dan Permukiman:

Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik pemerintah provinsi dan pengadaan tanah.

Pengaturan pembangunan perumahan disesuaikan dengan rencana pola ruang secara efektif, serta penyediaan infrastruktur pendukung dalam upaya mengurangi dan menata kawasan kumuh meliputi penyediaan sarana dan prasarana persampahan, sanitasi, dan air bersih.

3. Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan 3 (tiga) provinsi yakni sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten, dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat merupakan etalase bagi Provinsi Jawa Barat, sebagai pintu gerbang perpindahan orang dan barang yang masuk ke wilayah Provinsi Jawa Barat. Hal ini yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan sehingga perlu dilakukan penataan dan pengelolaan baik dalam aspek sektoral maupun spasial. Melalui kerja sama pembangunan antardaerah di wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Beberapa kerja sama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu:

a. Kebijakan Wilayah Perbatasan Jawa Barat – DKI Jakarta

Kerja sama pembangunan Wilayah Perbatasan Jawa Barat – DKI Jakarta akan dikelola bersama dengan Banten melalui kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur sesuai dengan

amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.

Aspek yang menjadi program pembangunan Perkotaan Jabodetabekpunjur ini meliputi pengendalian banjir dan SDEW, air bersih, sanitasi dan persampahan, transportasi, pesisir dan reklamasi, insentif dan disinsentif, serta pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.

Selain itu, kebijakan pembangunan wilayah perbatasan Jawa Barat-DKI Jakarta dalam pemenuhan yang berfokus pada aspek:

1) Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Pelayanan Umum meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, penanggulangan bencana, pemerintahan (batas wilayah), dan lain-lainnya.
2) Daya Saing meliputi urusan pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil (KUK), perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penataan ruang, lingkungan hidup, Sumber Daya Air (SDA), perhubungan, pekerjaan umum, dan lain-lainnya..

b. Kebijakan Wilayah Perbatasan Jawa Barat – Banten

Kebijakan pembangunan wilayah perbatasan Jawa Barat – Banten berfokus pada aspek:

1) Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Pelayanan Umum meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, penanggulangan bencana, pemerintahan (batas wilayah), dan lain-lainnya.
2) Daya Saing meliputi urusan pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil (KUK), perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penataan ruang, lingkungan hidup, Sumber Daya Air (SDA), perhubungan, pekerjaan umum, dan lain-lainnya.

c. Kebijakan Wilayah Perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah

Kebijakan pembangunan wilayah perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah berfokus pada aspek:

1) Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Pelayanan Umum meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, penanggulangan bencana, pemerintahan (batas wilayah), dan lain-lainnya.
2) Daya Saing meliputi pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil (KUK), perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penataan ruang, lingkungan hidup, Sumber Daya Air (SDA), perhubungan, pekerjaan umum, dan lain-lainnya.

Selanjutnya dalam perumusan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan pendekatan spasial dirumuskan dengan memperhatikan kebijakan dan arahan pengembangan di setiap Wilayah Pengembangan (WP), dikaitkan dengan indikasi program utama perwujudan rencana struktur dan rencana pola ruang dalam RTRW, yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan/atau program perangkat daerah, serta program Jabar Juara yang menjadi agenda pembangunan Kepala Daerah dalam RPJMD. Kerangka pikir dalam merumuskan arah kebijakan kewilayahan yang diintegrasikan dengan prioritas program pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dicantumkan dalam Gambar 6.5. Arah kebijakan kewilayahan tersebut merupakan substansi pemanfaatan ruang yang idealnya perlu diintegrasikan dalam penyusunan dokumen perencanaan program pembangunan dan perencanaan anggaran provinsi hingga perencanaan program sektoral di Perangkat Daerah.

Gambar 6.5
Kerangka Pikir Perumusan Arahan Kebijakan Kewilayahan

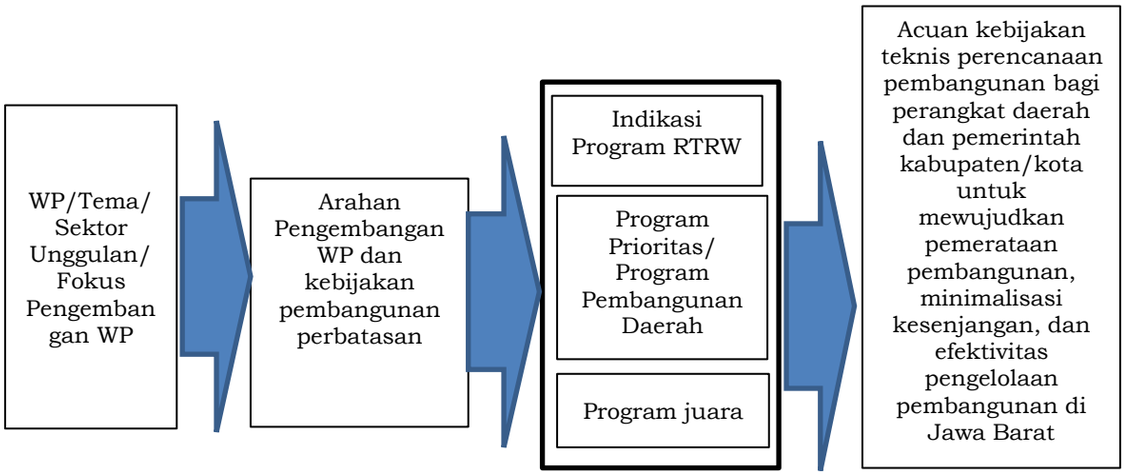

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, tahun 2020

Substansi arah kebijakan kewilayahan dicantumkan dalam tabel dan gambar peta arah kebijakan kewilayahan setiap WP yang dilihat pada Tabel 6.2, Gambar 6.6, Gambar 6.7, Gambar 6.8, Gambar 6.9, Gambar 6.10, dan Gambar 6.11.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jawa Barat

NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
1	Bodebekpunjur Tema: Mengendalikan perkembangan fisik wilayah	1. Kabupaten Bogor; 2. Kota Bogor; 3. Kabupaten Bekasi; 4. Kota Bekasi; 5. Kota Depok; 6. Kabupaten Cianjur (Puncak)	Sektor unggulan: Agroforestri, pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata Fokus pengembangan: a. Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi, diarahkan sebagai kota terdepan, berbatasan dengan ibukota negara yang merupakan bagian dari pengembangan KSN Jabodetabekpunjur untuk mendorong pengembangan PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja; b. Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, diarahkan menjadi kawasan penyangga dalam sistem PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, mendukung upaya pengendalian banjir melalui pembangunan kanal banjir dan pengelolaan kawasan pesisir serta untuk mengembangkan sektor industri ramah lingkungan dan hemat penggunaan air tanah, tidak mengakibatkan alih fungsi lahan di (KP2B), serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam untuk mendukung pembangunan di Bodebekpunjur; dan mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan kondisi jaringan irigasi (kewenangan provinsi); kawasan pesisir, Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Lindung di KSN Jabodetabekpunjur, dukungan pengembangan pariwisata melalui pembangunan jalan puncak II	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKL PKN: Kawasan Perkotaan Bodebek PKL: - Kab.Bekasi: Cikarang-Cibitung, Tarumajaya, Cibarusah, Setu, - Kab.Bogor: Cibinong, Cileungsi, Parung, Cigudeg, Caringin, Parungpanjang
				2. Mengembangkan infrastruktur strategis
				3. Mengembangkan perdagangan jasa, industri non polutan dan industri kreatif, pariwisata
				4. Investasi padat modal yang efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggi, nonpolutif
				5. Pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan konservasi, pelibatan swasta dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, peningkatan SDM lokal
				6. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani)
				7. Pengembangan kerja sama wilayah perbatasan
				8. Peningkatan kesiapsiagaan bencana

NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
2.	Purwasuka Tema: Mendorong pengembangan kawasan dengan tetap mengendalikan sawah di Pantura	1. Kabupaten Purwakarta; 2. Kabupaten Subang; dan 3. Kabupaten Karawang.	Sektor Unggulan: tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata dan pertambangan. Fokus Pengembangan: a. PKW Cikampek-Cikopo, diarahkan untuk memenuhi fungsinya sebagai PKW dengan melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan Wilayah pengaruhnya; b. Kabupaten Purwakarta, diarahkan untuk kegiatan industri nonpolutif dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, industri kreatif, pariwisata dan agroindustri, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan nonlogam; c. Kabupaten Subang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, agroindustri, kegiatan bisnis kelautan, serta kegiatan pertambangan mineral nonlogam; dan d. Kabupaten Karawang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bisnis kelautan, kegiatan agroindustri, industri nonpolutif dan nonekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, dan tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B. pengelolaan kawasan pesisir	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL PKW: PKW Cikampek-Cikopo PKL: - Kab.Purwakarta: Purwakarta - Kab. Karawang: Karawang, Cilamaya, Rengasdengklok, Teluk Jambe Barat - Kab.Subang: Pamanukan, Subang, Jalan Cagak, Pusakanagara 2. Mengembangkan infrastruktur strategis 3. Mengembangkan pertanian tanaman pangan, agroindustri, industri manufaktur non polutif dan non ekstraktif, industri kreatif dan multimedia, bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor 4. Peningkatan kesiapsiagaan bencana
3.	Ciayumajakuning Tema: Mendorong pengembangan wilayah gerbang timur Jawa Barat	1. Kabupaten Cirebon; 2. Kota Cirebon; 3. Kabupaten Indramayu; 4. Kabupaten Majalengka; 5. Kabupaten Kuningan; dan 6. sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang	Sektor Unggulan: tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan dan pariwisata Fokus Pengembangan: a. Kota Cirebon, diarahkan sebagai kawasan perkotaan inti dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya, serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL PKN: Cirebon PKW: - Indramayu - Kadipaten

NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
			perdagangan, di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi; b. Kabupaten Cirebon, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor bisnis kelautan, tanaman pangan dan hortikultura, pariwisata dan kegiatan pertambangan mineral; industri kreatif, pengembangan kota kreatif berbasis *folklore* (batik Trusmi), c. Kabupaten Indramayu, diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan utama tanaman pangan dan hortikultura, bisnis perikanan dan kelautan, industri yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada lahan pangan, pertambangan terutama minyak, gas, agribisnis dan agroindustri; d. Kabupaten Majalengka, diarahkan menjadi lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan *Aerocity* di Kertajati, daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, dan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi, pertambangan mineral serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi di PKW Kadipaten; e. Kabupaten Kuningan, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana pendukung, serta diarahkan untuk menampung kegiatan sektor tanaman pangan dan hortikultura, wisata alam, agroindustri, dan daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, termasuk perlindungan sumber air; dan f. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana, untuk kegiatan utama tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, pariwisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta kegiatan pertambangan mineral,	PKL: - Kab.Cirebon: Sumber, Arjawinangun, Lemahabang, Ciledug, Palimanan - Kab.Indramayu: Jatibarang, Losarang, Gantar-Terisi, Tukdana, Karangampel, Haurgeulis - Kab.Majalengka: Majalengka, Kertajati, Talaga, Rajagaluh - Kab.Kuningan: Kuningan, Cilimus, Luragung, Ciawigebang, Mandirancan - Kab.Sumedang: Sumedang, Conggeang-Tomo,Wado 2. Mengembangkan infrastruktur strategis 3. Pola ruang PKN dalam bentuk ring (Ring 1: Jasa perdagangan dan transportasi, Ring 2: Industri berbasis lokal, Ring 3: Penyedia bahan baku) 4. Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam 5. Mendorong agribisnis yang didukung sektor industri, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di kawasan pinggiran 6. Mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak 7. Pengendalian perikanan tangkap di kawasan pesisir 8. Pengembangan kerja sama wilayah 9. Peningkatan kesiapsiagaan bencana

NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
4.	Priangan Timur dan Pangandaran Tema: Mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran, serta pengembangan secara terbatas kawasan Daerah bagian Selatan	1. Kabupaten Garut; 2. Kabupaten Tasikmalaya; 3. Kota Tasikmalaya; 4. Kabupaten Ciamis; 5. Kota Banjar; dan 6. Kabupaten Pangandaran.	Sektor Unggulan: kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, industri kerajinan dan pertambangan mineral Fokus Pengembangan: a. Kota Tasikmalaya, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa; b. Kabupaten Tasikmalaya, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan nonlogam; c. Kabupaten Garut, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura dan agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, wisata alam dan minat khusus, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan nonlogam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta kegiatan wisata minat khusus di PKL Rancabuaya; d. Kabupaten Ciamis, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta kegiatan pertambangan mineral nonlogam; e. Kota Banjar, diarahkan sebagai PKL dengan sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan, perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang Daerah berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; dan f. Kabupaten Pangandaran, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan dan hortikultura serta sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional.	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL PKW: - Tasikmalaya - Pangandaran PKL: - Kab.Garut: Garut, Cikajang, Pameungpeuk, Rancabuaya (Caringin-Mekarmukti-Bungbulang) - Kab.Tasikmalaya: Singaparna, Cikatomas, Ciawi, Karangnunggal - Kab.Ciamis: Ciamis, Banjarsari, Kawali, Rancah, Panjalu, Cisaga - Kota Banjar: Banjar - Kab.Pangandaran: Parigi 2. Mengembangkan infrastruktur strategis 3. Mengembangkan pariwisata Pangandaran dsk 4. Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan dengan meningkatkan akses sentra-sentra produksi 5. Pengembangan kerja sama wilayah perbatasan 6. Peningkatan kesiapsiagaan bencana
5.	Cekungan Bandung Tema: Mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi	1. Kota Bandung; 2. Kabupaten Bandung; 3. Kabupaten Bandung Barat; 4. Kota Cimahi; dan	Sektor Unggulan: tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, agroforestri, industri nonpolutif dan ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, dan PKL

NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
	pemerintahan di tingkat pusat dan daerah	5. sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.	KP2B, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Fokus Pengembangan: a. Kota Bandung, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata; b. Kabupaten Bandung, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri nonpolutif, dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, agroindustri, wisata alam, tanaman pangan dan hortikultura, dan perkebunan; c. Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri nonpolutif, dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, tanaman pangan dan hortikultura, industri kreatif dan teknologi tinggi; d. Kota Cimahi, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri nonpolutif; dan e. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, serta industri nonpolutif dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B.	PKN: Kawasan Perkotaan Bandung Raya PKL: - Kab.Bandung: Ciwidey, Pangalengan - Kab.Bandung Barat: Cikalong Wetan, Padalarang 2. Mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan 3. Mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan 4. Mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal 5. Peningkatan kesiapsiagaan bencana
6.	Sukabumi dan sekitarnya Tema: Mendorong perkembangan koridor Sukabumi Cianjur dan PKW Palabuhanratu, serta membatasi perkembangan di bagian selatan	1. Kota Sukabumi, 2. Kabupaten Sukabumi, dan 3. Sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur	Sektor unggulan: kehutanan, peternakan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan bisnis kelautan, serta pertambangan mineral, serta perikanan budidaya laut	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL PKW: - Palabuhanratu

NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
	Kabupaten Sukabumi dan Cianjur		Fokus Pengembangan: a. Kota Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan pusat agroindustri, peternakan, agropolitan, wisata agro, industri nonpolutif dan tidak mengganggu resapan air, serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Sukabumi; b. Kabupaten Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, agribisnis, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri nonpolutif dan tidak mengganggu resapan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Palabuhanratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya, pengembangan wilayah pesisir selatan melalui pengembangan wisata pantai dan minat khusus serta perikanan tangkap, serta pengembangan subzona perikanan budidaya laut khususnya budidaya lobster antara lain di perairan Sukabumi Selatan, pertambangan mineral logam dan nonlogam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi yang diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan skala nasional dan internasional di PKW Palabuhanratu; dan c. Kabupaten Cianjur, diarahkan untuk pengembangan agroindustri, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata agro, wisata alam, industri kreatif, pengembangan wilayah pesisir untuk perikanan tangkap, wisata minat khusus, kawasan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Cidaun, serta pertambangan mineral logam dan nonlogam.	- Kota Sukabumi PKL: - Kab.Sukabumi: Cibadak, Cicurug, Sagaranten, Jampangkulon - Kab.Cianjur: Cianjur, Sindangbarang, Sukanagara 2. Mengembangkan infrastruktur strategis 3. Mengembangkan agribisnis, industri nonpolutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, dan wisata minat khusus. 4. Mengembangkan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global 5. Peningkatan kesiapsiagaan bencana 6. Pengembangan kerja sama wilayah perbatasan

Sumber: Hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Gambar 6.6
Peta Arah Kebijakan Kewilayahan WP Bodebekpunjur

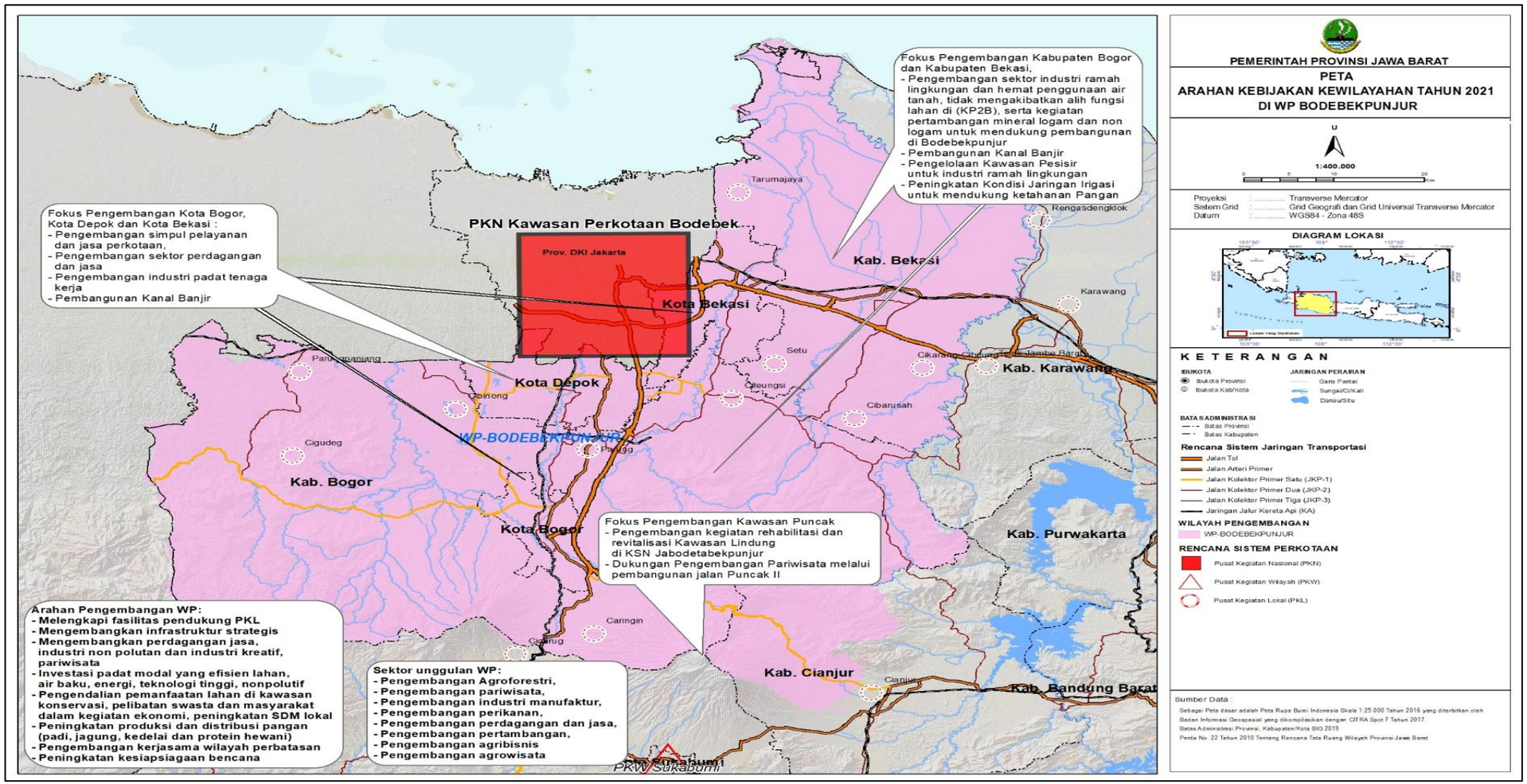

Gambar 6.7
Peta Arah Kebijakan Kewilayahan WP Purwasuka

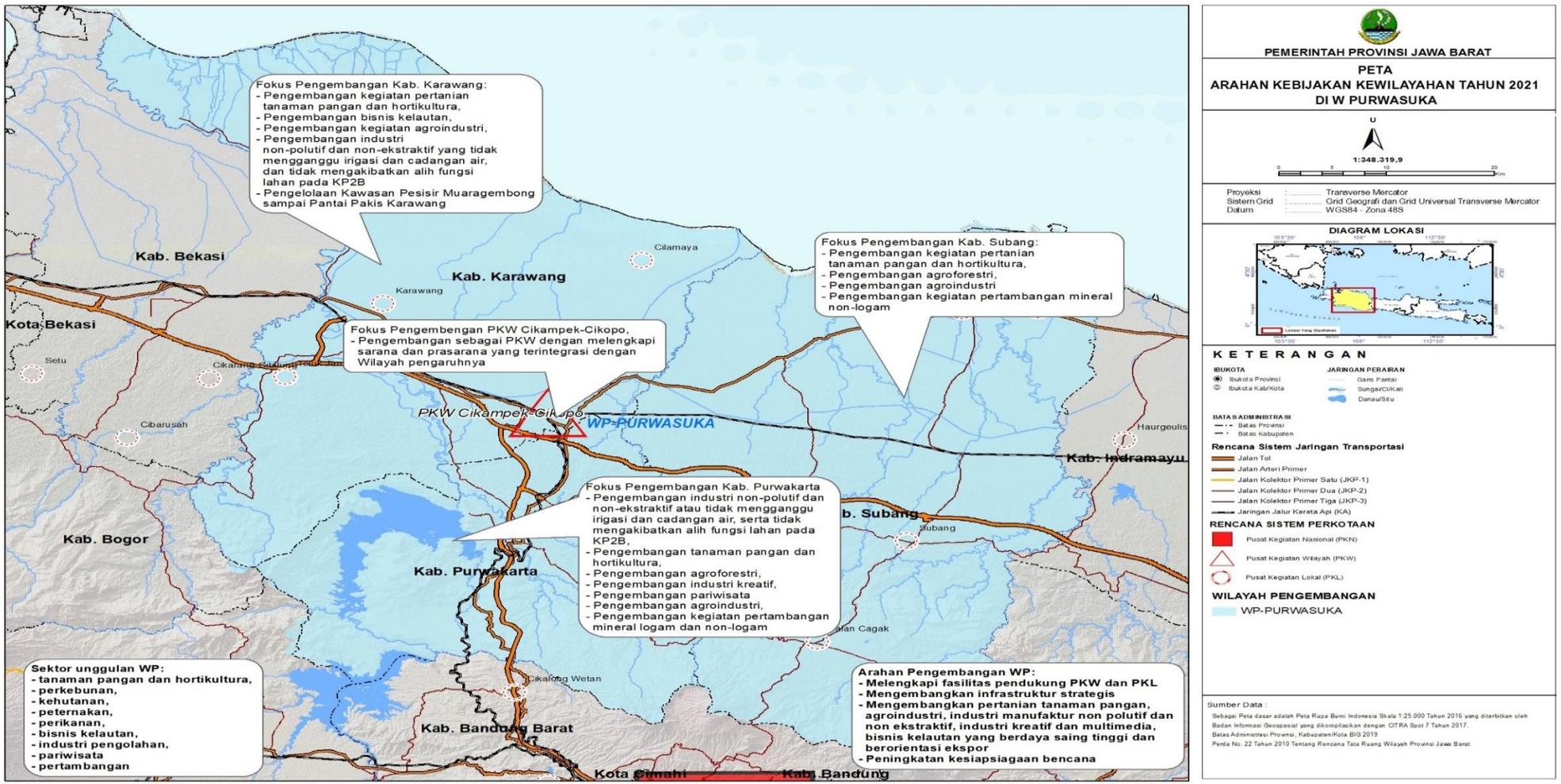

Gambar 6.8
Peta Arah Kebijakan Kewilayahan WP Ciayumajakuning

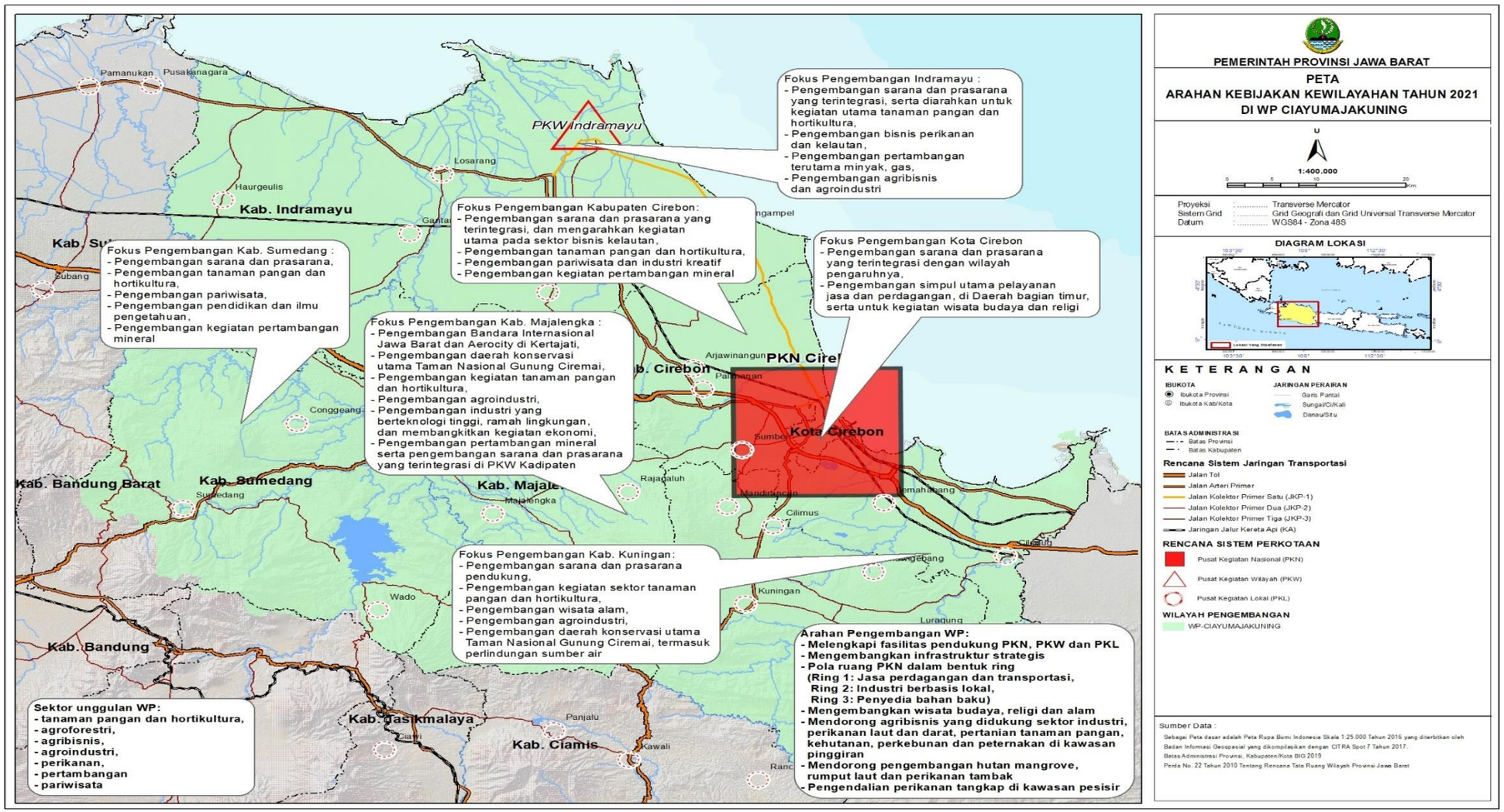

Gambar 6.9
Peta Arah Kebijakan Kewilayahan WP Priangan Timur dan Pangandaran

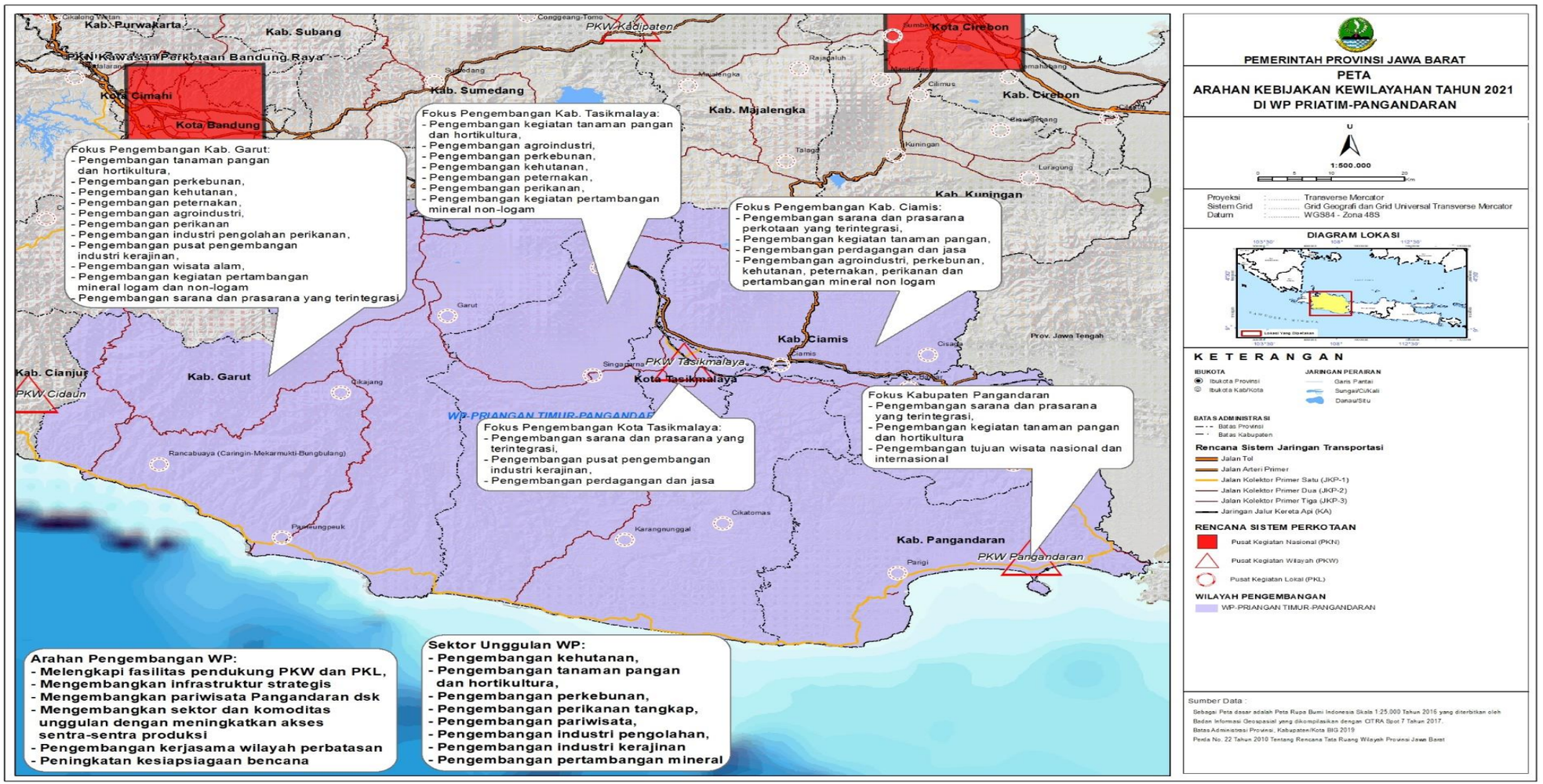

Gambar 6.10
Peta Arah Kebijakan Kewilayahan WP KK Cekungan Bandung

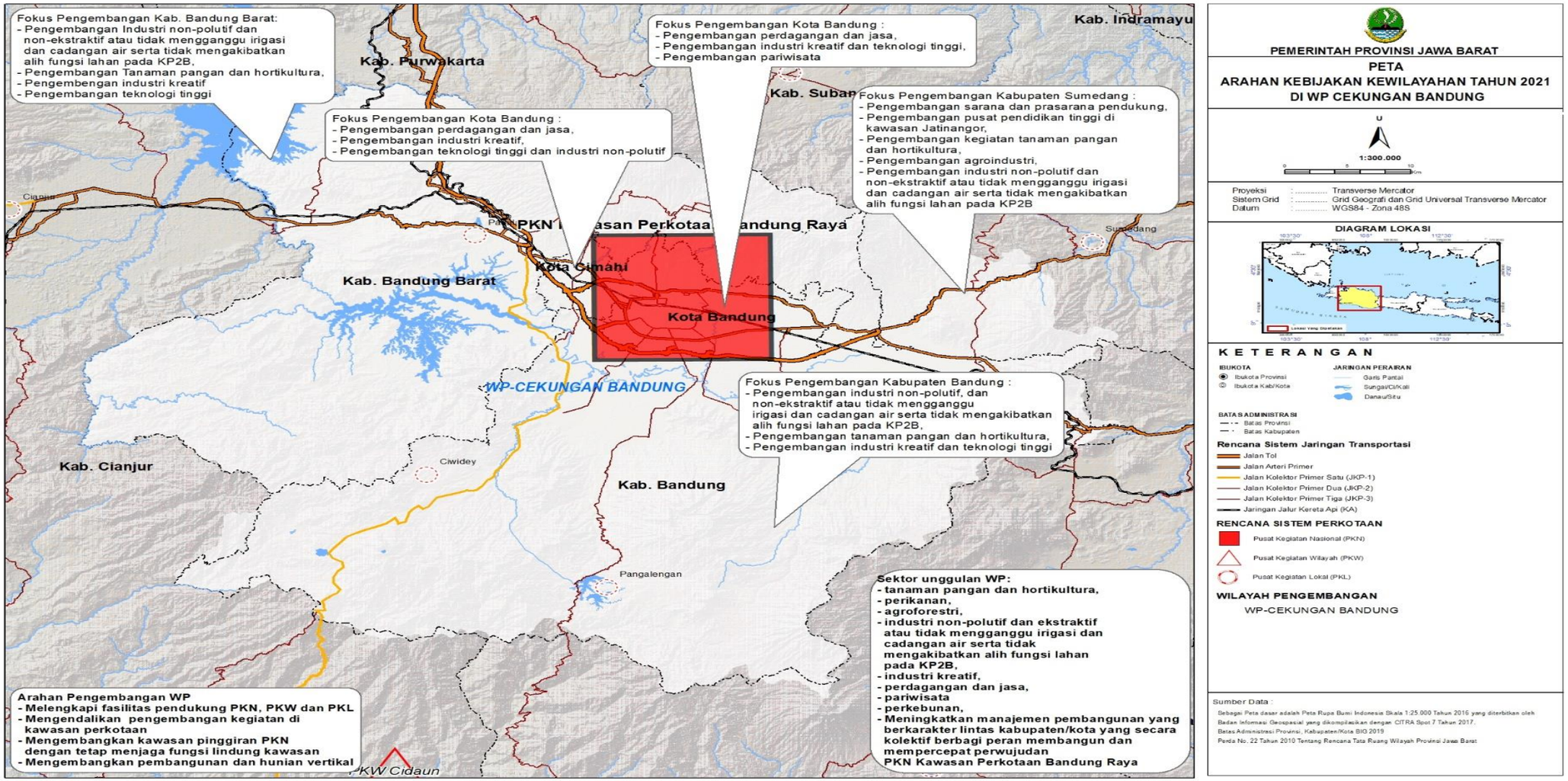

Gambar 6.11
Peta Arah Kebijakan Kewilayahan WP Sukabumi dan sekitarnya

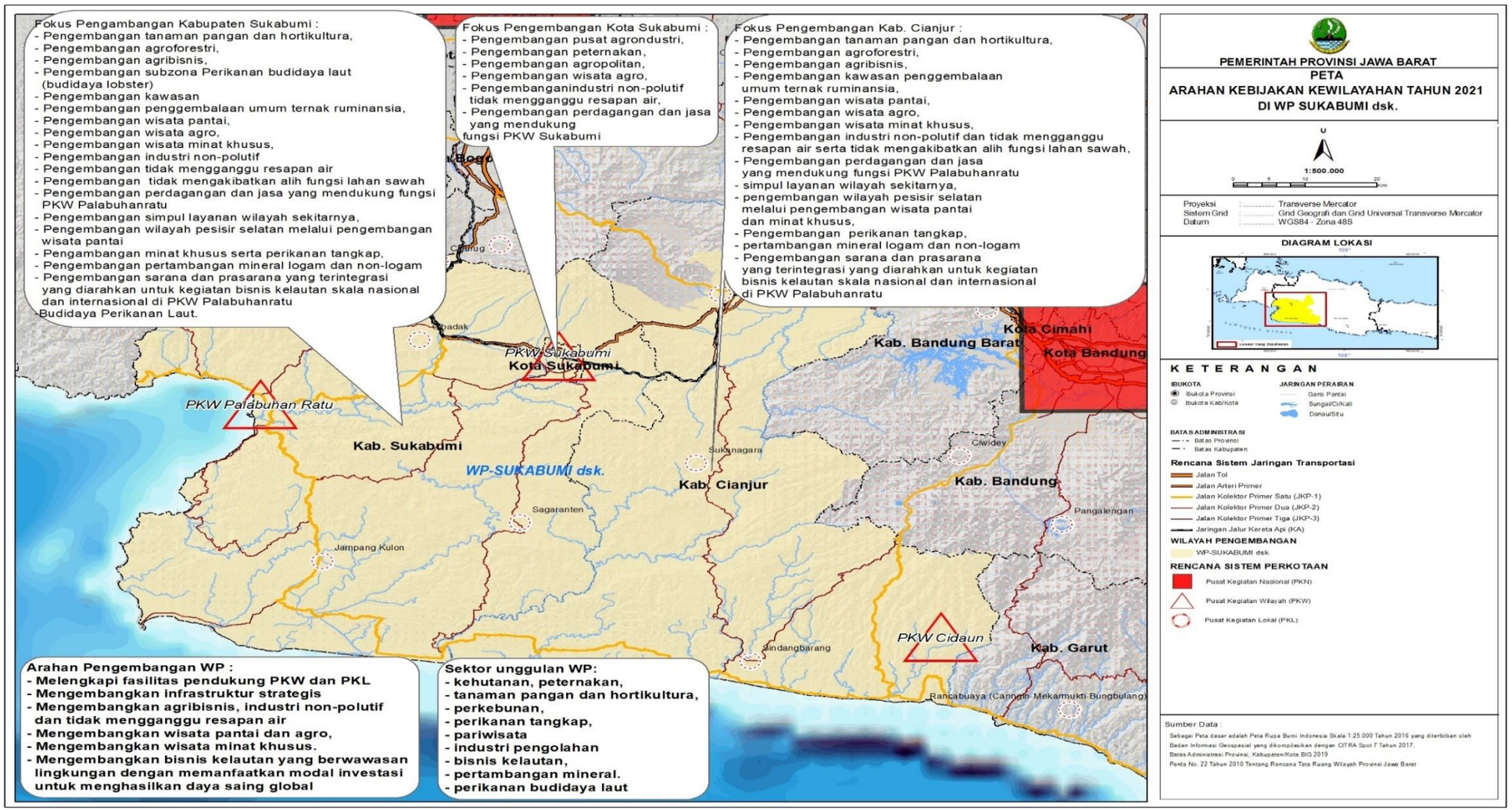

Berdasarkan kebijakan penataan ruang dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, maka kebijakan dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 diarahkan untuk:

1. Pembangunan wilayah berorientasi pada kebijakan pengembangan wilayah, mengakomodasi sektor unggulan, dan menciptakan konektivitas wilayah. Keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kelestarian fungsi lindung dan konservasi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat Provinsi Jawa Barat terutama pemenuhan terhadap kuantitas dan kualitas air bersih, kawasan hutan dan lahan pertanian pangan, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan fisik yang aman dari kerawanan bencana.
2. Pembangunan sektoral selaras dengan pembangunan wilayah, memastikan sinkronisasi dengan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang tercantum dalam RTRW dan RPJMD, mewujudkan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Pembangunan sektoral mewujudkan efektifitas pengelolaan pembangunan untuk mewujudkan fungsi pusat-pusat kegiatan (sarana dan prasarana minimal pelayanan publik), serta menerapkan kaidah konservasi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan.
3. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, yang berkolaborasi dengan seluruh *stakeholder* pembangunan Provinsi Jawa Barat.
4. Perumusan dan perwujudan konsep pengembangan dalam mengoptimalkan potensi unggulan, arah pengembangan, dan peluang investasi di 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) di Provinsi Jawa Barat dalam rangka efektifitas dan efisiensi ruang, serta pemerataan pembangunan. Perwujudan pembangunan setiap WP didorong sesuai tema pengembangan dan optimalisasi dari sektor unggulan yang berpotensi dikembangkan. Pembangunan infrastruktur strategis merupakan pendukung utama perwujudan pemerataan pembangunan, dan peluang kerja sama pembangunan dengan pihak swasta yang memiliki minat untuk berinvestasi dalam pengembangan kawasan.
5. Peningkatan tertib ruang melalui pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

6. Peningkatan pengelolaan pembangunan di kawasan perkotaan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kawasan Strategis Nasional, diataranya melalui kontribusi peran dan penyiapan pranata kelembagaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur, Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat yang terbagi menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) diselaraskan dengan kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pelaksanaan kebijakan kewilayahan nasional untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan di Provinsi Jawa Barat berlokasi di beberapa WP, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 6.3
Keterkaitan Kebijakan Kewilayahan
Provinsi Jawa Barat dengan Nasional

Wilayah Pengembangan Provinsi	Kebijakan Kewilayahan Nasional
WP Bodebekpunjur	A. Koridor Pertumbuhan (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi) B. Pengembangan Sektor Unggulan C. Pengembangan Kawasan Strategis 1. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; 2. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, yang meliputi: a. Pengembangan SMK di wilayah Jawa-Bali secara keseluruhan berjumlah 1.713 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (ekonomi kreatif, tekstil, kimia, manufaktur, otomotif, minyak, tambang, konstruksi, pariwisata, dan pertanian) c. Pengembangan BLK yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan manajer perusahaan (gedung) d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Jawa-Bali D. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Daerah Tertinggal

Wilayah Pengembangan Provinsi	Kebijakan Kewilayahan Nasional
	1. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; 2. peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 3. Penanganan *stunting* dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 20 kabupaten di Jawa Barat yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023; 4. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 4,85 persen di Jawa Barat; dan 5. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui: a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Pulau Jawa-Bali; b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; c. Peningkatan konservasi hutan; dan d. Pemantapaan pemulihan pasca bencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya. E. Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah: 1. Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten; 2. Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi. 3. Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif; 4. Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 5. Peningkatan riset dan inovasi daerah; 6. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerja sama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya 7. Peningkatan kualitas belanja daerah; 8. Pengembangan dan penguatan peran kecamatan; 9. Pengembangan kerja sama antardaerah, dan 10. Penguatan kerja sama, kemitraan dan kolaborasi multipihak. 11. Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 12. Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 13. Penataan Ruang dan Lahan

Wilayah Pengembangan Provinsi	Kebijakan Kewilayahan Nasional
	a. Peningkatan efektivitas instrument pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional; c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang; e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat; h. Pembentukan bank tanah; i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan. 14. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui: a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan; b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana. 15. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, yang meliputi: a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; b. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; c. Pertahanan luasan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan, terutama padi; d. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; e. Konservasi dan perlindungan habitat spesies kunci; f. Pengembangan energi baru terbarukan; g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; dan h. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal. F. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Jawa-Bali 1. Pembangunan KA Cepat Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung); 2. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng; 3. Penanganan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa.
WP Purwasuka	A. Koridor Pertumbuhan (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang); B. Pengembangan Sektor Unggulan; C. Pengembangan Kawasan Strategis: 1. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; 2. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan

Wilayah Pengembangan Provinsi	Kebijakan Kewilayahan Nasional
	pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, yang meliputi: a. Pengembangan SMK di wilayah Jawa-Bali secara keseluruhan berjumlah 1.713 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan; b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (ekonomi kreatif, tekstil, kimia, manufaktur, otomotif, minyak, tambang, konstruksi, pariwisata dan pertanian); c. Pengembangan BLK yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan manajer perusahaan (gedung); dan d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Jawa-Bali. D. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Daerah Tertinggal: 1. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; 2. peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 3. Penanganan *stunting* dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 20 kabupaten di Jawa Barat yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023; 4. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 4,85 persen di Jawa Barat; 5. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui: a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Pulau Jawa-Bali; b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; c. Peningkatan konservasi hutan; dan d. Pemantapaan pemulihan pasca bencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya. G. Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah: 1. Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten; 2. Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;

Wilayah Pengembangan Provinsi	Kebijakan Kewilayahan Nasional
	3. Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif; 4. Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 5. Peningkatan riset dan inovasi daerah; 6. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerja sama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya; 7. Peningkatan kualitas belanja daerah; 8. Pengembangan dan penguatan peran kecamatan; 9. Pengembangan kerja sama antardaerah; 10. Penguatan kerja sama, kemitraan dan kolaborasi multipihak; 11. Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat; 12. Penataan Ruang dan Lahan: a. Peningkatan efektivitas instrument pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional; c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang; e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat; h. Pembentukan bank tanah; i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan. 13. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui: a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan; b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana. 14. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, yang meliputi: a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; b. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; c. Pertahanan luasan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan, terutama padi; d. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; e. Konservasi dan perlindungan habitat spesies kunci;

Wilayah Pengembangan Provinsi	Kebijakan Kewilayahan Nasional
	f. Pengembangan energi baru terbarukan; g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; dan h. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal. H. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Jawa-Bali: 1. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng; dan 2. Penangangan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa.
WP Cekungan Bandung	A. Koridor Pertumbuhan (Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kab. Sumedang); B. Koridor Pemerataan (Kab. Bandung); C. Pengembangan Sektor Unggulan; D. Pengembangan Kawasan Strategis: 1. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; 2. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, yang meliputi: a. Pengembangan SMK di wilayah Jawa-Bali secara keseluruhan berjumlah 1.713 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan; b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di perguruan tinggi yang mendukung sektor industry (ekonomi kreatif, tekstil, kimia, manufaktur, otomotif, minyak, tambang, konstruksi, pariwisata dan pertanian); c. Pengembangan BLK yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan manajer perusahaan (gedung); dan d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Jawa-Bali. E. Pengembangan Kawasan Perkotaan: 1. Pengembangan kawasan perkotaan, melalui peningkatan kualitas; dan 2. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkotaan multimoda di Wilayah Metropolitan Cekungan Bandung melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan. I. Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah: 1. Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten; 2. Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi; 3. Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif; 4. Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 5. Peningkatan riset dan inovasi daerah; 6. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerja sama pemerintah

Wilayah Pengembangan Provinsi	Kebijakan Kewilayahan Nasional
	dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya; 7. Peningkatan kualitas belanja daerah; 8. Pengembangan dan penguatan peran kecamatan; 9. Pengembangan kerja sama antardaerah; dan 10. Penguatan kerja sama, kemitraan dan kolaborasi multipihak. 11. Penataan Ruang dan Lahan: a. Peningkatan efektivitas instrument pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional; c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang; e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat; h. Pembentukan bank tanah; i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan. 12. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui: a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan; b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana. 13. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, yang meliputi: a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; b. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; c. Pertahanan luasan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan, terutama padi; d. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; e. Konservasi dan perlindungan habitat spesies kunci; f. Pengembangan energi baru terbarukan; g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; dan h. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal. F. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Daerah Tertinggal: 1. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta

Wilayah Pengembangan Provinsi	Kebijakan Kewilayahan Nasional
	pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; 2. peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 3. Penanganan *stunting* dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 20 kabupaten di Jawa Barat yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023; 4. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 4,85 persen di Jawa Barat; 5. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui: a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Pulau Jawa-Bali; b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; c. Peningkatan konservasi hutan; dan d. Pemantapaan pemulihan pascabencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya. G. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*): 1. Pembangunan KA Cepat Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung); 2. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Metropolitan (Bandung); 3. Pembangunan Rumah Susun Perkotaan; dan 4. Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis Citarum.
WP Ciayumajakuning	A. Koridor Pertumbuhan (Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan); B. Pengembangan Sektor Unggulan; C. Pengembangan Kawasan Strategis: 1. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; 2. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, yang meliputi: a. Pengembangan SMK di wilayah Jawa-Bali secara keseluruhan berjumlah 1.713 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan; b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (ekonomi kreatif, tekstil, kimia, manufaktur, otomotif, minyak, tambang, konstruksi, pariwisata dan pertanian); c. Pengembangan BLK yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum

Wilayah Pengembangan Provinsi	Kebijakan Kewilayahan Nasional
	perdagangan dan manajer perusahaan (gedung); dan d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Jawa-Bali. D. Pengembangan Kawasan Perkotaan: 1. Pengembangan kawasan perkotaan, melalui peningkatan kualitas serta pengembangan Cirebon. E. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Daerah Tertinggal: 1. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; 2. peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 3. Penanganan *stunting* dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 20 kabupaten di Jawa Barat yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023; 4. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 4,85 persen di Jawa Barat; 5. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui: a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Pulau Jawa-Bali; b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; c. Peningkatan konservasi hutan; dan d. Pemantapaan pemulihan pasca bencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya. F. Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah: 1. Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten; 2. Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi; 3. Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif; 4. Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 5. Peningkatan riset dan inovasi daerah; 6. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerja sama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya; 7. Peningkatan kualitas belanja daerah; 8. Pengembangan dan penguatan peran kecamatan; 9. Pengembangan kerja sama antardaerah, dan

Wilayah Pengembangan Provinsi	Kebijakan Kewilayahan Nasional
	10. Penguatan kerja sama, kemitraan dan kolaborasi multipihak. 11. Penataan Ruang dan Lahan: a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional; c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang; e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat; h. Pembentukan bank tanah; i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan. 12. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui: a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan; b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana. 13. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, yang meliputi: a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; b. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; c. Pertahanan luasan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan, terutama padi; d. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; e. Konservasi dan perlindungan habitat spesies kunci; f. Pengembangan energi baru terbarukan; g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; dan h. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal. G. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*): 1. Pembangunan Rumah Susun Perkotaan; dan 2. Revitalisasi Kilang Minyak Balongan.
WP Priangan Timur - Pangandaran	A. Koridor Pemerataan (Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar); B. Pengembangan Sektor Unggulan; C. Pengembangan Kawasan Strategis: 1. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; 2. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan

Wilayah Pengembangan Provinsi	Kebijakan Kewilayahan Nasional
	pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, yang meliputi: a. Pengembangan SMK di wilayah Jawa-Bali secara keseluruhan berjumlah 1.713 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan; b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (ekonomi kreatif, tekstil, kimia, manufaktur, otomotif, minyak, tambang, konstruksi, pariwisata dan pertanian); c. Pengembangan BLK yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan manajer perusahaan (gedung); dan d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Jawa-Bali. D. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Daerah Tertinggal: 1. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; 2. peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 3. Penanganan *stunting* dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 20 kabupaten di Jawa Barat yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023; 4. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 4,85 persen di Jawa Barat; 5. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui: a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Pulau Jawa-Bali; b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; c. Peningkatan konservasi hutan; dan d. Pemantapaan pemulihan pascabencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya. E. Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah: 1. Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten; 2. Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;

Wilayah Pengembangan Provinsi	Kebijakan Kewilayahan Nasional
	3. Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif; 4. Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 5. Peningkatan riset dan inovasi daerah; 6. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerja sama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya; 7. Peningkatan kualitas belanja daerah; 8. Pengembangan dan penguatan peran kecamatan; 9. Pengembangan kerja sama antardaerah, dan 10. Penguatan kerja sama, kemitraan dan kolaborasi multipihak. 11. Penataan Ruang dan Lahan: a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional; c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang; e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat; h. Pembentukan bank tanah; i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan. 12. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui: a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan; b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana. 13. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, yang meliputi: a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; b. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; c. Pertahanan luasan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan, terutama padi; d. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; e. Konservasi dan perlindungan habitat spesies kunci; f. Pengembangan energi baru terbarukan; g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; dan

Wilayah Pengembangan Provinsi	Kebijakan Kewilayahan Nasional
	h. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal. F. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*): 1. Pembangunan Rumah Susun Perkotaan; dan 2. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng.
WP Sukabumi dan sekitarnya	A. Koridor Pemerataan (Kab. Sukabumi); B. Pengembangan Sektor Unggulan; C. Pengembangan Kawasan Strategis: 1. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; 2. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, yang meliputi: a. Pengembangan SMK di wilayah Jawa-Bali secara keseluruhan berjumlah 1.713 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan; b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (ekonomi kreatif, tekstil, kimia, manufaktur, otomotif, minyak, tambang, konstruksi, pariwisata dan pertanian); c. Pengembangan BLK yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan manajer perusahaan (gedung); dan d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Jawa-Bali. D. Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan perkotaan, melalui peningkatan kualitas serta pengembangan Kota Sukabumi. E. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Daerah Tertinggal: 1. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 2. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Sukabumi; 3. Penanganan *stunting* dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 20 kabupaten di Jawa Barat yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke

Wilayah Pengembangan Provinsi	Kebijakan Kewilayahan Nasional
	seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023; 4. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 4,85 persen di Jawa Barat; 5. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui: a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Pulau Jawa-Bali; b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; c. Peningkatan konservasi hutan; dan d. Pemantapaan pemulihan pasca bencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya. F. Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah: 1. Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten; 2. Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi; 3. Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif; 4. Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 5. Peningkatan riset dan inovasi daerah; 6. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerja sama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya; 7. Peningkatan kualitas belanja daerah; 8. Pengembangan dan penguatan peran kecamatan; 9. Pengembangan kerja sama antardaerah, dan 10. Penguatan kerja sama, kemitraan dan kolaborasi multipihak. 11. Penataan Ruang dan Lahan: a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional; c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang; e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat; h. Pembentukan bank tanah; i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan. 12. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui: a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;

Wilayah Pengembangan Provinsi	Kebijakan Kewilayahan Nasional
	b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana. 13. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, yang meliputi: a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; b. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; c. Pertahanan luasan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan, terutama padi; d. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; e. Konservasi dan perlindungan habitat spesies kunci; f. Pengembangan energi baru terbarukan; g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; dan h. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal. G. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*): 1. Pembangunan Rumah Susun Perkotaan; dan 2. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng.

Sumber: Hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

6.2.2 Keselarasan Penataan Ruang pada Perubahan RPJMD dengan RPJMN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi pembangunan nasional. Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2020-2024), pembangunan diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai target tersebut dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, sebagaimana diuraikan di dalam RPJMN Tahun 2020- 2024, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan beberapa lokasi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, maka dilakukan keselarasan antara proyek prioritas RPJMN di Provinsi Jawa Barat dengan rencana program perangkat daerah dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil analisis, seluruh kebijakan kewilayahan yang diarahkan untuk Provinsi Jawa Barat pada RPJMN didukung dengan program perangkat daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2021 sampai dengan 2023 sesuai kewenangan pemerintah daerah provinsi. Keselarasan Program dalam Perubahan RPJMD dengan Program Prioritas RPJMN disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 6.4
Keselarasan Program Perangkat Daerah dalam Perubahan RPJMD dengan Program Prioritas dalam RPJMN

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
1.	KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis			
	Pembangunan DPP Baru Bandung-Halimun-Cileteuh			
	Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru Bandung-Halimun-Cileteuh	Kab. Bandung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar)	Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jawa Barat	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.	KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan			
	Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh			
	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Purwakarta, Kab. Kuningan, Kab. Pangandaran	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Pengembangan komoditas unggulan Kopi			
	Kawasan Kopi	Provinsi Jawa Barat, Kab. Bogor,	Program Peningkatan	Program Penyediaan dan

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
		Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Ciamis	Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Pengembangan komoditas unggulan Kelapa			
	Kawasan Kelapa	Provinsi Jawa Barat, Kab. Sumedang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Pengembangan komoditas unggulan Tebu			
	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Provinsi Jawa Barat, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Subang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Optimalisasi komoditas unggulan emas			
	Optimalisasi produksi emas		Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
	Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap			
	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya			
	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	Provinsi Jawa Barat, a.l: Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Garut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Pengembangan komoditas unggulan Garam			
	Peningkatan produksi garam	Jawa Barat	Program Pengelolaan Ruang Laut	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
3.	KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan			
	ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabekpunjur)	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur		
	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Provinsi Jawa Barat		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
	Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
	Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan *Transit Oriented Development* (TOD) di Jabodetabek (Dukungan KPBU)	Jawa Barat dan (DKI, Banten)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan *Transit Oriented Development* (TOD) di Jabodetabek (Dukungan APBN)	Jawa Barat dan (DKI, Banten)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Pengembangan integrasi simpul transportasi Jabodetabek	Jawa Barat dan (DKI, Banten)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Kota Bogor, Kab. Bogor (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Pembangunan Underpass Bulak Kapal	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
	Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Pembangunan dan Peningkatan SPAM	WM Jakarta di Provinsi Jawa Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM – Zona Air Minum Prima	Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bogor, Kab. Bekasi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM – Smart Grid Water Management	Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bogor, Kab. Bekasi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	SPALD-T Skala Kota/Regional	Kota Bekasi, Kota Depok (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	SPALD-T Skala Permukiman	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai	WM Jakarta di Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	WM Jakarta di Provinsi Jawa Barat		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Bandung (Cekungan Bandung)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang		
	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
	Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat		Program Pengelolaan Energi Terbarukan Dan Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah Regional

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan:			
	a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel (APBN)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel (KPBU)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel (APBD)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan (APBN)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan (KPBU)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan (APBD)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	c. Pembangunan Jalur Ganda dan elektrifikasi KA Kiara Condong - Cicalengka	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan APBN)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan KPBU)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar)	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	Jalan Akses Stasiun Gede Bage	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
	Pembangunan KA Ekspres Jakarta-Semarang	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Lanjutan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) (KPBU)	Jakarta, Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Pusat Pengembangan Keahlian/ Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Jalan Tol Non Trans Jawa	Kota Bandung, Kab. Bandung (Provinsi Jawa Barat)	-	Program Penyelenggaraan Jalan
	Jalan Tol Non Trans Jawa	Kab. Bandung, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
	Jalan Tol Non Trans Jawa	Kab. Bandung, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
	Pembangunan Fly Over Kopo	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Provinsi Jawa Barat	Program Pengembangan Perumahan	Program Peningkaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	-	Program Peningkaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	-	Program Peningkaan Prasarana, saranan dan Utilitas Umum (PSU)
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
	Pembangunan dan Peningkatan SPAM	WM Bandung (lingkup pelayanan), Provinsi Jawa Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
			Handal dan Terintegrasi	
	Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	SPALD-T Skala Kota/Regional	Kota Bandung, Kab. Bandung (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	SPALD-T Skala Permukiman	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	-	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Jawa Barat)	Kota Sukabumi, Kota Cirebon		
	Jalan Tol Non Trans Jawa	Kota Bogor, Kab. Bogor (Provinsi Jawa Barat)	-	Program Penyelenggaraan Jalan
	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi;	Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan	Program Pengelolaan Perkeretaapian

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)		Transportasi Perkeretaapian	
	Pembangunan Bandara Sukabumi	Provinsi Jawa Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	-
	SPALD-T Skala Permukiman	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
4.	KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi			
	Pembangunan Desa Terpadu	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			2. Bina Pemerintahan Desa	
	Desa Wisata (DEWI)	DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Desa Digital (P3PD)	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur,	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
		Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		Masyarakat Hukum Adat
	Penetapan Batas Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang,	Bina Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
		Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Pendampingan pada 74.957 Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran,	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
		Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		
	Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Konvergensi Pencegahan *Stunting* di Desa	Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Subang, Karawang, Bandung Barat, Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	Kab. Sukabumi	1. Program Pengembangan Pariwisata	
			2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	
			3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			4. Program Ketenagalistrikan	
	Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Kab. Sukabumi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kab. Sukabumi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Penerapan *Sustainable Tourism Practices* Di Destinasi Utama dan Prioritas	Kab. Sukabumi	Program Pengembangan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Kab. Sukabumi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Sukabumi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri	Kab. Sukabumi	Program Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
	Sertifikat Hak Atas Tanah	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Program Pengelolaan Izin Lokasi
5.	KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah			
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat			
	Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	**Lokasi**	**Program**	**Program**
	Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Pusat (alokasi Kementerian)		Program Penataan Organisasi
	Program optimalisasi SIPD: *e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register*	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat			
	Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Percepatan kerja sama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Monitoring perjanjian kerja sama	-	-	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah			

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat			
	Integrasi dan penerapan SPM	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Penerapan SPM Sub bidang Bencana	-	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Program Penanggulangan Bencana
	Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat			
	Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)			
	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat			
	Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat			
	Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat			
	Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	daerah secara terintegrasi			
	Pengesahan APBD tepat waktu	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat			
	Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	-
		Provinsi	Program Bina Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	-
	Diklat Camat	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-
	Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-
	Peningkatan Pelayanan Pertanahan			
	Sertifikat Hak Atas Tanah	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Program Pengelolaan Izin Lokasi
	Peta Dasar Pertanahan	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Layanan Pertanahan	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Program Pengelolaan Izin Lokasi

No.	RPJMN			Perubahan RPJMD
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	Penyelenggaraan Penataan Ruang			
	Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jawa Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jawa Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jawa Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jawa Barat (KSN Kawasan Teropong Bintang Boscha)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sumber: Hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

6.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 seperti yang telah disebutkan pada Bab V, difokuskan pada prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Adapun penjelasan lebih rinci terkait indikasi program dan kegiatan prioritas di atas, dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.5
Indikasi Prioritas Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2022 – 2023

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5
1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 2. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3. Pengembangan Rumah Sakit 4. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5. Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 6. Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau,Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll) 7. Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 9. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 10. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 11. Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 12. Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	1. Penguatan sistem kesehatan daerah melalui kolaborasi/kemitraan pembangunan kesehatan daerah dengan pihak swasta; 2. Pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pekerja tertentu yang belum memiliki BPJS kesehatan; 3. Penyediaan produk medis, vaksin dan teknologi kesehatan; 4. Pembangunan dan peningkatan Puskesmas dan Rumah Sakit; 5. Pemenuhan sarana prasarana, SDM, alat kesehatan, obat, vaksin, dan bahan habis pakai, serta akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit; 6. Pendidikan dan pelatihan, serta dukungan pembiayaan pendidikan bagi tenaga kesehatan; 7. Insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil; 8. Integrasi sistem kesehatan antara daerah dengan pusat, serta pengembangan sistem informasi kesehatan daerah;

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
			13. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	9. Penguatan promosi kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 10. Optimalisasi strategi preventif dan promotif, melalui pengembangan sistem informasi kesehatan terintegrasi, sistem informasi manajemen 3T (*testing, tracing, treatment*) dan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas; 11. Penyediaan vaksin COVID-19; pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi hasil vaksinasi dimana pelaksanaannya akan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat serta melibatkan pemangku kepentingan agar efektif dan efisien; 12. Sosialisasi berkelanjutan mengenai keamanan vaksin; 13. Pengendalian penularan dan peningkatan kasus sekaligus pengendalian pencemaran limbah medis akibat pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 14. Kajian pembangunan rumah sakit rujukan pusat infeksi Provinsi Jawa Barat sebagai upaya kesiapsiagaan,
			14. Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	
			15. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	
			16. Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
			17. Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
			18. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	
			19. Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	
			20. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			21. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			22. Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	
		2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
			2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
			3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	serta mitigasi bencana non alam seperti COVID-19 15. Pusat isolasi mandiri COVID-19 di tingkat desa/kelurahan
			4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	
			5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	
			6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			9. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	
			11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
			13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
			14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	
			15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	
			16. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			17. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			18. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
			19. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
			20. Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	
			21. Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	
			22. Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			23. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
			24. Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	
			25. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	
			26. Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	
			27. Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			28. Pengelolaan Penelitian Kesehatan	
			29. Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	
		3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
			2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			3. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	
		4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			2. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	
			3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster	1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	1. Penyelamatan tenaga kerja di berbagai sektor usaha dan menyelamatkan terutama UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, tahapan *Recovery* atau pemulihan difokuskan pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha, relaksasi pembiayaan usaha, mempermudah dan mempromosikan investasi serta mendorong sektor – sektor ekonomi untuk berusaha dengan menerapkan protokol kesehatan. 2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan kompetensi, migran ataupun mandiri; 3. Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja dengan skema kolaborasi; 4. Pengembangan infrastruktur melalui KPBU, dan sumber pendanaan lainnya ; 5. Peningkatan daya beli masyarakat terutama kalangan menengah dan atas, pemulihan kepercayaan
			2. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	
		2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	
			2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	
			3. Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pendirian BUMD	
			4. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	
			5. Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pendirian BLUD	
	2. Program Promosi dan Penanaman Modal	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	
	3. Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
	4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perijinan di daerah, dan *government spending* pada proyek-proyek padat karya, peningkatan ekspor, peningkatan kapasitas kewirausahaan terutama bagi korban PHK, serta transformasi digital pemasaran produk UMKM. 6. Menghidupkan kembali industri Jawa Barat yang bersifat strategis dan padat karya; 7. Mengakselerasi perwujudan kawasan industri terpadu dalam konteks pengembangan industri 4.0; 8. Meningkatkan implementasi pola kemitraan antara industri besar dengan IKM sebagai salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan bahan baku impor dan penciptaan lapangan kerja baru; 9. Meningkatkan dukungan kelancaran distribusi hasil produksi melalui aksesibilitas, pengawasan dan pengendalian transportasi sarana dan prasarana logistik, serta pusat distribusi provinsi. 10. Mendukung penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sektor industri dan perrdagangan, memfasilitasi sarana dan prasarana
	5. Program Pengembangan Ekspor	1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1. Pameran Dagang Internasional/Nasional	
	6. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
	7. Program Pengembangan UMKM	1. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	1. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
	8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
	9. Program Peningkatan Sarana	1. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
	Distribusi Perdagangan	Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		logistik penanganan pandemi COVID-19. 11. Realisasi "investasi baru" di Provinsi Jawa Barat dengan mengoptimalkan promosi investasi dan fasilitasi para calon investor; 12. Fasilitasi proyek-proyek investasi yang terhambat pelaksanaannya melalui *Investor Relation Officer* (IRO); 13. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 14. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan koperasi; 15. Peningkatan skala usaha UKM; 16. Fasilitasi pemasaran dan pembiayaan bagi UKM; 17. Pembentukan wirausaha pemula dalam rangka pengentasan pengangguran; 18. Pengembangan ekonomi lokal berbasis tempat ibadah; 19. Pengembangan ekonomi berbasis pesantren. Pengembangan ekonomi dan Peningkatan skala usaha berbasis pesantren 20. Fasilitasi pengembangan pasar rakyat 21. Fasilitasi dalam kemudahan akses modal dengan perbankan dan pemberian stimulus bagi pelaku usaha kecil dalam bentuk pembiayaan dasar;
	10. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
	11. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1. Penumbuhan jiwa perkoperasian dan wirausaha di kalangan generasi muda (KOPSISSIS, KOPMA, dan Organisasi Masyarakat) (KOPERASI JUARA) dan peningktan kualitas kelembagaan koperasi
			2. Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1. Pemanfataan teknologi pemasaran digital oleh Koperasi (Digitalisasi Koperasi)
	12. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	1. Peningkatan kualitas pengelolaan Koperasi 2. Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi
			2. Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	1. Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan
	13. Program Penyelenggaraan Jalan	1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1. Rekonstruksi Jalan	1. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur dari dan ke sentra produksi melalui KPBU dan sumber pendanaan lainnya
			2. Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	
			3. Pembangunan Jalan	
			4. Pembangunan Jembatan	
			5. Pemeliharaan Berkala Jalan	
			6. Penggantian Jembatan	
			7. Rehabilitasi Jembatan	
3. Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan	1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan	1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1. Menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri atau mendatangkan dari luar Jawa Barat (ekspor-impor);
			2. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
	Pangan Masyarakat	Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	3. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	2. Intensifikasi pertanian bahan pokok, (fasilitasi ketersediaan pupuk bagi petani) dan modal usaha pertanian, peternakan, dan perikanan bantuan pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan, serta penguatan distribusi bahan pokok. 3. Memastikan *intake* air di daerah persawahan salah satunya melalui pemantapan jaringan irigasi di sentra produksi; 4. Pembentukan klaster tanaman pangan, klaster tanaman hortikultura, klaster peternakan, klaster perkebunan, klaster budidaya perikanan dan juga klaster nelayan dalam bentuk korporasi; 5. Adanya percepatan musim tanam; 6. Implementasi *smartagriculture* dalam proses produksi, misalkan : *transplanter indo combine harvester*, mesin pemilah bibit unggul, alat pengering, instalasi pengolah limbah (terutama limbah peternakan) serta melalui modifikasi alsintan sesuai kebutuhan; *7.* Pengembngan *urban farming*; *8. Contract farming*; 9. Peningkatan kompetensi penyuluh, *skill up* petani dan juga
		2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan provinsi	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
	2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih /Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Bahan Pakan serta Kewenangan Provinsi	
		2. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
		3. Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	1. Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan Dan Mikroorganisme	
		4. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1. Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	
		5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan	1. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
		Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		pembentukan petani generasi baru melalui program petani milenial; 10. Fasilitasi dalam kemudahan akses modal dengan perbankan dan pemberian stimulus bagi petani & nelayan dalam bentuk pembiayaan dasar; 11. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; 12. Menyediakan benih/bibit unggul; 13. Menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat; 14. Menyederhanakan sistem logistik dan distribusi; 15. Meningkatkan akses petani terhadap pasar; 16. Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP); 17. Pembangunan simpul pangan termasuk mendukung program pembangunan Toko Tani Indonesia Center (TTIC); 18. Sosialisasi makanan Bergizi Beragam Sehat dan Aman (B2SA); 19. Pemanfaatan bahan pangan lokal; 20. Peningkatan sistem informasi pangan melalui pembentukan unit sebagai pusat pemelihara keberlanjutan dan integritas data serta keberlangsungan sistem;
	3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Penataan Prasarana Pertanian	1. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	
			2. Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
	4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	
			2. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, Dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	
			3. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	
	5. Program Penyuluhan Pertanian	1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	1. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
			2. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	
			3. Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya Dan Swasta	
		2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasa	1. Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya Dan Swasta	
			2. Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	
			3. Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
			4. Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pemberdayaan Petani	21. Pengembangan budidaya perikanan laut di pantai Utara dan Selatan di Jawa Barat
			5. Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani	
		3. Pengembangan penerapan penyuluhan	1. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	
	6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	1. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
	7. Program Pengawasan Keamanan Pangan	1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	
	8. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1. Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	
			2. Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	3. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	
		3. Kesejahteraan hewan	4. Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	
	9. Program Pengelolaan	1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di	1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1. Peningkatan pengetahuan pelaku usaha perikanan tangkap dan

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
	Perikanan Tangkap	Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		pendamping dalam meningkatkan produksi hasil tangkapan
	10. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1. Pengolahan industri ikan skala menengah dan besar
			2. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1. Peningkatan jaminan mutu produk tangkap dan budidaya 2. Gelar mutu kelautan dan perikanan Jawa Barat 3. Kampanye Keamanan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan
	11. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)	1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3. Operasi dann Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 4. Operasional Unit Pengelola Irigasi	Pemenuhan keberlangsungan pasokan air di daerah persawahan, salah satunya melalui 1. peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di sentra produksi; serta 2. peningkatan kualitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola irigasi;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 2. Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1. Optimalisasi jaminan sosial daerah: Peningkatan jaminan masyarakat miskin untuk pendidikan dan kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Provinsi, Pembiayaan Kesehatan bagi masyarakat miskin di RS Provinsi, SPP Gratis SMA/SMK/SLB Negeri, Bantuan SPP bagi Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), Pembiayaan BPJS dan insentif bagi guru madrasah, guru Diniyah

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
				Takmiliyah Awaliyah (DTA) dan Pendidikan Agama Islam (PAI) Non PNS 2. Peningkatan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin melalui Peningkatan kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Jawa Barat, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin maupun korban bencana, pengawasan dan koordinasi bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah; 3. Peningkatan Kebutuhan Hidup Layak melalui perbaikan Rutilahu, Pembangunan sanitasi dan air bersih, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat miskin, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Revitalisasi panti sosial serta optimalisasi pelayanan panti sosial milik provinsi; 4. Penguatan sistem informasi pendataan dan pengaduan penyandang disabilitas dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antardaerah.
5. Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1. Peningkatan akses pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru, unit sekolah baru, dan sekolah terintegrasi untuk menuju 100 persen kecamatan memiliki sekolah negeri SMA/SMK
			2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
	2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2. Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta sarana prasana pendidikan; 3. Peningkatan efektivitas Bantuan pendidikan (BOS-PIP-LPDP); 4. Penguatan program vokasi melalui kerjasama dan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri; 5. Pemerataan dan penguatan jaringan internet di daerah; 6. Pembangunan sistem informasi berupa portal untuk dukungan Pendidikan Jarak Jauh; 7. Bantuan peralatan bagi guru dan siswa tidak mampu; 8. Digitalisasi metoda dan kurikulum pendidikan, 9. Pelatihan bagi guru dalam hal penggunaan digitalisasi pendidikan; 10. Peningkatan akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang makin terlindungi dari perilaku koruptif melalui kerjasama KPK dan Aparat penegak Hukum lainnya, serta penguatan akses pengawasan sosialnya termasuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap para pendidik yang mengalami persoalan hukum saat melakukan proses pembelajaran sekolah dengan lingkungan sekolahnya
			2. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	
			3. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	
	3. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas	1. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	
			2. Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	
			3. Pembangunan unit sekolah baru	
			4. Penambahan ruang kelas baru	
		2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	1. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	
			2. Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	
			3. Pembangunan unit sekolah baru	
			4. Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik	
			5. Penambahan ruang kelas baru	
		3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	
			2. Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	
			3. Program pembangunan unit sekolah baru	
			4. Penambahan ruang kelas baru	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
				11. Penyusunan regulasi integrasi budaya dalam pendidikan karakter 12. Penyusunan silabus pengembangan kompetensi sesuai nilai budaya yang akan diterapkan 13. Pemenuhan sarana dan prasarana, pelatihan, serta pembinaan bagi tenaga pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan sekolah sebagai pusat pengembangan kebudayaan
	4. Program Pengembangan Kurikulum	1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
			2. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
			3. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
			4. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
		2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Khusus	1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
			2. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
			3. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
			4. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	1. Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	1. Penguatan sistem kesiapsiagaan penanggulanagn resiko bencana dilaksanakan melalui pengembangan sistem mitigasi bencana dan *mapping* daerah rawan bencana, 2. Peningkatan sarana dan prasaarana penanganan kebencanaan yang modern, diantaranya melalui pengadaan *Early Warning System* (EWS) 3. Penguatan kesiapsiagaan melalui: Penilaian resiko, Rencana kontijensi, Penguatan kelembagaan, Penguatan Sistem informasi, Mobilisasi sumberdaya, Peringatan
			2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
			3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
			4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	
			5. Pengelolaan Risiko Bencana	
			6. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
			7. Penanganan Pascabencana Provinsi	
			8. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
			9. Penyusunan Rencana Kontijensi	dini, Mekanisme respon, Pendidikan dan pelatihan publik, Gladi/simulasi dan Pemberdayaan Masyarakat. 4. Pemenuhan kebutuhan logistik kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana; 5. Pengembangan *Jabar Resilience Culture Province* melalui penguatan kerangka regulasi dan kebijakan, peningkatan peran pentahelix serta membangun kultur masyarakat Jawa Barat yang siaga dan tangguh bencana berdasarkan tata nilai budaya dan kearifan lokal; 6. Penyusunan kajian sistem kesiapsiagaan penanggulangan bencana Jawa Barat.
			10. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
			11. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
		2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
			2. Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	
			3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	
			4. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
			6. Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	
		3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	
			2. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	
			3. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	
			4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
			5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
7. Inovasi Pelayanan Publik dan penataan daerah	1. Program Penataan Organisasi	1. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 3. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja 4. Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 5. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Digitalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Aplikasi secara optimal, seperti: Inovasi Penanganan COVID-19, Mall Pelayanan Publik (MPP), kolaborasi pelayanan publik dengan pemanfaatan *e-commerce* dan *fintech*. 2. Optimalisasi sumber daya, anggaran, teknologi informasi, serta jejaring kerja yang mendukung inovasi. 3. Optimalisasi unit kerja untuk melahirkan terobosan dalam rangka penyederhanaan proses bisnis pelayanan publik. 4. Peningkatan implementasi inovasi terbaik yang berkualitas untuk dapat diadopsi dan diimplementasikan (direplikasi) secara nasional. 5. Pemanfaatan pengelolaan kanal informasi yang ada untuk diseminasi informasi pelayanan publik dan media partisipasi aktif masyarakat.
8. Gerakan membangun desa	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa. 2. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 3. Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan,	Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, masyarakat hukum adat, pranata desa dan sarana prasarana desa,

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
			Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	serta kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, melalui: 1. Satu Desa Satu BUMDes; 2. *One Village One Company* (OVOC); 3. Desa Digital; 4. Patriot Desa; 5. CEO BUMDes (*Chief Executive Officer*); 6. Kampung Keluarga Juara; 7. Desa Sejahtera Mandiri; 8. Desa Wisata; 9. Sapa Warga; 10. Mobil Siaga; 11. Penguatan Infrastruktur Perdesaan; serta 12. Jembatan Gantung Desa (Jantung Desa).
			4. Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	
			5. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	
			6. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
			7. Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	
			8. Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	
			9. Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	
	2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta 2. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
			2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
			4. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			5. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
			6. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
			7. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
			8. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	
			9. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara	1. Program Penataan Bangungan Gedung	1. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	1. Peningkatan fungsi, kualitas dan kuantitas tempat peribadatan melalui pembangunan sarana dan prasarana dan penguatan tata kelola manajemen tempat ibadah; 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama; 3. Peningkatan kemampuan manajerial pendidikan keagamaan.
	2. Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1. Pelaksanaan kebijakan dan kesejahteraan rakyat	1. Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Program Penyelenggaraan Jalan	1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1. Rekonstruksi Jalan 2. Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan 3. Pembangunan Jalan 4. Pembangunan Jembatan 5. Pemeliharaan Berkala Jalan 6. Penggantian Jembatan 7. Rehabilitasi Jembatan	1. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur melalui KPBU dan sumber pendanaan lainnya. 2. Pembangunan dan revitalisasi jalan provinsi dengan tingkat kemantapan dan konektivitas yang tinggi, melalui pembangunan/ perbaikan jalan provinsi, 3. akselerasi pembangunan jalan tol dengan koordinasi multi pemangku kepentingan; 4. Pembangunan dan peningkatan jalan di perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten/kota; 5. Pembangunan jalan alternatif, jalan khusus maupun jalan lingkar di kabupaten/kota; 6. Pembangunan/Peningkatan jalan baik horizontal maupun vertikal di Provinsi Jawa Barat bagian selatan, penyelesaian ketimpangan jalur tengah selatan, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah jalur tengah utara dan tengah selatan, dan infrastruktur yang menghubungkan pusat ekonomi; 7. Bantuan dana untuk perbaikan/ peningkatan jalan kabupaten/kota.

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
	2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1. Pembangunan Gedung Terminal	1. Dukungan Pembangunan transportasi berbasis rel dan transportasi massal berbasis jalan di 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Bodebek, Bandung Raya (jalur Cipatat ke Padalarang) dan Cirebon 2. Dukungan pembangunan dan pengembangan bandar udara di Provinsi Jawa Barat yaitu BIJB Kertajati di Majalengka, Bandara Nusawiru di Pangandaran 3. Pembangunan dan rehabilitasi terminal tipe B, penyediaan fasilitas lalu lintas, pemantauan lalu lintas, dan sistem pengendalian transportasi
		2. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		3. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
	3. Program Pengelolaan Pelayaran	1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
		2. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	
	4. Program Pengelolaan Perkeretaapian	1. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	
		2. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provins	1. Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	
			2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
	5. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Penanggulangan pencemaran dan/kerusakann lingkungan hidup	1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/lingkungan hidup oleh masyarakat	1. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di DAS Citarum yang direplikasi untuk penanganan DAS Ciliwung, DAS Cilamaya serta Sub DAS Cileungsi dan Sub DAS Cikeas serta DAS lainnya; 2. Penanganan lahan kritis, air limbah domestik, persampahan, limbah industri, limbah peternakan, limbah perikanan, pengelolaan sumber daya air, edukasi dan penegakan hukum; 3. Pengembangan kawasan pengolahan persampahan tuntas dan berwawasan lingkungan, diantaranya melalui pembangunan bank sampah, biodigester, penerapan insinerator, pengembangan kelembagaan pengelola sampah dalam skala kelurahan/desa, dan peningkatan peran pemerintah, masyarakat, dan swasta dengan memperhatikan 5 aspek penting pengelolaan sampah yaitu regulasi, institusi, anggaran, teknologi, operasional, dan pasrtisipasi masyarakat dalam reduksi sampah dari sumbernya, serta penuntasan pembangunan
	6. Program pengelolaan persampahan	1. Penanganan sampah di TPA/TPST Regional	1. Penyusunan rencana, kebijakan, dan teknis penanganan sampah	
			2. Koordinasi dan singkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pembangunan sampah di TPA/TPST Regional	
			3. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	
			4. Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	
			5. Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	
			6. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	
			7. Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	
			8. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	
			9. Fasilitasi / Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/ Kota	
			10. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
			Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	TPPAS Legok Nangka dan TPPAS Lulut-Nambo.
	7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
			2. Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	
			3. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	
	8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis SPAM	
			2. Supervisi Pembangunan /Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	
			3. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	
			4. Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	
	9. Program Pengelolaan DAS	1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	11. Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan kritis, yaitu dengan penanaman dan pemeliharaan pohon secara berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat melalui Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP),
			2. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	
			3. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	
			4. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	
	10. Program Pengelolaan Hutan	1. Pengelolaan Rencana Tata Hukum Kesatuan Pengelolaan Hutan	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
		(KPH) Kewenangan Provinsi		
		2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
		3. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1. Pelaksanaan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	
			2. Pembangunan Hutan Rakyat di luar Kawasan Hutan Negara	
			3. Pembangunan Hutan Kota di luar Kawasan Hutan Negara	
			4. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	
			5. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	
			6. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	
			7. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	
		4. Perbenihan Tanaman Hutan	1. Sertifikat Sumber Bersih	
			2. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	
		5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
		6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	
			2. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	
		7. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6.000 m3/tahun	1. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6.000 m3/tahun	
		8. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	
	11. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	1. Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	
			2. Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat Tahura Provinsi	
			3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	
			4. Kerjasama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	
		2. Perlindungna Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi	1. Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	
		3. Pengelolaan Kawasan bernilai Ekosistem	1. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
		Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Kawasan bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	
			2. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	
			3. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	
	12. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
			2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	
			3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	
11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1. Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1. Pembangunan atau penataan destinasi dan infrastruktur pariwisata; 2. Pembenahan Amenitas, Atraksi dan Akses pariwisata; 3. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan dalam pengelolaan destinasi wisata; 4. Pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal; 5. Standarisasi dan sosialisasi protokol kesehatan yang berbasis pada *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE);
			2. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	
		2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
			2. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
			3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
		3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
	2. Program pemasaran pariwisata	1. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	6. Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif serta pengadaan event; 7. Pengembangan Sentra Industri Ekonomi Kreatif; 8. Pendataan ekonomi kreatif yang terdampak COVID-19 dan fasilitasi pembiayaan pada lembaga keuangan Mitra Pemerintah Daerah; 9. Pembangunan Pusat Budaya; 10. Pengembangan pengelolaan kawasan ekonomi khusus pariwisata.
			2. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	
			3. Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri	
	3. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
			2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	
			3. Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
	4. Program pengembangan kebudayaan	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
			2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
		2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
		3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah	1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	

PRIORITAS	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020			INDIKASI PRIORITAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
	NOMENKLATUR PROGRAM	NOMENKLATUR KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	
		Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
	5. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1. Penetapan Cagar Budaya	
		2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Selain pengembangan program-program prioritas di atas, juga dilakukan upaya-upaya transformasi pembangunan di Jawa Barat dengan memperhatikan upaya-upaya adaptasi terhadap situasi pandemi COVID-19 melalui program-program Jawa Barat Juara, meliputi:

1. Pesantren Juara

   Pesantren Juara merupakan upaya untuk memberdayakan keberadaan pesantren yang ada di Provinsi Jawa Barat agar memiliki kemandirian secara ekonomi, memiliki pendidikan pesantren yang berkualitas dalam membentuk sumber daya manusia yang bertakwa, berpancasila dan berdaya saing serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pesantren. Adapun pembangunan pesantren juara meliputi:

   a. *One Pesantren One Product* (OPOP) yakni suatu program dalam menciptakan, mengembangkan dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh setiap pesantren di Provinsi Jawa Barat yang dapat meningkatkan kemandirian pesantren;
   b. Memfasilitasi adanya regulasi berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pesantren;
   c. Bantuan sarana dan prasarana pesantren yakni suatu program dalam meningkatkan fasilitas yang dimiliki oleh pesantren agar optimal dalam memberikan pendidikan kepada para santri;
   d. Bantuan operasional pesantren dan pemberian beasiswa santri dan insentif Kiai, yakni suatu program dalam memberikan bantuan kepada santri yang kurang mampu dan insentif Kiai sebagai bentuk upaya dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Kiai yang memberikan pendidikan keagamaan kepada masyarakat Jawa Barat;
   e. Penyetaraan alumni pesantren melalui sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pendidikan yang diharapkan para lulusan pesantren memiliki kompetensi yang setara dan bersaing dengan lulusan pendidikan formal lainnya untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi baik PTN/PTS;
   f. Pesantren Lansia dan ramah difabel yakni sebagai program agar pesantren dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk lansia maupun difabel;
   g. Festival Pesantren yakni suatu program festival tahunan yang diharapkan mampu mengasah kemampuan peserta dibidang

keagamaan, juga merupakan ajang silaturahmi antar pesantren dan sekolah di Provinsi Jawa Barat;

h. Ramadhan Mubarak dilaksanakan untuk meningkatkan apresiasi seniman, budayawan dan masyarakat terhadap seni di bulan Ramadhan, sehingga diharapkan pesantren menjadi produktif dan mandiri secara ekonomi, serta para santri menjadi kreatif dan inovatif; dan
i. Beasiswa bagi santri yang akan melanjutkan ke program studi S1/S2/S3 dan pengiriman bagi santri yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan lanjutan di luar negeri.

2. Mesjid Juara
   a. Pembangunan Masjid Al Jabbar di Gedebage;
   b. Pembangunan masjid monumental di kabupaten/kota;
   c. Pembangunan masjid (bantuan keuangan/hibah);
   d. Subuh Berjamaah dan Magrib Mengaji dimaksudkan untuk mendekatkan masyarakat dengan masjid dalam penguatan keimanan dan ketakwaan masyarakat;
   e. Kredit Masyarakat Sejahtera dimaksudkan untuk menjadikan masjid dan tempat ibadah lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pinjaman modal akan diberikan melalui masjid dan tempat ibadah lainnya yang berdasarkan syariat agama masing-masing; dan
   f. Masjid Ramah Anak dimaksudkan untuk menambah fasilitas-fasilitas ramah anak di berbagai masjid seperti menyediakan TPA, arena bermain anak di pelataran masjid, pembimbingan anak untuk ikut shalat berjamaah dan lain-lain.
3. Ulama Juara
   a. Ajengan Masuk Sekolah dimaksudkan untuk mengirim ulama ke sekolah-sekolah sebagai sarana penguatan pendidikan agama;
   b. Beasiswa Kuliah untuk Penghafal Al-Qur'an dimaksudkan untuk memberikan beasiswa bagi penghafal Al-Qur'an; dan
   c. *English for Ulama* bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ulama dalam berbahasa Inggris.

4. Kesehatan Juara

a. Layad Rawat

Layad Rawat merupakan program pelayanan kesehatan dengan melakukan kunjungan dan perawatan gratis oleh dokter dan tenaga medis ke rumah-rumah masyarakat di seluruh kabupaten/kota dengan melakukan pelaporan dan panggilan darurat melalui telepon (*Hotline*) atau media *online* lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

b. Puskesmas Juara

Puskesmas Juara adalah menciptakan puskesmas di seluruh Jawa Barat memiliki sarana dan prasarana puskesmas yang memadai dan terakreditasi serta menjadi tambahan ketersediaan sumberdaya kesehatan dalam menghadapi kebencanaan daerah, baik bencana alam maupun bencana sosial, dengan disertai terbangunnya sistem informasi fasilitas kesehatan daerah untuk menjamin keberlanjutan konektivitas manajemen kesehatan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta informasi layanan.

c. Pembangunan dan Revitalisasi Rumah Sakit

Pembangunan dan revitalisasi rumah sakit meliputi pembangunan rumah sakit baru, revitalisasi rumah sakit yang kurang layak, dan revitalisasi rumah sakit tipe C menjadi tipe B. Penguatan infrastruktur kesehatan ini didukung dengan kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi pada program penataan bangunan gedung.

d. Mobil Kekasih

Kendaraan Konseling Silih Asih (Mobil Kekasih) yakni kendaraan yang ditujukan sebagai media konsultasi bagi masyarakat terhadap permasalahan psikologis yang dihadapi.

e. Jaminan kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu.

f. Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)

Poskestren yakni upaya kesehatan berbasis masyarakat dimana pesantren-pesantren yang ada di Provinsi Jawa Barat didorong agar

memiliki kesiapan, kemampuan, serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri.

5. Perempuan Juara

   Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) merupakan sekolah untuk perempuan khususnya di pedesaan. Sekolah ini merupakan wadah perempuan desa bertukar pengetahuan dan pengalaman, kecakapan diri sebagai warna negara yang sama hak dan kewajibannya terhadap kemajuan pembangunan nasional dan daerah, maupun sebagai bagian dari kelembagaan keluarga untuk menopang hadirnya keluarga penuh cinta kasih dan saling melindungi, menemukenali kebutuhan dan juga kepentingan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai upaya mewujudkan Perempuan Jawa Barat Juara yang mampu memberdayakan diri, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Pemberdayaan perempuan melalui sekoper cinta merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi, dan manfaat antar perempuan dan laki-laki di semua bidang serta meningkatkan kualitas kepemimpinan perempuan dalam kehidupan demokrasi yang makin tertib, sehat dan bermartabat. Pengetahuan dan pengalaman yang dipertukarkan dalam sekolah ini berkaitan dengan kebutuhan perempuan yang bersifat praktis maupun strategis. Untuk memulai kegiatan diperlukan sebuah proses pendidikan dan pelatihan bagi fasilitator yang akan mendampingi seluruh proses kegiatan sekolah perempuan nantinya.

6. Olahraga Juara

   Olahraga Juara diselenggarakan melalui pendirian pusat-pusat olahraga di kabupaten/kota meliputi pembangunan atau revitalisasi pusat olahraga dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga di Provinsi Jawa Barat untuk mempertahankan juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON), dan memberikan layanan/bantuan untuk atlet Provinsi Jawa Barat. Selain itu melakukan fasilitasi pelestarian dan pengembangan keolahragaan masyarakat yang menjadi kearifan lokal daerah bersama kelembagaan masyarakat daerah.

7. Budaya Juara

   Penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa semangat baru dalam upaya perlindungan,

pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki kebudayaan yang unik, menarik, dan beraneka ragam. Namun demikian dalam kehidupan bermasyarakat, aktualisasi kebudayaan lokal pada kenyataannya masih mengalami hambatan, diantaranya masih rendahnya perlindungan terhadap budaya lokal, masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal, kurang optimalnya promosi budaya lokal Jawa Barat di dalam dan luar negeri serta kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal. Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, Provinsi Jawa Barat telah menetapkan program Budaya Juara dengan menekankan pada upaya pemajuan kebudayaan Jawa Barat yang meliputi tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; olahraga tradisional; dan cagar budaya.

8. Sekolah Juara

   Program SEKOLAH JUARA merupakan salah satu program prioritas urusan pendidikan dimana penyelenggaraan program ditujukan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif di Provinsi Jawa Barat, dimana semua anak mendapatkan hak untuk memilki akses terhadap pendidikan melalui Prioritas Pembangunan: Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan. Program ini diselenggarakan melalui pembangunan ruang kelas baru terutama yang menjadi kewenangan provinsi, penyelenggaraan program sekolah terintegrasi untuk pemanfaatan fasilitas sekolah lintas kewenangan dalam kerangka menutup kebutuhan unit sekolah baru maupun ruang kelas baru, meningkatkan fasilitas sarana teknologi informasi dalam proses pembelajaran sekolah disertai pengembangan kebutuhan bahan ajar berbasis *e-book*, mengembangkan kelas/pembelajaran jarak jauh yang ditopang kecukupan dukungan infrastruktur jaringan teknologi dan informasi sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang akan menjadikan layanan pendidikan jarak jauh/daring dapat mengisi kekurangan sebaran unit sekolah baru yang tidak tersedia di semua kecamatan yang ada di kabupaten/kota, mengembangkan pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan akses kebutuhan dunia kerja dan kewirausahaan baru yang makin dilengkapi fasilitas pelatihan kerja/pelatihan usaha di setiap sekolah SMK atau kolaborasi

pemanfaatan fasilitas pelatihan kerja/usaha dengan balai latihan kerja atau pembentukan fasilitas pelatihan kerja/usaha bersama di tingkat kabupaten atau daerah perbatasan kabupaten/provinsi, meningkatkan kompetensi pendidik melalui sertifikasi untuk meningkatkan pencapaian mutu pendidikan yang makin merata di semua sekolah, meningkatkan akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang makin terlindungi dari perilaku koruptif melalui kerjasama KPK dan aparat penegak hukum lainnya serta penguatan akses pengawasan sosialnya termasuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap para pendidik yang mengalami persoalan hukum saat melakukan proses pembelajaran sekolah dengan lingkungan sekolahnya serta penyediaan bantuan biaya sekolah gratis bagi masyarakat miskin atau terdampak pandemi COVID-19 dan bencana alam lainnya, menciptakan *Resilience Citizen* melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) serta penguatan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat untuk meningkatkan mutu pendidikan, pembentukan karakter peserta didik terkait perilaku hidup bersih dan sehat terutama masa pandemi COVID-19 dan peningkatan pemahaman kepada siswa dalam pemenuhan kebutuhan gizi untuk pencegahan *stunting*. Untuk mewujudkan Sekolah Juara, sejumlah prioritas kegiatan yang akan dilakukan yaitu:

a. Sekolah Jabar Juara (Sajajar)

   Sekolah Jabar Juara (Sajajar) merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan menengah dan layanan khusus. Selain itu juga, Sekolah Jabar Juara (Sejajar) merupakan inovasi layanan pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat dalam mengakses layanan pendidikan. Tujuan Sajajar antara lain perluasan sekolah induk untuk memperkuat sekolah terbuka, penguatan kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri, pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, pemanfaatan teknologi yang mendukung terhadap sistem pembelajaran yang

aktif dan efisien (termasuk untuk belajar jarak jauh) dan terakhir pengembangan sistem asesmen yang memungkinkan pengenalan terhadap pengalaman belajar berbeda pada peserta didik. Implementasi Sekolah Jabar Juara (Sejajar), di antaranya: Sekolah Menengah (SM) Terbuka, SMK Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), *Smart School*, *Digital Learning*, Beasiswa untuk siswa miskin, bantuan biaya pendidikan untuk siswa yang terdampak bencana, dan Penguatan Laboratorium SMA, Bengkel kerja SMK, Pengembangan SMK Tematik. Selain itu juga fokus pada penguatan kerja sama SMK dengan industri, Penguatan kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga pendidikan lainnya, Pengembangan Sekolah Hijau, dan Pengembangan Sekolah Inklusif, Ramah Anak, Sekolah Aman Bencana, dan Sekolah Tangguh.

b. Jabar Masagi

Jabar Masagi merupakan program pendidikan karakter bagi pelajar dalam rangka membekali masyarakat Jawa Barat dengan nilai-nilai baik, berbasis budaya lokal yang selaras dengan cita-cita Jabar Juara Lahir dan Batin. Program ini merupakan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menumbuhkan manusia yang harmoni dengan diri, alam, dan seluruh makhluk hidup. Program tersebut akan menumbuhkan identitas budaya lokal pada siswa-siswi di Provinsi Jawa Barat, dengan nilai-nilai kearifan Sunda Priangan, Cirebonan, dan Betawi. Jabar Masagi berfokus pada pendidikan karakter dengan mengusung filosofi *surti, harti, bukti* dan *bakti*, serta mengajarkan peserta didik untuk cinta agama, bela negara, menjaga budaya, serta cinta lingkungan. Untuk menopang program Jabar Masagi, perlu ditopang integrasinya pada kurikulum sekolah, sebagai muatan lokal disertai peningkatan kompetensi Guru dan penyelenggara pendidikan, penyediaan buku dan bahan ajar lainnya di sekolah sekolah serta laboratorium kebudayaan lokal.

c. Sekolah Tanpa Gawai (Setangkai)

Sekolah Tanpa Gawai (Setangkai) merupakan salah satu inovasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melindungi anak dan remaja dari pengaruh informasi yang tidak layak. Program ini seyogyanya dimaknai tidak menghilangkan gawai di sekolah

melainkan dilakukan untuk mengendalikan penggunaan gawai di sekolah yang diintegrasikan dengan peningkatan kapasitas literasi digital bagi guru dan juga orang tua. Implementasi program setangkai merupakan bentuk pemenuhan hak anak khususnya hak perlindungan dan hak tumbuh kembang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat pedoman agar anak-anak mampu mengendalikan pemakaian gawai di sekolah. Salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan gawai adalah literasi digital yaitu kemampuan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten/informasi, dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Untuk ke depan perlu dipastikan TIK dapat terintegrasi penuh ke dalam pendidikan dan pelatihan di seluruh jenjang.

d. Sekolah Terintegrasi/Satu Atap/Terpadu

   Sekolah Terintegrasi/Satu Atap/Terpadu yakni program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memudahkan akses masyarakat seluas-luasnya pada fasilitas pendidikan terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan dari sisi geografis. Sekolah Terintegrasi/Satu Atap/Terpadu yaitu 2 (dua) atau 3 (tiga) sekolah dengan jenjang pendidikan berbeda (pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dalam satu lokasi yang diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk bersekolah di daerah-daerah yang rawan terhadap putus sekolah dan akses yang jauh untuk melanjutkan sekolahnya. Tujuan Sekolah Terintegrasi/Satu Atap/Sekolah Terpadu adalah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah. Untuk meningkatkan efektivitas sekolah terintegrasi, perlu dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran yang ditopang oleh pemanfaatan teknologi informasi dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang makin memadai, baik dengan penyediaan *wifi* mandiri maupun kolaborasi dengan operator telekomunikasi dan pihak lainnya.

e. Sekolah gratis bagi warga kurang mampu. Subsidi Gratis Golekmah diarahkan untuk menjawab isu kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial. Subsidi dimaksud berupa pemberian bantuan

perlindungan sosial bagi masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 2, 3, dan 4 pembangunan Jawa Barat. Beberapa program yang mendukung adalah SPP Gratis, diberikan kepada peserta didik SMA/SMK/SLB Negeri, sumbangan pembinaan pendidikan bagi siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) di SMK/SMA Swasta yang tidak diterima di sekolah negeri, hibah Bantuan Pendidikan Mengengah Universal (BPMU) merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada sekolah SMA/SMK/SLB Swasta dan MA untuk biaya operasional sekolah.

Selama masa pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan perubahan kinerja berbasis teknologi informasi sehingga berdampak pada penyelenggaraan program pendidikan. Oleh sebab itu, pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan melakukan adaptasi program sebagai bentuk Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada sektor pendidikan. Dengan tetap memfokuskan pada peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan mengembangkan konsep adaptasi program pendidikan khususnya bagi pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagai bentuk transformasi pendidikan pada masa penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) akibat pandemi COVID-19.

9. Guru Juara

   Program guru juara merupakan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Mewujudkan guru yang berkualitas dengan kompetensi yang tersertifikasi serta berdaya saing akan mampu menghasilkan siswa yang unggul. Program ini akan dilaksanakan melalui penambahan jumlah guru di sekolah-sekolah serta bantuan/tunjangan kepada guru sesuai dengan prestasi dan kinerja yang dicapai. pemagangan guru berprestasi untuk sekolah-sekolah vokasi pada kelembagaan kerja dan usaha serta pemberian kesempatan meningkatkan pendidikan formal para guru dan dukungan bantuan pendidikannya, dengan tetap mempertimbangkan

kecukupan kebutuhan guru pada sekolah. Selain peningkatan kualitas melalui kompetensi dan kualifikasi guru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan inovasi program bakti padmu guru yang memberikan perhatian dan persembahan untuk kesejahteraan guru. Program bakti padamu guru di wujudkan dalam penyediaan rumah bersubsidi bagi penyelenggara pendidikanyang berada di lingkup Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Luar Biasa (SLB), maupun di penyelenggara pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar.

10. Ibu dan Anak Juara
    a. Ngabring Ka Sakola (Ngabaso)

       Ngabring Ka Sakola (Ngabaso) merupakan program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mewujukan anak juara melalui pemenuhan hak anak di ruang publik, khususnya selama perjalanan ke/dari sekolah, berupa gerakan berjalan kaki ke dan dari sekolah secara berkelompok, membangun relasi sosial agar tercipta rasa aman dan selamat bagi anak saat ke dan dari sekolah. Melalui Program Ngabaso diharapkan dapat menunjang dan mendorong pembangunan infrastruktur publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah maupun kepedulian swasta dan masyarakat daerah untuk menyedikan kebutuhan fasilitas publik dan keluarga yang ramah anak dalam rangka mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi layak anak.

11. Milenial Juara

    Milenial Juara sebagai upaya mencetak generasi muda yang cerdas dan kreatif untuk menjawab berbagai tantangan serta persaingan global. Program Milenial juara meliputi *career expo* dan *career days* untuk *fresh graduate* di setiap kabupaten/kota, *start-up/creative hub* di kabupaten/kota dengan fasilitas pengembangan ide dan bisnis, pogram ekspedisi untuk pemuda Provinsi Jawa Barat dengan disertai pengembangan ide untuk perbaikan, dan penyaluran beasiswa khusus putera-puteri daerah Provinsi Jawa Barat untuk kuliah di dalam negeri maupun luar negeri.

12. Perguruan Tinggi Juara

    Perguruan Tinggi Juara merupakan wujud fasilitasi aktif pemerintah daerah untuk mendorong keberadaan Perguruan Tinggi di wilayah

Jawa Barat sebagai *Center of Excellence and Inovation.* Kolaborasi perguruan tinggi dengan perangkat daerah terus didorong untuk meningkatkan keunggulan kinerja organisasi guna menjamin ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah yang harus didukung oleh ketercapaian IKU dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dikontribusi oleh perangkat daerah bersangkutan. Selain itu dalam kerangka memperkuat tata kelola desa menuju Capaian Indeks Desa Membangun yang makin optimal, pemerintah provinsi perlu melakukan fasilitasi peningkatan mutu pembinaan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa di Jawa Barat melalui Program Desa Binaan dengan fasilitasi pelibatan setiap Perguruan Tinggi sebagai bentuk program pengabdian kepada masyarakat di Provinsi jawa Barat. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pun turut memfasilitasi adanya perguruan tinggi yang dibutuhkan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan kajian mendalam atas kebutuhan tersebut.

Beasiswa Perguruan Tinggi bagi warga kurang mampu. Program ini meliputi 1) Program Beasiswa Perguruan Tinggi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui Program *Jabar Future Leaders (JFL); 2)* Beasiswa Prestasi Akademik yang ditujukan bagi mahasiswa baru yang berkuliah di daftar 11 (sebelas) perguruan tinggi terakreditasi A terbagi menjadi jenjang S1, S2 dan S3; 3) Beasiswa Prestasi Non Akademik ditujukan bagi mahasiswa baru maupun sedang berjalan yang berkuliah di daftar 98 perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan prestasi non akademik seperti atlet, seni budaya dan keagamaan; dan 4) Beasiswa Prestasi Akademik Percepatan Akses Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa baru dan berjalan yang berkuliah di 98 daftar perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dimana program pembiayaan dibatasi hanya 1 (satu) tahun ajaran.

13. SMK Juara

SMK Juara dilaksanakan melalui revitalisasi SMK sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah serta *link and match* dengan industri dan

penciptaan kewirausahaan dini bagi lulusan yang tertarik menjadi pelaku wirausaha pada lapangan usaha yang relevan dengan peluang usaha di lingkungan sekolah vokasi atau daerah lainnya. Revitalisasi SMK di wujudkan melalui teaching factory, SMK BLUD, pengembangan *Center of Excelent* dan pengembangan kerjasama *Fastrack* pendidikan vokasi serta *Link and Macth* dengan DUDI. Penjabaran program revitalisasi SMK sebagai berikut:

a. Revitalisasi SMK melalui *teaching factory* menerapkan model pembelajaran praktik pada pendidikan kejuruan yang melibatkan semua peserta didik dalam menghasilkan suatu produk (barang atau jasa) melalui proses pembelajaran yang bernuansa dan berbasis industri. Penerapan model pembelajaran bernuasa dan berbasis industri ini dilakukan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.
b. pengembangan kelembagaan SMK dalam menunjang revitalisasi SMK di Provinsi Jawa Barat dilakukan penerapan SMK BLUD bagi SMK-SMK yang memiliki pontensi pendapatan. SMK BLUD merupakan langkah dalam memberikan payung hokum kepada SMK yang berpotensi memiliki pendapatan untuk menjalankan unit produksi, teaching factory dan usaha-usaha lainnya dengan tujuan sebagai sarana meningkatkan kompetensi siswa secara realistis. Dengan penerapan SMK BLUD ini dapat memberikan fleksibilitas keuangan kepada SMK untuk mengelola unit produksi dan unit usaha untuk peningkatan kualitas layanan.
c. Percepatan pemerataan peningkatan kualitas pendidikan SMK dilakukan melalui pengembangan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang menjadi acuan atau penggerak bagi SMK lainnya dalam meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Pengembangan pusat keunggulan ini untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan kejuruan SMK sesuai dengan standar kebutuhan kompetensi keahlian dan standar IDUKA Sektor Lainnya, sehingga menjadi Pusat Keunggulan yang lebih berkualitas dan berdaya saing.
d. Dalam upaya mewujudkan kesesuaian anatar dunia pendidikan dengan dunia industri program *fastrack* pendidikan vokasi melalui 2 (dua) program unggulan yaitu Program Diploma 2 *fasttrack* untuk

SMK dan program Diploma 3 upgrade menjadi sarjana terapan atau Diploma 4. Program *fastrack* pendidikan vokasi ini mengkolaborasikan unsur pendidikan vokasi yaitu SMK, Kampus Voaksi dan Politeknik sehingga peserta didik SMK yang telah menyelesaikan pendidikannya bisa langsung melanjukan ke jenjang Diploma 2 sesuai dengan politeknik atau kampus vokasi. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan politeknik dan kampus vokasi.

e. Program revitalisasi SMK melalui *Link and Match* ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi keluaran SMK sebagai upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat.

Dalam mengoptimalkan revitalisasi SMK dalam kerangka itu, pendidikan SMK akan dilengkapi fasilitas pelatihan kerja/pelatihan usaha di setiap sekolah SMK atau kolaborasi pemanfaatan fasilitas pelatihan kerja/usaha dengan Balai Latihan Kerja atau pembentukan fasilitas pelatihan kerja/usaha bersama di tingkat kabupaten atau daerah perbatasan kabupaten/provinsi.

14. Transportasi Juara
    a. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan keselamatan lalu lintas di jalan provinsi melalui:
    b. Dukungan Pembangunan transportasi berbasis rel dan transportasi massal berbasis jalan di 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Bodebek, Bandung Raya dan Cirebon, dukungan pembangunan sarana kereta api *medium speed* di Provinsi Jawa Barat menjadi *double track* (jalur ganda) dan reaktivasi kereta api;
    c. Dukungan pembangunan dan pengembangan bandar udara di Provinsi Jawa Barat yaitu BIJB Kertajati di Majalengka, dan Bandara Nusawiru di Pangandaran;
    d. Dukungan pembangunan *Inland Waterways* CBL (Cikarang Bekasi Laut) dan pembangunan pelabuhan baru;
    e. Pembangunan dan rehabilitasi terminal tipe B, penyediaan fasilitas lalu lintas, pemantauan lalu lintas, dan sistem pengendalian transportasi, melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

f. Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi, serta penyediaan perlengkapan jalan di jalur baru antara lokasi wisata Darajat, Kabupaten Garut sampai dengan Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung;

g. Pembangunan prasarana Bina Marga untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah meliputi pembangunan dan revitalisasi jalan provinsi dengan tingkat kemantapan dan konektivitas yang tinggi, melalui pembangunan/perbaikan jalan provinsi, akselerasi pembangunan jalan tol dengan koordinasi multi pemangku kepentingan, serta bantuan dana untuk perbaikan/peningkatan jalan kabupaten/kota.

Prioritas pembangunan prasarana Bina Marga terdiri dari:

1) Pembangunan dan peningkatan jalan di perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten/kota;
2) Pembangunan jalan alternatif, jalan khusus maupun jalan lingkar di kabupaten/kota dengan tujuan untuk memecah kemacetan maupun jalur elak sehingga akses tidak melalui pusat kota, salah satunya adalah Jalan Lingkar Sukabumi, dan dan dibukanya jalur baru antara lokasi wisata Darajat, Kabupaten Garut sampai dengan Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, melalui Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Peningkatan;
3) Pembangunan/Peningkatan jalan baik horizontal maupun vertikal di Provinsi Jawa Barat bagian selatan, penyelesaian ketimpangan jalur tengah selatan, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah jalur tengah utara dan tengah selatan, dan infrastruktur yang menghubungkan pusat ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, melalui Program Penyelenggaraan Jalan, diantaranya meliputi kegiatan Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan dan Jembatan di Jalur Tengah Selatan;
4) Pembangunan dan peningkatan jalan Simpang Muara Cikadu-Simpang Pancuh Tilu-Cikadu sepanjang ±28,6 km, dan peningkatan jalan provinsi lainnya, serta peningkatan jalan kabupaten/kota diantaranya peningkatan jalan lingkar Kuningan–Sampora–batas Cirebon dan peningkatan jalan desa

dengan tujuan meningkatkan akses destinasi pariwisata, pusat kegiatan ekonomi maupun daerah strategis baik provinsi maupun kabupaten/kota;

5) Dukungan terhadap pembangunan proyek strategis nasional yaitu pembangunan 16 (enam belas) ruas jalan tol di Jawa Barat, serta dukungan untuk pembangunan jalan kewenangan pusat non tol diantaranya peningkatan dan pelebaran Jalan Jalur Banjar– Kalipucang – Pangandaran sepanjang 48,66 Km; dan
6) Pembangunan *Flyover* (FO) di pusat kota dengan tujuan untuk memecah kemacetan diantaranya adalah FO Dewisartika di Kota Depok, FO Laswi, FO Supratman, FO Buah Batu-Kiaracondong, FO Kopo-Leuwi Panjang di Kota Bandung dan pembangunan infrastruktur jalan lainnya.

15. Logistik Juara

Logistik Juara diarahkan untuk mengefektifkan distribusi produk bahan pokok (konsumsi) sekaligus menjamin ketersediaan bahan pokok dan barang penting di Provinsi Jawa Barat melalui:

a. Keterkaitan antar sistem logistik melalui perwujudan Pusat Distribusi Regional Provinsi Jawa Barat;
b. Ketersediaan infrastruktur perdagangan berupa pasar, gudang, toko modern dan sarana prasarana perdagangan lainnya;
c. Dukungan ketersediaan jaringan prasarana angkutan barang berbasis KA, *dry port*, dan kantung parkir angkutan barang;
d. Ketersediaan infrastruktur jaringan informasi logistik;
e. Ketersediaan infrastruktur keuangan antara lain sistem resi gudang, keterlibatan perbankan atau lembaga keuangan lainnya dalam sistem logistik;
f. Hasil implementasi langkah-langkah di atas pada tahun 2023 ditunjukkan dengan terwujudnya target berupa Pusat Distribusi Provinsi yang memiliki "*Command Centre* Logistik Juara" yaitu sistem logistik terpadu yang dapat memantau, mengevaluasi serta sebagai sistem deteksi dini bagi ketersediaan bahan pokok dan barang penting di Provinsi Jawa Barat; dan

g. Sembako gratis

Rencana pelaksanaan sembako gratis dilakukan melalui penjaringan usulan subsidi sembako dari kabupaten/kota yang berisi data mengenai komoditas sembako dan rumah tangga miskin yang akan menerima subsidi, pendistribusian tanda bukti penerima subsidi, koordinasi dan pemberian pembiayaan subsidi kepada instansi terkait.

16. Gerbang Desa Juara

Gerbang desa juara merupakan sebuah gerakan untuk mewujudkan Desa yang mandiri yaitu Desa yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana desa, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Gerbang Desa meliputi:

a. Satu Desa Satu BUMDes

Satu Desa Satu BUMDes adalah upaya membentuk atau mengembangkan BUMDes di seluruh desa Jawa Barat.

b. *One Village One Company* (OVOC)

OVOC adalah upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan mengoptimalkan peran BUMDes dalam mengelola potensi desa.

c. Desa Digital

Desa digital sebagai upaya membangun jaringan internet di desa khususnya desa *blank spot* untuk memastikan akses informasi yang setara dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, percepatan akses, dan pelayanan informasi.

d. Patriot Desa

Patriot Desa adalah pemuda Jawa Barat yang lulus pendidikan dan pelatihan untuk menjadi pendamping desa dalam melakukan pemberdayaan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi.

e. CEO BUMDes (*Chief Executive Officer*)

CEO BUMDes adalah sarjana lulusan PTN/PTS (*fresh-graduate*) yang bertugas mendampingi BUMDesa untuk mencapai tujuan organisasi.

f. Kampung Keluarga Juara

Kampung Keluarga Juara merupakan salah satu inovasi yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga-keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tinggi, melalui pemenuhan aspek-aspek ramah perempuan, ramah terhadap anak, ramah terhadap lansia, ramah terhadap disabilitas dan ramah lingkungan, melalui dukungan berbagai pemangku kepentingan dengan mengintegrasikan dan mensinkronisasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sehingga terbentuk keluarga yang berkualitas, sejahtera, bahagia lahir dan batin.

g. Desa Sejahtera Mandiri

Desa sejahtera mandiri adalah masyarakat desa yang mampu menciptakan kreativitas dan inovasi untuk mewujudkan swasembada, berpartisipasi secara aktif dalam membangun desa dan memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan, serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa.

h. Desa Wisata

Desa wisata adalah upaya mendorong desa yang memiliki potensi ekonomi lokal seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, alam, dsb melalui pengelolaan daerah wisata sebagai nilai tambah bagi potensi ekonomi lokal menjadi destinasi yang menjadi daya tarik wisatawan melalui pengembangan Desa Wisata berbasis potensi ekonomi lokal.

i. Sapa Warga

Sapa Warga merupakan bentuk inovasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menampung aspirasi warga Jabar melalui pengembangan IT dan Media Sosial.

j. Mobil Siaga

Mobil Siaga adalah bantuan mobil bagi desa dengan konsep multifungsi untuk memenuhi kebutuhan primer warga desa antara lain; mengantar jenazah, mobil hiburan, angkutan pertanian, serta panggung untuk hajatan.

k. Penguatan Infrastruktur Perdesaan

Penguatan infrastruktur perdesaan merupakan upaya penguatan sarana prasarana bagi pembangunan desa dan aktivitas masyarakat perdesaan melalui 1) Identifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman perdesaan prioritas (agropolitan, minapolitan, pariwisata, pesisir, perbatasan, rawan bencana); 2) Pembangunan PSU kawasan permukiman perdesaan prioritas melalui skema bantuan keuangan; dan 3) Pembangunan akses jalan menuju kawasan desa wisata dan sentra pertanian dengan skema bantuan keuangan.

l. Jembatan Gantung Desa (Jantung Desa)

Jembatan Gantung Desa adalah jembatan yang berfungsi untuk menghubungkan 2 (dua) ujung jalan yang terputus oleh adanya rintangan, sungai dan saluran air, yang dibangun didalam wilayah administratif perdesaan.

17. Kota Juara

Kota Juara diarahkan sebagai perwujudan kawasan perkotaan yang modern, yang dilakukan melalui 1) Dukungan pengembangan ruang terbuka publik perkotaan; 2) Dukungan perencanaan dan penataan alun-alun kabupaten/kota melalui skema belanja modal maupun bantuan keuangan; 3) Pengembangan *smart building* pada kawasan tertentu (kampus/perkantoran) melalui skema hibah; 4) Pengembangan kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan; dan 5) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) meliputi pendampingan perbaikan Rutilahu dan perbaikan Rutilahu melalui skema bantuan sosial/bantuan keuangan khusus.

18. Pantura Juara

Peningkatan pembangunan di Pantura Jawa Barat dilaksanakan melalui 1) Mendorong pertumbuhan kawasan industri dengan menyiapkan pranata, meningkatkan promosi dan fasilitasi penanaman modal, serta membangun sarana-prasarana penunjang Kawasan Peruntukan Industri (KPI); dan 2) Lumbung Padi Jabar, yaitu peningkatan produksi khususnya di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu, untuk mempertahankan peran Provinsi Jawa Barat sebagai Lumbung Padi Nasional.

19. Pansela Juara

    Peningkatan pembangunan di Pansela Jawa Barat dilaksanakan melalui 1) Pengembangan destinasi wisata di Jabar Selatan; 2) Peningkatan aksesibilitas di Jabar Selatan meliputi akses bandar udara, jalur kereta api dan pelabuhan, serta pembangunan jalan tol (Bandung-Garut-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar-Pangandaran) maupun non tol (jalur tengah-selatan, dan jalur vertikal); 3) Pemekaran kabupaten di Jabar Selatan sebagai daerah otonom baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 4) Peningkatan konektivitas yang baik melalui optimalisasi fungsi dan penyediaan sarana-prasarana minimal di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang didukung dengan aksesibilitas yang menghubungkan antar pusat kegiatan tersebut (jalan, terminal, kereta api) sebagai pendukung pertumbuhan sektor ekonomi potensial di Pansela.

20. Energi Juara

    Peningkatan infrastruktur energi dilaksanakan melalui 1) Pengembangan penerapan energi baru dan terbarukan dan diversifikasi energi, yaitu dengan memberikan kemudahan dalam berinvestasi, dukungan regulasi, bantuan pembangunan pembangkit listrik dan pembentukan *roadmap* EBT; 2) Program *Caang Baranang*, yaitu dengan mendorong penerangan jalan umum di Provinsi Jawa Barat menyala 100 persen menggunakan lampu hemat energi; dan 3) Program Elektrifikasi 100 persen, yaitu bekerja sama dengan PLN dalam membangun jaringan listrik ke pelosok hingga rasio elektrifikasi dapat mencapai 100 persen.

21. Nelayan Juara

    Nelayan Juara diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan di Provinsi Jawa Barat yang dilakukan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan, serta menjaga kelestarian laut dan kawasan pesisir melalui:

    a. Bantuan fasilitas dan teknologi penangkapan dan budidaya ikan berupa pengadaan *smart fishing* bagi nelayan dan teknologi bioflok bagi pembudidaya ikan Jawa Barat.
    b. Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, meliputi pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Gebangmekar, Bondet, Karangsong, Dadap, Rancabuaya, Cilauteureun, Pamayangsari, Nusamanuk, Batukaras, dan Cisolok.

c. Pengembangan ekowisata bahari berupa pembangunan *jogging track* dan pengadaan perahu ponton.
d. Pembangunan *cold storage*.
e. Digitalisasi pemasaran melalui *e-commerce,* melalui aplikasi sistem informasi tata niaga ikan dan sistem informasi manajemen logistik ikan.
f. Hasil implementasi langkah-langkah di atas pada tahun 2023 ditunjukkan dengan terwujudnya target produksi perikanan sebanyak 1.069.482 ton dan angka konsumsi ikan di Provinsi Jawa Barat sebesar 30,93 Kg/Kap/Tahun.

22. Pariwisata Juara

Rencana pembangunan terkait pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata di Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 3 (tiga) fokus utama, yaitu:

a. Menyediakan sarana prasarana transportasi pendukung pariwisata untuk meningkatkan akses menuju destinasi wisata:
   1) Pembangunan akses infrastruktur transportasi, perhubungan, permukiman, energi dan telekomunikasi;
   2) Pembiayaan, *off taker*, dan promosi usaha kreatif sebagai upaya peningkatan kualitas dan peningkatan akses pasar produk ekonomi kreatif;
   3) Pengembangan fasilitasi *meeting, incentives, conferences and exhibition* (MICE) di 5 (lima) Pusat Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) yang berperan sebagai *tourism hub* dimana kelima Pusat DPP tersebut berfungsi sebagai pintu masuk utama, pusat informasi dan pemasaran, serta penyebaran pergerakan wisatawan;
   4) Pengembangan destinasi wisata *geopark* di Provinsi Jawa Barat melalui peningkatan akses infrastruktur, amenitas dan atraksi, serta pengajuan ke dalam jaringan *geopark* nasional dan internasional untuk meningkatkan promosi; dan
   5) Peningkatan efektivitas pemasaran pariwisata melalui penciptaan *smart digital tourism platform*.

b. Membangun destinasi wisata baru, melalui:
   1) Pembangunan dan revitalisasi tujuan wisata yang meliputi pengembangan akses infrastruktur, amenitas, dan atraksi di destinasi wisata; dan
   2) Pengembangan desa wisata melalui identifikasi potensi lokal, revitalisasi seni budaya lokal, mengemas aktivitas penduduk lokal menjadi atraksi, pengembangan *homestay* dan sarana prasarana amenitas lainya, internalisasi nilai sapta pesona di masyarakat, pengembangan produk ekonomi kreatif setempat, penyediaan akses infrastruktur, energi dan telekomunikasi.

c. Membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis pariwisata, melalui:
   1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata melalui pembangunan atau revitalisasi sekolah vokasi pariwisata; dan
   2) Penguatan promosi pariwisata Jawa Barat melalui penguatan analisa pasar, *branding*, penyelenggaraan *event* pariwisata secara regular, pemanfaatan teknologi digital sebagai media promosi.

d. Hasil implementasi langkah-langkah di atas sebagai bentuk realisasi Pariwisata Juara pada tahun 2023 ditunjukkan dengan terwujudnya target berupa:
   1) Pembangunan/pengembangan 18 (delapan belas) Desa Wisata;
   2) Pembangunan/pengembangan 27 (dua puluh tujuh) destinasi wisata baru; dan
   3) Inisiasi pembangunan 6 (enam) Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, meliputi: KEK Pariwisata Cikidang-Sukabumi, KEK Aerotropolis Majalengka, KEK Lido, KEK Sumedang (Jatigede), KEK Agrowisata Purwakarta, dan KEK Subang.

23. Lingkungan Juara

Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui 1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di DAS Citarum yang direplikasi untuk penanganan DAS Ciliwung, DAS Cilamaya serta Sub DAS Cileungsi dan Sub DAS Cikeas serta DAS lainnya, meliputi penanganan lahan kritis, air limbah domestik, persampahan, limbah industri, limbah peternakan, limbah perikanan, pengelolaan sumber daya air, edukasi dan penegakan hukum; 2) Pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya

air, meliputi pembangunan waduk baru sebagai pengendali banjir, serta penyedia air baku diantaranya Waduk Kuningan (Cileuweung), Waduk Sadawarna, Waduk Cipanas, Waduk Leuwikeris, Waduk Cibeet, Waduk Cijuray, Waduk Ciawi-Sukamahi, dan Waduk Cipunagara serta Tegalluar, Santosa, Cimeta, Sukawana, Cikapundung, dan Citarik, pembangunan kolam retesnsi dan normalisasi serta penataan situ/danau, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi yang dilakukan secara partisipasif bersama masyarakat; 3) Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan kritis, yaitu dengan penanaman dan pemeliharaan pohon secara berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat melalui Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP), 4) Pembangunan rendah karbon, sebagai transformasi dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang dikembangkan sesuai prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sehingga pelaksanaannya berorientasi pada keseimbangan 3 (tiga) aspek, yaitu tidak hanya penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga terintegrasi dengan upaya pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat dilaksanakan salah satunya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca setara 13,5 juta ton CO2 pada tahun 2030 melalui kegiatan di sektor strategis, seperti kehutanan, pertanian, energi, transportasi dan pengelolaan limbah. Adapun pelaksanaannya agar tetap dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan masih dalam proses perencanaan. Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Jawa Barat dalam rangka mentransformasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Menteri PPN/Bappenas pada tahun 2019. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu dari 7 (tujuh) provinsi yang menjadi percontohan perencanaan pembangunan rendah karbon nasional. Peraturan Gubernur melalui Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Jawa Barat ditargetkan dapat ditetapkan pada tahun 2021 dan menjadi acuan kebijakan untuk RPJMD periode berikutnya. Kendatipun demikan, prinsip-prinsip pembangunan rendah karbon pada dasarnya telah tertuang pada program dan kegiatan di dalam

Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023; dan 5) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana dan program strategis, penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan proyek strategis, serta pengawasan ketaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

24. Kelola Sampah Juara
    a. Peningkatan pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui:
    b. Pembangunan dan operasional TPPAS Regional Lulut Nambo;
    c. Pembangunan dan operasional TPPAS Regional Legoknangka;
    d. Pembangunan dan operasional TPPAS Regional Cirebon Raya:
    e. Pengembangan TPPAS Regional Bekarpur;
    f. Pengembangan TPPAS bersama;
    g. Pengembangan kawasan pengolahan persampahan tuntas, diantaranya melalui pembangunan bank sampah, penerapan insinerator, dan pengembangan kelembagaan pengelola sampah dalam skala kelurahan/desa, dan peningkatan peran masyarakat dalam reduksi sampah dari sumber; serta
    h. Pengembangan sistem pengurangan sampah lainnya.
25. Tanggap Bencana Juara

    Tanggap Bencana Juara merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana, baik sebelum, pada saat, dan setelah bencana terjadi. Hal ini menjadi penting mengingat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berada pada daerah rawan bencana (*ring of fire*). Program Tanggap Bencana Juara meliputi fasilitasi dukungan perencanaan model sistem bangunan tahan gempa serta perencanaan kawasan perumahan dan permukiman yang ramah terhadap bencana, pembangunan dan pengembangan perumahan dampak bencana, penerapan kurikulum muatan lokal tanggap bencana di seluruh sekolah di Provinsi Jawa Barat, pemetaan potensi dan pusat mitigasi bencana, *disaster-proofing* terkait ketangguhan infrastruktur vital provinsi dan fasilitas vital wilayah perkotaan dan perdesaan dan *crisis center* kebencanaan.

26. Ekonomi Kreatif Juara

Ekonomi Kreatif Juara diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sekaligus menangani masalah pengangguran di Provinsi Jawa Barat yang dilakukan melalui:

a. Penguatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha ekonomi kreatif;
b. Pengembangan sarana dan prasarana kota kreatif;
c. Pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan kualitas produk; dan
d. Pengembangan promosi produk ekonomi kreatif.
e. Hasil implementasi langkah-langkah di atas sebagai bentuk realisasi Ekonomi Kreatif Juara pada tahun 2023 ditunjukkan dengan terwujudnya inisiasi pembangunan 13 (tiga belas) unit c*reative center* di kabupaten/kota.

Selain pendekatan yang dilakukan di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga mulai mengembangkan ekonomi halal. Dalam mendukung pelaksanaan pengembangan ekonomi halal di Provinsi Jawa Barat, maka telah disusun rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang pengembangan ekonomi syariah atau ekonomi halal.

Pengembangan ekonomi syariah atau ekonomi halal yaitu pengembangan semua sektor inti perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural dipengaruhi oleh gaya hidup islami dan praktik bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi halal terdiri atas 6 (enam) sektor yaitu makanan halal, pariwisata halal, mode *fashion*, keuangan islam, media halal, serta obat dan kosmetik halal. Ruang lingkup pengembangan ekonomi halal terdiri atas percepatan regulasi ekonomi halal; perencanaan dan pendataan; pengembangan industri halal; pengembangan produk halal; pengembangan sumber daya manusia terpadu ekonomi halal; pengembangan pusat halal; pengembangan kewirausahaan ekonomi halal; promosi dan literasi ekonomi halal; kelembagaan ekonomi halal; pariwisata halal dan kawasan ekonomi halal; kemitraan dan jaringan usaha; insentif pengembangan ekonomi halal; pendanaan ekonomi halal; sistem informasi ekonomi halal; dan pengawasan dan pengendalian.

27. Buruh juara:

a. Hunian untuk buruh yakni membangun hunian dengan harga dan jarak yang terjangkau dengan tempat kerja buruh;

b. Transportasi Buruh yakni dengan menyediakan transportasi gratis untuk buruh dari dan menuju tempat kerja;
c. Sekolah anak buruh yakni dengan pembangunan/revitalisasi sekolah di sekitar kawasan industri agar anak buruh bisa bersekolah dengan jarak yang terjangkau; dan
d. Pengembangan rusunawa untuk pekerja industri.

28. Industri Juara

Industri Juara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas industri di Provinsi Jawa Barat yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan nilai produksi yang mengarah pada peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui:

a. Penguatan penyediaan bahan baku industri dan meningkatkan penggunaan bahan baku lokal;
b. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana dan teknologi industri;
c. Penguatan struktur industri melalui peningkatan kemitraan antara Industri Besar (IB) dengan Industri Kecil Menengah (IKM);
d. Peningkatan akses pembiayaan dan pasar bagi IKM; dan
e. Hasil implementasi langkah-langkah diatas pada tahun 2023 ditunjukkan dengan target berupa perwujudan 1 (satu) model kawasan industri terpadu berbasis inovasi dan kolaborasi yang akan menjadi Kawasan Industri Percontohan di Indonesia. Selain Kawasan industri percontohan tersebut, terdapat juga KEK Industri Kertajati Aerotropolis, dan KEK Patimban.

29. Pasar Juara

Pasar Juara diarahkan untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat serta mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri serta meningkatkan daya saing usaha ekonomi kreatif melalui:

a. Revitalisasi pasar rakyat;
b. Peningkatan kesejahteraan para pedagang dengan meningkatkan omzet penjualan di pasar rakyat;
c. Pengembangan pasar rakyat ber-SNI (Standar Nasional Indonesia);
d. Peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga;
e. Mengembangkan atau membangun pusat pemasaran serta pengembangan ekonomi kreatif; dan

f. Hasil implementasi langkah-langkah di atas pada tahun 2023 ditunjukkan dengan terwujudnya target Pasar Rakyat ber-SNI di kabupaten/kota dan Pasar Kreatif di Provinsi Jawa Barat.

30. Petani Juara

Petani Juara adalah petani perorangan dan keluarganya yang mengusahakan salah satu atau beberapa usaha tani di sektor pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, dan peternakan pada lahan yang dikuasai baik milik atau sewa, pada suatu klaster tani unggulan di Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk mensejahterakan dan mencukupi kebutuhan perekonomian melalui:

a. Pengembangan klaster-klaster pertanian

Klaster pertanian merupakan sistem pertanian terpadu dari hulu-hilir, mulai dari sistem produksi sampai pemasaran yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Pengembangan klaster pertanian bertujuan untuk mendorong pemenuhan permintaan komoditi pertanian baik di dalam daerah Provinsi Jawa Barat maupun untuk ekspor keluar Provinsi Jawa Barat dan juga mancanegara. Pembentukan klaster mengedepankan keterpaduan antara lingkungan, teknologi pertanian, *biodiversity*, hasil ekonomi dan integritas ekologi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah dengan melibatkan kelembagaan usaha yang didukung oleh sistem layanan dasar. Sistem layanan dasar dimaksud mencakup infrastruktur perdesaan, pendidikan, kesehatan serta didukung oleh ekosistem inovasi pertanian seperti Universitas, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), lembaga swadaya dan lembaga pendukung lainnya. Klaster yang akan dikembangkan di Provinsi Jawa Barat terdiri dari dari klaster tanaman hortikultura, klaster tanaman pangan, klaster unggas, klaster sapi dan klaster domba;

b. Pembangunan Simpul Pangan

Simpul Pangan merupakan suatu kelembagaan pasar yang secara aktif bekerja sebagai pengelola rantai pasok dan memberikan suatu *platform* organisasi dan logistik untuk kegiatan agregasi, distribusi dan pemasaran dari suatu produk yang sumbernya dapat diidentifikasi dari produsen lokal dan regional khususnya petani kecil dan menengah. Pembangunan simpul pangan

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan baik di dalam maupun di luar Provinsi Jawa Barat. Simpul pangan ini harus didukung oleh sistem informasi satu data pangan yang berperan sebagai dasar dalam memutuskan suatu kebijakan. Salah satu bentuk simpul pangan adalah dengan mendukung program Toko Tani Indonesia Center *(*TTIC).

c. Regenerasi Petani

Regenerasi petani Jawa Barat dilakukan melalui pembentukan petani milenial, yaitu petani berusia 19 – 39 tahun atau berjiwa milenial yang adaptif terhadap teknologi digital. Petani milenial ini merupakan program pengembangan usaha pertanian yang melibatkan generasi milenial dan para pemangku kepentingan lain agar tercipta ekosistem pertanian yang mandiri, maju dan berkelanjutan. Program petani milenial ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan ketersediaan tenaga kerja pertanian Jawa Barat, optimalisasi pemanfaatan teknologi pertanian dari hulu-hilir, menumbuhkembangkan kewirausahaan muda pertanian di Provinsi Jawa Barat, menciptakan pertanian maju, mandiri dan modern.

d. Pemberian insentif pada petani (pemenuhan kebutuhan dasar)

Pemberian insentif ini ditujukan bagi petani kecil dan menengah dalam bentuk fasilitasi asuransi usaha tani, bantuan benih/ bibit, pengawasan distibusi pupuk, serta program perlindungan, dan jaminan sosial.

e. Peningkatan dan rehabilitasi irigasi untuk menjaga produksi pertanian secara partisipatif, melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

f. Hasil implementasi langkah-langkah di atas pada tahun 2023 ditunjukkan dengan terwujudnya target produksi tanaman pangan hortikultura sebanyak 12.919.701 ton untuk mendukung kedaulatan pangan dan pengembangan simpul pangan.

31. Umat Juara

a. Manusia Pancasila:

1) Penguatan kerukunan umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Provinsi Jawa Barat;

2) Penguatan pendidikan multikulturalisme bertujuan untuk menghormati, mengakui, dan menghayati perbedaan di semua bidang kehidupan manusia; dan
3) Penguatan pendidikan demokrasi bertujuan untuk memahami, menghayati, megamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

32. UMKM Juara

UMKM Juara diarahkan untuk meningkatkan kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil, dari usaha kecil ke usaha menengah dan dari usaha menengah ke usaha besar dengan digitalisasi UMKM, kolaborasi ekonomi kreatif antardaerah dan mengefektifkan peran serta pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dimaksud yaitu Inkubator Bisnis, *E-commers*, *Fintech*, Lembaga Keuangan, Usaha besar, *off taker*, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang UKMM, Lembaga penjaminan, universitas serta media dalam melakukan:

a. Pembinaan, pendampingan manajemen usaha dan fasilitasi dana bergulir / kredit;
b. Peningkatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM untuk mengakselerasi pencapaian UMKM naik kelas;
c. Pemberdayaaan UMKM melalui dukungan dari BUMD;
d. Peningkatan kualitas maupun kuantitas produk untuk dapat bersaing di pasar ekspor; dan
e. *Bisnis matching* dan fasilitasi untuk bertemu dengan investor dalam dan luar negeri.

33. Wirausaha Juara

Wirausaha juara diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku usaha, terutama pelaku usaha pemula atau *start-up*, dengan mengefektifkan peran serta pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dimaksud yaitu Inkubator Bisnis, *E-commers*, *Fintech*, Lembaga Keuangan, Usaha besar, *off taker*, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang UKMM, Lembaga penjaminan, universitas serta media dalam melakukan:

a. Pembinaan dan pendampingan manajemen usaha dan fasilitasi kredit;
b. Fasilitasi akses pemasaran;

c. Fasilitasi akses pembiayaan bagi wirausaha; dan
d. Pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar (Digitalisasi Pemasaran).

34. Birokrasi Juara

Birokrasi juara yakni upaya dalam meningkatkan birokrasi yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik berkualitas baik berupa mall pelayanan publik pemerintahan maupun berkolaborasi dengan penyelenggara *marketplace* dan layanan publik di jaringan minimarket yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan *Smart Province/Jabar Digital Province* meliputi: pembangunan *Command Center*, *Integrated Government Dashboard,* Jabar Satu Data dan Satu Peta*, open data,* unit Jabar *Digital Service,* revitalisasi dan integrasi *Website* Jabar Juara, dan reformasi dalam tata kelola pemerintahan, serta perencanaan pemindahan pusat pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang diperlukan untuk meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta upaya lainnya untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Berkenaan dengan kondisi dan situasi pandemi COVID-19, pengembangan pengembangan *Smart Province/Jabar Digital Province* dimaksudkan juga sebagai upaya protokol kesehatan berupa digitalisasi pelayanan publik, dengan tujuan meminimalkan kontak langsung aparat dengan masyarakat.

a. Penataan daerah

Untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu untuk melakukan penataan daerah melalui pemekaran wilayah kabupaten, fasilitasi pembentukan maupun pemekaran kecamatan atau desa/kelurahan dan menetapkan calon ibukota Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai PKL dalam RTRW dengan mengarahkan sarana prasarana minimal yang harus disesuaikan di PKL. Selain itu, untuk DOB yang telah memenuhi syarat dasar kewilayahan dan adminsitratif, terus dilakukan fasilitasi dalam proses pembentukan sejak masa persiapan hingga keberlanjutannya sebagai DOB yang efektif dalam menjalankan

hak dan kewajiban sebagai daerah otonom penuh di Provinsi Jawa Barat.

35. APBD Juara

    APBD Juara adalah upaya optimalisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah melalui melalui inovasi teknologi (*e-planning, e-budgeting, e-monev*), optimalisasi dana pembangunan untuk kabupaten/kota (bantuan keuangan provinsi) dengan mempertimbangan *fiscal gap* maupun arahan khusus untuk program-program unggulan provinsi, membuka peluang pemberian pendanaan pembangunan melalui skema tugas pembantuan ke kabupaten kota maupun desa, serta dukungan pendanaan untuk fasilitasi tugas-tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat oleh perangkat daerah maupun kordinasi tugas-tugas instansi vertikal di daerah, dan penguatan Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

36. Aparatur Sipil Negara (ASN) Juara

    ASN Juara adalah upaya menciptakan ASN yang berkualitas melalui *coorporate*-university*, talent management/ talent pool, e-aparatur*, lelang jabatan, remunerasi berbasis kinerja dan beasiswa bagi ASN melalui pemberlakuan Sistem Merit secara penuh.

37. BUMD Juara

    BUMD Juara yakni upaya untuk mereformasi BUMD dengan menerapkan *Good Coorporate Govermence,* meningkatkan efektifitas dan efisiensi BUMD guna meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat, mendorong kemitraan BUMD dengan Badan Usaha Swasta, optimalisasi pemanfaatan aset provinsi, dan peningkatan peran BUMD dalam pemberdayaan usaha masyarakat.

38. Migran Juara

    Program Migran Juara adalah program perluasan kesempatan kerja ke luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Jawa Barat. Program ini memuat antara lain akselerasi peningkatan kesempatan kerja ke luar negeri melalui peningkatan kompetensi PMI, Sertifikasi Profesi PMI dan peningkatan layanan PMI melalui *Migrant Centre* yang menyediakan layanan pusat pelatihan bagi calon PMI, PMI dan Purna PMI; Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) keimigrasian bagi calon PMI; dan layanan *call centre* bagi calon PMI dan PMI.

39. Investasi Juara

Investasi Juara diarahkan untuk meningkatkan daya saing Provinsi Jawa Barat sebagai destinasi investasi terbaik nasional yang bersinergi dengan UMKM lokal dan menjadi solusi dalam penyerapan tenaga kerja, serta berkontribusi positif terhadap keuangan daerah dan pemerataan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat melalui:

a. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
b. Peningkatan potensi investasi padat karya;
c. Optimalisasi promosi investasi untuk komoditas unggulan Jawa Barat;
d. Implementasi pola kemitraan antara investor dengan UMKM lokal;
e. Peningkatan peran investasi terhadap pajak, retribusi, dan CSR; dan
f. Pemerataan pertumbuhan investasi antarwilayah.

Pelaksanaan Program-Program Jawa Barat Juara sebagaimana diuraikan diatas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan. Selain program unggulan tersebut, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan provinsi. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

6.4 Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang sekaligus mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Program pembangunan daerah disajikan berdasarkan sasaran untuk masing-masing misi RPJMD. Program pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat disajikan pada Dokumen Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023. Program-program tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu program pembangunan daerah tahun 2019, program pembangunan daerah tahun 2020, dan program pembangunan daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dilakukan karena ada perbedaan nomenklatur program, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) program tahun 2019 disusun dan

ditetapkan dalam Perda APBD Tahun 2019 pada tahun 2018 sebelum RPJMD ditetapkan; 2) program tahun 2020 merupakan program berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; dan 3) program tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 merupakan program yang disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program serta kegiatan dan sub kegiatan (di Perubahan Renstra Perangkat Daerah), menjadi salah satu alasan dilakukannya Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Dalam melaksanakan prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023, ditetapkan beberapa proyek strategis. Proyek ini disusun untuk membuat RPJMD lebih konkrit dalam menjawab isu-isu pembangunan, prioritas pembangunan daerah, dan manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan berdaya ungkit.

Proyek strategis Provinsi Jawa Barat menerapkan prinsip kolaborasi sumber pendanaan yaitu APBN, APBD, KPBU, dan swasta. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Jawa Barat mendorong keterlibatan berbagai pihak. Dalam pelaksanaannya, proyek strategis dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKPD dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan. Hal ini untuk memastikan proyek dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Daftar proyek strategis beserta sumber pendanaan dan tahun pelaksanaan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 6.6
Rencana Proyek Strategis Provinsi
Tahun 2018–2023

NO	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN				*Timeline*					
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	Sem I 2021	Sem II 2021	Sem I 2022	Sem II 2022	Sem I 2023	Sem II 2023
I	**Proyek Strategis Nasional**										
1.1	**Sektor Jalan dan Jembatan**										
1	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang – Dawuan;(59 km);	√			√	√	√	√			
2	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi(54km)	√		√			√	√	√		
3	Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang (28 km)	√		√	√						√
4	Jalan Tol Ciranjang-Padalarang (33 km)			√	√						√
5	Jalan Tol Serpong - Cinere (10,1km);				√		√				
6	Jalan Tol Cinere - Jagorawi (14,64km);				√		√				
7	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung (25,4km);				√		√				
8	Jalan Tol Cibitung - Cilincing (34km);				√		√				
9	Penambahan Lingkup Jalan Tol Depok - Antasari (21,54km);				√				√		
10	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kp. Melayu (21,04km);				√		√				
11	Penambahan Lingkup Jalan Tol Bogor Ring Road (11km)	√		√	√		√				
12	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan (64km)			√	√		√				
13	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya-Cilacap	√							√	√	√
14.	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	√							√	√	√
1.2	**Sektor Kereta**										
1	*Double Track* Jawa Selatan	√									√
2	*High Speed Railway Jakarta – Bandung.*	√			√				√		
3	Kereta Api Jakarta-Surabaya	√		√	√						√
4.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ *Light Rail*				√				√		

NO	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN				*Timeline*					
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	Sem I 2021	Sem II 2021	Sem I 2022	Sem II 2022	Sem I 2023	Sem II 2023
	Transit - (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi										
1.3	**Sektor Perumahan**										
1	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	√	√			√	√	√	√	√	√
1.4	**Sektor-Pelabuhan**										
1	*Inland Waterways* Cikarang – Bekasi Laut Jawa (CBL);				√						√
2	Pelabuhan Patimban	√				√					
1.5	**Sektor Air Bersih dan Sanitasi**										
1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede	√	√	√							√
2	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur		√	√	√						√
1.6	**Sektor Bendungan dan Irigasi**										
1	Bendungan Kuningan	√					√				
2	Bendungan Ciawi	√							√		
3	Bendungan Sukamahi	√							√		
4	Bendungan Leuwikeris	√							√		
5	Bendungan Cipanas	√							√		
6	Bendungan Sadawarna	√									√
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	√									√
1.7	**Sektor Tanggul Pantai**										
1	Tanggul Pantai	√									√
1.8	**Infrastruktur Energi**										
1	Upgrading Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan	√			√						√
2	Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Cirebon-Semarang)	√			√						√
3	Pembangunan Bahan Bakar Hijau Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek)	√			√						√

NO	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN				*Timeline*					
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	Sem I 2021	Sem II 2021	Sem I 2022	Sem II 2022	Sem I 2023	Sem II 2023
1.9	**Sektor Teknologi**										
1	Percepatan Pembangunan *Technopark*	√									√
2	Pengembangan Drone *Male* Kombatan (*Male Unmaned Combat Aerial Vaehicle)*	√									√
3	Pengembangan Teknologi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang teritegrasi dengan Kebun Rakyat	√									√
1.10	**Infrastruktur Pendidikan**										
1	Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia	√									√
II	**INFRASTRUKTUR STRATEGIS DAERAH**										√
2.1	**Jalan Tol**										
1	*Bandung Intra Urban Toll Road* (BIUTR) (27,3km)	√			√						√
2.2	**Jalan Strategis**										
1	Jalan Puncak II (67,65km)	√		√							√
2	Jalan Lingkar Soreang - Ciwidey (11,69 km)	√									√
3	Jalan Lingkar Kuningan (13,7km)	√						√	√	√	√
4	Jalan Lingkar Sukabumi		√			√	√	√	√	√	√
5	Jalan khusus Tambang Parung Panjang (15 km)				√				√	√	√
	Pembangunan Fly Over:										
1	-*Fly over* Kopo, Kota Bandung (1,3 km)	√				√	√	√			
2	- *Fly over* Buah Batu- Kiaracondong Kota Bandung (1,96 km)	√							√	√	√
3	- *Fly over* Dewi Sartika Kota Depok (bantuan hibah)		√			√	√	√	√		
2.3	**Kereta Api**										
1	Reaktivasi Jalur KA Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari	√	√						√		
2	Reaktivasi Jalur KA Cibatu-Garut-Cikajang	√	√			√					
3	*Double Track* Bogor-Sukabumi	√			√	√	√	√	√	√	
4	*Double Track* lintas Padalarang-Bandung-Cicalengka	√					√	√	√	√	√

NO	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN				*Timeline*					
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	Sem I 2021	Sem II 2021	Sem I 2022	Sem II 2022	Sem I 2023	Sem II 2023
5	Reaktivasi Jalur KA. Cianjur-Padalarang	√	√				√	√	√	√	√
2.4	**Prasarana dan Sarana Kereta Api dalam kota**										
1	LRT Bandung Raya			√	√						√
2.5	**Bandara Udara**										
1	Pengembangan Bandara Nusawiru Kab. Pangandaran	√		√	√			√	√	√	√
2.6	**Pelabuhan**										
1	Pengembangan Pelabuhan Cirebon (Kota Cirebon)			√	√		√				
2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi)	√					√	√	√		
3	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Bojongsalawe di Pangandaran	√					√	√	√		
4	Pengembangan Pelabuhan Penyebrangan Majingklak (Kabupaten Pangandaran)	√									√
5	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Penyeberangan Muara Gembong di Kabupaten Bekasi	√									√
6	Pembangunan Pelabuhan Tarumajaya (Kabupaten Bekasi)				√						√
7	Pembangunan Dermaga Kapal Wisata Palangpang di Kabupaten Sukabumi	√		√							√
2.7	**Infrastruktur Perumahan dan Permukiman**										
	Penyediaan Perumahan bagi MBR (buruh industri) dan ASN:										
1	Purwakarta	√	√	√							√
2.8	**Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman**										
1	Pembangunan Alun-Alun*)		√		√	√	√	√	√	√	√
2	Pembangunan Creative Centre*)		√		√	√	√	√	√	√	√
3	Pembangunan Pusat Budaya*)		√		√	√	√	√	√	√	√
4	Pembangunan Mesjid Raya Al Jabar		√		√	√	√	√	√	√	√
5	Pembangunan Mesjid Monumental Jawa Barat*)		√		√	√	√	√	√	√	√

NO	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN				*Timeline*					
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	Sem I 2021	Sem II 2021	Sem I 2022	Sem II 2022	Sem I 2023	Sem II 2023
2.9	**Persampahan**										
1	TPPAS Regional Cirebon Raya	√	√	√							√
2	TPPAS Regional Legok Nangka	√	√	√		√	√	√			
3	TPPAS Regional Lulut Nambo	√	√	√							√
2.10	**Penyediaan Air Minum**										
	SPAM Regional Bandung Raya										
1	Kertasari	√	√	√							√
2	Cigondoang	√	√	√							√
3	Sinumbra	√	√	√							√
4	Cikalong (Tahap II-Pembangunan IPA)	√	√	√					√		
5	SPAM Pangandaran (Pusat Pertumbuhan)	√	√	√							√
2.11	**Sistem Air Limbah**										
1	SPALD-T (Regional Bojongsoang)	√	√	√							√
2	SPALD-T (Komunal-DAS Citarum)	√	√						√		
2.12	**Bendungan, Waduk, dan Jaringan Irigasi**										
1	DI. Caringin (Sukabumi)	√	√				√	√	√	√	√
2	DI. Parigi	√	√								√
3	DI. Cikalong	√	√								√
4	DI. Curugdendeng	√									√
5	DI. Candragoyang	√									√
6	DI. Rengrang	√					√				
2.13	**Pariwisata**										
1	KEK Cikidang, Kabupaten Sukabumi	√		√	√						√
2	KEK Aerotropolis, Kabupaten Majalengka	√		√	√						√
3	KEK Lido, Kabupaten Bogor	√		√	√				√		
4	KEK Sumedang (Jatigede)	√		√	√						√

NO	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN				*Timeline*					
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	Sem I 2021	Sem II 2021	Sem I 2022	Sem II 2022	Sem I 2023	Sem II 2023
5	KEK Agrowisata Purwakarta	√		√	√						√
6	KEK Subang	√		√	√						√
2.14	**Kelautan**										
1	PPI Gebangmekar	√	√						√		
2	PPI Bondet	√	√				√				
3	PPI Karangsong	√	√				√				
4	PPI Dadap	√	√						√		
5	PPI Rancabuaya	√	√				√				
6	PPI Cilauteureun	√	√						√		
7	PPI Pamayangsari	√	√						√		
8	PPI Nusamanuk	√	√						√		
9	PPI Batukaras	√	√				√				
10	PPI Cisolok	√	√				√				
2.15	**Kawasan Sains dan Teknologi**										
1	Kawasan Sains dan Teknologi Pusat Jawa Barat di Jatinangor Kabupaten Sumedang			√					√		
2	Kawasan Sains dan Teknologi Kopi Jawa Barat di Pangalengan Kabupaten Bandung			√							√
3	Kawasan Sains dan Teknologi Pertanian Terpadu dan Indigofera Jawa Barat di Cikadu Kabupaten Cianjur			√					√		
4	Kawasan Sains dan Teknologi Industri Kreatif Jawa Barat di Kota Cirebon			√							√

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020
Keterangan: *) penganggaran ditentukan oleh tingkat kepentingan dan *readiness criteria*

Selain proyek strategis yang disebutkan pada Tabel 6.7 terdapat proyek strategis yang didanai melalui skema tahun jamak. Untuk rincian kegiatan yang didanai melalui skema tahun jamak yang akan diselesaikan sampai tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya skema tahun jamak ini dapat dikembangkan untuk kegiatan strategis lainnya.

Tabel 6.7
Proyek Strategis yang Didanai Tahun Jamak

No	Kegiatan	Usulan (Rp. Juta)				Total
		Tahun 2021	Tahun 2021 Perubahan	Tahun 2022	Tahun 2022 Perubahan	
1.	Masjid Al Jabbar	163.522	132.520	321.922	38.305	656.269
2.	*Underpass* Dewisartika (Kota Depok)	61.200		51.000	24.518	136.718
3.	Peningkatan Jalan Sumadra-Bungbulang-Sukarame	75.000	57.700	71.200	25.500	229.400
4.	Peningkatan Jalan Sukabumi – Sagaranten - Tegalbuleud	75.000	-	65.840	34.160	175.000
5.	Pembangunan Terminal Ciledug (Kab. Cirebon)	7.360	-	53.130	-	60.490
6.	Pembangunan Terminal Cikarang (kab. Bekasi)	7.360	-	53.130	-	60.490
	JUMLAH	**389.442**	**190.220**	**616.222**	**122.423**	**1.318.367**

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Program pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat disajikan pada Dokumen Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 yang terdiri dari 3 (tiga) tabel yaitu Tabel 1 yang memuat program pembangunan daerah tahun 2019, Tabel 2 memuat program pembangunan daerah tahun 2020, dan Tabel 3 memuat program pembangunan daerah Tahun 2021-2023. Hal ini dilakukan karena ada perbedaan nomenklatur program pada tahun 2019, tahun 2020, dan Tahun 2021–2023.

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai tahun 2021 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penerapan prinsip peraturan tersebut menjadi alasan utama Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah. Hal ini berarti program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dan mendapatkan anggaran.

Kolaborasi Pendanaan Pembangunan Daerah menjadi kebijakan daerah yang memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari 1) APBN, 2) APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, 3) Dana Masyarakat/Umat, 4) *Corporate Social Responsibility* (CSR), 5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan 6) Hibah.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah, sebagai berikut:

a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, serta 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:
   1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
   2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
   3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
   4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
   5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
   6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
   7. Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah;
   8. Gerakan Membangun Desa;
   9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
   10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
   11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

b. **Prioritas II,** dialokasikan untuk pemenuhan janji Gubernur dan Wakil Gubernur dan urusan wajib yang tidak termasuk dalam 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.

Sebagaimana analisis pada Bab III Perubahan RPJMD ini, maka penyajian kerangka pendanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat dapat dibagi 2 (dua) yaitu periode Tahun 2019-2020 (Tabel 7.1) dan Tahun 2021-2023 (Tabel 7.2). Masing-masing periode menggambarkan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 dan 2020

Kode Akun	Uraian	Realisasi	
		2019	2020*)
5.	**BELANJA**	**35.833.086.126.517**	**37.672.383.765.771**
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**28.033.579.142.382**	**31.074.644.696.112**
5.1.1	Belanja Pegawai	5.605.436.893.218	5.829.309.275.886
5.1.2	Belanja Bunga	-	18.123.947.774
5.1.3	Belanja Subsidi	19.384.264.000	-
5.1.4	Belanja Hibah	8.736.051.702.117	9.461.124.000.592
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	277.421.000.000	206.084.000.000

Kode Akun	Uraian	Realisasi	
		2019	2020*)
5.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa*	7.901.869.013.400	7.212.501.291.449
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	5.493.416.269.647	5.020.674.544.240
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	3.326.827.636.171
5.2	**Belanja Langsung**	**7.799.506.984.135**	**6.597.739.069.659**
5.2.1	Belanja Pegawai	283.317.579.553	280.747.359.080
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.985.841.862.221	4.753.271.452.404
5.2.3	Belanja Modal	2.530.347.542.361	1.563.720.258.175

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Barat, 2020
*) Realisasi 2020 (Belanja merupakan nilai SP2D)

Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

Kode Akun	Uraian	Proyeksi		
		2021	2022	2023
5	**BELANJA**	**44.615.065.661.799**	**42.126.705.021.135**	**42.365.232.496.792**
5.1	**Belanja operasi**	**24.836.798.357.117**	**25.607.220.991.355**	**25.813.010.514.364**
5.1.01	Belanja pegawai	6.857.125.031.176	7.028.553.156.955	7.054.266.985.879
5.1.02	Belanja barang dan jasa	7.220.375.246.644	7.712.452.954.571	7.863.892.326.042
5.1.03	Belanja bunga	-	-	-
5.1.04	Belanja subsidi	-	30.000.000.000	30.000.000.000
5.1.05	Belanja hibah	10.199.076.329.297	10.451.485.129.829	10.480.121.452.443
5.1.06	Belanja bantuan sosial	560.221.750.000	384.729.750.000	384.729.750.000
5.2	**Belanja modal**	**3.207.473.349.875**	**3.631.623.326.798**	**3.565.069.216.960**
5.2.1	Belanja Modal	3.207.473.349.875	3.631.623.326.798	3.565.069.216.960
5.3	**Belanja tidak terduga**	**368.913.568.696**	**100.000.000.000**	**100.000.000.000**
5.3.1	Belanja tidak terduga	368.913.568.696	100.000.000.000	100.000.000.000
5.4	**Belanja transfer**	**16.201.880.386.111**	**12.787.860.702.982**	**12.887.152.765.468**
5.4.01	Belanja bagi Hasil	9.301.544.755.277	9.420.872.902.982	9.565.164.965.468
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	6.900.335.630.834	3.366.987.800.000	3.321.987.800.000

Sumber: Bappeda, 2020
*) Perda APBD 2021,
Tahun 2022 dan 2023 Hasil Proyeksi masih sangat sementara

7.2 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

a. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:
   1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
   2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
   3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
   4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
   5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
   6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
   7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
   8. Gerakan Membangun Desa;
   9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
   10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
   11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.
b. Penjabaran visi, misi, dan prioritas pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
d. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
e. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
f. Penerapan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Program perangkat daerah merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan urusan pemerintahan daerah, dan unsur pemerintahan umum. Program-

program tersebut disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang terbagi menjadi 3 (tiga) tabel yaitu program perangkat daerah tahun 2019, program perangkat daerah tahun 2020, dan program perangkat daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan nomenklatur program diantara periode tahun tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Program tahun 2019 disusun dan ditetapkan dalam Perda APBD Tahun 2019 pada tahun 2018, sebelum RPJMD ditetapkan pada Maret 2019. Program-program tahun 2019 selanjutnya dijabarkan kedalam berbagai kegiatan pada masing-masing Renstra Perangkat Daerah.
b. Program tahun 2020 merupakan program berdasarkan proses penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dengan nomenklatur yang hampir seluruhnya berbeda dengan program tahun 2019. Perbedaan nomenklatur dan jumlah program tahun 2020 dengan tahun sebelumnya diikuti dengan penyesuaian indikator kinerja program. Selanjutnya, program-program tahun 2020 dijabarkan kedalam kegiatan pada masing-masing Renstra Perangkat Daerah.
c. Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan kegiatan, maka setelah penerapan aturan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan mengutamakan penggunaan indikator kinerja pada tahun sebelumnya. Selain itu, indikator program mulai Tahun 2021 sampai dengan 2023 juga mengutamakan penggunaan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) *outcome* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran pembangunan dengan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang setiap

tahun dilaporkan oleh pemerintah daerah. Sebagai operasionalisasi dari program-program perangkat daerah, maka perangkat daerah juga melakukan penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerjanya, target dan pagu anggaran yang dimuat pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Lebih rinci mengenai rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Dokumen Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023.

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan menggunakan indikator kinerja, yang merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu program dan kegiatan. Selanjutnya indikator kinerja tersebut diklasifikasikan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keluaran (*Output*) adalah jumlah barang atau jasa yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam waktu tertentu, baik untuk dikonsumsi langsung atau diolah kembali untuk kegiatan lebih lanjut. Hasil (*Outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan Dampak (*Impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

8.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama periode masa jabatan.

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan Pendapatan Per Kapita. Indikator kinerja makro tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Provinsi Jawa Barat, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional dan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat. Proyeksi indikator kinerja makro mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1
Proyeksi Indikator Makro Tahun 2021 - 2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		2019		Target RPJMD				2020		Target Perubahan RPJMD			Kondisi Akhir
			2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	Target Perubahan RPJMD	Realisasi	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,70	71,30	71,42-71,91	72,03	71,91-72,52	72,52-73,13	73,13-73,74	73,74-74,35	71,82	72,09	72,19	72,57	73,05	73,05
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,39	1,36	1,50	1,30	1,48	1,45	1,43	1,41	1,26	1,26	1,21	1,16	1,12	1,12
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,83	7,25	6,66-6,90	6,82	6,07-6,31	5,48-5,72	4,89-5,13	4,30-4,54	8,48	8,43	7,77	7,67	7,54	7,54
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,22	8,17	8,00-7,90	7,99	7,90-7,70	7,70-7,50	7,50-7,30	7,30-7,10	10,58	10,46	10,45	10,16	9,69	9,69
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,33	5,66	5,40-5,80	5,07	5,50-5,90	5,60-6,00	5,70-6,10	5,80-6,20	(-2,63)	-2,44	3,15	3,92	4,35	4,35
6	Indeks Gini	Poin	0,393	0,405	0,38-0,39	0,398	0,37-0,38	0,37-0,38	0,36-0,37	0,36-0,37	0,404	0,403	0,402	0,400	0,396	0,396
7	Pendapatan Per Kapita*	Juta Rupiah	37,20	40,30	-	43,35	-	-	-	-	41,50	41,80	44,02	46,48	49,29	49,29

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

*) Indikator makro yang baru digunakan dalam Perubahan RPJMD sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

Penyesuaian target indikator makro dilakukan mulai Tahun 2020 sampai dengan 2023 sebagai respon terhadap perkembangan keadaan akibat pandemi COVID-19. Selain itu, ditambahkan indikator Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHB Per Kapita) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka penyempurnaan pengukuran kinerja sasaran Perubahan RPJMD, maka mulai Tahun 2020 sampai 2023 dilakukan penyesuaian IKU pemerintah daerah dan targetnya dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19. Dasar pertimbangan mengenai penyesuaian IKU dan target telah diulas pada Bab V dokumen ini. IKU Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sampai dengan 2023 disajikan pada Tabel 8.2.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu IKK tingkat dampak (*Impact*) dan IKK tingkat hasil (*Outcome*). IKK tingkat dampak (*Impact*) memuat IKU pemerintah daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (*Impact*) merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (*Impact*) disajikan pada Tabel 8.3 dan Tabel 8.4. Sementara indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (*Outcome*) yang digunakan untuk menggambarkan indikator kinerja program yang disajikan pada Tabel 8.5, Tabel 8.6 dan Tabel 8.7.

Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU pemerintah daerah, IKU perangkat daerah, dan indikator kinerja program secara berjenjang sesuai kinerja yang akan dihasilkan/dicapai, memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Arsitektur kinerja ini disusun dengan *logic model* dan *cascading* secara vertikal (leveling dari tingkatan atas sampai bawah). *Cascading* merupakan penjabaran dan penyelarasan indikator kinerja secara berjenjang dari tingkat dampak (*impact*) baik untuk tingkat daerah (untuk mengukur sasaran RPJMD yang menjadi IKU Pemda) maupun perangkat daerah (untuk mengukur sasaran Renstra Perangkat Daerah yang menjadi IKU Perangkat Daerah) ke hasil (*outcome)* untuk mengukur program di dokumen Perubahan RPJMD ini. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dengan menyusun keluaran *(output)* untuk mengukur kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Menyikapi perkembangan keadaan khususnya setelah pandemi COVID-19 dan beberapa kebijakan nasional terkait percepatan penangannya serta kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Penyesuaian ini menyusul penyesuaian target pembangunan RKPD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 yang terlebih dahulu telah dilakukan masing-masing berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020.

Realisasi dan proyeksi IKU dan IKK Tahun 2019 sampai dengan 2023 disajikan pada tabel-tabel di bawah. Kondisi awal indikator kinerja program tahun 2017 dan 2018 pada tabel-tabel tersebut ada yang kosong (N/A) sebab indikator tersebut baru digunakan pada periode RPJMD Tahun 2018-2023, dan belum pernah digunakan/dihitung sebelumnya. Penggunaan indikator-indikator tersebut pada RPJMD Tahun 2018-2023 dan/atau Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan upaya penetapan indikator yang SMART dengan proses *cascading*.

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
		2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	68,50	68,70	68,60 – 69,00	68,50	69,10 - 69,50	69,60 – 70,00	70,10 - 70,50	70,60 – 71,00	68,10	68,50**	68,60	69,10	69,60	69,60	Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah, Kesbangpol
2	Indeks Demokrasi (poin)	68,78	65,50	68,79 - 70,78	69,09	70,79 - 71,78	71, 79 - 72,78	72,79 - 73,78	73,79 - 74,78	70,70	69,09**	70,79	71,79	72,79	72,79	Kesbangpol, Sekretariat DPRD, Biro Kesejahteraan Rakya-Sekretariat Daerah, Satpol PP
3	Persentase Penduduk Miskin (persen)	7,83	7,25	6,66-6,90	6,82	6,07-6,31	5,48-5,72	4,89-5,13	4,30-4,54	8,48	8,43	7,77	7,67	7,54	7,54	Perangkat daerah yang masuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	8,22	8,17	8,00-7,90	7,99	7,90-7,70	7,70-7,50	7,50-7,30	7,30-7,10	10,58	10,46	10,45	10,16	9,69	9,69	Perangkat daerah yang masuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat
5	Angka Harapan Hidup (tahun)	72,47	72,76	73,67 – 74,87	72,85	74,87 – 76,07	76,07 – 77,27	77,27 – 78,47	78,47 – 79,67	72,82	73,04	73,06	73,09	73,11	73,11	Dinas Kesehatan, Dinas P3AKB, Dinas Perumahan dan Permukiman

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
		2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	70,04	70,20	70,34	69,48	71,00	72,00	72,30	73,25	69,48	69,48**	69,60	69,80	70,30	70,30	Dinas P3AKB, Kesbangpol, Dinas Dukcapil
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	89,18	89,19	89,32	89,26	89,82	90,50	91,00	92,00	89,26	89,26**	89,30	89,42	90,02	90,02	Dinas P3AKB, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil
8	Rata–Rata Lama Sekolah (tahun)	8,14	8,18	8,28	8,37	8,39	8,49	8,60	8,70	8,35	8,55	8,58	8,60	8,64	8,64	Dinas Pendidikan, Dinas P3AKB, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
9	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,42	12,88	13,15	12,48	13,39	13,64	13,89	14,14	12,20	12,50	12,52	12,54	12,56	12,56	Dinas Pendidikan, Dinas P3AKB, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
10	Indeks Pembangunan Pemuda (poin)	46,33	49,00	53,63	50,00	56,31	59,13	62,09	65,19	49,00	50,00**	50,00	52,00	54,00	54,00	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas P3AKB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans
11	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (persen)	N/A*	N/A*	16,63	17,43	18,65	20,72	21,83	22,16	8,07	37,69	19,56	24,89	24,21	24,21	Dinas Parbud, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
		2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (poin)	69,58	69,61	70,00-71,00	77,50	70,00 - 71,00	71,00 - 73,50	71,00 - 73,50	73,60 - 76,00	70,00	88,40	72,00	74,00	75,00	75,00	Satpol PP, BPBD, Kesbangpol
13	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	1.155	1.231	1.300	1.302	1.340	1.386	1.447	1.503	1.000	1.146,6	1.050	1.100	1.150	1.150	Dinas ESDM, Dinas PMD
14	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	40,90	41,00	41,00 – 43,00	46,13	44,00 – 46,00	47,00 – 49,00	50,00 – 52,00	53,00 – 55,00	38,00	39,06	41,00	44,00	47,00	47,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
15	Indeks Desa Membangun (poin)	0,64	0,64	0,65	0,67	0,66	0,67	0,68	0,69	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,72	Dinas PMD, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas ESDM, Dinas SDA, Dinas Perkim, Bappeda
16	Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (usulan)	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	0	1	2	6	Biro Pemerintahan dan Otoritas Daerah - Sekretariat Daerah, Bappeda, BP2D
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	51,85 (metode lama)	49,54 (metode baru)	49,76	52,12	49,98	50,20	50,42	50,64	60,57	61,59	60,78	61,19	61,60	61,60	Dinas LH, Dinas Perkim, Dinas Perindag, DTPH, DKPP, DKP, DESDM, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
		2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	2,02	2,38	2,80	3,85	3,92	5,87	7,11	7,72	3,82	3,87	4,29	4,75	5,22	5,22	Dinas LH, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunana, DKP, DTPH, DESDM, Dishub, Dinas Perkim
19	Indeks Penggunaan Air (poin)	N/A*	N/A*	1,1923	1,192	1,191	1,1834	1,1822	1,1811	1,1927	1,1927	1,1922	1,1912	1,1902	1,1902	Dinas SDA, Dinas Perkim
20	Indeks Risiko Bencana (IRB) (poin)	166	166	165	152,13	164	163	162	161	150,45	152,13**	149	147	144	144	BPBD, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
21	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (poin)	85,2	81,6	82,4	89	83,2	84	84,8	85,6	83,20	84,80	84,00	84,80	85,60	85,60	DKPP, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, DKP
22	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak*	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	50,60	52,28	51,70	52,80	53,90	53,90	Dinas Perkim
23	Nilai Tukar Petani (NTP) (poin)	108,39	110,9	113,11	112,36	115,36	117,65	120	122,38	101,12	101,41	102,25	103,39	104,52	104,52	DKPP, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, DKP
24	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (persen)	2,71	2,85	2,30-3,00	6,84	3,01-3,15	3,16-3,30	3,31-3,45	3,46-3,50	2,65	2,85	2,91	2,99	3,08	3,08	Dinas Parbud, Dinas KUK, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perindag

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL		2019		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				2020		TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
		2017	2018	Target	Realisasi	2020	2021	2022	2023	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	Laju pertumbuhan Sektor Industri (persen)	5,35	6,49	2,63	4,04	2,70	2,77	2,85	2,94	(-4,49)	-4,22	2,78	3,40	3,72	3,72	Dinas Perindag, Dinas KUK, Dinas PMPTSP
26	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (persen)	4,55	4,19	3,00	7,51	3,00	4,00	4,00	5,00	-7,96	-7,94	3,23	4,01	4,45	4,45	Dinas Perindag, Dinas KUK, Dinas PMPTSP
27	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (triliun rupiah)	449,37	473,00	495,40	535,72	520,17	546,18	573,48	602,15	490,16	493,96	501,52	515,31	531,87	531,87	Dinas PMPTSP, Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi, Sekretariat Daerah
28	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (persen)	N/A	20,10	21,00	21,10	22,00	23,00	24,00	25,00	19,00	19,41	19,90	20,50	21,10	21,10	Dinas KUK, Dinas Perindag
29	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	BB (78,01)	BB**	BB (78,01)	A (80,01)	A 82,01	A (82,01)	Semua perangkat daerah
30	Tingkat efektivitas kerjasama Daerah (persen)	N/A*	N/A*	50,00	61,22	60,00	70,00	80,00	90,00	54,00	73,43	56,00	58,00	62,00	62,00	Biro Pemerintahan dan Otoritas Daerah - Sekretariat Daerah, Bappeda

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

*) Indikator baru digunakan pada periode RPJMD 2018-2023 dan belum pernah digunakan sebelumnya sehingga tidak tersedia data pada tahun tersebut.

**) Data Sementara menggunakan realisasi tahun sebelumnya (2019)

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/*Impact*
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,69	71,30	71,42-71,91	72,03	71,82	72,09	Indikator Makro
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,39	1,36	1,50	1,30	1,26	1,26	Indikator Makro
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,83	7,25	6,66 - 6,90	6,82	8,48	8,43	Indikator Makro/IKU Pemerintah Daerah
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,22	8,17	8,00 - 7,90	7,99	10,58	10,46	Indikator Makro/IKU Pemerintah Daerah
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,33	5,66	5,40 - 5,80	5,07	-2,63	-2,44	Indikator Makro
6	Indeks Gini	Poin	0,393	0,405	0,380 - 0,390	0,398	0,404	0,403	Indikator Makro
7	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	37,20	40,30	-	43,35	41,50	41,80	Indikator Makro
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,47	72,76	73,67 – 74,87	72,85	72,82	73,04	IKU Pemerintah Daerah
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	70,04	70,20	70,34	69,48	69,48	69,48**	IKU Pemerintah Daerah
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,18	89,19	89,32	89,26	89,26	89,26**	IKU Pemerintah Daerah
11	Rata–Rata Lama Sekolah	Tahun	8,14	8,18	8,28	8,37	8,35	8,55	IKU Pemerintah Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	12,88	13.15	12,48	12,20	12,50	IKU Pemerintah Daerah
13	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak *	Triliun Rupiah	N/A	N/A	-	-	50,60	52,28	IKU Pemerintah Daerah
14	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	85,20	81,60	82,40	89,00	83,20	84,80	IKU Pemerintah Daerah
15	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,71	2,85	2,30-3,00	6,84	2,65	2,85	IKU Pemerintah Daerah
16	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	5,35	6,49	2,63	4,04	-4,49	-4,22	IKU Pemerintah Daerah
17	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,55	4,19	3,00	7,51	-7,96	-7,94	IKU Pemerintah Daerah
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	449,37	473,00	495,40	535,72	490,16	493,96	IKU Pemerintah Daerah
19	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Persen	N/A	20,10	21,00	21,10	19,00	19,41	IKU Pemerintah Daerah
20	Indeks Kepuasan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	indeks	N/A	N/A	3,51-4 (Baik)	N/A	3,51-4 (Baik)	3,22	IKU Dinas Pendidikan
21	APM SMA/SMK/SLB	persen	N/A	N/A	66,65	N/A	69,60	68,44	IKU Dinas Pendidikan
22	Rata-Rata Nilai ujian Nasional SMA/SMK	nilai	52,2 (SMA IPA), 48,8 (SMA IPS), 52,31 (BHS) 52,2 (SMK)	51,08 (SMA IPA), 46,21 (SMA IPS), 43,83 (SMK)	54,03 (SMA IPA), 49,16 (SMA IPS), 46,78 (SMK)	belum terselenggara UN nya	0	0	IKU Dinas Pendidikan
23	Ratio Kematian Ibu	per 100.000	N/A	76,03	86/100.000 KH	78,3/100.00 KH	85/100.000 KH	85,77/100.000 KH	IKU Dinas Kesehatan
24	Ratio Kematian Bayi	per 1000	3,4	3,4	5.2/1.000 KH	3,28/1.000 KH	5/1.000 KH	3,18/ 1000 KH	IKU Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Prevalensi Stunting	persen	N/A	31,06	27,20	26,21	25,20	26,21	IKU Dinas Kesehatan
26	Persentase Penyehatan Lingkungan Terhadap Akses Jamban Sehat	Persen	33,05	66,89	75,00	72,39	80,00	82,49	IKU Dinas Kesehatan
27	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Rumah Tangga Ber PHBS >60%	Persen	N/A	N/A	40,70	40,70	51,90	59,25	IKU Dinas Kesehatan
28	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	88,00	89,00	90,00	81,80	90,00	73,16	IKU Dinas Kesehatan
29	Prevealensi Hipertensi	Persen	40,74	40,74	0,60	39,60	0,60	39,60	IKU Dinas Kesehatan
30	Persentase Warga Negara Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persen	N/A	N/A	100,00	N/A	100,00	100,00	IKU Dinas Kesehatan
31	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	Persen	0	80,00	94,76	95,89	99,81	95,90	IKU Dinas Kesehatan
32	Persentase Ketersediaan Obat Esensial	Persen	78,00	78,06	90,00	90,00	91,00	92,12	IKU Dinas Kesehatan
33	Persentase Penduduk Yang Mendapat Jaminan Kesehatan Menuju *Universal Health Coverage*	Persen	71,62	83,17	85,00	84,46	90,00	84,46	IKU Dinas Kesehatan
34	Tingkat kemantapan jalan	persen	89,30	90,18	91,48	91,90	79,87	81,54	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
35	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial	persen	N/A	N/A	2,49	1,35	7,24	7,44	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan								
36	Persentase penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	persen	N/A	N/A	79,25	79,25	72,40	72,40	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
37	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	persen	N/A	N/A	0,31	0,29	0,02	0,02	IKU Dinas Sumber Daya Air
38	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	persen	N/A	N/A	52,31	52,20	52,20	53,38	IKU Dinas Sumber Daya Air
39	Indeks Penggunaan Air (IPA)	Poin	N/A	N/A	1,1923	1,1920	1,1927	1,1927	IKU Dinas Sumber Daya Air/IKU Pemerintah Daerah
40	Tingkat implementasi rekomendasi yang dihasilkan oleh kelembagaan Sumber Daya Air	Persen	N/A	N/A	50,00	50,00	50,00	50,00	IKU Dinas Sumber Daya Air
41	Persentase Titik Terdampak Banjir dan Kekeringan yang ditangani	Persen	N/A	N/A	5,00	5,00	6,00	8,00	IKU Dinas Sumber Daya Air
42	Rasio permukiman layak	Rasio	0,9928	0,9948	0,9952	0,9952	0,9955	0,9952	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
43	Persentase luasan genangan permukiman yang tertangani	Persen	N/A	N/A	85,00	29,20	31,90	36,93	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
44	Tingkat kualitas kawasan permukiman	Persen	1,44	1,6	6,86	6,39	12,79	12,79	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Pemenuhan unsur penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib	Persen	100,00,	100,00	100,00	100,00	63,50	63,50	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
46	Tingkat ketersediaan rumah layak	Persen	8,88	8,77	91,63	91,70	91,86	91,90	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
47	Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Persen	5,65	12,90	21,77	19,59	42,74	48,84	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
48	Cakupan akses infrastruktur dasar permukiman	Persen	69,00	72,00	74,00	74,57	75,14	75,36	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
49	Laju Penegakan Perda dan Perkada	persen	4,50	4,50	5,00	33,87	4,50	4,05	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
50	Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	persen	62,00	83,50	70,00	70,00	68,25	68,25	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
51	Persentase anggota linmas untuk perlindungan masyarakat	persen	55,00	60,00	75,00	91,00	57,00	59,19	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
52	Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten	persen	40,00	45,00	70,00	70,00	68,25	68,25	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
53	persentase PMKS yang Terlayani Kesejahteraan Sosialnya	Persen	N/A	N/A	59,81	72,44	60,00	63,26	IKU Dinas Sosial
54	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yg berpartisipasi dalam penanganan PMKS	Persen	N/A	N/A	40,00	50,82	50,00	56,45	IKU Dinas Sosial
55	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	N/A	N/A	63,56	65,07	N/A	-	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Persentase Pencari Kerja Yang Bersertifikat	persen	N/A	N/A	0,25	0,17	0,35	0,36	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
57	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	persen	N/A	N/A	61,90	35,37	62,78	33,14	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
58	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan Perusahaan	Persen	N/A	N/A	5,00	18,08	10,00	2,55	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
59	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	persen	N/A	N/A	20,00	19,27	20,00	20,25	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
60	Persentase realisasi MoU yang dilaksanakan	Persen	N/A	N/A	85,00	100,00	85,00	0,00	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
61	Persentase kabupaten/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Persen	N/A	N/A	81,00	85,18	85,18	85,18	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
62	Tingkat Keberhasilan penangananan kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (KED) terhadap perempuan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
63	Cakupan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Persen	22,00	22,00	22,00	88,89	0,00	0,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
64	Cakupan perempuan di legislatif	Persen	24,00	24,00	24,00	20,00	20,00	20,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
65	Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender	Persen	20,00	25,00	29,00	88,89	44,00	44,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
66	Cakupan kabupaten kota yang mendapat pembinaan di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan di Jawa Barat	Persen	20,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
67	Cakupan kabupaten kota yang mendapat peningkatan kualitas perempuan hidup di Jawa Barat	Persen	20,00	30,00	40,00	0,00	45,00	45,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*)	Anak	2,24	2,49	2,34	2,52	2,15	2,55	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
69	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	42,07	36,20	42,47	42,73	42,80	42,84	IKU Dinas Lingkungan Hidup
70	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	78,91	72,80	79,31	79,40	79,51	79,58	IKU Dinas Lingkungan Hidup
71	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	Persen	N/A	N/A	0,62	0,78	0,79	0,80	IKU Dinas Lingkungan Hidup
72	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	persen	N/A	N/A	81,12	82,50	81,83	82,22	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
73	Persentase Desa Mandiri	Persen	N/A	N/A	2,58	1,84	4,46	5,08	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
74	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan TMMD/BBGRM/BSMSS	Jumlah	N/A	N/A	TMMD : 12 Kab BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota wilayah Kodam III Siliwangi	TMMD : 12 Kab, BBGRM 1 Kab & BSMSS 23 Kab/Kota wilayah Kodam III Siliwangi	TMMD : 12 Kab BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota wilayah Kodam III Siliwangi	TMMD : 12 Kab BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota wilayah Kodam III Siliwangi	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
75	Jumlah Desa Literasi yang dibina	Desa	N/A	N/A	100	100	200	100**	IKU Dinas Pemberdayaan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Masyarakat dan Desa
76	Jumlah KPD	KPD	N/A	N/A	653	654	300	440	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
77	Jenis inovasi dan TTG yang dihasilkan dari 27 Kabupaten/Kota.	Jenis	N/A	N/A	8	27	13	25	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
78	Tingkat ketersediaan Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perlengkapan jalan	persen	20,47	25,44	37,67	52,53	52,53	52,62	IKU Dinas Perhubungan
79	Tingkat ketersediaan prasarana dan fasilitas keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP	persen	27,78	32,03	36,09	36,16	38,35	38,35	IKU Dinas Perhubungan
80	Tingkat ketersediaan Jaringan Transportasi Massal berbasis Rel	persen	0	3,00	16,00	20,40	23,80	30,51	IKU Dinas Perhubungan
81	Tingkat ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Perhubungan Udara	Persen	25,39	26,905	37,00	48,90	0,00	0,00	IKU Dinas Perhubungan
82	Tingkat ketersediaan Prasarana Perhubungan Udara	Persen	27,93	47,15	59,72	58,01	58,01	58,07	IKU Dinas Perhubungan
83	Tingkat Pelayanan transportasi Kereta Api perkotaan di Jawa Barat	Persen	81,48	81,48	81,48	85,19	0,00	0,00	IKU Dinas Perhubungan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	persen	82,89	90,32	90,40	90,40	90,40	98,15	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
85	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	N/A	2,90	3,00	3,12	3,10	3,58	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
86	Tingkat kematangan pengelolaan dan layanan statistik sektoral	persen	N/A	N/A	77,00	77,99	70,00	80,46	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
87	Persentase penyelesaian sengketa informasi	persen	N/A	N/A	80,00	93,00	80,00	90,00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
88	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Score	I s.d II	II+ s.d III	III	Level II+ sd IV+	550	610	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
89	Persentase Koperasi yang Berkualitas	persen	N/A	N/A	30,00	26,30	26,30	27,97	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
90	Persentase UMKM yang Naik Kelas	persen	N/A	N/A	17,00	18,00	4,00	5,03	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
91	Laju Peningkatan UMKM yang mengakses kredit	Persen	N/A	N/A	20,00	12,13	0,00	0,00	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
92	Laju Peningkatan Koperasi yang mengakses kredit	Persen	N/A	N/A	20,00	10,00	0,00	0,00	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
93	Nilai realisasi investasi	Triliun Rupiah	107,10	116,97	107,00	137,50	99,00	120,40	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	poin	77,67	77,67	78	81,62	83	85,36	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
95	Laju pertumbuhan investasi PMA-PMDN	Persen	N/A	N/A	3,00	14,90	0,00	-12,00	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
96	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	poin	N/A	N/A	45,33	46,7	46,67	46,7**	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
97	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	persen	N/A	N/A	52,00	52,00	52,00	47,30	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
98	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional:								IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
	a. PEPARNAS	Peringkat	0	0	0	0	N/A	N/A	
	b. PEPARPENAS	Peringkat	0	0	1	5	N/A	N/A	
99	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional (PEPARPENAS)								IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
	a. PON	Peringkat	N/A	N/A	N/A	0	0	0	
	b. PEPARNAS	Peringkat	N/A	N/A	N/A	0	0	0	
	c. POPNAS	Peringkat	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	
	d. POPWILNAS	Peringkat	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Indeks Membaca Masyarakat	Poin	N/A	N/A	68,50	68,33	61,49	61,49	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
101	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Membaca	Poin	N/A	N/A	62,92	62,76	52,33	52,33	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
102	Tingkat Kebiasaan Membaca Masyarakat	Poin	N/A	N/A	68,02	67,68	63,54	63,54	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
103	Tingkat Pemanfaatan Bahan Bacaan	Poin	N/A	N/A	74,58	74,39	68,61	68,61	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
104	Persentase PD yang Memenuhi Standar Baku Kearsipan	Persen	N/A	N/A	52,00	2,90	0,00	28,95 (7 PD)	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
105	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	N/A	40	52,00	2,90	14,00	11	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
106	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan arsip	Persen	N/A	N/A	31,00	31,00	0,00	0	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
107	Persentase Penyelamatan dan Pelestarian arsip Statis	Persen	N/A	N/A	31,00	31,00	48,00	66 (10.000 lbr)	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
108	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	-	-	1.444.000,00	1.518.255,58	988.000	1.389.455	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
109	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan Jawa Barat	persen	2,48	3,20	1,10	4,16	1,10	1,10	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
110	Persentase Kawasan Konservasi Perairan Yang Dikelola	persen	-	5,28	13,54	14,03	14,03	19,04	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Persentase Tingkat Kepatuhan Perilaku Usaha Kelautan Dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	persen	45,16	55,48	50,00	51,00	51,00	51,85	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
112	NTUP Sub Sektor Kelautan dan Perikanan	Poin	115	121,69	122,69	126,71	0,00	0,00	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
113	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	N/A	N/A	1.830.000	3.645.433	30.000	31.610	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
114	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	N/A	N/A	49.000.000	64.610.832	15.000.000	35.513.885	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
115	Persentase Seni Budaya Yang Dilestarikan	Persen	N/A	N/A	16,42	58,21	8,07	37,69	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
116	Laju Seni Budaya Yang Dilestarikan	Jumlah	N/A	N/A	3,79	3,79	8,07	37,69	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
117	Skor PPH Tingkat Ketersediaan	poin	N/A	N/A	89,80	90,40	90,70	92,88	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
118	Tingkat Konsumsi Pangan:								IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	- energi	kkal/kap/hr	0	N/A	2150	2218	2150	2150	
	- protein	gr/kap/hr	N/A	N/A	57	64,8	57	64,9	

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Sesuai SNI	Persen	N/A	N/A	84,00	98,46	10,10	65,21	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
120	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)	Point	N/A	N/A	126,07	125,01	100,10	94,44	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
121	Produksi komoditas peternakan (ton):								IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	- Daging	ton	N/A	N/A	1.043.467	1.065.014	1.021.699	1.021.699*	
	- Telur	ton	N/A	N/A	243.517	262.989	609.741	609.741*	
	- Susu	ton	N/A	N/A	326.698	351.885	335.773	293.490**	
122	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Ton	N/A	N/A	12.454.406	13.465.327	12.570.313	13.759.620	IKU Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
123	NTUP -R	Poin	112,41	112,81	>100	109,42	100	93,59	IKU Dinas Perkebunan
124	Laju peningkatan produksi komoditas unggulan utama perkebunan	persen	N/A	N/A	0,10	10,00	1,00	2,19	IKU Dinas Perkebunan
125	Laju peningkatan nilai tambah produk perkebunan	Persen	N/A	N/A	2,00	0,00	0,10	0,14	IKU Dinas Perkebunan
126	Persentase tutupan hutan	persen	32,87	32,81	32,87	33,67	40,52	45,43	IKU Dinas Kehutanan
127	Tingkat kerusakan hutan	persen	1,00	0,86	0,90	0,80	0,80	0,78	IKU Dinas Kehutanan
128	Persentase peningkatan populasi Tumbuhan dan	persen	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	0,00	IKU Dinas Kehutanan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Satwa liar yang ditangkarkan								
129	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	persen	12,69	0,00	1,00	108,15	10,00	12,45	IKU Dinas Kehutanan
130	Produksi Hasil Hutan	Persen	12,69	0,00	1,00	108,15	10,00	12,45	IKU Dinas Kehutanan
131	Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam	Persen	5,00	10,00	8,00	-5,75	0,00	0,00	IKU Dinas Kehutanan
132	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	24,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IKU Dinas Kehutanan
133	Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	GWh	49.919	54.555	58.367	63.381	49.315	57.257	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
134	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	persen	0,91	1,07	1,63	1,84	1,84	1,84	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
135	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	persen	30,00	35,00	40,00	40,87	45,00	46,65	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
136	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	Persen	1,84	1,84	2,00	2,00	2,00	2,37	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
137	PDRB Industri Non Migas	(Rp Triliun)	N/A	N/A	N/A	884,12	800,00	860,07	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
138	Laju Pertumbuhan Ekspor Non Migas	persen	11,80	N/A	N/A	-1,38	-15,73	-11,18	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
139	PDRB Sektor Perdagangan	Rp. Triliun	269,77	N/A	N/A	323,64	280,00	303,86	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	Kontribusi Industri Jawa Barat Terhadap Nasional	Persen	42,29	41,59 (TW.III)	N/A	28,34	0,00	0,00	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
141	Laju Pertumbuhan Perdagangan Jawa Barat	Persen	N/A	N/A	N/A	7,51	0,00	0,00	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
142	Persentase Kebijakan yang Efektif	Persen	N/A	N/A	90,50	100,00	0,00	0,00	IKU Sekretariat Daerah
143	Persentase Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	Persen	N/A	N/A	90,50	100,00	75,00	75,00	IKU Sekretariat Daerah
144	Persentase Usulan Daerah Persiapan Otonom yang disetujui DPRD Provinsi	Persen	N/A	N/A	N/A	0,00	2,00	3	IKU Sekretariat Daerah
145	Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis	Persen	N/A	N/A	75,00	100,00	100,00	100	IKU Sekretariat Daerah
146	Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	75,00	78,91	80,00	84,12	IKU Sekretariat Daerah
147	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	90,00	100,00	75,00	90,00**	IKU Sekretariat Daerah
148	Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	skor/nilai	3,17	3,284	3,34	3,284	3,31	3,30	IKU Sekretariat Daerah
149	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum	Persen	N/A	N/A	90,00	100,00	90,00	100	IKU Sekretariat Daerah
150	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan, bantuan hukum	Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	80,00	100	IKU Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan HAM serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum								
151	Level Kematangan/ Maturitas PBJ	Level	N/A	N/A	2	2	3	3	IKU Sekretariat Daerah
152	Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi,supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD NonLembaga Keuangan dan investasi Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	90,00	90,00	90,00	81,78	90,00	90	IKU Sekretariat Daerah
153	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	100,00	124,24	100,00	138,46	IKU Sekretariat Daerah
154	Nilai Penguatan Organisasi	Nilai	N/A	N/A	2,08	1,85	2,22	2,22	IKU Sekretariat Daerah
155	Nilai Penataan Organisasi	Nilai	N/A	N/A	2,22	1,85	2,33	2,33	IKU Sekretariat Daerah
156	Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	3,83	N/A	4,10	3,82	4,39	4,39	IKU Sekretariat Daerah
157	Nilai Penataan Tata Laksana	Nilai	N/A	N/A	3,62	3,00	3,82	3,82	IKU Sekretariat Daerah
158	Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	Kategori	A	A	A	A	A	A	IKU Sekretariat Daerah
159	Nilai Manajemen Perubahan	Nilai	3,51	N/A	3,69	3,25	3,88	3,88	IKU Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160	Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kualifikasi	Cukup Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Baik	informasi	IKU Sekretariat Daerah
161	Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	Kualifikasi	N/A	N/A	Baik	Baik	Baik	baik	IKU Sekretariat Daerah
162	Indeks Penilaian Kualitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah	Kategori	N/A	N/A	100	100	Baik	Baik	IKU Sekretariat Daerah
163	Tingkat dukungan dan fasilitasi	persen	N/A	N/A	100,00	68,64	100,00	100,00	IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
164	Indeks kepuasan masyarakat	Skor	N/A	N/A	3,00	3,20	3,50	3,18	IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
165	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan, Promosi dan Informasi yang terlayani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Badan Penghubung
166	Persentase koordinasi jejaring kerja dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Badan Penghubung
167	Persentase fasilitasi promosi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan potensi pembangunan Jawa Barat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Badan Penghubung

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
168	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat	Persen	80,00	80,00	80,00	93,69	85,00	97,64	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
169	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Audit BPK	IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
170	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	Persen	N/A	N/A	80,00	N/A (Dalam Proses pemeriksaan Audit BPK RI)	0,00	0,00	IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
171	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Tinggi	Persen	N/A	N/A	80,00	N/A (Dalam Proses pemeriksaan Audit BPK RI)	0,00	0,00	IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
172	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	N/A	N/A	58,94	58,94	56,80	54,04	IKU Badan Pendapatan Daerah
173	Indeks Sistem Merit	poin	N/A	268	294	277	325	375,5	IKU Badan Kepegawaian Daerah
174	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kualifikasi (1), Kinerja (3), Disiplin (4)	Persen	N/A	48,00	64,50	76,00	66,00	76,00**	IKU Badan Kepegawaian Daerah
175	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Persen	10,00	20,00	30,00	30,00	40,00	30,00**	IKU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
176	Persentase PNS Pemprov Jabar yang bersertifikat kompetensi	Persen	70,00	80,00	90,00	98,52	75,00	92,16	IKU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177	Persentase Smart ASN Prov Jabar	Persen	N/A	20,00	40,00	40,00	60,00	40,00**	IKU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
178	Jumlah Akreditasi Pengembangan Kompetensi	Sertifikat	4	5	6	5	7	6	IKU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
179	Persentase Kajian Kelitbangan yang Didiseminasikan Kepada Perangkat Daerah atau *Stakeholder* Lainnya	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
180	Persentase rekomendasi kebijakan daerah yang dihasilkan	Persen	80,00	100,00	20,00	20,00	32,50	32,50	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
181	Persentase rencana kelitbangan yang diimplementasikan	Persen	N/A	N/A	20,00	20,00	0,00	0,00	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
182	Persentase hasil kelitbangan yang diterapkan	Persen	108,33	100,00	20,00	20,00	26,67	30,50	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
183	Persentase inovasi berbasis IPTEK yang diterapkan	Persen	93,33	100,00	20,00	37,10	24,80	40,80	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
184	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kelitbangan	Persen	100,00	100,00	20,00	20,00	0,00	0,00	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185	Persentase Kerjasama Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK yang diterapkan	Persen	100,00	100,00	20,00	20,00	0,00	0,00	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
186	Persentase dokumen perencanaan, peningkatan kualitas aparatur, sarana prasarana dan dokumen pengelolaan keuangan	Persen	100,00	100,00	20,00	20,00	0,00	0,00	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
187	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	Poin	3,176	3,249	3259	3,259	3,309	N/A	IKU Inspektorat
188	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional	Kab/Kota	3	2	4	N/A	0	0	IKU Inspektorat
189	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai	A	A	A	A	A	A	IKU Inspektorat
190	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP-nya adalah ≥ BB	Pemerintah Daerah	2	2	5	4	0	0	IKU Inspektorat
191	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Inspektorat
192	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang opini atas LKPD adalah WTP	Kab/Kota	25	N/A	25	24	26	27	IKU Inspektorat
193	Nilai evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	N/A	N/A	75	N/A	0	0	IKU Inspektorat

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	2	3	3	3	3	3	IKU Inspektorat
195	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	94,00	91,80	IKU Inspektorat
196	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	0	3	IKU Inspektorat
197	Indeks Ketahanan Daerah	poin	N/A	N/A	0,4	0,4	0,4	0,4**	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
198	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	persen	N/A	N/A	70,78	65,50	0,0198	0,0111	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
199	Tingkat Bina Politik dan Demokratisasi	persen	N/A	N/A	70,78	N/A	0,0009	0,00099	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
II. ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68,50	68,70	68,6 0	68,50	68,10	68,50**	IKU Pemerintah Daerah
2	Indeks Demokrasi	Poin	68,78	65,50	68,79	69,09	70,70	69,09**	IKU Pemerintah Daerah
3	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	N/A*	N/A*	16,63	17,43	6,54	37,69	IKU Pemerintah Daerah
4	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	69,58	69,61	70,00-71,00	77,50	70,00	88,40	IKU Pemerintah Daerah
5	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	46,33	49,00	53,63	50,00	49	50,00**	IKU Pemerintah Daerah
6	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	40,90	40,90-41,00	41,00 - 43,00	46,13	38,00	39,06	IKU Pemerintah Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Periode		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perangkat Daerah
			2017	2018	2019	2019	2020	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Konsumsi listrik per kapita	kWh/ Kapita	1.155	1.231	1.300	1.302	1.000	1146,60	IKU Pemerintah Daerah
8	Indeks Desa Membangun	Poin	0,64	0,64	0,65	0,67	0,68	0,69	IKU Pemerintah Daerah
9	Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru	Usulan	0	0	0	0	1	3	IKU Pemerintah Daerah
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	51,85 (metode lama)	49,54 (metode baru)	49,76	52,12	60,57	61,59	IKU Pemerintah Daerah
11	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2,02	2,38	2,80	3,85	3,82	3,87	IKU Pemerintah Daerah
12	Indeks Penggunaan Air	Persen	N/A*	N/A*	1,1923	1,192	1,1927	1,1927	IKU Pemerintah Daerah
13	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	166	166	165	152,13	149,45	152,13**	IKU Pemerintah Daerah
14	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	108,39	110,9	113,11	112,36	101,12	101,41	IKU Pemerintah Daerah
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	BB	BB	BB	BB	BB**	IKU Pemerintah Daerah
16	Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah	Persen	N/A*	N/A*	50,00	61,22	54,00	73,43	IKU Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

*) Indikator baru digunakan pada periode RPJMD 2018-2023 dan belum pernah digunakan sebelumnya sehingga tidak tersedia data pada tahun tersebut.

**) Data Sementara menggunakan realisasi tahun sebelumnya (2019)

Tabel 8.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/*Impact*
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,70	71,30	72,03	72,19	72,57	73,05	73,05	Indikator Makro
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,39	1,36	1,30	1,21	1,16	1,12	1,12	Indikator Makro
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,83	7,25	6,82	7,77	7,67	7,54	7,54	Indikator Makro
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,22	8,17	7,99	10,45	10,16	9,69	9,69	Indikator Makro
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,33	5,66	5,07	3,15	3,92	4,35	4,35	Indikator Makro
6	Indeks Gini	Poin	0,393	0,405	0,398	0,402	0,4	0,396	0,396	Indikator Makro
7	Pendapatan Per Kapita*	Juta Rupiah	37,22	40,3	43,35	44,02	46,48	49,29	49,29	Indikator Makro
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,47	72,76	72,85	73,06	73,09	73,11	73,11	IKU Pemerintah Daerah/IKU Dinas Kesehatan
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	70,04	70,20	69,48	69,60	69,80	70,30	70,30	IKU Pemerintah Daerah
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,18	89,19	89,26	89,30	89,42	90,00	90,00	IKU Pemerintah Daerah
11	Rata–Rata Lama Sekolah	Tahun	8,14	8,18	8,37	8,58	8,60	8,64	8,64	IKU Pemerintah Daerah
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	12,88	12,48	12,52	12,54	12,56	12,56	IKU Pemerintah Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak*	Triliun Rupiah	N/A	N/A	-	51,70	52,80	53,90	53,90	IKU Pemerintah Daerah
14	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	85,2	81,6	89,00	83,20	83,80	84,40	84,40	IKU Pemerintah Daerah
15	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,71	2,85	6,84	2,91	2,99	3,08	3,08	IKU Pemerintah Daerah
16	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	5,35	6,49	4,04	2,78	3,40	3,72	3,72	IKU Pemerintah Daerah
17	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,55	4,19	7,51	3,23	4,01	4,45	4,45	IKU Pemerintah Daerah
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	449,37	473,00	535,72	501,52	515,31	531,87	531,87	IKU Pemerintah Daerah
19	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Persen	N/A	20,10	21,10	19,90	20,50	21,10	21,10	IKU Pemerintah Daerah
20	Indeks Kepuasan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	indeks	N/A	N/A	N/A	3,51	3,70	4,01	4,01	IKU Dinas Pendidikan
21	APM SMA, SMK dan SLB	persen	60,64	64,41	68,44	72,56	75,51	78,46	78,46	IKU Dinas Pendidikan
22	Nilai Mutu Pendidikan16/01/2021*									IKU Dinas Pendidikan
	SMA	Nilai (SMA)	4.50	5.56	6.56	6,59	6,61	6,63	6,63	
	SMK	Nilai (SMK)	4.11	5.32	6.48	6,51	6,53	6,55	6,55	
	SLB	Nilai (SLB)	-	-	4.23	4,63	4,83	5,03	5,03	
23	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada UPT	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	81,26-81,75	81,76-82,25	82,26-83,75	IKU Dinas Kesehatan
24	Jumlah RS Provinsi yang terakreditasi paripurna	RS Terakreditasi	N/A	N/A	2	2	2	3	4	IKU Dinas Kesehatan

iku dinkes

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Prevalensi Stunting	Persen	N/A	N/A	26,21	23,20	21,20	19,20	19,20	IKU Dinas Kesehatan
26	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai	N/A	N/A	86	86,50	87	87,50	88	IKU Dinas Kesehatan
27	Tingkat Kemantapan Jalan	persen	89,3	90,18	91,90	81,11	82,78	83,84	83,84	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
28	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan	persen	N/A	N/A	1,35	13,23	19,07	24,90	24,90	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
29	Persentase Ketersediaan Regulasi Penataan Ruang (RTR dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)*	persen	N/A	N/A	N/A	56,21	75,57	94,93	94,93	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
30	Persentase Luasan Pengendalian Pemanfaat Ruang*	persen	N/A	N/A	N/A	34,45	45,43	60,10	60,10	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
31	Persentase Sumber Daya Kontruksi yang terlatih*	persen	N/A	N/A	N/A	47,29	78,04	100	100	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
32	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	persen	N/A	N/A	0,29	0,20	0,25	0,25	0,25	IKU Dinas Sumber Daya Air
33	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	persen	N/A	N/A	52,20	54,50	55,50	56,50	56,65	IKU Dinas Sumber Daya Air
34	Persentase Luas genangan yang tertangani*	persen	N/A	N/A	29,20	36,90	57,00	77,00	77,00	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Tingkat kualitas kawasan permukiman	persen	N/A	60,00	61,25	64,50	66,00	67,50	67,50	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
36	Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib	persen	100	100	100	77,00	83,50	88,50	88,50	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
37	Tingkat ketersediaan rumah layak	persen	N/A	91,32	91,70	92,09	92,41	92,72	92,72	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
38	Tingkat tertib tata kelola pertanahan*	persen	N/A	12,90	19,59	52,24	69,77	88,37	88,37	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
39	Akses Sanitasi Layak*	persen	N/A	70,74	72,44	80,37	83,58	86,79	86,79	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
40	Akses Air Minum Layak*	persen	N/A	78,00	78,78	95,12	96,75	98,37	98,37	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
41	Akses Penanganan Sampah di Perkotaan*	persen	N/A	N/A	69,01	72,3	77,00	79,00	79,00	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
42	Rasio Permukiman Layak	Rasio	0,9928	0,9948	0,9952	0,9958	0,9962	0,9965	0,9965	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
43	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat*	Poin	N/A	N/A	N/A	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
44	Laju Penegakan Perda dan Perkada	Persen	N/A	N/A	5,00	6,00	6,00	0,00	0,00	IKU Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Indeks Kesejahteraan Sosial*	Persen	N/A	N/A	N/A	39,01	39,67	40,27	40,27	IKU Dinas Sosial
46	Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi*	Persen	N/A	N/A	N/A	70,00	75,00	80,00	80,00	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
47	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja*	Persen	N/A	N/A	N/A	63,66	64,55	65,43	65,43	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
48	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan*	Persen	N/A	N/A	N/A	63,39	69,73	76,7	76,7	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
49	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	Persen	N/A	N/A	N/A	20,00	20,00	20,00	20,00	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
50	Persentase transmigran yang ditempatkan*	Persen	N/A	N/A	N/A	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
51	Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan 7 prasyarat Pengarusutamaan Gender*	Persen	N/A	N/A	N/A	88,88	92,59	100,00	100,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
52	Persentase Perempuan di Parlemen provinsi*	persen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
53	Tingkat Keberhasilan penangananan kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (KED) terhadap perempuan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
54	Tingkat keberhasilan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (KED) terhadap perempuan*	persen	N/A	N/A	N/A	74,07	85,19	100,00	100,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
55	Tingkat penanganan kasus KED terhadap anak	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
56	Persentase Kab/ Kota yang memperoleh predikat menuju kab/ Kota layak anak (KLA)	persen	56,00	70,00	85,18	88,88	96,22	100,00	100,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*)	anak	2,24	2,24	2,52	2,12	2,10	2,07	2,07	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
58	Indeks Perlindungan Anak*	Nilai	N/A	N/A	N/A	67,83	68,53	69,53	69,53	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
59	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	42,07	36,20	42,73	42,87	43,07	43,27	43,27	IKU Dinas Lingkungan Hidup
60	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) *	Poin	N/A	N/A	62,54	70,50	73,00	75,50	75,50	IKU Dinas Lingkungan Hidup
61	Indeks Kualitas Udara (IKU)*	Poin	78,91	72,80	79,40	79,71	79,91	80,11	80,11	IKU Dinas Lingkungan Hidup
62	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	persen	N/A	N/A	0,62	0,81	0,83	6,10	6,10	IKU Dinas Lingkungan Hidup
63	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	persen	N/A	N/A	81,12	82,63	83,47	84,28	84,28	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Persentase Perkembangan Strata Desa Mandiri	persen	N/A	0,70	1,84	6,34	8,22	10,11	10,11	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
65	Persentase Perkembangan Strata Desa Tertinggaal	persen	17,06	6,14	2,28	1,10	0,00	0,00	0,00	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
66	Presentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	persen	26,78	28,67	33,85	37,00	38,00	39,00	39,00	IKU Dinas Perhubungan
67	Presentase Terminal Tipe B yang dibangun*	persen	N/A	N/A	N/A	3,48	28,57	42,86	42,86	IKU Dinas Perhubungan
68	Tingkat ketersediaan prasarana dan dukungan fasilitas keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP	persen	27,78	32,03	36,09	58,97	86,82	97,13	97,13	IKU Dinas Perhubungan
69	Tingkat ketersediaan Jaringan Transportasi Massal berbasis Rel	persen	0,00	3,00	16,00	34,24	41,14	89,14	89,14	IKU Dinas Perhubungan
70	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	persen	82,89	82,89	90,32	90,45	90,5	90,55	90,55	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	N/A	N/A	2,90	3,30	3,50	3,70	3,70	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
72	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan	persen	N/A	N/A	N/A	80,00	90,00	100,00	100,00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	evaluasi Pembangunan Daerah*									
73	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	level	I s.d II	I s.d II	II+ s.d III	575	600	625	625	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
74	Persentase Koperasi yang mengakses kredit*	persen	N/A	N/A	N/A	23,00	26,00	30,00	30,00	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
75	Persentase UMKM yang Naik Kelas	persen	N/A	N/A	18,00	5,00	6,00	7,00	7,00	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
76	Nilai realisasi investasi	Triliun Rupiah	107,10	116,97	137,50	101,97	105,00	109,20	109,20	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
77	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	poin	77,67	77,67	81,62	85,00	87,00	89,00	89,00	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
78	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	poin	N/A	N/A	45,33	46,67	46,67	46,67	46,67	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
79	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	persen	N/A	N/A	52,00	54,00	56,00	58,00	58,00	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
80	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional (PEPARPENAS)	Peringkat	N/A	N/A	5	3	N/A	3	3	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
81	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional:									IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
	a. POPNAS	Peringkat	N/A	N/A	1	1	N/A	1	1	

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b. POPWILNAS	Peringkat	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	1	
82	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional:									IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
	a. PON	Peringkat	N/A	N/A	-	1	N/A	N/A	N/A	
	b. PEPARNAS	Peringkat	N/A	N/A	-	1	N/A	N/A	N/A	
83	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Poin	N/A	N/A	68,50	69,00	71,00	72,00	72,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
84	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	persen	N/A	40,00	52,00	30,00	45,00	60,00	60,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
85	Persentase Penyelamatan dan Pelestarian arsip Statis	persen	N/A	N/A	31,00	48,00	68,00	88,00	88,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
86	Indeks membaca masyarakat	Poin	N/A	N/A	68,50	62,00	63,00	64,00	64,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
87	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal*	Kategori	N/A	N/A	CC	B	BB	A	A	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
88	Persentase Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis*	Persen	N/A	N/A	31,00	35,00	50,00	65,00	65,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
89	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	1.435.213,5	1.435.213	1.417.455	1.014.400	1.041.553,12	1.069.481,49	1.069.481,49	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
90	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan Jawa Barat	persen	2,48	3,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Persentase Kawasan konservasi perairan yang dikelola	persen	N/A	5,28	13,54	22,27	24,38	25,43	25,43	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
92	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	persen	45,16	55,48	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
93	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat yang dilindungi, dikembangkan, dibina dan dimanfaatkan*	persen	N/A	N/A	23,28	19,56	24,89	24,21	24,21	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
94	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	N/A	N/A	1.830.000	30.000	33.000	36.300	36.300	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
95	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	N/A	N/A	49.000.000	30.000.000	36.000.000	39.600.000	39.600.000	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
96	Skor PPH Tingkat Ketersediaan	poin	N/A	N/A	90,40	91,60	92,50	93,40	93,40	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
97	Persentase peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan sesuai standar mutu dan keamanan pangan*	persen	N/A	N/A	N/A	10,27	11,35	12,67	12,67	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
98	Tingkat Konsumsi Pangan:									IKU Dinas Ketahanan
	- energi	kkal/kap/hr	N/A	N/A	N/A	2.150	2.150	2.150	2.150	

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- protein	gr/kap/hr	N/A	N/A	N/A	57	57	57	57	Pangan dan Peternakan
99	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)	Poin	N/A	N/A	N/A	101,00	102,50	104,00	104,00	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
100	Produksi komoditas peternakan (ton):									IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	- Daging	ton	N/A	N/A	N/A	1.084.574	1.147.449	1.210.324	1.210.324	
	- Telur	ton	N/A	N/A	N/A	630.222	650.702	671.183	671.183	
	- Susu	ton	N/A	N/A	N/A	372.403	409.032	445.662	445.662	
101	Persentase Peningkatan mutu produk hewan	persen	N/A	N/A	N/A	10,00	10,00	10,00	10,00	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
102	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran*	persen	N/A	N/A	N/A	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
103	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	ton	N/A	N/A	13.465.327	12.686.496	12.802.956	12.919.701	12.919.701	IKU Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
104	Laju peningkatan produktivitas komoditas unggulan utama perkebunan	persen	N/A	N/A	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	IKU Dinas Perkebunan
105	NTUP -R	Poin	112,41	112,81	109,42	101,25	102,39	103,52	103,52	IKU Dinas Perkebunan
106	Indeks Kualitas Tutupan Lahan*	Poin	N/A	N/A	N/A	38,80	38,85	38,90	38,90	IKU Dinas Kehutanan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Presentase Tutupan Hutan	persen	39,39	40,53	40,27	40,77	41,02	41,27	41,27	IKU Dinas Kehutanan
108	Nilai Produksi Hasil Hutan	Rp. Milyar	762,75	657,83	1855,03	1.892,31	1.911,24	1.930,35	1.930,35	IKU Dinas Kehutanan
109	Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	GWh	49,919	54,555	58,367	51,169	54,169	56,869	56,869	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
110	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	persen	0,91	1,07	1,63	1,84	2,45	5,13	5,13	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
111	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	persen	30,00	35,00	40,00	46,00	47,00	48,00	48,00	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
112	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	persen	1,84	1,84	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
113	PDRB Industri Non Migas	(Rp Triliun)	755,18	827,30	884,12	823,60	856,79	892,86	892,86	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
114	Laju Pertumbuhan Ekspor Non Migas	persen	14,49	3,99	-1,38	1,44	2,88	4,33	4,33	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
115	PDRB Sektor Perdagangan	Rp. Triliun	269,67	291,74	323,64	310,23	324,90	341,28	341,28	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Persentase Bahan Kebijakan umum pembinaan, Pemahaman, Pengalaman keagamaan	persen	90,00	90,00	90,50	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Sekretariat Daerah
117	Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Skor/ nilai	3,17	3,249	3,284	3,329	3,344	3,354	3,354	IKU Sekretariat Daerah
118	Persentase Fasilitas Administrasi Pemerintahan Umum*	persen	N/A	N/A	N/A	90,00	90,00	90,00	90,00	IKU Sekretariat Daerah
119	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti*	persen	N/A	N/A	N/A	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Sekretariat Daerah
120	Persentase penataan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan HAM*	persen	N/A	N/A	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	IKU Sekretariat Daerah
121	Persentase penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan*	persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Sekretariat Daerah
122	Indeks tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah*	indeks	N/A	N/A	2	70	80	90	90	IKU Sekretariat Daerah
123	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi *	nilai	N/A	N/A	2,08	3,94	4,06	4,18	4,18	IKU Sekretariat Daerah
124	Nilai Manajemen Perubahan	nilai	3,51	N/A	3,69	3,45	3,55	3,65	3,65	IKU Sekretariat Daerah
125	Kategori akuntabilitas kinerja instansi	predikat	A	A	A	A	A	A	A	IKU Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat									
126	Nilai Penataan Tatalaksana	nilai	3,43	N/A	3,62	3,20	3,30	3,40	3,40	IKU Sekretariat Daerah
127	Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	nilai	3,83	N/A	4,10	4,06	4,18	4,30	4,30	IKU Sekretariat Daerah
128	Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis	Persen	75,00	75,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Sekretariat Daerah
129	Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	Persen	65,00	70,00	-	80,00	80,00	85,00	85,00	IKU Sekretariat Daerah
130	Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi,supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan perumusan kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, pengendalian dalam aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti*	Persen	N/A	N/A	N/A	90,00	90,00	90,00	90,00	IKU Sekretariat Daerah
131	Kualifiasi Kepuasan Layanan Pimpinan*	Kualifikasi	N/A	N/A	-	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	Kualifikasi	Baik	Baik	-	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Sekretariat Daerah
133	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda*	Nilai	N/A	N/A	N/A	B	B	B	B	IKU Sekretariat Daerah
134	Persentase penyelenggaraan fungsi Biro Organisasi secara efektif*	persen	N/A	N/A	N/A	93,00	94,00	95,00	95,00	IKU Sekretariat Daerah
135	Indek Kepuasan Layanan Intenal Setda*	kualifikasi	N/A	N/A	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Sekretariat Daerah
136	Persentase Usulan Daerah Persiapan Otonom yang disetujui DPRD Provinsi*	Jumlah	N/A	N/A	N/A	2	1	1	6	IKU Sekretariat Daerah
137	Tingkat dukungan dan fasilitasi	persen	N/A*	N/A*	68,64	100	100	100	100	IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
138	Indeks kepuasan masyarakat	Skor	N/A	N/A	3,20	4,00	4,00	4,00	4,00	IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
139	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Penghubung*	Nilai	N/A	N/A	N/A	78,00	82,00	85,00	85,00	IKU Badan Penghubung
140	Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi*	persen	N/A	N/A	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
142	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	56,20	57,90	58,94	60,49	60,56	60,01	60,01	IKU Badan Pendapatan Daerah
143	Indeks Sistem Merit	poin	N/A	268	294	375,50	380,50	390	390	IKU Badan Kepegawaian Daerah
144	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dan STTPL*	persen	N/A	N/A	65,00	80,00	85,00	90,00	90,00	IKU Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
145	Persentase Akreditasi Penyelenggaraan Diklat*	persen	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
146	Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan Biro Pemprov. Jabar/Pemerintah Kab.Kota di Jabar/Masyarakat/Dunia Usaha/Pihak Lainnya*	persen	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
147	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	point	3,176	3,249	3,259	4,309	4,344	4,354	4,354	IKU Inspektorat

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	IKU Inspektorat
149	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Inspektorat
150	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern	persen	2	3	3	3	3	4	4	IKU Inspektorat
151	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	persen	100,00	100,00	100,00	96,00	98,00	100,00	100,00	IKU Inspektorat
152	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,40	0,45	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
153	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	persen	68,78 (metode lama)	65.50 (metode lama)	69.09 (metode lama)	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
154	Tingkat Bina Demokratisasi*	persen	68,78 (metode lama)	65.50 (metode lama)	69.09 (metode lama)	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
155	Tingkat Bina Politik dan Demokratisasi	Poin	68,78 (metode lama)	65.50 (metode lama)	69.09 (metode lama)	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68,50	68,70	68,50	68,60	69,10	69,60	69,60	IKU Pemerintah Daerah
2	Indeks Demokrasi	Poin	68,78	65,50	65,50 (2018)	71,79	72,70	73,70	73,70	IKU Pemerintah Daerah
3	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	N/A*	N/A*	17,43	19,56	24,89	24,21	24,21	IKU Pemerintah Daerah
4	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	69,58	69,61	77,50	72,00	74,00	75,00	75,00	IKU Pemerintah Daerah
5	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	46,33	49,00	50,00	50,00	52,00	54,00	54,00	IKU Pemerintah Daerah
6	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	40,90	41,00	46,13	41,00	44,00	47,00	47,00	IKU Pemerintah Daerah
7	Konsumsi listrik per kapita	kWh/ Kapita	1.155	1.231	1.302	1.050	1.100	1.150	1.150	IKU Pemerintah Daerah
8	Indeks Desa Membangun	Poin	0,64	0,64	0,67	0,70	0,71	0,72	0,72	IKU Pemerintah Daerah
9	Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru	Usulan	0	0	0	0	1	2	6	IKU Pemerintah Daerah
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	51,85 (metode lama)	49,54 (metode baru)	52,12	60,78	61,19	61,60	61,60	IKU Pemerintah Daerah
11	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2,02	2,38	3,85	4,29	4,75	5,22	5,22	IKU Pemerintah Daerah
12	Indeks Penggunaan Air	Persen	N/A*	N/A*	1,192	1,1922	1,1912	1,1902	1,1902	IKU Pemerintah Daerah
13	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	166,00	166,00	152,13	149,00	147,00	144,00	144,00	IKU Pemerintah Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi awal periode		Realisasi	Target				Keterangan
			2017	2018	2019	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	108,39	110,9	112,36	102,25	103,39	104,52	104,52	IKU Pemerintah Daerah
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	BB	BB	BB	A	A	A	IKU Pemerintah Daerah
16	Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah	Persen	N/A*	N/A*	61,22	56,00	58,00	62,00	62,00	IKU Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

* Indikator baru digunakan pada periode RPJMD 2018-2023 dan belum pernah digunakan sebelumnya sehingga tidak tersedia data pada tahun tersebut.

Tabel 8.5
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tingkat Hasil/*Outcome* Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Perangkat Daerah
				Target	Realisasi	
1		2	3	4	5	6
I. ASPEK PELAYANAN UMUM						
Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar						
1		**Pendidikan**				
	1	APK SMA/SMK Sederajat	Persen	85,00	78,04	Dinas Pendidikan
	2	APM SMA/SMK Sederajat	Persen	65,00	57,42	Dinas Pendidikan
	3	SMA/SMK Sederajat Akreditasi A	Persen	10,00	36,55	Dinas Pendidikan
	4	SMA yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana	Persen	70,00	70,00	Dinas Pendidikan
	5	SMK yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana	Persen	70,00	70,00	Dinas Pendidikan
	6	APK SLB	Persen	24,00	24,00	Dinas Pendidikan
	7	Sekolah SLB Terakreditasi A	Sekolah	5	16	Dinas Pendidikan
	8	SLB yang memenuhi standar sarana dan prasarana	Persen	20,00	16,00	Dinas Pendidikan
	9	Nilai Rerata Uji Kompetensi GTK SMA/MA/SMK/SLB	Nilai	75,51	58,97	Dinas Pendidikan
	10	Kualifikasi S2 Guru SMA	Persen	10,00	12,52	Dinas Pendidikan
	11	Kualifikasi S2 Guru SMK	Persen	10,00	6,08	Dinas Pendidikan
	12	Kualifikasi S2 Guru SLB	Persen	5,00	4,21	Dinas Pendidikan
	13	Siswa Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP/SMA/ SMK/SLB Negeri Swasta	Siswa	8.050.838	31.481.356	Dinas Pendidikan
2		**Kesehatan**				
	1	Persentase Rumah tangga yang berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	70,00	70,00	Dinas Kesehatan
	2	Persentase Desa Siaga Aktif	Persen	85,00	85,00	Dinas Kesehatan
	3	Persentase penduduk yang menggunakan air minum yang berkualitas	Persen	61,50	77,84	Dinas Kesehatan
	4	Persentase penduduk menggunakan jamban sehat	Persen	56,00	72,39	Dinas Kesehatan
	5	Ratio kematian ibu	Persen	86,00	78,30	Dinas Kesehatan
	6	Ratio kematian bayi	Persen	5,90	3,28	Dinas Kesehatan
	7	Prevalensi Gizi Buruk	Persen	0,52	0,52	Dinas Kesehatan
	8	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	Persen	89,00	89,00	Dinas Kesehatan
	9	Persentase Puskesmas terisi dokter sesuai standar	Persen	100,00	100,00	Dinas Kesehatan

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Perangkat Daerah
				Target	Realisasi	
1		2	3	4	5	6
	10	Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar	Persen	64,52	64,52	Dinas Kesehatan
	11	Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi	Puskesmas	256	256	Dinas Kesehatan
	12	Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi	Rumah Sakit	95	95	Dinas Kesehatan
	13	Jumlah RS mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar	Rumah Sakit	99	99	Dinas Kesehatan
	14	Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota	Persen	75,00	75,00	Dinas Kesehatan
	15	Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan	Persen	85,00	84,46	Dinas Kesehatan
	16	Terpenuhinya regulasi kebijakan bidang kesehatan provinsi	Dokumen	2	2	Dinas Kesehatan
	17	Tercapainya pengelolaan data dan informasi kesehatan provinsi (Pemerintah dan Swasta)	Persen	55,00	55,00	Dinas Kesehatan
	18	Persentase penanganan kesehatan pada kejadian bencana dan paska bencana	Persen	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	19	Persentase penanganan kesehatan pada Kejadian Luar Biasa Penyakit	Persen	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	20	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80,00	80,00	Dinas Kesehatan
	21	Peningkatan kinerja keuangan	Persen	30,00	30,00	Dinas Kesehatan
	22	Peningkatan kinerja pelayanan	Persen	70,00	70,00	Dinas Kesehatan
	23	Peningkatan mutu dan manfaat untuk masyarakat	Persen	60,00	60,00	Dinas Kesehatan
	24	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (*Treatment Succes Rate*)	Persen	89,00	81,8,00	Dinas Kesehatan
	25	Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI >90%	Persen	94,00	89,00	Dinas Kesehatan
	26	Prevalensi Hipertensi	Persen	28,55	39,60	Dinas Kesehatan
	27	Persentase Kab/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	Persen	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	28	Persentasi penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	44,10	74,00	Dinas Kesehatan
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
	1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	91,48	91,90	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	2	Presentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan	Persen	2,49	1,35	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	3	Penambahan SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikat	Orang	450	449	Dinas Bina Marga dan

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Perangkat Daerah
				Target	Realisasi	
1		2	3	4	5	6
						Penataan Ruang
	4	Persentase Ketersediaan Rencana Rinci	Persen	46,00	46,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	5	Persentase Ketersediaan Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persen	35,00	35,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	6	Persentase penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	Persen	79,25	79,25	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	7	Persentase Peningkatan Kapasitas tampung Sumber Daya Air	Persen	0,31	0,29	Dinas Sumber Daya Air
	8	Tingkat Pelayanan Rekomendasi Perijinan Sumber Daya Air	Persen	60,00	60,00	Dinas Sumber Daya Air
	9	Indeks kinerja sistem irigasi	Persen	52,31	52,20	Dinas Sumber Daya Air
	10	Cakupan layanan D.I. Tambak	Ha	0	0	Dinas Sumber Daya Air
	11	Persentase Titik Terdampak Banjir dan Kekeringan yang tertangani	Persen	5,00	8,00	Dinas Sumber Daya Air
	12	Tingkat Implementasi Rekomendasi yang Dihasilkan oleh Kelembagaan SDA	Persen	50,00	50,00	Dinas Sumber Daya Air
	13	Tingkat Penyediaan Sistem Informasi SDA yang dapat diakses Masyarakat	Persen	45,00	45,00	Dinas Sumber Daya Air
	14	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	78,00	78,78	Dinas Permukiman dan Perumahan
	15	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	70,67	72,44	Dinas Permukiman dan Perumahan
	16	Cakupan Pelayanan Penanganan Persampahan	Persen	69,00	69,01	Dinas Permukiman dan Perumahan
	17	Pengurangan luasan Genangan di Permukiman (Menurunkan jumlah kawasan dengan genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Persen	85,00	29,20	Dinas Permukiman dan Perumahan
4		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
	1	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	Persen	98,77	98,72	Dinas Permukiman dan Perumahan
	2	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	66,91	48,24	Dinas Permukiman dan Perumahan
	3	Penanganan Hunian Rumah untuk Pendukungan Pelaksanaan Program Pemerintah dan Pasca Bencana	Persen	100,00	100,00	Dinas Permukiman dan Perumahan
	4	Persentase prasarana dan Sarana yang dibangun dan dikembangkan	Kawasan Persen	6,87	6,39	Dinas Permukiman dan Perumahan
	5	Penyediaan Rumah Layak Huni	Persen	91,63	91,70	Dinas Permukiman dan Perumahan

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Perangkat Daerah
				Target	Realisasi	
1		2	3	4	5	6
	6	Persentase Layanan Pembinaan Teknis Bangunan Gedung dan Rumah Negara	Persen	100,00	100,00	Dinas Permukiman dan Perumahan
	7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan UPTD P3JB	Persen	80,00	79,59	Dinas Permukiman dan Perumahan
5		**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**				
	1	Jumlah penanganan kasus pelanggaran Perda dan Perkada	Kasus	150	166	Satuan Polisi Pamong Praja
	2	Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kali	800	509	Satuan Polisi Pamong Praja
	3	Jumlah kesiapsiagaan penanganan bencana oleh Satlinmas	Kali	100	27	Satuan Polisi Pamong Praja
	4	Jumlah peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di Jawa Barat	Orang	756	216	Satuan Polisi Pamong Praja
	5	Jumlah Pol PP dan PPNS yang terdidik dan berkompeten	Orang	520	520	Satuan Polisi Pamong Praja
	6	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	7	Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat	Persen	100,00	69,09	Satuan Polisi Pamong Praja
	8	Tingkat Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sektor Pembangunan	Persen	80,00	85,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	9	Tingkat Pengurangan Korban Jiwa Akibat Bencana Alam	Persen	75,00	80,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	10	Tingkat Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab/Kota	27	27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	11	Tingkat Penanganan Keadaan Darurat Bencana	Persen	90,00	90,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	12	Tingkat Pemulihan Pasca Bencana	Persen	95,00	80,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	13	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Persen	75,00	78,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6		**Sosial**				
	1	Persentase PMKS yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya	Persen	2,61	72,44	Dinas Sosial
	2	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	Persen	1,00	53,81	Dinas Sosial

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Perangkat Daerah
				Target	Realisasi	
1		2	3	4	5	6
	3	Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	Persen	100,00	6,42	Dinas Sosial
	4	Persentase PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	8,85	45,49	Dinas Sosial
	5	Persentase PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	7,92	1,96	Dinas Sosial
	6	Persentase sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	44,00	0,85	Dinas Sosial
	7	Persentase peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Persen	1,00	0,59	Dinas Sosial
	8	Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	Persen	45,55	17,28	Dinas Sosial
	9	Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya	Persen	1,00	53,81	Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar						
1		**Tenaga Kerja**				
	1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	57,00	0,11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	Jumlah Tenaga Kerja yang Tersertifikasi	Orang	500	400	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	1.000	830	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	50,00	31,07	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	12,00	13,46	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	6	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	60,00	35,37	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	12.000	8.557	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Perusahaan	6.000	6.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2		**Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**				
	1	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	60,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Perangkat Daerah
				Target	Realisasi	
1		2	3	4	5	6
						Keluarga Berencana
	2	Persentase Kab/Kota mendapat Penghargaan KLA Tingkat Nasional	Persen	70,00	85,18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Persen	80,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
3		**Pangan**				
	1	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89,80	93,67	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
4		**Pertanahan**				
	1	Persentase Tertib Tata Kelola Pertanahan Melalui Pemenuhan Urusan Wajib Sesuai Konkuren	Persen	21,77	19,59	Dinas Permukiman dan Perumahan
5		**Lingkungan Hidup**				
	1	Indeks Kualitas Air	Poin	42,47	42,73	Dinas Lingkungan Hidup
	2	Indeks Kualitas Udara	Poin	79,31	79,40	Dinas Lingkungan Hidup
	3	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Pengelolaan Limbah Domestik	Persen	0,62	0,78	Dinas Lingkungan Hidup
6		**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
	1	Akurasi Data Kependudukan	Persen	80,00	80,53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan	Perangkat Daerah	12	16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	3	Tertib Upaya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persen	90,00	91,84	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
	1	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Terlibat dalam Kegiatan TMMD, BSMSS,dan BBGRM	Persen	80,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2	Persentase Lembaga Lembaga Budaya dan Keswadayaan Masyarakat	Persen	80,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Perangkat Daerah
				Target	Realisasi	
1		2	3	4	5	6
	3	Persentase Posyandu Mandiri	Persen	100,00	27,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	4	Identifikasi potensi kawasan perdesaan di perbatasan	Kabupaten	5	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	5	Jumlah kerjasama pengembangan potensi kawasan perdesaan di perbatasan	Kabupaten	5	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	6	Persentase tingkat perkembangan desa mandiri	Persen	25,00	25,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	7	Jumlah perangkat desa/kelurahan yang memiliki pendidikan di atas pendidikan mininal	Persen	65,00	65,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	8	Jumlah desa yang sudah menerapkan SISKEUDES	Desa	60,00	90,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	9	Tingkat kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa sesuai standar baku sarana dan prasarana pemerintahan desa	Persen	50,00	50,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	10	Persentase anggaran APB-Desa diatas 30% untuk pembangunan infrastruktur perdesaan	Persen	40,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	11	Jumlah desa yang sudah memiliki rencana tata ruang wilayah desa	Dokumen	40	40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	12	Persentase Kader Terlatih dalam Kelembagaan Desa	Persen	50,00	73,26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	13	Jumlah dan jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) di Jawa Barat	Buah	25	27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	14	Persentase Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	70,00	70,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	15	Persentase Kerjasama Pengembangan Kapasitas Produksi Desa, dan Akses Pemasaran Potensi Desa	Persen	30,00	30,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	16	Persentase Kader Terlatih dalam Kelembagaan Desa	Persen	50,00	79,74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Perangkat Daerah
				Target	Realisasi	
1		2	3	4	5	6
	1	Menurunnya jumlah keluarga Pra sejahtera	Keluarga	1.083.117	1.157.346	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	2	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	73,00	56,97	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	3	Cakupan KB Pria	Persen	2,50	2,46	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	3	Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun	Persen	75,00	59,52	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
9		**Perhubungan**				
	1	Persentase ketersediaan Prasarana Transportasi Darat, Laut & ASDP, Kereta Api dan Udara	Persen	79,00	73,61	Dinas Perhubungan
	2	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	Orang	174.000.000	260.039.637	Dinas Perhubungan
	3	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Transportasi	Persen	N/A	N/A	Dinas Perhubungan
	4	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi	Persen	38,00	33,85	Dinas Perhubungan
	5	Persentase Angkutan Penumpang Umum (AKDP) yang Daftar Ulang Kartu Pengawasan	Persen	56,00	57,33	Dinas Perhubungan
10		**Komunikasi dan Informatika**				
	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,50	3,12	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah	Media	15	15	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3	Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi di Daerah	Persen	80,00	93,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
11		**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**				
	1	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	Persen	20,00	29,84	Dinas KUK
	2	Pertumbuhan Akses Modal KUK	Persen	20,00	24,61	Dinas KUK

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Perangkat Daerah
				Target	Realisasi	
1		2	3	4	5	6
	3	Pertumbuhan Jumlah Rasio Wirausaha	Persen	1,50	1,50	Dinas KUK
12		**Penanaman Modal**				
	1	Jumlah Nilai Investasi PMA-PMDN	Trilyun Rupiah	108,50	137,50	Dinas PMPTSP
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perijinan)	Poin	79,00	81,62	Dinas PMPTSP
13		**Kepemudaan dan Olah Raga**				
	1	Jumlah pemuda berprestasi Nasional. (Pemuda pelopor, PPAN, Paskibraka, KPN)	Orang	17	19	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	Persentase Pemuda yang Berwirausaha atas Pembinaan Kewirausahaan	Persen	10,00	10,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	3	Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Terdata	Persen	20,00	15,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	4	Prestasi Marching Band di Tingkat Nasional	Peringkat	1	1	Dinas Pemuda dan Olahraga
	5	Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Kepramukaan	Kategori	5	5	Dinas Pemuda dan Olahraga
	6	Jumlah Event Kepemudaan Tingkat Jawa Barat	Event	2	2	Dinas Pemuda dan Olahraga
	7	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan di Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab./Kota	5	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
	8	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Olahraga	Orang	10.137	39.367	Dinas Pemuda dan Olahraga
	9	Persentase Kecamatan Penempatan Sarjana Pendamping, Penggerak, Pembangunan Olahraga (SP3OR)	Persen	17,28	17,28	Dinas Pemuda dan Olahraga
	10	Persentase Tenaga Olahraga Tradisional, Layanan Khusus dan Rekreasi yang dibina yang bersertifikat	Persen	10,00	8,40	Dinas Pemuda dan Olahraga
	11	Jumlah event olahraga Tradisional, Layanan khusus dan Rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti	Event	9	9	Dinas Pemuda dan Olahraga
	12	Jumlah Penerima Penghargaan Insan Olahraga Berprestasi/Berjasa	Orang	1.160	342	Dinas Pemuda dan Olahraga
	13	Persentase medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional:				
		a. POPNAS	Persen	20,00	17,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		b. POPWILNAS	Persen	0,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		c. PEPARPENAS	Persen	12,00	7,82	Dinas Pemuda dan Olahraga
	14	Persentase Sertifikat Lanjutan bagi Tenaga Olahraga Prestasi yang dibina	Persen	10,00	12,80	Dinas Pemuda dan Olahraga
	15	Persentase Pembangunan Kawasan SPORT Jabar Arcamanik	Persen	90,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	16	Jumlah Event Olahraga yang Mendukung Prestasi Olahraga Jawa Barat	Event	7	7	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Perangkat Daerah
				Target	Realisasi	
1		2	3	4	5	6
	17	Jumlah Sarana dan Prasarana keolahragaan di Kabupaten/Kota yang tersedia	Kab./Kota	5	12	Dinas Pemuda dan Olahraga
14		**Statistik**				
	12	Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	70,00	70,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
15		**Persandian**				
	13	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Skala Tingkat Kematangan	III	III	Dinas Komunikasi dan Informatika
	14	Tingkat Penyelenggaraan Persandian	Skala Tingkat Kematangan	II	II	Dinas Komunikasi dan Informatika
16		**Kebudayaan**				
	1	Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Jumlah Pembinaan Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah)	Pembinaan	3	16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2	Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Sejarah dan Permuseuman (Jumlah Pembinaan Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Sejarah dan Permuseuman)	Pembinaan	3	30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3	Pengusulan HKI	Usulan/ Rekomendasi Per Tahun	1	1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	4	Pelestarian Seni Tradisi (Jumlah Pembinaan Pelestarian Seni Tradisi)	Pembinaan	3	9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	5	Jumlah Event/Festival/Pasanggiri/ Lomba/Sayembara Karya Seni	Event Per Tahun	5	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17		**Perpustakaan**				
	1	Indeks membaca masyarakat	Poin	69,00	69,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	Persentase pelestarian koleksi naskah kuno	Persen	60,00	60,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18		**Kearsipan**				
	1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	Persen	37,00	37,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	Persentase arsip statis yang diselamatkan	Persen	100,00	31,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pemerintahan Pilihan						
1	**Kelautan dan Perikanan**					
	1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	244.000,00	249.754,40	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.200.000,00	1.269.657,38	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	Peningkatan produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan	Persen	91,00	99,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Perangkat Daerah
				Target	Realisasi	
1		2	3	4	5	6
		kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan				
	4	Konsumsi Ikan Jawa Barat	Kg/Kap/Tahun	29,10	35,81	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5	Peningkatan Penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan secara akuntabel	Persen	75,00	78,57	Dinas Kelautan dan Perikanan
	6	Jumlah Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	Kawasan	1	2	Dinas Kelautan dan Perikanan
	7	Jumlah Benih Ikan yang ditebar di Perairan Daratan	Ekor	60.000.000	29.060.500	Dinas Kelautan dan Perikanan
	8	Jumlah Plasma Nutfah yang dilestarikan	Jenis	4	5	Dinas Kelautan dan Perikanan
	9	Produksi garam	Ton	245.978	445.727,60	Dinas Kelautan dan Perikanan
2		**Pariwisata**				
	1	Jumlah Event Pariwisata	Event Per Tahun	3	3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2	Jumlah Event Promosi Pariwisata	Event Per Tahun	5	5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jawa Barat	Orang Per Tahun	6.030.682	6.030.682	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusatntara ke Jawa Barat	Orang Per Tahun	72.169.325	72.169.325	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3		**Pertanian**				
	1	Produksi Komoditas Peternakan:				
		a Daging	Ton	1.043.467	1.065.014	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		b.Telur	Ton	243.517	262.989	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		c.Susu	Ton	326.698	351.885	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2	Jumlah Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Peternakan	Unit	480	502	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3	Peningkatan mutu produk peternakan				
		a. Daging	Persen	60,00	84,79	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		b.Telur	Persen	81,00	41,78	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		c.Susu	Persen	81,00	48,68	Dinas Ketahanan

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Perangkat Daerah
				Target	Realisasi	
1		2	3	4	5	6
						Pangan dan Peternakan
	4	Bobot Kinerja Pengendalian PHMS di Jawa Barat	Poin	76,00	80,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	5	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	2,50	-7,13	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	6	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Persen	1,50	3,96	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	7	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Persen	2,50	1,52	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	8	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Rata-rata Komoditas Perkebunan	Persen	2,60	4,71	Dinas Perkebunan
	9	Peningkatan ketersediaan benih unggul komoditas perkebunan	Persen	2,60	2,70	Dinas Perkebunan
	10	Peningkatan benih tanaman perkebunan tersertifikasi	Persen	2,60	2,70	Dinas Perkebunan
	11	Peningkatan Kemantapan Kelembagaan	Persen	2,60	2,75	Dinas Perkebunan
	12	Optimalisasi Lahan Perkebunan	Ha	≥484.234	485.529	Dinas Perkebunan
	13	Penurunan intensitas serangan OPT Perkebunan	Persen	-1,00	-1,20	Dinas Perkebunan
	14	Peningkatan Penerapan Jaminan Mutu	Persen	10,00	10,81	Dinas Perkebunan
4		**Kehutanan**				
	1	Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	1,00	108,15	Dinas Kehutanan
	2	Peningkatan Jasa Wisata Alam	Persen	8,00	-5,75	Dinas Kehutanan
	3	Bertambahnya Unit Manajemen Hutan Rakyat	Persen	0,00	0,00	Dinas Kehutanan
	4	Persentase Tutupan Hutan	Persen	32,87	33,67	Dinas Kehutanan
	5	Jumlah Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi yang memiliki izin	Persen	20,00	418,18	Dinas Kehutanan
	6	Tingkat Kerusakan Hutan	Persen	0,90	0,80	Dinas Kehutanan
	7	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditetapkan	Persen	10,00	0,00	Dinas Kehutanan
	8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca)	Persen	9,05	2.650.477	Dinas Kehutanan
	9	Peningkatan Kompetensi Penyuluh	Persen	100,00	100,00	Dinas Kehutanan
5		**Energi dan Sumber Daya Mineral**				
	1	Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Administrasi dan Teknis	Persen	34,53	40,87	Dinas ESDM
	2	Persentase Peningkatan Muka Air Tanah	Persen	5,00	5,22	Dinas ESDM
	3	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh	1.376	1.302	Dinas ESDM

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Perangkat Daerah
				Target	Realisasi	
1		2	3	4	5	6
	4	Jumlah Instalasi Tenaga Listrik yang Laik Operasi	Unit	600	916	Dinas ESDM
	5	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi	Persen	0,36	3,81	Dinas ESDM
6		**Perdagangan**				
	1	Indeks Keberdayaan Konsumen	Poin	37,00	38,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2	Jumlah Pengujian Mutu Barang	Jumlah Pengujian	160	408	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	SNI Wajib	20	16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	4	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	22,00	15,23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	5	IHK (Indeks Harga Konsumen) bahan makanan	Poin	3,00-4,00	4,18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	6	Volume Ekspor	Ribu Ton	7.500,00	7.393,30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	7	Nilai Ekspor	Juta USD	30.000,00	29.709,05	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7		**Perindustrian**				
	1	PDRB sektor industri non-migas	Rp. Triliun	821,95	884,12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2	Jumlah Unit usaha Industri	Unit Usaha	211.000	214.287	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3	PMA sektor Industri	Rp. Triliun	16,70	-50,69	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	4	PMDN sektor industri	Rp. Triliun	4,80	-54,59	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8		**Transmigrasi**				
	1	Jumlah Perjanjian Kerjasama	Perjanjian	15	13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penunjang Urusan Pemerintahan						
1		**Perencanaan**				
	1	Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	30,00	35,00	Bappeda

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Perangkat Daerah
				Target	Realisasi	
1		2	3	4	5	6
	2	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota	Persen	80,00	85,00	Bappeda
	3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00	100,00	Bappeda
	4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informsi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00	100,00	Bappeda
2		**Keuangan**				
	1	Jumlah penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah	Buah	3	3	BPKAD
	2	Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	Persen	100,00	100,00	BPKAD
	3	Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal	Persen	40,00	40,00	BPKAD
	4	Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah.	Persen	85,00	85,00	BPKAD
	5	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	56,52	58,95	Bapenda
	6	Dana Perimbangan	Persen	43,16	40,83	Bapenda
	7	Pendapatan lain-lain yang sah	Persen	0,31	0,22	Bapenda
	8	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Pendapatan Daerah)	Skor	82,30	84,60	Bapenda
3		**Kepegawaian**				
	1	Persentase pegawai yang mencapai SKP diatas 76%;	Persen	80,00	87,89	Badan Kepegawaian Daerah
	2	Persentase Pelanggaran Disiplin	Persen	2,00	0,05	Badan Kepegawaian Daerah
	3	Jumlah PNS yang Melanjutkan Pendidikan Formal	Orang	200	237	Badan Kepegawaian Daerah
	4	Tingkat Kesejahteraan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persen	100,00	80,00	Badan Kepegawaian Daerah
4		**Pendidikan dan Pelatihan**				
	1	Jumlah ASN yang terfasilitasi uji keahlian (kompetensi)	Orang	220	5.122	BPSDM
	2	Jumlah ASN/Pejabat Negara yang terfasilitasi pengembangan kompetensi	Orang	720	862	BPSDM
5		**Penelitian dan Penegmbangan**				
	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Berbasis IPTEK	Jumlah	5	4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2	Jumlah Hasil Penelitian yang Diterapkan dalam Pembangunan Jawa Barat	Jumlah	10	10	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	3	Jumlah Karya IPTEK yang Didaftarkan untuk mendapat Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah	60	20	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	4	Jumlah Inovasi yang Ditindaklanjuti menjadi SIDa	Jumlah	15	15	Badan Penelitian dan

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Perangkat Daerah
				Target	Realisasi	
1		2	3	4	5	6
						Pengembangan Daerah
Fungsi Lainnya						
1		**Sekretariat Daerah**				
	1	Persentase Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian antar waktu DPRD Prov, DPRD Kab/Kota	Persen	95,00	95,00	Sekretariat Daerah
	2	Persentase Fasilitasi pengangkatan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen	95,00	95,00	Sekretariat Daerah
	3	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Persen	85,00	85,00	Sekretariat Daerah
	4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	82,30	82,30	Sekretariat Daerah
	5	Persentase Penggunaan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Mulai Dari Perencanaan, Proses Pengadaan sampai dengan Monev/Pelaporan	Persen	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
	6	Nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Kategori	A	A	Sekretariat Daerah
	7	Persentase harmonisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan prodak hukum daerah	Persen	80,00	96,56	Sekretariat Daerah
	8	Kerja sama antar daerah	Buah	10	10	Sekretariat Daerah
	9	Kerja sama dengan pihak ketiga	Buah	15	15	Sekretariat Daerah
	10	Kerja sama luar negeri	Buah	3	6	Sekretariat Daerah
	11	Peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi terkait upaya sinkronisasi regulasi bidang kerja sama daerah	Buah	3	3	Sekretariat Daerah
	12	Persentase Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persen	80,00	80,00	Sekretariat Daerah
	13	Persentase Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian antar waktu DPRD Prov, DPRD Kab/Kota	Persen	95,00	95,00	Sekretariat Daerah
	14	Prosentasi Fasilitasi pengangkatan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen	95,00	95,00	Sekretariat Daerah
	15	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Dokumen	9	9	Sekretariat Daerah
	16	Jumlah Dokumen fasilitasi administrasi kependudukan dan Pemerintahan Desa	Dokumen	15	15	Sekretariat Daerah
	17	Tingkat Persepsi Publik yang Positif terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Kualifikasi "Baik"	61 - 79 (baik)	61 - 79 (baik)	Sekretariat Daerah
	18	Kontribusi BUMD terhadap PAD meningkat	Kali	4	4	Sekretariat Daerah

No.		Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2019		Perangkat Daerah
				Target	Realisasi	
1		2	3	4	5	6
	19	Jumlah BUMD yang dibina dan diawasi	BUMD	12	12	Sekretariat Daerah
	20	Rata-rata Kontribusi Deviden terhadap PAD	Persen	2,00	2,00	Sekretariat Daerah
	21	Keputusan Gubernur untuk Penetapan Lokasi pembangunan bagi kepentingan umum	Kepgub	9	9	Sekretariat Daerah
	22	Dokumen fasilitasi administrasi kependudukan dan Pemerintahan Desa	Dokumen	15	15	Sekretariat Daerah
	23	Jumlah Forum Komunikasi dengan insan pers dan media massa	Forum	4	4	Sekretariat Daerah
2		**Sekretariat DPRD**				
	1	Tingkat kinerja DPRD	Persen	100,00	71,09	Sekretariat DPRD
	2	Tingkat dukungan dan fasilitasi DPRD	Persen	100,00	68,64	Sekretariat DPRD
3		**Penghubung**				
	1	Jumlah Promosi Potensi Pembangunan Jawa Barat	Event/Promosi	15	15	Badan Penghubung
	2	Persentasi Pelayanan dan Informasi Potensi Pembangunan Daerah Jawa Barat yang Efektif dan Efisien	Persen	100,00	100,00	Badan Penghubung
4		**Pengawasan**				
	1	Hasil Penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di Tngkat Nasional	Poin	3.275,00	belum rilis	Inspektorat
	2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Peringkat	A	A	Inspektorat
	3	Opini BPK-RI terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat	Opini	WTP	WTP	Inspektorat
	4	Level Maturitas SPIP Pemeintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Level	III	III	Inspektorat
	5	Persentase Penyelasaian tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Persen	75,00	94,00	Inspektorat
	6	Persentase Penyelesaian TLHP Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap PD Provinsi	Persen	90,00	83,00	Inspektorat
	7	Persentase Nilai Indikator RAD-PPK	Persen	100,00	100,00	Inspektorat
	8	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Persen	75,00	101,00	Inspektorat
5		**Prmerintahan Umum**				
	1	Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat	Poin	73,00	69,09	Badan Kesbangpol
	2	Rasio masyarakat Jawa Barat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan	Persen	1,50	1,50	Badan Kesbangpol
	3	Persentase penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat	Persen	59,00	59,00	Badan Kesbangpol
	4	Persentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat	Persen	50,00	50,00	Badan Kesbangpol
	5	Tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama	Skala	68,50	68,50	Badan Kesbangpol

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019, Bappeda

Indikator kinerja kunci tingkat hasil (*Outcome*) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah. Indikator tersebut disajikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja program perangkat daerah tahun 2020.

Tabel 8.6
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tingkat Hasil/*Outcome* Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	**Pendidikan**					
	1	Persentase Siswa Penerima Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) SD/SMP/SMA/SMK/SLB/ Negeri Swasta	Persen	100,00	99,93	Dinas Pendidikan
	2	Persentase Sekolah dan Siswa SMA/SMK/SLB yang terlayani dalam BOS	Persen	100,00	99,38	Dinas Pendidikan
	3	Rasio Siswa Per-Sekolah SMA	Rasio	720	439	Dinas Pendidikan
	4	Rasio Siswa Per-Kelas SMA	Rasio	36	31	Dinas Pendidikan
	5	Persentase SMA dengan Akreditasi B	Persen	56,50	80,77	Dinas Pendidikan
	6	Angka Kelulusan SMA	Persen	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	7	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Rasio	720/2250 /146	406/366/ 96	Dinas Pendidikan
	8	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Rasio	36/9	32/10	Dinas Pendidikan
	9	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Persen	56,50/22, 00	80,47/50, 00	Dinas Pendidikan
	10	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Persen	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	11	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Rasio	720/2250 /146	377/323/ 51	Dinas Pendidikan
	12	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah	Rasio	36/9	27/6	Dinas Pendidikan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
		Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II				
	13	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Persen	56,50/22,00	82,35/29,17	Dinas Pendidikan
	14	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Persen	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	15	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Rasio	720/2250/146	399/391/77	Dinas Pendidikan
	16	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Rasio	36/9	29/8	Dinas Pendidikan
	17	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Persen	56,50/22,00	74,43/72,73	Dinas Pendidikan
	18	Angka Kelulusann Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Persen	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	19	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Rasio	720/2250/146	541/432/100	Dinas Pendidikan
	20	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Rasio	36/9	32/10	Dinas Pendidikan
	21	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Persen	56,50/22,00	77,48/47,37	Dinas Pendidikan
	22	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Persen	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	23	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Rasio	720/2250/146	462/394/67	Dinas Pendidikan
	24	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Rasio	36/9	29/8	Dinas Pendidikan
	25	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Persen	56,50/22,00	72,06/52,63	Dinas Pendidikan
	26	Angka Kelulusann Sekolah Menengah Sederajat di	Persen	100,00	100,00	Dinas Pendidikan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX				
	27	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Rasio	720/2250/146	440/305/73	Dinas Pendidikan
	28	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Rasio	36/9	30/9	Dinas Pendidikan
	29	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Persen	56,50/22,00	79,87/40,00	Dinas Pendidikan
	30	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Persen	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	31	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Rasio	720/2250/146	405/334/64	Dinas Pendidikan
	32	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Rasio	36/9	30/8	Dinas Pendidikan
	33	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Persen	56,50/22,00	74,72/26,92	Dinas Pendidikan
	34	Angka Kelulusann Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Persen	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	35	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Rasio	720/2250/146	446/559/49	Dinas Pendidikan
	36	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Rasio	36/9	29/6	Dinas Pendidikan
	37	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Persen	56,50/22,00	87,54/53,70	Dinas Pendidikan
	38	Angka Kelulusann Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Persen	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	39	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Rasio	720/2250/146	535/373/53	Dinas Pendidikan
	40	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah	Rasio	36/9	32/8	Dinas Pendidikan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
		Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII				
	41	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Persen	56,50/22,00	77,93/55,13	Dinas Pendidikan
	42	Angka Kelulusann Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Persen	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	43	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Rasio	720/2250/146	514/507/77	Dinas Pendidikan
	44	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Rasio	36/9	30/9	Dinas Pendidikan
	45	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Persen	56,50/22,00	77,62/54,55	Dinas Pendidikan
	46	Angka Kelulusann Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Persen	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	47	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Rasio	720/2250/146	371/329/55	Dinas Pendidikan
	48	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Rasio	36/9	32/10	Dinas Pendidikan
	49	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Persen	56,50/22,00	76,95/38,24	Dinas Pendidikan
	50	Angka Kelulusann Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Persen	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	51	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Rasio	720/2250/146	403/330/83	Dinas Pendidikan
	52	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Rasio	36/9	30/12	Dinas Pendidikan
	53	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Persen	56,50/22,00	81,18/81,82	Dinas Pendidikan
	54	Angka Kelulusann Sekolah Menengah Sederajat di	Persen	100,00	100,00	Dinas Pendidikan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII				
	55	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Rasio	720/2250/146	558/328/70	Dinas Pendidikan
	56	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Rasio	36/9	30/11	Dinas Pendidikan
	57	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Persen	56,50/22,00	71,52/71,88	Dinas Pendidikan
	58	Angka Kelulusann Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Persen	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	59	Persentase Guru yang memiliki sertifikat Pendidik	Persen	30,00	34,40	Dinas Pendidikan
	60	Persentase Kepala Sekolah yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	30,00	57,15	Dinas Pendidikan
	61	Persentase Pengawas yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	30,00	100,00	Dinas Pendidikan
	62	Rasio siswa per sekolah SLB	Rasio	SDLB-SMPLB 45-SMPLB/SMALB 48	64	Dinas Pendidikan
	63	Rasio siswa per kelas SLB	Rasio	SDLB/SMPLB (9)-SMPLB/SMALB (6)	8	Dinas Pendidikan
	64	Persentase SLB terakreditasi minimal B	Persen	56,38	52,60	Dinas Pendidikan
	65	Angka Kelulusann SLB	Persen	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	66	Jumlah Siswa Pendidikan dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	Persen	25,00	3,96	Dinas Pendidikan
	67	Rasio Siswa Per-Sekolah SMK	Rasio	2520	379	Dinas Pendidikan
	68	Rasio Siswa Per-Kelas SMK	Rasio	36	29	Dinas Pendidikan
	69	Persentase SMK dengan Akreditasi B	Persen	20,00	76,56	Dinas Pendidikan
	70	Angka Kelulusan SMK	Persen	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	71	Persentase lulusan SMK tersertifikasi	Persen	20,00	30,00	Dinas Pendidikan
	72	Persentase sekolah menengah sederajat yang memanfaatkan fasilitasi digital di UPTD Tikomdik	Persen	24,00	70,27	Dinas Pendidikan
2	**Kesehatan**					

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	1	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	Persen	72,00	75,23	Dinas Kesehatan
	2	Persentase Kabupaten Kota Puskesmas Sesuai Standar	Persen	86,00	82,00	Dinas Kesehatan
	3	Persentase Kab/Kota Yg Mempunyai 80% Rumah Sakit Dengan Pencapaian Spm	Persen	33,00	33,00	Dinas Kesehatan
	4	Persentase Rumah Sakit Regional Yg Memenuhi Standar	Persen	50,00	50,00	Dinas Kesehatan
	5	Persentase Puskesmas Siap Akreditasi	Persen	100,00	94,92	Dinas Kesehatan
	6	Persentase Rumah Sakit Siap Akreditasi	Persen	70,00	86,64	Dinas Kesehatan
	7	Persentase Kab/Kota Memiliki Laboratorium Kesehatan Terakreditasi	Persen	30,00	85,20	Dinas Kesehatan
	8	Persentase Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi	Persen	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	9	Jumlah Kab/Kota Yang Melaksanakan Kerjasama Dengan Provinsi Terkait Layad Rawat	Jumlah Kab/Kota	13	27	Dinas Kesehatan
	10	Persentase Kab/Kota Yang Mendapatkan Pembiayaan Kesehatan	Persen	40,00	40,00	Dinas Kesehatan
	11	Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan	Persen	90,00	85,51	Dinas Kesehatan
	12	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Melaksanakan Perencanaan Dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan	Persen	75,00	75,00	Dinas Kesehatan
	13	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan	Persen	70,00	70,00	Dinas Kesehatan
	14	Persentase Tenaga Kesehatan Mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan	Persen	75,00	0,00	Dinas Kesehatan
	15	Persentase Ketersediaan Obat Esensial	Persen	91,00	92,12	Dinas Kesehatan
	16	Persentase Dokumen Berita Acara Yang Dibuat	Persen	90,00	87,52	Dinas Kesehatan
	17	Persentase Bangunan Gedung Serba Guna/Mesjid Kantor	Persen	100,00	100,00	Dinas Kesehatan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
		Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat				
	18	Persentase Kegiatan Rapid Health Assesment	Persen	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	19	Persentase Masyarakat Yang Dilayani Dilokasi Bencana	Persen	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	20	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Persentase Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal 88%	Jumlah	19	15	Dinas Kesehatan
	21	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Bumil Minimal 95%	Jumlah	19	16	Dinas Kesehatan
	22	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Air Minum Yang Berkualitas	Persen	85,00	80,29	Dinas Kesehatan
	23	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	Persen	80,00	82,49	Dinas Kesehatan
	24	Persentase Kabupaten/Kota Yang Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar	Persen	60,00	79,91	Dinas Kesehatan
	25	Persentase Kabupaten/Kota Yang Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Olah Raga Pada Kelompok Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persen	60,00	86,00	Dinas Kesehatan
	26	Jumlah Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi Yang Dilibatkan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Komponen Unsur Masyarakat	4	4	Dinas Kesehatan
	27	Persentase Regulasi Bidang Kesehatan Yang Diusulkan Oleh Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat	Persen	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	28	Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota Yang Dilakukan Pembinaan Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Kab/Kota	27	27	Dinas Kesehatan
	29	Persentase Desa/Kelurahan Yang Mencapai Uci >90%	Persen	90,50	44,80	Dinas Kesehatan
	30	Angka Keberhasilan Pengobatan Tb (Treatment Succes Rate)	Persen	90,00	73,16	Dinas Kesehatan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	31	Persentase Pasien Hiv Yg Di Obati	Persen	65,00	42,00	Dinas Kesehatan
	32	Persentase Kab/Kota Yg 50 % Puskesmas Melaksanakan Tatalaksana Pnemonia Balita Sesuai Standar	Persen	60,00	44,44	Dinas Kesehatan
	33	Persentase Kab/Kota Yang Mencapai Ir Dbd < 49/100.000 Pddk	Persen	70,00	55,55	Dinas Kesehatan
	34	Persentase Kab/Kota Yang Sudah Eliminasi Malaria	Persen	89,00	93,00	Dinas Kesehatan
	35	Proporsi Kab/Kota Yang Mencapai Eliminasi Filariasis	Persen	45,00	27,27	Dinas Kesehatan
	36	Proporsi Cacat Kusta Tk II	Persen	10,00	6,00	Dinas Kesehatan
	37	Persentase Kab/Kota Yang Melakukan Deteksi Dini Hepatitis B Pada Ibu Hamil	Persen	80,00	96,00	Dinas Kesehatan
	38	Persentase Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies Ditatalaksana Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	39	Prevalensi Hipertensi	Persen	60,00	39,60	Dinas Kesehatan
	40	Persentasi Penduduk Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100,00	74,00	Dinas Kesehatan
	41	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan Yang Diakreditasi	Jumlah	70	70	Dinas Kesehatan
	42	Persentase Kepuasan Pelanggan	Persen	60,00	70,00	Dinas Kesehatan
	43	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan Baru	Jumlah	241	241	Dinas Kesehatan
	44	Indek Kepuasan Masyarakat Di Rs Al Ihsan	Persen	77,84	80,46	Dinas Kesehatan
	45	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm)	Persen	76,15	81,04	Dinas Kesehatan, (RS. Jampangkulon)
	46	Indek Kepuasan Masyarakat Di Rs Jiwa	Persen	80,00	88,86	Dinas Kesehatan
	47	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm)	Persen	76,15	81,04	Dinas Kesehatan, (RS. Pameungpeuk)
	48	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm)	Persen	76,15	81,04	Dinas Kesehatan, (RS. Kesehatan Kerja)
	49	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS Paru	Persen	76,00	77,09	Dinas Kesehatan
	50	Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Melalui Pelatihan	Persen	11,64	0,93	Dinas Kesehatan
	51	Nilai Komponen Yang Sesuai Dengan Pembobotan	Nilai	≥ 3,5	3,64	Dinas Kesehatan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	52	Persentase Bor (Bed Occupancy Ratio)	Persen	58,00	63,59	Dinas Kesehatan, (RS. Paru)
	53	Persentase Bor	Persen	65,00	80,29	Dinas Kesehatan, (RS. Al-Ihsan)
	54	Persentase Bor Rs Jampangkulon	Persen	68,00	61,52	Dinas Kesehatan
	55	Persentase Bor Di Rs Jiwa	Persen	61,00	47,65	Dinas Kesehatan
	56	Persentase Bor (Bed Occupancy Ratio)	Persen	58,00	63,59	Dinas Kesehatan, (RS. Pameungpeuk)
	57	Persentase Bor	Persen	65,00	80,29	Dinas Kesehatan, (RSUD. Kesehatan Kerja)
	58	Jumlah Penambahan Pengunjung	Jumlah	21.000	16.433	Dinas Kesehatan
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
	1	Persentase Sumber Daya Konstruksi Yang Terlatih	Persen	21,95	28,14	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	2	Tingkat Capaian Pembangunan Sarana Ibadah	Persen	62,70	62,70	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	3	Persentase Rencana Tata Ruang yang diselesaikan	Persen	40,00	40,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	4	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Yang Diberikan	Persen	100,00	100,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	5	Persentase Permohonan Rekomendasi Gubernur Yang Diproses Terhadap Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.	Persen	68,52	68,52	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	6	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penataan Ruang	Persen	81,06	81,06	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	7	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi Dan Kawasan Potensial Di Wilayah Pelayanan I	Persen	4,32	4,32	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	8	Persentase peningkatan aksesibilitas menuju sentra-sentra ekonomi dan kawasan potensial Di Wilayah Pelayanan II	Persen	9,20	10,20	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	9	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi Dan Kawasan Potensial Di Wilayah Pelayanan III	Persen	7,67	7,67	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	10	Persentase Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan Dan Rehabilitasi Jalan	Persen	100,00	100,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	11	Persentase Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Jalan	Persen	100,00	100,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	12	Persentase Kelengkapan Peralatan Pemeliharaan Jalan	Persen	58,00	58,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	13	Tingkat Kemantapan Jalan Di Wilayah Pelayanan I	Persen	74,51	75,84	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	14	Tingkat Kemantapan Jalan Di Wilayah Pelayanan II	Persen	72,80	73,46	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	15	Tingkat Kemantapan Jalan Di Wilayah Pelayanan III	Persen	84,75	84,75	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	16	Tingkat Kemantapan Jalan Di Wilayah Pelayanan IV	Persen	77,25	78,26	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	17	Tingkat Kemantapan Jalan Di Wilayah Pelayanan V	Persen	86,73	89,08	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	18	Tingkat Kemantapan Jalan Di Wilayah Pelayanan VI	Persen	82,37	88,13	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	19	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis Yang Siap Bangun	Persen	100,00	100,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	20	Persentase Ketersediaan Data Teknis Untuk Pengelolaan Jalan	Persen	35,46	35,46	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	21	Persentase Kejadian Daya Rusak Air Yang Ditangani	Persen	6,00	8,00	Dinas Sumber Daya Air
	22	Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Pada Ws. Cisadea-Cibareno	Persen	80,11	80,11	Dinas Sumber Daya Air
	23	Kapasitas Tampung Air Baku Di Ws. Ciliwung-Cisadane	M3	0	0	Dinas Sumber Daya Air
	24	Kapasitas Tampung Air Baku Di Ws. Cimanuk-Cisanggarung	M3	0	0	Dinas Sumber Daya Air
	25	Kapasitas Tampung Air Baku Di Ws. Cisadea-Cibareno	M3	3000	3000	Dinas Sumber Daya Air
	26	Kapasitas Tampung Air Baku Di Ws. Citanduy	M3	0	0	Dinas Sumber Daya Air
	27	Kapasitas Tampung Air Baku Di Ws. Citarum	M3	0	0	Dinas Sumber Daya Air
	28	Kapasitas Tampung Air Baku Di Ws. Ciwulan-Cilaki	M3	0	0	Dinas Sumber Daya Air
	29	Persentase Hasil Kerja Kontruksi Irigasi Yang Sesuai Standar	Persen	34,17	34,17	Dinas Sumber Daya Air
	30	Persentase Hasil Kerja Kontruksi Sumber Daya Air Yang Sesuai Standar (Alternatif 2)	Persen	34,17	34,17	Dinas Sumber Daya Air
	31	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Dan	Persen	74,94	74,94	Dinas Sumber Daya Air

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
		Pemanfaatan Sumber Daya Air				
	32	Persentase Daerah Irigasi Yang Dikelola Dengan Baik	Persen	11,26	11,26	Dinas Sumber Daya Air
	33	Persentase Daerah Irigasi Tambak Yang Dikelola Dengan Baik	Persen	25,00	0,00	Dinas Sumber Daya Air
	34	Persentase Sumber Air Yang Dikelola Dengan Baik	Persen	28,69	28,69	Dinas Sumber Daya Air
	35	Tingkat Pelayanan Informasi Publik Sumber Daya Air	Persen	56,25	56,25	Dinas Sumber Daya Air
	36	Persentase Rekomendasi Kelembagaan Sumber Daya Air Yang Diterapkan	Persen	50,00	50,00	Dinas Sumber Daya Air
	37	Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Pada Ws. Cimanuk-Cisanggarung	Persen	78,96	78,96	Dinas Sumber Daya Air
	38	Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Pada Ws. Citanduy	Persen	77,32	77,315	Dinas Sumber Daya Air
	39	Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Pada Ws. Citarum	Persen	67,86	67,86	Dinas Sumber Daya Air
	40	Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Pada Ws. Ciwulan - Cilaki	Persen	74,49	74,49	Dinas Sumber Daya Air
	41	Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Pada Ws.Ciliwung-Cisadane	Persen	66,06	66,06	Dinas Sumber Daya Air
	42	Kapasitas Tampung Sumber Air Di Ws. Ciliwung-Cisadane	M3	17.126.817,75	17.126.817,75	Dinas Sumber Daya Air
	43	Persentase Sungai Dan Atau Drainase Utama Yang Terpelihara Pada Ws.Ciliwung-Cisadane	Persen	46,00	46,00	Dinas Sumber Daya Air
	44	Kapasitas Tampung Sumber Air Di Ws. Ciwulan-Cilaki	M3	1.040.510	1.040.510	Dinas Sumber Daya Air
	45	Persentase Panjang Sungai Yang Dapat Dilakukan Pengendalian Dan Penataan Di Ws. Ciwulan-Cilaki	Persen	0,01	0,01	Dinas Sumber Daya Air
	46	Persentase Titik Pantai Yang Dapat Dilakukan Pengamanan Dan Penataan Di Ws. Ciwulan-Cilaki	Persen	7,69	7,69	Dinas Sumber Daya Air
	47	Kapasitas Tampung Sumber Air Di Ws. Cimanuk-Cisanggarung	M3	189.865.890	189.865.890	Dinas Sumber Daya Air
	48	Persentase Sungai Dan Atau Drainase Utama Yang Terpelihara Pada Ws.Cimanuk-Cisanggarung	Persen	14,29	14,29	Dinas Sumber Daya Air

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	49	Kapasitas Tampung Sumber Air Di Ws. Cisadea-Cibareno	M3	1.510.128	1.510.128	Dinas Sumber Daya Air
	50	Persentase Panjang Sungai Yang Dapat Dilakukan Pengendalian Dan Penataan Di Ws. Cisadea-Cibareno	Persen	0,06	0,06	Dinas Sumber Daya Air
	51	Persentase Titik Pantai Yang Dapat Dilakukan Pengamanan Dan Penataan Di Ws. Cisadea-Cibareno	Persen	18,18	18,18	Dinas Sumber Daya Air
	52	Kapasitas Tampung Sumber Air Di Ws. Citanduy	M3	3.333.000	3.333.000	Dinas Sumber Daya Air
	53	Persentase Sungai Dan Atau Drainase Utama Yang Terpelihara Pada Ws.Citanduy	Persen	11,11	11,11	Dinas Sumber Daya Air
	54	Kapasitas Tampung Sumber Air Di Ws. Citarum	M3	6.598.490	6.598.490	Dinas Sumber Daya Air
	55	Persentase Sungai Dan Atau Drainase Utama Yang Terpelihara Pada Ws.Citarum	Persen	20,00	20,00	Dinas Sumber Daya Air
	56	Persentase Rencana Pengembangan Air Baku Yang Diterapkan	Persen	5,00	5,00	Dinas Sumber Daya Air
	57	Persentase Kejadian Daya Rusak Air Yang Ditangani Pada Ws. Cisadea-Cibareno	Persen	22,50	22,50	Dinas Sumber Daya Air
	58	Persentase Kejadian Daya Rusak Air Yang Ditangani Pada Ws. Ciwulan-Cilaki	Persen	15,38	15,38	Dinas Sumber Daya Air
	59	Tingkat Kinerja Komisi Irigasi Provinsi	Poin	76	76	Dinas Sumber Daya Air
	60	Persentase Penerapan Perencanaan Teknis Irigasi	Persen	40,00	40,00	Dinas Sumber Daya Air
	61	Persentase Penerapan Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	Persen	25,00	25	Dinas Sumber Daya Air
	62	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	73,11	73,31	Dinas Perumahan dan Permukiman
	63	Cakupan Pelayanan Penanganan Persampahan	Persen	69,60	69,69	Dinas Perumahan dan Permukiman
	64	Cakupan Pengurangan Sampah	Persen	4,08	6,52	Dinas Perumahan dan Permukiman
	65	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	79,28	79,59	Dinas Perumahan dan Permukiman
	66	Pengurangan Luasan Genangan Di Permukiman	Persen	67,05	63,07	Dinas Perumahan dan Permukiman
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
	1	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	62,00	52,816	Dinas Perumahan dan Permukiman
	3	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	Persen	98,08	99,45	Dinas Perumahan dan Permukiman

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	4	Penyediaan Rumah Layak Huni	Persen	91,86	91,90	Dinas Perumahan dan Permukiman
	5	Persentase Hunian Rumah Untuk Pendukungan Pelaksanaan Program Pemerintah Dan Pasca Bencana yang ditangani	Persen	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	6	Persentase Layanan Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Dan Rumah Negara	Persen	63,50	63,50	Dinas Perumahan dan Permukiman
	7	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD P3Jb (Pengelolaan Dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat)	Persen	80,00	86,60	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					
	1	Persentase Satpol PP Dan PPNS Yang Terdidik Dan Berkompeten	Persen	35,00	68,25	Satuan Polisi Pamong Praja
	2	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Persen	68,25	68,25	Satuan Polisi Pamong Praja
	3	Persentase Penegakan Perda Dan Perkada	Persen	75,00	4,05	Satuan Polisi Pamong Praja
	4	Tingkat Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Oleh Satlinmas	Persen	72,80	59,19	Satuan Polisi Pamong Praja
	5	Meningkatnya Nilai Indeks Kapasitas Kab/Kota di Jawa Barat	Persen	80,00	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	6	Terpulihnya kehidupan dan Penghidupan	Persen	100,00	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	7	Meningkatnya pelayanan kedaruratan dan logistik untuk Kab/Kota di Jawa Barat	Persen	100,00	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	8	Tingkat Pemahaman Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Poin	0,0079	0,0015	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	9	Tingkat Ketahanan Lingkungan Strategis Daerah	Poin	0,0078	0,0069	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	10	Tingkat Kualitas Kewaspadaan Daerah	Poin	0,004	0,0027	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	11	Kualitas Pembangunan Politik Dalam Negeri	Poin	0,0009	0,00099	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	**Sosial**					
	1	Persentase PMKS Yang Direhabilitasi (Diluar Katagori PMKS Di UPTD)	Persen	0,19	0,07	Dinas Sosial
	2	Persentase PMKS Yang Mendapat Jaminan Sosial	Persen	9,53	9,53	Dinas Sosial

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	3	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	Persen	0,00	0,00	Dinas Sosial
	4	Persentase PSK Yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	50,00	51,19	Dinas Sosial
	5	Persentase PSKS Yang Berdaya/Persentase PMKS Yang Pulih Fungsi Sosialnya	Persen	0,00	0,00	Dinas Sosial
	6	Persentase Pihak Yang Berperan Aktif Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial	Persen	0,00	0,00	Dinas Sosial
	7	Persentase Keluarga Miskin Dan Kelompok Rentan Yang Meningkat Produktifitas Sosial Ekonominya	Persen	31,87	39,45	Dinas Sosial
	8	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja	Persen	90,00	99,29	Dinas Sosial
	9	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya	Persen	90,00	97,85	Dinas Sosial
	10	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum	Persen	90,00	97,55	Dinas Sosial
	11	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Dan Pemeliharaan Makam Pahlawan	Persen	90,00	97,64	Dinas Sosial
	12	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Persen	90,00	97,98	Dinas Sosial
	13	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	Persen	90,00	91,61	Dinas Sosial
	14	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Pengembangan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Persen	90,00	96,64	Dinas Sosial
	15	Persentase ABH yang Direhab di PSRABH Cileungsi Bogor dan Satpel	Persen	100,00	98,00	Dinas Sosial
	16	Persentase PSKS Yang Berperan Aktif Dalam	Persen	50,00	56,45	Dinas Sosial

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
		Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				
	17	Persentase Remaja Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial Di UPTD Dan Satpel	Persen	100,00	70,60	Dinas Sosial
	18	Persentase PMKS Yg Mendapat Rehabilitasi Sosial Di PRSBK Dan Satpel - Rtm	Persen	100,00	67,30	Dinas Sosial
	19	Persentase Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Di UPTD	Persen	100,00	122,50	Dinas Sosial
	20	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	Persen	90,00	93,82	Dinas Sosial
	21	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Direhabilitasi Di UPTD PSRPD Cibabat Cimahi	Persen	100,00	80,80	Dinas Sosial
	22	Persentase Wanita Tuna Susila Yang Direhabilitasi Sosial Di UPTD PSRTS Dan Satpel - RTM Selama 6 Bulan	Persen	100,00	62,60	Dinas Sosial
	23	Persentase Lanjut Usia Di Dalam Balai Yg Mendapat Perlindungan Sosial	Persen	100,00	138,80	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	**Tenaga Kerja**					
	1	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Bekerja	Persen	68,08	33,41	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	Persentase Perusahaan Yang Diperiksa Norma Ketenagakerjaan	Persen	20,00	20,25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	Persentase Perusahaan Yang Diperiksa Norma Ketenagakerjaan Wilayah I	Persen	16,11	15,42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	4	Persentase Perusahaan Yang Diperiksa Norma Ketenagakerjaan Wilayah II	Persen	28,21	21,72	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	5	Persentase Perusahaan Yang Diperiksa Norma Ketenagakerjaan Wilayah III	Persen	36,54	26,71	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	6	Persentase Perusahaan Yang Diperiksa Norma Ketenagakerjaan Wilayah IV	Persen	21,13	19,62	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	7	Persentase Perusahaan Yang Diperiksa Norma Ketenagakerjaan Wilayah V	Persen	22,42	25,65	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	8	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja Dengan Perusahaan	Persen	10,00	2,55	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	9	Persentase Tenaga Kerja Yang Tersertifikasi	Persen	0,22	0,36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	10	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	0,05	0,035	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	11	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Mandiri	Persen	0,08	0,064	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	12	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Pekerja Migran	Persen	0,04	0,006	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**					
	1	Cakupan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi	Persen	23,70	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	2	Cakupan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat Provinsi	Persen	7,00	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	3	Cakupan Organisasi Perempuan Yang Mendapat Pembinaan	Persen	45,00	45,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	4	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah Yang Up To Date Pada 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Persen	44,00	44,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	5	Cakupan Pembinaan Pengarusutamaan Gender Ke Kabupaten Kota	Persen	45,00	45,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	6	Cakupan Kelompok Pekka Yang Mendapat Program Pembinaan Program Pekka	Persen	45,00	45,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
						Keluarga Berencana
	7	Cakupan Kepala Keluarga Yang Mendapat Pembinaan Program P2WKSS	Persen	45,00	45,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	8	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Ked) Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Tenaga Terlatih Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	9	Cakupan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Ked) Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Tenaga Terlatih Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	10	Cakupan Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Berhasil Dibina	Persen	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
3	**Pangan**					
	1	Tingkat Kinerja Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Di Jawa Barat (%)	Point	70	71,8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	2	Persentase Kenaikan Unit Usaha Produk Peternakan Yang Memiliki Sertifikasi Jaminan Mutu (%)	Persen	3,00	6,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	3	Rasio Komposisi PPH Ketersediaan Terhadap PPH Konsumsi				Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
		- Padi-Padian	Point	≥ 25	≥ 25	
		- Umbi-Umbian	Point	≥ 2,5	≥ 2,5	
		- Pangan Hewani	Point	17,5	17,5	
		- Minyak Dan Lemak	Point	4,5	4,5	
		- Buah Atau Biji Berminyak	Point	0,6	0,6	
		- Kacang-Kacagan	Point	≥ 10	≥ 10	
		- Gula	Point	2	2	
		- Sayur Dan Buah	Point	≥ 30	≥ 30	
	4	Persentase Daerah Rawan Pangan Yang Diintervensi	Persen	10,00	6,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	5	Rasio Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Dari Angka Ideal	Persen	5,00	4,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	6	Persentase Peningkatan Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	Persen	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	7	Stabilitasi Harga Dan Pasokan Pangan (Cv) :				Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
		- Beras	Poin	≤ 10	≤ 10	
		- Cabe Merah	Poin	≤ 25	≤ 25	
		- Bawang Merah	Poin	≤ 25	≤ 25	
		- Daging Ayam	Poin	≤ 10	≤ 10	
	8	Hpp Gabah Kering Panen (GKP) Di Tingkat Petani/Produsen	Rp	0	≥ HPP	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	9	Konsumsi Beras (Persen)	Persen	1,50	3,60	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	10	Konsumsi Pangan Hewani	Gr/Kap /Hr	116,5	116,5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	11	Konsumsi Sayur Dan Buah	Gr/Kap /Hr	223	223,1	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	12	Konsumsi Umbi-Umbian	Gr/Kap /Hr	40,5	40,5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	13	Persentase Dewan Ketahanan Pangan kab/kota yang dibentuk dan dibina	Persen	100,00	16,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	14	Laju Pangan Segar yang aman	Persen	10,00	10,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	15	Persentase Penerapan Hasil Pelatihan Bidang Peternakan Dan Ketahanan Pangan	Persen	65,00	76,52	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	16	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Balai Pelatihan Peternakan Dan Ketahanan Pangan	Persen	80,50	85,83	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	17	Persentase Tingkat Kesembuhan Pasien	Persen	90,00	96,75	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	18	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Hewan	Persen	88,00	89,75	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	19	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diawasi	Persen	50,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	20	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diregistrasi	Persen	10,00	30,13	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	Persen	75,00	89,91	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	22	Persentase Bibit Domba Dan Kambing Sesuai Sni Yang Dihasilkan	Persen	17,00	18,33	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Dan Kambing	Persen	84,60	88,48	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	24	Persentase Bibit Ayam Sentul Unggul	Persen	11,70	30,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	25	Persentase Bibit Itik Rambon Galur Murni	Persen	68,00	68,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas	Persen	82,20	83,34	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	27	Persentase Ternak Sapi Perah Yang Memiliki Produksi Individu ≥ 5.000 Kg/Laktasi	Persen	22,00	22,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	28	Persentase Produksi Hijauan Pakan Ternak Yang Berkualitas	Persen	55,00	55,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	29	Persentase Produksi Susu Yang Diolah	Persen	2,20	3,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	30	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pengembangan Ternak Sapi Perah Dan Hijauan Pakan Ternak	Persen	89,00	90,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	31	Persentase Ruang Lingkup Parameter Uji Yang Terakrediasi Sesuai ISO 17025:2017	Persen	73,00	44,10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	32	Persentase Pakan Yang Bersertifikat	Persen	70,00	164,31	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	33	Cakupan Pelayanan Pengujian	Persen	2,50	72,70	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	34	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pengujian Mutu Dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan	Persen	82,10	82,15	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	35	Peningkatan Pelayanan Pengujian Dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Produk Hewan	Persen	0,50	29,94	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	36	Persentase Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi ISO/IEC 17025 : 2017	Persen	90,00	92,31	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	37	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Balai Kesehatan	Persen	82,10	84,09	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
		Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
	38	Persentase Bibit Ternak Betina Sesuai SNI Dari Produksi Bibit Betina Yang Dihasilkan	Persen	33,00	33,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	39	Laju Produksi Susu	Liter	160.000	156.688	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	40	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Balai Perbibitan Dan Pengembangan Inseminasi Buatan Sapi Perah Bunikasih	Persen	84,00	87,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	41	Laju Produksi Benih Semen Beku Sapi Potong	Persen	15,00	17,45	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	42	Persentase Induk Sapi Potong Yang Memiliki Sklb	Persen	7,00	8,93	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	43	Persentase Bibit Ternak Sapi Potong Sesuai SNI	Persen	21,00	25,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	44	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Balai Perbibitan Dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong	Persen	82,10	87,51	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	45	Laju Pertumbuhan Populasi Ternak Ruminansia Besar	Persen	1,00	-3,46	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	46	Laju Pertumbuhan Populasi Ternak Ruminansia Kecil	Persen	2,00	0,45	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	47	Laju Pertumbuhan Ternak Unggas	Persen	2,00	-5,75	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	48	Persentase Pelaku Usaha Dengan Produktivitas Yang Meningkat	Persen	20,00	22,94	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
4	**Pertanahan**					
	1	Persentase Tertib Tata Kelola Pertanahan Melalui Pemenuhan Urusan Wajib Sesuai Konkuren	Persen	42,74	48,84	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	**Lingkungan Hidup**					
	1	Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK Kabupaten/Kota	Persen	40,00	60,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2	Persentase Peningkatan Kampung Iklim	Persen	78,57	81,00	Dinas Lingkungan Hidup
	3	Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persen	96,00	110,74	Dinas Lingkungan Hidup

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	4	persentase penurunan konsentrasi parameter SOX	Persen	89,00	110,74	Dinas Lingkungan Hidup
	5	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategis yang Dievaluasi Dampak dan Risikonya melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Persen	25,00	54,16	Dinas Lingkungan Hidup
	6	Persentase Peningkatan Desa Berbudaya Lingkungan	Persen	77,78	70,37	Dinas Lingkungan Hidup
	7	Persentase Peningkatan Kemitraan Lingkungan	Persen	40,00	40,00	Dinas Lingkungan Hidup
	8	Persentase Peningkatan Dokumen Lingkungan yang Dinilai dan Diawasi Implementasinya	Persen	55,00	89,16	Dinas Lingkungan Hidup
	9	Persentase Peningkatan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Pelaku Usaha dan/Kegiatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Persen	75,13	76,33	Dinas Lingkungan Hidup
	10	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter COD (Mg/L)	Persen	92,00	136,32	Dinas Lingkungan Hidup
	11	Persentase Peningkatan Sampah yang Terolah di TPA/TPST Regional	Persen	50,00	53,78	Dinas Lingkungan Hidup
	12	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pengelolaan Limbah Domestik	poin	0,79	0,79	Dinas Lingkungan Hidup
6	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**					
	1	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persen	81,83	82,22	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2	Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi	Persen	62,50	64,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	3	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	Persen	81,23	*81,37	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	4	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persen	80,80	88,55	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
	1	Persentase Desa Literasi Yang Dibina	Desa	200	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	2	Persentase Kader Penggerak Desa	Kpd	300	440	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	3	Persentase Kampung Adat Yang Dibina	Persen	100,00	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	4	Jumlah Desa Mandiri	Desa	89	270	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	5	Persentase Aparatur Desa Yang Dibina Dan Terlatih	Persen	20,00	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	6	Persentase Desa Digital	Desa	200	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	7	Jumlah Bumdesa Yang Mendapat Pendampingan Pembangunan Ekonomi Desa Yang Mandiri	Bumdesa	180	176	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	8	Persentase Inovasi Dan TTG Yang Dihasilkan Dari 27 Kabupaten/Kota.	Jenis	13	25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	9	Persentase Desa Yang Mendapat Bantuan APBD	Desa	5.312	5.307	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
	1	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	62,87	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
9	**Perhubungan**					
	1	Jumlah Penumpang Terminal Di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah I	Penumpang	887.479	510.250	Dinas Perhubungan
	2	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Di Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah I Yang Terpasang	Persen	29,80	29,80	Dinas Perhubungan
	3	Jumlah Penumpang Terminal Di Wilayah Kerja UPTD Pp Perhubungan LLAJ Wilayah II	Penumpang	1.956.148	2394748	Dinas Perhubungan
	4	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Di Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Kerja UPTD PP	Persen	46,73	46,78	Dinas Perhubungan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
		Perhubungan LLAJ Wilayah II Yang Terpasang				
	5	Jumlah Penumpang Terminal Di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah III	Penumpang	572.868	619.006	Dinas Perhubungan
	6	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Di Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah III Yang Terpasang	Persen	35,37	35,37	Dinas Perhubungan
	7	Jumlah Penumpang Terminal Di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah IV	Penumpang	199.613	173.054	Dinas Perhubungan
	8	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Di Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah IV Yang Terpasang	Persen	27,33	27,33	Dinas Perhubungan
	9	Persentase Perencanaan Prasarana Perhubungan Udara Yang Dihasilkan	Persen	37,81	38,17	Dinas Perhubungan
	10	Jumlah Penumpang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru	Penumpang	1.223	1.089	Dinas Perhubungan
	11	Tingkat Ketersediaan Prasarana Bandar Udara	Persen	71,34	71,4	Dinas Perhubungan
	12	Persentase Perencanaan Prasarana Dan Keselamatan Perhubungan Laut Dan ASDP Yang Dihasilkan	Persen	50,18	50,17	Dinas Perhubungan
	13	Jumlah Barang Dan Penumpang Angkutan ASDP Di Jawa Barat				Dinas Perhubungan
		A. Barang	Ton	100.000	28.647	
		B. Penumpang	Orang	600.000	222.973	
	14	Tingkat Ketersediaan Prasarana Dan Keselamatan Perhubungan ASDP	Persen	58,00	58,00	Dinas Perhubungan
	15	Jumlah Barang Dan Penumpang Angkutan Laut				Dinas Perhubungan
		A. Barang	Ton	23.700.209	24.724.893	
			Teus	N/A	N/A	
		B. Penumpang	Orang	N/A	N/A	
	17	Tingkat Ketersediaan Prasarana Dan Keselamatan Perhubungan Laut Di Jawa Barat	Persen	36,36	36,36	Dinas Perhubungan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	18	Jumlah Penumpang Kereta Api	Penumpang	38.827.305	74.691.069	Dinas Perhubungan
	18	Tingkat Ketersediaan Prasarana Moda Perkeretaapian	Persen	23,80	30,51	Dinas Perhubungan
	19	Jumlah Penumpang AKDP Di Provinsi Jawa Barat	Penumpang	98.195.328	92.199.803	Dinas Perhubungan
	20	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Transportasi	persen	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
10	**Komunikasi dan Informatika**					
	1	Persentase Layanan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persen	90,40	97,40	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Persentase Diseminasi Informasi Dan Kemitraan Komunikasi Yang Dilaksanakan	Persen	90,00	96,66	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3	Persentase Media Komunikasi Publik Yang Dimanfaatkan	Persen	90,80	93,85	Dinas Komunikasi dan Informatika
	4	Persentase Persidangan Komisi Informasi Melalui Mediasi Dan Ajudikasi Non Litigasi	Persen	75,00	80,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	5	Tingkat Layanan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	3,10	3,68	Dinas Komunikasi dan Informatika
	6	Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	3,10	3,58	Dinas Komunikasi dan Informatika
	7	Tingkat Kematangan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	3,10	3,58	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**					
	1	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	6,10	-6.24	Dinas Koperasi dan Usaha kecil
	2	Jumlah Usaha Pemula	Unit	1.300	1.300	Dinas Koperasi dan Usaha kecil
	3	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Orang	0	0	Dinas Koperasi dan Usaha kecil
	4	Tingkat Kepatuhan Koperasi	Persen	2,50	0,63	Dinas Koperasi dan Usaha kecil
	5	Laju Pertumbuhan Omzet Umkm Binaan	Persen	5,00	0,35	Dinas Koperasi dan Usaha kecil
	6	Persentase Koperasi Aktif	Persen	46,00	58,90	Dinas Koperasi dan Usaha kecil
12	**Penanaman Modal**					
	1	Persentase Data Dan Informasi Yang Valid	Persen	80,00	80,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	2	Tingkat Penyelesaian Perizinan Bidang Esda Yang Tepat Waktu	Persen	55,00	55,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	3	Tingkat Penyelesaian Perizinan Bidang Insos Yang Tepat Waktu	Persen	55,00	55,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4	Kemudahan Prosedur Dalam Mendapatkan Pelayanan Perizinan	Indeks	77,50	77,50	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	5	Laju Minat Investasi Di Jawa Barat	Persen	5,50	5,50	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	6	Tingkat Kualitas Pelayanan Perizinan	Persen	82,00	82,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	7	Peningkatan Laju Realisasi Proyek Penanaman Modal	Persen	5,50	5,50	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	**Kepemudaan dan Olahraga**					
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persen	0,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	Persentase Tenaga Olahraga Tradisional, Berkebutuhan Khusus Dan Rekreasi Binaan Yang Bersertifikat	Persen	0,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	3	Persentase Event Olahraga Tradisional, Berkebutuhan Khusus Dan Rekreasi Yang Diselenggarakan Dan Diikuti	Persen	25,00	25,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	4	Persentase Medali Emas Yang Diperoleh Dalam Event Nasional Peparpenas	Persen	0,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	5	Persentase Medali Emas Yang Diperoleh Dalam Event Nasional:				Dinas Pemuda dan Olahraga
		A. Popnas	Persen	0,00	0,00	
		B. Popwilnas	Persen	0,00	0,00	
	6	Persentase Tenaga Olahraga Prestasi Binaan Yang Memiliki Sertifikat	Persen	0,60	0,60	Dinas Pemuda dan Olahraga
	7	Persentase Event Olahraga Prestasi Yang Diselenggarakan Dan Diikuti	Persen	10,00	10,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	8	Persentase Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Yang Berprestasi Di Tingkat Nasional	Persen	100,00	100,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	9	Persentase Penyediaan Sarana Olahraga Kawasan Sport Jabar	Persen	0,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	10	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	Persen	1,00	1,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	11	Persentase Pemuda Binaan Dispora Yang Berwirausaha	Persen	1,00	1,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	12	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Dibina	Persen	3	3	Dinas Pemuda dan Olahraga
	13	Persentase Pemberian Pengahargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berprestasi Di Tingkat Nasional	Persen	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	**Statistik**					
	1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persen	60,00	77,59	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Persentase Dokumen Hasil Pengolahan Dan Analisis Statistik Sektoral Spasial Dan Aspasial Yang Dihasilkan	Persen	60,00	83,33	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Data Dan Informasi	Poin	75	83,33	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	**Persandian**					
	1	Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Level	III sd III+	III+ sd IV+ (610 score)	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	**Kebudayaan**					
	1	Persentase Usulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Jawa Barat Yang Ditetapan Sebagai WBTB Tingkat Nasional	Persen	16,95	54,23	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
	2	Persentase Bahasa, Sastra Dan Aksara Daerah Yang Dilestarikan	Persen	0,00	0,00	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
	3	Persentase Cagar Budaya Yang Dilindungi	Persen	17,39	19,13	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
	4	Persentase Benda Koleksi Museum Sri Baduga Yang Dilindungi	Persen	6,95	9,93	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
	5	Persentase Seni Budaya Yang Dilindungi	Persen	10,94	37,69	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
17	**Perpustakaan**					
	1	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Poin	0,0965	0,3178**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	2	Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Lingkup Provinsi Yang Memiliki Sertifikat	Persen	54,65	52,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	3	Laju Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	Persen	3,00	2,25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	4	Persentase Naskah Kuno Berkonten Ilmu Pengetahuan Yang Dilestarikan	Naskah Kuno	2	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	5	Persentase Karya Cetak, Karya Rekam Dan Hasil Khazanah Budaya Jawa Barat Yang Disimpan Sesuai Dengan Peraturan	Persen	1,17	50,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	6	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	679.679	48.984	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	7	Persentase Koleksi Buku Yang Dibaca	Persen	1,81	1,21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	8	Survei Kepuasan (SKM) terhadap Pelayanan Perpustakaan	Poin	81	80,53	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
18	**Kearsipan**					
	1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	59,00	28,95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	Persentase Penyusutan Arsip	Persen	20,00	4,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	3	Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	15,00	3,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	4	Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	17,00	66,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	5	Persentase Simpul SIKN Yang Terintegrasi Se-Jawa Barat	Persen	46,00	4,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kearsipan	Poin	55	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
URUSAN PILIHAN						
1	**Kelautan dan Perikanan**					
	1	Tingkat Penanganan Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan	Persen	100,00	100,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2	Tingkat Indikasi Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Wiayah Selatan	Persen	70,00	70,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	Tingkat Indikasi Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Wiayah Utara	Persen	70,00	70,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	4	Persentase Lokasi Kawasan Konservasi Perairan Yang Dikelola	Persen	37,50	39,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5	Produksi Garam	Ton	245.978	41.342,98	Dinas Kelautan dan Perikanan
	6	Jumlah Plasma Nutfah Yang Dilestarikan Di Wilayah Selatan	Jenis	5	5	Dinas Kelautan dan Perikanan
	7	Persentase Lokasi Kawasan Konservasi Perairan Yang Dikelola Di Wilayah Selatan	Persen	33,33	33,30	Dinas Kelautan dan Perikanan
	8	Jumlah Plasma Nutfah Yang Dilestarikan Di Wilayah Utara Jawa Barat	Jenis	5	5	Dinas Kelautan dan Perikanan
	9	Persentase Lokasi Kawasan Konservasi Perairan Yang Dikelola Di Wilayah Utara	Persen	33,33	33,30	Dinas Kelautan dan Perikanan
	10	Produksi Perikanan Tangkap Wilayah Selatan	Ton	14.708,86	14.718,35	Dinas Kelautan dan Perikanan
	11	Produksi Perikanan Tangkap Wilayah Utara	Ton	158.565,17	195.810,19	Dinas Kelautan dan Perikanan
	12	Konsumsi Ikan Jawa Barat	Kg/Kap/Th	29,95	36,20	Dinas Kelautan dan Perikanan
	13	Laju Produksi Olahan Yang Terstandardisasi	Persen	3,00	15,64	Dinas Kelautan dan Perikanan
	14	Persentase Produksi Perikanan Yang Memenuhi Standard Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan	Persen	92,00	92,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	15	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	808.000	1.163.695,40	Dinas Kelautan dan Perikanan
	16	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	180.000	225.759,86	Dinas Kelautan dan Perikanan
	17	Produksi Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Wilayah Selatan	Ton	3.220,63	10.365,23	Dinas Kelautan dan Perikanan
	18	Produksi Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Wilayah Utara	Ton	295.855,51	383.855,90	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	**Pariwisata**					
	1	Persentase Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	Persen	2,44	1,47	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2	Persentase Industri Kreatif Yang Dikembangkan	Persen	11,11	7,40	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3	Persentase Seni Budaya Dan Destinasi Wisata Yang Dipromosikan	Persen	9,52	52,38	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	**Pertanian**					
	1	Produksi Benih Tanaman Buah	Pohon	90.000	147.131	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	2	Produksi Benih Tanaman Sayuran	Kg	15.000	12.287	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	3	Produksi Benih Tanaman Hias	Pohon	56.750	80.085	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	4	Produksi Benih Tanaman Obat	Kg	4.700	600	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	5	Produksi Benih Pokok Tanaman Pangan	Kg	362.700	362.700	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	6	Produktivitas Tanaman Hortikultura	Kw/Ha	90,12	95,34	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	7	Persentase Penerapan Sertifikat Mutu Hasil Tanaman Hortikultura	Persen	20,00	17,80	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	8	Produktivitas Tanaman Pangan	Kw/Ha	57,26	57,42	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	9	Persentase Penerapan Sertifikat Mutu Hasil Tanaman Pangan	Persen	20,00	21,00	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	10	Persentase SDM TPH Yang Dilatih	Persen	20,41	11,16	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	11	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Balai Pelatihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persen	88,86	88,89	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	12	Persentase Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Yang Berserifikat	Persen	70,50	96,89	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	13	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	Persen	79,79	85,16	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	14	Produksi Benih Kentang	Knol	285.000	220.162	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	15	Persentase Alsintan Yang Dikembangkan	Persen	66,66	66,66	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	16	Persentase Kelompok Tani Yang Di Bina Oleh Penyuluh	Persen	48,13	37,54	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	17	Persentase Penyuluh Yang Berprestasi	Persen	2,13	2,13	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	18	Persentase Luas Lahan Yang Terkena Serangan Opt/Dpi	Persen	4,50	11,16	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	19	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman	Persen	1,85	2,21	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	20	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Perkebunan	Persen	1,00	1,20	Dinas Perkebunan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	21	Persentase Peningkatan Kompetensi Sdm Perkebunan	Persen	2,00	2,46	Dinas Perkebunan
	22	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Perkebunan	Persen	2,00	2,50	Dinas Perkebunan
	23	Laju Peningkatan Akses Permodalan Perkebunan	Persen	2,00	5,00	Dinas Perkebunan
	24	Laju Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Komoditas Perkebunan Yang Tepat	Persen	9,00	12,5	Dinas Perkebunan
	25	Penurunan Serangan Opt Perkebunan	Persen	1,00	1,02	Dinas Perkebunan
	26	Persentase Peningkatan Penggunaan Benih Bersertifikat	Persen	3,67	10,08	Dinas Perkebunan
	27	Laju Petani Yang Mengolah Produk Primer	Persen	5,00	5,60	Dinas Perkebunan
	28	Laju Petani yang melakukan inovasi pemasaran	Persen	2,00	2,34	Dinas Perkebunan
	29	Laju Peningkatan Produksi Benih Perkebunan	Persen	1,00	1,58	Dinas Perkebunan
4	**Kehutanan**					
	1	Persentase penurunan emisi sektor kehutanan	Persen	100,00	100,00	Dinas Kehutanan
	2	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Persen	5,00	0,00	Dinas Kehutanan
	3	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah I	Persen	5,00	0,00	Dinas Kehutanan
	4	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah II	Persen	5,00	0,00	Dinas Kehutanan
	5	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah III	Persen	5,00	0,00	Dinas Kehutanan
	6	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah IV	Persen	5,00	0,00	Dinas Kehutanan
	7	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah IX	Persen	5,00	0,00	Dinas Kehutanan
	8	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar	Persen	5,00	0,00	Dinas Kehutanan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
		yang ditangkarkan di CDK Wilayah V				
	9	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah VI	Persen	5,00	0,00	Dinas Kehutanan
	10	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah VII	Persen	5,00	0,00	Dinas Kehutanan
	11	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah VIII	Persen	10,00	0,00	Dinas Kehutanan
	12	Persentase peningkatan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di TAHURA Ir. H. Djuanda	Persen	5,00	0,00	Dinas Kehutanan
	13	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Dokumen	5	0,00	Dinas Kehutanan
	14	Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam	Persen	0,00	0,00	Dinas Kehutanan
	15	Berkurangnya Persentase Luas Lahan Kritis yang ditangani	Persen	0,65	0,65	Dinas Kehutanan
	16	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah I	Persen	1,21	1,21	Dinas Kehutanan
	17	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah II	Persen	1,31	1,31	Dinas Kehutanan
	18	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah III	Persen	0,82	0,82	Dinas Kehutanan
	19	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah IV	Persen	0,31	0,31	Dinas Kehutanan
	20	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah IX	Persen	3,35	3,35	Dinas Kehutanan
	21	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah V	Persen	0,87	0,87	Dinas Kehutanan
	22	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah VI	Persen	0,78	0,78	Dinas Kehutanan
	23	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah VII	Persen	1,32	1,32	Dinas Kehutanan
	24	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah VIII	Persen	1,70	1,70	Dinas Kehutanan
	25	Jumlah Produksi Olahan Hasil Hutan	Persen	10,00	12,45	Dinas Kehutanan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	26	Jumlah Produksi Hasil Hutan	Persen	10,00	12,45	Dinas Kehutanan
	27	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah I	Persen	10,00	12,45	Dinas Kehutanan
	28	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah II	Persen	10,00	12,45	Dinas Kehutanan
	29	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah III	Persen	10,00	12,45	Dinas Kehutanan
	30	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah IV	Persen	10,00	12,45	Dinas Kehutanan
	31	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah V	Persen	10,00	12,45	Dinas Kehutanan
	32	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah VI	Persen	10,00	12,45	Dinas Kehutanan
	33	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah VII	Persen	10,00	12,45	Dinas Kehutanan
	34	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah VIII	Persen	10,00	12,45	Dinas Kehutanan
	35	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	0,00	0,00	Dinas Kehutanan
	36	Persentase Layanan Perizinan Perhutanan Sosial	Persen	45,00	47,80	Dinas Kehutanan
	37	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	0,00	0,00	Dinas Kehutanan, (CDK Wilayah I)
	38	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	0,00	0,00	Dinas Kehutanan (CDK Wilayah II)
	39	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	0,00	0,00	Dinas Kehutanan (CDK Wilayah III)
	40	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	0,00	0,00	Dinas Kehutanan (CDK Wilayah IV)
	41	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	0,00	0,00	Dinas Kehutanan (CDK Wilayah V)
	42	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	0,00	0,00	Dinas Kehutanan (CDK Wilayah VI)
	43	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan	Persen	0,00	0,00	Dinas Kehutanan (CDK Wilayah VII)

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
		Rakyat yang dikelola secara lestari				
	44	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	0,00	0,00	Dinas Kehutanan (CDK Wilayah VIII)
	45	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	0,00	0,00	Dinas Kehutanan (CDK Wilayah IX)
	46	Tingkat kerusakan hutan	Persen	0,80	0,78	Dinas Kehutanan
	47	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah I	Persen	0,80	0,78	Dinas Kehutanan
	48	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah II	Persen	0,80	0,78	Dinas Kehutanan
	49	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah III	Persen	0,80	0,78	Dinas Kehutanan
	50	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah IV	Persen	0,80	0,78	Dinas Kehutanan
	51	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah V	Persen	0,80	0,78	Dinas Kehutanan
	52	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah VI	Persen	0,80	0,78	Dinas Kehutanan
	53	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah VII	Persen	0,80	0,78	Dinas Kehutanan
	54	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah VIII	Persen	0,80	0,78	Dinas Kehutanan
	55	Tingkat kerusakan hutan di TAHURA Ir. H. Djuanda	Persen	0,80	0,78	Dinas Kehutanan
	56	Persentase Kesiapan Dokumen Arahan dan Dokumen Tata Batas	Persen	57,00	57,00	Dinas Kehutanan
	57	Persentase sumber benih yang terbangun	Persen	100,00	100,00	Dinas Kehutanan
	58	Persentase Terbangunnya Aplikasi Teknologi Informasi Inovasi Pembangunan Kehutanan	Persen	100,00	100,00	Dinas Kehutanan
5	**Energi Dan Sumber Daya Mineral**					
	1	Persentase Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan	Persen	4,35	38,26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	2	Laju Pembangunan Sumur Imbuhan	Persen	20,59	56,65	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3	Persentase Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	4,61	6,89	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	4	Persentase Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	3,31	48,32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	5	Persentase Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	5,91	79,11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	6	Persentase Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen	4,68	14,37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	7	Persentase Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	4,85	5,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	8	Persentase Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	3,00	27,54	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	9	Persentase Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	3,00	2,10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	10	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan Yang Patuh Terhadap Aturan	Persen	59,71	72,86	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	11	Persentase Instalasi Tenaga Listrik Yang Laik Operasi	Persen	80,00	87,41	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	12	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Persen	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	13	Persentase Pelaku Usaha Ketenagalistrikan Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	40,00	80,75	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	14	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	15	Persentase Pelaku Usaha Ketenagalistrikan Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	40,00	93,40	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	16	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	17	Persentase Pelaku Usaha Ketenagalistrikan Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	40,00	130,90	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	18	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	19	Persentase Pelaku Usaha Ketenagalistrikan Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen	40,00	172,10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	20	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	21	Persentase Pelaku Usaha Ketenagalistrikan Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	40,00	58,55	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	22	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	23	Persentase Pelaku Usaha Ketenagalistrikan Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	40,00	55,20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	24	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	25	Persentase Pelaku Usaha Ketenagalistrikan Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	40,00	80,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	26	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	27	Persentase Sample Air Tanah Yang Diuji KualitAsNya	Persen	0,70	0,70	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	28	Persentase Komoditas EBT Yang Diuji Unjuk Kinerja Sebagai Bahan Penggunaan Kebijakan Bidang Energi	Persen	12,50	12,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	29	Persentase Pengujian Kualitas Bahan Tambang Di Jawa Barat	Persen	15,00	15,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	30	Jumlah Pemanfaatan EBT Di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	SBM (Setara Barel Minyak)	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	31	Jumlah Pemanfaatan EBT Di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	SBM (Setara Barel Minyak)	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	32	Jumlah Pemanfaatan EBT Di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	SBM (Setara Barel Minyak)	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	33	Jumlah Pemanfaatan EBT Di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	SBM (Setara Barel Minyak)	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	34	Jumlah Pemanfaatan EBT Di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	SBM (Setara Barel Minyak)	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	35	Jumlah Pemanfaatan EBT Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	SBM (Setara Barel Minyak)	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	36	Jumlah Pemanfaatan EBT Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	SBM (Setara Barel Minyak)	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	37	Persentase Energi Baru Dan Terbarukan	Persen	21,61	41,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	38	Jumlah Reduksi Co2 Dari Bidang Energi (Tidak Termasuk Sektor Transportasi)	Ton Co2Eq	107,17	107,17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	39	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Teknis	Persen	45,00	46,65	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	40	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Administrasi	Persen	67,00	68,24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	41	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	67,00	44,44	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	42	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	67,00	78,57	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	43	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	67,00	77,31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	44	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen	67,00	68,40	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	45	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	67,00	67,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	46	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	67,00	75,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	47	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	67,00	67,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6	**Perdagangan**					
	1	Indeks Keberdayaan Konsumen	Poin	37,00	51,95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2	Nilai Ekspor Non Migas	USD$	15357,55	26388,27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3	Indeks Harga Konsumen Bahan Makanan	Poin	4	3,76	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bpsmb Agro	Kategori	B	A	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bpsmb Logam Dan Elektronika	Kategori	B	B	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bpsmb Air Minum Dalam Kemasan	Kategori	B	A	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bpsmb Keramik Dan Tabung Gas	Kategori	B	A	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	**Perindustrian**					
	1	Pertumbuhan Pma/Pmdn Sektor Industri Agro, Kimia, Tekstil Dan Aneka	Persen	1,00	(-36,19) / 27.90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2	Pertumbuhan Unit Usaha Industri Agro, Kimia, Tekstil Dan Aneka	Persen	0,10	105,1 0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3	Persentase Pertumbuhan Pma/Pmdn Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika (Ilmate)	Persen	1,00	32.64 / (-48.85)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	4	Pertumbuhan Unit Usaha Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika	Persen	0,10	51,23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD Industri Logam	Kategori	B	B	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD Ipok	Kategori	B	B	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	**Transmigrasi**					
	1	Persentase Perjanjian Kerjasama Bidang	Persen	85,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
		Ketransmigrasian Yang Direalisasikan				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	**Perencanaan**					
	1	Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan pembangunan	Persen	80,00	80,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah	Persen	80,00	85,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	3	Rata-rata capaian proyek strategis Jawa Barat yang diselesaikan	Persen	100,00	95,86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	4	Rata-rata capaian kegiatan APBN di Jawa Barat	Persen	80,00	80,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	Rata-rata capaian kinerja pembangunan kab/kota	Persen	85,00	85,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	6	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	7	Persentase Partisipasi Publik Terhadap Proses Perencanaan	Persen	60,00	60,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	8	Persentase Kesesuaian Perencanaan Dan Penganggaran	Persen	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	9	Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	81,00	81,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	10	Persentase Sasaran, Program Dan Kegiatan RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD Dan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi	Persen	80,00	80,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	11	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota Dengan Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Ekonomi	Persen	80,00	80,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	12	Persentase Sasaran, Program Dan Kegiatan RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD Dan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Bidang Fisik	Persen	80,00	80,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	13	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota Dengan	Persen	80,00	80,00	Badan Perencanaan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
		Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Fisik				Pembangunan Daerah
	14	Persentase Sasaran, Program Dan Kegiatan Rkpd Yang Konsisten Dengan Rpjmd Dan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya:	Persen	80,00	80,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	15	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota Dengan Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya	Persen	80,00	80,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	**Keuangan**					
	1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Keuangan Daerah	Persen	100,00	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Aset Daerah	Persen	80,00	80,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	3	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persen	100,00	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	4	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Pengamanan Dan Pemanfaatan Aset Daerah	Persen	80,00	80,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persen	80,00	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	6	Persentase Pemenuhan Dokumen Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Persen	100,00	85	Badan Pendapatan Daerah
	7	Persentase Kepatuhan Unit Kerja Terhadap Tupoksi Dan SPIP	Persen	100,00	100	Badan Pendapatan Daerah
	8	Persentase Akurasi, Kecepatan Dan Kecermatan Unit Kerja Dalam Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan	Persen	100,00	100	Badan Pendapatan Daerah
	9	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pendapatan I	Persen	100,00	N/A	Badan Pendapatan Daerah
	10	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pendapatan I	Persen	5,71	N/A	Badan Pendapatan Daerah
	11	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pendapatan II	Persen	100,00	N/A	Badan Pendapatan Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	12	Rasio Efektivitas Dana Perimbangan	Persen	100,00	N/A	Badan Pendapatan Daerah
	13	Rasio Efektivitas Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Persen	100,00	N/A	Badan Pendapatan Daerah
	14	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pendapatan II	Persen	3,00	N/A	Badan Pendapatan Daerah
	15	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Badan Pendapatan Daerah	Persen	100,00	100,00	Badan Pendapatan Daerah
	16	Persentase Pemenuhan Dokumen Analisis Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Serta Rencana Pengembangan Instrumen Pelayanan Pendapatan	Persen	100,00	100,00	Badan Pendapatan Daerah
	17	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi Dan Kerja Sama Pelayanan/Pendapatan Daerah	Persen	100,00	100,00	Badan Pendapatan Daerah
	18	Persentase Validitas Dan Keakuratan Database Sistem Pendapatan	Persen	80,50	81,00	Badan Pendapatan Daerah
	19	Persentase Service Level Agreement (Sla)	Persen	95,00	95,00	Badan Pendapatan Daerah
	20	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	Persen	100,00	N/A	Badan Pendapatan Daerah
	21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	Poin	83,93	84,00	Badan Pendapatan Daerah
	22	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	Persen	5,70	-0,14	Badan Pendapatan Daerah
	23	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	Persen	100,00	80,00	Badan Pendapatan Daerah
	24	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	Poin	84,475	86,00	Badan Pendapatan Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	25	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	Persen	5,72	N/A	Badan Pendapatan Daerah
	26	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	Persen	100,00	86,00	Badan Pendapatan Daerah
	27	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	Poin	86,675	85,00	Badan Pendapatan Daerah
	28	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	Persen	5,71	-0,08	Badan Pendapatan Daerah
	29	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	Persen	100,00	80,00	Badan Pendapatan Daerah
	30	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	Poin	85,8	84,00	Badan Pendapatan Daerah
	31	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	Persen	5,72	-0,31	Badan Pendapatan Daerah
	32	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	Persen	100,00	78,00	Badan Pendapatan Daerah
	33	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	Poin	83,87	86,00	Badan Pendapatan Daerah
	34	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	Persen	5,72	-0,14	Badan Pendapatan Daerah
	35	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	Persen	100,00	82,00	Badan Pendapatan Daerah
	36	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	Poin	89,025	89,00	Badan Pendapatan Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	37	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	Persen	5,51	-0,08	Badan Pendapatan Daerah
	38	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	Persen	100,00	83,00	Badan Pendapatan Daerah
	39	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	Poin	83,80	87,00	Badan Pendapatan Daerah
	40	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	Persen	5,72	-0,17	Badan Pendapatan Daerah
	41	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	Persen	100,00	85,00	Badan Pendapatan Daerah
	42	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	Poin	84,10	85,00	Badan Pendapatan Daerah
	43	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	Persen	5,93	-0,08	Badan Pendapatan Daerah
	44	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon Ii Ciledug	Persen	100,00	66,00	Badan Pendapatan Daerah
	45	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	Poin	83,875	88,00	Badan Pendapatan Daerah
	46	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	Persen	5,55	-0,21	Badan Pendapatan Daerah
	47	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	Persen	100,00	81,00	Badan Pendapatan Daerah
	48	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan	Poin	83,92	90,00	Badan Pendapatan Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
		Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut				
	49	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	Persen	5,76	-0,07	Badan Pendapatan Daerah
	50	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	Persen	100,00	83,00	Badan Pendapatan Daerah
	51	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	Poin	84,45	88,00	Badan Pendapatan Daerah
	52	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	Persen	5,62	-0,08	Badan Pendapatan Daerah
	53	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	Persen	100,00	68,00	Badan Pendapatan Daerah
	54	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	Poin	86,62	90,00	Badan Pendapatan Daerah
	55	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	Persen	3,54	-0,21	Badan Pendapatan Daerah
	56	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	Persen	100,00	79,00	Badan Pendapatan Daerah
	57	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kerawang	Poin	83,775	90,00	Badan Pendapatan Daerah
	58	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	Persen	5,72	-0,16	Badan Pendapatan Daerah
	59	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	Persen	100,00	80,00	Badan Pendapatan Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	60	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	Poin	83,80	92,00	Badan Pendapatan Daerah
	61	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	Persen	5,97	-0,09	Badan Pendapatan Daerah
	62	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	Persen	100,00	81,00	Badan Pendapatan Daerah
	63	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	Poin	83,80	89,00	Badan Pendapatan Daerah
	64	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	Persen	5,46	-0,08	Badan Pendapatan Daerah
	65	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	Persen	100,00	64,00	Badan Pendapatan Daerah
	66	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaraan	Poin	93,075	89,00	Badan Pendapatan Daerah
	67	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	Persen	3,54	0	Badan Pendapatan Daerah
	68	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	Persen	100,00	79,00	Badan Pendapatan Daerah
	69	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	Poin	84,55	88,00	Badan Pendapatan Daerah
	70	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	Persen	5,71	N/A	Badan Pendapatan Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	71	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	Persen	100,00	79,00	Badan Pendapatan Daerah
	72	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	Poin	84,25	87,00	Badan Pendapatan Daerah
	73	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	Persen	5,75	-0,08	Badan Pendapatan Daerah
	74	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	Persen	100,00	85,00	Badan Pendapatan Daerah
	75	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	Poin	83,35	86,00	Badan Pendapatan Daerah
	76	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	Persen	5,71	-0,07	Badan Pendapatan Daerah
	77	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi Ii Pelabuhan Ratu	Persen	100,00	71,00	Badan Pendapatan Daerah
	78	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	Poin	84,01	92,00	Badan Pendapatan Daerah
	79	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	Persen	5,74	-0,24	Badan Pendapatan Daerah
	80	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	Persen	100,00	82,00	Badan Pendapatan Daerah
	81	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah	Poin	90,425	96,00	Badan Pendapatan Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
		Wilayah Kabupaten Sumedang				
	82	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	Persen	5,73	-0,07	Badan Pendapatan Daerah
	83	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Persen	100,00	78,00	Badan Pendapatan Daerah
	84	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Poin	84,40	89,00	Badan Pendapatan Daerah
	85	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Persen	5,83	-0,08	Badan Pendapatan Daerah
	86	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Persen	100,00	93,00	Badan Pendapatan Daerah
	87	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Poin	84,125	88,00	Badan Pendapatan Daerah
	88	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Persen	4,76	-0,18	Badan Pendapatan Daerah
	89	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	Persen	100,00	94,00	Badan Pendapatan Daerah
	90	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	Poin	83,90	90,00	Badan Pendapatan Daerah
	91	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	Persen	5,66	-0,19	Badan Pendapatan Daerah
	92	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Persen	100,00	97,00	Badan Pendapatan Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	93	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Poin	83,65	91,00	Badan Pendapatan Daerah
	94	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Persen	5,11	-0,11	Badan Pendapatan Daerah
	95	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	Persen	100,00	83,00	Badan Pendapatan Daerah
	96	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	Poin	84,975	85,00	Badan Pendapatan Daerah
	97	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	Persen	5,68	-0,08	Badan Pendapatan Daerah
	98	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	Persen	100,00	88,00	Badan Pendapatan Daerah
	99	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	Poin	83,05	88,00	Badan Pendapatan Daerah
	100	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	Persen	5,69	-0,17	Badan Pendapatan Daerah
	101	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	Persen	100,00	87,00	Badan Pendapatan Daerah
	102	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	Poin	83,85	90,00	Badan Pendapatan Daerah
	103	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	Persen	5,73	-0,16	Badan Pendapatan Daerah
	104	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	Persen	100,00	89,00	Badan Pendapatan Daerah
	105	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	Poin	83,05	84,00	Badan Pendapatan Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	106	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	Persen	5,68	-0,14	Badan Pendapatan Daerah
	107	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	Persen	100,00	90,00	Badan Pendapatan Daerah
	108	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	Poin	84,675	90,00	Badan Pendapatan Daerah
	109	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	Persen	2,66	-0,16	Badan Pendapatan Daerah
	110	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	Persen	100,00	84,00	Badan Pendapatan Daerah
	111	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	Poin	87,35	91,00	Badan Pendapatan Daerah
	112	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	Persen	5,66	-0,16	Badan Pendapatan Daerah
	113	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	Persen	100,00	81,00	Badan Pendapatan Daerah
	114	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	Poin	85,60	98,00	Badan Pendapatan Daerah
	115	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	Persen	5,74	-0,23	Badan Pendapatan Daerah
	116	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	Persen	100,00	86,00	Badan Pendapatan Daerah
	117	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	Poin	86,10	91,00	Badan Pendapatan Daerah
	118	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	Persen	3,50	-0,15	Badan Pendapatan Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	119	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	Persen	100,00	90,00	Badan Pendapatan Daerah
	120	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	Poin	84,975	89,00	Badan Pendapatan Daerah
	121	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	Persen	4,90	-0,05	Badan Pendapatan Daerah
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**					
	1	Nilai Kriteria Penggajian, Penghargaan, Dan Disiplin	Nilai (0-40)	32,50	40	Badan Kepegawaian Daerah
	2	Nilai Kriteria Perlindungan Dan Pemberian Kemudahan	Poin	16	16	Badan Kepegawaian Daerah
	3	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Poin	40	40	Badan Kepegawaian Daerah
	4	Nilai Kriteria Pengadaan Pegawai	Nilai (0-40)	40	36	Badan Kepegawaian Daerah
	5	Nilai Kriteria Promosi, Mutasi Dan Rotasi	Nilai (0-40)	32,50	40	Badan Kepegawaian Daerah
	6	Nilai Kriteria Sistem Pendukung Kepegawaian	Nilai (0-24)	19	21	Badan Kepegawaian Daerah
	7	Nilai Kriteria Pembinaan Karir Dan Peningkatan Kompetensi	Nilai (0-120)	85	102.50	Badan Kepegawaian Daerah
	8	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja	Nilai (0-60)	60	80,00	Badan Kepegawaian Daerah
	9	Persentase Fasilitas Kesejahteraan dan dukungan Peningkatan Kinerja Pegawai di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	10	Jumlah ASN Non Provinsi Yang Terfasilitasi Pengembangan Kompetensi	Persen	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	11	Jumlah Akreditasi Manajerial & Sosial Kultural, Teknis, Pemerintahan, ISO Dan Akreditasi Corpu SI	Sertifikat	5	6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	12	Persentase Pejabat Struktural Yang Pernah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Latsar Cpns	Persen	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	13	Presentasi Pimpinan Daerah Yang Lulus	Persen	100,00	100,00	Badan Pengembangan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
		Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah				Sumber Daya Manusia
	14	Presentasi Pimpinan Tinggi Yang Lulus Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi	Persen	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	15	Persentase DPRD/Kepala Desa/Perangkat Desa Yg Lulus Pengembangan Kompetensi Khusus	Persen	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	16	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional Dan Pelaksana Yang Pernah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Persen	18,70	24,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	17	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional Dan Pelaksana Yang Pernah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif	Persen	18,70	20,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	18	Persentase Rencana Pengembangan Kompetensi Yang Sesuai Prioritas Pembangunan	Persen	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	19	Persentase Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi Yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	20	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Untuk Implementasi Proyek Perubahan Alumni	Dokumen	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	21	Persentase Lulusan Uji Kompetensi Manajerial, Teknis, Sosial Kultural Dan Pemerintahan	Persen	18,70	30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	**Penelitian dan Pengembangan**					
	1	Persentase Penelitian Dan Pengembangan IPTEK Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Persen	0,00	0,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	2	Persentase Kajian Kelitbangan Yang Didiseminasikan Kepada Perangkat Daerah Atau Stakeholder Lainnya	Persen	37,14	37,14	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	3	Persentase Kerjasama Penelitian Yang Ditindaklanjuti	Persen	40,00	40,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	4	Persentase Pemanfaatan Iptek	Persen	26,67	30,50	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	5	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	24,80	40,80	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	6	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Kajian Dan Analisis Yang Diterapkan	Persen	32,50	32,50	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
FUNGSI LAINNYA						
1	**Sekretariat Daerah**					
	1	Persentase Fasilitasi Naskah Kerja Sama Daerah	Persen	90,00	N/A	Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Sekretariat Daerah
	2	Persentase Verifikasi Dokumen Persyaratan Dan Kelayakan Pemekaran Daerah	Persen	100,00	-	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi, Sekretariat Daerah
	3	Persentase Efektifitas Kebijakan Yang Diimplementasikan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Aspek Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Persen	65,00	91,66	Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah
	4	Persentase Efektifitas Kebijakan Yang Diimplementasikan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Aspek Sarana Perekonomian	Persen	65,00	86,67	Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah
	5	Persentase Administrasi Pemerintahan Umum Yang Diverifikasi	Persen	90,00	N/A	Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Sekretariat Daerah
	6	Persentase Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dan HAM Yang Difasilitasi	Persen	100,00	N/A	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Daerah
	7	Persentase Laporan/Rekomendasi/Bahan Rumusan Kebijakan Yang Akan Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan BUMD Lembaga Keuangan.	Persen	96,00	96,00	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi, Sekretariat Daerah
	8	Persentase Laporan/Rekomendasi/Bahan Rumusan Kebijakan Yang Akan Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan BUMD Non Lembaga Keuangan.	Persen	96,00	96,00	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi, Sekretariat Daerah
	9	Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Persen	49,00	N/A	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia,

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
						Sekretariat Daerah
	10	Persentase Layanan Informasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Website Dan Sosialisasi	Persen	100,00	N/A	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Daerah
	11	Persentase Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Dan Di Harmonisasi	Persen	100,00	N/A	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Daerah
	12	Persentase Bahan Laporan/Rekomendasi/Bahan Rumusan Kebijakan Yang Akan Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan Investasi Daerah	Persen	96,00	96,00	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi, Sekretariat Daerah
	13	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan Sosial Yang Ditindaklanjuti	Persen	91,00	91,90	Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, Sekretariat Daerah
	14	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100,00	N/A	Biro Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Daerah
	15	Persentase Perangkat Daerah Yang Proses Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan	Persen	92,00	N/A	Biro Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Daerah
	16	Persentase Bahan Kebijakan Pembinaan, Pemahaman Dan Pengamalan Keagamaan	Persen	91,00	91,00	Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, Sekretariat Daerah
	17	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Penanggulangan Masalah Pemberdayaan Sosial Yang Ditindaklanjuti	Persen	91,00	91,00	Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, Sekretariat Daerah
	18	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Yang Ditindaklanjuti	Persen	91,00	91,00	Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, Sekretariat Daerah
	19	Persentase Pemberitaan Positif Di Media	Persen	57,00	70,03	Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Sekretariat Daerah
	20	Persentase Hubungan Stakeholder Kehumasan	Persen	100,00	100,00	Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Sekretariat Daerah
	21	Persentase Pemohon Informasi Yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan,

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
						Sekretariat Daerah
	22	Persentase Paket Pekerjaan Yang Selesai Ditenderkan	Persen	92,00	92,00	Biro Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Daerah
	23	Persentase Acara Pimpinan Yang Terdokumentasikan	Persen	100,00	100,00	Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Sekretariat Daerah
	24	Persentase Acara Pimpinan Yang Terpublikasikan	Persen	100,00	100,00	Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Sekretariat Daerah
	25	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Dengan Ketatalaksanaan Baik	Persen	100,00	N/A	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah
	26	Persentase Dokumen Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Yang Disusun Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persen	100,00	N/A	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah
	27	Persentase Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Disusun Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persen	100,00	N/A	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah
	28	Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Yang Diimplementasikan	Persen	75,00	N/A	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah
	29	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Indeks Reformasi Birokrasi Berkategori 'B'	Persen	0,00	N/A	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah
	30	Persentase Tingkat Kepatuhan Unit Pelaksanaan Pelayanan Publik Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persen	27,00	N/A	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah
	31	Persentase Unit Pelayanan Publik Bidang Pertanian Yang Mengikuti Kompetisi Abdibaktitani Tingkat Nasional	Persen	0,00	N/A	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah
	32	Persentase Efektifitas Kebijakan Yang Diimplementasikan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Aspek Sumber Daya Alam	Persen	65,00	91,66	Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah
	33	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	87,00	N/A	Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Sekretariat Daerah

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	34	Persentase Layanan Keprotokolan Kdh, Wkdh, Dan Sekda Yang Dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Sekretariat Daerah
	35	Persentase Rancangan Produk Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Yang Dikaji	Persen	100,00	N/A	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Daerah
	36	Persentase Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Berbasis Kinerja	Persen	75,00	N/A	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah
	37	Persentase Penataan Kelembagaan Berbasis Kinerja	Persen	75,00	N/A	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah
2	**Sekretariat DPRD**					
	1	Tingkat Fasilitasi Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Legislasi Serta Pengawasan	Persen	100,00	65,32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
	2	Tingkat Fasilitasi Hubungan kelembagaan DPRD, penjaringan aspirasi serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran DPRD	Persen	100,00	90,46	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
	3	Persentase Anggota DPRD Yang Terpenuhi Kesejahteraannya	Persen	100,00	100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
3	**Pengawasan**					
	1	Persentase Jumlah PD Yang Mengimplementasikan SPIP	Persen	50,00	50,00	Inspektorat
	2	Persentase Jumlah Perangkat Daerah Menyusun Daftar Risiko (Risk Register)	Persen	90,00	90,00	Inspektorat
	3	Nilai Evaluasi Monitoring Dan Evaluasi RAD-PPK Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Persen	92,00	91,80	Inspektorat
	4	Persentase Perangkat Daerah Yang Dicanangkan Menjadi Zona Integritas (ZI)	Persen	90,00	90,00	Inspektorat
	5	Jumlah PD Zona Integrasi Yang Akan Ditetapkan Menjadi WBK [WBBM]	Perangkat Daerah	3	1	Inspektorat
	6	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kebijakan Peningkatan Kapabilitas APIP	Persen	100,00	100,00	Inspektorat
	7	Persentase Permohonan Konsultasi Yang Mampu Dilayani	Persen	100,00	100,00	Inspektorat

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
	8	Persentase Perangkat Daerah Yang Nilai Sakip-nya Adalah ≥ A	Persen	80,00	89,19	Inspektorat
	9	Persentase Reviu Atas Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	Inspektorat
	10	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Nilai SAKIP-nya Adalah ≥ BB	Pemerintah Daerah	10	N/A	Inspektorat
	11	Persentase Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan	Persen	100,00	0,00	Inspektorat
	12	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang diselesaikan	Persen	75,00	100,00	Inspektorat
	13	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Opini Atas LKPD Adalah WTP	Pemerintah Daerah	26	75	Inspektorat
	14	Penurunan Temuan APIP Terhadap Perangkat Daerah (PD) Provinsi	Persen	5,00	27,00	Inspektorat
	15	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap PD Provinsi yang diselesaikan	Persen	85,00	5,00	Inspektorat
	16	Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Persen	80,00	85,00	Inspektorat
	17	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	Persen	100,00	80,00	Inspektorat
	18	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Nilai EPPD Masuk Kategori Sangat Tinggi (ST)	Persen	89,00	100,00	Inspektorat
4	**Penghubung**					
	1	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100,00	100,00	Badan Penghubung
	2	Persentase Penyelenggaraan Promosi Potensi Pembangunan Jawa Barat	Persen	100,00	100,00	Badan Penghubung
	3	Persentase Koordinasi Jejaring Kerja Dengan Stakeholder	Persen	100,00	100,00	Badan Penghubung
	4	Persentase Fasilitasi Keprotokolan Yang Dilayani	Persen	100,00	100,00	Badan Penghubung

Sumber: Angka Sementara, Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020

Keterangan:

*) Indikator baru digunakan pada periode RPJMD 2018-2023 dan belum pernah digunakan sebelumnya sehingga tidak tersedia data pada tahun tersebut.

**) Data Sementara menggunakan realisasi tahun sebelumnya (2019)

Tabel 8.7
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/*Outcome* Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1	**Pendidikan**						
	1 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	persen	72,56	75,51	78,46	78,46	Dinas Pendidikan
	2 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	persen	45,27	46,43	47,59	47,59	Dinas Pendidikan
	3 Tingkat pengembangan kurikulum muatan lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	persen	80,00	80,00	84,00	84,00	Dinas Pendidikan
	4 Persentase Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sesuai Standar	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	5 Persentase izin Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan masyarakat yang diterbitkan	persen	80,00	80,00	84,00	84,00	Dinas Pendidikan
	6 Persentase dokumen pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah di Provinsi Jawa Barat	persen	80,00	84,00	88,20	88,20	Dinas Pendidikan
2	**Kesehatan**						
	1 Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	89,00	91,00	93,00	93,00	Dinas Kesehatan
	2 Presentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	Persen	85,00	90,00	95,00	95,00	Dinas Kesehatan
	3 Presentase Kabupaten/Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	Persen	80,00	85,00	90,00	90,00	Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	Persen	73,27	80,19	90,00	90,00	Dinas Kesehatan
5	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Persen	63,00	83,00	93,00	93,00	Dinas Kesehatan
6	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
7	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
8	Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	Persen	91,00	96,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
9	Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	Persen	80,00	88,00	96,00	96,00	Dinas Kesehatan
10	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	Persen	80,00	90,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
11	Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
12	Persentasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	Persen	45,00	60,00	80,00	80,00	Dinas Kesehatan
13	Persentasi Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi	Persen	80,00	90,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
14	Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	Persen	90,00	92,00	95,00	95,00	Dinas Kesehatan
15	Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	Persen	90,00	95,00	96,00	96,00	Dinas Kesehatan
16	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat	Persen	91,67	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
17	Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan Dana BOK dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	18	Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS)	hari	N/A	9	9	9	RSUD Al Ihsan, RSUD Pameungpeuk, RS Paru, RS Kesehatan kerja, RS Jampangkulon
	19	Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS)	hari	N/A	21	21	21	RS Jiwa
	20	Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	persen	N/A	90,00	95,00	95,00	Labkes
	21	Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Upaya Peningkatan Kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan yang sudah dapat difungsikan	persen	N/A	75,00	80,00	80,00	Upelkes
	22	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan	Persen	N/A	59,00	69,00	69,00	Dinas Kesehatan
	23	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	Persen	N/A	60,00	70,00	70,00	UPTD RS Jiwa
	24	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan	Persen	N/A	80,00	100,00	100,00	UPTD RS Paru
	25	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	Persen	75	75,00	75,00	75,00	UPTD RSUD Jampang Kulon
	26	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	Persen	75	85,71	100,00	100,00	UPTD RSUD Pameungpeuk
	27	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	Persen	30	30,00	30,00	30,00	UPTD RS Kesehatan Kerja
	28	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	Persen	8,31	4,57	4,99	4,99	UPTD Upelkes
	29	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	Persen	N/A	75,00	80,00	80,00	UPTD Labkes
	30	Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Penyalur Alat	Persen	N/A	88,00	90,00	90,00	Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kesehatan (PAK) dan Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)						
	31	Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	Persen	N/A	92,60	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	32	Persentase Kab/Kota yang membangun kemitraan dan kerjasama dengan RS Paru untuk jejaring ekternal TB melalui kegiatan Layad Paru	Persen	N/A	80,00	100,00	100,00	UPTD RS Paru
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
	1	Tingkat Pembangunan Sarana Ibadah	persen	75,77	100,00	0	100,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	2	Persentase Dokumen Perencanaan Teknis yang Siap Bangun	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	3	Persentase Panjang Jalan yang Dilakukan Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Jalan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	4	Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	km	1.914,76	1.953,98	1.979,18	1979,18	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	5	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial	persen	13,23	19,07	24,90	24,90	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	6	Persentase Sumber Daya Konstruksi yang Terlatih	persen	47,29	78,04	100,00	100,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	7	Tingkat Ketersediaan Rencana Tata Ruang	persen	42,86	71,43	100,00	100,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	8	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	persen	0,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	9	Persentase Berita Acara yang diterbitkan dalam rangka persetujuan substansi Ranperda RTR Kabupaten/Kota	persen	69,57	79,71	89,69	89,69	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	10	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persen	34,46	45,43	60,10	60,10	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	11	Persentase SITU yang Terpelihara	persen	10,71	10,83	10,95	10,95	Dinas Sumber Daya Air
	12	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Sumber Daya Air
	13	Kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi	Persen	69,65	69,71	69,77	69,77	Dinas Sumber Daya Air
	14	Persentase Drainase Utama yang dikelola dan dikembangkan	Persen	36,90	57,00	77,00	77,00	Dinas Sumber Daya Air
	15	Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota	persen	50,00	50,00	50,00	50,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	16	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	persen	70,60	72,60	74,60	74,60	Dinas Perumahan dan Permukiman
	17	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	18	Persentase Luas genangan yang tertangani	persen	36,90	57,00	77,00	77,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	19	Rasio Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persen	77,00	83,50	88,50	88,50	Dinas Perumahan dan Permukiman

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	20	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (% PBL)	persen	64,50	66,00	67,50	67,50	Dinas Perumahan dan Permukiman
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
	1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	2	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	persen	74,00	75,00	76,00	76,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	3	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	persen	42,40	46,02	49,63	49,63	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**							
	1	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	persen	65,00	68,00	71,00	71,00	Satuan Polisi dan Pamong Praja
	2	Persentase Anggota Linmas Desa di Jawa Barat	persen	70,00	73,00	75,00	75,00	Satuan Polisi dan Pamong Praja
	3	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	persen	75,00	95,00	100,00	100,00	Satuan Polisi dan Pamong Praja
	4	Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten	persen	40,00	45,00	50,00	50,00	Satuan Polisi dan Pamong Praja
	5	Persentase Kabupaten Kota yang indeks ketahanan daerahnya meningkat	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	6	Persentase kabuoaten/kota yang terfsilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	7	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pasca bencana	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	8	Persentase Pendampingan Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	9	Persentase Pendampingan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	**Sosial**							
	1	Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial yang Berpartisipasi Dalam Penyelenggaraan Kesos	persen	55,00	60,00	68,00	68,00	Dinas Sosial
	2	Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial yang Ber Dalam Penyelenggaraan Kesos UPTD PPKS	persen	55,00	60,00	68,00	68,00	Dinas Sosial, UPTD PPKS
	3	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi	persen	28,00	30,00	32,00	32,00	Dinas Sosial
	4	Persentase Daerah yang Difasilitasi Untuk Membentuk Puskesos	persen	95,00	98,00	100,00	100,00	Dinas Sosial
	5	Persentase pekerja migran korban tindak kekerasan yang tertangani	persen	0,75	1,20	1,35	1,35	Dinas Sosial
	6	Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosial di dalam panti	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial, UPTD PRSAMPK, PPSBR, PRSABH, PRSPD, PRSBK, PRSTS, PRSLU
	7	Persentase Fakir Miskin yang tertangani	persen	37,50	38,10	38,70	38,70	Dinas Sosial

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	8 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial
	9 Tingkat pengelolaan makam pahlawan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial
	10 Indeks Partisipasi Sosial	Poin	40.00	45.00	50.00	50.00	
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1	**Tenaga Kerja**						
	1 Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 Persentase Pencari Kerja yang Diuji Kompetensi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persen	84,05	86,15	88,30	88,30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	4 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	persen	80,00	85,00	90,00	90,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	5 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan	persen	20,00	20,00	20,00	20,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung Anak**						
	1 Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender	persen	22,22	37,40	51,85	51,85	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Anak, dan Keluarga Berencana
	2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	persen	1,92	1,90	1,88	1,88	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi (KED) yang Mendapat Layanan Pengaduan Oleh UPTD PPA	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana , UPTD PPA
	4	Jumlah Kab Kota yang Sudah Membentuk Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Di Jawa Barat	kab/kota	16,00	21,00	27,00	27,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	5	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang Up To Date Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	persen	66,00	74,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Keluarga Berencana
	6	Peningkatan Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi	persen	25,00	50,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	7	Peningkatan Cakupan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Tingkat Provinsi	persen	25,00	50,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	8	Ratio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak)	rasio	0,27	0,24	0,21	0,21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	9	Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Berencana (UPTD PPA)
3	**Pangan**							
	1	Persentase Cadangan Pangan	persen	50,00	50,00	50,00	50,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2	Persentase Desa Rawan Pangan yang Diintervensi	persen	10,00	10,00	10,00	10,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3	Persentase Peningkatan Sertifikasi PSAT	persen	10,27	11,35	12,67	12,67	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
4	**Pertanahan**							
	1	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Lokasi Lintas Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	2	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Selesai Tepat Waktu	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	3	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Pembangunan Strategis Di Jawa Barat	persen	33.33	50,00	66,67	66,67	Dinas Perumahan dan Permukiman
	4	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	persen	20,00	60,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	**Lingkungan Hidup**							
	1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	persen	50,00	75,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter COD (Mg/L)	persen	94,00	97,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	3	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SOX	persen	93,00	96,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	4	Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK Kabupaten/Kota	persen	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	5	Persentase Peningkatan Kampung Iklim	persen	85,71	92,86	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	6	Persentase Jumlah Parameter yang Terakreditasi di Setiap Bahan/Produk yang Diuji	persen	81,25	90,62	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	7	Persentase Jumlah Sertifikat Kompetensi Teknis yang Diperoleh	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	8	Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	9	Persentase Pelaporan Pengendalian B3 dan LB3	persen	45,23	71,42	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	10	Persentase Peningkatan Dokumen Lingkungan yang Dinilai dan Diawasi Implementasinya	persen	70,00	85,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	11	Persentase Status Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten/Kota	persen	20,00	60,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	12	Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Desa Berbudaya Lingkungan	persen	88,89	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	13	Persentase Peningkatan Kemitraan Lingkungan	persen	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	14	Persentase Peningkatan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Pelaku Usaha dan/Kegiatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	persen	80,91	91,71	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
	15	Persentase Peningkatan Sampah yang Terolah Di TPA/TPST Regional	persen	50,00	50,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
	1	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	persen	81,60	82,42	83,25	83,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	81,60	82,42	83,25	83,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	3	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	persen	82,35	83,57	84,78	84,78	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	4	Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
	1	Persentase fasilitas penataan desa yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2	Persentase fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan Provinsi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3	Persentasi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	4	Persentase fasilitasi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di desa	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
	1	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR	persen	63,27	63,67	64,07	64,07	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	2	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang Telah Dilakukan DINAS P3AKB Provinsi Jawa Barat di Kabupaten/Kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	3	Persentase Pembinaan Ketahanan Keluarga yang Telah Dilakukan DINAS P3AKB Jawa Barat Di Kabupaten Kota	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Keluarga Berencana
9	**Perhubungan**							
	1	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan Lingkup Provinsi	persen	87,69	87,69	87,85	87,85	Dinas Perhubungan
	2	Nilai V/C Ratio di Jalan Provinsi	persen	0.82	0.82	0.82	0.82	Dinas Perhubungan
	3	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah I)	persen	87,69	87,69	87,85	87,85	Dinas Perhubungan
	4	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah II)	persen	87,69	87,69	87,85	87,85	Dinas Perhubungan
	5	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah III)	persen	87,69	87,69	87,85	87,85	Dinas Perhubungan
	6	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah IV	persen	87,69	87,69	87,85	87,85	Dinas Perhubungan
	7	Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi	persen	92,59	96,30	100,00	100,00	Dinas Perhubungan
	8	Jumlah Dokumen Pendukung Pelabuhan Pengumpan Regional yang Disiapkan (UPTD PPP Pelabuhan Laut)	dokumen	10,00	14,00	14,00	14,00	Dinas Perhubungan
	9	Persentase Dermaga yang Terpenuhi Standar (UPTD PPP LL ASDP)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perhubungan
	10	Persentase Kebijakan Penetapaan Jaringan Perkeretaapian yang Kewenangan Provinsi	persen	30,00	60,00	100,00	100,00	Dinas Perhubungan
	11	Jumlah Kebijakan Pengembangan Perhubungan yang Dihasilkan	Dokumen	4,00	3,00	3,00	3,00	Dinas Perhubungan
10	**Komunikasi dan Informatika**							

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	persen	80,00	80,50	90,00	90,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	persen	95,00	98,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	persen	40,00	58,00	60,00	60,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	4	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	persen	40,00	50,00	60,00	60,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**							
	1	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional	persen	0,00	7,00	9,00	9,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	2	Tingkat Kepatuhan Koperasi	persen	3,10	3,70	4,50	4,50	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	3	Persentase Sertifikat Kesehatan KSP/USP Koperasi	persen	0,00	50,00	55,00	55,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	4	Persentase Wirausaha Menjadi Usaha Mikro	persen	48,40	74,10	100,00	100,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	5	Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	persen	33,30	66,60	100,00	100,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	6	Tingkat Koperasi yang Berkualitas	persen	33,00	35,00	37,00	37,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	7	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	persen	6,30	6,60	6,90	6,90	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	8	Persentase Kelembagaan Usaha UMKM	persen	30,00	32,00	35,00	35,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	9	Laju Pertumbuhan Omzet UMKM Binaan	persen	5,50	6,00	6,50	6,50	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
12	**Penanaman Modal**							
	1	Indikator Daya Saing (Peringkat *Ease Of Doing Business*)	Peringkat	2,00	2,00	2,00	2,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi Potensi dan Peluang Investasi	persen	10,00	10,00	10,00	10,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	3	Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	persen	60,00	65,00	70,00	70,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Investasinya	persen	15,00	15,00	15,00	15,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	5	Tingkat pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	persen	80,00	84,00	88,20	88,20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	**Kepemudaan dan Olahhraga**							
	1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	persen	17,30	17,80	18,00	18,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dalam Kondisi Baik	persen	68,00	70,00	72,00	72,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	3	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	persen	2,60	3,00	3,00	3,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	4	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	persen	10,50	11,50	12,00	12,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	5	Persentase Medali Emas yang Diperoleh Dalam Event Nasional POPNAS	persen	20,00	0,00	20,00	20,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	6	Persentase Medali Emas yang Diperoleh Dalam Event Nasional POPWILNAS	persen	0,00	20,00	0,00	20,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	7	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Dalam Kondisi Baik	persen	80,00	85,00	87,00	87,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	8	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	persen	10,00	10,00	10,00	10,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	9	Persentase Medali Emas yang Diperoleh Dalam Event Nasional Peparpenas	persen	9,00	0,00	12,00	12,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	10	Tingkat Partisipasi Masyarakat Jawa barat dalam Kepramukaan	persen	17,00	17,00	17,00	17,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	**Statistik**							
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	**Persandian**							
	1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	persen	89,15	93,02	96,90	96,90	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	**Kebudayaan**							
	1	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan (Usulan WBTB Jabar yang ditetapkan sebagai wbtb nasional, Bahasa, Sastra, dan Aksara daerah yang dilestarikan, dan seni budaya yang dilindungi)	persen	18,47	34,48	30,79	83,74	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola	persen	17,39	26,09	26,09	69,57	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3	Persentase Benda Koleksi Museum Negeri Sri Baduga yang Dilindungi	persen	19,87	23,51	23,18	66,56	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17	**Perpustakaan**							
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Membaca	Poin	53,00	54,00	55,00	55,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	Tingkat Pemanfaatan Bahan Bacaan	Poin	69,00	70,00	71,00	71,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3	Tingkat Kebiasaan Membaca	Poin	64,00	65,00	66,00	66,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	persen	19,00	21,00	23,00	23,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	**Kearsipan**							
	1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	persen	15,00	30,00	45,00	45,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	persen	58,00	65,00	70,00	70,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3	Persentase Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							
1	**Kelautan dan Perikanan**							
	1	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang Dikelola Sesuai Dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	persen	79,51	81,51	83,51	83,51	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2	Jumlah Produksi Garam	ton	258.276,9	271.190,75	284.750,29	284.750,29	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	182.160,00	184.345,92	186.558,07	186.558,07	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	832.240,00	857.207,20	882.923,42	882.923,42	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5	Persentase Tingkat Penanganan Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	persen	85,00	85,00	85,00	85,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	6	Angka Konsumsi Ikan Jawa Barat	Kg/Kap/Th	30,28	30,60	30,93	30,93	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	**Pariwisata**							
	1	Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	persen	19,51	24,39	29,27	73,17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2	Persentase seni budaya dan destinasi wisata yang dipromosikan	persen	14,29	23,81	28,57	66,67	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3	Persentase Sumber Daya Industri Kreatif yang Dikembangkan	persen	22,22	25,93	22,22	70,37	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	**Pertanian**							
	1	Rata-Rata Performa Ternak yang Sesuai Standar	persen	42,00	43,00	44,00	44,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2	Tingkat Pemenuhan Prasarana Peternakan	persen	32,00	78,60	90,00	90,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	persen	4,00	5,00	5,00	5,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	4	Persentase Petugas dan Pelaku Usaha Peternakan yang Meningkat Kinerjanya	persen	25,00	25,00	25,00	25,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	5	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)	Ku/Ha	57,76	58,26	58,76	58,76	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	6	Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ku/Ha)	Ku/Ha	90,19	90,26	90,34	90,34	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	7	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	persen	80,59	81,59	82,21	82,21	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	8	Luas Panen Tanaman Pangan	Ha	1892521,00	1892521,00	1892521,00	1892521,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	9	Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha	194718,00	196981,00	199271	199271	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	10	Indeks Pertamanan (IP)	persen	1,90	1,95	2,00	2,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	11	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI	persen	4,50	4,50	4,50	4,50	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	12	Persentase Penyuluh yang Berprestasi	persen	2,13	2,13	2,13	2,13	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	13	Persentase Kelompok Tani yang di Bina oleh Penyuluh	persen	56,15	72,20	94,17	94,17	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	14	Persentase Sumber Daya Manusia Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilatih	persen	20,41	20,41	20,41	20,41	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	15	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	persen	88,86	88,86	88,86	88,86	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	16	Persentase Rekomendasi Teknis Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diterbitkan	persen	-	100,00	100,00	100,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	17	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Sarana Perkebunan	persen	25,00	25,00	25,00	25,00	Dinas Perkebunan
	18	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana Perkebunan	persen	25,00	25,00	25,00	25,00	Dinas Perkebunan
	19	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Penanganan Bencana Perkebunan	persen	25,00	25,00	25,00	25,00	Dinas Perkebunan
	20	Laju Peningkatan Perkebunan Besar yang Mendapatkan Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan	persen	50,00	50,00	50,00	50,00	Dinas Perkebunan
	21	Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan yang dibina	persen	75,00	75,00	75,00	75,00	Dinas Perkebunan
4	**Kehutanan**							
	1	Tingkat Ketersediaan Dokumen Arahan Pengelolaan Hutan	persen	71,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kehutanan
	2	Persentase Penanganan Lahan Kritis	persen	3,00	4,00	5,00	5,00	Dinas Kehutanan
	3	Tingkat Kerusakan Hutan	persen	0,70	0,60	0,50	0,50	Dinas Kehutanan
	4	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	persen	30,00	30,00	30,00	30,00	Dinas Kehutanan
	5	Persentase Peningkatan Penerimaan Dari Jasa Lingkungan	persen	10,00	10,00	10,00	10,00	Dinas Kehutanan
	6	Persentase Peningkatan Habitat dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Ditangkarkan	persen	5,00	5,00	5,00	5,00	Dinas Kehutanan
	7	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Mengikuti Bimtek/Diklat	orang	75,00	100,00	120,00	120,00	Dinas Kehutanan
	8	Penurunan Nilai Total Suspended Solid (TSS) di Daerah Aliran Sungai	persen	41,55	39,05	36,55	36,55	Dinas Kehutanan
5	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1	Rasio Sumur Imbuhan Terhadap Sumur Produksi	persen	15,98	18,31	20,64	20,64	Dinas Sumber Daya Mineral
	2	Persentase Pengambil Air Tanah yang Taat Peraturan	persen	56,00	58,00	60,00	60,00	Dinas Sumber Daya Mineral
	3	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	persen	56,00	58,00	60,00	60,00	Cabang Dinas Wilayah I Cianjur Dinas Sumber Daya Mineral,
	4	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	persen	56,00	58,00	60,00	60,00	Cabang Dinas Wilayah II Bogor Dinas Sumber Daya Mineral
	5	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	persen	56,00	58,00	60,00	60,00	Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta Dinas Sumber Daya Mineral
	6	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	persen	56,00	58,00	60,00	60,00	Cabang Dinas Wilayah IV Bandung Dinas Sumber Daya Mineral
	7	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	persen	56,00	58,00	60,00	60,00	Cabang Dinas Wilayah V Sumedang Dinas Sumber Daya Mineral
	8	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	persen	56,00	58,00	60,00	60,00	Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Dinas Sumber Daya Mineral
	9	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	persen	56,00	58,00	60,00	60,00	Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon Dinas Sumber Daya Mineral
	10	Persentase Sample Air Tanah yang Diuji Kualitasnya	persen	1,50	2,00	3,00	3,00	Cabang Dinas UPTD Laboratorium Dinas Sumber Daya Mineral
	11	Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Administrasi	persen	58,00	59,00	60,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	12	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	persen	58,00	59,00	60,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah I Cianjur
	13	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	persen	58,00	59,00	60,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah II Bogor
	14	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	persen	58,00	59,00	60,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	15	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	persen	58,00	59,00	60,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah IV Bandung
	16	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	persen	58,00	59,00	60,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah V Sumedang
	17	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	persen	58,00	59,00	60,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya
	18	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	persen	58,00	59,00	60,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon
	19	Persentase Pengujian Kualitas Bahan Tambang Di Jawa Barat	persen	40,00	50,00	60,00	60,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas UPTD Laboratorium
	20	Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Teknis	persen	46,00	47,00	48,00	48,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	21	Jumlah Reduksi CO2 Dari Bidang Energi (Tidak Termasuk Sektor Transportasi)	Ton Co2eq	932,70	1553,95	2175,21	2175,21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	22	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	SBM (Setara Barel Minyak)	0,00	23,81	23,81	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah I Cianjur
	23	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	SBM (Setara Barel Minyak)	0,00	23,81	23,81	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah II Bogor
	24	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	SBM (Setara Barel Minyak)	0,00	23,81	23,81	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta
	25	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	SBM (Setara Barel Minyak)	0,00	23,81	23,81	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah IV Bandung
	26	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	SBM (Setara Barel Minyak)	0,00	23,81	23,81	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah V Sumedang
	27	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	SBM (Setara	0,00	23,81	23,81	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Barel Minyak)					Mineral, Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya
	28	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	SBM (Setara Barel Minyak)	0,00	23,81	23,81	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon
	29	Persentase Komoditas EBT yang Diuji Unjuk Kinerja Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan Bidang Energi	persen	50,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	30	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan	persen	79,08	90,08	98,00	98,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	31	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah I Cianjur	persen	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah I Cianjur
	32	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Cabang Dinas Wilayah II Bogor	persen	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah II Bogor
	33	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta	persen	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	34	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah IV Bandung	persen	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah IV Bandung
	35	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah V Sumedang	persen	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah V Sumedang
	36	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya	persen	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya
	37	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon	persen	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon
	38	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,
	39	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah I Cianjur
	40	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Mineral, Cabang Dinas Wilayah II Bogor
	41	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta
	42	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah IV Bandung
	43	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah V Sumedang
	44	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya
	45	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon
6	**Perdagangan**							

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2	Laju Sarana Distribusi Perdagangan	persen	3,00	5,00	7,00	7,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	persen	5,00	5,00	5,00	5,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	4	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	milyar USD	10,14	10,39	10,84	10,84	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	5	Persentase Konsumen yang dilayani dan Ditangani	persen	73,00	80,00	80,00	80,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	6	Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri	persen	6,74	7,89	9,76	9,76	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	**Perindustrian**							
	1	Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi	Unit Usaha	200	200	250	250	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dipantau dan Dianalisis Dalam Laporan Hasil Pemantauan yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	persen	1,60	1,60	1,60	1,60	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3	Persentase Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kabupaten/Kota Yang Masuk Dalam SII Nas	persen	50,00	50,00	50,00	50,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	**Transmigrasi**						
	1 Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	lokasi	0,00	3,00	3,00	3,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 Persentase Perjanjian Kerjasama Bidang Ketransmigrasian yang Direalisasikan	persen	85,00	90,00	95,00	95,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
1	**Sekretariat Daerah**						
	1 Persentase Perangkat Daerah dengan kinerja yang efektif dan efisien	persen	93,00	94,00	95,00	95,00	Sekretariat Daerah/ Biro Organisasi
	2 Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pemerintahan dan otonom daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah	2,00	1,00	1,00	1,00	Sekretariat Daerah/ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	3 Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	persen	85,00	90,00	90,00	90,00	Sekretariat Daerah/ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 Presentase Bahan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	persen	80,00	85,00	90,00	90,00	Sekretariat Daerah/ Biro Kesra
	5 Peresentase Penyelenggaraan Kebijakan Daerah Dalam Pembentukan Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	persen	80,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah/ Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	6	Persentase keselarasan penyusunan kebijakan dan implementasi kebijakan lingkup perekonomian dan pembangunan	persen	62,00	66,00	76,00	76,00	Sekretariat Daerah/ Biro Perekonomian
	7	Level Maturitas UKPBJ	Level	3,00	3,00	4,00	4,00	Sekretariat Daerah/ Biro Pengadaan Barang/Jasa
	8	Kualifikasi dan kompetensi SDM UKPBJ	persen	70,00	80,00	90,00	90,00	Sekretariat Daerah/ Biro Pengadaan Barang/Jasa
2	**Sekretariat DPRD**							
	1	Tingkat Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	2	Tingkat Fasilitasi Kapasitas, Hubungan Kelembagaan DPRD serta Penjaringan Aspirasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							
1	**Perencanaan**							
	1	Rata-Rata Tingkat Kesesuaian Perencanaan Antar Waktu dan Level Pemerintahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Pembangunan Daerah
	3	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	4	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	**Keuangan**							
	1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD Perubahan Provinsi Jawa Barat	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	3	Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi yang tepat waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	4	Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD dan APBD Perubahan yang dievaluasi tepat waktu	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	Persentase Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota yang dievaluasi tepat waktu	persen	80,00	80,00	80,00	80,00	Badan Pengelolaan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Keuangan dan Aset Daerah
	6	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	persen	6,00	6,00	6,00	6,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	7	Tingkat Kepatuhan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah	persen	80,00	90,00	100,00	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	8	Persentase pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	persen	0,26	0,32	0,36	0,36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	9	Persentase Akurasi Pelaporan Barang Milik Daerah	persen	70,00	75,00	80,00	80,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	10	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	persen	90,00	92,70	95,48	95,48	Badan Pendapatan Daerah
3	**Kepegawaian**							
	1	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan ; Pengadaan; Perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi kepegawaian	poin	113,00	113,00	120,00	120,00	Badan Kepegawaian Daerah
	2	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	poin	40,00	40,00	40,00	40,00	Badan Kepegawaian Daerah

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3	Nilai Kriteria Pengembangan Karir	poin	102,50	107,5	110,00	110,00	Badan Kepegawaian Daerah
	4	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja, dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	poin	120,00	120,00	120,00	120,00	Badan Kepegawaian Daerah
4	**Pendidikan dan Pelatihan**							
	1	Persentase Jabatan Struktural Bersertifikat Kompetensi dan Ber-STTPL	persen	75,00	80,00	85,00	90,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2	Persentase Pelaksana Bersertifikat Kompetensi dan Ber-STTPL	persen	75,00	80,00	85,00	90,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	3	Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan atau STTPL Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum	persen	75,00	80,00	85,00	90,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	4	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis Dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan Dan Prajabatan,Serta jabatan Fungsional	persen	6,00	6,00	6,00	18,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Dan Sumber Belajar	persen	3,00	3,00	3,00	9,00	Badan Pengembangan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Sumber Daya Manusia
	6	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan program dan kegiatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	7	Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	8	Persentase Ketersediaan dokumen Akuntansi dan Pelaporan keuangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	9	Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	10	Persentase Ketersediaan dokumen untuk diverifikasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	11	Persentase Ketersediaan dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	12	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	13	Persentasi Pemeliharaan Kendaraan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	14	Persentase Tersedianya Akomodasi Rapat Internal Dan Luar Kantor	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	15	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	16	Persentase Ketersediaan Barang Habis Pakai Kantor	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	17	Persentase Terpenuhinya Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	18	Persentase Terpenuhinya Langganan Kantor	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	19	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	20	Persentase Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Sumber Daya Manusia
	21	Persentase Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	22	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Diklat, Kursus Singkat Dan Bimtek Aparatur	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	23	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olah Raga Serta Pakaian Aparatur, Sarana Dan Prasarana Olah Raga	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**Penelitian dan Pengembangan**							
	1	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Dihasilkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang Dihasilkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	3	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang Dihasilkan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	4	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan yang Dihasilkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perhubungan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5 Persentase kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi, Tehnologi dan Hasil Kelitbangan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	**Penghubung**						
	1 Tingkat layanan Hubungan Antar Lembaga, Protokol dan Promosi Informasi yang Difasilitasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penghubung
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						
1	**Inspektorat Daerah**						
	1 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap Perangkat Daerah Provinsi yang Diselesaikan	persen	90,00	95,00	100,00	100,00	Inspektorat
	2 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang Diselesaikan	persen	80,00	80,00	90,00	90,00	Inspektorat
	3 Persentase Hasil Reviu Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Ditindaklanjuti	persen	90,00	95,00	100,00	100,00	Inspektorat
	4 Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	persen	75,00	90,00	100,00	100,00	Inspektorat
	5 Persentase kegiatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD- PPK) yang Mencapai Target	persen	96,00	98,00	100,00	100,00	Inspektorat
	6 Persentase Pemenuhan Infrasturuktur Kebijakan Peningkatan Kapabilitas APIP	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat
	7 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	persen	80,00	80,00	90,00	90,00	Inspektorat
VII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2022	2023		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**							
	1	Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	persen	0,0079	0,0094	0,011	0,011	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2	Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri	persen	0,0054	0,0064	0,0077	0,0077	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	3	Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persen	0,0032	0,0038	0,0046	0,0046	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	4	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persen	0,0047	0,0056	0,0068	0,0068	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	5	Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	persen	0,004	0,0048	0,0058	0,0058	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

8.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota

Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten dan kota di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat mendukung pencapaian 5 (lima) indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari:

1. Indeks Pembangunan Manusia beserta indikator komponen pembentuknya meliputi:
   a. Rata-Rata Lama Sekolah;
   b. Angka Harapan Lama Sekolah;
   c. Angka Harapan Hidup; dan
   d. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan.
2. Persentase Penduduk Miskin;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka; dan
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Target dukungan terhadap 5 (lima) indikator makro dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 8.8
Penetapan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Poin)							
		KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET				KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	69,13	69,69	70,65	70,40	70,89	70,89	70,72	70,72
2	Kabupaten Sukabumi	65,49	66,05	66,87	67,20	67,73	68,25	68,78	68,78
3	Kabupaten Cianjur	63,70	64,62	65,38	64,72	65,01	65,48	65,98	65,98
4	Kabupaten Bandung	71,02	71,75	72,41	72,26	72,80	73,48	74,17	74,17
5	Kabupaten Garut	64,52	65,42	66,22	66,07	66,69	67,37	68,98	68,98
6	Kabupaten Tasikmalaya	64,14	65,00	65,64	65,19	65,44	65,90	66,37	66,37
7	Kabupaten Ciamis	68,87	69,63	70,39	70,38	70,62	71,09	72,13	72,13
8	Kabupaten Kuningan	67,78	68,55	69,12	68,39	69,26	69,45	69,66	69,66
9	Kabupaten Cirebon	67,39	68,05	68,69	68,00	68,86	68,97	69,08	69,08
10	Kabupaten Majalengka	65,92	66,72	67,52	67,34	67,85	68,33	68,85	68,85
11	Kabupaten Sumedang	70,07	70,99	71,46	70,71	71,49	72,35	73,28	73,28
12	Kabupaten Indramayu	65,58	66,36	66,97	66,50	66,75	66,95	67,22	67,22
13	Kabupaten Subang	67,73	68,30	68,69	68,35	68,56	68,95	69,35	69,35
14	Kabupaten Purwakarta	69,28	69,98	70,67	69,28	69,56	69,92	70,35	70,35
15	Kabupaten Karawang	69,17	69,89	70,86	70,10	70,60	71,17	71,96	71,96
16	Kabupaten Bekasi	72,63	73,49	73,99	73,94	74,34	74,87	75,40	75,40
17	Kabupaten Bandung Barat	66,63	67,46	68,27	67,93	68,51	69,13	69,76	69,76
18	Kabupaten Pangandaran	66,60	67,44	68,21	67,90	68,00	68,25	68,50	68,50
19	Kota Bogor	75,16	75,66	76,23	76,11	76,67	77,22	77,78	77,78
20	Kota Sukabumi	73,03	73,55	74,31	74,20	74,45	74,60	74,75	74,75
21	Kota Bandung	80,31	81,06	81,62	81,81	82,27	82,78	83,03	83,03
22	Kota Cirebon	74,00	74,35	74,92	75,14	75,44	75,73	75,93	75,93

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Poin)							
		KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET				KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
23	Kota Bekasi	80,30	81,04	81,59	81,59	82,31	82,67	83,04	83,04
24	Kota Depok	79,83	80,29	80,82	81,21	81,54	82,64	83,15	83,15
25	Kota Cimahi	76,95	77,56	78,11	77,66	77,66	78,08	78,41	74,41
26	Kota Tasikmalaya	71,51	72,03	72,84	72,05	72,51	73,01	73,53	73,53
27	Kota Banjar	70,79	71,25	71,75	71,56	71,80	72,22	72,65	72,65

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Tabel 8.9
Penetapan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten dan Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2023

NO	KABUPATEN/KOTA	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (Tahun)							
		KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET				KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	7,84	7,88	8,29	8,30	8,39	8,50	8,61	8,61
2	Kabupaten Sukabumi	6,79	6,80	7,02	7,08	7,19	7,30	7,41	7,41
3	Kabupaten Cianjur	6,92	6,93	6,97	6,99	7,07	7,17	7,24	7,24
4	Kabupaten Bandung	8,51	8,58	8,79	8,67	8,80	8,84	8,97	8,97
5	Kabupaten Garut	7,28	7,50	7,51	7,54	7,63	7,98	8,33	8,33
6	Kabupaten Tasikmalaya	7,12	7,13	7,17	7,21	7,28	7,39	7,47	7,47
7	Kabupaten Ciamis	7,59	7,60	7,69	7,70	7,72	7,74	7,76	7,76
8	Kabupaten Kuningan	7,35	7,36	7,38	7,41	7,46	7,52	7,60	7,60
9	Kabupaten Cirebon	6,61	6,62	6,71	6,78	6,88	7,01	7,13	7,13
10	Kabupaten Majalengka	6,90	6,91	7,09	7,11	7,19	7,27	7,39	7,39
11	Kabupaten Sumedang	7,98	8,17	8,27	8,30	8,50	8,80	9,00	9,00
12	Kabupaten Indramayu	5,97	5,98	5,99	6,00	6,10	6,20	6,30	6,30
13	Kabupaten Subang	6,83	6,84	6,85	7,00	7,12	7,25	7,37	7,37
14	Kabupaten Purwakarta	7,74	7,75	7,92	7,97	7,97	8,04	8,12	8,12
15	Kabupaten Karawang	7,34	7,35	7,65	8,59	8,89	7,87	8,01	8,01
16	Kabupaten Bekasi	8,82	8,84	8,84	9,02	9,13	9,24	9,35	9,35
17	Kabupaten Bandung Barat	7,74	7,97	8,18	8,02	8,14	8,26	8,38	8,38
18	Kabupaten Pangandaran	7,37	7,58	7,67	7,76	7,81	7,89	7,95	7,95
19	Kota Bogor	10,29	10,30	10,32	10,30	10,34	10,40	10,45	10,45
20	Kota Sukabumi	9,52	9,53	9,58	9,58	9,78	9,82	10,10	10,10
21	Kota Bandung	10,59	10,63	10,74	10,82	10,89	11,02	11,12	11,12
22	Kota Cirebon	9,88	9,89	9,90	10,22	10,35	10,48	10,61	10,61

NO	KABUPATEN/KOTA	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (Tahun)							
		KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET				KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
23	Kota Bekasi	10,93	11,09	11,10	11,11	11,12	11,13	11,14	11,14
24	Kota Depok	10,84	10,85	11,00	11,16	11,26	11,62	11,75	11,75
25	Kota Cimahi	10,93	10,94	10,95	10,95	10,96	10,97	10,98	10,98
26	Kota Tasikmalaya	9,03	9,04	9,13	9,35	9,55	9,70	9,90	9,90
27	Kota Banjar	8,59	8,60	8,62	8,63	8,67	8,78	8,88	8,88

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Tabel 8.10
Penetapan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten dan Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (Tahun)							
		KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET				KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	12,43	12,44	12,47	12,48	12,53	12,55	12,58	12,58
2	Kabupaten Sukabumi	12,19	12,20	12,22	12,33	12,38	12,44	12,49	12,49
3	Kabupaten Cianjur	11,89	11,90	11,98	11,99	12,11	12,16	12,22	12,22
4	Kabupaten Bandung	12,43	12,64	12,68	13,09	13,06	13,16	13,48	13,48
5	Kabupaten Garut	11,73	11,80	11,82	11,86	11,99	12,05	12,11	12,11
6	Kabupaten Tasikmalaya	12,47	12,48	12,52	12,44	12,53	12,63	12,72	12,72
7	Kabupaten Ciamis	13,66	13,67	13,79	13,96	14,12	14,48	14,69	14,69
8	Kabupaten Kuningan	12,06	12,07	12,10	12,10	12,14	12,19	12,23	12,23
9	Kabupaten Cirebon	12,21	12,22	12,24	12,25	12,27	12,29	12,32	12,32
10	Kabupaten Majalengka	12,18	12,19	12,21	12,66	12,81	12,97	13,17	13,17
11	Kabupaten Sumedang	12,93	12,94	12,96	12,84	12,91	12,99	13,05	13,05
12	Kabupaten Indramayu	12,21	12,22	12,24	12,42	12,50	12,70	12,80	12,80
13	Kabupaten Subang	11,67	11,68	11,69	11,72	11,76	11,78	11,80	11,80
14	Kabupaten Purwakarta	11,89	12,09	12,10	12,36	12,46	12,58	12,73	12,73
15	Kabupaten Karawang	11,96	12,07	12,08	12,09	12,10	12,16	12,22	12,22
16	Kabupaten Bekasi	12,63	13,05	13,08	13,34	13,59	13,84	14,10	14,10
17	Kabupaten Bandung Barat	11,79	11,83	11,86	12,11	12,27	12,44	12,62	12,62
18	Kabupaten Pangandaran	12,03	12,04	12,06	12,10	12,12	12,14	12,16	12,16
19	Kota Bogor	13,37	13,38	13,40	13,41	13,81	14,00	14,20	14,20
20	Kota Sukabumi	13,39	13,40	13,46	13,46	13,59	13,72	13,85	13,85
21	Kota Bandung	13,90	14,18	14,19	14,20	14,21	14,22	14,23	14,23

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (Tahun)							
		KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET				KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
22	Kota Cirebon	13,08	13,09	13,11	13,57	13,71	13,85	13,99	13,99
23	Kota Bekasi	13,51	13,76	13,99	14,19	14,29	14,59	14,79	14,79
24	Kota Depok	13,87	13,90	13,91	14,50	14,71	15,33	15,59	15,59
25	Kota Cimahi	13,76	13,77	13,79	13,78	13,79	13,80	13,83	13,83
26	Kota Tasikmalaya	13,41	13,42	13,44	13,47	13,51	13,54	13,58	13,58
27	Kota Banjar	13,19	13,20	13,22	13,23	13,24	13,25	13,26	13,26

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Tabel 8.11
Penetapan Angka Harapan Hidup Kabupaten dan Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGKA HARAPAN HIDUP (Tahun)							
		KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET				KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	70,70	70,86	71,01	71,17	71,22	71,25	71,27	71,27
2	Kabupaten Sukabumi	70,26	70,49	70,73	70,85	71,02	71,19	71,36	71,36
3	Kabupaten Cianjur	69,49	69,70	69,91	70,91	71,11	71,31	71,53	71,53
4	Kabupaten Bandung	73,13	73,26	73,40	73,34	73,43	73,89	73,98	73,98
5	Kabupaten Garut	70,84	71,03	71,22	71,45	71,69	71,82	71,96	71,96
6	Kabupaten Tasikmalaya	68,71	68,96	69,21	69,22	69,39	69,56	69,73	69,73
7	Kabupaten Ciamis	71,07	71,32	71,57	71,83	71,87	71,99	72,13	72,13
8	Kabupaten Kuningan	72,88	73,11	73,35	73,28	73,37	73,45	73,53	73,53
9	Kabupaten Cirebon	71,49	71,66	71,82	72,00	72,11	72,24	72,36	72,36
10	Kabupaten Majalengka	69,39	69,68	69,97	70,08	70,22	70,40	70,60	70,60
11	Kabupaten Sumedang	72,00	72,14	72,29	72,00	72,51	72,65	73,20	73,20
12	Kabupaten Indramayu	70,86	71,11	71,37	71,70	72,00	72,30	72,70	72,70
13	Kabupaten Subang	71,71	71,92	72,13	72,37	72,52	72,68	72,85	72,85
14	Kabupaten Purwakarta	70,42	70,61	70,80	70,58	70,63	70,68	70,75	70,75
15	Kabupaten Karawang	71,64	71,81	71,98	71,65	71,68	73,15	73,30	73,30
16	Kabupaten Bekasi	73,30	73,43	73,56	73,60	73,93	74,26	74,59	74,59
17	Kabupaten Bandung Barat	71,87	72,03	72,18	72,01	72,04	72,08	72,13	72,13
18	Kabupaten Pangandaran	70,56	70,84	71,12	71,40	72,50	72,78	73,07	73,07
19	Kota Bogor	73,01	73,21	73,41	73,61	73,87	74,14	74,42	74,42
20	Kota Sukabumi	71,95	72,11	72,26	72,10	72,25	72,40	72,55	72,55
21	Kota Bandung	73,86	74,00	74,14	74,15	74,18	74,25	74,32	74,32

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGKA HARAPAN HIDUP (Tahun)							
		KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET				KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
22	Kota Cirebon	71,86	71,99	72,13	72,25	72,38	72,51	72,64	72,64
23	Kota Bekasi	74,63	74,76	74,89	74,93	74,96	74,99	75,02	75,02
24	Kota Depok	74,04	74,17	74,31	74,36	74,40	74,60	74,81	74,81
25	Kota Cimahi	73,61	73,75	73,89	73,89	73,91	73,95	74,20	74,20
26	Kota Tasikmalaya	71,48	71,70	71,93	72,35	72,75	73,15	73,55	73,55
27	Kota Banjar	70,39	70,59	70,79	70,82	70,86	71,00	71,13	71,13

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Tabel 8.12
Penetapan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten dan Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN (Ribu Rupiah)							
		KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET				KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	9.901	10.323	10.683	10.603	10.522	10.731	10.945	10.945
2	Kabupaten Sukabumi	8.263	8.618	8.973	7.210	8.269	8.557	8.843	8.843
3	Kabupaten Cianjur	7.300	7.874	8.290	7.706	7.837	8.110	8.421	8.421
4	Kabupaten Bandung	9.854	10.203	10.502	10.150	10.550	10.800	10.980	10.980
5	Kabupaten Garut	7.270	7.597	8.099	7.876	8.090	8.540	8.990	8.990
6	Kabupaten Tasikmalaya	7.250	7.761	8.092	7.592	7.710	7.830	7.951	7.951
7	Kabupaten Ciamis	8.658	9.190	9.557	9.272	9.303	9.334	9.365	9.365
8	Kabupaten Kuningan	8.736	9.297	9.673	8.967	9.042	9.116	9.190	9.190
9	Kabupaten Cirebon	9.650	10.212	10.670	10.168	10.346	10.436	10.484	10.484
10	Kabupaten Majalengka	8.833	9.416	9.822	9.120	9.280	9.410	9.475	9.475
11	Kabupaten Sumedang	9.569	10.153	10.406	9.880	10.200	10.450	10.800	10.800
12	Kabupaten Indramayu	9.014	9.633	10.090	9.302	9.400	9.499	9.599	9.599
13	Kabupaten Subang	10.206	10.715	11.012	10.830	10.995	11.205	11.418	11.418
14	Kabupaten Purwakarta	10.941	11.372	11.819	12.200	12.700	13.000	13.150	13.150
15	Kabupaten Karawang	10.703	11.277	11.856	11.478	11.749	12.026	12.309	12.309
16	Kabupaten Bekasi	10.790	11.155	11.610	10.494	10.648	10.998	11.091	11.091
17	Kabupaten Bandung Barat	8.002	8.329	8.684	8.424	8.627	8.850	9.086	9.086
18	Kabupaten Pangandaran	8.588	8.968	9.423	8.744	9.006	9.277	9.555	9.555
19	Kota Bogor	10.940	11.348	11.825	11.293	11.413	11.534	11.657	11.657

NO	KABUPATEN/KOTA	PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN (Ribu Rupiah)							
		KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET				KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
20	Kota Sukabumi	10.188	10.609	11.204	10.648	10.806	10.966	11.129	11.129
21	Kota Bandung	16.033	16.630	17.254	16.584	16.987	17.013	17.227	17.227
22	Kota Cirebon	11.100	11.397	11.930	11.806	12.014	12.307	12.626	12.626
23	Kota Bekasi	15.378	15.755	16.157	14.139	14.563	15.000	15.450	15.450
24	Kota Depok	14.727	15.262	15.696	15.193	15.197	15.240	15.366	15.366
25	Kota Cimahi	11.353	11.921	12.448	11.935	12.136	12.340	12.548	12.548
26	Kota Tasikmalaya	9.497	9.855	10.414	7.630	8.570	9.860	11.150	11.150
27	Kota Banjar	9.987	10.329	10.705	10.474	10.636	10.862	11.109	11.109

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Tabel 8.13
Penetapan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (Persen)							
		KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET				KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	8,57	7,14	6,66	7,69	7,54	7,38	7,14	7,14
2	Kabupaten Sukabumi	8,04	6,76	6,22	7,38	7,13	6,88	6,63	6,63
3	Kabupaten Cianjur	11,41	9,81	9,15	10,36	10,33	10,05	9,76	9,76
4	Kabupaten Bandung	7,36	6,65	5,94	6,40	6,30	6,23	6,06	6,06
5	Kabupaten Garut	11,27	9,27	8,98	9,48	8,98	8,41	7,66	7,66
6	Kabupaten Tasikmalaya	10,84	9,85	9,12	10,39	10,23	10,03	9,81	9,81
7	Kabupaten Ciamis	8,20	7,22	6,65	7,64	7,53	7,38	7,01	7,01
8	Kabupaten Kuningan	13,27	12,22	11,41	13,58	13,38	13,06	12,74	12,74
9	Kabupaten Cirebon	12,97	10,70	9,94	11,59	10,73	9,88	9,14	9,14
10	Kabupaten Majalengka	12,60	10,79	10,06	11,89	11,20	10,80	10,37	10,37
11	Kabupaten Sumedang	10,53	9,76	9,05	10,26	9,71	9,54	7,56	7,56
12	Kabupaten Indramayu	13,67	11,89	11,11	12,72	12,20	11,95	11,50	11,50
13	Kabupaten Subang	10,77	8,67	8,12	9,93	9,86	9,75	9,61	9,61
14	Kabupaten Purwakarta	9,06	7,99	7,48	7,91	7,77	7,63	7,48	7,48
15	Kabupaten Karawang	10,25	8,06	7,39	10,00	9,00	8,72	8,57	8,57
16	Kabupaten Bekasi	4,73	4,37	4,01	4,37	4,16	4,00	3,91	3,91
17	Kabupaten Bandung Barat	11,49	10,06	9,38	10,86	10,60	10,33	10,08	10,08
18	Kabupaten Pangandaran	10,00	8,12	7,71	9,06	8,54	8,12	7,72	7,72
19	Kota Bogor	7,11	5,93	5,77	6,68	6,24	6,12	6,01	6,01
20	Kota Sukabumi	8,48	7,12	6,67	7,90	7,80	7,70	7,50	7,50
21	Kota Bandung	4,17	3,57	3,38	3,66	3,49	3,32	3,14	3,14

NO	KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (Persen)							
		KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET				KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
22	Kota Cirebon	9,66	8,88	8,41	9,15	8,80	8,55	8,35	8,35
23	Kota Bekasi	4,79	4,11	3,81	8,58	5,70	4,72	4,01	4,01
24	Kota Depok	2,34	2,14	2,07	4,66	4,61	4,55	4,46	4,46
25	Kota Cimahi	5,76	4,94	4,39	5,21	5,07	5,02	4,95	4,95
26	Kota Tasikmalaya	14,8	12,71	11,6	13,64	12,64	11,66	10,67	10,67
27	Kota Banjar	7,06	5,70	5,50	6,362	6,27	6,16	6,04	6,04

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Tabel 8.14
Penetapan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (Persen)							
		KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET				KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	9,55	9,75	9,06	13,95	12,90	12,28	11,05	11,05
2	Kabupaten Sukabumi	7,66	7,77	7,99	9,00	7,60	7,40	7,20	7,20
3	Kabupaten Cianjur	10,10	10,16	9,72	11,05	10,45	9,81	9,69	9,69
4	Kabupaten Bandung	3,92	5,00	5,48	8,56	7,60	6,70	5,50	5,50
5	Kabupaten Garut	7,86	7,07	7,28	10,48	9,46	8,41	7,51	7,51
6	Kabupaten Tasikmalaya	6,61	6,83	6,25	6,59	6,25	6,19	6,25	6,25
7	Kabupaten Ciamis	5,17	4,60	5,10	5,67	5,24	4,72	4,81	4,81
8	Kabupaten Kuningan	7,94	8,99	9,61	15,25	13,80	11,01	10,14	10,14
9	Kabupaten Cirebon	9,61	10,56	10,28	12,25	11,10	9,86	8,39	8,39
10	Kabupaten Majalengka	5,02	4,95	4,37	5,90	5,50	5,13	4,88	4,88
11	Kabupaten Sumedang	7,15	7,52	7,63	9,89	9,05	7,99	6,95	6,95
12	Kabupaten Indramayu	8,64	8,36	8,28	9,21	9,00	8,90	8,80	8,80
13	Kabupaten Subang	8,74	8,65	8,59	9,25	8,85	8,88	8,84	8,84
14	Kabupaten Purwakarta	9,11	9,89	9,65	10,69	10,27	10,08	9,91	9,91
15	Kabupaten Karawang	9,55	9,05	9,61	8,00	7,50	9,45	9,70	9,70
16	Kabupaten Bekasi	10,97	9,69	8,94	9,37	8,69	8,37	8,05	8,05
17	Kabupaten Bandung Barat	9,33	8,50	8,17	8,95	8,85	8,77	8,70	8,70
18	Kabupaten Pangandaran	3,34	3,58	4,48	5,15	5,04	4,93	4,84	4,84
19	Kota Bogor	9,57	9,65	9,10	12,68	12,61	11,65	11,33	11,33
20	Kota Sukabumi	8,00	8,48	8,44	10,25	9,81	9,70	9,59	9,59
21	Kota Bandung	8,44	8,01	8,16	11,20	11,16	11,14	11,10	11,10
22	Kota Cirebon	9,29	9,06	8,98	9,80	9,43	9,00	8,50	8,50
23	Kota Bekasi	9,32	9,07	8,23	8,77	8,60	8,40	8,30	8,30

NO	KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (Persen)							
		KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET				KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
24	Kota Depok	7,00	6,64	6,11	8,98	8,22	7,88	7,69	7,69
25	Kota Cimahi	8,43	7,93	8,08	13,30	12,64	11,37	10,30	10,30
26	Kota Tasikmalaya	6,89	6,85	6,75	8,50	7,72	7,02	6,32	6,32
27	Kota Banjar	5,97	5,89	6,10	6,18	5,85	5,87	5,85	5,85

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Tabel 8.15
Penetapan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (Persen)							
		KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET				KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	5,96	6,19	5,85	-2,26	4,31	4,69	5,01	5,01
2	Kabupaten Sukabumi	5,14	5,79	5,75	-1,22	3,89	5,23	5,54	5,54
3	Kabupaten Cianjur	5,72	6,23	5,47	0,30	3,60	5,00	5,33	5,33
4	Kabupaten Bandung	6,17	6,26	6,09	-1,10	5,00	5,25	5,59	5,59
5	Kabupaten Garut	4,89	4,96	5,02	-0,17	3,39	4,31	4,59	4,59
6	Kabupaten Tasikmalaya	5,95	5,70	5,43	-2,77	3,33	4,50	4,93	4,93
7	Kabupaten Ciamis	5,21	5,44	5,38	1,65	3,41	4,73	5,04	5,04
8	Kabupaten Kuningan	6,36	6,43	6,56	-2,42	1,75	1,90	2,00	2,00
9	Kabupaten Cirebon	5,05	5,02	4,86	-2,10	4,38	4,61	4,84	4,84
10	Kabupaten Majalengka	6,81	6,46	7,71	0,25	3,10	4,50	5,17	5,17
11	Kabupaten Sumedang	6,23	5,83	6,32	-2,00	3,80	5,40	6,20	6,20
12	Kabupaten Indramayu	1,45	1,34	3,20	1,00	1,00	1,46	1,56	1,56
13	Kabupaten Subang	5,10	4,38	4,27	-2,51	3,02	4,19	4,47	4,47
14	Kabupaten Purwakarta	5,12	4,98	4,38	2,42	3,18	3,66	4,16	4,16
15	Kabupaten Karawang	5,76	6,07	4,06	3,00	3,00	4,43	4,71	4,71
16	Kabupaten Bekasi	5,78	6,02	4,18	2,16	3,08	4,25	4,55	4,55
17	Kabupaten Bandung Barat	5,69	5,50	5,05	-2,71	3,25	4,51	4,81	4,81
18	Kabupaten Pangandaran	5,10	5,41	5,96	-2,74	3,30	4,58	4,87	4,87
19	Kota Bogor	6,12	6,14	6,04	-2,32	3,57	5,37	5,53	5,53
20	Kota Sukabumi	5,43	5,51	5,49	-1,50	4,45	5,23	5,54	5,54
21	Kota Bandung	7,21	7,01	6,79	-3,75	4,51	5,20	5,50	5,50
22	Kota Cirebon	5,79	6,21	6,29	-3,10	3,72	5,17	5,50	5,50

NO	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (Persen)							
		KONDISI AWAL		REALISASI	TARGET				KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
23	Kota Bekasi	5,79	6,21	5,41	-0,80	3,17	4,25	5,32	5,32
24	Kota Depok	6,65	6,97	6,74	-0,81	3,53	4,89	5,21	5,21
25	Kota Cimahi	5,43	6,46	6,84	-3,07	3,69	5,11	5,45	5,45
26	Kota Tasikmalaya	6,07	5,93	5,97	2,50	4,50	5,00	5,50	5,50
27	Kota Banjar	5,12	5,04	5,02	-3,07	3,69	5,11	5,45	5,45

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

BAB IX
PENUTUP

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kaidah pelaksanaannya yang harus dilaksanakan secara konsisten. Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 disajikan sebagaimana di bawah ini.

9.1 Pedoman Transisi

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2023. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Perubahan RPJMD ini, alasan utama yang melatarbelakangi perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu terbitnya RPJMN Tahun 2020-2024, penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan pandemi COVID-19. Dampak dari ketiga hal tersebut yaitu perlu segera dilakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

9.1.1 Masa Transisi Tahun 2020

Pada tahun 2020, dilakukan penyusunan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020. Di dalam 2 (dua) dokumen tersebut telah memuat penyesuaian target indikator makro pembangunan dan target indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, IKK tingkat dampak, dan IKK tingkat *outcome* tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai respon dari terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap target dan pelaksanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka akan terjadi perbedaan antara dokumen RKPD Tahun 2021 dengan dokumen APBD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2021. Pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 hanya memuat program dan kegiatan sedangkan pada dokumen APBD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2021 sudah memuat klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

9.1.2 Masa Transisi Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)

Dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan, maka Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ini memuat 5 (lima) tahun periode RPJMD, yaitu realisasi pembangunan tahun 2019 dan 2020; rencana tahun 2021 yang sesuai dengan perubahan target pembangunan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020; dan rencana tahun 2022 dan 2023 yang targetnya disesuaikan dengan target tahun 2021.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampai akhir periode RPJMD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2023. Sebagaimana diketahui, tahun 2023 adalah tahun terakhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan

menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Penyusunan RKPD Tahun 2024 akan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, Rancangan RKP Tahun 2024, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Salah satu agenda penyusunan RKPD Tahun 2024 yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional tahun 2024, dan hal-hal penting lainnya.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Jawa Barat akibat pandemi COVID-19 menunjukkan terjadinya dampak yang meluas dan mendalam tidak hanya terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, namun juga telah merambat ke seluruh sendi kehidupan lainnya. Untuk itu, telah ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak Maret tahun 2020 ini. Amanat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terbit setelah penetapan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, telah diterapkan dan diselaraskan ke dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ini.

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memuat perencanaan selama 5 (lima) tahun meliputi realisasi tahun 2019 dan 2020, rencana tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam mewujudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021, serta penyusunan RKPD (dan Perubahan RKPD) Tahun 2022 dan RKPD (dan Perubahan RKPD) Tahun 2023.

2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
3. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dilakukan dalam rangka menanggapi dampak pandemi COVID-19, serta kajian permasalahan dan isu strategis di Provinsi Jawa Barat, maka disusun 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023, yaitu : 1) Reformasi sistem kesehatan daerah; 2) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi; 3) Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan; 4) Reformasi sistem perlindungan sosial; 5) Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan; 6) Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana; 7) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah; 8) Gerakan membangun desa; 9) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara; 10) Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 11) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

   Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat periode perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, dua tahun ke depan akan lebih berkonsentrasi pada penguatan perekonomian terutama peningkatan daya beli masyarakat di kalangan menengah dan atas, pemulihan kepercayaan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perizinan di daerah, dan *government spending* pada proyek-proyek padat karya, peningkatan ekspor, serta transformasi digital pemasaran produk UMKM.

   Adapun untuk membantu masyarakat yang terdampak secara langsung akibat pandemi COVID-19, masih diperlukan program jaring pengaman sosial berupa bantuan sembako, subsidi listrik, subsidi internet, transfer uang tunai atau bentuk bantuan lainnya yang disediakan pemerintah.
4. Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.

5. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 kepada masyarakat.
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkewajiban menyempurnakan Perubahan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkewajiban melaksanakan program-program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
8. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah secara periodik.
9. Gubernur dalam hal ini dilakukan oleh Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan RPJMD dan RKPD secara periodik.
10. Pada tahun 2021, evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2021 untuk triwulan 1, 2, dan 3 dilakukan dengan berpedoman kepada dokumen Perda APBD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan hasil pemetaan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sedangkan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2021 untuk triwulan 4 dilakukan berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah pada Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Hal tersebut di atas dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan

pelaksanaannya yang akan diterbitkan oleh pemerintah setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan RPJMD ini.

11. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2018–2023 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar menyukseskan, dan mengawal terwujudnya **Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**.

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL